



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan dengan baik, mencapai sasaran, serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi setelah RKP ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD disusun dengan mengacu pada RKP Tahun 2025.
- (2) Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - Bab VI : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Bab VIII : Penutup.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menguraikan program dan kegiatan beserta indikasi pagu masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:
 - a. acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah untuk memfinalkan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - b. pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun Anggaran 2025.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah RKPD ditetapkan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemerintah Daerah menggunakan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juni 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

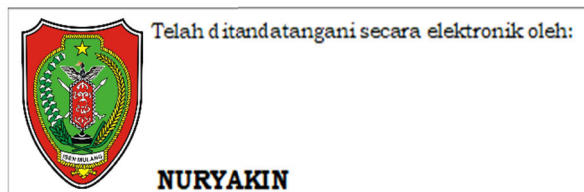


Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juni 2024

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 35



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2024
TANGGAL 28 JUNI 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2024
TANGGAL 28 Juni 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.2
1.3 Hubungan antar Dokumen	I.6
1.4 Maksud dan Tujuan	I.7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I.8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	II.1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II.1
2.1.1.1 Letak Astronomis, Letak Geografis dan Kondisi Fisik	II.1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II.7
2.1.1.3 Kawasan Rawan Bencana	II.9
2.1.1.4 Demografi	II.18
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.23
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II.23
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II.36
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II.50
2.1.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II.51
2.1.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II.53
2.1.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Wilayah	II.55
2.1.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II.56
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II.56

2.1.4.1	Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II.57
2.1.4.1.1	Pendidikan	II.57
2.1.4.1.2	Kesehatan	II.64
2.1.4.1.3	Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang	II.75
2.1.4.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II.78
2.1.4.1.5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II.83
2.1.4.1.6	Sosial	II.84
2.1.4.1.7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.86
2.1.4.2	Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II.88
2.1.4.2.1	Tenaga Kerja	II.88
2.1.4.2.2	Pangan	II.90
2.1.4.2.3	Pertanahan	II.92
2.1.4.2.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.95
2.1.4.2.5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II.97
2.1.4.2.6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II.99
2.1.4.2.7	Perhubungan	II.100
2.1.4.2.8	Komunikasi dan Informatika	II.106
2.1.4.2.9	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II.108
2.1.4.2.10	Penanaman Modal	II.108
2.1.4.2.11	Kepemudaan dan Olahraga	II.109
2.1.4.2.12	Statistik	II.109
2.1.4.2.13	Persandian	II.110

	2.1.4.2.14 Kebudayaan	II.110
	2.1.4.2.15 Perpustakaan	II.112
	2.1.4.2.16 Kearsipan	II.113
2.1.4.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II.114
	2.1.4.3.1 Kelautan dan Perikanan	II.114
	2.1.4.3.2 Pariwisata	II.115
	2.1.4.3.3 Pertanian	II.116
	2.1.4.3.4 Perindustrian	II.121
	2.1.4.3.5 Transmigrasi	II.123
	2.1.4.3.6 Energi	II.125
2.1.4.4	Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan	II.126
	2.1.4.4.1 Perumusan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah	II.126
	2.1.4.4.2 Pengawasan	II.127
	2.1.4.4.3 Perencanaan Pembangunan	II.128
	2.1.4.4.4 Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kepegawaian	II.129
	2.1.4.4.5 Penelitian dan Pengembangan	II.136
	2.1.4.4.6 Keuangan	II.138
2.2	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKP SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD	II.140
2.2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RKP TAHUN 2023	II.140
2.3.1.1	Evaluasi terhadap sasaran pembangunan daerah	II.140
2.3.1.2	Evaluasi terhadap prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan pembangunan.	II.141
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III.1
3.1.1	Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2023 dan 2024 (dari RKP)	III.1
3.1.2	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan 2024	III.3

3.1.3	Proyeksi dan Tantangan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	III.14
3.1.4	Arah Kebijakan Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	III.18
3.1.4.1	Tema Pembangunan	III.18
3.2.1.2	Sasaran Pembangunan Tahun 2025	III.22
3.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III.29
3.2.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III.29
3.2.1.1	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III.30
3.2.2	Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah	III.31
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III.35
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III.38
3.2.5	Kebijakan Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	III.39

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1	Tujuan dan sasaran Pembangunan
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
4.2.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2025
4.2.2	Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah
4.2.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah
4.2.4	Sasaran Target Nasional dan Target Provinsi Kalimantan Tengah
4.2.5	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
4.2.6	Prioritas Penanganan Kewilayahan
4.2.7	Pengembangan Kawasan Strategis Pembangunan Ekonomi
4.3	Inovasi Daerah

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1	Kebijakan Umum Arah Pengembangan Wilayah
5.1.1	Zona 1 (Wilayah Barat)

5.1.2	Zona 2 (Wilayah Tengah)	
5.1.3	Zona 3 (Wilayah Timur)	
5.2	Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045	
5.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	
5.4	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	VI.1
6.1	Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan	V.1
6.2	Usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang Mendukung Pelaksanaan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Prioritas Strategis Nasional	VI.4
6.3	Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	VI.7
6.3.1	Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	VI.7
6.3.2	Usulan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah	VI.8
6.3.3	Rencana Program dan Kegiatan	
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
7.1	Indikator Kinerja Utama	
7.2	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	
BAB VIII	PENUTUP	VIII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2021 dan Target 2022 dan 2023.....	I-16
Tabel 3.2	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017- 2024 (Juta Rupiah).....	III-29
Tabel 3.3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022.....	III-30
Tabel 3.4	Kerangka Struktur Pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.....	III-39
Tabel 4.1	Tujuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.....	IV-5
Tabel 4.2	Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional.....	IV-21
Tabel 4.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.....	IV-27
Tabel 4.4	Sasaran antara Target capaian Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.....	IV-30
Tabel 4.5	Integrasi BERKAH ke dalam Program Perangkat Daerah.....	IV-34
Tabel 4.6	Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU per Zona.....	IV-48
Tabel 4.7	Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU per Klaster.....	IV-48
Tabel 4.8	Proyeksi Kontribusi PDRB Klaster dengan Intervensi/Big Push.....	IV-50
Tabel 4.9	Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Palangkaraya.....	IV-50
Tabel 4.10	Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Buntok.....	IV-51
Tabel 4.11	Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Muara Teweh.....	IV-52
Tabel 4.12	Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Pangkalan Bun.....	IV-55
Tabel 4.13	Sasaran Pembangunan Klaster Pangkalan Bun.....	IV-61
Tabel 4.14	Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Sampit.....	IV-62
Tabel 4.15	Sasaran Pembangunan Klaster Sampit.....	IV-68
Tabel 4.16	Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Palangkaraya.....	IV-70
Tabel 4.17	Sasaran Pembangunan Klaster Palangkaraya.....	IV-77
Tabel 4.18	Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Kuala Kapuas.....	IV-77
Tabel 4.19	Sasaran Pembangunan Klaster Kuala Kapuas.....	IV-84
Tabel 4.20	Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Buntok.....	IV-86
Tabel 4.21	Sasaran Pembangunan Klaster Buntok.....	IV-92
Tabel 4.22	Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Muara Teweh.....	IV-92
Tabel 4.23	Sasaran Pembangunan Klaster Muara Teweh.....	IV-98
Tabel 4.24	SULAN KEGIATAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD PADA RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.....	IV-123
Tabel 4.25	USULAN KEGIATAN KABUPATEN/KOTA PADA RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.....	IV-261
Tabel 5.1	Target Indikator makro pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	V-2

	Tahun 2025.....	
Tabel 5.2	Potensi dan Pengembangan Potensi pada Zona 1 (Wilayah Barat) di Provinsi Kalimantan Tengah.....	V-7
Tabel 5.3	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten Tahun 2025.....	V-8
Tabel 5.4	Potensi dan Pengembangan Potensi pada Zona 2 (Wilayah Tengah) di Provinsi Kalimantan Tengah.....	V-12
Tabel 5.5	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten Tahun 2025.....	V-13
Tabel 5.6	Potensi dan Pengembangan Potensi pada Zona 3 (Wilayah Timur) di Provinsi Kalimantan Tengah.....	V-16
Tabel 5.7	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten Tahun 2025.....	V-17
Tabel 5.8	Arah Kebijakan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.....	V-20
Tabel 6.1	Usulan dari Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilakukan pembahasan dalam desk Musrenbangnas Tahun 2025.....	VI-5
Tabel 6.2	Rekapitulasi Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	VI-8
Tabel 6.3	RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.....	VI-11
Tabel 7.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Tahun 2023.....	VII-2
Tabel 7.2	Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	VII-3
Tabel 7.3	ingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	VII-3
Tabel 7.4	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	VII-4
Tabel 7.5	Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Tengah.....	VII-5
Tabel 7.6	INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKRENBANG 2024.....	VII-6
Tabel 7.7	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Target RPJMD 2021-2026.....	VII-48
Tabel 7.8	CAPAIAN DAN TARGET SPM PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.....	VII-83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-8
Gambar 3.1	Tahapan RPJPN.....	III-18
Gambar 3.2	Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025.....	III-20
Gambar 3.3	Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	III-22
Gambar 4.1	Grafik Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Klaster Asumsi BAU (kiri) dan Asumsi Intervensi (kanan).....	IV-47
Gambar 4.2	Pembagian Tema Pembangunan Menurut Zona.....	IV-53
Gambar 4.3	Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Barat.....	IV-54
Gambar 4.4	Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Tengah.....	IV-69
Gambar 4.5	Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Timur.....	IV-85
Gambar 4.6	Peta Sebaran Kondisi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah.....	IV-99
Gambar 4.7	Peta Sebaran Pengangguran.....	IV-100
Gambar 4.8	Peta Sebaran Kondisi Ekonomi.....	IV-102
Gambar 4.9	Prioritas Pembangunan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah.....	IV-103
Gambar 5.1	Pembagian Wilayah ke dalam 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah.....	V-3
Gambar 5.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023.....	V-4
Gambar 5.3	Angka Kemiskinan Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%).....	V-5
Gambar 5.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%).....	V-6
Gambar 5.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%).....	V-6
Gambar 5.6	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023.....	V-9
Gambar 5.7	Angka Kemiskinan Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%).....	V-10
Gambar 5.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022 (%).....	V-10
Gambar 5.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%).....	V-11
Gambar 5.10	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024.....	V-14
Gambar 5.11	Angka Kemiskinan Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%).....	V-14
Gambar 5.12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%).....	V-15

Gambar 5.13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%).....	V-16
Gambar 5.14	Tema Pembangunan Regional.....	V-18
Gambar 5.15	Arah Pembangunan Pulau Kalimantan.....	V-19

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah dibandingkan Nasional..	III-6
Grafik 3.2	Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2024 menurut Lapangan Usaha.....	III-9
Grafik 3.3	Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2024 menurut Pengeluaran.....	III-10



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau biasa disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yaitu RPJMD dan dokumen rencana kerja pembangunan nasional (RKP). Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Provinsi Kalimantan Tengah menyusun dokumen RKPD yang diharapkan dapat menjawab permasalahan maupun isu strategis tahunan baik tuntutan dari masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah baik skala nasional maupun regional.

Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan dokumen tahunan telah menerapkan sistem melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), bawah-atas (*bottom-up*), holistik, tematik, integratif dan spasial. Selain pendekatan-pendekatan tersebut diatas untuk memprioritaskan dan efisiensi anggaran berdasarkan tema pembangunan tahunan dan menselaraskan dengan prioritas perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan kebijakan *Money Follow Programs* dengan memperhatikan pada 1) prioritas pembangunan pada tahun berjalan, 2) hasil evaluasi dan pengendalian, 3) perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah, 4) penguatan pendanaan pembangunan.

Dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa tata cara penyusunan RKPD meliputi : Persiapan Penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan Rancangan Akhir RKPD, Penetapan RKPD.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dimana merupakan masa berakhirnya Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan akan dilaksanakannya PILKADA Serentak pada Tahun 2024. RKPD Tahun Anggaran 2025 menjadi *baseline* atau target awal dalam menentukan proyeksi kedepan sebagai acuan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah dan menjaga kesinambungan pembangunan antar perencanaan kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

RKPD Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yakni “Memantapkan pembangunan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, menuju Kalteng unggul dan bermartabat”. Diharapkan dengan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat mempercepat tercapainya visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
21. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP Tahun 2025;
31. Tahun 2024 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi struktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
34. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (6-224/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102)

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen

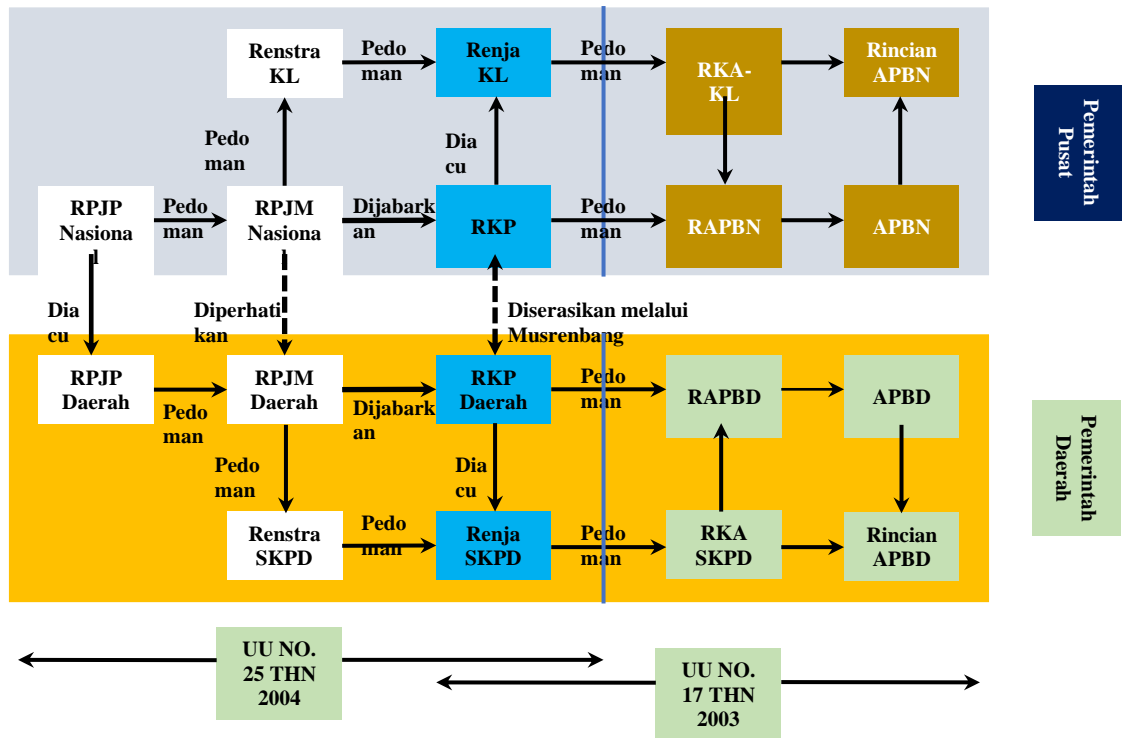


perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

Pada skala nasional dikenal rencana pembangunan jangka panjang nasional atau disingkat RPJPN yang berdimensi jangka panjang (20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN berdimensi 5 tahun dan rencana kerja pemerintah berdimensi tahunan yang disingkat dengan RKP. Dokumen perencanaan RPJMN berdimensi 5 tahun dijabarkan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga (K/L) yang disebut dengan rencana strategis (RENSTRA-K/L) dan Dokumen perencanaan berdimensi tahunan yaitu RKP dijabarkan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga yang disebut dengan rencana kerja (RENJA-K/L) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja anggaran (RKAK/L).

Pada skala daerah, dikenal dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang disingkat dengan RPJPD, rencana jangka menengah daerah yang disingkat dengan RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Dokumen perencanaan RPJMD berdimensi 5 tahun dijabarkan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah (PD) yang disebut dengan rencana strategis (RENSTRA-PD) dan Dokumen perencanaan berdimensi tahunan yaitu RKPD dijabarkan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang disebut dengan rencana kerja (RENJA-PD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja anggaran (RKA-PD)

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Kalimantan Tengah Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004
: UU Nomor 17 Tahun 2003

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

R
K
P
D

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini adalah untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 adalah sebagai :

1. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir renja Perangkat Daerah Provinsi;
2. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya;



3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
5. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan; dan
7. Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta menyusun LKPJ, LPPD dan LKPD.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Sistematika penyusunan yang dipakai untuk menyusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi, RKP, program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan



Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.



BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

4.3. Inovasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

4.4. Keterkaitan Dimensi Strategi Pembangunan Nasional dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2025

4.5. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota didasarkan menjelaskan kinerja seluruh pembangunan di daerah baik dari sisi ekonomi maupun social yang merupakan bagian dari integrasi pembangunan baik ditingkat provinsi maupun pusat.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Provinsi.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berdiri setelah adanya restrukturisasi provinsi di Pulau Kalimantan. Merunut ke belakang berdasarkan wilayah geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah dahulu merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari aspek geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cukup banyak kesamaan karakteristik dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan yang ditandai dengan luasnya wilayah hutan, rawa-rawa, hingga lahan gambut. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki sebelas sungai besar dan 33 sungai kecil yang bermula dari utara dan mengalir ke Laut Jawa. Sungai Barito merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah dengan panjang mencapai 900 km dengan kedalaman berkisar antara 6 hingga 14 meter. Sungai merupakan lokasi utama pemukiman dan moda transportasi yang penting di Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ibu kota provinsi di Palangka Raya. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak di pertengahan wilayah Kalimantan Tengah atau berada di titik sentral seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadikan pembangunan daerah antara ibu kota provinsi dan kabupaten memiliki kesetaraan dalam pencapaian kualitas pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kelebihan dalam pencapaian pembangunan daerah dibandingkan dengan kabupaten lainnya, seperti: Kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Utara, maupun Kotawaringin Barat.

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana.

2.1.1.1. Letak Astronomis, Letak Geografis dan Kondisi Fisik

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan. Secara astronomis Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur





Timur hingga 115°51' Bujur Timur. Luas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153.564,5 Km² atau 8,04 persen dari luas Indonesia.

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Batas utara : Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur

Batas timur : Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan

Batas selatan : Laut Jawa

Batas barat : Kalimantan Barat

Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota meliputi 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1.576 desa/kelurahan. Tabel 2.1 berikut memaparkan pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menurut kabupaten/kota tahun 2021.

Tabel 2. 1

Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Persentase terhadap Luas Provinsi	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kotawaringin Barat	10.759	7,01	6	94
2	Kotawaringin Timur	16.796	10,94	17	185
3	Kapuas	14.999	9,77	17	233
4	Barito Selatan	8.830	5,75	6	93
5	Barito Utara	8.300	5,40	9	103
6	Katingan	17.500	11,40	13	161
7	Seruyan	16.404	10,68	10	100
8	Sukamara	3.827	2,49	5	32
9	Lamandau	6.414	4,18	8	90
10	Gunung Mas	10.804	7,03	12	128
11	Pulang Pisau	8.997	5,86	8	99





No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Persentase terhadap Luas Provinsi	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
12	Murung Raya	23.700	15,43	10	125
13	Barito Timur	3.834	2,50	10	103
14	Kota Palangka Raya	2.399,5	1,56	5	30
Kalimantan Tengah		153.564,5	100	136	1.576

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2024

Kabupaten Murung Raya memiliki luas wilayah terbesar yaitu 15,43 persen dari luas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu seluas 23.700 km². Selanjutnya luas wilayah administrasi terkecil yaitu Kota Palangka Raya seluas 2.399,5 km² atau 1,56 persen dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kapuas berjumlah 233 desa/kelurahan yang tersebar pada 17 kecamatan. Kemudian jumlah desa/kelurahan paling sedikit yaitu Kota Palangka Raya sejumlah 30 desa/kelurahan dan terbagi dalam 5 kecamatan.

a. Kondisi Topografi dan Fisiologi

Berdasarkan kondisi bentang alam, topografi Provinsi Kalimantan Tengah terbagi kedalam tiga satuan fisiografis yaitu pegunungan, dataran dan rawa. Wilayah bagian utara terdiri dari rangkaian pegunungan. Titik tertinggi terletak di Gunung Batu Sambang yang mencapai 1.660 meter dpal. Wilayah bagian tengah mulai dijumpai perbukitan dengan topografi landai. Semakin ke arah selatan, kemiringan lahan semakin datar. Wilayah bagian selatan terdiri dari dataran rendah, rawa, dan paya-paya.

Topografi wilayah Kalimantan Tengah terbagi dalam 5 kelas kemiringan meliputi datar, landau, agak curam, curam dan sangat curam. Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah memiliki topografi datar dengan kemiringan 0 – 8 persen seluas 6.940.144,05 Ha.



**Tabel 2.2**

Luas dan Kelas Kemiringan Wilayah Daratan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kelas Lereng (%)	Luas (Ha)	Persentase
1.	0 – 8 (Datar)	6.940.144,05	46,12
2.	8 – 15 (Landai)	1.552.839,80	10,32
3.	15 – 25 (Agak Curam)	3.977.865,28	26,44
4.	25 – 40 (Curam)	1.694.814,85	11,26
5.	> 40 (Sangat Curam)	881.357,24	5,86

Sumber: website <https://dishut.kalteng.go.id/>

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah, dan menerus dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi landai hingga kemiringan tertentu dan memiliki pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sedangkan pada sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam memanjang dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian mencapai 1.660 meter dpl

Tabel 2.3

Luas Wilayah Fisiologi Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Wilayah	Luas (Km ²)
1.	Dataran rendah pesisir	36.870
2.	Undak-undak pedalaman	37.310
3.	Dataran dan perbukitan pedalaman	57.124
4.	Pegunungan Schwaner	9.000
5.	Pegunungan Muller	11.000
6.	Pegunungan Meratus	2.300

Sumber: website <https://dishut.kalteng.go.id/>





b. Kondisi Geologi

Struktur geologi Provinsi Kalimantan Tengah tidak terpisahkan dari struktur geologi Kalimantan secara umum. Struktur geologi secara regional berupa patahan/sesar (fault), yaitu struktur yang terbentuk karena pergerakan lempeng di zona patahan. Sesar terdiri dari sesar normal dan sesar naik. Pada bagian tengah-utara, struktur geologi berupa patahan, lipatan dan kekar. Pada bagian selatan-barat daya, struktur geologi relatif stabil. Pembentukan sesar, lipatan dan kekar berhubungan dengan aktivitas tektonik pada Zaman Tersier. Struktur batuan di Kalimantan Tengah tersusun dari batuan berumur tua ke muda sebagai berikut:

1. Batuan Malihan, batuan berumur Paleozoikum-Mesozoikum yang terdiri dari filit, sikis, genes, kuarsit, dan kristalin.
2. Batuan Beku, batuan berumur Perm-Trias yang terdiri dari granit, granodiorit, diorit, tonalit, gabro, dan monzolit.
3. Batuan Sedimen, terdiri dari sedimen klastik.
4. Batuan Vulkanik, terdiri dari breksi, aliran lava, batupasir tufaan, dan intrusi-intrusi kecil andesit basaltis.
5. Alluvial, endapan berumur Pleistosen-Resen yang terdiri dari pasir, lempung, gambut, dan lumpur.

c. Hidrologi

Provinsi Kalimantan Tengah dialiri sebelas sungai yang berhulu di wilayah bagian utara. Anak-anak sungai dibagian hulu berpola dendritik dengan kemiringan yang tinggi. Sungai-sungai utama memiliki kemiringan rendah hingga ke wilayah tengah. Di wilayah tengah terdapat rawa gambut dan pada bagian hilir terdapat rawa pasang surut. Total terdapat 11 sungai besar dan





33 sungai kecil atau anak sungai. Berikut rincian nama sungai di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.4
Nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Dapat Dilayari (km)	Kedalaman (meter)	Lebar (meter)
1	Sungai Jelai	200	150	8	150
2	Sungai Arut	250	190	4	100
3	Sungai Lamandau	300	250	6	150
4	Sungai Kumai	175	100	6-9	250
5	Sungai Seruyan	350	300	5	250
6	Sungai Mentaya	400	270	6	350
7	Sungai Katingan	650	520	3-6	250
8	Sungai Sebangau	200	150	5	100
9	Sungai Kahayan	600	500	7	450
10	Sungai Kapuas	600	420	6	450
11	Sungai Barito	900	700	6-14	350-500

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2024

d. Klimatologi

Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan panas. Pengukuran iklim di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berada pada titik-titik tertentu. Berdasarkan pengamatan klimatologi dan geofisika tahun 2023, rata-rata suhu udara tertinggi mencapai 37,3 derajat celcius dan rata-rata suhu udara terendah mencapai 20,07 derajat celcius.



**Tabel 2.5**

Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2023

Unsur iklim	2021	2022	2023
Suhu (°C)			
Minimum	21,0	19,8	20,07
Rata-rata	27,3	27,1	27,6
Maksimum	35,2	35,2	37,3
Kelembaban (%)			
Minimum	41,0	43,0	31
Rata-rata	87,1	84,0	80,7
Maksimum	100,0	100,0	100
Kecepatan Angin (m/det)			
Minimum	CALM	CALM	CALM
Rata-rata	3,3	3,5	3,72
Maksimum	23,0	24,0	25
Tekanan Udara (mbar)			
Minimum	1.000	1.000,8	1.000,5
Rata-rata	1.003,9	1.007,6	1.008,4
Maksimum	1.012,5	1.018,6	1.014,5
Jumlah Curah Hujan (mm)	2.908,2	3.259,1	2.626,2
Jumlah Hari Hujan (hari)	256	240	228
Penyinaran Matahari (%)	4,7	4,8	5

Catatan: Calm adalah kecepatan angin mendekati nol
 Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2024

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Menurut *International Encyclopedia of Human Geography* (2009), pengembangan wilayah merupakan konsep multidimensi dengan keragaman sosial ekonomi yang besar yang ditentukan oleh berbagai factor seperti kekayaan sumber daya alam, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, ketersediaan dan akses modal, investasi produktif dan overhead, budaya dan sikap kewirausahaan, infrastruktur fisik, struktur sectoral, infrastruktur dan kemajuan teknologi, pikiran terbuka, sistem pendukung public, dan lain sebagainya. Tujuan utama pengembangan wilayah adalah pemerataan pengembangan antarwilayah baik secara fisik maupun sosial ekonomi wilayah. Oleh sebab itu, diperlukan mengelompokkan





potensi pengembangan wilayah yang ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan terus dikembangkan berdasarkan pengelompokan pola ruang yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (RTRWP) yakni pola penggunaan lahan kawasan hutan dan pola penggunaan lahan di luar kawasan hutan yang dapat dijabarkan dibawah ini

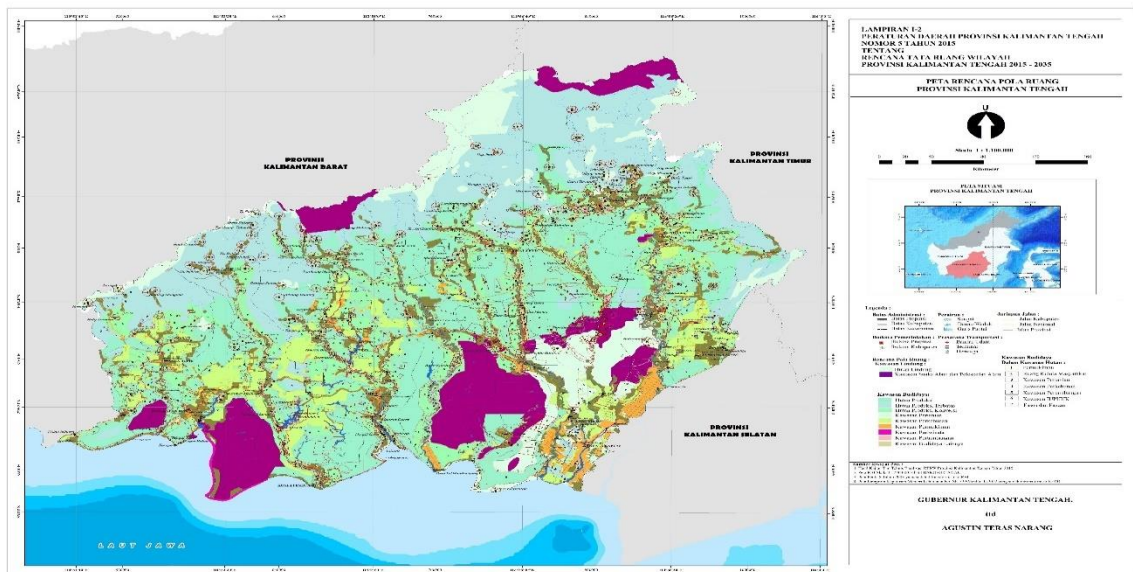
a. Pola Penggunaan Lahan Kawasan Hutan

Kondisi fisik wilayah secara alamiah menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori bioregion hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.9415/MENLHK-PKTL/KUH/PUA.2/II/2019 serta Batas Daerah Versi Juli 2020, diketahui luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 12.268.570 Ha. Sejalan dengan wilayah yang masih dominan hutan, penggunaan lahan pun masih didominasi dengan kawasan hutan.

b. Pola Penggunaan Lahan diluar Kawasan Hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.9415/MENLHK-PKTL/KUH/PUA.2/II/2019 serta Batas Daerah Versi Juli 2020 diketahui jumlah luas area diluar kawasan hutan sebesar 3.258.028 Ha. Tutupan lahan tahun 2020 diluar kawasan hutan sebagian besar berupa lahan perkebunan 1.076.593 hektar, pertanian lahan kering campur semak 516.257 hektar, semak belukar rawa 439.068 hektar, semak belukar 318.741 hektar, pertanian lahan kering 245.595 hektar kemudian tutupan lahan lainnya seperti lahan terbuka, permukiman, pertambangan, rawa, sawah, hutan rawa sekunder.





Sumber : Perda RTRWP Kalimantan Tengah

Gambar 2.1

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana

Dalam Undang Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Memperhatikan karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari kemungkinan bencana, baik yang dipicu oleh faktor alam, non alam maupun sosial.

R
K
P
D
2
0
2
5





Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tingkat resiko bencana sedang dengan jenis ancaman yang berpotensi menimbulkan bencana yaitu 1) kebakaran hutan dan lahan; 2) Banjir; 3) tanah longsor; 4) cuaca ekstrim; 5) kekeringan; 6) gelombang ekstrim/abrasi dan 7) gempa bumi.

1) Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Fenomena tersebut terjadi pada musim kemarau yaitu sekitar bulan Juli hingga bulan Oktober, dimana pada bulan tersebut terjadi peningkatan jumlah hotspots di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya daerah yang mengandung gambut. Penyebab terjadinya kebakaran lahan dan hutan antara disebabkan oleh:

- a. Iklim, yaitu kemarau panjang yang sering terjadi bersamaan dengan pengaruh El Nino, Dipole Mode, Sirkulasi Monsun Asia-Australia, daerah pertemuan angin antar tropis, dan suhu permukaan laut yang merupakan faktor pendorong lain terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- b. Kondisi lahan berupa tanah gambut menjadi salah satu faktor pendorong menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dimana jenis tanah tersebut sangat mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan.
- c. Pembersihan lahan dengan cara membakar yang terjadi di kalangan masyarakat yang bertujuan untuk membuka lahan pertanian atau untuk status kepemilikan.

Dampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan ini cukup luas. Kabut asap yang ditimbulkan mengganggu sektor transportasi, mengancam kesehatan masyarakat serta menghambat pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk musnahnya biodiversity (keanekaragaman hayati).





Tabel 2.6
Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A Kabupaten						
1	Kotawaringin Barat	69.125	626.896	328.814	1.024.834	Tinggi
2	Kotawaringin Timur	285.461	811.998	530.013	1.627.472	Tinggi
3	Kapuas	472.478	500.411	470.885	1.443.774	Tinggi
4	Barito Selatan	95.716	516.800	240.260	852.776	Tinggi
5	Barito Utara	422.902	378.381	6.156	807.438	Sedang
6	Katingan	577.539	648.485	335.019	1.561.042	Tinggi
7	Seruyan	549.389	345.822	694.562	1.589.773	Tinggi
8	Sukamara	5.961	158.375	208.711	373.047	Tinggi
9	Lamandau	357.451	250.541	7.171	615.164	Sedang
10	Gunung Mas	546.248	451.319	7.152	1.004.719	Sedang
11	Pulang Pisau	5.710	278.600	577.246	861.557	Tinggi
12	Murung Raya	1.357.786	200.985	2.646	1.561.417	Sedang
13	Barito Timur	19.298	232.566	116.564	368.428	Tinggi
B Kota						
1	Palangka Raya	4.539	118.489	100.876	223.904	Tinggi
	Provinsi Kalimantan Tengah	4.769.603	5.519.668	3.626.074	13.915.345	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (KRB Kalteng 2022-2026)

Potensi bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kelas potensi kebakaran hutan dan lahan ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan.

2) Banjir

Banjir sebagai peristiwa atau keadaan ketika daerah atau daratan terendam akibat volume meningkat. Bencana banjir hampir setiap tahun terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat 2 (dua) jenis banjir berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, yaitu banjir bandang dan banjir rob.

Banjir bandang disebabkan oleh intensitas curah hujan tinggi di hulu sungai sehingga debit air sungai meluap. Wilayah Kalimantan Tengah yang dikelilingi oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki potensi besar terjadinya banjir bandang. Dampaknya dapat mengakibatkan genangan pada permukiman penduduk yang berada di bantaran DAS dan melumpuhkan aktivitas masyarakat secara total. Potensi tersebut meliputi Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito utara, Kabupaten





Kapuas bagian utara dan tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur bagian utara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan bagian utara dan tengah.

Banjir Rob atau air pasang disebabkan oleh naiknya permukaan air sungai atau pesisir pantai sebagai akibat pasang laut atau meningginya gelombang laut oleh badai. Potensi tersebut mengancam wilayah yang berhadapan dengan Laut Jawa yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

3) Tanah Longsor

Tanah longsor diartikan sebagai gerakan massa tanah atau batuan, atau campuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Potensi tanah longsor berada di wilayah dengan morfologi relief kasar dengan lereng-lereng terjal dan topografi berbukit, pegunungan dan wilayah hulu DAS dengan tingkat kemiringan curam antara 8 – 25%. potensi ancaman tersebut di wilayah utara Kalimantan Tengah meliputi Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas bagian utara, Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Kabupaten Katingan bagian utara, Kabupaten Kotawaringin Timur bagian utara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan bagian utara dan Kabupaten Sukamara bagian utara.

4) Kekeringan

Kekeringan terjadi pada musim kemarau dengan surah hujan dibawah normal. Kondisi tersebut dapat berpotensi di wilayah dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan atau pada daerah non pasang surut meliputi Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten barito Timur, kabupaten Kapuas bagian utara, Kabupaten Gunung Mas bagian utara, kabupaten Katingan bagian utara, Kabupaten Kotawaringin timur bagian utara, Kabupaten Lamandau, kabupaten Seruyan bagian utara., Kabupaten Kapuas bagian selatan dan tengah, Kabupaten Pulang Pisau bagian selatan dan tengah, Kabupaten

Katingan bagian selatan dan tengah, serta





bagian selatan Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Sukamara dan Kotawaringin Barat.

5) Cuaca Ekstrim

Suatu kondisi cuaca yang kuat, masif serta memiliki potensi tinggi untuk rusak dan menimbulkan korban jiwa. Bencana yang termasuk ke dalam peristiwa ekstrem karena cuaca antara lain siklon tropis, hujan lebat, badai guruh, angin kencang, puting beliung, kemarau berkepanjangan. Ancaman paling sering terjadi di wilayah Kalimantan tengah berupa angin puting beliung yang sering terjadi pada musim pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau ataupun sebaliknya. Resiko tertinggi akan anacaman tersebut yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Murung Raya, Gunung Mas, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Pulang Pisau, katingan, Kapuas dan Kota Palangka Raya.

6) Gelombang Ekstrim/Abrasi

Gelombang ekstrim merupakan gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Kondisi tersebut ditandai dengan kecepatan angin tinggi diikuti peningkatan tinggi gelombang laut. Pengaruh musim barat dan timur (monsun) terhadap gelombang jelas terlihat di perairan Kalimantan Tengah bagian selatan yang menyebabkan abrasi pantai. Tinggi gelombang bervariasi berkisar pada $\pm 0,75 - 2$ meter.

Abrasi merupakan pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu karena terganggunya keseimbangan alam di daerah tersebut. Adanya pengikisan tersebut menyebabkan berkurangnya daerah pantai di wilayah yang dekat dengan air laut menjadi sasaran pengikisan. Jika hal tersebut dibiarkan, memberikan dampak negatif seperti masalah kepemilikan hak tanah, berkurangnya luas lahan tambak, kerusakan bangunan dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir.





Bagian selatan Kalimantan Tengah dengan panjang garis pantai + 750 km berhadapan dengan Laut Jawa sangat rentan terdampak gelombang ekstrim dan abrasi seperti wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

7) Gempa Bumi

Gempa bumi sebagai getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan sesara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi maupun disebabkan oleh letusan gunung berapi.

Wilayah Kalimantan Tengah yang tidak memiliki gunung berapi aktif serta jauh dari zona pertemuan lempeng tektonik Indoaustralia dan Eurasia memberikan potensi ancaman sangat kecil dari kejadian gempa bumi. Meskipun terjadi getaran, akan tetapi getarannya terasa sangat rendah.

d. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai suatu entitas spasial yang mencakup energi, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakannya, yang saling mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sejalan dengan pelaksanaan berbagai proyek strategis di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana program dan kegiatan pembangunan membutuhkan suplai sumber daya alam yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kondisi alam dan kehidupan seperti peningkatan polusi dan degradasi kualitas lingkungan. Kondisi buruk tersebut berpotensi mengancam daya dukung, kapasitas tahanan, dan produktivitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap masyarakat dan program-program





pembangunan. Oleh karena itu, menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik demi sangat diperlukan guna keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan secara kompleks dan menyeluruh.

Pengukuran kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tinggi rendahnya nilai IKLH mampu mencerminkan sejauh mana upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, baik di wilayah provinsi maupun nasional. IKLH mencakup penilaian kondisi kualitas air (dikenal sebagai Indeks Kualitas Air-IKA), kondisi kualitas udara (dikenal sebagai Indeks Kualitas Udara-IKU), serta kondisi tutupan lahan (dikenal sebagai Indeks Kualitas Tutupan Lahan), dan kondisi kualitas air laut (IKAL). IKLH berfungsi sebagai ukuran performa pengelolaan lingkungan hidup dan menggambarkan secara substansial terkait kualitas lingkungan hidup suatu daerah. IKLH menjadi sumber data dan informasi penting dalam rangka merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat dijadikan sebagai indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah.

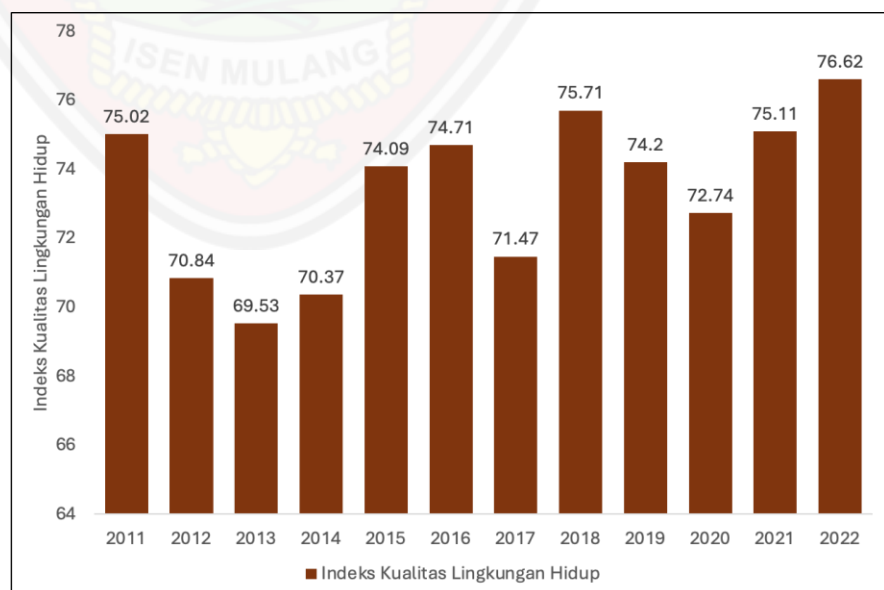
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdapat tiga indikator utama sebagai komponen untuk menghitung IKLH, yaitu indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas air dihitung berdasarkan berbagai parameter, yakni Derajat Keasaman (pH), Kadar Oksigen Terlarut (DO), Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD), Kebutuhan Oksigen Kimia (COD), Total Padatan Tersuspensi (TSS), Kadar Nitrat (NO₃-N), Total Fosfat (T-Phosphat), dan Kandungan Fecal Coliform (Fecal Coli).





Indikator kualitas udara dihitung berdasarkan parameter NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2,5}$ yang diambil dari berbagai lokasi seperti area perkantoran, industri, permukiman, dan transportasi. Sementara itu, komponen indikator kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan perhitungan luas tutupan lahan, tutupan vegetasi non-hutan termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan dalam wilayah yang diamati. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Sebelum tahun 2020, metode perhitungan IKLH menggunakan 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Mulai tahun 2020, terdapat penambahan indikator dan perubahan rumus IKLH. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terbaru adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu dari 2011 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



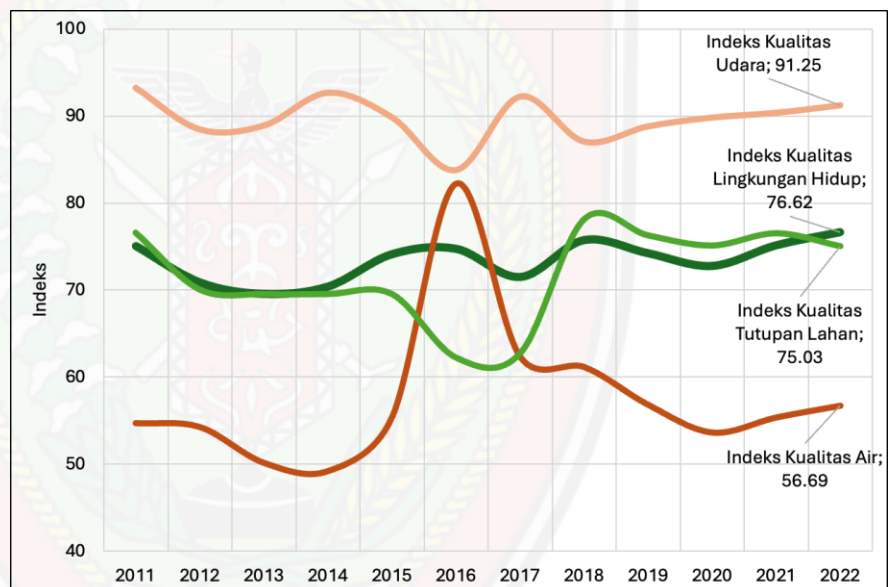
Gambar 2.2

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2020





Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan sejak Tahun 2018. Pada tahun 2018 IKLH sebesar 75,71 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar 72.74. Penyumbang turunnya IKLH adalah dari rendahnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang semakin menurun akibat meningkatnya pencemaran sungai. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan akibat deforestasi dan alih fungsi kawasan, sehingga berdampak terhadap perubahan tutupan lahan. Gambar .1.3 di bawah menunjukkan fluktuasi IKA, IKU, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan IKLH selama periode 2011–2022.

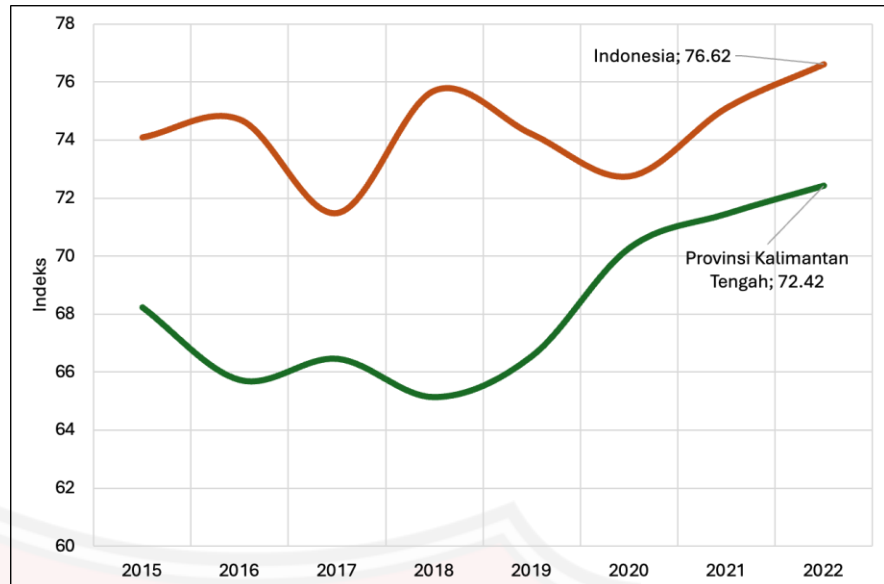


Gambar 2.3

Perbandingan Nilai IKA, IKU, IKTL, dan IKLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Adapun berikut merupakan perbandingan Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nasional tahun 2016-2020. Selama periode lima tahun tersebut nilai IKLH Kalimantan Tengah secara konsisten berada di atas nilai IKLH nasional.





Gambar 2.4

Perbandingan Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nasional Tahun 2016-2020

e. Potensi Sumber Daya Alam

Kalimantan Tengah memiliki sumber energi yang besar, baik energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Potensi sumber daya tidak terbarukan seperti batu bara dan gas alam. Potensi sumber daya terbarukan seperti energi surya, air, angin, biomassa dan biogas. Potensi energi terbarukan yang besar di Kalimantan Tengah perlu dikembangkan dan direalisasikan terutama untuk sebagai alternatif dari sumber daya tidak terbarukan sebagai pembangkit listrik.

Wisata alam yang tersebar diseluruh kabupaten/kota menjadi salah satu keunggulan dan penggerak ekonomi di Kalimantan Tengah. Pengembangan pariwisata secara partisipatif mampu mendayagunakan masyarakat lokal, diantaranya dengan mengadakan pembinaan, menciptakan masyarakat yang sadar wisata, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga alam dan melestarikan budaya adat-istiadat.

2.1.1.4. Demografi

a. Gambaran Umum Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 mencapai 2.741.000 jiwa yang





terdiri atas 1.420.800 jiwa penduduk laki-laki dan 1.320.200 jiwa penduduk perempuan. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalami sedikit peningkatan. Tercatat pada tahun 2011 laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1,28% dari tahun sebelumnya, sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 mencapai 1,40%. Meskipun demikian, pada rentang tahun 2011 hingga 2023 terjadi beberapa fluktuasi laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan nilai mencapai 4,42%. Sementara itu, laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai sebesar -1,65%. Fluktuasi pertumbuhan penduduk tersebut disebabkan oleh beberapa faktor demografi, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Secara detail, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan laju pertumbuhan penduduk disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2011	2.249.146	1.173.070	1.076.076	1,28
2012	2.283.687	1.191.086	1.092.601	1,54
2013	2.384.700	1.243.800	1.140.900	4,42
2014	2.439.858	1.273.302	1.166.556	2,31
2015	2.495.035	1.302.796	1.192.239	2,26
2016	2.550.192	1.332.274	1.217.918	2,21
2017	2.605.274	1.361.715	1.243.559	2,16
2018	2.660.200	1.391.000	1.269.200	2,11
2019	2.714.900	1.420.300	1.294.600	2,05
2020	2.670.000	1.385.900	1.284.100	-1,65
2021	2.702.400	1.401.600	1.300.800	1,21





2022	2.741.000	1.420.800	1.320.200	1,44
2023	2.773.747	1.434.119	1.339.628	1,40

Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2024

Berdasarkan hasil dari Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024, jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Kotawaringin Timur sejumlah 443.359 jiwa atau 15,98 persen dari total penduduk Kalimantan Tengah. Selanjutnya Kabupaten Sukamara memiliki jumlah penduduk paling sedikit sejumlah 66.633 jiwa atau 2,4 persen.

Sebaran penduduk Kalimantan Tengah masih terkonsentrasi di kabupaten/kota besar seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Total penduduk yang tinggal di keempat kabupaten/kota tersebut sebanyak 52,35 persen dari keseluruhan penduduk Kalimantan Tengah.

Tabel 2.8

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Kotawaringin Barat	10.759	279.740	30
Kotawaringin Timur	16.796	443.359	29
Kapuas	14.999	423.210	25
Barito Selatan	8.830	134.698	22
Barito Utara	8.300	160.605	16
Sukamara	3.827	66.633	20
Lamandau	6.414	102.103	13
Seruyan	16.404	171.304	11
Katingan	17.500	169.355	8
Pulang Pisau	8.997	138.199	14
Gunung Mas	10.804	142.835	15
Barito Timur	3.834	117.312	37
Murung Raya	23.700	116.621	5
Palangka Raya	2.400	305.797	107
KALIMANTAN TENGAH	153.564	2.773.747	18

Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data SP 2023 kepadatan penduduk Kalimantan Tengah yaitu 18 jiwa/km². Kota Palangka Raya memiliki kepadatan





penduduk tertinggi yaitu 107 jiwa/km² dan Kabupaten Murung Raya dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 5 jiwa/km².

b. Sex Ratio Penduduk Kalimantan Tengah

Sex Ratio diartikan sebagai perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Tabel 2. 9

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, 2023, dan 2024

No.	Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin Penduduk		
		2020 ¹	2023 ²	2024 ²
1	Kotawaringin Barat	108	107	107
2	Kotawaringin Timur	108	107	107
3	Kapuas	107	106	106
4	Barito Selatan	105	104	104
5	Barito Utara	108	108	107
6	Sukamara	111	110	109
7	Lamandau	115	114	114
8	Seruyan	112	112	112
9	Katingan	108	107	107
10	Pulang Pisau	109	108	108
11	Gunung Mas	112	111	111
12	Barito Timur	105	105	105
13	Murung Raya	108	108	107
14	Palangka Raya	104	102	101
	Kalimantan Tengah	108	107	107

Catatan: ¹ Hasil Sensus Penduduk

² Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023

Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, rasio jenis kelamin Kalimantan Tengah tahun 2023 dan tahun 2024 adalah 107. Artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 107 penduduk laki-laki.

c. Komposisi dan Jumlah Penduduk

Selain ditinjau berdasarkan jenis kelamin, kondisi demografi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditinjau berdasarkan komposisi umur penduduk. Jumlah penduduk pada kelompok umur 0 – 4





mencapai 221.900 jiwa pada tahun 2022. Nilai tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data tahun 2020 yang mencapai 220.400 jiwa dan tahun 2021 yang mencapai 220.800 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2021 mencapai 1.903.400 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 1.936.100 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia (65+ tahun) pada tahun 2022 mencapai 134.200 jiwa. Jumlah penduduk lanjut usia tersebut mengalami kenaikan sekitar dua kali lipat apabila dibandingkan jumlah penduduk lanjut usia pada tahun 2011 sebesar 65.267 jiwa. Secara rinci, komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut
Kelompok Umur Tahun 2011-2022

Kelompok Umur	Tahun											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-4	236.698	240.333	244.500	247.029	250.685	252.035	253.192	254.300	254.900	220.400	220.800	221.900
5-9	242.939	246.669	232.600	234.705	235.056	237.277	239.490	242.000	244.100	221.500	219.800	219.500
10-14	216.303	219.397	222.100	224.294	227.268	229.271	231.695	234.300	236.200	234.600	232.000	229.300
15-19	201.388	204.529	218.100	219.092	220.281	222.595	224.219	226.000	228.100	237.900	236.700	236.300
20-24	211.259	214.567	220.900	222.452	223.214	224.219	225.429	226.700	227.500	240.500	241.200	241.700
25-29	231.725	235.345	222.600	225.353	228.209	230.628	232.892	235.400	236.900	236.400	237.800	240.000
30-34	208.788	212.016	220.100	224.124	227.570	231.169	234.275	236.900	239.600	232.200	233.600	235.100
35-39	183.807	186.650	206.300	213.134	218.071	222.178	226.618	230.900	235.100	218.000	221.100	224.900
40-44	149.109	151.405	171.000	178.901	188.226	197.389	205.720	213.200	220.400	202.400	205.700	209.100
45-49	116.127	117.913	135.200	142.539	150.057	157.866	165.839	173.600	181.900	175.500	180.600	186.000
50-54	87.903	89.254	102.200	108.103	114.446	120.737	127.408	134.200	141.700	141.600	147.200	153.200
55-59	57.301	58.184	72.200	77.287	82.319	87.773	93.187	98.500	104.400	111.100	116.000	121.100
60-64	40.532	41.155	47.000	50.324	54.043	58.039	62.453	67.000	71.900	78.600	83.500	88.700
65+	65.267	66.270	69.900	72.521	75.590	79.016	82.857	87.200	92.200	119.300	126.400	134.200
Jumlah	2.249.146	2.283.687	2.384.700	2.439.858	2.495.035	2.550.192	2.605.274	2.660.200	2.714.900	2.670.000	2.702.400	2.741.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Data komposisi penduduk juga dapat direpresentasikan dalam bentuk piramida penduduk. Sebagai contoh, data komposisi penduduk tahun 2022 yang disajikan pada gambar berikut menggambarkan jenis piramida penduduk stasioner awal. Jenis piramida tersebut ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia



produktif yang masif, angka kelahiran yang mulai stabil, dan angka harapan hidup yang mulai membaik.

d. Distribusi Penduduk Kalimantan Tengah

Berdasarkan distribusi penduduk, dapat dilihat bahwa penduduk Provinsi Kalimantan Tengah secara umum terkonsentrasi pada empat daerah dengan persentase penduduk di atas 10%. Adapun keempat daerah tersebut meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi kabupaten dengan persentase penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 dengan nilai 15,98%. Sementara itu, Kabupaten Sukamara menjadi kabupaten dengan persentase penduduk terendah dengan nilai 2,40% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Tengah. Secara rinci, distribusi penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11

Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)
Kotawaringin Barat	279.740	10,08
Kotawaringin Timur	443.359	15,98
Kapuas	425.186	15,33
Barito Selatan	134.698	4,86
Barito Utara	160.605	5,79
Sukamara	66.633	2,40
Lamandau	102.103	3,68
Seruyan	171.304	6,17
Katingan	169.355	6,10
Pulang Pisau	138.199	4,98
Gunung Mas	142.835	5,15
Barito Timur	117.312	4,23
Murung Raya	116.621	4,20
Palangka Raya	305.797	11,02
KALIMANTAN TENGAH	2.773.747	100,00

Sumber: Statistik Kependudukan Kalimantan Tengah, BPS, 2024

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Analisis aspek kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat dapat memberikan gambaran dan hasil evaluasi terhadap kondisi





sosial ekonomi kemasyarakatan di suatu wilayah. Aspek kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dirincikan berdasarkan beberapa fokus pembahasan, antara lain fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

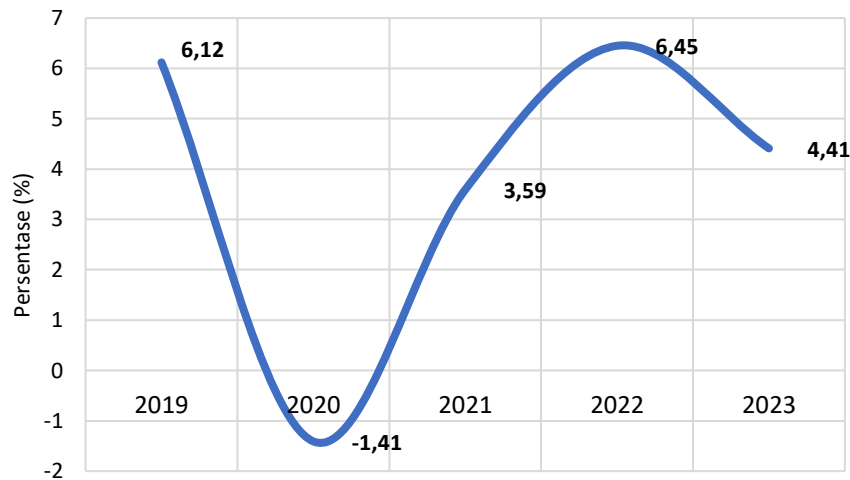
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Aspek kesejahteraan ekonomi menitikberatkan pada indikator-indikator yang merepresentasikan kondisi ekonomi dan kemiskinan di suatu wilayah. Indikator yang dapat digunakan yakni pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, laju inflasi, kemiskinan, dan rasio gini.

- a. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal tersebut berangkat dari asumsi bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, akan semakin besar dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakatnya. Indikator yang digunakan dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi selama tahun 2019-2023. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah memiliki rata-rata 3,83% per tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 6,45% atau naik 2,86% dari tahun 2021. Sementara, tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah menurun -1,4%. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 merupakan dampak dari pelemahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2010-2023 secara lebih terperinci dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar 2.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Berdasarkan data Kalimantan Tengah pada tahun 2019–2023, diketahui bahwa terjadi tren peningkatan nilai PDRB ADHK selama periode 5 tahun disertai dengan fluktuasi kecil berupa penurunan pada tahun 2020. Pada awal periode, PDRB ADHK menunjukkan nilai sebesar Rp64.649,2 miliar yang kemudian meningkat secara stabil hingga tahun 2022. Meskipun Kembali terjadi penurunan di tahun 2023 Masa Normal Baru di tahun 2021–2022 menunjukkan adanya upaya adaptasi untuk memulihkan kondisi ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai PDRB ADHK.

b. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian suatu wilayah dipengaruhi oleh beragam kegiatan perekonomian yang dilaksanakan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat. Selain itu, potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia juga menjadi faktor yang mempengaruhi struktur perekonomian daerah. Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral, yakni dilihat dari distribusi peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi





nilai tambah setiap sektor. Berdasarkan analisis data tersebut akan terlihat sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan atau sektor andalan di suatu wilayah. Persentase kontribusi PDRB menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Ada tidaknya dominasi transformasi/perubahan struktur ekonomi juga dapat dianalisis dengan pengelompokan tujuh belas lapangan usaha menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a) **Lapangan Usaha Primer**

Lapangan usaha primer adalah lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber daya alam seperti tanah maupun segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

b) **Lapangan Usaha Sekunder**

Lapangan usaha sekunder adalah lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang memiliki nilai tambah. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air; serta lapangan usaha konstruksi.

c) **Lapangan Usaha Tersier**

Lapangan usaha tersier adalah lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha transportasi dan pergudangan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha real estat; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan;

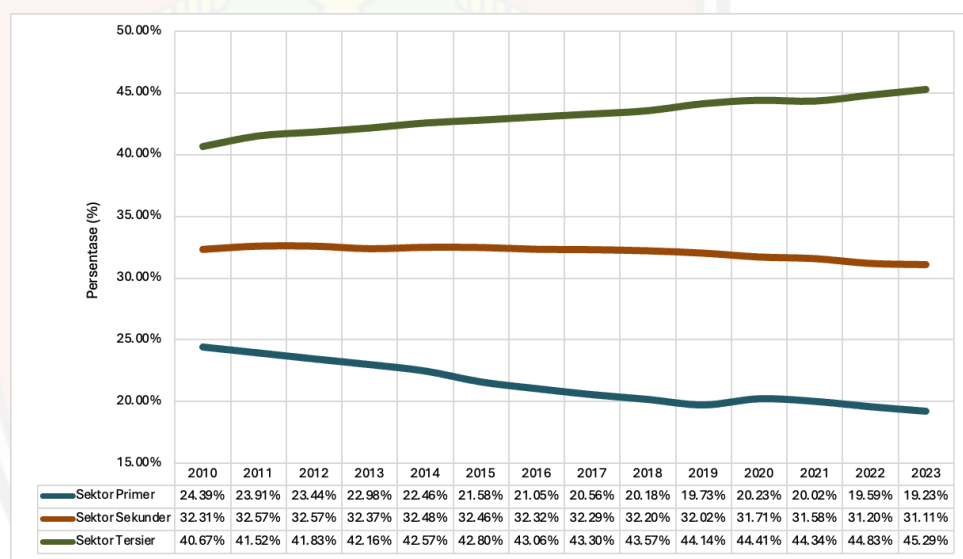
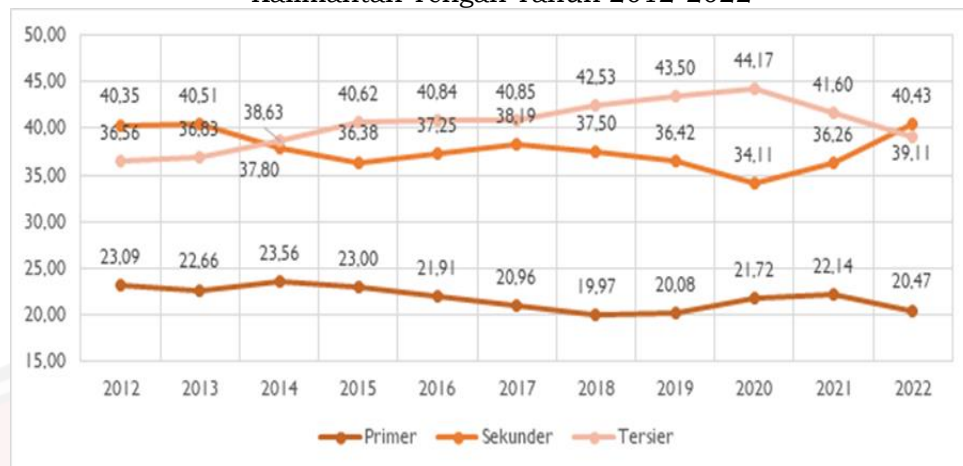




lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta lapangan usaha jasa lainnya.

Gambar 2.6

Perbandingan Struktur Ekonomi Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha di provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2022



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh lapangan usaha sekunder di awal periode. Pada tahun 2014 terjadi pergeseran dominasi oleh lapangan usaha tersier hingga tahun 2021. Pada akhir periode diketahui bahwa lapangan usaha sekunder mendominasi struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, rincian struktur ekonomi berdasarkan jenis lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12

Proporsi Per Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 - 2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan	12.54 %	12.37%	12.85%	12.63%	11.82%





	Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing						
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	7.64%	7.36%	7.37%	7.39%	7.33%	7.40%
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	21.04 %	20.79%	20.61%	20.55%	20.47%	20.39%
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	1.03%	1.02%	1.01%	1.03%	1.05%	1.04%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water supply,	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%
F	Konstruksi/ Construction	10.05 %	10.12%	10.00%	9.91%	9.60%	9.59%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	13.21 %	13.15%	12.92%	13.04%	13.07%	13.04%
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	4.18%	4.23%	3.67%	3.65%	4.16%	4.51%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommo- dation and Food Service	3.02%	3.04%	2.79%	2.79%	2.97%	3.11%
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	5.17%	5.38%	6.08%	6.26%	6.41%	6.56%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financi- al and Insurance Activities	3.99%	4.05%	4.27%	4.18%	4.04%	4.03%
L	Real Estat/ Real Estate Activities	2.87%	2.89%	3.02%	3.00%	2.90%	2.80%

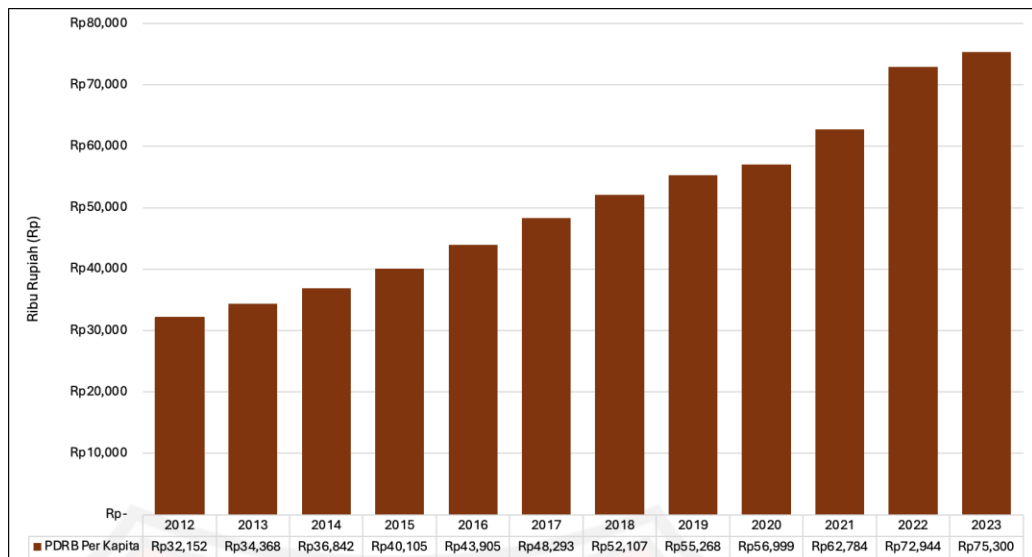


M, N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	1.80%	1.89%	1.82%	1.77%	1.83%	1.89%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public	3.35%	3.34%	3.41%	3.28%	3.19%	3.08%
P	Jasa Pendidikan/ Education	3.08%	3.12%	3.27%	3.15%	3.01%	2.92%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	1.13%	1.16%	1.33%	1.41%	1.38%	1.37%
R, S, T, U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	1.78%	1.87%	1.83%	1.81%	1.88%	1.97%

c. PDRB Per Kapita

Kesejahteraan masyarakat secara ekonomi juga dapat digambarkan dengan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan semakin baik. Perhitungan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut. Dari gambar 2.2.6 dapat diketahui bahwa PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir.





Gambar 2.7

Nilai PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2012-2022

d. Laju Inflasi

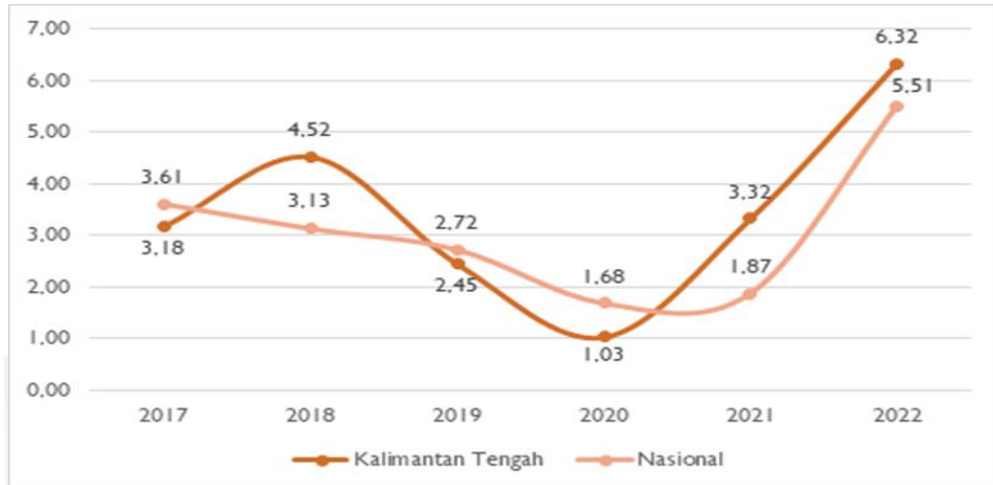
Terdapat keterkaitan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika inflasi terlalu rendah atau terjadi deflasi, maka akan menekan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketika inflasi terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat akan turun dan mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan. Oleh sebab itu inflasi menjadi salah satu indikator makro yang diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa atau turunnya daya jual mata uang suatu negara secara terus menerus. Timbulnya inflasi disebabkan adanya tekanan dari sisi penawaran (cost push inflation), permintaan (demand pull inflation), dan ekspektasi inflasi. Terjadinya demand pull inflation disebabkan oleh tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya, atau dengan kata lain permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya, yang mana ekspektasi inflasi dapat cenderung bersifat adaptif atau forward looking.

Tingkat keparahan inflasi dapat dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu inflasi ringan dengan laju inflasi kurang dari 10 persen per tahun, inflasi sedang saat laju inflasi antara 10–30 persen per tahun, inflasi berat yakni pada kisaran 30-100 persen per tahun, dan inflasi sangat berat/hiperinflasi saat laju inflasi lebih dari





100 persen per tahun. Berdasarkan data pada Gambar 2.2.5 diketahui bahwa inflasi di Kalimantan Tengah sangat fluktuatif. Adapun perubahannya masih tergolong ringan dengan laju kurang dari 10 persen per tahun.



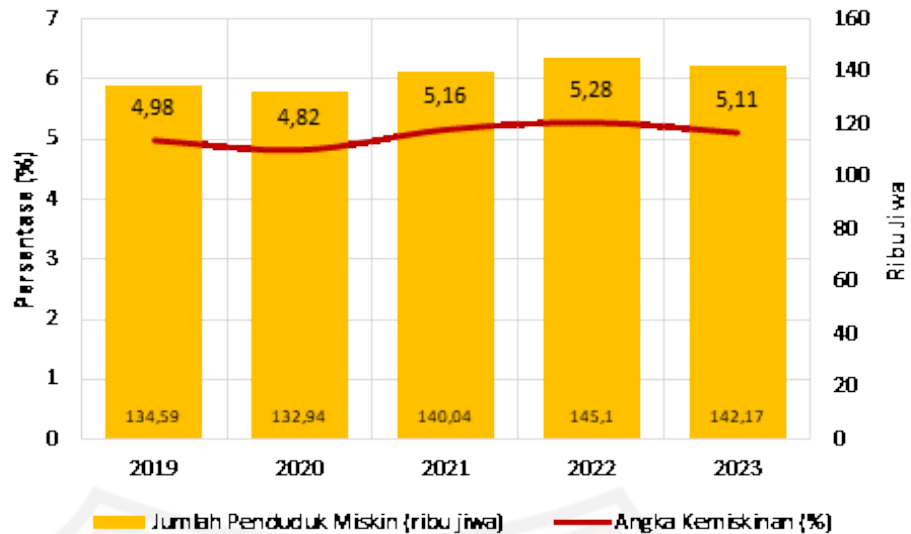
Gambar 2.8

Perbandingan Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022

e. Kemiskinan

Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tren peningkatan pada periode 2019-2023. Angka kemiskinan terendah pada periode tersebut adalah 4,82% pada tahun 2020, sedangkan angka kemiskinan tertinggi terdapat pada tahun 2022, yaitu 5,28%. Jumlah penduduk miskin tertinggi adalah pada tahun 2022, yaitu sebesar 145.100 jiwa. Peningkatan kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,34% dari tahun sebelumnya.





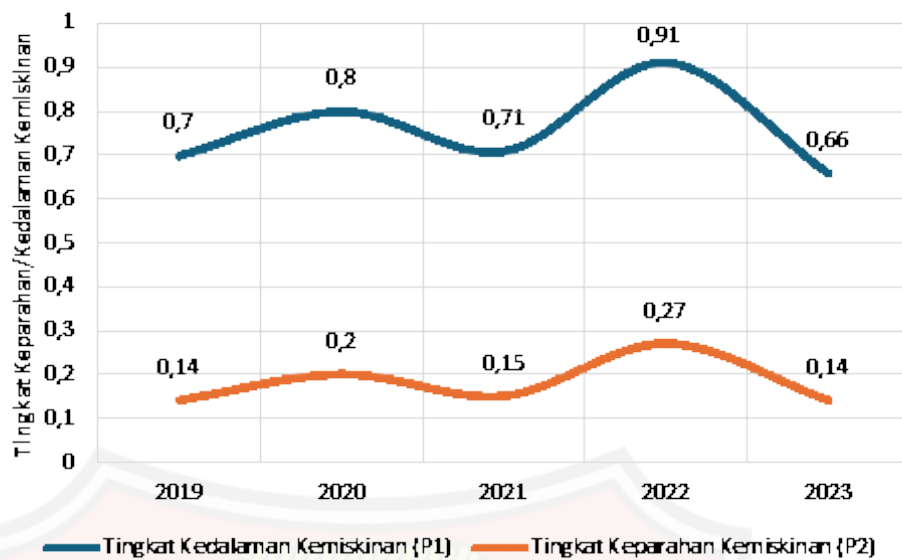
Gambar 2.9

Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Selain angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, indikator kemiskinan lainnya adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan sebaliknya. Tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi pada periode 2019-2023 dengan tren peningkatan. Tingkat kedalaman kemiskinan tertinggi pada tahun 2022, yaitu 0,91.





Gambar 2.10

Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2024

Tingkat keparahan kemiskinan (P2) adalah sebaran pengeluaran antarpenduduk miskin. Semakin tinggi nilai berarti semakin timpang pengeluaran antarpenduduk miskin. Tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi dengan tren peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengeluaran antarpenduduk miskin semakin timpang dari tahun ke tahun. Tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah tertinggi pada tahun 2022 (0,27).

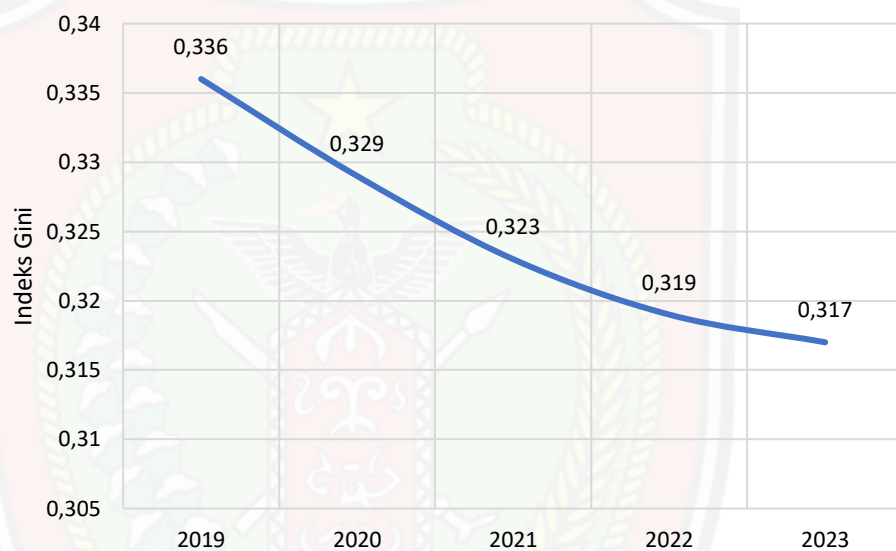
f. Rasio Gini

Selain pendapatan per kapita, indeks gini juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Indeks gini merupakan indeks yang mengukur tingkat pemerataan melalui pendekatan koefisien gini dimana koefisien tersebut dianalisis menggunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio indeks gini berkisar antara 0 dan 1, saat nilai rasio gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, saat rasio gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi pendapatan makin tinggi. Kategori indeks gini terbagi menjadi tiga yaitu rasio





gini lebih dari 0,5 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, rasio gini antara 0,3–0,5 mengartikan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan rasio kurang dari 0,3 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan rendah. Pada tahun 2019-2023, ketimpangan di Provinsi Kalimantan Tengah terus menurun yang dibuktikan dengan terus menurunnya indeks gini pada periode tersebut. Indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 menurun 0,019 poin atau 5,65% dari tahun 2019.



Gambar 2.11

Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

g. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mengacu pada tingkat pertumbuhan PDRB suatu daerah dalam periode tertentu. LPE menjadi suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam suatu periode waktu. LPE dihitung sebagai persentase perubahan PDRB dari satu tahun ke tahun berikutnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi positif yang akan menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Beberapa faktor yang memengaruhi LPE meliputi investasi, konsumsi, ekspor-impor, dan produktivitas tenaga kerja. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, stabilitas politik, kebijakan





ekonomi yang baik, dan lingkungan usaha yang kondusif juga berperan penting dalam LPE.

Dampak LPE terhadap pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah signifikan untuk menentukan arah pembangunan. Apabila LPE tinggi, maka Kalimantan Tengah dapat mengalami peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini bisa memacu pembangunan infrastruktur dan industri, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat memiliki dampak negatif seperti degradasi lingkungan dan ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengelola pertumbuhan ekonomi dengan bijak, memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan, serta mengupayakan inklusi ekonomi agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, perlu mempertimbangkan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu agar dapat mencapai pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

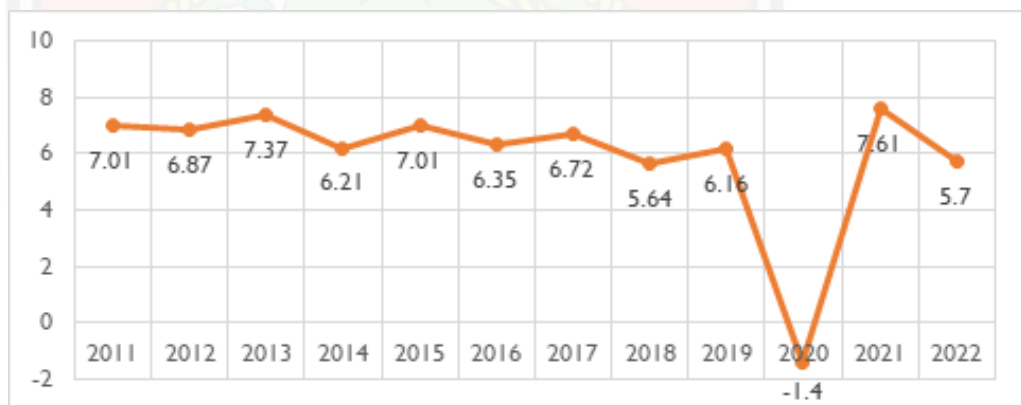
Grafik di bawah menunjukkan LPE Provinsi Kalimantan Tengah sejak 2011 hingga triwulan IV tahun 2022. Terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Kontraksi terbesar terjadi pada kategori Jasa Lainnya sebesar 4,36 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,20 persen yang diikuti dengan Konstruksi sebesar 11,56 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh 8,12 persen dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi di Ekonomi Kalimantan Tengah. Selain itu, LPE Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2015- 2019 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami perlambatan. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2018 ke tahun 2019, namun LPE Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 lebih kecil sebesar 0,85 persen bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015 yang mencapai 7,01 persen. Tidak hanya itu, kondisi

LPE pada tahun 2022 sebesar 5,7





merupakan penurunan dari LPE di tahun sebelumnya sebesar 1,91 dan bernilai lebih rendah dibanding pada kondisinya di tahun 2011. Adanya tren penurunan dan pelambatan laju pertumbuhan di Kalimantan Tengah selama 11 tahun perlu menjadi perhatian khusus untuk pembangunan daerah. Selain Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami perlambatan LPE, beberapa kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah juga pada tahun 2019 Laju Pertumbuhan Ekonominya mengalami penurunan, diantaranya Kotawaringin Barat, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Seruyan, Katingan, Barito Timur dan Kota Palangkaraya. Secara detail, fluktuasi LPE Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.12

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Fokus kesejahteraan sosial budaya menitikberatkan pada indikator-indikator yang merepresentasikan kondisi sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan di suatu wilayah. Indikator yang dapat digunakan yakni kemampuan literasi dan numerasi, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Harapan Lama Sekolah, Standar Kompetensi Pendidik, Usia Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

a. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi adalah kecakapan terkait penggunaan angka dan simbol dalam matematika dasar dalam memecahkan masalah praktis di kehidupan sehari-hari. Penilaian

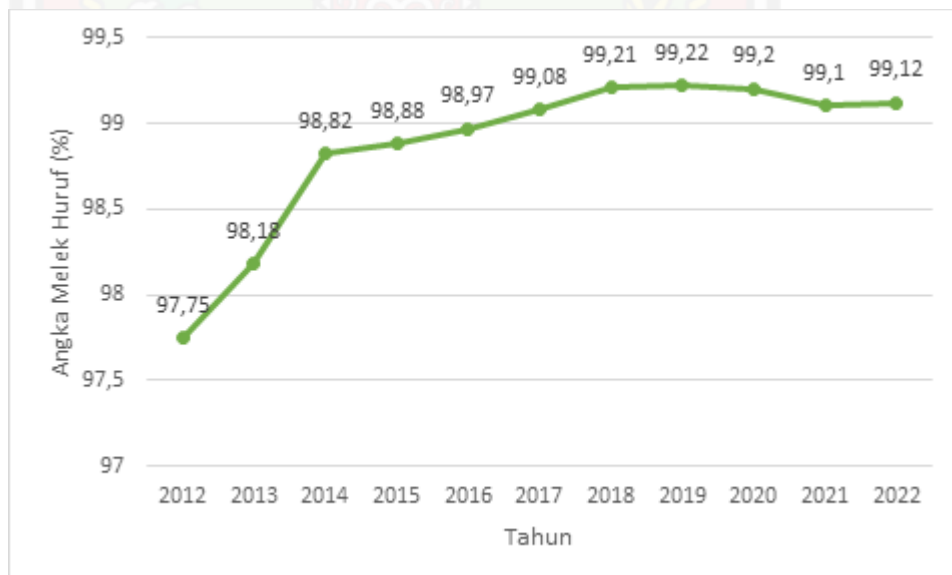




kemampuan literasi dan numerasi menggunakan indikator rata-rata kemampuan berdasarkan asesmen nasional.

b. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan indikator yang menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Kondisi Angka Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga 2022. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Tengah berada di angka 97,75%. Nilai ini semakin meningkat per tahunnya, hingga berada pada titik tertinggi sebesar 99,22% pada tahun 2019. Namun, data tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya sedikit penurunan Angka Melek Huruf, dimana pada tahun 2020 sebesar 99,20% dan tahun 2021 sebesar 99,10%. Meskipun demikian, Angka Melek Huruf kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga menjadi 99,12%. Tren perubahan Angka Melek Huruf dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Error! No text of specified style in document..13

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

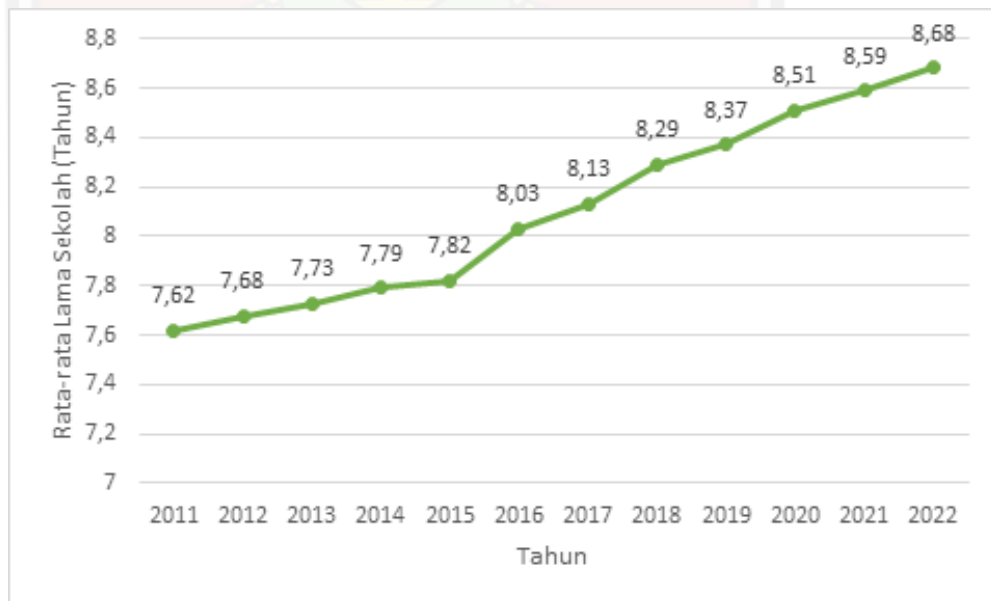
c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah merupakan gambaran atas rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan terakhir. Kondisi rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan





Tengah mengalami peningkatan selama periode tahun 2011 hingga 2022. Data tahun 2011 menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 7,62 tahun. Nilai tersebut mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu, hingga pada tahun 2022 nilai rata-rata lama sekolah mencapai 8,68 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas mampu menyelesaikan pendidikan hingga semester 2 kelas 3 SMP. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah masih memerlukan dorongan agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara detail, tren peningkatan Rata-rata Lama Sekolah disajikan pada gambar berikut.



Gambar Error! No text of specified style in document..14

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

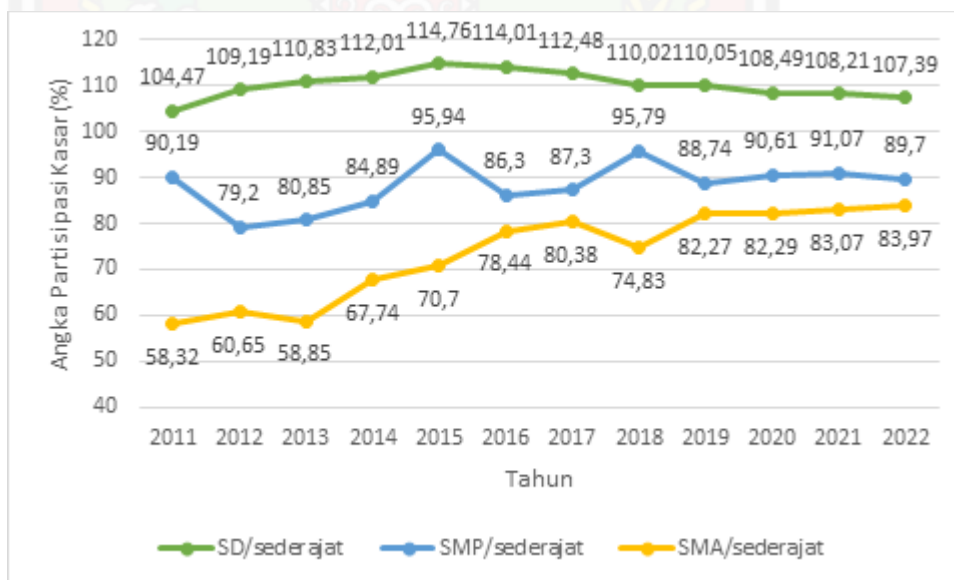
d. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang menggambarkan akses penduduk terhadap layanan pendidikan, terutama bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah terdiri atas dua jenis, yakni Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya, tanpa mempertimbangkan faktor usia. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SD/ sederajat pada





tahun 2011 mencapai 104,47% dan mengalami peningkatan hingga mencapai 114,76% pada tahun 2015. Namun, nilai tersebut kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 menjadi 107,39%. Sementara itu, nilai APK untuk jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat cenderung mengalami fluktuasi. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2011 mencapai 90,19% dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi hanya sebesar 79,2%. Nilai tersebut mengalami fluktuasi tiap tahunnya, hingga pada tahun 2022 nilai APK jenjang SMP/ sederajat menjadi 89,7%. Nilai APK untuk jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2011 sebesar 58,32% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 60,65%. Penurunan nilai APK untuk jenjang SMA/ sederajat terjadi pada tahun 2013 dan 2018. Nilai APK jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2022 sebesar 83,97%. Secara lengkap, nilai APK jenjang SD/ sederajat hingga SMA/ sederajat disajikan pada gambar berikut.



Gambar Error! No text of specified style in document..15
 Angka Partisipasi Kasar Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

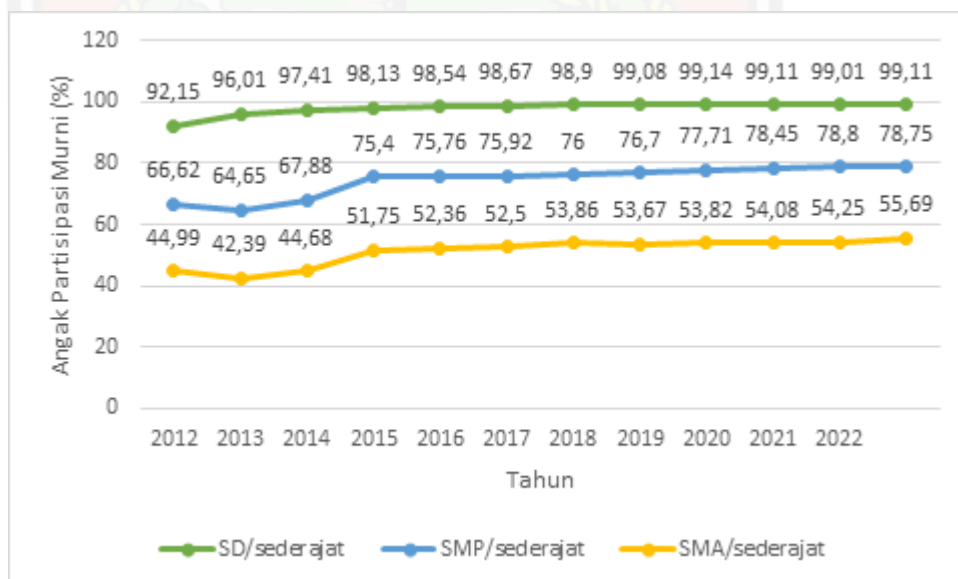
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu dengan usia yang sesuai terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya. Secara umum, APM di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Nilai APM jenjang SD/ sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah

R
K
P
D
2
0
2
5





pada tahun 2011 mencapai 92,15%. Data tahun 2022 menunjukkan APM jenjang SD/ sederajat mengalami peningkatan menjadi 99,11%. Nilai APM jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2011 sebesar 75,76% dan mengalami peningkatan menjadi 78,75% pada tahun 2022. Fenomena yang sama juga terjadi pada nilai APM jenjang SMA/ sederajat yang mengalami peningkatan dari 44,99% pada tahun 2011 menjadi 55,69% pada tahun 2022. Nilai APM yang belum mencapai 100% menandakan bahwa masih ada penduduk yang menyekolahkan anaknya tidak sesuai dengan usianya. Sementara itu, nilai APM yang semakin berkurang setiap jenjangnya menandakan masih terdapat penduduk usia sekolah yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut. Secara detail, nilai APM di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar .2.16

Angka Partisipasi Murni Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

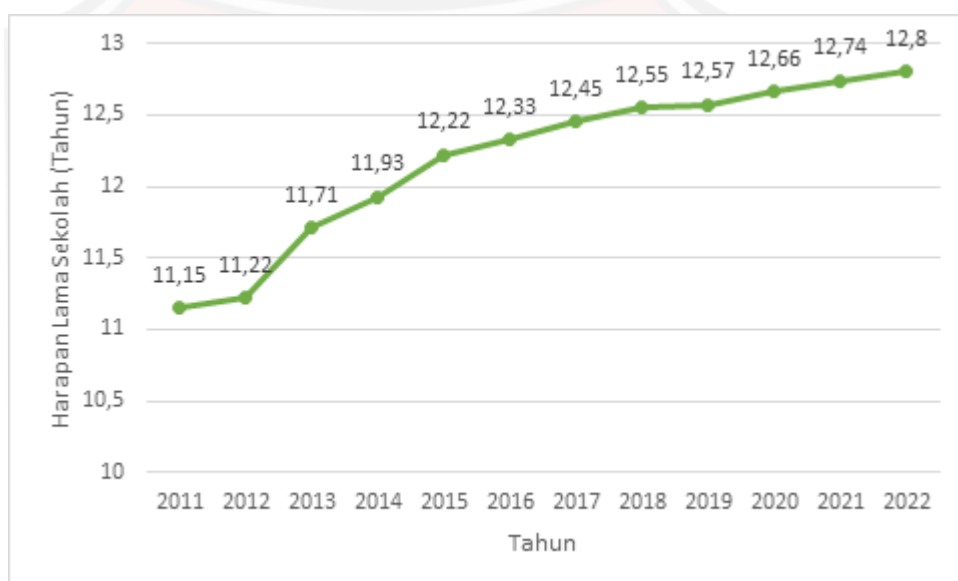
e. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh penduduk usia 7 tahun ke atas dengan asumsi bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa HLS di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2011 ke tahun 2022 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Data tahun 2011





menunjukkan angka HLS mencapai 11,15 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 2 SMA/ sederajat. Sementara itu, data tahun 2022 menunjukkan angka HLS mencapai 12,8 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan hingga lulus pendidikan jenjang SMA/ sederajat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Angka HLS Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar .2.17

Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 7 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

f. Standar Kompetensi Pendidik

Salah satu komponen integral dalam penilaian keberhasilan seseorang dalam pekerjaan adalah kompetensi, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Melalui identifikasi kompetensi pendidik, diharapkan keberhasilan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dapat diukur dengan lebih valid. Kompetensi pendidik dapat diukur dengan dua indikator, yakni persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV dan persentase guru yang tersertifikasi.

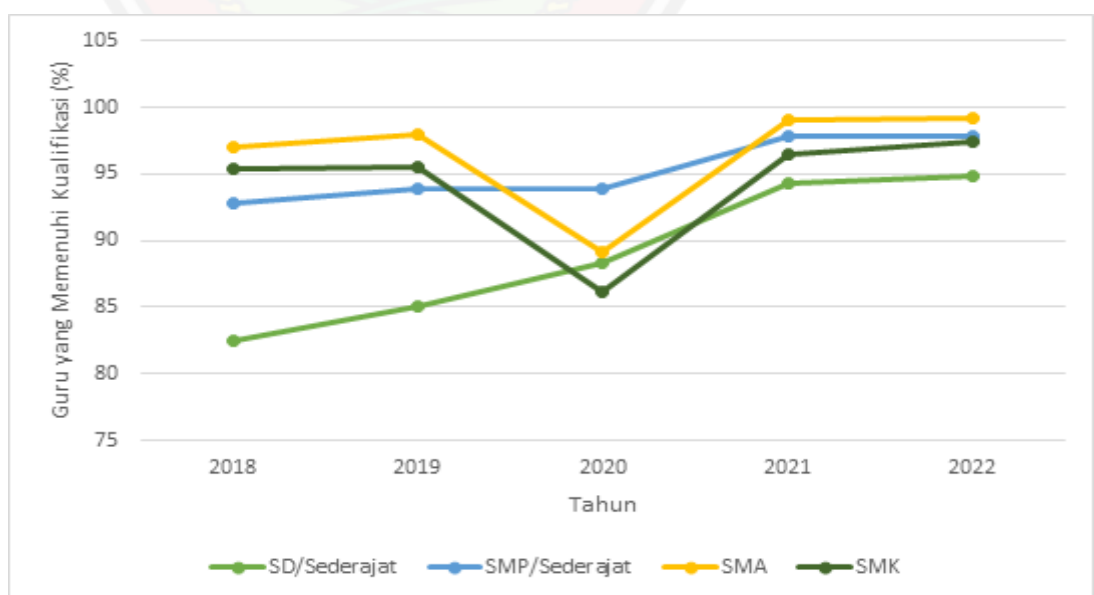
Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Provinsi Kalimantan Tengah pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat selama periode 2018-2022 cenderung mengalami





peningkatan. Untuk jenjang SD/ sederajat, persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV pada tahun 2018 mencapai 82,5%. Nilai tersebut meningkat menjadi 94,78% pada tahun 2022. Persentase guru pada jenjang SMP/ sederajat dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV adalah sebesar 92,82% pada tahun 2018, dan meningkat menjadi 97,76% pada tahun 2022.

Sementara itu, persentase guru untuk jenjang SMA dan SMK mengalami fluktuasi. Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV untuk kedua jenjang tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 97,03% untuk SMA dan 95,4% untuk SMK menjadi 98,02% untuk SMA dan 95,56% untuk SMK. Namun, persentase guru pada kedua jenjang tersebut mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, yakni menjadi 89,14% untuk SMA dan 86,11% untuk SMK. Nilai persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV kembali mengalami peningkatan pasca tahun 2020, dengan nilai 99,15% untuk SMA dan 97,37% untuk SMK pada tahun 2022. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan salah satunya oleh banyaknya jumlah guru yang purna tugas pada tahun tersebut yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah guru baru. Secara rinci, nilai persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV disajikan pada gambar berikut.



Gambar **Error! No text of specified style in document..18**
 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 – 2022.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)



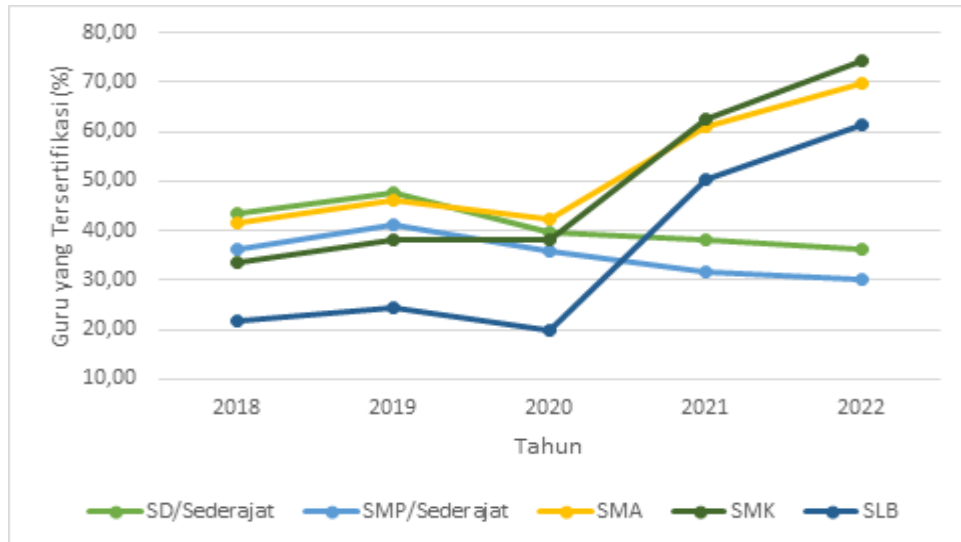


Indikator kedua yang dapat digunakan untuk mengukur standar kompetensi pendidik adalah persentase guru yang tersertifikasi. Sertifikasi yang diberikan terhadap guru merupakan sebuah bentuk pengakuan bagi para guru yang telah memenuhi standar kelayakan dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2018-2022, persentase guru yang tersertifikasi cenderung mengalami fluktuasi.

Persentase guru pada jenjang SD/ sederajat yang tersertifikasi tahun 2018 adalah sebesar 43,30%. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 47,80%. Namun, pada tiga tahun berikutnya, Persentase guru yang tersertifikasi pada jenjang SD/ sederajat mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hingga mencapai 36,30% pada tahun 2022. Fenomena serupa juga terjadi pada guru jenjang SMP/ sederajat, dengan persentase tahun 2018 sebesar 36,40% dan tahun 2022 sebesar 30,00%.

Meskipun juga mengalami fluktuasi, persentase guru pada jenjang SMA, SMK, maupun SLB secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2022. Persentase guru jenjang SMA yang tersertifikasi pada tahun 2018 sebesar 41,50% dan mengalami peningkatan menjadi 69,85% pada tahun 2022. Persentase guru jenjang SMK yang tersertifikasi adalah sebesar 33,50% pada tahun 2018, dan mengalami peningkatan menjadi 74,21% pada tahun 2022. Sementara itu, persentase guru jenjang SLB yang tersertifikasi adalah sebesar 21,80% pada tahun 2018, dan meningkat menjadi 61,22% pada tahun 2022. Detail perubahan persentase guru yang tersertifikasi dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar Error! No text of specified style in document..19

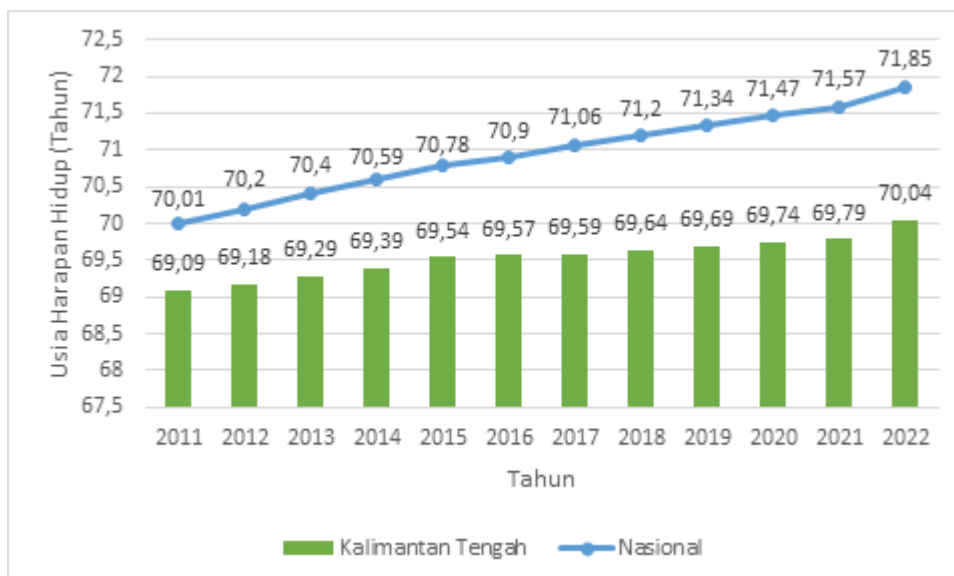
Persentase Guru yang Tersertifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2018 – 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

g. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan sebuah indikator yang menunjukkan rata-rata usia yang mungkin dicapai oleh penduduk baru lahir di suatu wilayah. Data UHH di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami peningkatan sepanjang periode 2011 hingga 2022. UHH Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011 mencapai 69,09 tahun, dan meningkat menjadi 70,04 tahun pada 2022. Peningkatan UHH ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan dalam akses layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, nilai UHH Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah rata-rata UHH nasional. Rata-rata UHH nasional pada tahun 2011 telah mencapai 70,01 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 71,85 tahun. Untuk itu, diperlukan upaya tambahan untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat melampaui rata-rata UHH nasional.





Gambar 2.20
Usia Harapan Hidup Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

h. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup penduduk. Nilai IPM diperoleh dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur IPM, yakni Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita. Selama periode 2011-2022, nilai IPM beserta empat komponen indikatornya di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan nilai IPM menandakan keberhasilan program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk selama beberapa tahun terakhir. Perkembangan indikator komponen IPM di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Indikator Komponen IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

No.	Indikator IPM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,09	69,18	69,29	69,39	69,54	69,57	69,59	69,64	69,69	69,74	69,79	70,04
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,15	11,22	11,71	11,93	12,22	12,33	12,45	12,55	12,57	12,66	12,74	12,8

R
K
P
D
2
0
2
5

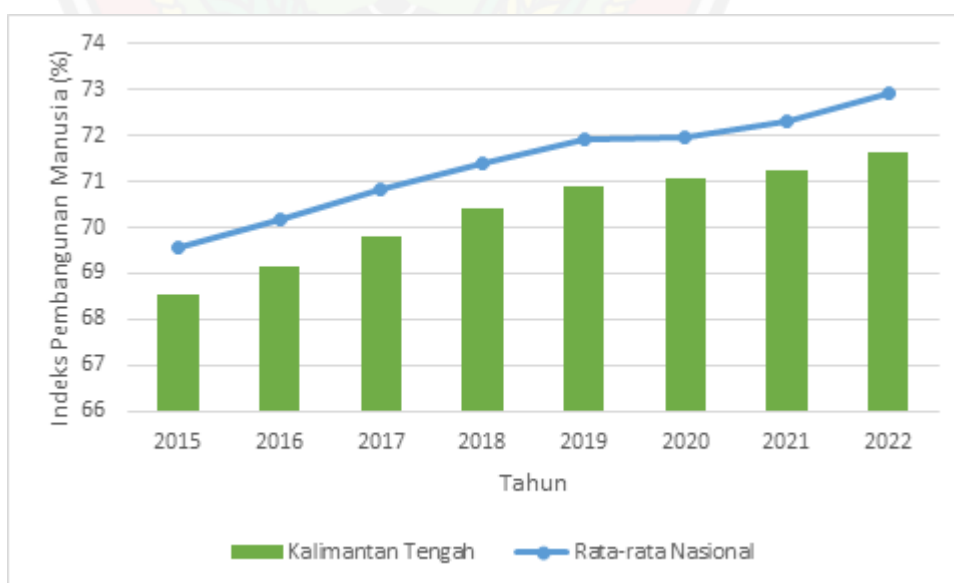




No.	Indikator IPM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,62	7,68	7,73	7,79	7,82	8,03	8,13	8,29	8,37	8,51	8,59	8,68
4.	Pengeluaran per Kapita (Rp)	7.882.800,00	8.517.288,00	9.641.640,00	10.597.728,00	11.049.432,00	12.537.240,00						
5.	IPM	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25	71,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2015-2022 masih berada di bawah nilai rata-rata IPM nasional. Nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 sebesar 68,53%, sedangkan rata-rata IPM nasional pada tahun yang sama mencapai 69,55%. Kondisi ini tidak berubah jauh pada tahun 2022, dengan nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 71,63% dan rata-rata IPM nasional sebesar 72,91%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah masih perlu didorong agar dapat melampaui rata-rata nasional. Secara rinci, perbandingan IPM Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rata-rata IPM nasional disajikan pada gambar berikut.



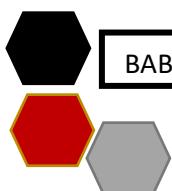
Gambar 2.21

Perbandingan IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Rata-rata IPM Nasional Tahun 2015-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

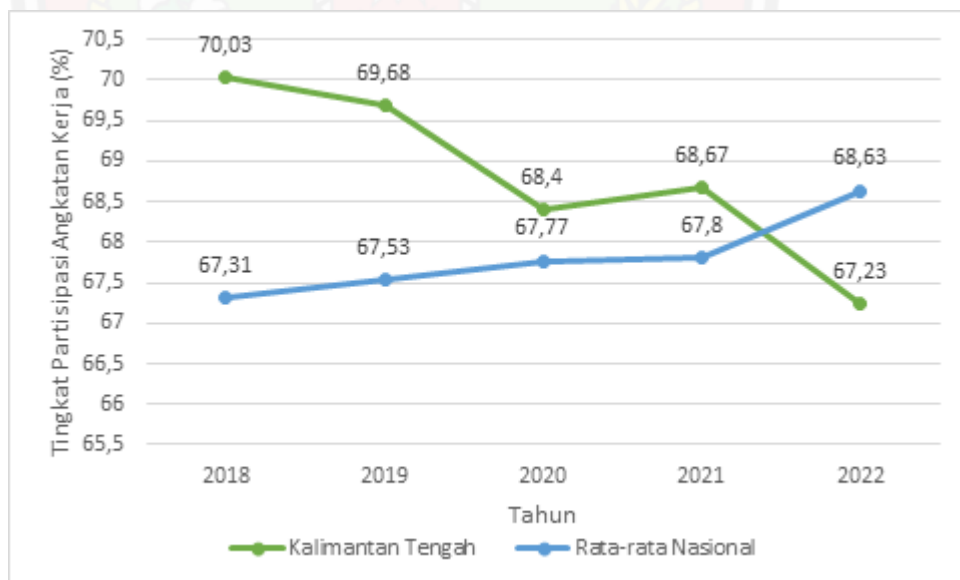
i. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

R
K
P
D
2
0
2
5





Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan sebuah indikator yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam sektor tenaga kerja, termasuk pula yang sedang bekerja dan mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK, maka semakin banyak angkatan kerja di suatu wilayah apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk usia kerja. Nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data tahun 2018, nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 70,03%. Angka ini berada di atas rata-rata TPAK nasional, dengan nilai hanya sebesar 67,31%. Selama tiga tahun berikutnya, nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di atas rata-rata TPAK nasional. Kondisi ini mengalami perubahan pada tahun 2022, dimana nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 67,23% dan rata-rata TPAK nasional berada pada angka 68,63%. Perubahan nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah dan rata-rata TPAK nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.22

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah dan Rata-rata Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

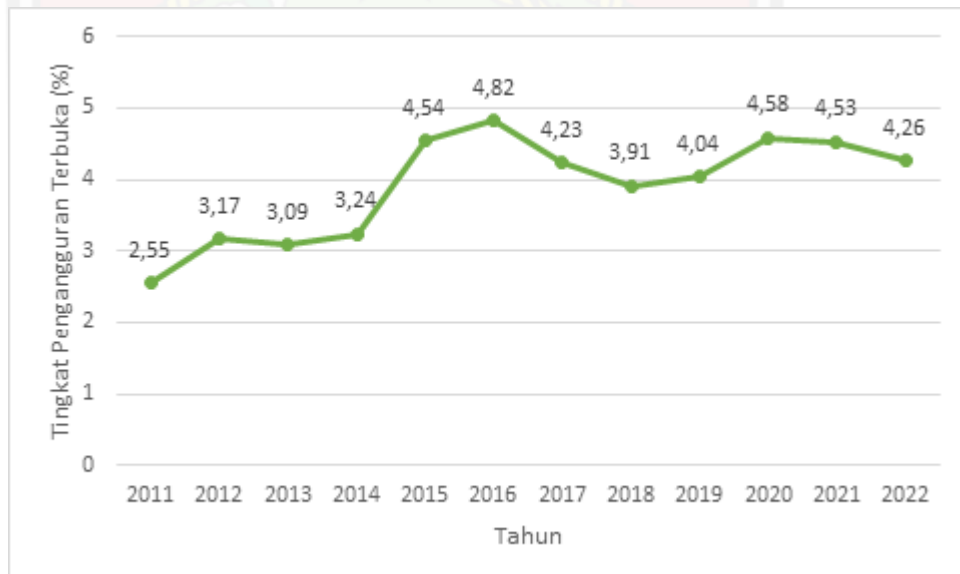
j. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data yang ada, TPT di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami





fluktuasi selama periode 2011 hingga 2022. TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011 sebesar 2,55%. Nilai tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 4,82%. Kemudian, nilai TPT mengalami penurunan hingga mencapai 3,91% pada tahun 2018. Peningkatan nilai TPT kembali terjadi pada periode dua tahun berikutnya hingga mencapai 4,58% pada tahun 2020. Pasca tahun 2020, nilai TPT berangsur mengalami penurunan, hingga pada tahun 2022 nilai TPT mencapai 4,26%. Fenomena peningkatan TPT menandakan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu menyerap semua penduduk angkatan kerja. Detail lengkap fluktuasi nilai TPT di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Error! No text of specified style in document..23
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

k. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu sasaran pembangunan yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015. Merupakan skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui implementasi TPB,





diharapkan pada tahun 2030 penduduk akan merasakan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan sekitar. Terdapat 17 tujuan yang diakomodasi ke dalam TPB, meliputi:

- 1) Mengatasi berbagai bentuk kemiskinan;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendukung pertanian berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua usia;
- 4) Menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan kesempatan belajar sepanjang hayat;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
- 6) Memastikan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan;
- 7) Menyediakan energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan;
- 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pekerjaan yang layak, dan kesempatan kerja;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, industri berkelanjutan, dan inovasi;
- 10) Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antara negara;
- 11) Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan;
- 12) Mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- 13) Mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan pemanfaatan laut dan sumber daya kelautan;
- 15) Pemulihan ekosistem darat dan pengelolaan hutan berkelanjutan;
- 16) Mendorong masyarakat yang damai, inklusif, dan institusi efektif; serta
- 17) Merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

TPB menjadi salah satu acuan yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan





urusan dan kewenangannya, sebanyak 235 indikator TPB menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, angka tersebut masih dapat disesuaikan dengan kekhususan indikator, kondisi geografis, dan ketentuan indikator pada dokumen perencanaan. Provinsi Kalimantan Tengah mengemban sebanyak 204 indikator yang menjadi kewenangannya. Rincian jumlah indikator berdasarkan tujuan TPB yang relevan di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Jumlah Indikator Berdasarkan Tujuan TPB yang Relevan di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator
1.	Mengatasi berbagai bentuk kemiskinan	23
2.	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendukung pertanian berkelanjutan	11
3.	Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua usia	33
4.	Menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan kesempatan belajar sepanjang hayat	10
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan	15
6.	Memastikan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	19
7.	Menyediakan energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan	3
8.	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pekerjaan yang layak, dan kesempatan kerja	19
9.	Membangun infrastruktur tangguh, industri berkelanjutan, dan inovasi	10
10.	Mengurangi ketidakesetaraan di dalam dan antara negara	5
11.	Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan	10
12.	Mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	3
13.	Mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	3
14.	Konservasi dan pemanfaatan laut dan sumber daya kelautan	5
15.	Pemulihan ekosistem darat dan pengelolaan hutan berkelanjutan	6
16.	Mendorong masyarakat yang damai, inklusif, dan institusi efektif	16
17.	Merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	13
Total		204

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kalimantan Tengah





2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Pemahaman yang kuat tentang daya saing daerah dan penerapan strategi yang efektif dalam setiap fokus ini dapat membantu daerah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih tinggi bagi penduduknya. Daya saing daerah memang memiliki peran kunci dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Indikator yang terangkum dan dikelompokkan dalam aspek daya saing daerah dikelompokkan pada tiga (3) fokus besar yaitu: fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.1.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Pengeluaran per Kapita

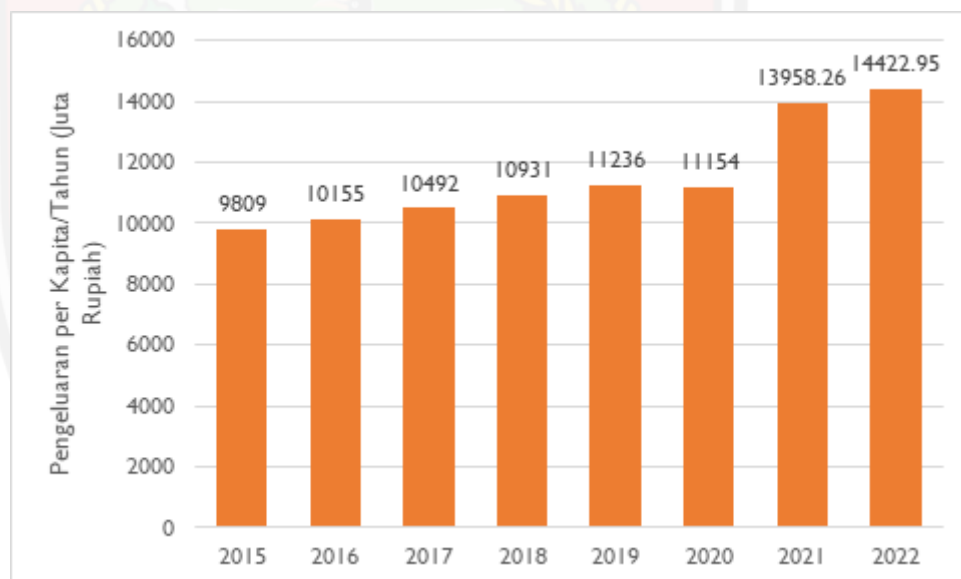
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah salah satu indikator yang penting dalam mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Ini mengindikasikan seberapa besar rata-rata pengeluaran yang dapat diakses oleh setiap anggota rumah tangga dalam suatu wilayah dan dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Menurut Teori Hukum Engel, hubungan antara proporsi pengeluaran makanan dan non makanan dalam pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat. Hukum Engel menyatakan bahwa ketika pendapatan rumah tangga meningkat, maka proporsi pengeluaran untuk makanan akan cenderung menurun sementara pengeluaran untuk non makanan (seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi) akan cenderung meningkat.

Persentase pengeluaran makanan dan non makanan merupakan salah satu indikator dalam





pemahaman kondisi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari kondisi kemiskinan dan kemiskinan terjadi akibat tingkat pendapatan masih di bawah garis kemiskinan, apabila kebutuhan pokok (makanan) belum terpenuhi maka pengeluaran non makanan tidak dapat terjadi atau tidak ada peningkatan. Grafik di bawah merupakan rerata pengeluaran per kapita di Kalimantan Tengah selama periode 2015–2022 yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selain peningkatan yang terjadi, terdapat penurunan pada tahun 2020 ketika Pandemi Covid-19.



Gambar 2.24

Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022

Secara lebih rinci, Tabel 2.4.1 menunjukkan pengeluaran per kapita bulanan menurut kelompok makanan dan non makanan di Provinsi Kalimantan Tengah selama tujuh tahun pada periode 2015–2021. Meskipun terjadi peningkatan nilai pengeluaran pada golongan makanan, namun tren sempat menunjukkan penurunan pada tahun 2017 hingga 2019 yang merupakan indikasi positif, akan tetapi terjadi peningkatan kembali pada dua tahun berikutnya hingga berkontribusi sebesar 51,09 persen pada total pengeluaran per kapita dalam sebulan di tahun 2021. Di sisi lain, pada golongan makanan





terjadi peningkatan nilai pengeluaran diiringi dengan tren peningkatan persentase konsumsi juga. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan dan diversifikasi konsumsi.

Tabel 2.15

Pengeluaran per Kapita Bulanan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahunn 2015-2021.

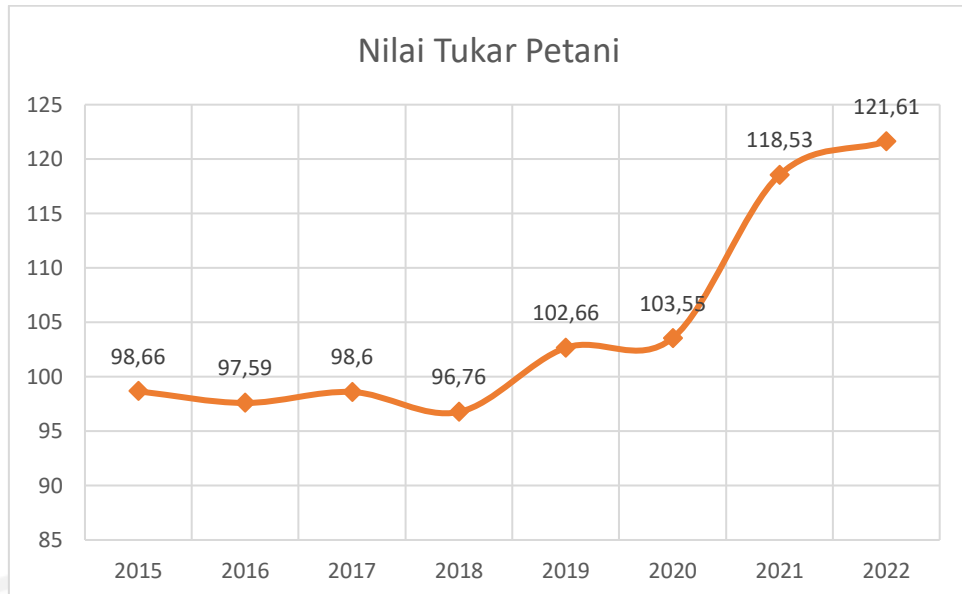
Golongan/Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Makanan	53,74	52,29	54,77	51,66	50,56	50,7	51,09
	494858	546306	621622	632493	650759	675948	713145
Non Makanan	46,26	47,71	45,23	48,34	49,44	49,3	48,91
	425928	498464	513358	591814	636442	657370	682681

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) diukur sebagai rasio antara harga yang diterima oleh petani (HT) dan harga yang dibayar oleh petani (HB). Jika NTP lebih dari 100 artinya petani mengalami surplus, hal ini berarti harga yang mereka terima untuk produk pertanian lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Sebaliknya, jika NTP kurang dari 100, maka petani mendapatkan harga yang lebih kecil dari kenaikan harga konsumsi, sehingga dapat mengakibatkan pendapatan petani yang lebih kecil dari pengeluaran mereka.

Perencanaan dan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam NTP. Adapun grafik di bawah menunjukkan fluktuasi NTP di Kalimantan Tengah selama tujuh (7) tahun sejak 2015 hingga 2022. Pada tahun 2019, NTP Kalimantan Tengah mencapai angka 102,66 yang menandai capaian pertama untuk NTP di atas 100, hal ini berarti petani menerima harga produk yang lebih tinggi dibanding dengan kenaikan harga. Kenaikan NTP secara pesat terjadi dua tahun kemudian di tahun 2021 dengan NTP yang mencapai 118,53 dan pada tahun 2022 menjadi 121,61. Adapun stabilitas dan kenaikan NTP harapannya akan didorong oleh hasil kinerja pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah.





Gambar 2.25

Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021

2.1.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal utama dalam pembangunan suatu wilayah. Manusia berperan sebagai pelaku sekaligus sasaran dalam proses pembangunan. Pembangunan SDM diperlukan untuk meningkatkan kualitas, baik secara fisik, mental, maupun pengetahuan. Semakin tinggi kualitas SDM dapat berdampak positif dalam proses pembangunan sehingga meningkatkan laju pembangunan di suatu daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dilihat menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM). Pengukuran IPM menggunakan tiga dimensi dasar, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai IPM Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, artinya kualitas SDM juga semakin baik. Akan tetapi, nilai ini masih dibawah nilai IPM nasional. Pada tahun 2022, IPM Kalimantan Tengah mencapai 71,63 sedangkan IPM nasional sebesar 72,91.

Indikator lainnya untuk melihat pembangunan SDM adalah tingkat ketergantungan penduduk. Melalui angka ketergantungan penduduk, dapat





dilihat rasio penduduk non produktif yang ditanggung penduduk usia produktif. Berdasarkan data dari BPS, angka ketergantungan di Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2010, angka ketergantungan sebesar 50,4; menurun menjadi 46,2 pada tahun 2015; dan menurun menjadi 43,3 pada tahun 2020. Diproyeksikan akan tetap menurun hingga mencapai 41,4 ditahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan semakin sedikitnya jumlah penduduk usia non produktif dan bertambahnya penduduk usia produktif. Pada tahun 2022, jumlah penduduk usia produktif sebesar 1.936.100 jiwa sedangkan jumlah penduduk non produktif sebesar 804.900. Jumlah produktif yang tinggi menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah mengalami bonus demografi. Bonus demografi akan berdampak positif dan optimal apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, apabila bonus demografi tidak dikelola dengan baik, akan memunculkan masalah kependudukan kedepannya.

2.1.3.3. Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Wilayah

Perencanaan pembangunan wilayah tidak lepas kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang layak, memadai, dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek mendasar dalam proses pembangunan. Kapasitas dan kualitas infrastruktur yang memadai akan memudahkan mobilitas penduduk dan logistik (pergerakan barang) yang mampu membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin baik kuantitas dan kualitas kondisi infrastruktur di wilayah tersebut maka potensi perkembangan wilayahnya semakin tinggi. Oleh karenanya, fokus fasilitas infrastruktur wilayah erat kaitannya dengan urusan pekerjaan umum,





penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, serta pertanahan dan aspek infrastruktur lainnya.

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai fokus pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah pada urusan pekerjaan umum adalah aspek konektivitas, layanan air minum, dan pemenuhan layanan irigasi. Infrastruktur jalan merupakan syarat utama dalam peningkatan konektivitas, namun berdasarkan data yang tersedia, persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik terhadap keseluruhan jalan (jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat) selama enam tahun terakhir (2015-2020) justru menunjukkan trend penurunan, yakni dari 53,35% pada tahun 2015 menjadi 39,53% pada tahun 2020.

2.1.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Fokus ini membahas mengenai kondisi iklim investasi yang sesuai di suatu daerah. Dalam berinvestasi, tentu dibutuhkan iklim kondusif yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk melangsungkan kegiatan ekonomi. Hal ini turut menjadi pertimbangan bagi para investor selain faktor lain seperti sarana dan prasarana wilayah. Untuk mengukur kondisi iklim investasi yang aman bisa menggunakan data kriminalitas dan demonstrasi yang terjadi di Kalimantan Tengah. Semakin tinggi angka kriminalitas atau jumlah kejahatan, menunjukkan semakin rendahnya rasa aman yang dirasakan masyarakat termasuk investor di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah demo di Kalimantan Tengah bertambah pada tahun 2022, begitu pula dengan angka kejahatan yang meningkat di tahun 2020. Tidak ada data yang menyampaikan lebih rinci terkait jenis demonstrasi dan jenis kejadian





kejahatan. Oleh karena itu, penting menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengurangi angka kejahatan serta demonstrasi yang terjadi; serta menyediakan akses bagi masyarakat umum untuk mengetahui frekuensi kejahatan di Kalimantan Tengah.

2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Analisis aspek pelayanan umum dapat memberikan gambaran dan hasil evaluasi terhadap kualitas pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat di suatu wilayah. Aspek pelayanan umum di Provinsi Kalimantan Tengah dirincikan berdasarkan beberapa fokus pembahasan, antara lain fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, fokus layanan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, fokus layanan urusan pemerintahan pilihan, serta fokus layanan fungsi penunjang dan administrasi pemerintahan.

2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menitikberatkan pada indikator-indikator yang merepresentasikan kondisi pelayanan dasar di suatu wilayah. Indikator yang dapat digunakan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.1.4.1.1 Pendidikan

Gambaran umum terkait kondisi layanan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat diamati dari beberapa indikator. Indikator tersebut yakni Angka Kesiapan Sekolah, Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Putus Sekolah, dan Fasilitas Pendidikan.





Secara lengkap, indikator kinerja bidang pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16

Kondisi Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Kesiapan Sekolah	%	77,16	77,2	79,17	78,67	77,14
2.	Angka Melek Huruf	%	99,21	99,22	99,2	99,1	99,12
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,55	12,57	12,66	12,74	12,8
4.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,37	8,51	8,59	8,68
5.	Angka Partisipasi Murni						
	APM SD/ sederajat	%	99,08	99,14	99,11	99,01	99,11
	APM SMP/ sederajat	%	76,7	77,71	78,45	78,8	78,75
	APM SMA/ sederajat	%	53,67	53,82	54,08	54,25	55,69
6.	Angka Partisipasi Kasar						
	APK SD/ sederajat	%	110,02	110,05	108,49	108,21	107,39
	APK SMP/ sederajat	%	95,79	88,74	90,61	91,07	89,7
	APK SMA/ sederajat	%	74,83	82,27	82,29	83,07	83,97
7.	Angka Putus Sekolah						
	APS SD/ sederajat	%	0,25	0,12	0,28	0,15	0,2
	APS SMP/ sederajat	%	0,7	0,34	0,39	0,2	0,21
	APS SMA/ sederajat	%	1,32	0,57	0,45	0,22	0,22
8.	Fasilitas Pendidikan						
	Ruang kelas pendidikan SD/MI dalam kondisi bangunan baik dan rusak ringan	%	91,48	92,27	92,85	100	70,57
	Ruang kelas pendidikan SMP/MTS dalam kondisi bangunan baik dan rusak ringan	%	90,98	92,81	94,26	100	78,14
	Ruang kelas pendidikan SMA/SMK/ MA dalam kondisi bangunan baik dan rusak ringan	%	97,89	97,74	98,04	100	88,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Indikator pertama yang menggambarkan kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah





adalah Angka Kesiapan Sekolah (AKS). Indikator ini merepresentasikan yang digunakan untuk melihat kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat). Kesiapan sekolah merupakan tahapan perkembangan di mana anak sudah memiliki kesiapan mengikuti perubahan/transisi kegiatan dari rumah ke sekolah, dan didukung oleh layanan pendidikan pra-sekolah (KB/TK/PAUD). Nilai AKS di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami peningkatan dan penurunan selama periode 2018-2022. Sebanyak 77,16% penduduk yang bersekolah di kelas 1 SD tercatat memiliki kesiapan sekolah pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 dan 2020, hingga mencapai 79,17% pada tahun 2020. Namun, nilai AKS mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya, sehingga nilainya menjadi 77,14% pada tahun 2022. Fenomena naik turunnya nilai AKS mencerminkan bahwa layanan pendidikan pra-sekolah masih perlu dioptimalkan untuk mendukung tingkat kesiapan sekolah bagi anak-anak yang akan memasuki jenjang SD/ sederajat.

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi indikator kondisi pendidikan berikutnya. Indikator yang menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Kondisi AMH di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami fluktuasi minor selama periode 2018-2022. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa AMH di Provinsi Kalimantan Tengah berada di angka 99,21%. Nilai ini mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, sehingga nilai AMH menjadi sebesar 99,22% pada tahun 2019. Namun, data tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya sedikit penurunan AMH, dimana pada tahun 2020 sebesar 99,20% dan tahun 2021 sebesar 99,10%.





Meskipun demikian, AMH kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga menjadi 99,12%.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu dengan usia yang sesuai terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya. Secara umum, APM di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Nilai APM jenjang SD/ sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mencapai 99,08%. Data tahun 2022 menunjukkan APM jenjang SD/ sederajat mengalami peningkatan menjadi 99,11%. Nilai APM jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2018 sebesar 76,70% dan mengalami peningkatan menjadi 78,75% pada tahun 2022. Fenomena yang sama juga terjadi pada nilai APM jenjang SMA/ sederajat yang mengalami peningkatan dari 53,67% pada tahun 2018 menjadi 55,69% pada tahun 2022. Nilai APM yang belum mencapai 100% menandakan bahwa masih ada penduduk yang menyekolahkan anaknya tidak sesuai dengan usianya. Sementara itu, nilai APM yang semakin berkurang setiap jenjangnya menandakan masih terdapat penduduk usia sekolah yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya, tanpa mempertimbangkan faktor usia. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SD/ sederajat pada tahun 2018 mencapai 110,02% dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 menjadi 107,39%. Sementara itu, nilai APK untuk jenjang SMP/ sederajat dan





SMA/ sederajat cenderung mengalami fluktuasi. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2018 mencapai 95,79%. Nilai tersebut mengalami fluktuasi tiap tahunnya, hingga pada tahun 2022 nilai APK jenjang SMP/ sederajat menjadi 89,7%. Nilai APK untuk jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2018 sebesar 74,63%. Nilai APK jenjang SMA/ sederajat juga mengalami fluktuasi, sehingga nilai APK jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2022 menjadi sebesar 83,97%.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Angka Putus Sekolah (APS). Indikator ini merepresentasikan jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan yang ditempuh karena berbagai faktor. Nilai APS jenjang SD/ sederajat pada tahun 2018 sebesar 0,25%. Nilai tersebut kemudian mengalami fluktuasi dengan tren menurun, sehingga nilai APS jenjang SD/ sederajat pada tahun 2022 mencapai 0,20%. Fenomena serupa juga terjadi pada jenjang SMP/ sederajat, dengan nilai APS tahun 2018 sebesar 0,70% dan tahun 2022 sebesar 0,21%. Nilai APS pada kedua jenjang tersebut sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020, yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan memaksa pelajar untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Implementasi kegiatan belajar mengajar secara daring yang tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan sarana pembelajaran akan menyulitkan sebagian kalangan, sehingga memilih untuk putus sekolah. Nilai APS jenjang SMA/ sederajat memiliki tren penurunan selama periode 2018-2022. Sebanyak 1,32% penduduk usia SMA/ sederajat





mengalami putus sekolah pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2022 nilainya menjadi 0,22%.

Indikator terakhir yang dapat menggambarkan kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah kondisi bangunan ruang kelas pendidikan. Sebagai salah satu prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar, kondisi bangunan ruang kelas yang baik akan mendorong kekondusifan para siswa dalam melakukan pembelajaran. Secara umum, kondisi bangunan ruang kelas untuk jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat mengalami peningkatan selama periode 2018-2021. Bangunan ruang kelas jenjang SD/ sederajat dengan kondisi baik atau rusak ringan pada tahun 2018 sebesar 91,48%. Bangunan ruang kelas jenjang SMP/ sederajat dengan kondisi baik atau rusak ringan pada tahun 2018 sebesar 90,98%. Bangunan ruang kelas jenjang SMA/ sederajat dengan kondisi baik atau rusak ringan pada tahun 2018 sebesar 97,89%. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa kondisi bangunan ruang kelas untuk jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat dengan kondisi baik atau rusak ringan telah mencapai 100%. Namun, berdasarkan audit terbaru melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, persentase bangunan ruang kelas dengan kondisi baik atau rusak ringan untuk semua jenjang mengalami penurunan cukup signifikan. Tercatat persentase bangunan ruang kelas dengan kondisi baik atau rusak ringan untuk jenjang SD/ sederajat sebesar 70,57%, untuk SMP/ sederajat sebesar 78,14%, dan untuk SMA/ sederajat sebesar 88,64%. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian para pemangku





kepentingan, agar para siswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas dengan nyaman dan kondusif.

Tabel 2.17
Capaian dan Target - Provinsi Kalteng

No	INDIKATOR	Capaian 2023	Target 2023	Target 2024	Adjust Target 2024	Target 2025
1	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	66,32	100,00	100,00	BAD	100,00
2	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	62,60	100,00	100,00	BAD	100,00
3	Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	67,01	67,48	69,38		72,03
4	Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	56,34	54,03	56,11	57,06	57,77
5	Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	67,01	66,98	68,22	BAD	70,65
6	Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	55,83	53,23	55,27	56,57	57,30
7	Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	66,29	64,88	67,97	BAD	69,97
8	Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	53,33	64,49	64,49	BAD	64,99
9	Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	60,14	68,76	68,76	BAD	69,26
10	Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	60,41	63,02	65,45	63,27	65,95
11	Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	56,86	60,97	61,97	61,47	62,97
12	Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	55,56	57,77	57,77	BAD	61,71
13	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,72	94,00	94,00	BAD	94,61





14	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	68,37	76,00	76,90	BAD	77,51
15	Indeks Iklim Keamanan SMA	72,26	79,20	81,20	BAD	83,20
16	Indeks Iklim Kebinekaan SMA	74,65	70,77	73,14	76,09	77,52
17	Indeks Inklusivitas SMA	57,96	59,19	62,19	BAD	64,95
18	Indeks Iklim Keamanan SMK	70,97	78,70	80,70	BAD	81,20
19	Indeks Iklim Kebinekaan SMK	72,86	69,02	71,42	74,12	75,37
20	Indeks Inklusivitas SMK	57,05	57,06	59,22	BAD	61,24
21	Indeks Iklim Keamanan SDLB	74,55	83,83	83,83	BAD	84,33
22	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	68,76	70,47	72,63		73,63
23	Indeks Inklusivitas SDLB	54,14	61,90	63,90	62,40	64,90
24	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	70,89	80,84	81,84	81,34	82,84
25	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	66,39	66,81	69,04	BAD	72,65
26	Indeks Inklusivitas SMPLB	69,67	63,17	66,47	70,71	71,75
27	Indeks Iklim Keamanan SMALB	72,06	83,28	85,28	BAD	86,28
28	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	68,10	66,43	68,61	BAD	70,27
29	Indeks Inklusivitas SMALB	66,70	63,87	67,23	BAD	70,09

2.1.4.1.2 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kondisi kesehatan yang baik dapat menjadi landasan untuk menjalani kehidupan dengan layak. Meskipun pemenuhan kebutuhan terhadap kesehatan merupakan tanggung jawab setiap warganegara, pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin setiap warganegara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Hasil analisis terhadap pelayanan wajib di bidang kesehatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Kondisi Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2023





No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,64	69,69	73,10	73,14	73,34	73,54
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 lahir hidup	7,6	6,2	6,6	9,2	8,6	12,69
3.	Angka Kematian Balita	Per 1.000 lahir hidup	8,3	6,6	7	9,8	9	TAD
4.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 lahir hidup	165	166	140	212	148	179,3
5.	Stunting	%	34,04	32,30	16,70	27,4	26,9	23,5
6.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	84,73	84,49	80,36	88,14	88,45	TAD
7.	Persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah	%	80,12	82,59	79,27	79,28	49,52	TAD
8.	Cakupan pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan	%	44,11	50,48	52,98	55,98	55,26	TAD
9.	Angka Pengobatan Lengkap TBC	%	TAD	84	55,4	79	81	TAD
10.	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	%	TAD	60	0,7	7	31,5	TAD
11.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	TAD	64,79	65,52	66,58	67,72	TAD
12.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Rasio	1 : 102.316	1 : 104.418	1 : 102.692	1 : 100.081	1 : 97.896	TAD
13.	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Rasio	29,9	31,5	35,1	45,4	38,2	TAD
14.	Rasio dokter gigi per 75.000 penduduk	Rasio	0,3	0,3	0,38	0,41	0,41	TAD
15.	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Rasio	238,3	193,0	197,6	202,4	149,2	TAD

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 (diolah)





Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan sebuah indikator yang menunjukkan rata-rata usia yang mungkin dicapai oleh penduduk baru lahir di suatu wilayah. Data UHH di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami peningkatan sepanjang periode 2018 hingga 2023. UHH Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mencapai 69,64 tahun, dan meningkat menjadi 73,54 tahun pada 2023. Peningkatan UHH ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan dalam akses layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, nilai UHH Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah rata-rata UHH nasional. Rata-rata UHH nasional pada tahun 2011 telah mencapai 70,01 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 71,85 tahun. Untuk itu, diperlukan upaya tambahan untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat melampaui rata-rata UHH nasional.

Indikator layanan bidang kesehatan selanjutnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Sesuai dengan target yang ditetapkan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 3 Target 2, yang ingin mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Kondisi AKB di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2018-2023 mengalami fluktuasi. Nilai AKB pada tahun 2018 sebesar 7,6 bayi meninggal dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,2 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang





berdampak derajat kesehatan masyarakat, nilai AKB mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 6,6 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023, nilai AKB di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat mencapai 12,69 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Fenomena serupa dengan AKB juga terjadi pada indikator Angka Kematian Balita (AKABA). AKABA menggambarkan jumlah balita yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini berkaitan langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKABA kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Kondisi AKABA di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2018-2020 mengalami fluktuasi. Nilai AKABA pada tahun 2018 sebesar 8,3 balita meninggal dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,6 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang berdampak derajat kesehatan masyarakat, nilai AKABA mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 7 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Nilai AKABA pada tahun 2022 tercatat sebesar 9 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Indikator berikutnya yang menggambarkan kondisi kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI merupakan sebuah indikator yang merepresentasikan derajat kesehatan perempuan. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk





kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan setiap 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa nilai AKI selama periode 2018-2020 cenderung mengalami penurunan. Nilai AKI pada tahun 2018 sebesar 165 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut sedikit meningkat pada tahun 2019 menjadi 166 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup, dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 140 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Nilai AKI kembali mengalami lonjakan pada tahun 2021 hingga menjadi 212 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 148 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada TPB Tujuan 3 Target 1, nilai AKI Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di atas target tersebut, yakni di bawah 70 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator kesehatan makro yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara global. Penurunan AKI menunjukkan bahwa adanya peningkatan derajat kesehatan perempuan di kalangan masyarakat.

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multifaktorial dan bersifat antargenerasi. Secara umum, permasalahan *stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung menurun selama periode 2018-2020. Data tahun 2018 menunjukkan prevalensi *stunting* sebesar 34,04%. Nilai tersebut menurun menjadi 32,30% pada tahun 2019 dan 16,70% pada tahun 2020.

Sebagai catatan, untuk data tahun 2020





diambil dari aplikasi EPPBGM dengan tingkat keterisian sebesar 59,9%. Nilai prevalensi stunting yang masih cukup tinggi perlu menjadi perhatian pemerintah, karena permasalahan gizi dapat menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak.

Dua indikator berikutnya berkaitan dengan ibu hamil, yakni cakupan kunjungan Ibu hamil K4 dan persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 menggambarkan persentase ibu hamil yang melakukan paling sedikit empat kali kunjungan selama masa kehamilan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Melalui analisis cakupan kunjungan ibu hamil K4 diharapkan dapat mengetahui gambaran tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah dan kemampuan manajemen program kesehatan ibu dan anak (KIA). Berdasarkan data yang tersedia, diketahui cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi tiap tahun. Sebanyak 84,73% ibu hamil melakukan kunjungan K4 pada tahun 2018. Nilai tersebut kemudian anjlok pada tahun 2020 menjadi 80,36% akibat pandemi Covid-19. Periode tahun 2021 dan 2022 menunjukkan adanya peningkatan kembali cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Provinsi Kalimantan Tengah, hingga mencapai 88,45% pada tahun 2022.

Persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah menggambarkan upaya layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia atau kekurangan darah. Anemia pada ibu hamil akan berdampak terhadap tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak.





Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa ibu hamil memerlukan setidaknya 90 tablet tambah darah untuk dikonsumsi selama masa kehamilan. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2018-2022 cenderung menurun. Sebanyak 80,12% ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 82,59%. Namun, pasca pandemi Covid-19, persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah mengalami penurunan drastis, hingga puncaknya pada tahun 2022 hanya sebanyak 49,52% ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah. Penurunan signifikan ini perlu menjadi perhatian serius, karena anemia pada ibu hamil memiliki dampak yang signifikan bagi ibu dan anak yang dikandung. Indikator berikutnya yang dapat menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah cakupan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada anak usia <6 bulan. Pemberian ASI eksklusif menjadi penting dalam proses tumbuh kembang anak, karena ASI yang diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayi untuk tumbuh dan berkembang. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan selama periode 2018-2022. Sebanyak 44,11% ibu memberikan ASI eksklusif kepada anak sampai usia 6 bulan pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 55,98%. Namun, persentase tersebut mengalami sedikit





penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 55,26%. Persentase pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan ini cenderung masih rendah, sehingga diperlukan upaya preemtif dan penyuluhan bagi ibu hamil dan melahirkan terhadap pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi anak usia <6 bulan.

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Salah satu kegiatan Pengendalian Penyakit TB Paru yang sasarannya pada penderita adalah pemberian pengobatan lengkap TB bagi pasien. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pemberian pengobatan lengkap TB bagi pasien mengalami fluktuasi selama periode 2019-2022. Sebanyak 84,00% pasien menerima pemberian pengobatan lengkap TB pada tahun 2019. Akibat pandemi, pemberian pengobatan lengkap TB mengalami penurunan hingga menjadi 55,40%. Pemberian pengobatan lengkap TB pasca pandemi kembali mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2022 persentasenya menjadi 81,00%.

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk berjenis *Aedes aegypti*. Penyakit ini masih menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat di Indonesia. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kejadian DBD adalah angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena penyakit DBD. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa angka kesakitan DBD mengalami fluktuasi yang berkorelasi dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa dari

100.000 penduduk terdapat 60 orang yang





mengeluhkan mengalami DBD. Hal ini berkorelasi dengan fakta bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mengalami KLB DBD pada tahun tersebut. Angka kesakitan DBD menurun drastis pada dua tahun berikutnya, dengan nilai sebesar 0,7 dari 100.000 penduduk pada tahun 2020 dan 7 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Adapun angka kesakitan DBD pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 31,5 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan DBD yang mengalami fluktuasi menandakan bahwa potensi terjadinya KLB DBD masih sangat besar, sehingga memerlukan upaya preventif dan kesiapsiagaan untuk menangani kejadian tersebut.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi layanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak. Campak merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus yang termasuk dalam genus *Morbillivirus* dari keluarga *Paramyxoviridae* dan sering menyerang anak-anak. Apabila tidak ditangani serius, campak akan menyebabkan munculnya komplikasi penyakit seperti pneumonia, kerusakan pada mata, dan gangguan sistem pencernaan. Salah satu bentuk pencegahan penyakit campak adalah dengan pemberian imunisasi campak. Imunisasi campak diberikan pertama kali pada saat anak berusia 9 bulan. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami tren peningkatan. Data tahun 2019 menunjukkan sebanyak 64,79% anak usia 1 tahun telah menerima imunisasi campak. Nilai tersebut mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2022 mencapai 67,72%. Mengingat persentase





tersebut masih jauh dari 100%, pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk mengikuti imunisasi campak agar mampu menjamin kesehatan anak. Selain memperhatikan kondisi pelayanan kesehatan, kondisi sarana dan prasarana kesehatan juga perlu untuk dianalisis. Terdapat setidaknya empat indikator yang menggambarkan kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi per 75.000 penduduk, dan rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk menggambarkan jumlah beban layanan yang ditanggung oleh rumah sakit. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami fluktuasi. Jumlah rumah sakit yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 sebesar 26 unit. Masing-masing unit rumah sakit tersebut rata-rata melayani sebanyak 102.316 penduduk. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan adanya peningkatan jumlah penduduk tanpa diiringi penambahan jumlah rumah sakit, dengan rasio sebanyak 1:104.418. Adanya penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020 menyebabkan rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami penurunan menjadi 1:102.692. Rasio rumah sakit per satuan penduduk kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dengan adanya penambahan jumlah rumah sakit yang tersedia, dengan nilai 1:100.081 pada tahun 2021 dan 1:97.896 pada tahun 2022. Penurunan beban layanan rumah sakit diharapkan mampu mendorong optimalisasi pelayanan rumah sakit.





Rasio dokter per 100.000 penduduk menggambarkan beban yang dimiliki oleh seorang dokter untuk melayani penduduk. Secara umum, terjadi penurunan beban layanan dokter yang ditandai dengan peningkatan rasio dokter per 100.000 penduduk. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 29 hingga 30 dokter, dengan rasio sebesar 29,88. Beban dokter mengalami penurunan, sehingga rasio dokter per 100.000 penduduk menjadi 45,44 pada tahun 2021, yang diartikan tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 45 dokter. Namun, beban dokter kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan rasio 38,23 atau tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 38 dokter. Rasio dokter per 100.000 penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah jauh di bawah rasio ideal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), yakni 100 dokter untuk tiap 100.000 penduduk.

Rasio dokter gigi per 75.000 penduduk menggambarkan beban kerja seorang dokter gigi untuk melayani penduduk. Secara umum, terjadi penurunan beban layanan dokter gigi yang ditandai dengan peningkatan rasio dokter gigi per 75.000 penduduk. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa rasio dokter gigi per 75.000 penduduk pada tahun 2018 sebesar 3,02. Angka tersebut menandakan bahwa tiap 75.000 penduduk dilayani oleh sekitar 3 dokter gigi. Nilai tersebut mengalami peningkatan setiap tahun, hingga pada tahun 2022 rasio dokter gigi per 75.000 penduduk sebesar 4,08 atau tiap 75.000 penduduk dilayani oleh 4 dokter gigi. Rasio dokter gigi terhadap penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah jauh di bawah rasio ideal WHO, yakni 1 dokter hanya melayani 2.000 penduduk. Beban layanan dokter





gigi yang terlampau tinggi dikhawatirkan akan mengurangi kualitas layanan yang diberikan.

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk menggambarkan beban kerja seorang tenaga kesehatan untuk melayani penduduk. Secara umum, rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada tahun 2018 sebesar 238,31, atau tiap tenaga kesehatan melayani 238 penduduk. Rasio tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga menjadi 193,01 sebelum akhirnya mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada tahun 2021 sebesar 202,43 atau tiap tenaga kesehatan melayani sekitar 202 penduduk. Sementara itu, rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 149,22. Apabila dibandingkan dengan rasio ideal tenaga kesehatan per satuan penduduk yang ditetapkan WHO, yakni 2,5 tenaga kesehatan per 1.000 penduduk atau 1 tenaga kesehatan per 400 penduduk, maka rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah sudah berada pada kondisi ideal.

2.1.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur yang layak, memadai, dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek mendasar dalam suatu proses pembangunan, selain itu kapasitas dan kualitas infrastruktur yang memadai akan memudahkan mobilitas penduduk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

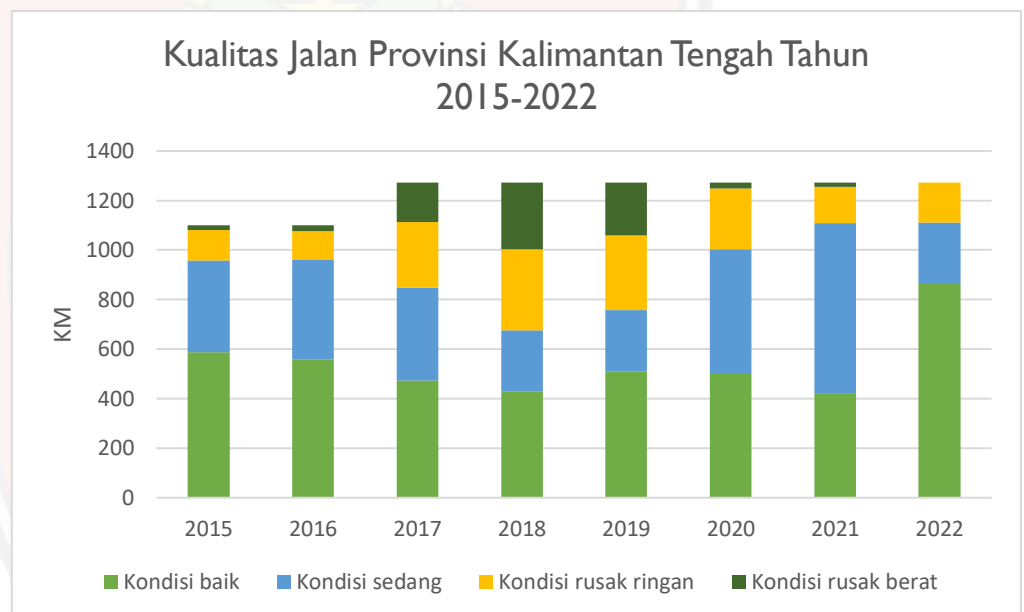
Bina Marga

Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk mempermudah mobilitas penduduk dan pergerakan logistik barang. Jalan dan jembatan





merupakan prasarana utama yang mampu menembus keterisolasian wilayah sehingga wilayah satu dengan yang lain dapat terkoneksi membentuk suatu jaringan struktur ruang yang mampu mempercepat kegiatan dan laju ekonomi suatu wilayah. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang mengacu pada peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Panjang jalan provinsi menurut kualitas kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.26

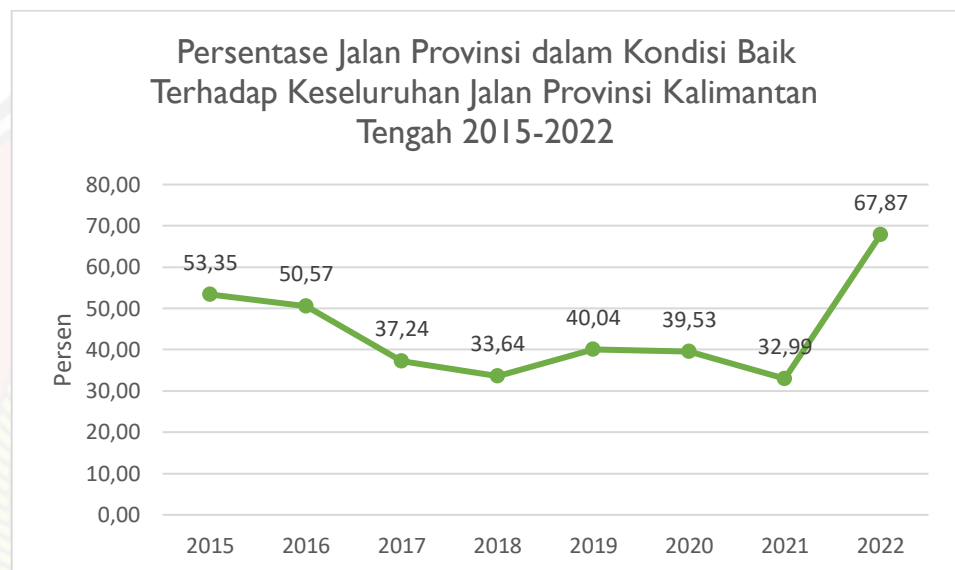
Kualitas Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (diolah)

Total keseluruhan panjang jalan provinsi provinsi pada tahun 2022 adalah 1.272,06 km di mana dalam empat tahun terakhir sudah menunjukkan tren kenaikan total jalan provinsi dalam kondisi baik. Total jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat dalam tiga tahun terakhir juga telah mengalami tren penyusutan sehingga infrastruktur jalan kewenangan provinsi di Kalimantan Tengah tergolong baik dan berpotensi positif terhadap perencanaan pembangunan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa persentase





jalan provinsi dalam kondisi baik terhadap keseluruhan jalan (jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat) selama lima tahun terakhir masih berada di bawah 50% yakni 37,24% pada tahun 2017 dan menjadi 32,99% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 tercatat kondisi jalan provinsi dalam kondisi baik mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 67,87%.



Gambar 2.27

Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik Terhadap Keseluruhan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (diolah)

Cipta Karya

Akses terhadap air minum layak merupakan sarana dasar yang tidak kalah penting dari aspek pelayanan umum wajib lainnya. Provinsi Kalimantan Tengah selama delapan tahun terakhir (2014-2022) mengalami tren peningkatan yang konsisten terkait rumah tangga yang memiliki akses air minum layak yang mengindikasikan adanya pembangunan yang positif terhadap aspek layanan air minum. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak mengalami peningkatan dari 56,02% pada tahun 2014 meningkat menjadi 77,01% persen tahun 2022. Namun, meskipun mengalami tren peningkatan yang konsisten pada tiap tahunnya, ternyata capaian angka akses air minum layak Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 masih jauh di bawah capaian nasional. Persentase





rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dalam skala nasional tahun 2022 adalah sejumlah 91,05%. Bahkan secara nasional, Kalimantan Tengah masih menduduki urutan ke-31 dari 34 provinsi di Indonesia.



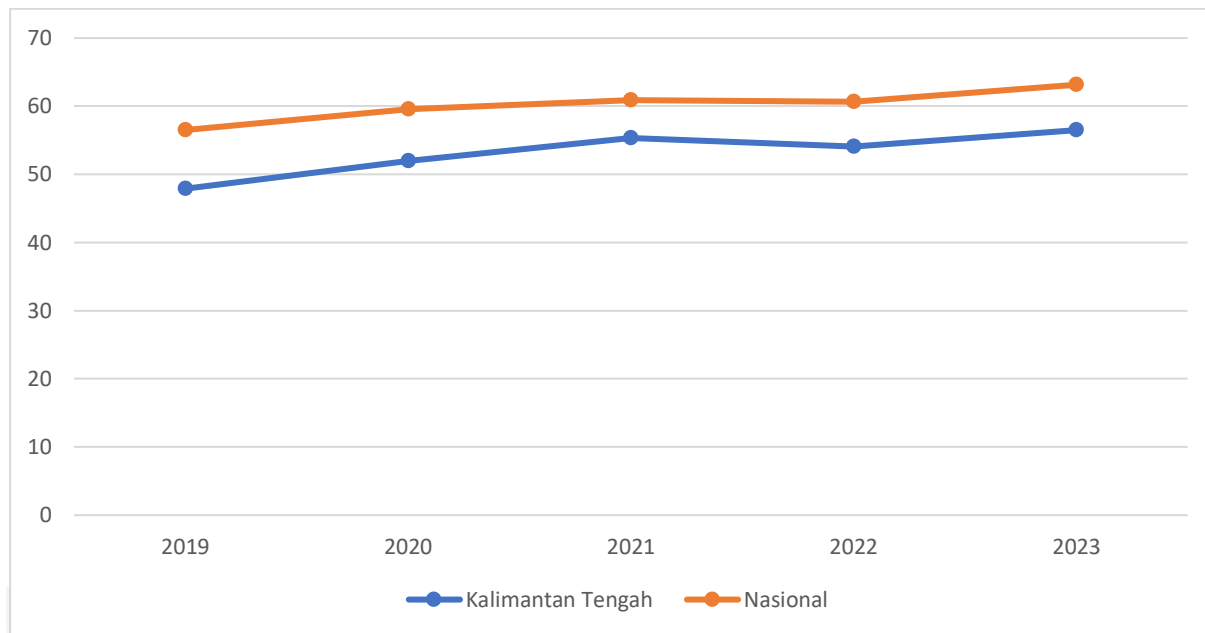
Gambar 2.28

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

2.1.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan data yang di olah dari BPS, Susenas tahun 2020, jumlah RLH di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 366.112 Unit (51,97%) yang mengindikasikan masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH). Data tersebut dihitung berdasarkan 4 indikator yakni ketahanan bangunan, luasan bangunan, akses air minum dan akses sanitasi. Persentase RLH ini didapat berdasarkan rumus jumlah RLH dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Indonesia tahun 2023 sebesar 63,15%. Oleh karenanya capaian RLH di Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 tahun terakhir (2019-2023) masih berada di bawah capaian nasional.



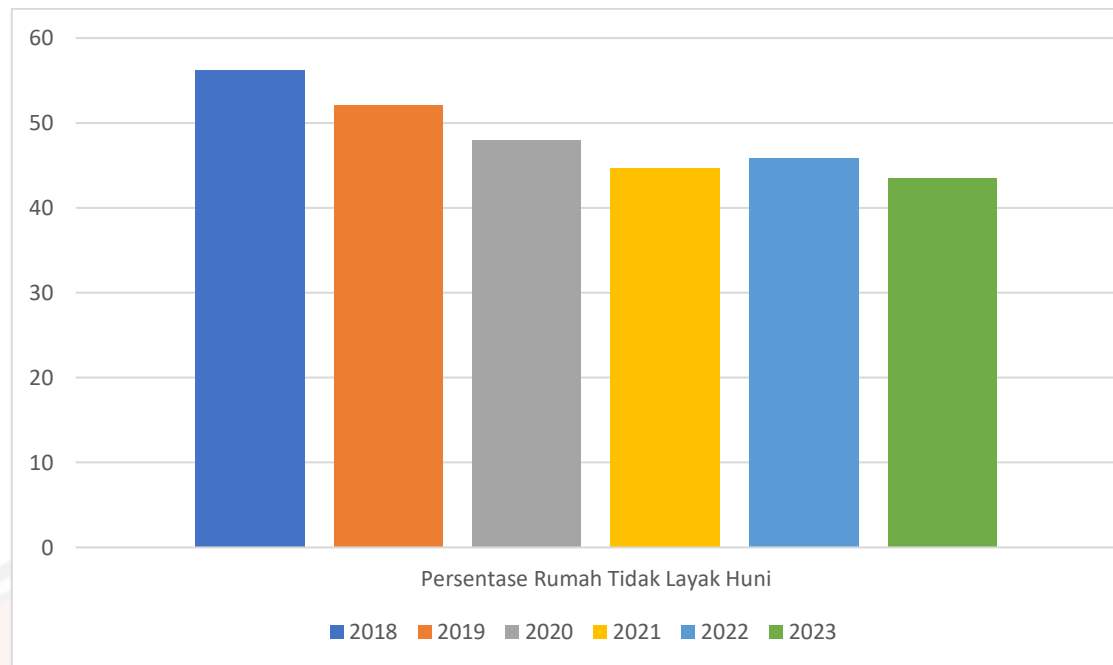


Gambar 2.29

Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 201-2029
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan data pada gambar di bawah ini, diketahui bahwa persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Tengah cukup fluktuatif. Jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari tahun 2019-2021 dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022. Jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri mencapai 325.892 unit (45,93%) pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 312.409 unit (44,66%). Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 43,51%. Secara keseluruhan jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari tahun 2019.

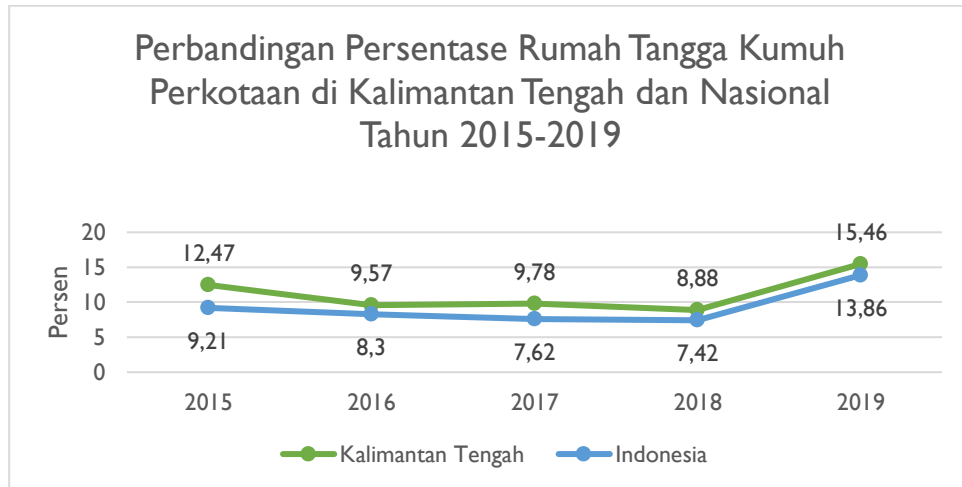




Gambar 2.30
Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Tengah Tahun 2018-2023

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tumbuh secara spontan di suatu wilayah khususnya di wilayah perkotaan dalam lingkungan yang kurang sehat dan kurang didukung oleh Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) yang memadai seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, dan jalan akses darurat. Persentase rumah tangga kumuh di kawasan perkotaan memiliki trend cenderung meningkat mencapai 15,46% di tahun 2019. Berdasarkan data dari BPS Nasional, tingkat persentase rumah tangga kumuh kawasan perkotaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) masih berada di atas persentase nasional yang mengindikasikan bahwa luasan kawasan kumuh di area perkotaan di Provinsi Kalimantan Tengah harus menjadi salah satu fokus pembangunan agar pertumbuhan kawasan kumuh cenderung menurun.





Gambar 2.31

Perbandingan Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, terlihat bahwa hingga tahun 2022, tingkat kesesuaian pembangunan dalam pemanfaatan ruang (RTRW) mencapai 90,00%. Angka ini terus mengalami peningkatan stabil di enam tahun terakhir, meningkat secara konsisten dari 85% di tahun 2017 menjadi 90% di tahun 2022. Oleh karenanya, kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah masih tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga penggunaan ruang masih sesuai pada kapasitas dan daya dukung yang tersedia. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah dan masyarakat berhasil mengimplementasikan aturan yang terkandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan berhasil mengendalikan tata ruang. Nilai kesesuaian ruang ini merupakan hasil dari kombinasi dari keterwujudan dan keselarasan dalam pemanfaatan ruang, yang pada dasarnya terdiri dari aspek struktur dan pola ruang.





Gambar 2.32

Ketaatan Terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (diolah)

Berkaitan dengan akses sanitasi layak di kawasan permukiman, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak cenderung memiliki trend naik/meningkat. Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun terakhir (2017-2022) mengalami peningkatan tren terkait rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Konsep sanitasi layak sejak tahun 2018 mengalami perubahan yang mengedepankan aspek dasar kelayakan prasarana dasar kesehatan yaitu memiliki fasilitas BAB sendiri/bersama, kloset leher angka dan TPAT tangka septik/IPAL. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami peningkatan dari 50,97% pada tahun 2017 meningkat menjadi 74,33% persen tahun 2022. Namun, capaian angka akses sanitasi layak Kalimantan Tengah tahun 2022 ternyata masih jauh di batas nasional. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dalam skala nasional tahun 2022 adalah sejumlah 80,92%. Bahkan





Kalimantan Tengah menduduki urutan ke-29 dari 34 provinsi di Indonesia.



Gambar 2.33

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

2.1.4.1.5 Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang ini membahas permasalahan yang menyangkut ketertiban umum serta upaya perlindungan yang dilakukan kepada masyarakat. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kejahatan yang dilaporkan, dengan total terdapat 2.629 kasus. Semakin banyak kejahatan yang terjadi menimbulkan rasa tidak aman dan cemas bagi masyarakat. Penyelesaian kejahatan belum mencapai 100% dan juga menurun daripada tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, persentase penyelesaian kejahatan mencapai 87,19% sementara pada tahun 2020 menurun menjadi 78,89%. Angka ini menjadi perhatian bagi pemerintah agar dapat menyelesaikan kejahatan yang dilaporkan, serta memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku kejahatan.

Penurunan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum juga dilihat dari berkurangnya jumlah Linmas atau petugas perlindungan masyarakat.





Linmas berperan dalam memelihara kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta turut terlibat dalam penanganan bencana. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah demo pada tahun 2022. Demo terjadi karena belum terselesaikannya permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah; belum terakomodirnya hak-hak politik masyarakat; serta sebagai media penyampaian tuntutan atas kekurangan dalam kinerja pemerintah yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Tabel 2.19

Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kejahatan yang dilaporkan	5.699	2.444	2.629	TAD	TAD
Rasio penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk	138	94	62	TAD	TAD
Persentase penyelesaian kejahatan	72,19	87,19	78,89	TAD	TAD
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	TAD	TAD	267:598	270:619	274:621
Jumlah Linmas	49.101	56.032	55.648	58.856	52.032
Cakupan patroli petugas Satpol PP	TAD	20	20	25	30
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	13062	15212	14858	15904	14122
Jumlah Demo	TAD	5	5	7	10
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	71,27	81,16	74,91	73,17	79,3

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

2.1.4.1.6 Sosial

Penanganan urusan sosial berhubungan dengan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Amanat ini sesuai disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai situasi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga





negara sehingga dapat menjalani kehidupan dengan layak dan mampu mengembangkan diri serta menjalankan peran sosialnya. Ada 20 jenis PMKS yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu korban bencana alam, korban bencana sosial, gembel dan pengemis (gepeng), penderita HIV/AIDS, pecandu narkoba, fakir miskin, anak terlantar, anak korban kekerasan di lingkungan rumah tangga, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat, anak korban kekerasan seksual, lansia terlantar, komunitas adat terpencil, penyandang tuna netra, penyandang tuna wicara-rungu, penyandang tuna daksa, penyandang tuna grahita, penyandang cacat fisik, tuna susila, bekas narapidana, dan korban penyalahgunaan NAPZA.

Tabel 2.20

Capaian Indikator Bidang Sosial

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	144.777	167.607	226.903	226.518	420.553
Persentase PMKS yang tertangani	52,25	96,05	106,15	47,64	61,71
Rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan	100	100	100	100	100
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	52,25	96,05	106,15	47,64	61,71

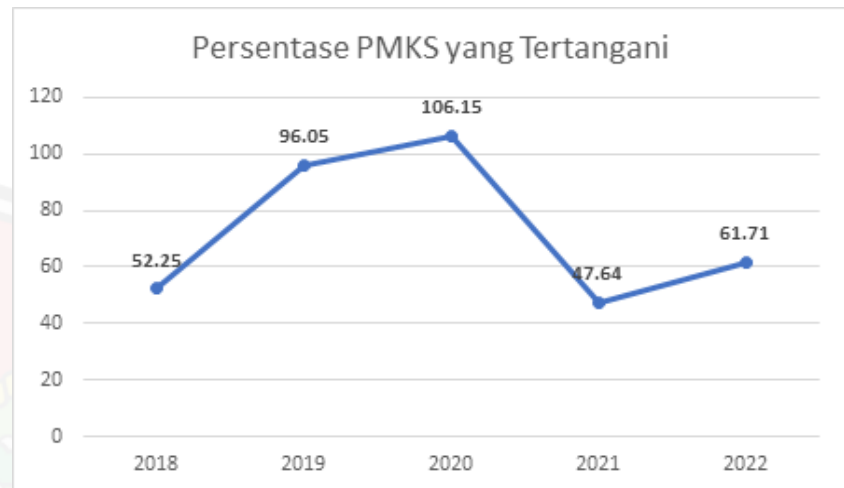
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Dokumen RPJMD Kalimantan Tengah

Jumlah PMKS di Provinsi Kalimantan Tengah berfluktuasi setiap tahunnya. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 420.553 PMKS, sementara pada tahun 2021 berjumlah 226.518 PMKS. Akan tetapi, dari keseluruhan PMKS tersebut, belum sepenuhnya tertangani oleh





pemerintah. Persentase PMKS yang tertangani juga cenderung meningkat kecuali pada tahun 2021 yang menurun menjadi 47,64%. Kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 61,71%. Grafik persentase PMKS yang tertangani dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.34

Persentase PMKS yang Tertangani

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Provinsi Kalimantan Tengah juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjabarkan target pada masing-masing jenis pelayanan SPM bidang sosial. Terdapat lima jenis pelayanan SPM bidang sosial, yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di dalam panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.





2.1.4.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengukuran pemberdayaan perempuan di suatu wilayah menggunakan indeks pembangunan gender, indeks ketimpangan gender, dan indeks pemberdayaan gender. Indeks pembangunan gender merupakan indikator yang membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2019-2023, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, IPG menurun dari tahun 2019. Sementara, pada tahun 2022-2023, IPG meningkat melebihi kondisi awal pada tahun 2019. IPG pada tahun 2023 adalah 89,49.

Indeks ketimpangan gender (IKG) menunjukkan kesenjangan gender pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan antargender pada ketiga dimensi tersebut. Selama tahun 2019-2023, IKG mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2023, terjadi peningkatan IKG dari tahun sebelumnya. IKG pada tahun 2023 adalah 0,541 yang sama dengan IKG pada tahun 2019.

Sementara, indeks pemberdayaan gender (IDG) menunjukkan partisipasi atau peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara terus-menerus pada tahun 2020-2022. IDG Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah 81,98, turun poin dari tahun 2019.

Tabel 2.21

Indikator Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,09	89,03	88,79	89,2	89,49
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,541	0,547	0,537	0,526	0,541
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,2	82,41	82,08	82	81,98

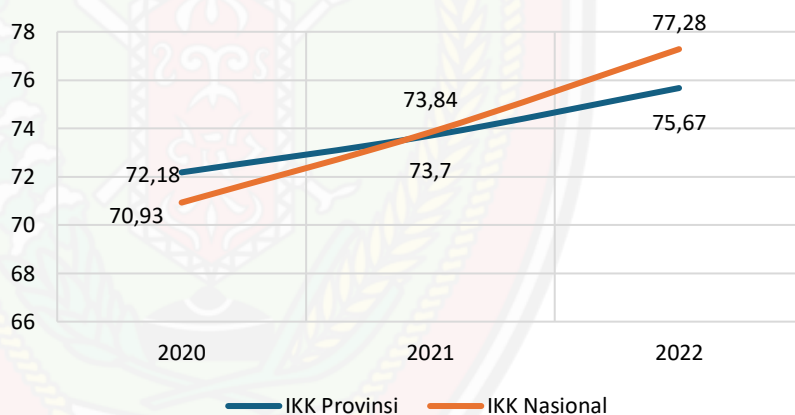
Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2024





Keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat. Pembangunan keluarga di Indonesia diukur dengan beberapa indikator, salah satunya adalah Indeks Kualitas Keluarga (IKK). IKK menunjukkan keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan perlindungan anak dan kesetaraan gender.

IKK diukur menggunakan dimensi kualitas legalitas-struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial-psikologi, dan kualitas ketahanan sosial-budaya. IKK Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022, IKK Provinsi Kalimantan Tengah meningkat 3,4 menjadi 75,67. Nilai tersebut berada di bawah nilai IKK nasional, yaitu 77,28.



Gambar 2.35

Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2022

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

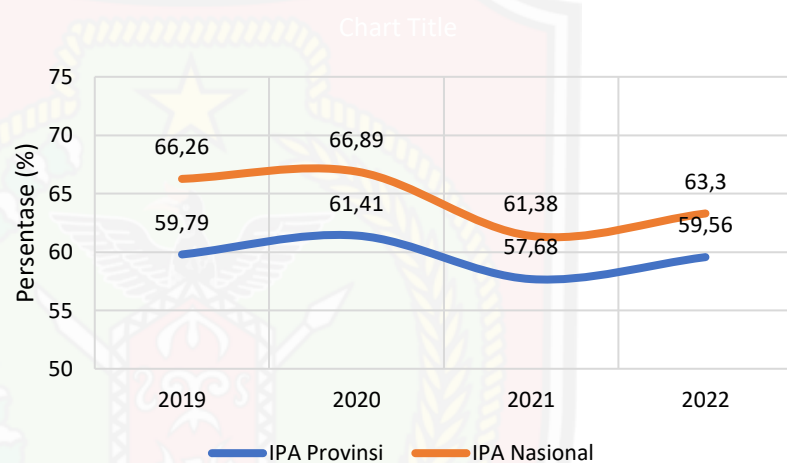
Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia. Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin baik kondisi daerah dalam melakukan perlindungan terhadap anak. IPA menggunakan indikator hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan





budaya, serta perlindungan khusus dalam penilaiannya.

IPA Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Hal tersebut sejalan dengan tren IPA nasional pada periode yang sama. Pada tahun 2020, IPA meningkat 1,62 dari tahun 2019. Pada tahun 2022, IPA Provinsi Kalimantan Tengah meningkat kembali setelah turun pada tahun sebelumnya walaupun belum melampaui capaian IPA tahun 2019.



Gambar 2.36

Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023 dan 2022

2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menitikberatkan pada indikator-indikator yang merepresentasikan kondisi pelayanan umum non-dasar di suatu wilayah. Indikator yang dapat digunakan yakni ketenagakerjaan, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan.

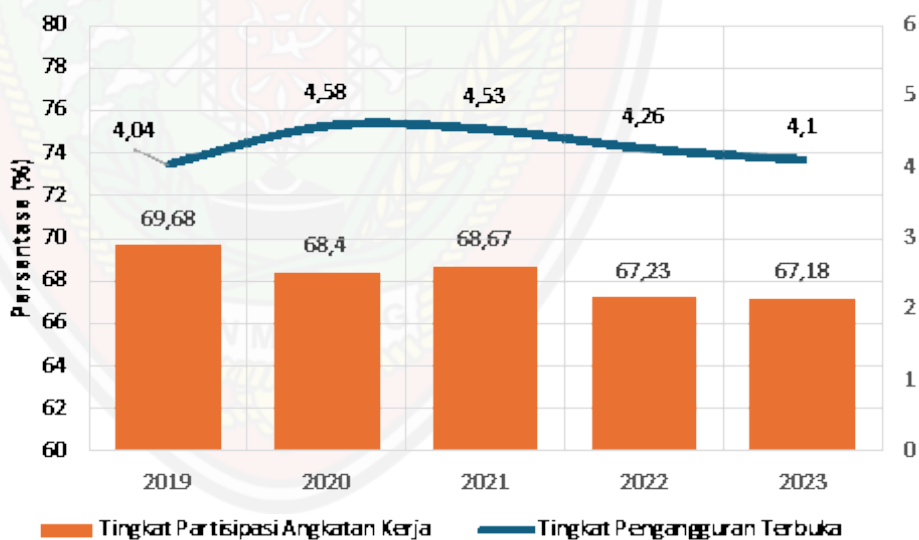




2.1.4.2.1 Tenaga Kerja

Penduduk usia produktif adalah kelompok usia yang menjadi penggerak ekonomi wilayah. Semakin tingginya penduduk usia produktif yang bekerja, akan meningkat produktivitas suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Tengah terus menurun pada periode 2019-2023. Pada tahun 2019, TPAK Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 69,98% kemudian menjadi 67,18% pada tahun 2023.

Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami tren peningkatan pada tahun 2019-2023. Peningkatan TPT secara cukup drastis terjadi pada tahun 2020 yang merupakan akibat dari pandemi Covid-19 menjadi 4,58%. Pada tahun 2021-2023, TPT terus menurun walaupun belum menurun hingga kondisi awal sebelum pandemi Covid-19.



Gambar 2.37

Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

2.1.4.2.2 Pangan

Kebijakan pangan dan keberhasilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyediakan dan mengelola keanekaragaman konsumsi pangan





masyarakat menunjukkan komitmen Kalimantan Tengah dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Kalimantan Tengah yang masih terus berfluktuasi selama periode 2015-2022 menunjukkan perlunya peningkatan ketersediaan konsumsi pangan penduduk. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama, dan peningkatan skor PPH menunjukkan adanya peningkatan dalam keanekaragaman konsumsi pangan yang mencakup berbagai jenis makanan yang diperlukan untuk memastikan gizi yang seimbang. Ketersediaan dan keragaman konsumsi pangan sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah defisiensi gizi, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Hal ini juga merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan pangan berkelanjutan dan mengurangi masalah kelaparan dan malnutrisi. Belum stabilnya peningkatan skor PPH mengindikasikan perlunya komitmen pemerintah provinsi terhadap pemenuhan pangan disertai diversifikasinya. Menurut RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021–2026, konsumsi beras masih tinggi di masyarakat yang mengindikasikan adanya ketergantungan pada satu jenis sumber pangan dasar. Hal ini perlu menjadi pertimbangan diversifikasi pangan pada periode jangka panjang selanjutnya. Dinamika skor PPH disajikan pada gambar berikut





Gambar 2.38

Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

2.1.4.2.3 Pertanian

Berdasarkan amanat dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib sebagai kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah provinsi memiliki 9 kewenangan dalam urusan bidang pertanahan, yakni izin lokasi, pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sengketa tanah garapan, Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Subyek dan obyek redistribusi tanah, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sembilan kewenangan dalam urusan bidang pertanahan dijelaskan sebagai berikut:

1. Izin Lokasi

Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Izin Lokasi digantikan menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar menggantikan izin lokasi dan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). KKPR terdiri atas KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan non-berusaha, dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Namun,





dalam hal izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang lainnya yang diterbitkan lebih dahulu sebelum ditetapkan peraturan hukum ini, maka izin lokasi dan atau IPR lainnya dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis. Izin lokasi merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota kepada pelaku usaha/perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatan lainnya. Setiap pelaku usaha/perusahaan yang telah memperoleh persetujuan/izin prinsip penanaman modal wajib memperoleh izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal. Ketentuan mengenai objek dan subjek KKPR, tata cara pemberian dan jangka waktu hak dan kewajiban pemegang KKPR, dan pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Tabel 2.22

Data Izin Lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2020

No	Jenis Perizinan	Luas (Ha)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hak Guna Usaha	1.093.605,1	1.104.305,82	1.115.111,25	1.126.022,4	1.137.040,33	1.173.419,82
2	Perkembangan Perizinan (arahan lokasi, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dan status	2.942.325,86	2.969.047,29	2.996.011,39	3.023.220,38	3.050.676,47	3.390.764,78





No	Jenis Perizinan	Luas (Ha)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	kawasan (pelepasan kawasan hutan) serta hak kepemilikan atas tanah (hak guna usaha) perkebunan besar)						

Sumber: Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

2. Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan definisi pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atau merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya dibutuhkan dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukan. Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-benda di atasnya yang dilakukan melalui skema atau proses penyelenggaraan tahapannya.

3. Sengketa Tanah Garapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menggantikan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang





Penyelesaian Kasus Pertanahan, pada pasal 1 disebutkan bahwa sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa didefinisikan sebagai perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 110-2111 tanggal 28 September 2003 disebutkan bahwa tanah garapan merupakan sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan atau tanpa persetujuan tertulis dalam jangka waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan. Sengketa tanah garapan dapat muncul akibat pengaduan masyarakat maupun inventarisasi Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan penyelesaiannya melalui mediasi berdasarkan prinsip musyawarah mufakat tanpa harus dilanjutkan sampai ke lembaga pengadilan.

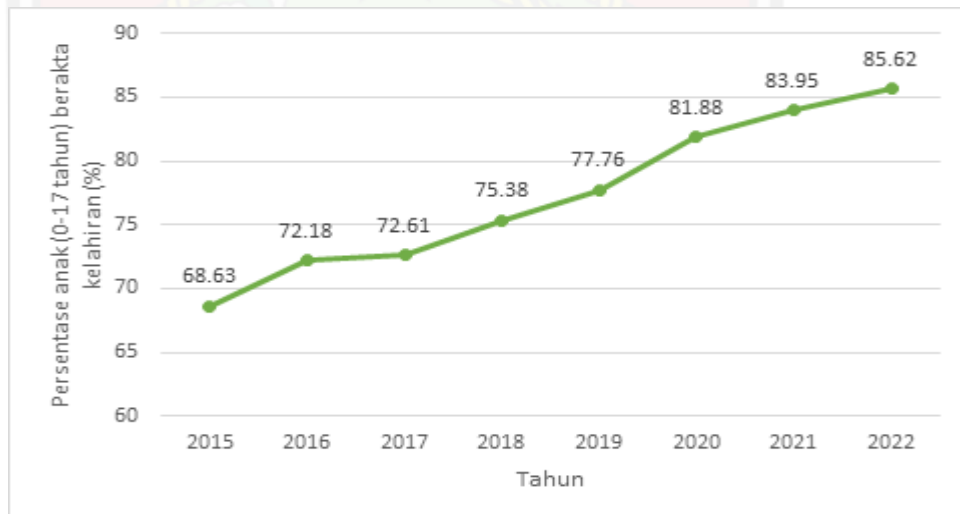
2.1.4.2.4 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Indikator pertama yang dapat menggambarkan capaian kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data yang tersedia, persentase anak usia 0-17 tahun





yang memiliki akta kelahiran mengalami peningkatan sepanjang periode 2015-2022. Tercatat hanya sebanyak 68,63% anak usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran. Nilai tersebut kemudian mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga pada tahun 2022 nilai persentase indikator tersebut mencapai 85,62%. Akta kelahiran menjadi penting bagi seseorang, mengingat dokumen tersebut diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan umum. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran, secara *de jure* dapat dianggap tidak ada.



Gambar 2.39

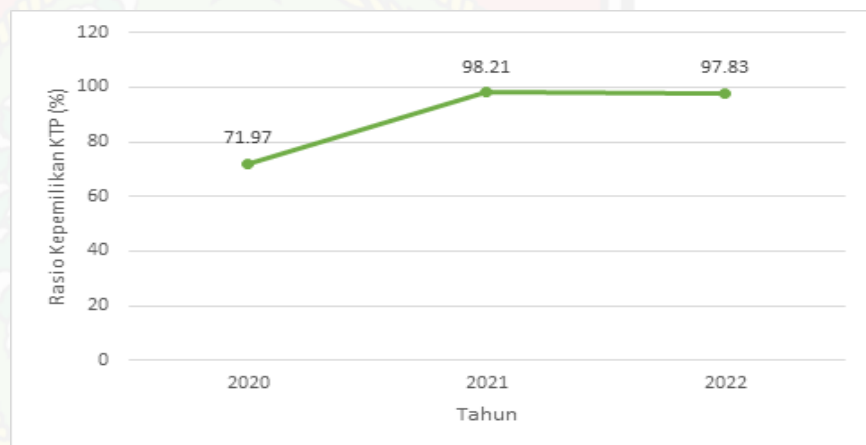
Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Berakta Kelahiran Tahun 2015-2022
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator berikutnya yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Indikator ini menjelaskan mengenai jumlah penduduk wajib KTP (mulai usia 17 tahun 1 hari) yang telah memiliki KTP. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa rasio kepemilikan KTP di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Data tahun 2020 menunjukkan sebanyak 71,97% penduduk wajib KTP telah memiliki





KTP. Rendahnya rasio kepemilikan KTP pada tahun ini disebabkan oleh adanya pengurangan kapasitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, data tahun 2021 dan 2022 memiliki capaian yang lebih baik, dengan nilai masing-masing berada di atas 97% sebagai hasil dari pemulihan layanan pasca pandemi Covid-19. Secara detail, perkembangan rasio kepemilikan KTP dan NIK disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.40

Rasio Kepemilikan KTP

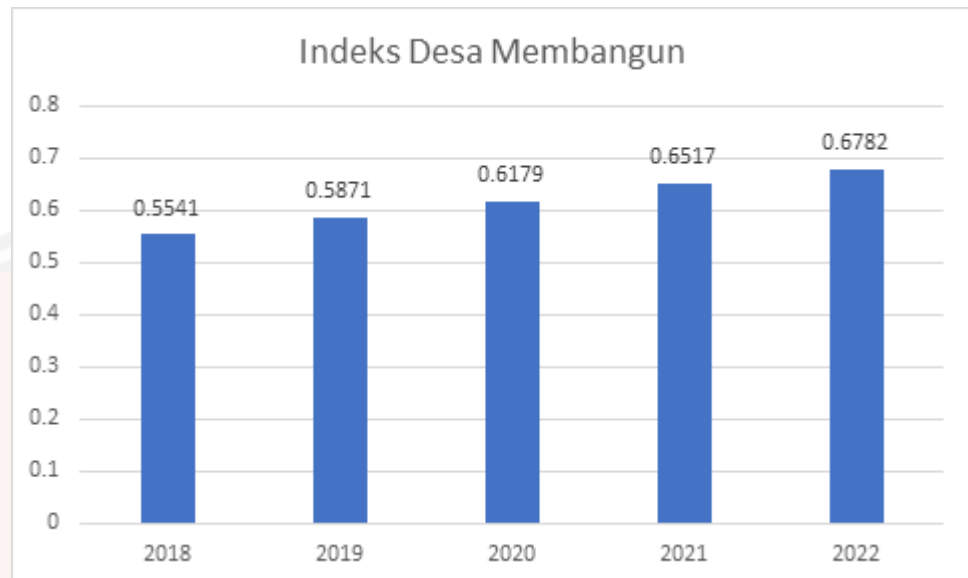
2.1.4.2.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran. Untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa digunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa (kemendesa.go.id). Berdasarkan gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan nilai Indeks Desa





Membangun setiap tahunnya. Pada tahun 2022, nilai IDM mencapai 0,678 atau diklasifikasikan kedalam desa berkembang. Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Tengah masih tergolong dalam desa tertinggal yang kemudian mulai bergeser menjadi desa berkembang pada tahun 2020.



Gambar 2.41

Grafik Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2022

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (diolah)

Selain menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), pembangunan masyarakat dan desa dapat dilihat menggunakan indikator pada Tabel 2.3.7. Data tahun 2020 hingga 2022 belum tersedia, sehingga pada gambaran ini hanya kondisi sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 terjadi beberapa penurunan persentase, yaitu pada lembaga desa yang dibina, pelayanan sosial dasar masyarakat, serta pembentukan kelembagaan posyantek. Penurunan pada indikator tersebut berpengaruh terhadap proses pembangunan desa yang digerakkan oleh lembaga desa, inovasi teknologi tepat guna, serta menurunnya pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial masyarakat. Untuk mencapai optimalisasi pembangunan masyarakat dan desa, perlu meningkatkan capaian persentase indikator berikut hingga sampai kondisi 100%.



**Tabel 2.23**

Kinerja Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	45,43	46,25	46,82	59	TAD
Persentase lembaga desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa	5,44	8,16	8,53	6,3	TAD
Persentase tingkat perkembangan desa	24,68	25,12	25,33	64	TAD
Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa	2,9	2,92	2,92	2	TAD
Persentase jumlah lembaga ekonomi dan unit usaha masyarakat yang terbentuk	16,85	30,53	32,86	42	TAD
Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina dalam usaha meningkatkan ekonomi keluarga	0,01	0,02	0,03	0,06	TAD
Persentase Kelembagaan Posyantek yang terbentuk	13,75	21,48	26	20	TAD

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, (diolah)

2.1.4.2.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian jumlah penduduk dilakukan melalui program Keluarga Berencana. Keberhasilan program KB dapat dilihat melalui berbagai indikator, seperti rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif, dan cakupan peserta unmet need. Rasio akseptor KB menunjukkan tingkat partisipasi program Keluarga Berencana (KB) oleh masyarakat. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan usia subur yang mengikuti program KB. Rasio akseptor KB di Provinsi Kalimantan Tengah





cenderung pada nilai stagnan. Pada tahun 2017, rasio akseptor KB sebesar 79,2 yang kemudian menurun menjadi 79,15 pada tahun 2018. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 79,85 dan stagnan pada angka yang sama pada tahun 2020.

Tabel 2.24
Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2022

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,58	0,66	2,24	2,24		
Rasio akseptor KB	79,2	79,15	79,85	79,85	-	-
Cakupan peserta KB aktif	67,21	65,56	65,06	65,97	63,13	62,84
Cakupan Unmet Need KB	6,3	-	-	-	12,4	11,8
Angka kelahiran remaja (15-19 tahun) per 1000 perempuan (ASFR 15-19)	83	-	-	63,13	36,2	36,2
Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	-	-	-	19,7	19,7
Persentase penduduk umur 15-19 tahun berstatus kawin/pernah kawin	-	-	-	-	62,82	60,89

Sumber: DP3APPKB Kalimantan Tengah

Unmet Need merupakan kebutuhan KB yang belum terpenuhi yang dilihat dari persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi tetapi tidak memakai alat kontrasepsi. Pada tahun 2017, nilai *unmet need* di Kalimantan Tengah sebesar 6,3. Data tidak tersedia pada tahun 2018-2020. Akan tetapi, pada tahun 2021 jumlah *unmet need* meningkat cukup besar menjadi 12,4. Semakin tinggi angka *unmet need* maka diperlukan penguatan program keluarga berencana. Pada tahun 2022, nilai *unmet need* mulai menurun menjadi 11,8 yang artinya semakin meningkat jumlah keluarga yang mampu mengakses alat kontrasepsi.

2.1.4.2.7 Perhubungan

Sistem transportasi (darat, sungai/laut, dan udara) serta lalu lintas merupakan unsur penting dan krusial dalam mendukung keberhasilan progres





pembangunan, terutama dalam mengaplikasikan kegiatan ekonomi masyarakat dan evolusi wilayah Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan kelancaran lalu lintas. Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah sangat didukung dengan pembangunan di sektor perhubungan. Salah satu faktor penting dalam pengembangan suatu wilayah dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain yaitu pembangunan infrastruktur jaringan transportasi.

Aksesibilitas antar wilayah dalam keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi kuat kaitannya dalam pemerataan pembangunan wilayah. Untuk mengatasi kesenjangan jarak antara tempat asal dan tujuan diperlukan sarana dan prasarana sistem transportasi melalui jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan perangkutan. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi resiko yang diakibatkan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan data pada grafik dibawah ini, diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah arus penumpang angkutan umum memiliki tren yang fluktuatif. Pandemi Covid-19 turut memengaruhi tren penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2020. Pada tahun-tahun berikutnya tren menunjukkan adanya kenaikan jumlah arus penumpang seiring dengan pelonggaran pembatasan perjalanan oleh pemerintah.





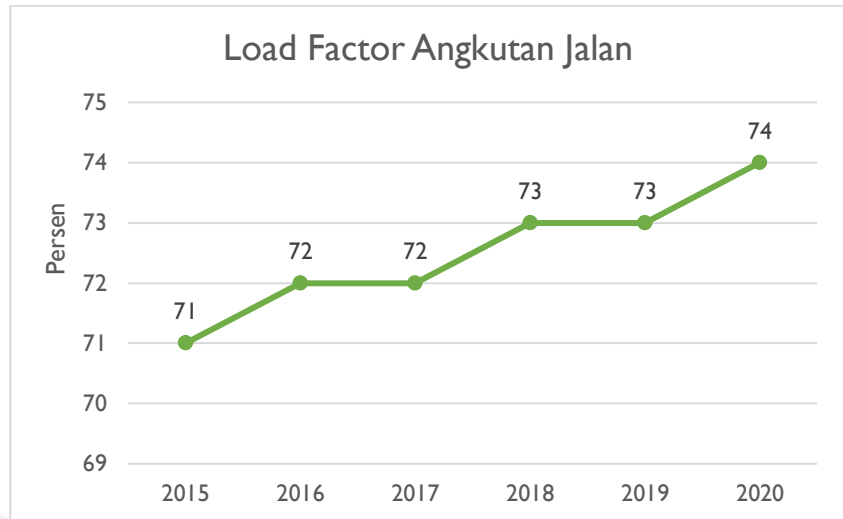
Gambar 2.42

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Perhubungan (diolah)

Berbicara mengenai urusan perhubungan, tentu tidak akan lepas kaitannya dengan mobilisasi orang dan barang (logistik). Lebih lanjut mengenai mobilisasi orang di dalam suatu wilayah dapat dijelaskan dengan indikator *load factor*. Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (2002), *load factor* merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dengan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam persen (%). *Load factor* angkutan umum disetiap rutenya berkisar mulai dari 30% sampai 100%. *Load factor* angkutan jalan dari tahun 2015-2020 memiliki tren meningkat, dari angka 71% di tahun 2015 meningkat menjadi 74% di tahun 2020. Namun, perlu menjadi catatan bahwa belum terdapat data lebih lanjut mengenai variasi kendaraan pada angka ini, apakah didominasi oleh angkutan umum atau kendaraan pribadi. Tren yang meningkat pada lima tahun terakhir ini tentu menjadi kesempatan bagus untuk Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengembangkan pergerakan orang dan barang di wilayahnya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah.





Gambar 2.43

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Perhubungan (diolah)

Banyaknya sungai yang melewati wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi potensi pengembangan wilayah dalam urusan perhubungan. Pembangunan pelabuhan laut menjadi salah satu fokus pembangunan urusan perhubungan di Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Pelabuhan Laut

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pelabuhan laut sebagai sarana jasa perdagangan serta angkutan penumpang dan barang (ekspor, impor, maupun lokal) yang terdiri dari pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan baru, dan pelabuhan perikanan.

a. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul adalah:

1. Pelabuhan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur (diusulkan menjadi





Pelabuhan Utama di Teluk Sampit
Kabupaten Kotawaringin Timur)

2. Pelabuhan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 3. Pelabuhan Sukamara di Kabupaten Sukamara;
 4. Pelabuhan Teluk Segintung di Kabupaten Seruyan;
 5. Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas;
 6. Pelabuhan Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau;
 7. Pelabuhan PT. Bina Cahaya Timur di Kabupaten Barito Selatan; dan
 8. Pelabuhan PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa di Kabupaten Barito Timur.
- b. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan regional adalah:
1. Pelabuhan Pegatan Mendawai di Kabupaten Katingan;
 2. Pelabuhan Kuala Pembuang di kabupaten Seruyan.
- c. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal adalah :
1. Pelabuhan Kereng Bangkirai di kota Palangkaraya;
 2. Pelabuhan Pangkalan Bun di kabupaten Kotawaringin Barat;
 3. Pelabuhan Samuda di kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 4. Pelabuhan Kuala Jelai di kabupaten Sukamara;
 5. Pelabuhan Ranga Ilung di Kabupaten Barito Selatan
- d. Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru adalah :





1. Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 3. Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan;
 4. Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau.
- e. Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan sebagai pangkalan pendaratan ikan (PPI) adalah:
1. PPI Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;
 2. PPI Batanjung di Kabupaten Kapuas;
 3. PPI Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara;
 4. PPI Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan;
 5. PPI Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 6. PPI Selat Jeruju Pagatan di Kabupaten Katingan; dan
 7. PPI Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selain berbagai pelabuhan yang disebutkan di atas, Kalimantan Tengah juga memiliki alur pelayaran internasional dan nasional. Alur pelayaran internasional dan nasional yang ada di Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Alur pelayaran Internasional: Sampit – luar negeri.
- b. Alur pelayaran Nasional: Sampit – Semarang; Sampit – Surabaya; Sampit-Jakarta; Kumai - Semarang; Kumai – Surabaya; Kumai – Jakarta; Pangkalan Bun – Semarang; Pangkalan Bun – Surabaya; Pangkalan Bun - Jakarta; Sukamara – Semarang, Sukamara – Surabaya; Sukamara – Jakarta; Teluk Segintung – Semarang; Teluk Segintung – Surabaya; Teluk Segintung – Jakarta;





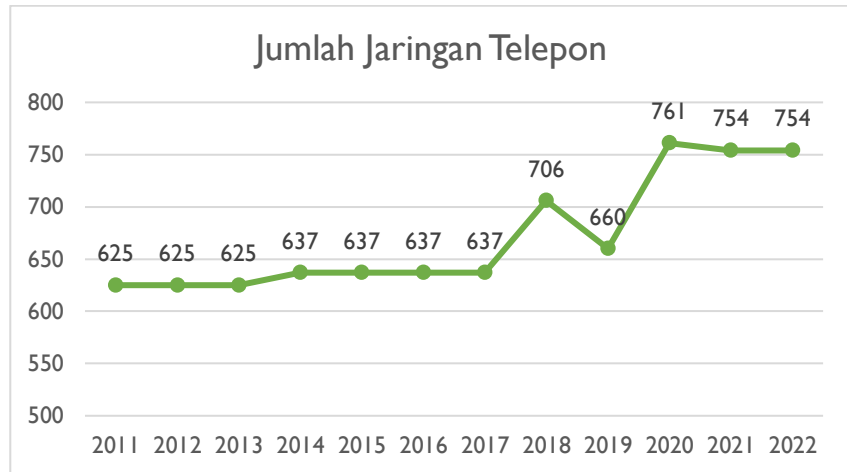
Batanjung – Semarang; Batanjung – Surabaya; Batanjung – Jakarta; Pulang Pisau – Semarang; Pulang Pisau – Surabaya; dan Pulang Pisau – Jakarta.

2.1.4.2.8 Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan tengah, serta pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan cepatnya persebaran informasi, maka kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur telekomunikasi juga semakin tinggi. Terlebih kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan menguasai teknologi komunikasi dan informatika terus meningkat sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai regulator dan pelaku dalam pembangunan yang mengatur dan mengendalikan infrastruktur komunikasi dan informasi. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 1517 desa/kelurahan yang tersebar di 14 kabupaten/kota, diketahui sejumlah 1228 desa/kelurahan sudah terlayani layanan telekomunikasi pada tahun 2022. Sisanya yakni sejumlah 343 desa/kelurahan belum terlayani layanan telekomunikasi atau termasuk dalam area blankspot.



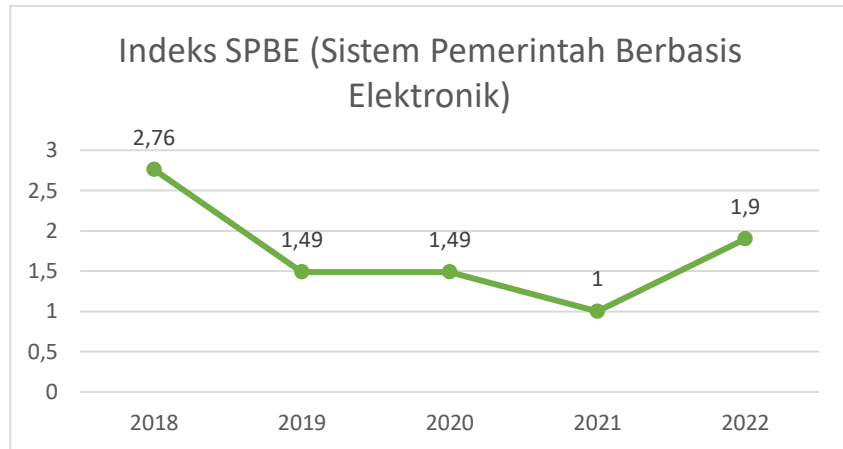
**Gambar 2.44**

Jumlah Jaringan Telepon Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi (diolah)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunaannya. Indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah meraih skor indeks SPBE 2,76 (kategori baik) pada tahun 2018 yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nilai indeks predikat dengan rincian skor: Kurang (<1,8); Cukup (1,8 - 2,6); Baik (2,6 - 3,5); Sangat Baik (3,5 - 4,2); dan Memuaskan (4,2 - 5,0). Namun, dalam empat tahun terakhir angkut tersebut justru mengalami penurunan yang berakhir pada 1,9 pada tahun 2022.



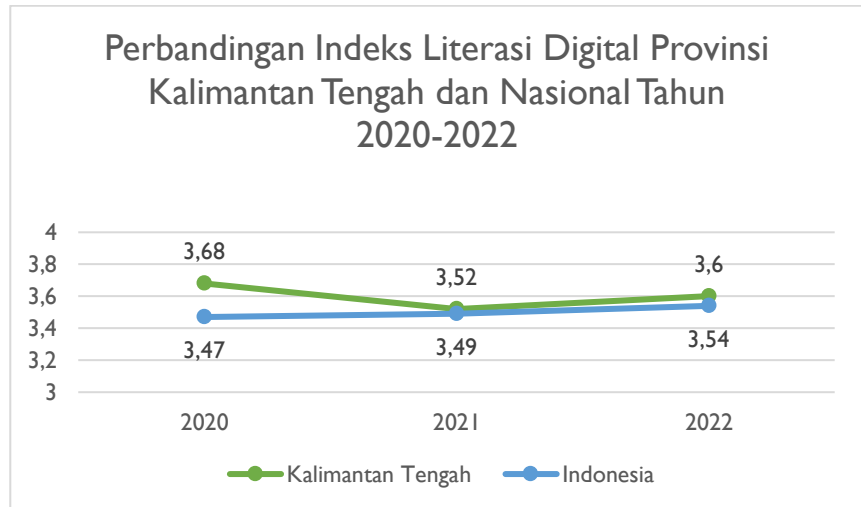


Gambar 2.45

Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi (diolah)

Salah satu indikator penting lainnya dalam perencanaan pembangunan di dalam urusan komunikasi dan informasi adalah Indeks Literasi Digital. Pengukuran literasi digital dilakukan dengan menghitung sub indikator di bawahnya yang terdiri dari 4 kategori sub-indeks. Keempat kategori sub-indeks tersebut yaitu informasi dan literasi data, komunikasi dan kolaborasi, keamanan, dan kemampuan teknologi. Masing-masing sub-indeks ini selanjutnya diukur dari 7 aspek yang bersifat lebih mikro yang telah disepakati secara nasional. Pilar tersebut digunakan untuk mengukur pengetahuan tentang kemampuan menggunakan teknologi, pengetahuan tentang keamanan pribadi, kemampuan berpikir kritis, pengetahuan keamanan perangkat, informasi dan literasi data, kemampuan berkomunikasi, serta etika dalam menggunakan teknologi. Skor Indeks Literasi Digital berkisar 1-5. Semakin besar skor, semakin tinggi literasi digital suatu wilayah. Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan dalam tiga tahun terakhir sudah berada di atas rata-rata Indeks Literasi Digital Nasional, terakhir pada tahun 2022 Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka 3,6.



**Gambar 2.46**

Perbandingan Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi (diolah)

2.1.4.2.9 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dan memiliki landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Sementara itu, usaha Mikro adalah usaha produktif yang bisa dimiliki perseorangan maupun badan usaha, dengan kekayaan paling banyak 50 juta dan omzet usaha mikro paling banyak 300 juta setahun dengan fasilitas minim dan terbatasnya jumlah karyawan.

2.1.4.2.10 Penanaman Modal

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk meninjau tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah investasi atau penanaman modal. Hal tersebut disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan dari kehadiran investasi, yakni peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan optimalisasi sarana produksi untuk menghasilkan luaran dan nilai tambah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.4.2.11 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan penerus bangsa sehingga aspek kepemudaan perlu diperhatikan dalam pembangunan





sebagai penyiapan kualitas penerus pembangunan. Indeks pembangunan pemuda (IPP) memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Lapisan tersebut terdiri atas pembangunan individu, pembangunan kesejahteraan, dan partisipasi di berbagai bidang kehidupan.

Aspek-aspek pembangunan pemuda dalam IPP dikelompokkan menjadi lima domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dengan tren meningkat. Selama periode tersebut, IPP Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah IPP nasional. IPP tertinggi Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pada tahun 2020, yaitu 50,67.

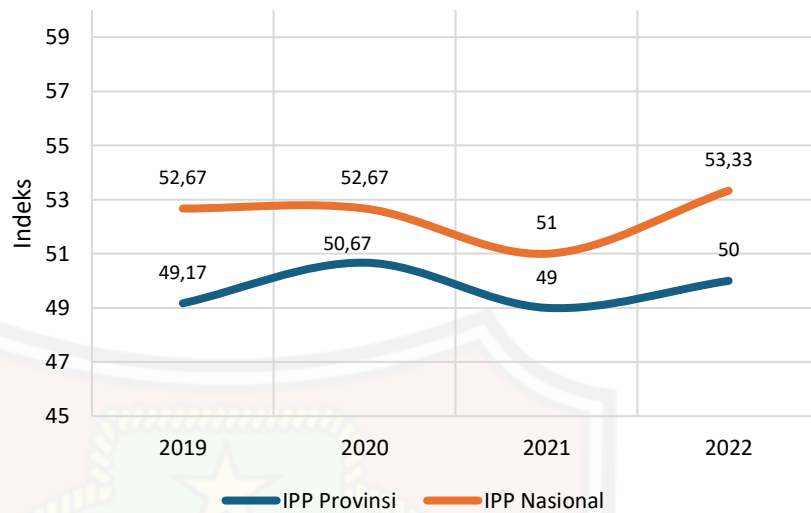
Pada tahun 2023, IPP Provinsi Kalimantan Tengah adalah 50, yang mengalami peningkatan 0,83 poin dari IPP tahun 2019. Meskipun mengalami peningkatan nilai, IPP Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tersebut berada di peringkat dua terendah nasional. Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2023, nilai domain IPP Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 selain domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami stagnasi dari tahun sebelumnya.

Pada domain pendidikan, masalah yang terjadi adalah kepesertaan pada pendidikan tinggi yang masih rendah. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja, persentase wirausaha pemuda juga masih rendah (0,17). Partisipasi dan kepemimpinan pemuda memiliki masalah rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan. Sementara, pada domain gender dan diskriminasi, partisipasi pendidikan menengah dan atas pemuda perempuan dan rendahnya partisipasi pemuda





perempuan dalam sektor formal. Selain itu, perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Tengah juga masih tinggi (14,72).



Gambar 2.47

Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2023

Pembangunan dibidang olahraga bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas manusia dibidang kesehatan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan olahraga menggunakan Sport Development Index (SDI). Pengukuran SDI menggunakan sembilan dimensi dasar, yaitu sumber daya manusia olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, performa, dan partisipasi (kemenpora.go.id). Pengukuran SDI mulai dilakukan pada tahun 2021. Nilai SDI Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 44% dan menurun menjadi 32,4% pada tahun 2022. Untuk meningkatkan SDI bisa dilakukan melalui intervensi kebijakan dan pengadaan program yang mendukung partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Tabel 2.25

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah organisasi kepemudaan	62	66	66	66	66	66
Jumlah kegiatan kepemudaan	35	13	11	12	8	32





Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah organisasi olahraga	42	42	42	42	36	36
Jumlah klub olahraga	46	46	46	46	46	46
Jumlah lapangan olahraga	289	1214	1214	1214	3070	3070
Jumlah gedung olahraga	16	16	16	16	16	16
<i>Sport Development Index</i>	-	-	-	-	44%	32,4%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 (diolah)

2.1.4.2.12 Statistik

Urusan pemerintahan daerah bidang statistik diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Urusan statistik daerah difokuskan kepada data statistik sektoral yang berperan penting dalam tahap penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

2.1.4.2.13 Persandian

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang persandian bertujuan untuk memastikan keamanan arus informasi yang dimiliki oleh daerah. Informasi menjadi suatu aset berharga bagi daerah karena karakteristiknya, meliputi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi.

2.1.4.2.14 Kebudayaan

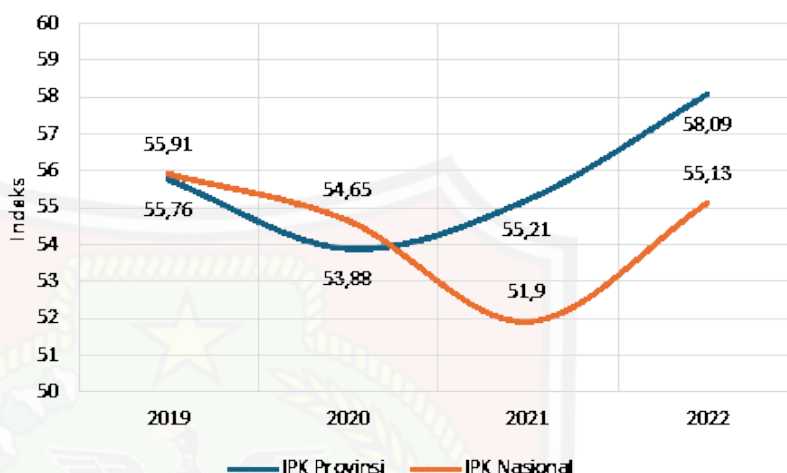
Kebudayaan selain sebagai identitas wilayah juga menjadi modal pembangunan secara ekonomi, pembangunan komunitas, pendidikan maupun lainnya. Pembangunan kebudayaan di Indonesia diukur menggunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK memiliki tujuh dimensi, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.

IPK Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi dengan tren meningkat. IPK Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022





mencapai 58,09, naik 2,33 poin dari tahun 2019. Pada tahun tersebut, capaian dimensi ekonomi budaya memiliki nilai terendah dibandingkan dimensi-dimensi lainnya. Selama tahun 2019-2022, IPK Provinsi Kalimantan Tengah lebih tinggi daripada IPK nasional, kecuali pada tahun 2019.



Gambar 2.48

Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022

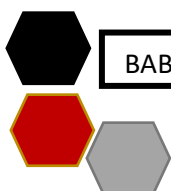
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023

Pada tahun 2021, imbas dari adanya Covid-19 terjadi rasionalisasi anggaran sehingga mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Namun masih terdapat kegiatan gelar seni budaya yang diselenggarakan Taman Budaya yang sumbernya dari DAK yang menjadi magnet menarik kunjungan wisatawan lokal untuk berkunjung dan menyaksikan pertunjukan seni yang diselenggarakan saat itu, seperti pertunjukan tari, teater dan pameran lukisan.

Tabel 2.26

Capaian Kinerja Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah cagar budaya yang terpelihara	3 buah	32 cagar budaya /situs	3 buah	3 buah	3 buah





No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah koleksi benda museum yang terpelihara	50 koleksi	115 koleksi	328 koleksi	650 koleksi	361
3	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 festival /gelar seni	15 festival/ gelar seni	10 festival/ gelar seni	14 festival/ gelar seni	12 festival/ gelar seni

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2023

Cagar budaya yang dipelihara pada tahun 2021 yaitu berupa pengelolaan/perbaikan 3 (tiga) Rumah Betang, yaitu Betang Tumbang Gagu di Kabupaten Kotawaringin Timur, Betang Tumbang Malahoi dan Betang Tumbang Kurik di Kabupaten Gunung Mas. Koleksi benda museum yang dipelihara pada tahun 2021 yaitu koleksi yang ada pada Museum Balanga yang dananya berasal dari DAK non fisik museum. Koleksi yang dapat dipelihara/dirawat yaitu sebanyak 650 koleksi dari 4.524 koleksi keseluruhan Museum Balanga. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah) didapat dari data cagar budaya yang telah terdaftar di Registrasi Nasional Cagar Budaya sesuai UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya , sedangkan Cagar Budaya di TA 2022 yang telah dilaksanakan revitalisasi Huma Hai Loendjoe di Kabupaten Kapuas.

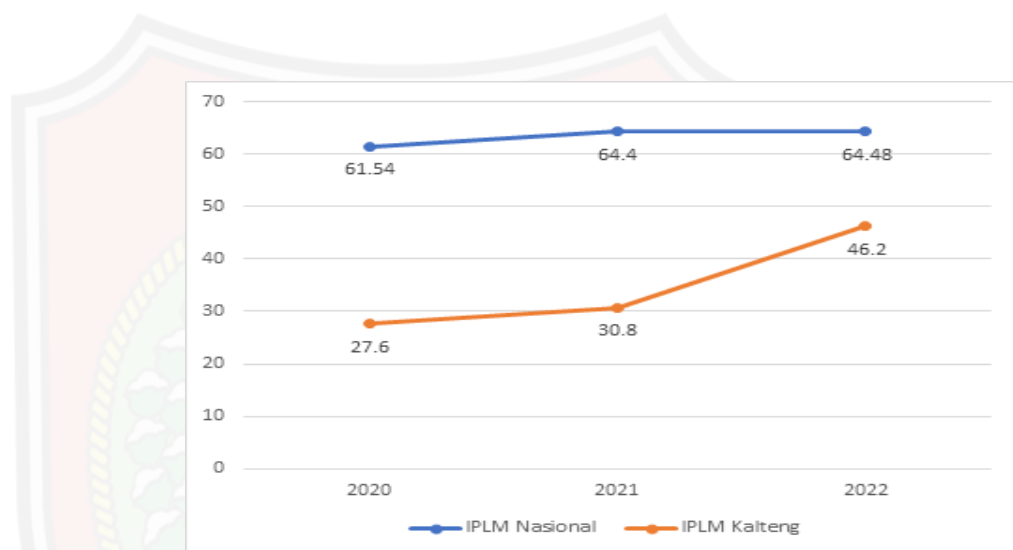
2.1.4.2.15 Perpustakaan

Pembangunan dalam penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan dilakukan untuk mewujudkan peran perpustakaan sebagai penyedia informasi dalam rangka meningkatkan kebiasaan membaca masyarakat, meningkatkan pelayanan berbasis IT, dan meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Literasi Membaca (IPLM), yaitu kajian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat. Nilai IPM Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dari





tahun ke tahun. Pada tahun 2018 nilai IPLM sebesar 27,6. Kemudian meningkat menjadi 30,8 pada tahun 2021 dan 46,2 pada tahun 2022. Walaupun menunjukkan tren meningkat, nilai IPLM Kalimantan Tengah masih berada dibawah nilai IPLM nasional. Berikut grafik perbandingan IPLM Kalimantan Tengah dan IPLM nasional.



Gambar 2.49

Grafik IPLM Nasional dan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2022
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (diolah)

Tabel 2.27

Capaian Indikator Urusan Perpustakaan

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Jumlah pengunjung perpustakaan	22.150	11.215	20.556	26.675
Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan	28	35	37,4	42,19
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	33	33	30	28
Jumlah anggota perpustakaan	4179	2174	TAD	TAD
Jumlah koleksi buku perpustakaan	3.022	31.195	30.000	32.000
Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan	88.223	39.916	TAD	TAD

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

2.1.4.2.16 Kearsipan

Urusan kearsipan digunakan sebagai bahan untuk akuntabilitas kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih





dan transparan. Capaian indikator urusan kearsipan cenderung stagnan seperti pada indikator jumlah SOPD yang menerapkan kearsipan secara baku dan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

Tabel 2.28

Capaian Indikator Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan	46	46	46	-	-
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	60	65	85	85	85
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	11	13	14	19	15
Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN)	43,7	35,11	42,35	41,2	21,29

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

2.1.4.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.4.3.1 Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan kondisi geografis, terdapat tujuh (7) kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki atau berbatasan dengan wilayah laut. Ketujuh daerah tersebut meliputi Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingin, Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas. Besarnya sumber daya kemaritiman di wilayah Kalimantan Tengah sayangnya masih dihadapkan pada tingginya eksploitasi yang menyebabkan degradasi lingkungan. Adapun aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan tidak hanya berada di laut, namun di hulu sungai, seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, permukiman, dan deforestasi hutan yang kemudian berdampak pada hilir sungai. Ditinjau dari potensi perikananannya, Tabel berikut menunjukkan





jumlah produksi perikanan (ton/tahun), baik perikanan tangkap maupun budidaya, selama periode enam tahun (2016–2021).

Tabel 2.29

Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Budidaya Tahun 2016–2021

Jenis Budidaya	Jumlah Produksi (Ton)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tangkap	151.276,5	113.194,52	132.483,99	150.437,93	153.426,16	151.510,52
Budidaya	77.724,54	94.346,27	98.151,88	101.857,32	116.729,4	120.935,64

Produksi perikanan tangkap mencakup volume (ton) dari perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum daratan. Selama tujuh tahun terjadi fluktuasi volume tangkapan yang mana jumlah tangkapan pada 2017 hingga 2019 belum dapat melebihi tangkapan di tahun 2016. Di sisi lain, peningkatan terus terjadi selama tujuh tahun pada produksi perikanan budidaya hingga mencapai 120.935,64 ton di tahun 2021. Jumlah ini menunjukkan peningkatan volume hingga 43.211,1 ton dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan positif tersebut dapat mengindikasikan keberhasilan program dan fasilitasi produksi sektor perikanan serta peningkatan kualitas SDM dalam mengelola budidaya perikanan.

2.1.4.3.2 Pariwisata

Pembangunan pariwisata dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menghasilkan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan sektor ini akan mempromosikan budaya, seni, dan warisan alam Kalimantan Tengah, meningkatkan pemahaman akan keanekaragaman lingkungan, serta memperkuat kesadaran lingkungan. Selain itu, pembangunan pariwisata dapat





mendukung infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih baik, seperti jalan, bandara, dan sanitasi yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Pengembangan pariwisata juga membuka peluang investasi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta, menciptakan dampak positif dalam diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan sektor lainnya. Namun, pembangunan pariwisata harus diimbangi dengan keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan yang bijaksana untuk melindungi sumber daya alam dan budaya. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat menjadi pilar penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk Kalimantan Tengah dalam jangka panjang.

Salah satu destinasi wisata andalan Kalimantan Tengah ialah Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan yang menjadi kawasan perlindungan flora dan fauna, khususnya orang utan. Destinasi ini umumnya menarik lebih banyak turis mancanegara dibanding turis lokal, terutama pada pertengahan tahun hingga akhir tahun. Sebagai penunjang pariwisata diadakanlah pameran tahunan sebagai media bagi setiap daerah di Kalimantan Tengah untuk mempromosikan potensi wisata yang dimiliki. Berikut merupakan jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Kalimantan Tengah selama empat tahun.





Tabel 2.30
Jumlah Total Kunjungan Wisatawan di Kalimantan Tengah Tahun
2018–2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Wisatawan Nusantara	1.495.009	783.100	589.098	1.667.830	1.786.610
Jumlah Wisatawan Mancanegara	61.479	2.365	579	21.932	17.134
Jumlah Wisatawan	1.556.488	785.465	589.677	1.689.762	1.803.744

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 (diolah)

2.1.4.3.3 Pertanian

Pertanian dan perkebunan di Kalimantan Tengah berperan sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah. Pembangunan pertanian dan perkebunan juga berkontribusi pada ketahanan pangan daerah, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan pasokan makanan yang stabil untuk penduduk. Selain itu, sektor ini membantu dalam diversifikasi ekonomi, dengan menghasilkan komoditas pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya. Momentum tersebut membuka peluang untuk investasi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan juga mendukung pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem, serta menghindari kerusakan lingkungan yang dapat berdampak jangka panjang.





Tabel 2.31
Luas Panen Setiap Komoditas

Luas Panen	2019	2020
Padi	146.145,00	143.275
Jagung	19.631,00	26.893
Kedelai	88	94
Kacang Tanah	213	265
Kacang Hijau	16	23
Ubi Kayu	2.889	2.277
Ubi Jalar	488	512

Sumber: BPS (Diolah)

Ditinjau dari data produktivitas pertanian pada tabel di bawah, terdapat peningkatan produktivitas pada komoditas padi, kedelai, kacang hijau, dan ubi kayu. Peningkatan tertinggi ada pada komoditas ubi kayu sebesar 10,02 kuintal per hektar. Adapun penurunan produktivitas tertinggi terjadi pada komoditas ubi jalar dengan penurunan sebesar 11,46 kuintal per hektar. Adanya peningkatan produktivitas komoditas selain padi mengindikasikan peningkatan variasi sumber pangan daerah, namun terjadinya penurunan pada komoditas tertentu perlu menjadi perhatian untuk dilihat penyebabnya dan memetakan pengembangan ke depan dengan berbasis pada data *series* yang lebih panjang.

Tabel 2.32
Produktivitas Pertanian

Produktivitas	2019	2020
Padi	30,35	33,58
Jagung	50,54	48,28
Kedelai	14,99	15,65
Kacang Tanah	12,59	9,05
Kacang Hijau	4,63	10,04
Ubi Kayu	263,77	273,79
Ubi Jalar	126,6	115,14

Sumber: BPS (Diolah)

Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan menjadi lumbung pangan melalui pengembangan *food estate*. Secara lebih khusus, data mengenai komoditas padi selama





periode 2019–2022 menunjukkan peningkatan produktivitas meski cenderung berfluktuasi. Diperlukan komitmen pemerintah provinsi dan pusat dalam mewujudkan keberlanjutan pangan di Kalimantan Tengah yang tidak hanya untuk padi, namun juga sumber pangan lain sebagai upaya diversifikasi pangan.

Tabel 2.33

Padi	2019	2020	2021	2022
Luas Panen	146145,00	143275	125870,1	109756,2
Produksi	443.561	403.023	381.190	353.865
Produktivitas	30,35	33,58	30,28	32,24

Sumber: BPS (Diolah)

Perdagangan memainkan peran sentral dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan sektor perdagangan meningkatkan konektivitas antar daerah, menghadirkan peluang bisnis baru, dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal. Dampak tersebut berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, pembangunan sektor perdagangan memungkinkan akses lebih baik terhadap barang dan jasa, memfasilitasi investasi, serta mendukung pengembangan infrastruktur logistik yang lebih baik, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah.

Kesiapan dalam perdagangan ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana berpengaruh pada kelancaran dan distribusi barang yang kemudian memengaruhi harga barang. Berdasarkan tabel di bawah, terdapat fluktuasi dengan tren penurunan pada jumlah pasar rakyat. Pasar rakyat yang mulanya berjumlah 410 di tahun 2016 kemudian turun menjadi 406 pada tahun





2022 meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga 2019. Adapun pasar modern mengalami perkembangan jumlah secara umum dari 120 unit pada tahun 2016 kemudian menjadi 335 unit pada tahun 2022. Ditinjau dari rata-rata laju perubahannya, diperkirakan pasar modern dapat bertambah hingga lebih 1030 unit pada tahun 2045 dan pasar rakyat hanya bertambah sampai 500 unit. Transisi preferensi masyarakat selama periode 2016–2022 yang memengaruhi jumlah kedua jenis pasar di atas dapat menjadi dasar pertimbangan regulasi terkait pemasaran, logistik barang, dan pemberdayaan.

Tabel 2.34
Jumlah Pasar

No.	Jenis Pasar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pasar Rakyat	410	421	429	507	507	419	406
2	Pasar Modern	120	202	219	183	183	331	335
Jumlah		530	623	648	690	690	741	741

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Di sisi lain, terkait dengan aktivitas ekspor di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat peningkatan jumlah eksportir dari 24 eksportir di tahun 2018 menjadi 39 eksportir di tahun 2022. Akan tetapi, terjadi penurunan pada jumlah SKA atau Surat Keterangan Asal. SKA sendiri juga disebut sebagai *Certificate of Origin* (COO) yang merupakan sertifikasi asal barang yang menunjukkan bukti bahwa suatu barang atau komoditas yang diekspor memang berasal dari daerah atau negara pengekspor. Selain itu, terjadi peningkatan FOB dalam kurun waktu lima tahun selama periode 2018 hingga 2022. FOB atau *Free On Board* adalah harga barang yang digunakan sebagai dasar pembebasan atau





de minis value, apabila suatu barang bernilai kurang dari batas pembebasan maka tidak dikenakan pungutan bea masuk dan pajak impor.

Tabel 2.35
Aktivitas Ekspor di Kalimantan Tengah

No.	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Eksportir	24	24	30	24	39
2	SKA	795	643	878	815	218
3	FOB (USD)	248.753.095	2.244.156.025	1.039.841.228	631.939.889,8	88.7242.196,5

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, sektor perdagangan memainkan peran kunci dalam mengirimkan komoditas pertanian dan perkebunan ke pasar nasional dan internasional. Hal ini membantu diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Namun, pembangunan sektor perdagangan harus diimbangi dengan regulasi yang efisien dan perlindungan terhadap lingkungan. Pengelolaan yang bijaksana diperlukan untuk menghindari eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.4.3.4 Perindustrian

Industri merupakan pilar penting dalam memicu transformasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun melalui pengembangan industri lokal, maka daerah dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan perkebunan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Langkah tersebut juga dapat menghasilkan diversifikasi ekonomi, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan





mengurangi tingkat kemiskinan. Tidak hanya itu, perindustrian mendukung pengembangan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan inovasi teknologi, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan berpartisipasi dalam ekonomi yang lebih maju. Industri yang berkembang kemudian mampu menciptakan pasar untuk produk-produk lokal dan meningkatkan nilai tambah pada sumber daya alam yang ada. Pada pelaksanaan pengembangannya, penting memerhatikan pengelolaan yang berkelanjutan disertai pemantauan yang ketat sesuai dengan regulasi berlaku guna menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Tabel 2.3.21 menunjukkan jumlah industri besar dan tenaga kerja di bidang industri besar selama periode 2017 hingga 2022. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan jumlah industri dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 2045 sebanyak 185 industri besar. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak sejalan dengan adanya penurunan jumlah tenaga kerja di bidang industri besar yang mengalami penurunan. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa tenaga kerja yang terserap dalam sektor industri bukan merupakan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Apabila terjadi hal demikian, maka diperlukan intervensi regulasi yang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat lokal untuk membersamai pertumbuhan pada sektor industri dan manufaktur sebagai industri pengolahan yang nantinya berimplikasi pada peningkatan nilai ekonomi provinsi.



**Tabel 2.36**

Jumlah Industri Besar Beserta Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Industri	115	102	102	141	142	148
Jumlah Tenaga Kerja	41.851	20.380	20.380	20.824	Tidak ada data	Tidak ada data

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Di sisi lain, industri kecil di Kalimantan Tengah mengalami perkembangan positif, baik dari jumlah industri maupun tenaga kerja yang diserap. Tabel 2.3.22 di bawah menunjukkan perkembangan angka keduanya selama periode tahun 2017 hingga 2021. Adapun Gambar. di bawah menunjukkan grafik proyeksi (BAU) dari jumlah industri kecil beserta tenaga kerja industri kecil. Dari grafik tersebut diketahui bahwa peningkatan akan terus terjadi secara stabil pada sektor industri kecil.

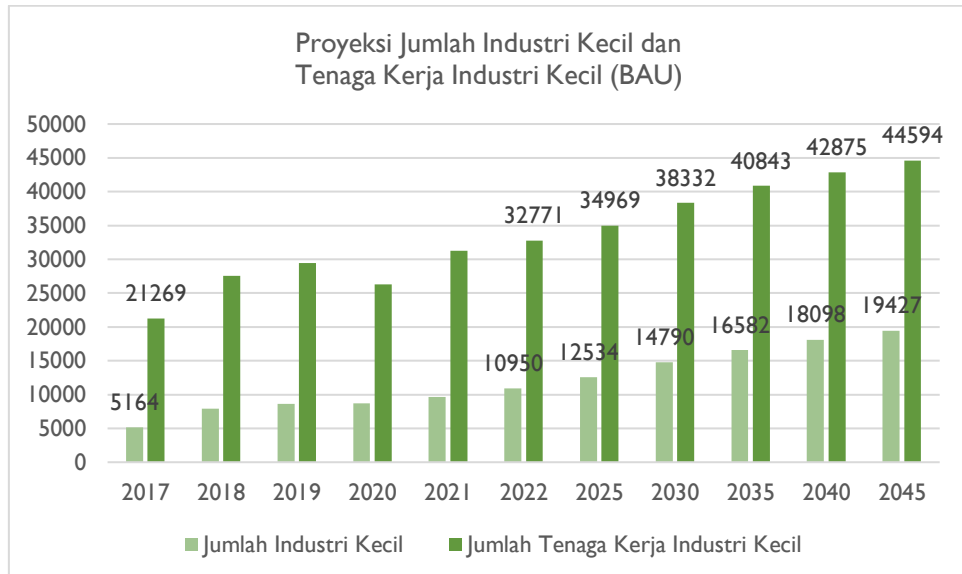
Tabel 2.37

Jumlah Industri Kecil beserta Tenaga Kerja Industri Kecil

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Industri	5164	7953	8633	8724	9653
Jumlah Tenaga Kerja	21269	27516	29410	26289	31255

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian



**Gambar 2.50**

Grafik Proyeksi Jumlah Industri Kecil dan Tenaga Kerja Industri Kecil
Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Diolah)

Pengembangan industri kecil dapat menciptakan lapangan kerja, menekan angka pengangguran, dan meningkatkan pendapatan per kapita. Perekonomian daerah pun dapat berkembang disertai dengan diversifikasi ekonomi yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi pasar global. Investasi dalam infrastruktur dan akses pasar yang lebih baik juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta adanya peningkatan pendapatan daerah dari pajak bisa membantu pembiayaan pembangunan lanjutan. Perlu menjadi catatan bahwa pengawasan lingkungan harus tetap diutamakan dan penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas disertai dengan peningkatan kualitas SDM.

2.1.4.3.5 Transmigrasi

Indikator pada bidang transmigrasi berikut merujuk pada dokumen RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Terdapat penurunan jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat pada tahun 2019. Pada





tahun 2018 sebanyak 609 lahan tersertifikasi, dan bertambah 750 pada tahun 2019. Akan tetapi, jumlah ini belum bisa digunakan untuk menghitung ketercapaian penerbitan sertifikat lahan karena belum ditemukan data jumlah lahan transmigrasi keseluruhan (sudah dan belum mendapatkan sertifikat). Pengukuran perkembangan kawasan transmigrasi menggunakan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang menunjukkan peningkatan mulai tahun 2020 hingga 2022. Nilai indeks pada tahun 2020 sebesar 22,7, kemudian meningkat menjadi 39,6 pada tahun 2021 dan mencapai 41,18 pada tahun 2022. Angka ini masih bisa ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat proyek prioritas revitalisasi kawasan transmigrasi yang salah satunya berlokasi di Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau. Pengembangan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan permukiman dan pengembangan pangan dalam bentuk food estate. Diperlukan data lebih rinci untuk mengetahui keberhasilan proyek revitalisasi kawasan transmigrasi ini.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Bidang Transmigrasi

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	13 60	609	750	TAD	TAD	TAD
Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	0	25	143	TAD	TAD	TAD
Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan	4	4	0	TAD	TAD	TAD
Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	TA D	TAD	20,8	22,7	39,6	41,18





Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng (Diolah)

2.1.4.3.6 Energi

Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Provinsi Kalimantan Tengah selama sebelas tahun terakhir (2011-2022) terus mengalami peningkatan tetapi masih di bawah garis nasional. Tercatat pada tahun 2011 persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 65,49% dan terus meningkat menjadi 85,36% di tahun 2022. Namun, perlu menjadi catatan bahwa meskipun sudah mencapai angka 85,36%, rata-rata nasional sudah mencapai 97,73% sehingga masih jauh di bawah rata-rata nasional, bahkan berada pada urutan ke 34 dari 36 provinsi di Indonesia.



Gambar 2.51

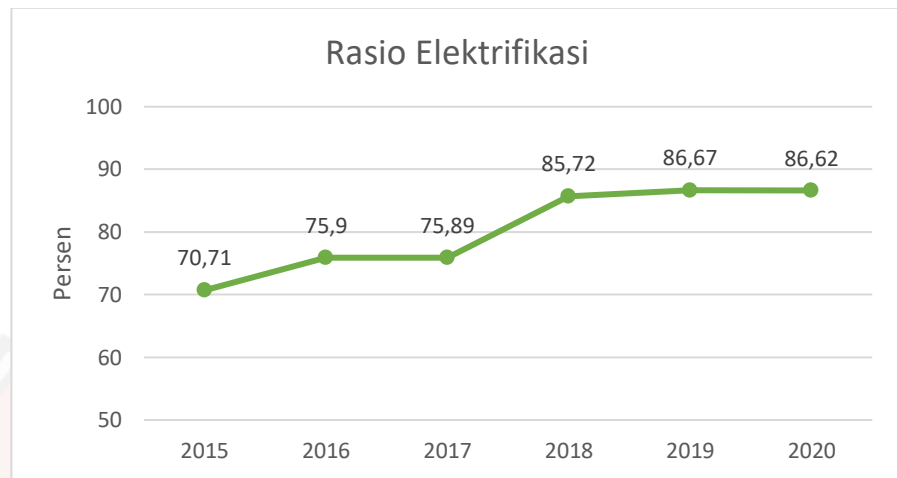
Grafik Perbandingan Persentase Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN (Persen) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Rasio elektrifikasi (RE) merupakan perbandingan jumlah pengguna (rumah tangga) yang memiliki sumber penerangan listrik baik listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan seluruh jumlah rumah tangga yang ada. Rasio Elektrifikasi tahun 2015 sebesar 70,71% dan tahun 2020 Rasio



Elektrifikasi sebesar 86,69%. Peningkatan Rasio Elektrifikasi sebesar 15,69% pada lima tahun terakhir.



Gambar 2.52

Grafik Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

2.1.4.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.1.4.4.1 Perumusan Koordinasi Monitoring dan

Evaluasi Kebijakan Daerah

Bidang urusan ini membahas tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan monitoring bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana, menemukan kesalahan sedini mungkin dalam pelaksanaan rencana, serta melakukan penyesuaian implementasi kebijakan dengan melihat kondisi lapangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan termasuk untuk mengukur output atau hasil, dampak kebijakan, serta penyimpangan yang terjadi. Terkait urusan ini belum tersedia data yang dapat diakses.





2.1.4.4.2 Pengawasan

Fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan yang dilakukan terhadap urusan pemerintahan daerah dijalankan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Tingkat leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalteng menunjukkan level yang stabil pada tahun 2020 dan 2021, yaitu pada level 3. Tingkat leveling APIP ini masih bisa ditingkatkan hingga mencapai nilai maksimal, yaitu level 5. Opini hasil pemeriksaan eksternal terhadap urusan pemerintahan daerah juga sudah baik, yaitu opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. Penurunan terjadi pada persentase tindak lanjut hasil pengawasan selesai BPK/RI, Itjen Kemendagri/teknis lainnya, dan inspektorat. Kinerja pemerintah juga dapat diukur dengan menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks ini menilai sejauh mana pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pengukuran indeks ini menggunakan indikator indeks perilaku anti korupsi, nilai SAKIP, opini BPK, indeks kelembagaan, indeks SPBE, indeks profesionalisme ASN, dan indeks





pelayanan publik. Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi setiap tahunnya walaupun peningkatan tersebut cukup kecil.

Tabel 2.39
Capaian Indikator Bidang Pengawasan

Indikator	2018	2019	2020	2021
Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalteng	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3
Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP	WTP	WTP
Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalteng	TAD	Level 3	Level 3	Level 3
Persentase tindak lanjut hasil pengawasan selesai:				
- BPK RI	84,14	78,49	88	50
- ITJEN Kemendagri/teknis lainnya	87,7	52,24	90	50
- Inspektorat	89,49	90,8	93	70
Persentase penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	22,97	52,78	10	50
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Provinsi (SAKIP) Kalimantan Tengah	62,86	63,05	62,05	62,44
Persentase perangkat daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal "B"	TAD	TAD	TAD	50
Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	44	58	60	TAD
Indeks Reformasi Birokrasi	59,28	59,59	TAD	59,73

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalteng (diolah)

2.1.4.4.3 Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk menentukan arah kebijakan suatu daerah di masa depan. Perencanaan ini melibatkan berbagai pihak sehingga dapat mengakomodir kebutuhan yang dapat dipenuhi kedepannya. Pengukuran pelaksanaan perencanaan pembangunan menggunakan indikator-indikator seperti





kesesuaian antar dokumen perencanaan, persentase ketercapaian target indikator RPJMD, serta jumlah perangkat daerah yang telah berhasil mencapai target. Berdasarkan data pada tabel di bawah ini, diketahui bahwa beberapa indikator seperti kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD serta Renja PD dengan Renstra PD mengalami penurunan pada tahun 2020. Artinya terdapat peningkatan ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan tersebut. Selain itu juga terjadi penurunan ketercapaian target indikator RPJMD. Penurunan-penurunan ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Bidang Perencanaan

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 (2020) dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2016-2021	100	89,74	96,67	78,28
Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 (2020) dengan arah kebijakan dan prioritas RKP tahun n+1 (2020)	100	100	100	100
Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	89,7	86,24	95,7	92,83
Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	86,1	80,94	94,29	66,38
Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	91,2	94,78	95,86	95,86
Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	36	36	37	38
Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	51	45,7	47,45	36,52

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalteng (diolah)





2.1.4.4.4 Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan

Kepegawaian

Kinerja bidang kepegawaian dapat ditinjau berdasarkan beberapa indikator, yakni jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal, serta jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu. Indikator jumlah PNS menggambarkan kondisi kepegawaian di Provinsi Kalimantan Tengah. Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal menggambarkan jumlah PNS yang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan lanjut. Sementara itu, jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu dapat menggambarkan upaya pembinaan dan penegakan disiplin terhadap para aparatur sipil yang melakukan pelanggaran. Secara rinci, kondisi kepegawaian di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41

Kondisi Indikator Bidang Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2022

No.	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah PNS Prov. Kalteng	4.915	10.382	10.019	10.059	9.653	9.596	9.271
2.	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan Formal	1,02%	0,96%	1,49%	1,25%	0,88%	0,82%	1,24%





No.	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu	76	18	28	14	28	TAD	TAD

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalteng

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui jumlah PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Jumlah PNS pada tahun 2016 sebesar 4.915 pegawai. Nilai tersebut meningkat pada tahun 2017 menjadi 10.382 pegawai. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2019 menjadi 10.059 pegawai. Peningkatan yang terjadi dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni pengadaan seleksi CPNS dan pendataan jumlah pegawai yang diperbaharui. Sementara itu, penurunan jumlah PNS terjadi pada tahun 2018, 2020, 2021, dan 2022. Penurunan yang terjadi umumnya disebabkan oleh keberadaan PNS yang memasuki masa purnatugas, mutasi keluar, maupun kematian.

Indikator kedua yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja bidang kepegawaian adalah persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas PNS adalah dengan menyediakan jalur tugas belajar dan izin belajar. Tugas belajar merupakan penugasan kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dengan biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan





izin belajar merupakan pemberian izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dengan pembiayaan mandiri. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa persentase PNS yang mengikuti program tugas belajar dan izin belajar di Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat rendah. Nilai tertinggi persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal berada pada tahun 2018, yakni sebesar 1,49% dari total PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, persentase terendah PNS yang melanjutkan pendidikan formal terjadi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 0,82%. Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum masih sangat rendah. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi perangkat daerah yang mengurus kepegawaian, mengingat pendidikan lanjut dapat menunjang karier PNS dengan meningkatkan pola pikir, perilaku, dan kemampuan yang sesuai dengan pendidikan yang ditempuh.

Indikator berikutnya yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja bidang kepegawaian adalah jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu. Sebagai abdi negara, seorang PNS terikat terhadap kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. PNS harus menjaga ucapan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan, baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Berdasarkan data yang tersedia, secara





umum jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu mengalami penurunan. Tahun 2016 menjadi tahun dengan jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu tertinggi, yakni sebanyak 76 kasus. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2019 dengan jumlah kasus secara berturut-turut 18 kasus dan 14 kasus. Namun, pada tahun 2018 dan 2020 jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani secara tepat waktu mengalami peningkatan, hingga mencapai masing-masing sejumlah 28 kasus. Penurunan jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu dapat dimaknai bahwa jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terjadi pada tataran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan, sehingga penanganan kasus pelanggaran disiplin juga mengalami penurunan.

Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja bidang pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat ditinjau berdasarkan beberapa indikator, yakni persentase peserta diklat prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan, persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan, persentase peserta diklat teknis yang lulus *post test*, dan persentase peserta diklat fungsional yang lulus *post test*. Secara rinci, kondisi indikator bidang diklat di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.





Tabel 2.42
Capaian Indikator Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2020

No.	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase peserta diklat prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan	92,94	92,98	0	96	99	0
2.	Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	98,75	85,34	56,81	88	100	0
3.	Persentase peserta diklat teknis yang lulus <i>post test</i>	100	88,34	126,67	99	79	68,6
4.	Persentase peserta diklat fungsional yang lulus <i>post test</i>	100	0	31,75	98	72	113,27

Sumber: Badan Pengembangan SDM Kalteng

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum tingkat kelulusan diklat di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Terkait peserta diklat prajabatan, persentase kelulusan dengan predikat memuaskan telah berada di atas 90%. Nilai tertinggi persentase kelulusan diklat prajabatan dengan predikat memuaskan terjadi pada tahun 2019 dengan nilai mencapai 99%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 92,94%. Diklat prajabatan tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19.





Kemudian, persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan mengalami tren penurunan selama periode 2015-2017 dan mengalami peningkatan pada periode 2018-2019. Sebanyak 98,75% peserta diklat kepemimpinan pada tahun 2015 berhasil lulus dengan predikat memuaskan. Persentase tersebut mengalami penurunan, hingga pada tahun 2017 mencapai titik terendah sebesar 56,81%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh kurikulum diklat kepemimpinan yang dianggap terlalu sulit, sehingga perlu adanya perbaikan. Pasca tahun 2017, persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan kembali mengalami peningkatan. Sebanyak 88% peserta diklat kepemimpinan pada tahun 2018 berhasil lulus dengan predikat memuaskan. Sementara itu, pada tahun 2019 seluruh peserta berhasil lulus dengan predikat memuaskan.

Fluktuasi juga terjadi pada indikator persentase peserta diklat teknis yang lulus *post test* dan persentase peserta diklat fungsional yang lulus *post test*. Diklat teknis merupakan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai PNS, sedangkan diklat fungsional merupakan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi jenjang jabatan fungsional.





Persentase peserta diklat teknis yang lulus *post test* pada tahun 2015 mencapai 100%. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga mencapai 88,34%, sebelum akhirnya mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 hingga mencapai 126,67%. Namun, persentase peserta diklat teknis yang lulus *post test* kembali mengalami penurunan, hingga pada tahun 2020 nilainya mencapai 68,6%. Persentase peserta diklat fungsional yang lulus *post test* pada tahun 2015 mencapai 100%. Terjadi penurunan persentase peserta diklat fungsional yang lulus *post test* pada tahun 2017, yakni hanya sebesar 31,75%. Peningkatan terjadi pada tahun 2018, dengan persentase kelulusan peserta diklat fungsional mencapai 98%. Meskipun mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 hingga mencapai 72%, persentase kelulusan *post test* peserta diklat fungsional meningkat pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 113,27%.

2.1.4.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Salah satu elemen penting untuk memastikan kualitas kebijakan yang disusun dalam sebuah perencanaan pembangunan adalah keberadaan hasil penelitian dan pengembangan yang mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis di suatu wilayah kajian. Melalui penyediaan masukan dan rekomendasi dari sebuah hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan, diharapkan proses pengambilan kebijakan





strategis dapat dilakukan dengan lebih baik dan memiliki landasan yang lebih kuat. Kinerja pada unsur penelitian dan pengembangan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditunjukkan dengan indikator persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa selama periode tahun 2017-2022, persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah mencapai 100% pada empat tahun, yakni tahun 2017, 2018, 2021, dan 2022. Beberapa kajian yang dilakukan selama periode tersebut diantaranya adalah kajian aspek teknis dan sosial ekonomi program food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, kajian optimalisasi fiskal daerah dan potensi penerimaan dan penggunaannya, kajian pemetaan kluster potensi pariwisata, kajian pengembangan UMKM, dan kajian lingkungan hidup strategis. Sementara itu, pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada kegiatan kajian atau penelitian yang berjalan di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara rinci, persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.





Tabel 2.43
Capaian Indikator Bidang Penelitian dan Pengembangan
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	100	100	0	0	100	100

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, Renja Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

2.1.4.4.6 Keuangan

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari tiga indikator utama, yakni Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Daerah, Persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap APBD, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Selama periode 2015-2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Opini tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPK, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. SILPA merupakan indikator yang menggambarkan sejumlah dana yang tidak digunakan oleh pemerintah daerah





dalam melakukan pelayanan masyarakat pada tahun tersebut. SILPA dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pembiayaan daerah. Berdasarkan data yang tersedia pada periode 2015-2022, persentase SILPA terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Nilai terendah SILPA terjadi pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 1,33% dari APBD tahun berjalan, sedangkan nilai tertinggi SILPA terjadi pada tahun 2018 dengan nilai mencapai 18,19%. Persentase SILPA yang masih tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengindikasikan realisasi penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang belum optimal.

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan masing-masing daerah yang diperoleh melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Indeks ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan kebijakan keuangan daerah. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui IKFD di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami fluktuasi selama periode 2015-2022. Nilai IKFD pada tahun 2015 adalah sebesar 1,35. Nilai tersebut kemudian mengalami penurunan signifikan, hingga pada tahun 2019 nilainya menjadi 0,437. Meskipun





mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 0,776, nilai IKFD kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga nilainya menjadi 0,392. Nilai IKFD mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 hingga menjadi 2,314. Semakin tinggi nilai IKFD, maka kemampuan suatu daerah dalam menjalankan program-program pelayanan wajib menggunakan anggaran yang tersedia akan semakin baik. Secara rinci, perkembangan ketiga indikator tersebut selama periode 2015-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.44

Capaian Indikator Bidang Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022

No.	Indikator	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase SILPA terhadap APBD	6,88%	1,33%	11,71%	18,19%	18,15%	14,17%	6,89%	18,13%
3.	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	1,35	1,17	0,61	0,464	0,437	0,776	0,392	2,314

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023

Tahun 2023 merupakan tahun peralihan dari masa RPJMD 2016-2021 dan masa RPJMD 2021-2026, dimana tahun 2022 RPJMD periode 2021-2026 masih dalam tahap penyusunan sehingga penetapan tujuan pembangunan RKPD tahun 2023 belum bisa mengacu pada RPJMD karena RPJMD masih proses penyusunan dan tidak termuat secara gamblang tujuan dan indikator tujuan pembangunan daerah pada dokumen RKPD ini.

2.2.1.1 Evaluasi terhadap sasaran pembangunan daerah.





Berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Rasio.

Evaluasi Indikator Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.45

No	Indikator Sasaran Pembangunan	Target RKPD 2023	Capaian Tahun 2023	Evaluasi/Penilaian	Tingkat Ketercapaian
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,70	4,14	Belum Tercapai	72,63%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	4	4,10	Tercapai	100%
3	Tingkat Kemiskinan (%)	4,18	5,11	Belum Tercapai	4,75%
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,89%	73,73	Tercapai	100%
5	Gini Rasio (Indeks)	0,222	0,317	Belum Tercapai	-0,21%
6	Indeks Modal Manusi	-	-	Indikator baru hasil penyelarasan	
7	Intensitas Penurunan Emisi GRK	-	-	Indikator baru hasil penyelarasan	

Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 ditargetkan 5,7 persen, dan capaian tahun 2023 sebesar 4,14. Dengan demikian target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sesuai RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 belum tercapai. Begitu juga untuk indikator Tingkat kemiskinan, dan Gini Rasio juga belum tercapai berturut turut sebesar 5,11 persen dan 0,317. Sedangkan untuk indikator dengan interpretasi tercapai ada pada Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,10, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,73.

Pada tahun 2023 kondisi perekonomian Kalimantan Tengah, dilihat dari target indikator sasaran pembangunan dalam RKPD tahun 2023 banyak tidak tercapai.





2.2.1.2 Evaluasi terhadap prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan pembangunan.

Evaluasi terhadap indikator Kinerja Pemerintah Daerah pada 3 (tiga) aspek indikator kinerja Pemerintah daerah difokuskan hanya pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial.

Dalam mengevaluasi indikator kinerja pemerintah daerah ini tetap menggunakan gap analisis, tapi untuk tingkat capaian tidak dihitung berdasarkan rasio antara capaian dan target tetapi dengan menghitung jumlah target evaluasi atau penilaiannya melampaui dan tercapai. Hal ini dikarenakan banyak data capaian yang masih belum ada.

Tabel 2.46

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Target	Capaian	Interpretasi	Tingkat Capaian	PD Penanggung Jawab
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pendapatan					
1.1	Persentase optimalisasi penerimaan pendapatan daerah (%)	100	103,55	tercapai	100,00	Bappenda
1.2	Rasio kemandirian keuangan daerah (%)	42,3	60,84	tercapai	100,00	Bappenda
1.3	Indeks kepuasan pelayanan	91,2	86,04	belum tercapai	94,34	Bappenda
II.	Kesejahteraan Sosial					
2	Pendidikan					
2.1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,6	12,76	belum tercapai	87,40	Disdik
2.2	Rata-rata Lama Sekolah	10	8,73	belum tercapai	87,30	Disdik
2.3	Angka Melek Huruf	99,82	99,03	belum tercapai	99,21	Disdik
3	Kesehatan					
3.1	Umur Harapan Hidup (tahun)	70,19	73,54	melampaui	100,00	Dinkes (BPS)
3.2	Persentase Balita Wasting	7,5	5,5	tercapai	7,77	Dinkes (Bidang Kesmas)
3.3	Persentase Balita Stunting (%)	18,4	12,1	belum tercapai	18,74	Dinkes (Bidang Kesmas)
3.4	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	6,9	6	tercapai	7,03	Dinkes (Bidang Kesmas)





3.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup (indeks)	131	211	belum tercapai	130,39	Dinkes (Bidang Kesmas)
4	Ketenagakerjaan					
4.1	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	96,00	96,10	tercapai	100,00	Disnakertrans
5	Kesejahteraan Rakyat					
5.1	Jumlah Tempat Ibadah yang Dikelola	210	210	tercapai	100,00	Biro Kesra
5.2	Jumlah Kelembagaan Spiritual yang Dibina	85	95	tercapai	100,00	Biro Kesra
5.3	Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	12	3	belum tercapai	25,00	Biro Kesra
III.	Seni Budaya dan Olahraga					
1	Kebudayaan					
1.1	Jumlah grup kesenian/sanggar seni (grup)	380	492	melampaui	100,00	Disbudpar
1.2	Jumlah pemanfaatan Gedung (kali)	35	75	melampaui	100,00	Disbudpar
2	Pemuda dan Olahraga					
2.1	Jumlah Klub olahraga (buah)	145	136	belum tercapai	93,79	Dispora
2.2	Jumlah gedung olahraga (unit)	4	4	tercapai	100,00	Dispora
Rata Rata Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat					80,96	
B	ASPEK PELAYANAN UMUM					
I.	Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar					
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Menengah					
1.1.1	Prosentase guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang berkualifikasi minimal S1/D4	99	99,71	tercapai	100,00	Disdik
1.1.2	Prosentase guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang bersertifikasi	66,50	71,23	tercapai	100,00	Disdik
1,1,3	Persentase SMA berakreditasi minimal B (%)	72,13	69,96	belum tercapai	96,99	Disdik
1.1.4	Persentase SMK Berakreditasi minimal B (%)	73,7	61,15	belum tercapai	82,97	Disdik
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	68,17	70,36	tercapai	100,00	Disdik



1.1.6	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	85,5	88,28	tercapai	100,00	Disdik
1.1.7	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,58	0	melampaui	1,58	Disdik
1.1.8	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	90,42	66,32	belum tercapai	73,35	Disdik
1.1.9	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi	49,5 %	24,54	belum tercapai	49,58	Disdik
1.1.10	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal Dasar	85 %	47,52 %	belum tercapai	55,91	Disdik
2	Kesehatan					
2.1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	100	81,46	belum tercapai	81,46	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100	65,57	belum tercapai	65,57	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.3	Insidensi HIV (per 1000 pddk yg tdk terinfeksi HIV)	0,148	0,24	tercapai	100,00	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.4	Insidensi TB (per 100,000 penduduk)	51,1	51	belum tercapai	99,80	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.5	Eliminasi malaria (kab/kota)	12	12	tercapai	100,00	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.6	Rasio distribusi tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk Per 1000 pddk	1,09	1,4	tercapai	100,00	Dinkes (Bidang SDK)
2.7	Rasio dokter per satuan penduduk (per 100,000 penduduk) (%) (45/100,000)	29,5	29,3	belum tercapai	99,32	Dinkes (Bidang SDK)
2.8	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (9 nakes)	Persentase puskesmas dengan	Persentase puskesmas dengan	Persentase puskesmas dengan	Persentase puskesmas	Persentase puskesmas dengan



2.9	Persentase fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) terakreditasi	100	60	belum tercapai	60,00	Dinkes (Bidang Yankes)
2.10	Persentase rumah sakit terakreditasi	100	100	tercapai	100,00	Dinkes (Bidang Yankes)
2.11	Cakupan kepesertaan JKN (persen)	93,4	98,38	tercapai	100,00	Dinkes (Bidang Yankes)
2.12	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (persen)	92	88,55	belum tercapai	96,25	Dinkes (Bidang SDK)
2.13	Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS)	45	45	tercapai	100,00	Dinkes (Bidang Kesmas)
2.14	Jumlah Kab/kota yang melakukan Pandu (Pelayanan Terpadu) PTM (penyakit Tidak menular) di > 80% Puskesmas	11	14	melampaui	100,00	Dinkes (Bidang P2)
2.15	Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20	0	belum tercapai	0,00	Dinkes (Bidang
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	0,43	0,4296	tercapai	99,91	DPUPR
3.2	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	85,61	85,599	tercapai	99,99	DPUPR
3.3	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (> 40	43,20	42,31	belum tercapai	97,94	DPUPR
3.4	Persentase Jalan Provinsi yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	63,46	BAD	belum bisa dinilai	0,00	DPUPR
3.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	76	86,91	melampaui	100,00	DPUPR
3.6	Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik	77,56	77,45	belum tercapai	99,86	DPUPR
3.7	Rasio Jaringan Irigasi	24,49	23,85	belum tercapai	97,39	DPUPR
3.8	Persentase penduduk berakses air minum	95,28	77,72	belum tercapai	81,57	DPUPR
3.9	Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	8	6	belum tercapai	75,00	DPUPR
3.10	Drainase yang dibangun ditingkatkan (meter)	3,000	2.287	belum tercapai	100,00	DPUPR



3.11	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	1,080	1.248	tercapai	100,00	DPUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4.1	Persentase Rumah layak huni (%)	65,46	54,07%	tercapai	100,00	Dinas Perkimtan
4.2	Rasio rumah layak huni	1 : 5,83	1 : 7,15	belum tercapai	99,80	Dinas Perkimtan
4.3	Persentase areal Kawasan kumuh (%)	0,0511	0,0510	belum tercapai	99,80	Dinas Perkimtan
4.4	Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani (%)	3,571	2,381	belum tercapai	66,68	Dinas Perkimtan
4.5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani (%)	9,091	6,061	belum tercapai	66,67	Dinas Perkimtan
4.6	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	tercapai	100,00	Dinas Perkimtan
4.7	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%)	100	100	tercapai	100,00	Dinas Perkimtan
5	Ketentraman, Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat					
5.1	Capaian pembinaan Terhadap Ormas, LSM aktif (Prosentase)	75	117,87	melampaui	100,00	Kesbangpol
5.2	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah (nilai)	75,50	79,30	melampaui	100,00	Kesbangpol
5.3	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang)	200	1300	melampaui	100,00	Kesbangpol
5.4	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yangtelah ditangani (persentase kasus)	80	72,00%	belum tercapai	90,00	Kesbangpol
5.5	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10,000 penduduk (Orang)	9:10000	8:10000	belum tercapai	88,00	SatpolPP
5.6	Jumlah Anggota Linmas yang Terlatih (Orang)	70	1956	melampaui	100	Satpol PP
5.7	Penegakan Perda (kali)	19	6	belum tercapai	31,58	SatpolPP
5.8	Cakupan patroli petugas Satpol PP (kali)	836	237	belum tercapai	28,35	SatpolPP
5.9	Pengamanan Objek Vital dan Aset Pemerintah Provinsi (kali)	2,159	12287	melampaui	100	SatpolPP



5.10	Pengawasan Pejabat atau Tamu VVIP (kali)	125	26	belum tercapai	28,80	SatpolPP
5.11	Koordinasi Kewaspadaan Dini dengan Stakeholder terkait (kegiatan)	16	BAD	belum bisa dinilai	0	SatpolPP
5.12	Persentase Penanganan Pra Bencana	100	100	tercapai	100,00	BPBPK
5.13	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	tercapai	100,00	BPBPK
5.14	Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan	100	100	tercapai	100,00	BPBPK
5.15	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100	100	tercapai	100,00	BPBPK
5.16	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	12	12	tercapai	100,00	BPBPK
5.17	Tersedianya SDM Penanggulangan Bencana yang kompeten	10	10	tercapai	100,00	BPBPK
5.18	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	100	100	tercapai	100,00	BPBPK
5.19	Persentase pendampingan elayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	100	tercapai	100,00	BPBPK
6	Sosial					
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)	67	67	tercapai	100,00	Dinsos
6.2	PPKS yang memperoleh antuan sosial (Orang)	1,000	1,000	tercapai	100,00	Dinsos
6.3	Jumlah penanganan kasus enyandang masalah Kesejahteraan sosial (Kasus)	100	100	tercapai	100,00	Dinsos
6.4	Potensi dan Sumber Kesos (PSKS) yang mendapat Pembinaan	3,100	3,100	tercapai	100,00	Dinsos
6.5	Jumlah Fakir Miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KK)	150	150	tercapai	100,00	Dinsos
6.6	Jumlah PPKS yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar secara inklusivitas di dalam panti (orang)	300	300	tercapai	100,00	Dinsos
II	Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					





1	Tenaga Kerja					
1.1	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	96,00	18,75	belum tercapai	19,55	Disnakertrans
1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,50	67,18	belum tercapai	92,66	Disnakertrans
1.3	Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	2750	1831	belum tercapai	66,58	Disnakertrans
1.4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,00	4,10	belum tercapai	3,98	Disnakertrans
1.5	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	80,00	72,94	belum tercapai	91,18	Disnakertrans
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	81,92	81,98	melampaui	100,00	DP3AP2KB
2.2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,50	1,64	belum tercapai	46,86	DP3AP2KB
2.3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	87,5	114,3	melampaui	100,00	DP3AP2KB
2.4	Indeks Perlindungan Anak	63,68	59,56	belum tercapai	93,53	DP3AP2KB
2.5	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	55	100	melampaui	100,00	DP3AP2KB
3	Pangan					
3.1	Skor Pola Harapan (PPH) Konsumsi (%)	90,4	91,2	melampaui	100,00	DKP
3.2	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	34,167	51,087	melampaui	100,00	DKP
3.3	Penguatan Cadangan Pangan (%)	60,5	100	melampaui	100,00	DKP
3.4	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	2	2,32	melampaui	100,00	DKP
3.5	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	90,5	90,0	tercapai	99,45	DKP
4	Pertanahan					
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	1,12	1,766	melampaui	100,00	Dinas Perkintan
4.2	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%)	20,3	66,6	melampaui	100,00	Dinas Perkintan
5	Lingkungan Hidup					
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,53	75,17	melampaui	100,00	DLH





5.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)	77	39,20	belum tercapai	50,91	DLH
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
6.1	Penerbitan Kartu Keluarga (dokumen)	824,105	822,022	belum tercapai	99,75	Disdukcapil
6.2	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	98,7	97,76	belum tercapai	99,05	Disdukcapil
6.3	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan (%)	45	50,39	tercapai	100,00	Disdukcapil
6.4	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s,d,17 Tahun (%)	98,50	98,93	belum tercapai	100,00	Disdukcapil
6.5	Persentase Penerbitan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan (%)	75,5	98,33	belum tercapai	100,00	Disdukcapil
6.6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	42	45,84	belum tercapai	100,00	Disdukcapil
6.7	Jumlah Instansi/Lembaga yang Menandatangani kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (lembaga pengguna)	5	4	belum tercapai	80,00	Disdukcapil
6.8	Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk (%)	100	100	tercapai	100,00	Disdukcapil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
7.1	Jumlah Aparatur Desa Terlatih	1010	1184	tercapai	100,00	Dinas PMD
7.2	Jumlah Desa Mandiri	65	194	tercapai	100,00	Dinas PMD
7.3	Jumlah Desa Berkembang	797	704	belum tercapai	88,33	Dinas PMD
7.4	Jumlah Desa Tertinggal	300	143	melampaui	47,67	Dinas PMD
7.5	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	730	642	belum tercapai	87,95	Dinas PMD
7.6	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	1740	3686	tercapai	100,00	Dinas PMD



8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	62,44	54,25	belum tercapai	86,88	DP3AP2KB
8.2	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2,06	2,29	tercapai	100,00	DP3AP2KB
8.3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern	73,68	74,38	tercapai	100,00	DP3AP2KB
8.4	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,18	8,58	tercapai	100,00	DP3AP2KB
8.5	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	20	20	tercapai	100,00	DP3AP2KB
9	Perhubungan					
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP)	1,638,000	686,186	belum tercapai	41,89	Dishub
9.2	Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	400	360	belum tercapai	90,00	Dishub
9.3	Rasio Izin Trayek	0,000078	0,0000004	belum tercapai	0,51	Dishub
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut /Udara/Terminal Bus	3	1	belum tercapai	33,33	Dishub
9.5	Persentase Layanan Angkutan Darat (%)	63	63	tercapai	100,00	Dishub
9.6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	88	80	belum tercapai	90,91	Dishub
9.7	Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (%)	100	100	tercapai	100,00	Dishub
9.8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,014	0,014	tercapai	100,00	Dishub
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum darat (Orang/Barang)	220,000 / 240,000	111,704	tercapai	100,00	Dishub
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun	2,200,000 orang/32,350,000 ton	798,890 orang/8598765 ton	tercapai	100,00	Dishub
10	Komunikasi dan Informatika					
10.1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	68	60	belum tercapai	88,24	Diskominfoantik
10.2	Jumlah konten yang disebarluaskan melalui media cetak/ online/elektronik	650	600	belum tercapai	92,31	Diskominfoantik



10.3	Jumlah website/aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan	48	43	belum tercapai	89,58	Diskominfosa ntik
10.4	Jumlah lokasi yang terhubung dengan <i>Fiber Optic</i> (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	52	43	belum tercapai	82,69	Diskominfosa ntik
10.5	Jumlah informasi yang di upload pada portal PPID Provinsi Kalimantan Tengah	540	500	belum tercapai	92,59	Diskominfosa ntik
10.6	Jumlah PD yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah (co-location/hosting)	33	30	belum tercapai	90,91	Diskominfosa ntik
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
11.1	Persentase Kontribusi UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	12,35	39,47	melampaui	100,00	Diskop,UKM
11.2	Jumlah Wirausaha (Unit)	78,644	121.458	melampaui	100,00	Diskop,UKM
11.3	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	57,800	121.149	melampaui	100,00	Diskop,UKM
11.4	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	9,99	69,88	melampaui	100,00	Diskop,UKM
11.5	Persentase Rasio Kewirausahaan	5,52	8,61	melampaui	100,00	Diskop,UKM
11.6	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Unit)	4,242	3.672	belum tercapai	87,00	Diskop,UKM
11.7	Jumlah UMKM yang di dampingi (Unit)	480	449	belum tercapai	93,54	Diskop,UKM
11.8	Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USP-Kop/KJKS) (Unit)	2,584	2.594	melampaui	100,00	Diskop,UKM
11.9	Persentase koperasi aktif (%)	83,71	80,96	belum tercapai	96,71	Diskop,UKM
11.10	Pertumbuhan Koperasi (Unit)	50	140	melampaui	100,00	Diskop,UKM
11.11	Presentase koperasi yang memiliki kategori sehat/Berkualitas (%)	19,00	18,03	belum tercapai	94,89	Diskop,UKM
11.12	Koperasi berprestasi tingkat provinsi dan nasional (unit)	12	0	belum tercapai	0,00	Diskop,UKM
11.13	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih (Orang)	240	240	tercapai	100,00	Diskop,UKM
11.14	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset (%)	2,00	11,52	melampaui	100,00	Diskop,UKM
11.15	Koperasi Modern (Unit)	2	6	melampaui	100,00	Diskop,UKM





11.16	Persentase Kontribusi Koperasi di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	1,65	3,29	melampaui	100,00	Diskop,UKM
12	Penanaman Modal					
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	700	2.267	melampaui	100,00	DPMPTSP
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (dalam juta rupiah)	8,300,000	19.104.525,23	melampaui	100,00	DPMPTSP
12.3	PMDN (dalam Juta Rupiah)	5,810,000	8.779.502,70	melampaui	100,00	DPMPTSP
12.4	PMA (dalam US \$ Ribu)	170,547,95	697.636,70	melampaui	100,00	DPMPTSP
12.5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Investasi (%)	4,01	32,44	melampaui	100,00	DPMPTSP
12.6	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan (%)	81	84,64	melampaui	100,00	DPMPTSP
12.7	Jumlah Perizinan yang Terbit Tetap Waktu	595	690	melampaui	100,00	DPMPTSP
12.8	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	4	6	melampaui	100,00	DPMPTSP
12.9	Jumlah Informasi Data Perijinan berusaha yang terkelola dengan baik	5	10	melampaui	100,00	DPMPTSP
12.10	Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi	2	5	melampaui	100,00	DPMPTSP
13	Kepemudaan dan Olahraga					
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	84,21%	80,00%	belum tercapai	95,00	Dispora
13.2	Persentase Wirausaha Muda	41,50%	32,00%	belum tercapai	77,11	Dispora
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	85,71%	66,67%	belum tercapai	77,79	Dispora
13.4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	45,45%	45,45%	tercapai	100,00	Dispora
13.5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda					
13.6	Jumlah Atlet Berprestasi					
13.7	Jumlah Prestasi Olahraga					
14	Statistik					
14.1	Buku " Kalimantan Tengah Dalam Angka"	Ada	Ada	tercapai	100,00	Diskominfoantik
14.2	Buku "PDRB Kalimantan Tengah"	Ada	Ada	tercapai	100,00	Diskominfoantik





14.3	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	tercapai	100,00	Diskominfosa ntik
15	Persandian					
15.1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	402	447	tercapai	100,00	Diskominfosa ntik
16	Kebudayaan					
16.1	Penyelenggaraan festivalseni dan budaya (kali)	4	4	tercapai	100,00	Disbudpar
16.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	651	743	tercapai	100,00	Disbudpar
17	Perpustakaan					
17.1	Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan (eks)	147,000	37560	belum tercapai	100,00	DPAD
17.2	Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan	27,675	9015	belum tercapai	100,00	DPAD
17.3	Jumlah Lembaga/Perpustakaan yang diberikan Pembinaan Peprustakaan	24	8	belum tercapai	33,33	DPAD
17.4	Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan (%)	95,00	83	belum tercapai	87,37	DPAD
17.5	Jumlah Koleksi Bacaan yang tersedia di perpustaklaan (judul)	35,000	11300	belum tercapai	100,00	DPAD
17.6	Jumlah Naskah Kuno yang terlestarikan (Naskah)	2	0	belum tercapai	0,00	DPAD
18	Kearsipan					
18.1	Presentase SOPD Menerapkan Arsip Secara Baku Sesuai	100%	97	belum tercapai	97,00	DPAD
III.	Urusan Pilihan					
1	Kelautan dan Perikanan					
1.1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	136140,63	136164,09	tercapai	100,00	Dislutkan
1.2	Produksi Perikanan Tangkap	137130,72	160127,81	tercapai	100,00	Dislutkan
1.3	Angka Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	57,62	56,67	belum tercapai	98,35	Dislutkan
1.4	Jumlah kebutuhan benih ikan (ekor)	72,010	72824	tercapai	100,00	Dislutkan
1.5	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	109,5	109,9	tercapai	100,00	Dislutkan
1.6	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,30	2,80	belum tercapai	84,85	Dislutkan



1.7	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	85	88,89	tercapai	100,00	Dislutkan
1.8	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok)	48	204	tercapai	100,00	Dislutkan
1.9	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	4	4	tercapai	100,00	Dislutkan
1.10	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	35073,68	35528,94	tercapai	100,00	Dislutkan
2	Pertanian dan Peternakan					
2.1.	<i>Luas panen tanaman pangan</i>					
2.1.1	Padi (Ha) :	170,824	101.093	belum tercapai	59,18	DPTPHP
2.1.2	Jagung (Ha)	28,231	7.500	belum tercapai	26,57	DPTPHP
2.1.3	Kedelai(Ha)	99,2	108,8	tercapai	100,00	DPTPHP
2.1.4	Ubi Kayu (Ha)	3,516	1.252	belum tercapai	35,61	DPTPHP
2.2.	<i>Produktivitas tanaman pangan</i>					
2.2.1	Padi (ku/Ha)	4,10	3,13	belum tercapai	76,34	DPTPHP
2.2.2	Jagung (Kwintal/Ha)	5,89	3,75	belum tercapai	63,67	DPTPHP
2.2.3	Kedelai (Kwintal/Ha)	1,59	1,96	tercapai	100,00	DPTPHP
2.2.4	Ubi Kayu (Kwintal/Ha)	27,65	27,21	belum tercapai	98,41	DPTPHP
2.3.	<i>Produksi tanaman pangan</i>					
2.3.1	Padi (Ton)	663,617	334.733	belum tercapai	50,44	DPTPHP
2.3.2	Jagung (Ton)	47,858,14	26.856,24	belum tercapai	56,12	DPTPHP
2.3.3	Kedelai (Ton)	155,21	165,39	tercapai	100,00	DPTPHP
2.3.4	Ubi Kayu (Ton)	109,866,38	33.494,55	belum tercapai	30,49	DPTPHP
2.4	<i>Luas Panen Tanaman Hortikultura</i>					
2.4.1	Buah-Buahan (Ku)					
	a. Jeruk (Ha)	586	297	belum tercapai	50,68	DPTPHP
	b. Durian (Ha)	1,059	1.334	tercapai	100,00	DPTPHP
	c. Rambutan (Ha)	2,765	2.696	tercapai	100,00	DPTPHP
	d. Nanas (Ha)	493	110	belum tercapai	22,31	DPTPHP
	e. Pisang (Ha)	2,019	623	belum tercapai	30,86	DPTPHP
2.4.2	Sayuran (Ku)					
	a. Bawang Merah (Ha)	1,046	17	belum tercapai	1,63	DPTPHP
	b. Cabai Besar (Ha)	1,053	209	belum tercapai	19,85	DPTPHP



	c. Cabai Rawit (Ha)	2,343	915	belum tercapai	39,05	DPTPHP
	d. Kacang Panjang (Ha)	2,060	748	belum tercapai	3,63	DPTPHP
2.4.3.	Tanaman Hias (Tangkai)					
	a. Anggrek	1,831	1,531	belum tercapai	83,62	DPTPHP
	b. Mawar	885	865	belum tercapai	97,74	DPTPHP
2.4.4	Tanaman Obat (Kg)					
	a. Jahe	381,286	380,986	belum tercapai	99,92	DPTPHP
	b. Kunyit	194,609	194,509	belum tercapai	99,95	DPTPHP
2.5.	<i>Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura</i>					
2.5.1	Buah-Buahan (Ku)					
	a. Jeruk (Ton)	13,893	4.394	belum tercapai	31,63	DPTPHP
	b. Durian (Ton)	7,695	11.365	tercapai	100,00	DPTPHP
	c. Rambutan (Ton)	9,760	20.147	tercapai	100,00	DPTPHP
	d. Nanas (Ton)	14,064	10.994	belum tercapai	78,17	DPTPHP
	e. Pisang (Ton)	33,815	40.546	tercapai	100,00	DPTPHP
2.5.2	Sayuran (Ku)					
	a. Bawang Merah (Ton)	7,988	72	belum tercapai	0,90	DPTPHP
	b. Cabai Besar (Ton)	6,416	999	belum tercapai	15,57	DPTPHP
	c. Cabai Rawit (Ton)	8,161	6.969	belum tercapai	85,39	DPTPHP
	d. Kacang Panjang (Ton)	7,615	4.004	belum tercapai	52,58	DPTPHP
2.5.3	Tanaman Hias (Tangkai)					
	a. Anggrek	12,990	1.795	tercapai	100,00	DPTPHP
	b. Mawar	6,884	4.459	belum tercapai	64,77	DPTPHP
2.5.4	Tanaman Obat (Kg)					
	a. Jahe	766,798	438.843	belum tercapai	57,23	DPTPHP
	b. Kunyit	333,277	249.778	belum tercapai	74,95	DPTPHP
2.6	<i>Jumlah Produktivitas Tanaman Holtikultura</i>					
2.6.1	Buah-Buahan (Ku)					
	a. Jeruk (Ton)	18,86	14,81	tercapai	100,00	DPTPHP
	b. Durian (Ton)	6,51	8,52	tercapai	100,00	DPTPHP
	c. Rambutan (Ton)	4,73	7,47	tercapai	100,00	DPTPHP
	d. Nanas (Ton)	94,67	100,32	tercapai	100,00	DPTPHP
	e. Pisang (Ton)	20,11	65,08	belum tercapai	30,90	DPTPHP
2.6.2	Sayuran (Ku)					
	a. Bawang Merah (Ton)	7,07	58,91	tercapai	100,00	DPTPHP
	b. Cabai Besar (Ton)	6,15	4,78	belum tercapai	77,72	DPTPHP





	c. Cabai Rawit (Ton)	6,26	7,61	tercapai	100,00	DPTPHP
	d. Kacang Panjang (Ton)	2,53	5,35	tercapai	100,00	DPTPHP
2.6.3	Tanaman Hias (Tangkai)					
	a. Anggrek	5,65	1,65	belum tercapai	29,20	DPTPHP
	b. Mawar	3,47	10,93	tercapai	100,00	DPTPHP
2.6.4	Tanaman Obat (Kg)					
	a. Jahe	2,20	2,35	tercapai	100,00	DPTPHP
	b. Kunyit	1,94	1,95	tercapai	100,00	DPTPHP
2.7	<i>Populasi Ternak</i>					
2.7.1	Sapi Potong (Ekor)	105,459	73.936	belum tercapai	70,11	DPTPHP
2.7.2	Kerbau (Ekor)	14,490	11.588	belum tercapai	79,97	DPTPHP
2.7.3	Kambing (Ekor)	56,498	45.957	belum tercapai	81,34	DPTPHP
2.7.4	Babi (Ekor)	275,390	101.857	belum tercapai	36,99	DPTPHP
2.7.5	Ayam Buras (Ekor)	3,347,926	2.843.942	belum tercapai	84,95	DPTPHP
2.7.6	Ayam Ras Petelur (Ekor)	520,580	617.863	tercapai	100,00	DPTPHP
2.7.7	Ayam Ras Pedaging	27,524,246	26.653.685	belum tercapai	96,84	DPTPHP
2.7.8	Itik (Ekor)	349,725	256.689	belum tercapai	73,40	DPTPHP
2.8	<i>Jumlah Produksi Daging Ternak</i>					
2.8.1	Sapi Potong (Ton)	5,386	4.026,73	belum tercapai	74,76	DPTPHP
2.8.2	Kerbau (Ton)	98	48,75	belum tercapai	49,74	DPTPHP
2.8.3	Kambing (Ton)	254	33,65	belum tercapai	13,25	DPTPHP
2.8.4	Babi (Ton)	2,041	1.949,35	belum tercapai	95,51	DPTPHP
2.8.5	Ayam Buras (Ton)	2,805	2.543,78	belum tercapai	90,69	DPTPHP
2.8.6	Ayam Ras Petelur (Ton)	44	411,50	tercapai	100,00	DPTPHP
2.8.7	Ayam Ras Pedaging (Ton)	42,652	39.440,16	belum tercapai	92,47	DPTPHP
2.8.8	Itik (Ton)	215	242,43	tercapai	100,00	DPTPHP
2.9	<i>Telur</i>					
2.9.1	Ayam Buras (Kg)	2,596,096	2.417.351	belum tercapai	93,11	DPTPHP
2.9.2	Ayam Ras Petelur (Kg)	7,136,250	5.573.705	belum tercapai	78,10	DPTPHP
2.9.3	Itik (Kg)	1,827,790	1.509.203	belum tercapai	82,57	DPTPHP
2.10	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kalteng (%)	7,16	4,62	belum tercapai	64,53	DPTPHP
2,11	Kontribusi sub sector tanaman pangan terhadap PDRB (%)	1,5	1,23	belum tercapai	82,00	DPTPHP





2.12	Kontribusi sub sector peternakan terhadap PDRB (%)	2,57	0,48	belum tercapai	18,68	DPTPHP
2.13	Kontribusi Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB (%)	3,09	1,46	belum tercapai	47,25	DPTPHP
3	Pariwisata					
3.1	Jumlah wisatawan (orang)	845,070	1.803.744	melampaui	100,00	Disbudpar
4	Perdagangan					
4.1	Pertumbuhan Sektor	7,35	6,72	belum tercapai	91,43	Disdagperin
4.2	Kontribusi PDRB dari Sektor	13,60	11,86	belum tercapai	87,21	Disdagperin
4.3	Nilai Ekspor Bersih	1,785	4916,97	tercapai	100,00	Disdagperin
4.4	Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)	5,25	-14,37	belum tercapai	0	Disdagperin
4.5	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu (%)	5,00	6,7	belum tercapai	100,00	Disdagperin
4.6	Pengaduan Konsumen Terkait Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100	tercapai	100,00	Disdagperin
4.7	Peningkatan Sampel Produk yang Memenuhi	11,55	11,68	tercapai	100,00	Disdagperin
5	Kehutanan					
5.1	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan	90	93,40	tercapai	100,00	Dishut
5.2	Luas Kawasan Hutan KPH yang difasilitasi pemanfaatannya (hektar)	40,000	39835	belum tercapai	99,59	Dishut
5.3	Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar)	1,100	806	belum tercapai	73,27	Dishut
5.4	Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Setiap Tahun (hektar)	285,000	90812,96	tercapai	100,00	Dishut
5.5	Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar)	385,000	372991,45	belum tercapai	96,88	Dishut
5.6	Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun (persen)	100	70	belum tercapai	70,00	Dishut





5.7	Luas Kawasan Konservasi/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola (hektar)	58,501	58,113	belum tercapai	0,10	Dishut
5.8	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas old/silver (unit)	200	509	tercapai	254,50	Dishut
5.9	Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (%)	0,94	0,97	tercapai	103,19	Dishut
5.10	Jumlah Dokumen pengelolaan DAS wilayah Kalimantan Tengah (dokumen)	1	1	tercapai	100,00	Dishut
6	Perkebunan					
6.1	Persentase Penanganan Organisme Penyakit Tanaman (OPT)	75%	75	tercapai	100,00	Disbun
6.2	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	53	53	tercapai	100,00	Disbun
6.3	Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang Memperoleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)	55%	33,8	belum tercapai	61,45	Disbun
6.4	Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80%	80	tercapai	100,00	Disbun
6.5	Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500	500	tercapai	100,00	Disbun
6.6	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	14,00	14,67	tercapai	100,00	Disbun
6.7	Persentase Peningkatan NTP sub sektor Perkebunan	0,08	0,20	tercapai	100,00	Disbun
6.8	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,14%	2	tercapai	100,00	Disbun
7	Perindustrian					
7.1	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan (%)	16,10	15,49	belum tercapai	96,21	Disdagperin
7.2	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	6,05	6,10	tercapai	100,00	Disdagperin
8	Ketransmigrasian					
8.1	Jumlah rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan	8	6	belum tercapai	75	Disnakertrans



9	Energi Dan Sumber Daya Mineral					
9.1	Rasio Elektrifikasi (%)	93,39	93,38	belum tercapai	99,99	DESDM
9.2	Rasio desa berlistrik (%)	96,27	86,51	belum tercapai	89,86	DESDM
9.3	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)(%)	12	13	tercapai	100,00	DESDM
IV	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Perencanaan Pembangunan					
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	tercapai	100,00	Bappedalitbang
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perubahan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	tercapai	100,00	Bappedalitbang
2	Penelitian Dan Pengembangan					
2.1	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah (%)	97	100	melampaui	100,00	Bappedalitbang
3	Setda (Administrasi Pemerintahan)					
3.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	88	81,85	belum tercapai	93,01	Biro Organisasi
3.2	Nilai SAKIP	BB	B	belum tercapai	87,50	Biro Organisasi
3.3	Predikat Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	tercapai	100,00	Biro Organisasi
3.4	Perda Kelembagaan Organisasi Daerah	1 Perda, 5 Pergub	4 Pergub	belum tercapai	80,00	Biro Organisasi
3.5	Pengadaan Tepat Waktu (%)	50	100	tercapai	100,00	Biro Pengadaan Barang dan
3.6	Ketersediaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (%)	100	99,99	tercapai	99,99	Biro Pengadaan Barang dan
3.7	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kabupaten/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	100%	100	tercapai	100,00	Biro Administrasi Pembangunan



3.8	Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	100%	100	tercapai	100,00	Biro Administrasi Pembangunan
3.9	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	95%	89,14	belum tercapai	93,83	Biro Administrasi Pembangunan
3.10	Jumlah penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (rancangan)	10	9	belum tercapai	90,00	Biro Hukum
3.11	Jumlah Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan)	50	63	melampaui	100,00	Biro Hukum
3.12	Jumlah penyusunan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan)	750	619	belum tercapai	82,53	Biro Hukum
3.13	Jumlah rancangan produk hukum daerah Kabupaten/kota yang dievaluasi (rancangan prohumda)	191	51	belum tercapai	26,70	Biro Hukum
3.14	Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara refresif (produk hukum)	107	530	melampaui	100,00	Biro Hukum
3.15	Jumlah Rancangan produk hukum daerah kabupaten,kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (rancangan prohumda)	296	530	melampaui	100,00	Biro Hukum
3.16	Jumlah dokumen gugatan perkara hukum litigasi yang ditandatangani (perkara)	12	30	melampaui	100,00	Biro Hukum
3.17	Jumlah dokumen perkara non litigasi yang ditangani (kasus)	12	12	tercapai	100,00	Biro Hukum
3.18	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan aksi HAM (dokumen)	3	3	tercapai	100,00	Biro Hukum





3.19	Jumlah buku-buku himpunan produk hukum daerah (buku)	550	0	belum tercapai	0,00	Biro Hukum
3.20	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	83%	100	tercapai	100,00	Biro Umum
3.21	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2,10%	100	tercapai	100,00	Biro Umum
3.22	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	150 Kali	311	tercapai	100,00	Biro Umum
3.23	Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	125 Kali	170	melampaui	100,00	Biro Umum
3.24	Jumlah tata naskah dinas yg ditandatangani oleh pimpinan	230 Surat	251	tercapai	100,00	Biro Umum
3.25	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional	85 Kali	142	tercapai	100,00	Biro Umum
3.26	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	165 Kali	207	tercapai	100,00	Biro Umum
3.27	Jumlah dokumen perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (dokumen)	2 dokumen	2	tercapai	100,00	Biro Administrasi Pimpinan
3.28	Jumlah pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (dokumen)	300 dokumen	63	belum tercapai	21,00	Biro Administrasi Pimpinan
3.29	Jumlah pelayanan kegiatan Pimpinan (Protokol dan Humas)	700 Kegiatan	484	belum tercapai	69,14	Biro Administrasi Pimpinan
4	Kepegawaian, Pendidikan Serta Pelatihan					
4.1	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	90%	95	tercapai	100,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.2	Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	75%	77	tercapai	100,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	70%	100	tercapai	100,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	54	51	belum tercapai	94,44	Badan Kepegawaian Daerah





4.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1010	3189	tercapai	100,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	6200	6846	melampaui	100,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.7	Indeks Profesionalitas ASN	76,00	71,86	belum tercapai	94,55	Badan Kepegawaian Daerah
4.8	Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	0,10%	0,10	tercapai	100,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.9	Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	85%	90	tercapai	100,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.10	Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	72%	98	tercapai	100,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
5.1	Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	85%	100	tercapai	100,00	BPSDM
5.2	Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test	85%	146	tercapai	100,00	BPSDM
5.3	Persentase Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Sosial Kultural yang lulus post test	80%	55	belum tercapai	68,75	BPSDM
5.4	Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan diklat	85%	33	belum tercapai	38,82	BPSDM
6	Keuangan					
6.1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	tercapai	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.2	Persentase SILPA terhadap APBD	6,33%	14	belum tercapai	5,12	Badan Keuangan
6.3	Persentase belanja pendidikan (20%)	30,96%	14	belum tercapai	31,51	Badan Keuangan
6.4	Persentase belanja Kesehatan (10%)	10,03%	9	belum tercapai	10,13	Badan Keuangan



6,5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	7,00%	14 Kabupaten/ Kota	belum bisa dinilai berbeda satuan antara target dengan capaian	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.6	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	tercapai	100	Badan Keuangan dan
7	Penghubung					
7.1	Jumlah yang mendapat fasilitasi layanan penghubung	2100	BAD	belum bisa dinilai	0	Badan Penghubung
7.2	Jumlah layanan informasi dan promosi	100	BAD	belum bisa dinilai	0	Badan Penghubung
8	Pengawasan					
8.1	Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Level 3	Level 3	tercapai	100,00	Inspektorat
8.2	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP	tercapai	100,00	Inspektorat
8.3	Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat 3	Tingkat 3	tercapai	100,00	Inspektorat
8.4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai					
	- BPK RI	65 %	76,39 %	tercapai	100,00	Inspektorat
	- ITJEN Kemendagri/Teknis Lainnya	65 %	67,61 %	tercapai	100,00	Inspektorat
	- Inspektorat	75 %	85,02%	tercapai	100,00	Inspektorat
8.5	Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan,	40 %	30,77	belum tercapai	76,93	Inspektorat
8.6	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Minimal "B"	70 %	76,31 %	tercapai	100,00	Inspektorat
Rata Rata Capaian Kinerja Pelayanan Umum					84,05	
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
I.	Kemampuan Ekonomi					
1	Pertanian					
1.1	Nilai Tukar Petani/ NTP	108,6	118,57	tercapai	100,00	DPTPHP
1.2	Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Tanaman	102,1	98,85	belum tercapai	96,82	DPTPHP
1.3	Nilai Tukar Petani / NTP	101,9	110,14	tercapai	100,00	DPTPHP





1.4	Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Peternakan	106,4	103,40	belum tercapai	97,18	DPTPHP
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
2.1	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemerintahan, Fasilitasi Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerjasama	70	BAD	belum bisa dinilai	0	Biro Pemerintahan dan Otda
II.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
1	Penataan Ruang					
1.1	Jumlah RTR Provinsi Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	9	9	tercapai	100,00	DPUPR
1.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kab/Kota)	14	14	tercapai	100,00	DPUPR
1.3	Persentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang (%)	70,00	70	tercapai	100,00	DPUPR
1.4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (%)	55,00	55	tercapai	100,00	DPUPR
1.5	Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	60,00	60	tercapai	100,00	DPUPR
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan					
2.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	315	220	belum tercapai	69,84	Biro Perekonomian
2.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	56	40	belum tercapai	71,43	Biro Perekonomian
2.3	Jumlah Industri dan Kelembagaan Pariwisata (buah)	275	2330	melampaui	100,00	Disbudpar
2.4	Jumlah Obyek Wisata Unggulan (buah)	15	88	melampaui	100,00	Disbudpar
III.	Iklim Berinvestasi					
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat					
1.1	Angka kriminalitas	9,78	11,75	belum tercapai	9,58	Kesbangpol
IV.	Sumber Daya Manusia					
1	Ketenagakerjaan					
1.1	Jumlah peserta pelatihan yang memiliki Sertifikat kompetensi	100	119	melampaui	100,00	Disnakertrans





Rata Rata Capaian Kinerja Aspek Daya Saing	84,05
--	-------

Sumber : Data Capaian: BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan OPD Provinsi Kalimantan Tengah Terkait,
Data Tingkat Capaian : diolah, 2024.

BAD : belum ada data

Evaluasi Hasil terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan Pembangunan Daerah

Rata rata capaian kinerja indikator tujuan pembangunan daerah provinsi Kalimantan Tengah sesuai target RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah 67,38% dengan predikat kinerja Sedang.

2. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah

Rata rata capaian kinerja indikator sasaran pembangunan daerah provinsi Kalimantan Tengah sesuai target RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah 84,96 % dengan predikat kinerja Tinggi.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rata rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) provinsi Kalimantan Tengah sesuai target RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah 65,10% dengan predikat kinerja Rendah.

4. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD)

- Aspek Kesejahteraan Rakyat

Rata rata capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD), pada Aspek Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah 67,38% dengan predikat kinerja Sedang.

- Aspek Pelayanan Umum

Rata rata capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD), untuk Aspek Pelayanan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah 84.05% dengan predikat kinerja Tinggi.





- Aspek Daya Saing Daerah

Rata rata capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD), di Aspek Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah 84.05% dengan predikat kinerja Tinggi.

5. Beberapa urusan yang perlu perhatian

Beberapa urusan yang perlu perhatian karena banyak belum tercapai kinerjanya adalah pada Aspek Kesejahteraan Rakyat adalah Pendidikan dan Kesehatan, Pemuda olahraga. Pada Aspek Pelayanan Umum adalah Pertanian dan Peternakan, Tenaga Kerja, Perumahan Permukiman Pendidikan dan Kesehatan. Pada Aspek Daya Saing Daerah adalah Ketenagakerjaan, dan Sumber Daya Manusia.





BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2025 berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Kalimantan Tengah tahun 2024. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2025 memuat kondisi dan arah kebijakan ekonomi nasional nasional, kondisi ekonomi yang berkembang tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024, serta potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha prioritas dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2023 dan 2024 (dari RKP)

Ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap tangguh pada tahun 2024 di tengah meningkatnya probabilitas resesi negara-negara maju. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Kondisi ini perlu ditingkatkan untuk mempertahankan pencapaian target pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yakni menjadi *Upper-Middle Income Country*.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan telah kembali ke tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Untuk



mengejar *trajectory* pertumbuhan dalam Visi Indonesia 2045, diperlukan peningkatan rata-rata pertumbuhan satu hingga dua persen di atas tingkat pertumbuhan prapandemi. Upaya peningkatan rata-rata pertumbuhan jangka panjang membutuhkan transformasi ekonomi melalui dukungan kuat dari sumber daya manusia yang berkualitas, serta penguatan teknologi dan digitalisasi. Selain itu, dalam mengejar pertumbuhan jangka panjang diperlukan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, perekonomian pada tahun 2024 diharapkan akan terakselerasi sehingga dapat mengembalikan *trajectory* pertumbuhan jangka panjang dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan *megatrend* global ke depan.

Stabilitas ekonomi makro tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 serta tetap menjaga kinerja baik indikator makro untuk menjamin kesinambungan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Dalam jangka pendek diarahkan tetap memberi ruang bagi penuntasan agenda pembangunan tahun 2024. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah pada rentang Rp 14.900-Rp 15.900 per US\$.

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembanguana jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045, dimana fokus kebijakan Makro Tahun 2024 adalah :



1. Percepatan Transformasi Ekonomi

Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

2. Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pemaagunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

4. Mewujudkan Stabilitas Ekonomi

Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang aman dan kondusif.



3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan 2024

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2023, perekonomian Kalimantan Tengah mencatatkan pertumbuhan 4,14% (yoy), melemah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang tumbuh 6,45% (yoy). Pertumbuhan ekonomi mendorong konsumsi sektor rumah tangga yang mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan juga didorong oleh sektor investasi yang mampu tumbuh 5,33% (yoy) setelah berkontraksi di tahun 2022 sebesar 2,09% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tertahan oleh penurunan ekspor sektor pertambangan sebesar 0,54% (yoy) setelah berakhirnya masa Commodity Boom. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah didorong oleh sektor pertanian yang meningkat 4,41% (yoy) atau lebih tinggi dari tahun 2022 akibat panen TBS yang meningkat. Sektor industri pengolahan juga mampu tumbuh 5,87% (yoy) akibat kenaikan produksi olahan CPO yaitu komoditas minyak goreng. Sementara itu, sektor pertambangan menahan laju pertumbuhan ekonomi Kalteng dimana sektor ini mengalami kontraksi 5,55%(yoy) yang disebabkan oleh pelarangan ekspor bauksit dan pelemahan harga acuan batu bara.

Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Perusahaan sebesar 11,18 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,93 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,45 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 4,41 persen dan 5,87 persen. Sedangkan Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sebesar 5,55 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak jauh berbeda dari



tahun sebelumnya. Perekonomian Kalimantan Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,50 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan 15,56 persen; Pertambangan dan Pengalihan sebesar 12,62 persen; serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,50 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Tengah mencapai 62,18 persen.

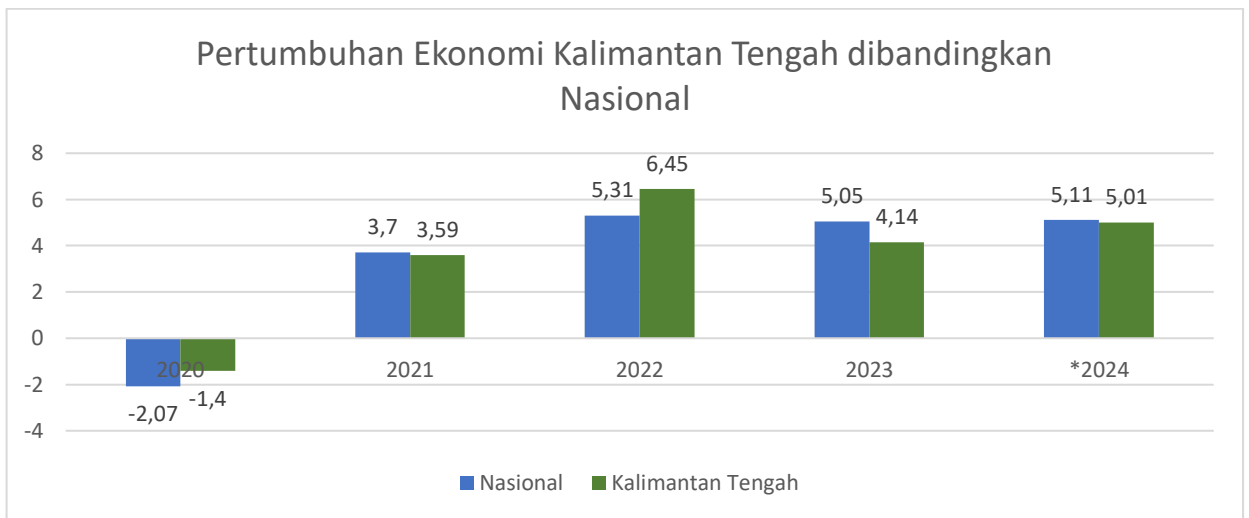
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2023, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan andil paling besar (0,93 persen) yang diikuti Industri Pengolahan (0,91 persen) serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,80 persen).

Sedangkan dilihat dari struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kalimantan Tengah yaitu sebesar 54,17 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 38,26 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 37,26 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 12,14 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 1,49 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,11 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki peran sebesar 32,21 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah 2023, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,95 persen, diikuti pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,11 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,77 persen.



Grafik 3.1



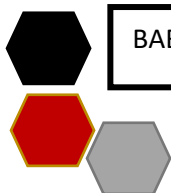
Ket * data triwulan I tahun 2024 (yoy)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Sedangkan perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan I-2024 tumbuh sebesar 5,01%, kedua tertinggi di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Timur. Perekonomian Kalimantan Tengah tahun 2024 akan mengalami pertumbuhan meskipun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya. Dari sisi permintaan, perlambatan ditopang oleh kinerja investasi yang tumbuh melambat disebabkan oleh ketidakpastian politik dalam kegiatan Pemilu 2024.

Kinerja sektor konstruksi yang melambat sejalan dengan masuknya tahun politik mengakibatkan realokasi anggaran Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Selain itu, masuknya tahun politik menyebabkan pelaku usaha cenderung bersikap wait and-see dalam melakukan investasi. Namun demikian, pesta demokrasi tersebut memberikan dampak positif pada konsumsi pemerintah maupun konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga. Hal ini sejalan dengan maraknya belanja kampanye menjelang Pemilu dan Pilkada. Sejalan dengan konsumsi

R
K
P
D





pemerintah, berlangsungnya beberapa perayaan HBKN seperti Imlek di bulan Februari dan Nyepi di bulan Maret, serta memasuki periode awal Ramadhan pada triwulan berjalan juga turut mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Kinerja ekspor diperkirakan turut meningkat seiring dengan prakiraan peningkatan kinerja produksi batu bara, disaat yang sama prakiraan kebutuhan minyak goreng juga akan meningkat utamanya jelang perayaan HBKN Ramadhan.

Dari sisi penawaran, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi diperkirakan melambat. Sektor pertanian diperkirakan tumbuh melambat karena keterlambatan panen akibat kemunduran jadwal penanaman padi karena El Nino. El Nino mendorong keterlambatan penanaman, sehingga panen awal yang seharusnya bisa dilakukan di bulan Februari mengalami menjadi bulan maret dan puncak panen padi terjadi di triwulan depan. El Nino juga memberikan dampak terhadap penurunan hasil panen TBS. Sejalan dengan menurunnya input TBS, sektor industri pengolahan diperkirakan melambat. Curah hujan yang cukup tinggi di awal tahun ini menyebabkan kematangan buah sawit menjadi kurang optimal seiring bertambahnya kadar air pada tandan buah. Selain itu, intensitas curah hujan tersebut juga menghambat proses distribusi hasil panen dikarenakan medan jalan yang terendam air sehingga menyulitkan akses truk pengangkut. Selanjutnya, sektor konstruksi diperkirakan tumbuh melambat akibat perilaku investor yang masih melakukan wait and see untuk melakukan pembangunan. Kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan tumbuh terbatas, kinerja pertambangan masih tumbuh cukup perkasa. Pertumbuhan investasi belum cukup kuat. Konsumsi rumah tangga cenderung meningkat (pada TW I-2024 didorong oleh liburan hingga awal tahun, hari raya Imlek, Nyepi, Paskah dan bulan Ramadhan).

Ekspansi fiskal pemerintah cukup gencar, sehingga mengangkat performa pengeluaran pemerintah dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024, ekonomi Kalimantan Tengah akan tetap tumbuh kuat dimana prakiraan perbaikan sektor pertambangan dan



perdagangan karena permintaan global relatif masih tinggi dan pemenuhan kebutuhan domestik yang tetap terjaga, meskipun terdapat tantangan ketidakpastian global. Perbaikan kinerja sektor pertambangan memberikan dampak positif terhadap kinerja perdagangan dan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat mendorong perdagangan ritel Kalteng. Sektor Pertanian berpotensi meningkat seiring perbaikan infrastruktur pertanian dan perluasan lahan.

Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2024 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 4,70% - 5,70% (yoy)

Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 adalah :

- a. Optimalisasi lahan rawa terus berlanjut pada tahun 2024, diharapkan mendorong peningkatan panen pada periode panen September-Oktober 2024.
- b. Kondisi cuaca yang lebih ideal serta prakiraan perluasan lahan seiring maraknya konversi lahan karet menjadi sawit mendorong peningkatan produksi kelapa sawit.
- c. Mulai beroperasinya smelter Freeport Gresik pada tahun 2024 dapat meningkatkan permintaan domestik batu bara kalori tinggi.
- d. Target DMO batu bara tahun 2024 yang lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2023. Produksi batu bara China tahun 2024 diperkirakan turun akibat pembatasan produksi yang disebabkan oleh lonjakan kecelakaan kerja pada tahun 2023.
- e. Adanya program pengembangan energi terbarukan pada tahun 2024
- f. Konsumsi LNPRT dan konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat pada masa tahun politik 2024

Faktor penahan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 adalah

- a. Pada musim kemarau, terdapat risiko terbatas terjadinya fenomena La Nina
- b. Realisasi investasi swasta diperkirakan melambat, karena investor cenderung wait-and-see kepastian politik.



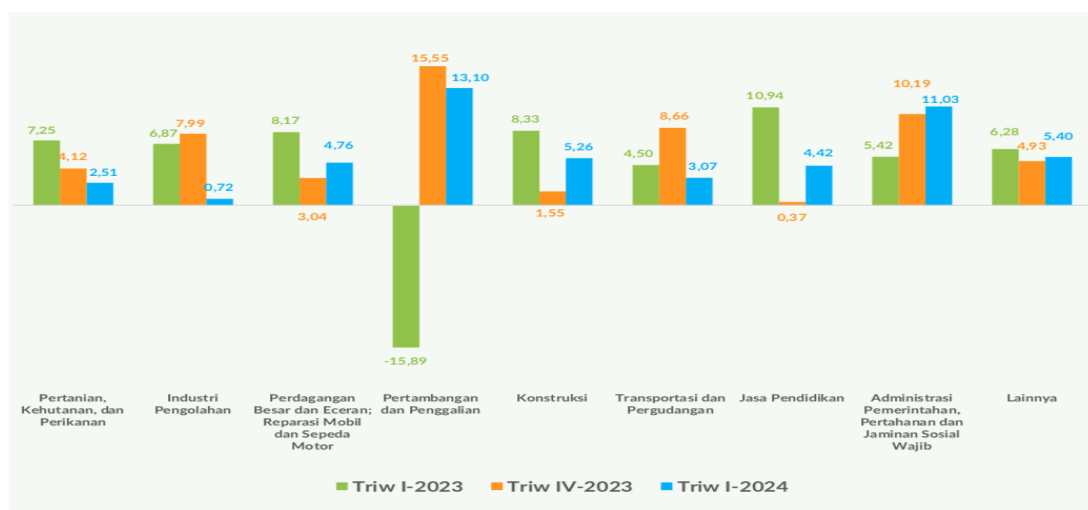
- c. Adanya peningkatan alokasi kuota untuk penyaluran biodiesel B35 berdampak pada pengurangan pasokan CPO di pasar global sehingga kinerja ekspor CPO diperkirakan stagnan.
- d. Permintaan baja yang melemah terutama dari sektor konstruksi dan otomotif di Jepang berpotensi menurunkan permintaan batu bara ke Indonesia.

2) Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kalimantan Tengah triwulan I-2024 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,27 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 16,40 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,13 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,48 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Tengah mencapai 63,29 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2024 (y-on-y), Pertambangan dan Penggalian menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 1,82 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,60 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,54 persen.

Grafik 3.2

Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2024 menurut Lapangan Usaha



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2024

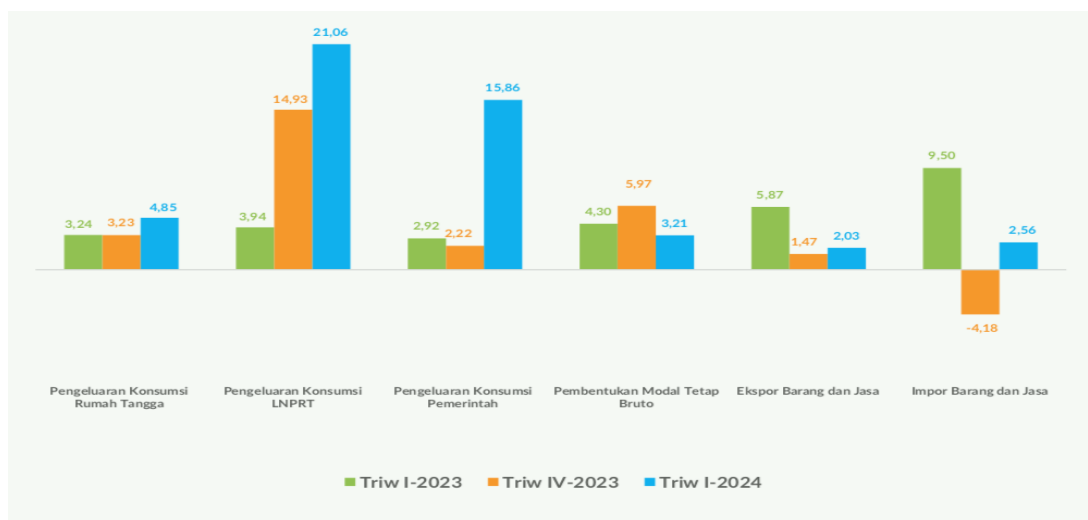


Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2024 (y-on-y), Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,81 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 1,51 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,16 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 didominasi oleh Komponen Ekspor yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kalimantan Tengah yaitu sebesar 55,53 persen; diikuti oleh komponen PK-RT sebesar 39,06 persen; Komponen PMTB sebesar 37,32 persen; Komponen PK-P sebesar 10,10 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,71 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 44,16 persen.

Grafik 3.3

Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2024 menurut Pengeluaran



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2024

3) Inflasi

Laju inflasi merupakan gambaran harga-harga. Harga yang membumbung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara itu, harga yang relatif stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah. Tingkat inflasi adalah kenaikan persentase tahunan dalam tingkat harga umum yang diukur berdasarkan indeks harga



konsumen atau indeks harga lainnya. Kenaikan harga ketika inflasi sulit untuk turun kembali, di mana kenaikan harga ini mempengaruhi kenaikan harga barang-barang lainnya.

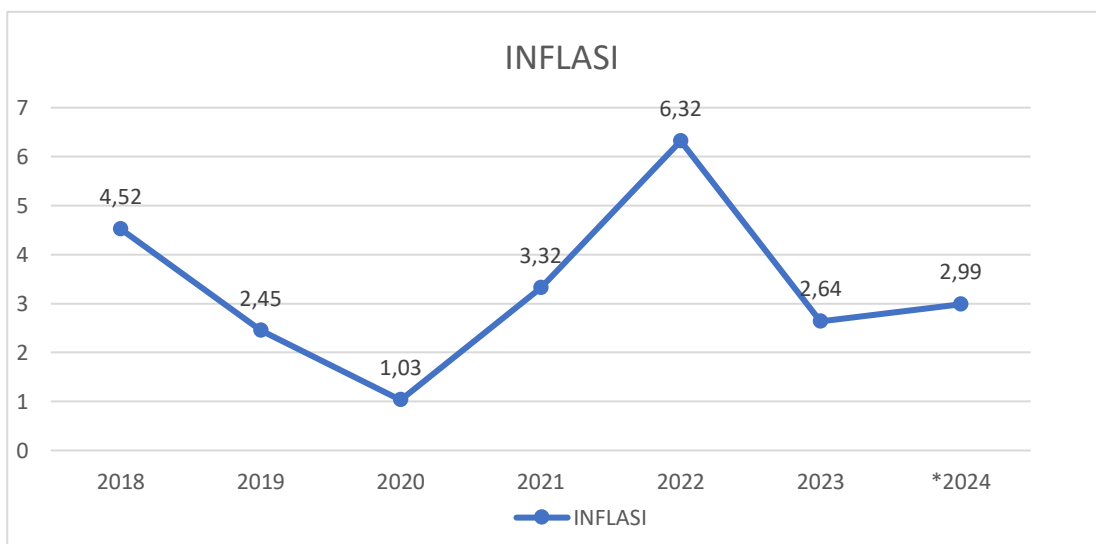
Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat memperlihatkan tingkat harga suatu barang dan jasa yang dibeli masyarakat. IHK bermanfaat untuk mengetahui tingkat kenaikan pendapatan, harga, juga dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi dan tolak ukur besarnya biaya produksi.

Inflasi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,64% (yoy) dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 6,32% (yoy). Pencapaian kinerja inflasi 2023 yang sangat baik ini ditopang oleh terkendalinya harga pangan karena berbagai kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui giat operasi pasar dan pasar penyeimbang secara berkala dan intensif, peningkatan pasokan pangan melalui peningkatan produktifitas secara internal sampai dengan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sepanjang tahun 2023. Secara triwulanan, tekanan inflasi sepanjang tahun 2023 terutama terjadi di triwulan I 2023 sebesar 5,63% (yoy) dan triwulan II yang inflasinya sebesar 3,55% (yoy). Tekanan inflasi triwulan I 2023 didorong oleh keterbatasan stok komoditas pangan akibat hama tungro dan banjir. Komoditas beras dan rokok kretek filter masih menjadi penyumbang inflasi Kalimantan Tengah terbesar sepanjang tahun 2023. Peningkatan harga beras disebabkan oleh terbatasnya pasokan ditengah mundurnya masa tanam pada bulan November dan Desember karena El-Nino. Sementara itu, tekanan inflasi dari transmisi kenaikan harga rokok masih terus berlanjut sepanjang tahun 2023.

Tekanan inflasi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023. Peningkatan tekanan inflasi gabungan seiring dengan penambahan kota IHK baru yaitu Kabupaten Sukamara dan Kapuas. Strategi komoditi pangan yang diprakirakan mengalami kenaikan harga antara lain beras, aneka cabai, aneka bawang, daging ayam ras, dan telur ayam ras ditengah naiknya permintaan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.



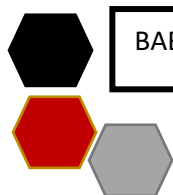
Pada April 2024, Kalteng mencatatkan Inflasi gabungan sebesar 0,73% (mtm), meningkat dibandingkan Maret 2024 yang inflasi sebesar 0,66% (mtm). Peningkatan inflasi didorong kelompok makanan, minuman dan tembakau terutama peningkatan harga daging ayam ras seiring dengan terbatasnya pasokan karena sedikitnya ayam siap panen pasca HBKN Idul Fitri. Sementara itu, inflasi juga didorong oleh kelompok transportasi seiring dengan tingginya mobilitas pada HBKN Idul Fitri dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama kenaikan harga emas perhiasan karena ketegangan geopolitik yang meningkat sehingga meningkatkan daya tarik emas sebagai aset safe haven.



Sumber : BPS, Berita Resmi Pusat Statistik 2024

Dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi inflasi di tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di tahun 2022 yang tercatat sebesar 6,32% (yoy). Inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) yang sebesar 2,64 persen disebabkan oleh peningkatan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (6,36 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,00 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (2,41 persen), kelompok pendidikan (1,87 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran

R
K
P
D





(1,60 persen), kelompok transportasi (1,43 persen), kelompok kesehatan (1,37 persen), dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,84 persen). Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,36 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,26 persen), dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,02 persen).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat selama Desember 2023, tercatat telah terjadi inflasi sebesar 0,30 persen atau mengalami peningkatan indeks harga konsumen dari 118,34 pada November 2023 menjadi 118,69 pada Desember 2023. Inflasi pada Desember 2023 (0,30 persen) ini disebabkan oleh peningkatan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,66 persen), kelompok transportasi (0,60 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,38 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,21 persen), kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,16 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,15 persen), dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,08 persen). Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,20 persen). Kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan.

Kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau serta perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga mendominasi kenaikan indeks harga baik di Palangka Raya maupun di Sampit. Proteksionisme pangan juga bertransmisi pada harga komoditas global secara umum. Di dalam negeri, penyesuaian harga oleh pemerintah, keterbatasan pasokan akibat peningkatan harga bahan baku (antara lain pupuk, harga pakan), pencabutan subsidi dan harga enceran tertinggi (HET) migor, penyesuaian cukai rokok dan berakhirnya musim panen turut mendorong peningkatan harga beberapa komoditas.

Inflasi pada periode tengah tahun 2024 jelang semester baru dan Idul Adha cenderung berfluktuasi. Namun demikian, terdapat



beberapa komoditas rutin penyumbang inflasi diantaranya daging ayam ras, biaya sekolah akademi & SMA, serta cabai rawit. Tahun ini secara khusus terdapat beberapa komoditas yang perlu diwaspadai dalam pencapaian target inflasi tahun 2024 adalah : daging ayam ras (peningkatan permintaan pada periode HBKN); cabai rawit dan bawang merah (berlaluinya musim panen); daging sapi (penyakit Mulut dan Kuku, terbatasnya pasokan dan peningkatan permintaan); minyak goreng (dinamika global, pencabutan subsidi minyak curah); dan energi (harga energi bertahan tinggi akibat kondisi global)

Untuk itu pada tahun 2024 ini dalam rangka penguatan stabilisasi harga serta pencapaian target inflasi, pada jangka pendek dapat diselenggarakan operasi pasar untuk minyak goreng bersama PKS dan komoditas lainnya bersama BULOG. Komunikasi belanja bijak juga perlu terus dilaksanakan. Di samping itu untuk tetap menjaga stabilitas administered price (AP) di tingkat daerah. Pada jangka panjang, perlu didorong pergerakan struktural ke arah peningkatan pasokan. Hal ini dapat diwujudkan melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) bersama daerah sentra penghasil komoditas pangan untuk menjamin ketersediaan pasokan. Selain itu, juga dapat didorong pendirian sentra-sentra komoditas yang persisten menyumbang inflasi khususnya pada kelompok Volatile Food (Pangan Bergejolak).

3.1.3 Proyeksi dan Tantangan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Tantangan Perekonomian 2025

Proyeksi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,6-6,2 dan inflasi pada kisaran 2,0 - 4,0.

Pertumbuhan ekonomi tersebut tumbuh dengan asumsi sebagai berikut :

1. Perbaikan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2025 diperkirakan masih terus berlanjut, aktivitas ekonomi diperkirakan secara bertahap mulai kembali pulih, daya beli masyarakat diperkirakan akan tetap terjaga sejalan dengan normalisasi dunia



usaha dan ketersediaan lapangan pekerjaan, selain itu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah akan didorong untuk mengejar pembangunan yang sempat terhambat akibat pandemi Covid-19.

2. Perdagangan antar negara diperkirakan meningkat sejalan dengan kebijakan pelonggaran mobilitas arus barang dan manusia serta pemulihan ekonomi negara mitra dagang.
3. Sementara itu, upaya Pemerintah Daerah dan pelaku usaha untuk mendorong hilirisasi dan kemandirian lokal melalui pembangunan smelter agar output yang dihasilkan memiliki nilai tambah mulai dapat dirasakan. Smelter timbal di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mulai dioperasikan di akhir 2021 diyakini mulai memberikan hasil bagi perekonomian lokal. Ke depan, pembangunan smelter seng dan bauksit yang saat ini masih dalam proses pembangunan akan semakin meningkatkan kemandirian ekonomi lokal dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar.
4. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 di prakirakan masih akan meningkat secara moderat. Dari sisi permintaan, tekanan inflasi diprediksi akan meningkat seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat sebagai dampak dari pemulihan ekonomi yang terus berlangsung akan mendorong pola konsumsi masyarakat sehingga mempengaruhi perkembangan harga pada inflasi inti. Dari sisi penawaran ketergantungan sebagian pasokan pangan Provinsi Kalimantan Tengah dari daerah lain masih menjadi risiko pendorong peningkatan inflasi Kalimantan Tengah ke depan. Selain itu terdapat potensi kenaikan harga energi seiring pemulihan ekonomi domestik yang diprakirakan akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi dan depresiasi nilai tukar yang dapat mendorong kenaikan harga pada komoditas yang menjadi bagian dari *imported inflation*. Namun demikian faktor cuaca pada tahun depan diprakirakan lebih baik dan mampu meredam tekanan inflasi pada tahun-tahun selanjutnya.

**Tabel 3.3**

Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2021 dan Target 2022 dan 2023

No	Indikator Makro	Target dan Realisasi Capaian Kinerja									
		2020		2021		2022		2023		TARGET	
		Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,65	- 1,40	5,5-6,5	5,65	- 1,40	5,5-6,5	4,14	5,70	5,80	5,60
2	Laju Inflasi	4,1-4,2	1,03	2,5-3	4,1-4,2	1,03	2,5-3	2,64	2,0-4,0 ²	-	-
3	Angka Kemiskinan (%)	4,75	5,26	4,44	4,75	5,26	4,44	5,11	4,81	4,66	4,11 - 4,61
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,7	4,58	4	3,7	4,58	4	4,10	4	3,90	3,32 - 3,91
5.	IPM	-	71,05	73,5	71,25	72	71,63	73,73	72,89	73,42	-
6.	IMM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54
7.	Intensitas Emisi GRK (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024, Berita Resmi Pusat Statistik 2023,

Dengan melihat kondisi dan proyeksi Ekonomi Kalimantan Tengah yang ada maka pada tahun 2025, perlu dilakukan Penguatan Sektor Primer dan Stabilisasi Harga Sebagai Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Yang Sehat

Di samping itu perlu dilakukan upaya yang tepat dengan skala prioritas dalam menghadapi dan mengantisipasi risiko yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan melakukan antara lain :

1. Pengembangan sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan, dengan meningkatkan (a) sektor hulu (perluasan lahan, ketersediaan benih, pupuk bersubsidi, infrastruktur pertanian dan teknologi mesin; (b) sektor hilir (pergudangan, infrastruktur pascapanen dan pemasaran dan distribusi; (c) kelembagaan (penguatan BUMD pangan, petani milenial, pembinaan, insentif, kompetisi usaha tani generasi muda)
2. Mendorong industri pengolahan hasil tambang dan pertanian/perkebunan dengan mendorong investasi (PMA/PMDN) melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif (peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan, pelabuhan,



mencegah konflik sosial) serta penyiapan SDM Kalimantan Tengah untuk penguasaan skill industri

3. Pengembangan pariwisata, perdagangan, jasa dan industri kreatif serta UMKM melalui peningkatan akses transportasi udara, laut, darat; terus mengembangkan calender of events yang sudah bagus; mendorong investasi hotel bintang 4 dan 5 serta mendukung MICE; mendorong UMKM dan industri kreatif, inventarisasi, pembinaan, peningkatan kapasitas, adopsi digital, onboarding, interlinkage UMKM dan pariwisata
4. Penguatan ekonomi lokal di wilayah kabupaten melalui strategi penciptaan wirausaha baru serta ekosistem usaha berbasis produk unggulan untuk menggerakkan perekonomian dari skala terkecil di pedesaan.
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru.
6. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga
7. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik produk agro maupun non agro.
8. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk.
9. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan
10. Penguatan pemulihan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi.
11. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.



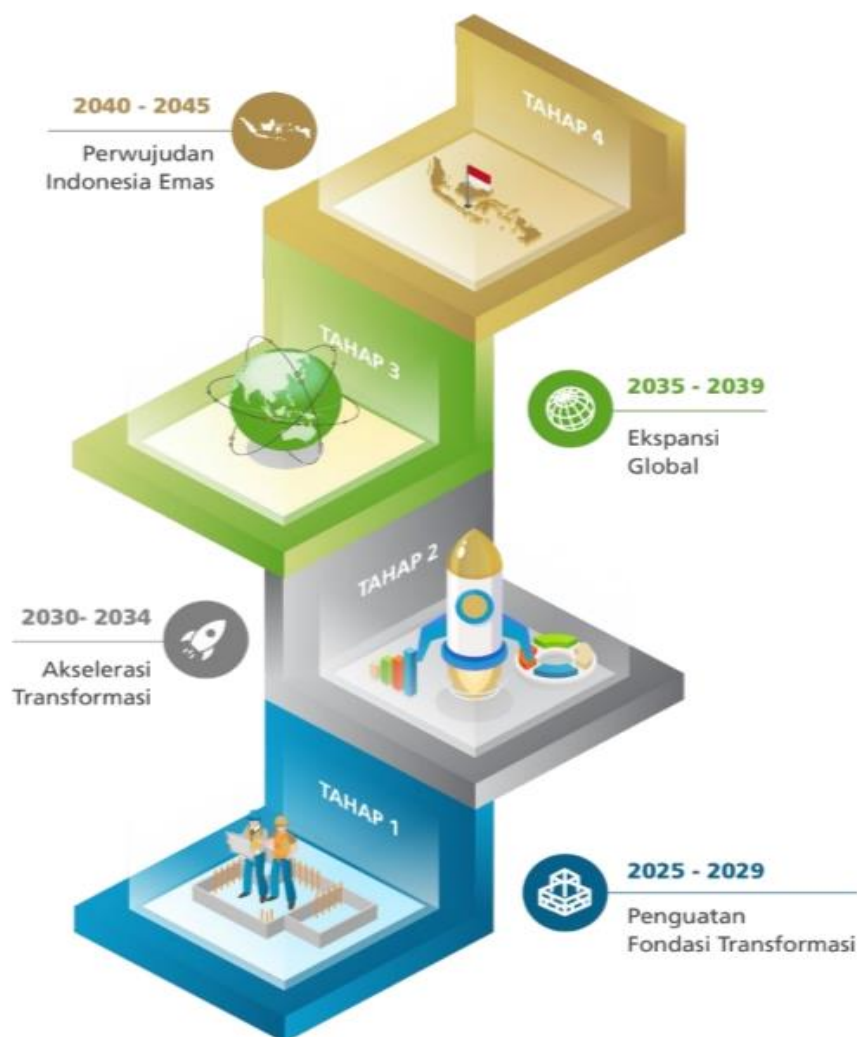
12. Menjaga iklim investasi melalui melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.
13. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/*green economy* yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial.

3.1.4 Arah Kebijakan Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

3.1.4.1 Tema Pembangunan

RPJPN Tahun 2025 - 2045 merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan RPJPN Tahun 2025 – 2045 dimanifestasikan ke dalam 4 (empat) tema besar lima tahunan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Tahapan RPJPN



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.



Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponen-komponen sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui
 - a. penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
 - b. restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
 - c. penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting;
 - d. penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif;
 - e. peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics berkualitas;
 - f. pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; serta
 - g. penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).
2. Infrastruktur Berkualitas melalui
 - a. penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi,
 - b. penguatan infrastruktur digital,
 - c. pengembangan infrastruktur transisi energi,
 - d. percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta
 - e. penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui
 - a. penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - b. pengembangan skema graduasi bantuan sosial;



- c. peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
- d. peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
- e. peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
- f. percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
- g. peningkatan produksi industri pengolahan;
- h. dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta
- i. penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Gambar 2.2
Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

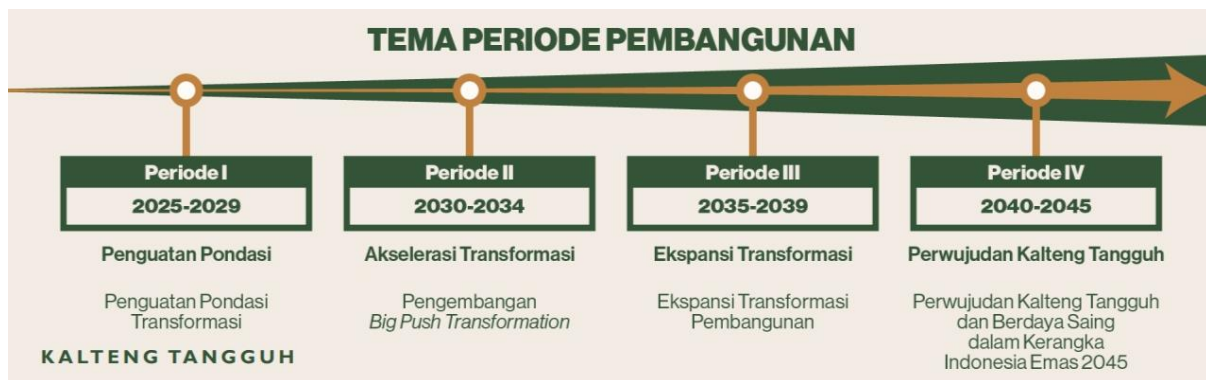


tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya telah dilakukan penyelarasan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

Penyelarasan Visi RPJPD dengan RPJPN 2025-2045



Pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 kemudian dimanifestasikan ke dalam 4 (empat) tema besar lima tahunan sebagai berikut :



Berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 dengan tema Penguatan Pondasi Transformasi, arah Pembangunan Wilayah Kalimantan ditetapkan dengan tema Superhub Ekonomi Nusantara dan untuk Provinsi Kalimantan Tengah tema yang ditetapkan adalah Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional.

Sebagaimana halnya RKP Tahun 2025, perencanaan tahunan dalam RKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 juga disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPD (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMD (periode 2021-2026 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda Penguatan Pondasi Transformasi.

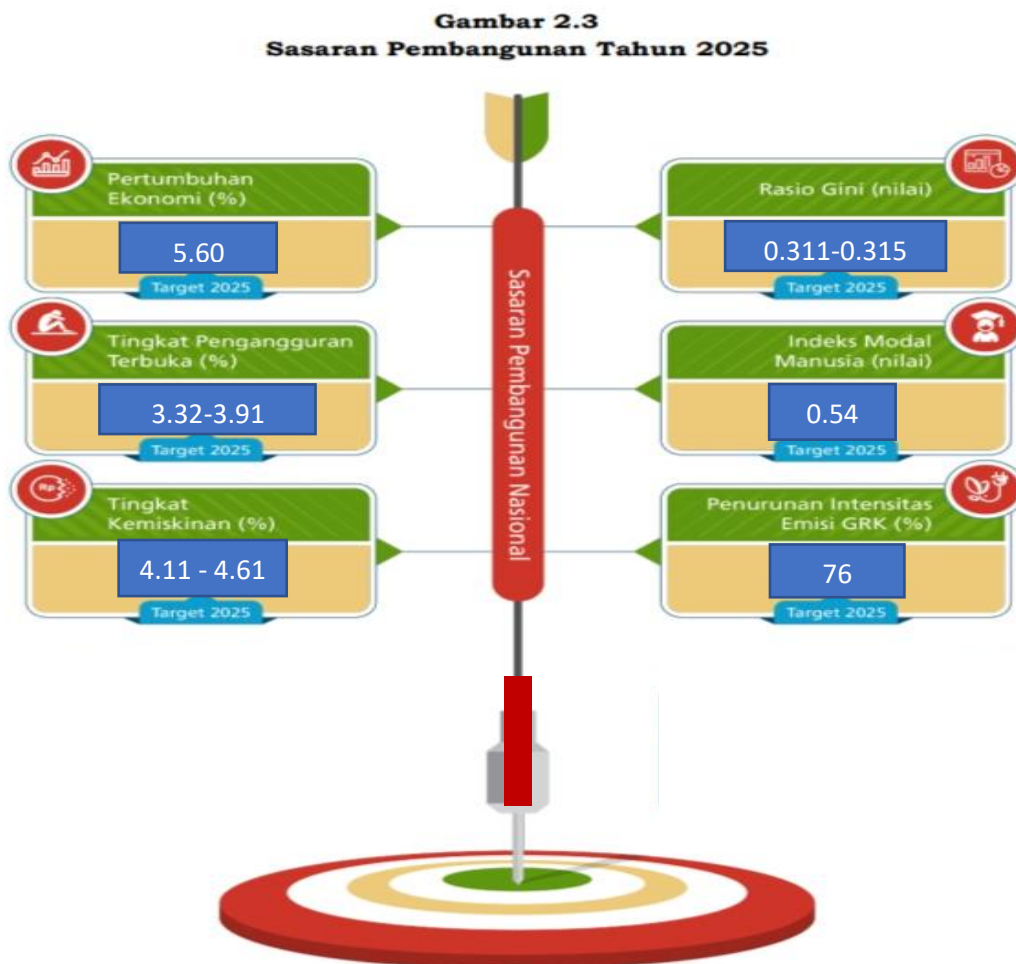


Mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah Memantapkan Pembangunan Melalui Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul Dan Bermartabat.

3.1.4.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan dan pembangunan yang ramah lingkungan.

Gambar 2.3 Sasaran Pembangunan Tahun 2025



R
K
P
D



1. Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6 persen pada tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 3.32-3.91 persen.

Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0.311-0.315. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,54 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 4,11-4,61 persen, yang akan diupayakan melalui pembangunan yang ramah lingkungan dengan indikasi penurunan intensitas emisi GRK mencapai 76%.

2. Arah Kebijakan Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2025, prospek positif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka wilayah Kalimantan ditargetkan sebesar 4,0-4,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka untuk Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan akan berada pada kisaran 3.32-3.91 persen.

Semakin kondusifnya perekonomian nasional serta melihat trend dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diharapkan Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah juga akan menurun. Arah kebijakan dan upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja; penumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; belanja pemerintah yang bersifat padat karya, dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif. Kemudian, strategi penyiapan kebhkerjaan dan keahlian angkatan kerja dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, serta peningkatan kepersertaan sistem perlindungan sosial.



3. Arah Kebijakan Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 untuk Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan berada di kisaran 4.11 - 4.61 persen. Hal ini mempertimbangkan banyak hal antara lain kondisi dan capaian tingkat kemiskinan sebelumnya serta upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 menuju kemiskinan 0 persen.

Berdasarkan dua strategi besar pengurangan kemiskinan, yaitu strategi makro dan mikro, maka dibutuhkan kondisi yang optimal di masing-masing strategi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dijaga inklusif serta stabilitas inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan sarana dan prasarana dasar; akses terhadap informasi; layanan dasar; serta kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas.

Arah kebijakan mikro atau program-program afirmasi disempurnakan dalam payung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui beberapa fokus, yaitu (1) perluasan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk melakukan pensasaran program; (2) peningkatan kapasitas pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti; (3) penguatan dan pelaksanaan skema graduasi program-program bantuan sosial dan komplementaritasnya dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (4) integrasi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan dengan pendekatan adaptif dan penyaluran nontunai; (5) penyempurnaan sasaran program utamanya untuk pilar peningkatan pendapatan masyarakat sehingga secara tepat menysasar kelompok miskin dan rentan; (6) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat.

4. Arah Kebijakan Rasio Gini



Rasio Gini pada tahun 2025 untuk Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan berada di kisaran 0.311-0.315. Arah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat terutama ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Arah Kebijakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah kebijakan yang dapat mempertahankan daya beli dan meningkatkan pendapatan.

Arah kebijakan tersebut di atas diterjemahkan ke dalam beberapa strategi yang harus di implementasikan. Strategi yang dijalankan untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor antara lain melalui (1) pengembangan registrasi sosial-ekonomi; (2) peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial; (3) integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) penguatan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; (5) pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sosial sembako untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Upaya tersebut dimaksudkan agar kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kelompok tersebut dapat mengalami kenaikan pendapatan yang lebih cepat.

5. Arah Kebijakan Indeks Modal Manusia

Indeks Pembangunan Manusia telah digunakan sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia selama kurang lebih 30 tahun terakhir dengan tren meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil evaluasi capaian dan dampak pembangunan, pengukuran Indeks Pembangunan Manusia masih terbatas pada komponen kuantitas yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta kehidupan layak (pengeluaran per kapita), sehingga dirasa belum mampu mendorong investasi pada unsur sumber daya manusia. Pada perencanaan pembangunan periode 2025-2045 akan digunakan indikator baru yaitu Indeks Modal Manusia yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia abilitas, dan kelompok rentan lainnya.



Indeks Modal Manusia merupakan indikator baru yang dikembangkan oleh Bank Dunia, yang terdiri dari penilaian capaian aspek kesehatan (prevalensi balita tidak stunting, peluang bertahan hidup balita dan peluang bertahan hidup usia produktif) dan pendidikan (harapan lama sekolah dan *harmonized test scores*).

Perbedaan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (IMM) adalah bahwa IMM mampu mengukur *Learning Experience* sehingga dapat melihat dari segi kualitas pendidikan di suatu wilayah. IMM juga menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk evaluasi pembangunan manusia sehingga diharapkan mampu meningkatkan investasi yang lebih banyak pada modal manusia untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di masa depan.

Pada tahun 2020, nilai Indeks Modal Manusia Indonesia adalah sebesar 0,54 yang menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan hanya akan mencapai 54 persen potensi produktivitas maksimumnya saat ia berusia 18 tahun jika mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang ada saat ini secara penuh. Agar dapat dilakukan pemantauan secara rutin mempertimbangkan ketersediaan dan keterwakilan data, telah dilakukan penyesuaian metodologi perhitungan Indeks Modal Manusia. Berdasarkan hasil penyesuaian metodologi tersebut, didapatkan capaian Indeks Modal Manusia Indonesia sebesar 0,53 pada tahun 2023.

Pada tahun 2025, Indeks Modal Manusia Indonesia secara nasional ditargetkan mencapai nilai 0,56. Sedangkan Indeks Modal Manusia untuk Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan pada nilai 0,54, yang akan dicapai melalui upaya peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Upaya peningkatan akses kesehatan untuk semua dilakukan melalui (1) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; (2) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (3) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; dan (4) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.

Dalam hal akses dan kualitas pendidikan, akan ditingkatkan melalui (1) percepatan Wajib Belajar 13 Tahun mencakup perluasan 1 tahun pra-



sekolah (perluasan Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal) dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang disertai penguatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; (2) peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan tinggi, melalui peningkatan efektivitas bantuan pendidikan, khususnya bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, berasal dari daerah afirmasi, dan berprestasi; (3) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, peningkatan kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

6. Arah Kebijakan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target ambisius tersebut telah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dimana diantara lima sasaran utama dalam Visi Indonesia 2045 adalah Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju Net-Zero Emission dengan target 93,5 persen di tahun 2045. Pada tahun 2025, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca secara nasional ditargetkan mencapai 38,6 persen. Sedangkan untuk provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan sebesar 76 %.

Tingginya target penurunan emisi gas rumah kaca untuk Provinsi Kalimantan Tengah dirasakan bertolak belakang dengan tema pembangunan wilayah yang ditetapkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah dalam rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional, apalagi mengingat bahwa pengembangan pertanian untuk kawasan food estate justru menyasar lahan gambut yang semestinya dilindungi dan dikembalikan ekosistemnya sebagai lahan basah terrestrial agar tidak menyumbang/melepas emisi gas rumah kaca, terlebih mengingat bahwa lahan gambut kering sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan.



Peningkatan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sangat terkait dengan aktivitas pembangunan yang bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian diperlukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon yang selaras dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan koridor berkelanjutan dan transformasi melalui penerapan Ekonomi Hijau yang dilakukan melalui Percepatan Transisi Energi; Ekonomi Sirkular Industri; Terciptanya pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing; serta Pengelolaan Hutan Lestari.

Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dilakukan dengan memperkuat program Pembangunan Rendah Karbon yaitu (1) Peningkatan Proporsi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Primer, (2) Efisiensi Energi, (3) Peningkatan Transportasi Hijau dan Berkelanjutan, (4) Peningkatan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan, (5) Pencegahan Pengurangan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan Gambut, (6) Implementasi Praktik Pertanian yang Rendah Karbon, (7) Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru, (8) Pengembangan Industri Hijau, serta (9) Pengelolaan Limbah dan Ekonomi Sirkular.

3.1. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam kategori “Rendah” (2019 & 2021) dan sempat mengalami kenaikan menjadi “Sedang” (2020). Sementara itu, IKFD mayoritas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam kategori “Rendah” (2019 – 2020) dan naik menjadi “Sedang” (2021).

Perkembangan DOFD Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2017-2024, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.5
Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017- 2024
(Juta Rupiah)

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah ()
2017	1.342.330,62	4.098.485,31	32,75
2018	1.616.749,84	4.678.157,67	34,56
2019	1.783.139,62	4.990.195,45	35,73
2020	1.554.979,95	4.750.038,01	32,74
2021	1.737.027,33	4.963.495,02	35,00
2022	2.424.298,00	5.389.985,74	44,98
2023	2.431.155,00	6.539.548,00	37,17
2024	2.684.640,00	7.634.089,00	35,17

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2023

3.2.1.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh PD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh badan keuangan daerah sebagai entitas pelaporan menjadi laporan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk laporan arus kas disusun secara sentralistik oleh Badan keuangan dan Aset Daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dimana kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan belanja daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP.

**Tabel 3.6**

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022

Tahun	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2023
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : BKAD Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Dalam hal pelaporan dan pengawasan laporan keuangan, Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2017-2023 hasil pelaporan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu wajar tanpa pengecualian secara konsisten.

3.2.2. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Nasional; Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah juga mengembangkan kerjasama operasi.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, melalui penagihan dipermudah dengan cara jemput bola, pengembangan sistem pembayaran pajak secara on-line (e-Samsat) dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
3. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
4. Melakukan pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah.



5. Mendorong iklim investasi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain melalui penyederhanaan proses perizinan dan instensifikasi pemasaran daerah, yang diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
6. Pemberdayaan dan Penguatan peran Perusahaan Daerah (BUMD) untuk lebih bersaing dan menangkap peluang – peluang bisnis yang menguntungkan .
7. Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan seluruh Asosiasi pengusaha dalam peran serta kerjasama di berbagai sektor usaha dengan Perusahaan Daerah.
8. Melakukan Inventarisasi dan pengawasan kendaraan besar/alat berat beserta kendaraan penunjang, penggunaan bahan bakar minyak dan penggunaan air permukaan pada perusahaan sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Melaksanakan (Elektrik Samsat Online Nasional) E-Samolnas untuk efisiensi dan efektifitas serta kemudahan pemungutan khususnya dalam Pemungutan Pajak Kendaran Bermotor.

Selain itu upaya peningkatan pendapatan daerah :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Perbaiki kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, diklat, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi
5. Melakukan Inventarisasi dan pengawasan kendaraan besar/alat berat beserta kendaraan penunjang, penggunaan bahan bakar minyak dan penggunaan air permukaan pada perusahaan sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang



produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD

7. Pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah
8. Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya), untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Pajak dan Retribusi Daerah, pengembangan pelayanan Samsat Unggulan, tata cara atau prosedur pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
9. Menciptakan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Baru dengan Memaksimalkan Industri Hilirisasi, 1 Desa 1 Produk Unggulan Baik Sektor Wisata atau Produk Unggulan lainnya serta menumbuhkan Ekonomi-ekonomi Keratif dan UMKM yang produktif.



3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Belanja Daerah Pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1. belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Tahun 2022 Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara agregat masih didominasi oleh Belanja Operasional (65,25%) sedangkan Proporsi belanja modal masih jauh lebih kecil (19,7%).

Komponen Belanja	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota	Agregat
1. Belanja Operasi	3.131,18	11.503,52	14.634,70
	60,31%	66,74%	65,25%
2. Belanja Modal	1.054,88	3.365,33	4.420,20
	20,32%	19,52%	19,71%
3. Belanja Tidak Terduga	256,58	189,27	445,85
	4,94%	1,10%	1,99%
4. Belanja Transfer	749,05	2.178,94	2.927,99
	14,43%	12,64%	13,05%
Total Belanja Daerah	5.191,68	17.237,06	22.428,74

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah (2023)



1. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025

Proyeksi belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengalami perubahan pada tahun 2025 menjadi Rp. 8.799.913.521.188,00 dibandingkan dengan tahun 2024 yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi, pada RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 4.882.242.912.228,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,47 persen dibandingkan APBD tahun 2024 Rp.4.859.275.843.411,00.
- b. Belanja Modal, pada RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.752.632.383.466,00 dan mengalami kenaikan 3,47 persen dibandingkan APBD tahun 2024 sebesar Rp. 2.657.199.486.683,00.
- c. Belanja Tidak Terduga, pada RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 31.600.034.400,00 dan mengalami penurunan sebesar 376,68 persen dibandingkan APBD tahun 2024 sebesar 150.000.000.000,00 .
- d. Belanja Transfer, pada RKPD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.133.438.191.094,00 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD tahun 2024.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

- a. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
- c. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan);
- d. Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- e. Kegiatan pengawasan anggaran oleh APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.



- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel
- g. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
 - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.
- h. Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk



program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.

- i. Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya.
- j. Mulai tahun 2018 dialokasikan pendanaan untuk pembangunan fisik pada kegiatan multi years untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah., dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.



b. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran. Pada rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 ini diperkirakan terjadi surplus anggaran, dimana jumlah Pendapatan daerah lebih besar dari jumlah belanja daerah. Defisit anggaran, yakni Rp. 298.968.649.693.

3.2.5. Kebijakan Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Tahun 2025 Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar 11,37% dari tahun 2024 atau sebesar Rp. 979.730.975.363,00 dari pagu APBD Murni TA.2024 sebesar Rp.7.634.086.167.260,00 menjadi Rp. 8.613.820.142.623,00 di Tahun 2025. Proyeksi kenaikan tersebut terjadi dikarenakan adanya penurunan Pendapatan Transper Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan Dana Bagi Hasil Yang digunakan hanya DBH untuk Tahun 2024 saja, namun untuk penerimaan pajak mengalami kenaikan berdasarkan tren pada tahun sebelumnya di bidang perindustrian, perkebunan maupun pertambangan yang bisa menghasilkan kontribusi yang maksimal juga ikut berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan dari segi Pajak Daerah dan pendapatan secara keseluruhan. Terkait belanja daerah dilakukan berdasarkan prinsip pengendalian anggaran dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah. Untuk lebih jelasnya terkait kerangka Struktur Pendanaan APBD dapat pada tabel 3.13 dibawah ini.



Tabel 3. 12
Kerangka Struktur Pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No.	URAIAN	APBD 2024	RANHIR RKPD 2025	Selisih	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/4*100
1.	PENDAPATAN DAERAH	7.634.089.167.260,00	8.613.820.142.623,00	979.730.975.363,00	11,37
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.684.640.636.260,00	2.595.978.876.260,00	(88.661.760.000,00)	(3,42)
1.1.1.	Pajak Daerah	2.203.674.709.512,00	2.203.674.709.512,00	-	-
1.1.2.	Retribusi Daerah	21.924.472.000,00	9.262.712.000,00	(12.661.760.000,00)	(136,70)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27.115.202.590,00	27.115.202.590,00	-	-
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	431.926.252.158,00	355.926.252.158,00	(76.000.000.000,00)	(21,35)
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	4.948.383.281.000,00	6.016.776.016.363,00	1.068.392.735.363,00	17,76
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	4.944.953.281.000,00	6.016.776.016.363,00	1.068.392.735.363,00	17,77
1.2.2	Transfer Antar Daerah	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00	-	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.065.250.000,00	1.065.250.000,00	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.065.250.000,00	1.065.250.000,00	-	-
2.	BELANJA DAERAH	8.799.913.521.188,00	8.799.913.521.188,00	(1.955.517.464.235,00)	(28,57)
2.1	BELANJA OPERASI	4.859.275.843.411,00	4.882.242.912.228,00	22.967.068.817,00	0,47
2.1.1	Belanja Pegawai	1.579.991.913.144,00	1.530.087.443.144,00	(49.904.470.000,00)	(3,26)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.204.619.618.715,00	2.284.279.690.811,00	79.660.072.096,00	3,49
2.1.4	Belanja Subsidi	205.000.000,00	205.000.000,00	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	966.758.362.131,00	838.751.190.736,00	(128.007.171.395,00)	(15,26)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	107.700.949.421,00	228.919.587.537,00	121.218.638.116,00	52,95
2.2	BELANJA MODAL	2.657.199.486.683,00	2.752.632.383.466,00	95.432.896.783,00	3,47
2.2.1	Belanja Modal	2.657.199.486.683,00	2.752.632.383.466,00	95.432.896.783,00	3,47



No.	URAIAN	APBD 2024	RANHIR RKPD 2025	Selisih	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/4*100
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	150.000.000.000,00	31.600.034.400,00	(118.399.965.600,00)	(374,68)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	150.000.000.000,00	31.600.034.400,00	(118.399.965.600,00)	(374,68)
2.4	BELANJA TRANSFER	1.133.438.191.094,00	1.133.438.191.094,00	-	-
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.119.788.191.094,00	1.119.788.191.094,00	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	13.650.000.000,00	13.650.000.000,00	-	-
	JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH	8.799.913.521.188,00	8.799.913.521.188,00	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.165.824.353.928,16)	(186.093.378.565,00)	979.730.975.363,16	(526,47)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.465.824.353.928,16	900.000.000.000,00	(565.824.353.928,16)	(62,87)
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	1.285.824.353.928,16	900.000.000.000,00	(385.824.353.928,16)	(42,87)
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	180.000.000.000,00	-	(180.000.000.000,00)	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	300.000.000.000,00	-	(300.000.000.000,00)	
3.2.1.	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	300.000.000.000,00	-	(300.000.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.165.824.353.928,16	900.000.000.000,00	(265.824.353.928,16)	(29,54)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	0,00	713.906.621.435,00	713.906.621.435,00	100,00



Kebijakan Alokasi Anggaran

Pada tahapan Rancangan Akhir RKPD ini masih menggunakan asumsi realistis sesuai RPJMD dan RKPD Tahun 2024 dimana pendapatan daerah masih di angka 7 Triliun selanjutnya akan disempurnakan dan dihitung kembali terhadap sector apa saja yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 agar dapat mencapai diangka 9-10 Triliun.

kapasitas kemampuan keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas. yaitu:

a) Prioritas pertama

Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan. antara lain:

- a. Belanja Fungsi Pendidikan. bahwa anggaran pendidikan sekurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Belanja Fungsi Kesehatan. bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Belanja Infrastruktur. penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum. diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%. sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;

Sedangkan belanja mengikat atau *mandatory expenditure* digunakan untuk belanja pegawai Belanja dan belanja RSUD BLUD.

b) Prioritas kedua

Prioritas kedua ini dialokasikan untuk membiayai pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

c) Prioritas ketiga

Prioritas ketiga merupakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendukung ketercapainya kinerja Kepala Daerah.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah ini disusun untuk mendukung capaian Visi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yakni **“Kalimantan Tengah Makin BERKAH”**. Penjelasan pokok-pokok visi tersebut yakni :

1. BERMARTABAT : Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang.
2. ELOK : Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3. RELIGIUS : Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi Kalteng yang berkarakter.
4. KUAT : Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sektor.
5. AMANAH : Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.
6. HARMONIS : Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Untuk mendukung visi tersebut telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka ditetapkan misi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, antara lain :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Pokok misi 1, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif;
- b) Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya;





- c) Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industry kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk;
- d) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industry pengolahan tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA);
- e) Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sector pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
- f) Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (ecotourism) melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalteng;
- g) Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut;
- h) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;
- i) Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;

2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global

Pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- b) Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan.
- c) Mempercepat pengembangan Kawasan *food estate* dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan lokal.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

Pokok misi 3, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi yang berdampak positif





- bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan public (smart government);
- b) Mendorong budaya birokrasi pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan warga melalui pelayanan terpadu dan perluasan partisipasi public;
 - c) Menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi penguatan iklim investasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menuju penyelenggaraan mall pelayanan public;
 - d) Mendorong kemudahan berinvestasi melalui jaminan rasa aman, proses perijinan yang mudah dan birokrasi pemerintahan yang tangkas.
 - e) Menciptakan Kalteng sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), narkoba, konflik dan ekstrimisme dengan memperkuat nilai-nilai agama dan kearifan local;
 - f) Memantapkan kolaborasi dan kebersamaan lintas sectoral antara pemerintah, dunia usah, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada perwujudan Kalteng yang aman, tertib, dan Tangguh dari berbagai tantangan global
 - g) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

Pokok misi 4, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui dukungan bantuan sosial fungsi pendidikan untuk warga Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Menyediakan layanan pendidikan prioritas bagi wilayah terisolir dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;





- c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan serta sarana dan prasana pendukung beserta pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah yang masih kekurangan serta meningkatnya status gizi masyarakat;
- e) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja;
- f) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pengembangan rumah ibadah dan pusat-pusat kebudayaan;
- b) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- c) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, Pancasila dan cinta damai;
- d) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- e) Memperluas partisipasi perempuan yang berorientasi kesetaraan gender;
- f) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

Berdasarkan misi tersebut diatas dan penjabarannya dalam mewujudkan perencanaan yang tepat sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menentukan prioritas pembangunan menggunakan pendekatan *money follows program* dan dalam mengurangi masalah sosial dan mengatasi ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan *mandatory spending* dalam pengelolaan belanja daerah,





selain itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang tematik dengan memanfaatkan protensi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah, daerah menetapkan tema pembangunan untuk Tahun 2025 yakni **“Memantabkan Pembangunan Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul dan Bermartabat”**. Dimana tema ini akan menjadi acuan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dengan memfokuskan pada peningkatan ekonomi lokal melalui optimalisasi sumberdaya lokal dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di daerah disertai dengan peningkatan kualitas SDM.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Tujuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

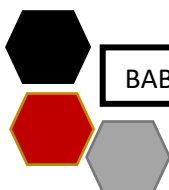
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 8 (delapan) tujuan dengan 12 (dua belas) indikator tujuan berserta targetnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel.

Tujuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

NO (1)	VISI (2)	MISI (3)	TUJUAN (4)	INDIKATOR (5)	KONDISI AWAL (2021) (6)	TARGET		
						2024 (7)	2025 (8)	
<p>VISI: Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)</p>								
1		1 Merpercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan	1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Serta Pemerataan Pembangunan Melalui Konektivitas Antar Wilayah	1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 1.1.2 Indeks Ketimpangan (Indeks Williamson) 1.1.3 Indeks Gini	3,57 % 0,16 % 0.329 Angka	5,80 % 0,138 % 0.316 Angka	5,60 % (BA Forum Pemutakhiran IMD) 0,132 % 0.311-0.315 Angka (BA Forum Pemutakhiran IMD)	

R
K
P
D
2
0
2
5





NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2021)	TARGET	
						2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2		2 Memperkuat Ketahanan Daerah Dalam Mengantisipasi Perubahan Global	1.2 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	1.2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,74 Poin	74,75 Poin	74,97 Poin
			2.1 Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan pengurangan Kemiskinan Masyarakat	2.1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (ID)	74,91 %	76,00 %	76,50 %
				2.1.2 Prosentase Penduduk Miskin	5,16 %	4,66 %	4,11-4,61 % (BA Forum Pemutakhiran IMD)
2.2 Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Ancaman Bencana dan Budaya serta Kerentanan Pangan	2.2.1 Indeks Resiko Bencana	131 Angka	128 Angka	127 Angka			
3		3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi	3.1 Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi Yang Inovatif dan Responsif	3.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	CC Nilai	BB Nilai	BB Nilai
4		4 Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing	4.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	4.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,05 %	73,42 %	73,95 %
				4.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	4,58 %	3,90 %	0.54 (BA Forum Pemutakhiran IMD) 3.32-3.91 % (BA Forum Pemutakhiran IMD)
5		5 Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender	5.1 Meningkatkan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Sosial Budaya Bermasyarakat	5.1.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,82 %	78,07 %	78,12 %

R
K
P
D
2
0
2
5





NO (1)	VISI (2)	MISI (3)	TUJUAN (4)	INDIKATOR (5)	KONDISI AWAL (2021) (6)	TARGET	
						2024 (7)	2025 (8)
			5.2 Meningkatkan Kesetaraan Gender.	5.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,03 %	89,11 %	89,13 %
6.				Penurunan Intensitas Emisi GRK			76.00 (BA Forum Pemutakhiran IMD)

4.1.2. Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Tengah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan dalam tahun tersebut. Provinsi Kalimantan Tengah



No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target	
						2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)							
1	Merpercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan						
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Serta Pemerataan Pembangunan Melalui Konektivitas Antar Wilayah		Pertumbuhan Ekonomi	3,57 %	5,80 %	5,60 % (BA Forum Pemutakhiran IMD)
				Indeks Ketimpangan (Indeks Williamson)	0,16 %	0,138 %	0,132 %
				Indeks Gini	0.329 Angka	0.316 Angka	0.311-0.315 Angka (BA Forum Pemutakhiran IMD)
			Meningkatnya Ketercukupan Energi	Rasio Elektrifikasi	86,82 Angka	95,58 Angka	97,77 Angka
			Meningkatnya Ketercukupan Energi	Rasio Desa Berlistrik	92,55 Angka	97,51 Angka	98,75 Angka
			Meningkatnya Ketercukupan Energi	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	7%	15 %	18 %





No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target	
						2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Jalan Provinsi	0,34 Angka	0,38 Angka	0,39 Angka
			Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio konektivitas sektor transportasi	0,85 Angka	0,88 Angka	0,89 Angka
			Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase Desa Bersinyal	67%	87 %	92 %
			Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	270004 Ha	425.000 Ha	465.000 Ha
			Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver	81 Unit	260 Unit	330 Unit
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	15,96%	16,20 %	16,30 %
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan	Kontribusi Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	21,80%	25,2 %	26,1 %





No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target	
						2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Mendorong Masuknya Investasi Daerah				
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB	13,22%	15,00 %	16,00 %
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	773359 Orang	870.422 Orang	896.535 Orang
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Realisasi penanaman modal (dalam juta)	6267959 Juta	8.650.000 0 Juta	9.100.000 Juta
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBI)	107 Angka	110,75 Angka	112 Angka
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,19%	13,70 %	13,80 %





No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target	
						2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,74 Poin	74,75 Poin	74,97 Poin
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,61%	59,70 %	59,80 %
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,84%	87,34 %	87,44 %
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lahan (IKL)	72,33%	74,99 %	75,66 %
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	65,04	71,67 %	72,28 %
		Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Provinsi		Kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan RTRW	78%	84 %	86 %
2	Memperkuat Ketahanan Daerah Dalam Mengantisipasi Perubahan Global						
		Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan		Indeks Demokrasi Indonesia (ID)	74,91 %	76 %	76,50 %





No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target	
						2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pengurangan Kemiskinan Masyarakat		Prosentase Penduduk Miskin	5,16%	4,66%	4.11-4.61% (BA Forum Pemutakhiran IMD)
			Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	7:10.000 per 1.000 penduduk	10:10.000 per 1.000 penduduk	10:10.000 per 1.000 penduduk
			Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teratasi	80%	82 %	83 %
			Menurunnya Kemiskinan Di Pedesaan dan Perkotaan	Persentase penduduk miskin pedesaan	5,38%	5,20 %	5,10 %
			Menurunnya Kemiskinan Di Pedesaan dan Perkotaan	Persentase penduduk miskin perkotaan	4,86%	4,70 %	4,65 %
			Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	Persentase rumah layak huni	54,41%	70,98 %	71,28 %
			Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	Persentase akses air minum layak	85,85%	100 %	100 %





No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target	
						2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	Persentase akses sanitasi layak	69%	80 %	85 %
		Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Ancaman Bencana dan Budaya serta Kerentanan Pangan		Indeks Resiko Bencana	131 Angka	128 Angka	127 Angka
			Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah Serta Antisipasi Penanganan Terhadap Bencana Kerawanan Pangan dan Pandemi				
			Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah Serta Antisipasi Penanganan Terhadap Bencana Kerawanan Pangan dan Pandemi				
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi						
		Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi Yang Inovatif dan Responsif		Indeks Reformasi Birokrasi	CC Nilai	BB Nilai	BB Nilai





No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target	
						2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	90 %	92 %
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Profesionalisme ASN	74,69%	78 %	78 %
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	63,50%	74,79 %	78,69 %
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kajian Kelitbangan	2 Kajian	4 Kajian	4 Kajian
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Inovasi Digital Daerah	64,53%	81,11 %	83,27 %
			Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	B Predikat	BB Predikat	A Predikat
			Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Opini BPK	WTP Nilai	WTP Nilai	WTP Nilai





No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target	
						2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing						
		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,05 %	73,42 %	73,95 %
				Indeks Modal Manusia	-	-	0,311-0,315 (indikator Baru berdasarkan penyesuaian)
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,58 %	3,90 %	3.32-3.91 % (BA Forum Pemutakhiran IMD)
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Indeks Pendidikan	0,638 Indeks	0,682 Indeks	0,687 Indeks
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Indeks kesehatan	0,765 Indeks	0,776 Indeks	0,781 Indeks
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	74,06 Angka Indeks	81 Angka Indeks	82 Angka Indeks





No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target	
						2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender						
		Meningkatkan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Sosial Budaya Bermasyarakat.		Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,82 %	78,07 %	78,12 %
			Meningkatnya Kualitas Beribadah	Nilai Toleransi	76,52 Angka	76,8 Angka	76,9 Angka
			Meningkatnya Kualitas Beribadah	Nilai Kesetaraan	78,37 Angka	78,61 Angka	78,67 Angka
			Meningkatnya Kualitas Beribadah	Nilai Kerjasama	78,57 Angka	78,85 Angka	78,92 Angka
			Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,76%	58,76 %	58,26 %
		Meningkatkan Kesetaraan Gender.		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,03 %	89,11 %	89,13 %





No	Visi & Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target	
						2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	79,67%	81,94 %	81,98 %





4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2025

RKPD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada arah pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah Jangka Panjang (2025-2045) dan Jangka Menengah Daerah (2025-2029), tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan RKP Tahun 2025 yang bertemakan “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, tema RKP ini untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai “*Game Changer*” untuk menuju Indonesia maju dengan Prioritas Nasional :

1. Prioritas Nasional 1

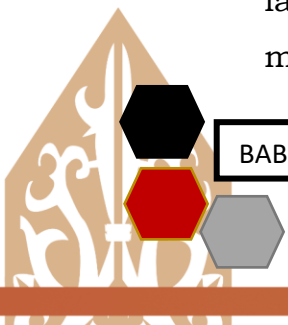
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

2. Prioritas Nasional 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Prioritas Nasional 3

Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.





4. Prioritas Nasional 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. Prioritas Nasional 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Prioritas Nasional 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Prioritas Nasional 7

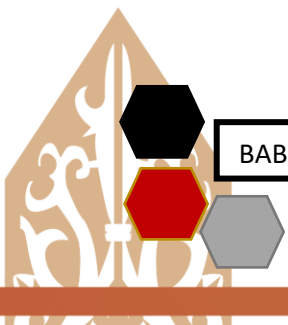
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. Prioritas Nasional 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan RKP Tahun 2025 diatas, maka RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang bertemakan **“Memantabkan Pembangunan Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul dan Bermartabat”**, tema RKPD ini mengusung Prioritas Provinsi :

1. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing;
2. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;



3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;
4. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
5. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah;
6. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;
7. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan;
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
10. Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
11. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah;
12. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Arah pengembangan wilayah Kalimantan Tengah Tahun 2025 berdasarkan fokus kegiatan dan lokasi prioritas antara lain :

1. Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Kawasan Industri Surya Borneo dan Kawasan Industri Batanjung
2. Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada Kota Palangka Raya
3. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi yang difokuskan pada 9 kawasan transmigrasi, 1 kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan *food estate*, dan 11 KPPN.

Adapun sasaran Pembangunan RKP yang harus dicapai pada Tahun 2025 berdasarkan hasil Kesepakatan Forum Pemutakhiran Indikator Makro Daerah Antara Kementerian/Lembaga Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Bappenas Bulan Mei 2024, antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,60 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3.32-3.91 %
3. Tingkat Kemiskinan sebesar 4.11 - 4.61%
4. Rasio Gini sebesar 0,311-0,315
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 76,00
6. Indeks Modal Manusia sebesar 0,54.

4.2.2 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 6 (Enam) isu strategis yang harus diselesaikan dalam mencapai suatu tujuan, isu strategis tersebut berkaitan dengan Prioritas Nasional yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2

Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional

Isu Strategis Provinsi	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
1. Pengembangan Kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan, baik untuk kepentingan lokal Provinsi Kalimantan	Memaksimalkan pembangunan proyek strategis daerah dan nasional di Kalimantan Tengah, dengan arah kebijakan : a. Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan;	PN 3 Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,

Isu Strategis Provinsi	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
Tengah maupun untuk kepentingan nasional,	<p>b. Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah;</p> <p>c. Penguatan Kerjasama dengan semua pihak dalam Pengarustamaan Prinsip Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;</p> <p>d. Peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>e. Pengelolaan Sumber Daya Air;</p> <p>f. Peningkatan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan dokumen RTRW;</p> <p>g. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim;</p> <p>h. Peningkatan restorasi dan pengelolaan lahan gambut;</p> <p>i. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan;</p> <p>j. Pengurangan laju deforestasi.</p> <p>Mendorong peningkatan UMKM di Kalimantan Tengah, dengan arah kebijakan :</p> <p>a. Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu;</p> <p>b. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan;</p> <p>c. Memperluas dan meningkatkan kualitas BUMDesa;</p> <p>d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah rentan terhadap akses (wilayah 3T: Tertinggal, Terluar, Terdalam);</p> <p>e. Meningkatkan pembangunan, Pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa.</p>	<p>mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p> <p>PN 6</p> <p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p>
2. Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar dan konektivitas	<p>Meningkatkan jaringan infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan arah kebijakan :</p> <p>a. Menjunjung tinggi norma, agama, budaya, dan adat istiadat lokal;</p>	<p>PN 3</p> <p>Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan</p>



Isu Strategis Provinsi	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
	b. Edukasi dan Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat; c. Mendukung sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial; d. Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS dalam upaya penanganan PMKS; e. Pengembangan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum; f. Pembangunan infrastruktur sanitasi; g. Pengembangan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan dan perkotaan termasuk kawasan kumuh serta pengentasan rumah tidak layak huni;	kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3. Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan kebutuhan produksi maupun pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dan berdaya saing dalam menghadapi MEA, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan pengawasan masyarakat; c. Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); d. Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; e. Evaluasi Produk-Produk Regulasi daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan merugikan kepentingan umum serta tidak menghargai kebinekaan; f. Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; g. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan <i>up to date</i> melalui Pelayanan Informasi;	PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Isu Strategis Provinsi	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
	<p>h. Peningkatan penanganan <i>Complaint Handling System</i>;</p> <p>i. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK Untuk mewujudkan pelayanan yang Cepat, Efektif, Efisien, Responsif, Transparan, dan Akuntabel.</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, dan pekerjaan penduduk, dengan arah kebijakan :</p> <p>a. Peningkatan akses terhadap pendidikan Menengah dan Tinggi;</p> <p>b. Peningkatan akses pendidikan Menengah Kejuruan;</p> <p>c. Peningkatan kualitas, profesionalisme, kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>d. Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan;</p> <p>e. Peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi Pendidikan;</p> <p>f. Peningkatan rata-rata lama sekolah;</p> <p>g. Peningkatan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;</p> <p>h. Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja;</p> <p>i. Mengembangkan kapasitas BLK yang intensif;</p> <p>j. Pengembangan market place profesi milleneal melalui Milleneal Job Center (MJC);</p>	
4. Peningkatan upaya mitigasi bencana	<p>Meningkatkan jaringan infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan arah kebijakan :</p> <p>a. Peningkatan <i>Early Warning System</i>, kesadaran masyarakat terhadap bencana dan penguatan kelembagaan bencana dan pandemi;</p> <p>b. Peningkatan Ketahanan Daerah menghadapi Bencana dan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.</p>	<p>PN 3</p> <p>Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p>
5. Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam	<p>Memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan berkelanjutan, dengan arah kebijakan :</p>	<p>PN 5</p> <p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya</p>



Isu Strategis Provinsi	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
	a. Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita; b. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat; c. Optimalisasi pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; d. Peningkatan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat.	alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dan antisipasi perkiraan resesi ekonomi global 7. Penurunan angka stunting dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan kualitas pelayanan, kesehatan, dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan status kesehatan keluarga; b. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; c. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita; d. Penyediaan pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas; e. Perluasan akses dan Penguatan Fasilitas Kesehatan; f. Pemenuhan dan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan tertinggal; g. Peningkatan RSUD, RS Khusus dan RSUD Rujukan; Mengembangkan sektor Sosial Budaya dan Pariwisata di Kalimantan Tengah, dengan arah kebijakan : a. Menggali, menumbuhkan dan mengembangkan serta memupuk modal sosial dalam mewujudkan kepedulian sosial; b. Revitalisasi nilai-nilai seni dan budaya lokal serta Pengembangan sektor Pariwisata; c. Pengarusutamaan gender; d. Peningkatan kualitas hidup perempuan.	PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
8. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya perbaikan tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan pengembangan industri yang ada berbasis 4.0, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan produktivitas disertai dengan Penguatan Daya Saing produk industri pengolahan;	PN 3 Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan



Isu Strategis Provinsi	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
	b. Peningkatan penggunaan teknologi industri; c. Peningkatan produktivitas disertai dengan penguatan daya saing produk agro dan mina industri; d. Peningkatan penggunaan teknologi pada agro dan mina industri; e. Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan; f. Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan; g. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM; h. Pengembangan destinasi dan promosi wisata; i. Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur Pariwisata; j. Peningkatan Akselerasi dan integrasi industry kepariwisataan; k. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif; l. Peningkatan kenyamanan pelayanan dan efisiensi dalam perijinan berinvestasi; m. Peningkatan promosi dan informasi peluang investasi.	Akan mendukung dan meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

4.2.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah

Selain hubungan antara tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah perlu juga diketahui bagaimana keterkaitan antara prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025, dengan tujuan untuk diintegrasikan dengan prioritas nasional dengan tetap mencerminkan karakteristik daerah sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut penajaman keterkaitan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025, dijelaskan pada tabel 4.4

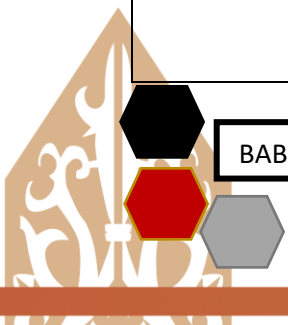
Tabel 4. 3

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
<p>Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter 	<p>Prioritas 1 Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing.</p>
<p>Prioritas Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim 3. Pembangunan Rendah Karbon 4. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) 5. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan 7. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan 8. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi 	<p>Prioritas 5 : Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah</p> <p>Prioritas 6 : Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan</p>
<p>Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Wilayah Sumatera 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara 	<p>Prioritas 2 : Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam</p>



Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi 6. Pembangunan Wilayah Maluku 7. Pengembangan Wilayah Papua 	<p>rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah</p> <p>Prioritas 4: Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku</p>
<p>Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar 2. Infrastruktur Ekonomi 3. Infrastruktur Perkotaan 4. Energi dan Ketenagalistrikan 5. Transformasi Digital 	<p>Prioritas 7: Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan</p> <p>Prioritas 10: Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah</p>
<p>Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi 2. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri 	<p>Prioritas 3 : Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah</p>
<p>Prioritas Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi 	<p>Prioritas 12 : Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,</p>





Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
<p>Prioritas Nasional 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi Demokrasi 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 3. Penegakan Hukum Nasional 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional 	<p>Prioritas 8: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>
<p>Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda 6. Pengentasan Kemiskinan 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing 	<p>Prioritas 8: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Prioritas 9: Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>Prioritas 11: Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah</p>

4.2.4 Sasaran Target Nasional dan Target Provinsi Kalimantan Tengah

Sehubungan dengan sasaran, tujuan dan prioritas pembangunan tersebut, diharapkan pada awal tahun 2025, pembangunan Wilayah di Pulau Kalimantan semakin meningkat dengan mendukung tema RKP untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran sasaran pembangunan wilayah Kalimantan diatas serta mempertimbangkan potensi dan sumber daya daerah maka target pembangunan yang merupakan prioritas nasional serta prioritas daerah terdapat lima sasaran yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 4

Sasaran antara Target capaian Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No	Indikator Pembangunan	Nasional	Target RKPD 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6	5,60
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,5-5,0	3,32-3,91
3.	Tingkat Kemiskinan	7,0-8,0	4,11 – 4,61
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	73,95
5.	Indeks Modal Manusia	0,56	0,54
6.	Gini Rasio (Indeks)	-	0,311-0,315
7.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	38,6	76,00

Sumber : Paparan Ranwal RKP Tahun 2025 dan Kesepakatan Indikator Makro Daerah 2025

Jika dibandingkan, target sasaran secara nasional tidak jauh berbeda dengan sasaran pada RKPD tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah diproyeksikan angka 5,60 pada tahun 2025 lebih tinggi atau sama dengan target nasional dengan asumsi tumbuh dari 5 (lima) sektor utama Kalimantan Tengah antara lain : Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Sektor Industri, Sektor Konstruksi dan Sektor Perdagangan. Pada aspek tingkat pengangguran terbuka, target RKPD pada tahun 2025 diproyeksi 3,32-3,91 % lebih rendah dari target nasional yakni 4,5-5,0 %. Target Indeks pembangunan manusia (IPM) di tahun 2025

berubah menjadi

Indeks Modal Manusia pada 0,56. Gini Rasio yang 2024 secara nasional adalah 0,379 – 0,382 lebih tinggi dibanding dengan target RKPD Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,311-0,315.

Dalam menyusun RKPD Kalimantan Tengah tahun 2025 ini selain harus berpedoman pada dokumen perencanaan RPJMN dan RPJPD tetapi juga harus merujuk pada dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2025. Hal ini dikarenakan, RKP merupakan penjabaran dari RPJMN yang memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang lebih spesifik daripada RPJMN.

4.2.5 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 merupakan masa Awal Pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Pelaksanaan PILKADA Serentak pada Tahun 2024. Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJM keempat (2021-2025) pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan di Tahun 2025 maka Fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 mengarah pada “Memantabkan Pembangunan Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Manuju Kalteng Unggul Bermartabat” Prioritas pembangunan Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026 dan Penyelarasan terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 dan diharapkan Juga selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan disusun oleh kepala Daerah Terpilih nantinya antara lain :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;

2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok;
3. Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;
4. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah;
5. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.

4.2.5.1. Program prioritas I: Belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan

Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan seperti:

1. Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
5. Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan dan rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi

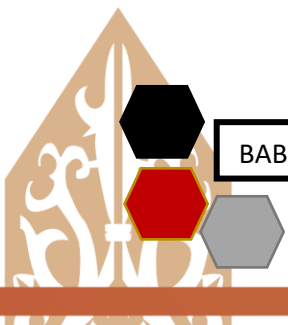


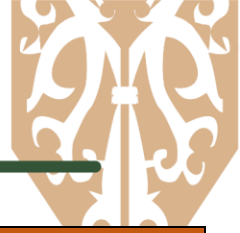
kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

4.2.5.2. Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari “Makin BERKAH” yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye: Makin BERKAH. Makin BERKAH merupakan 6 (enam) cita-cita pasangan **Gubernur H. Sugianto Sabran** dan **Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, S.sos., MM.** Kalimantan Tengah Periode 2021-2026. Enam cita-cita tersebut akan diwujudkan melalui pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Makin BERKAH merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 yaitu: **Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis.**

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. BERKAH merupakan intisari dari semangat dan Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Dengan demikian Program Prioritas meliputi Perangkat Daerah pendukung yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini.





Tabel 4.5 Integrasi BERKAH ke dalam Program Perangkat Daerah

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
	<p>Berkah #1: Kalteng Bermartabat. Kalteng Unggul, Berdaya Saing, Dan Cemerlang</p> <p>Prioritas Pembangunan</p> <p>1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat</p>	Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menebus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit <i>Belom Bahadat</i>	

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
		(hidup beradat) dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing tinggi dan berreputasi cemerlang.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	<p>Berkah #2: Kalteng Elok. Kalteng Indah, Hijau, dan Ramah</p> <p>Prioritas Pembangunan</p> <p>2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok</p>	Meningkatkan sertifikasi lahan masyarakat adat dan pengembangan ekonomi hijau;	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Dinas Kehutanan
		Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata lintas kabupaten atau kota, termasuk menjadikan lahan gambut dan hutan rawa terbesar di Indonesia sebagai ecotourism berkelas dunia.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
			Program pengelolaan hutan	Dinas Kehutanan
			Program konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
	<p>Berkah #3</p> <p>Kalteng Religius. Masyarakat berkarakter Religius</p> <p>Prioritas Pembangunan</p> <p>3. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius</p>	Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat sebagai pilar pembentukan karakter masyarakat	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dalam rangka perjalanan wisata religi misalnya para kyai dan ustadz naik haji dan umroh ke Mekkah, pendeta ziarah rohani ke Yerusalem, Hindu dan hindu Kaharingan ke India	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru ngaji, sekolah minggu dan guru spiritual di berbagai agama dan keyakinan masing-masing.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
	Berkah #4 Kalteng Kuat. Produktif, Sehat dan Cerdas Prioritas Pembangunan 4. Mempercepat pengembangan kawasan food estate, Mempercepat	Mempercepat pengembangan kawasan food estate sebagai penunjang cadangan logistic strategis untuk pertahanan negara, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local;	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
	pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dinas Perkebunan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
			Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Mempercepat program afirmatif dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana;	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
				Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
			Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Biro Perekonomian
			Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>) dalam rangka Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan dan Memperkuat Ekonomi Daerah melalui pengembangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
		Koperasi dan UMKM	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Memperluas kuantitas dan kualitas penerima beasiswa Kalteng Berkah yang selama ini telah berjalan;		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Memastikan fasilitas dan layanan akses kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat melalui perawatan khusus secara gratis bagi pasien kurang mampu.		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus RSJ Kalawa Atei
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	<p>Berkah #5: Kalteng Amanah. Jujur, Profesional, Kreatif, dan Inovatif</p> <p>Prioritas Pembangunan</p> <p>5. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah</p>	Peningkatan SDM aparatur birokrasi yang inovatif demi pelayanan public yang cepat dan tepat.	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
			Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan
			Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
			Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
		Membuka ruang seluas-luasnya kepada kalangan professional untuk menduduki jabatan public sesuai kapasitas dan kompetensinya;	Program Pemerintahan Dan Otonomi Khusus	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Program Administrasi Umum	Biro Umum

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
		Mengoptimalkan penerapan e-government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public secara efektif dan efisien;	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Program Pengembangan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Meningkatkan kapasitas SDM aparatur birokrasi pemerintahan melalui Pendidikan dan pelatihan khusus;	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		Meningkatkan insentif khusus bagi ketua RT/RW, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penuh dedikasi dan loyalitas.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Berkah #6 Kalteng Harmoni. Masyarakat Toleran, Beretika, Rukun.	Memperkuat falsafah Huma Betang dalam kehidupan beragama, berbudaya dan bermasyarakat melalui pemberdayaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Berkah/ Prioritas	Program ICON	Program Nomenklatur PD	PD
	Prioritas Pembangunan	budayawan dan tokoh-tokoh adat;		
	6. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni	Menerbitkan peraturan dan hukum adat sebagai instrument untuk meneguhkan peradaban masyarakat yang tertib;	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Memperkuat kelembagaan adat sebagai agen kebudayaan yang terkonsolidasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pembangunan berdimensi kearifan lokal.	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pelestarian Koleksi NAsional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Arsip

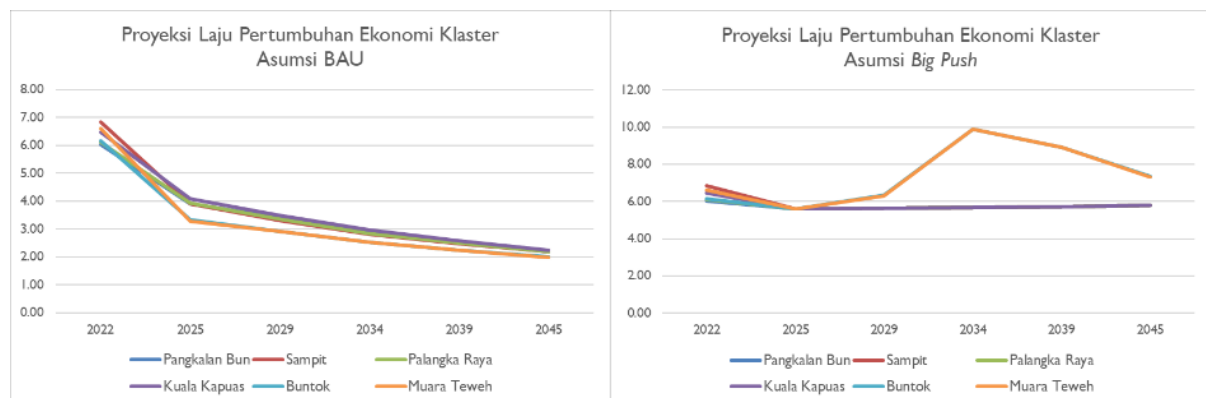
Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

4.2.6 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan RKPD tahun 2025 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RPJPD 2025-2045. Pada bagian ini disusun arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kalimantan Tengah berdasarkan pembagian zona dan klaster. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan ini melengkapi arah kebijakan yang juga disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pada bagian ini diharapkan arah kebijakan yang disusun dapat menjawab tantangan utamanya perubahan dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Tengah. Berikut merupakan penjabaran dari target dari kondisi kontribusi PDRB yang ingin dicapai di masing-masing klaster.

Target Pertumbuhan Ekonomi Klaster

Guna mencapai pertumbuhan ekonomi provinsi yang compliance dengan target pembangunan regional serta mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi daerah maka laju pertumbuhan ekonomi perlu direkayasa guna mendukung shifting zona timur. Guna untuk mencapai **pemerataan ekonomi** dan **mengejar ketertinggalan** di **zona Timur** (kluster Buntok dan MuaraTeweh) maka dibutuhkan intervensi >30% lebih tinggi daripada zona Tengah dan Barat. Secara lebih detail laju pertumbuhan ekonomi masing masing klaster terdapat dalam gambar berikut.



Gambar IV.1. Grafik Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Klaster Asumsi BAU (kiri) dan Asumsi Intervensi (kanan)

Dalam grafik proyeksi di atas untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah maka terdapat dua strategi utama. Strategi pertama adalah meningkatkan LPE di klaster zona timur (Buntok dan Muara Teweh) menjadi hingga 9,9% pada periode kedua RPJPD. Pada sisi lain dilakukan pula strategi kedua yakni menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi klaster lain di angka 4-5% per tahun.

Proyeksi Kontribusi PDRB Masing-Masing Klaster

Kontribusi PDRB menjadi penting untuk mempertimbangkan bagaimana kontribusi yang perlu dicapai dari masing-masing zona pembangunan. Pertimbangan dalam menyusun kontribusi PDRB masing-masing zona dan klaster disusun berdasarkan konsep untuk melakukan pemerataan pembangunan di masing-masing zona pembangunan. Berdasarkan proyeksi PDRB dengan asumsi *Business As Usual* didapatkan bahwa kontribusi masing-masing zona pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6. Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU per Zona

Zona	Baseline 2022	2025	2029	2034	2039	2045
Zona Barat	43,91%	43,76%	43,90%	44,04%	44,14%	44,23%
Zona Tengah	33,89%	34,23%	34,43%	34,61%	34,75%	34,88%
Zona Timur	22,21%	22,01%	21,66%	21,35%	21,11%	20,88%

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Terlihat bahwa kontribusi PDRB zona barat diproyeksikan menjadi penyumbang paling mendominasi terhadap PDRB Kalimantan Tengah. Kontribusi besar ini disumbang dari berbagai aktivitas ekonomi di Zona Barat dan konsentrasi fasilitas sarana prasarana utama dan orde tinggi yang terkonsentrasi di zona ini. Kontribusi zona kemudian dibagi berdasarkan klaster yang menyusun zona. Secara lebih mendetail angka kontribusi dari masing-masing klaster dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.7. Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU per Klaster

Kluster	Baseline	2025	2029	2034	2039	2045
---------	----------	------	------	------	------	------

	2022					
Zona Barat						
Pangkalan Bun	20,14%	20,13%	20,22 %	20,34%	20,44 %	20,51%
Sampit	23,77%	23,63%	23,68 %	23,70%	23,70 %	23,73%
Zona Tengah						
Palangkaraya	19,36%	19,70%	19,77 %	19,83%	19,87 %	19,91%
Kuala Kapuas	14,53%	14,53%	14,66 %	14,79%	14,88 %	14,97%
Zona Timur						
Buntok	9,40%	9,00%	8,86%	8,73%	8,63%	8,54%
Muara Teweh	12,81%	13,02%	12,81 %	12,62%	12,48 %	12,35%

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Terdapat informasi bahwa angka kontribusi terbesar yang mendominasi terdapat dalam kluster pembangunan di zona Barat. Kluster yang memiliki kontribusi besar yakni Kluster Pangkalan Bun dan Kluster Sampit dan kemudian disusul oleh kluster pembangunan di zona tengah yakni Kluster Palangkaraya dan Kuala Kapuas. Hal ini cukup besar ditopang oleh konsentrasi industri di kedua kluster di zona Barat. Namun, masih menjadi catatan di mana zona timur belum memiliki andil yang signifikan dengan zona barat dan tengah terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, di mana terdapat 2 kluster pembangunan di zona timur, yakni, Kluster Buntok dan Kluster Muara Teweh. Kluster Buntok merupakan kluster dengan kontribusi paling kecil berjarak cukup jauh hingga >10% daripada kluster dengan kontribusi terbesar menandakan masih ada pekerjaan ekstra yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam menuntaskan ketimpangan pembangunan daerah. Selain itu, Kluster Palangkaraya yang berada di Zona Tengah juga patut menjadi perhatian karena berpotensi mengalami penurunan kontribusi jika tidak diberikan arah kebijakan yang sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Berikut merupakan tabel proyeksi kontribusi masing-masing kluster *Non Business As Usual* yang diharapkan mampu menjawab tantangan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah selama dua puluh tahun mendatang.

Tabel IV.8. Proyeksi Kontribusi PDRB Klaster dengan Intervensi/ *Big Push*

Kluster	Baseline 2022	2025	2030	2035	2040	2045
Zona Barat						
Pangkalan Bun	20,14%	20,13%	19,92%	19,55%	19,04%	18,25%
Sampit	23,77%	23,63%	23,32%	22,77%	22,08%	21,12%
Zona Tengah						
Palangkaraya	19,36%	19,70%	19,47%	19,05%	18,51%	17,72%
Kuala Kapuas	14,53%	14,53%	14,44%	14,21%	13,87%	13,33%
Zona Timur						
Buntok	9,40%	9,00%	9,76%	11,01%	12,57%	14,88%
Muara Teweh	12,81%	13,02%	13,09%	13,41%	13,93%	14,70%

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Dapat diinformasikan bahwa dengan asumsi *Non Business As Usual* Klaster Palangkaraya Raya (Zona Tengah) serta Klaster Buntok dan Muara Teweh (Zona Timur) memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih besar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi *Non Business As Usual* ini dapat diciptakan dengan memberikan *big push* untuk masing-masing kluster pembangunan, di mana idealnya Klaster Palangkaraya Raya diberikan target 10% lebih tinggi, Klaster Buntok diberikan target 15% lebih tinggi, dan Klaster Muara Teweh diberikan target 5% lebih tinggi daripada target-target yang telah ditetapkan untuk kluster lainnya.

Tabel IV.9. Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Palangkaraya

Palangkaraya	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,05%	13,24%	12,88%	12,65%	12,50%	12,38%
Pertambangan dan Penggalian	4,52%	4,22%	4,04%	3,92%	3,84%	3,79%
Industri Pengolahan	10,97%	10,84%	10,63%	10,50%	10,41%	10,34%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,26%	0,27%	0,28%	0,28%	0,29%	0,29%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Konstruksi	12,01%	11,85%	11,82%	11,80%	11,78%	11,77%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,80%	13,69%	13,56%	13,47%	13,42%	13,37%
Transportasi dan Pergudangan	7,77%	7,56%	7,52%	7,49%	7,48%	7,46%

Palangkaraya	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,59%	3,46%	3,44%	3,43%	3,42%	3,41%
Informasi dan Komunikasi	1,41%	1,49%	1,57%	1,62%	1,65%	1,67%
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,63%	4,94%	5,28%	5,50%	5,65%	5,76%
Real Estat	2,85%	2,86%	2,85%	2,85%	2,84%	2,84%
Jasa Perusahaan	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,22%	13,84%	13,62%	13,48%	13,38%	13,31%
Jasa Pendidikan	6,38%	6,74%	7,07%	7,29%	7,44%	7,55%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,27%	3,71%	4,17%	4,46%	4,66%	4,81%
Jasa lainnya	1,10%	1,15%	1,12%	1,11%	1,10%	1,09%

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Klaster Palangkaraya Raya dapat difokuskan dengan menekan kegiatan di sektor tersier yang berkaitan dengan jasa seperti pengembangan jasa keuangan dan asuransi, kegiatan administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, sert jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel IV.10. Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Buntok

Buntok	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,13%	14,92%	14,86%	14,83%	14,80%	14,78%
Pertambangan dan Penggalian	37,88%	35,95%	33,90%	32,46%	31,40%	30,57%
Industri Pengolahan	5,80%	5,94%	6,16%	6,31%	6,42%	6,51%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,12%	0,12%
Konstruksi	6,01%	6,51%	6,80%	7,01%	7,16%	7,28%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,42%	6,71%	7,06%	7,31%	7,49%	7,64%
Transportasi dan Pergudangan	6,83%	7,26%	7,63%	7,90%	8,09%	8,24%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,43%	1,55%	1,63%	1,68%	1,72%	1,76%
Informasi dan Komunikasi	1,20%	1,27%	1,36%	1,42%	1,47%	1,51%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,68%	2,84%	2,98%	3,08%	3,15%	3,21%
Real Estat	2,07%	2,15%	2,25%	2,32%	2,38%	2,42%
Jasa Perusahaan	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,88%	4,76%	4,65%	4,57%	4,51%	4,47%
Jasa Pendidikan	5,75%	5,99%	6,32%	6,56%	6,73%	6,87%

Buntok	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,78%	2,91%	3,09%	3,23%	3,32%	3,40%
Jasa lainnya	0,97%	1,06%	1,09%	1,11%	1,12%	1,13%

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Klaster Buntok dapat difokuskan dengan menekan kegiatan di sektor sekunder yang berkaitan dengan industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan.

Tabel **Error! No text of specified style in document.** Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Muara Teweh

Muara Teweh	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,21%	8,12%	8,01%	7,94%	7,88%	7,84%
Pertambangan dan Penggalian	52,48%	50,15%	47,39%	45,49%	44,10%	43,04%
Industri Pengolahan	5,23%	5,38%	5,57%	5,70%	5,80%	5,87%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%
Konstruksi	6,02%	6,63%	7,34%	7,84%	8,20%	8,47%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,02%	5,17%	5,35%	5,48%	5,57%	5,64%
Transportasi dan Pergudangan	5,22%	6,08%	7,09%	7,79%	8,30%	8,69%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,98%	1,01%	1,05%	1,08%	1,10%	1,12%
Informasi dan Komunikasi	1,11%	1,11%	1,16%	1,20%	1,22%	1,24%
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15%	1,15%	1,19%	1,22%	1,24%	1,26%
Real Estat	1,32%	1,34%	1,37%	1,39%	1,40%	1,41%
Jasa Perusahaan	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,68%	4,95%	5,24%	5,43%	5,57%	5,68%
Jasa Pendidikan	4,39%	4,48%	4,59%	4,66%	4,72%	4,76%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,72%	2,86%	3,02%	3,13%	3,21%	3,28%
Jasa lainnya	1,32%	1,41%	1,45%	1,49%	1,51%	1,53%

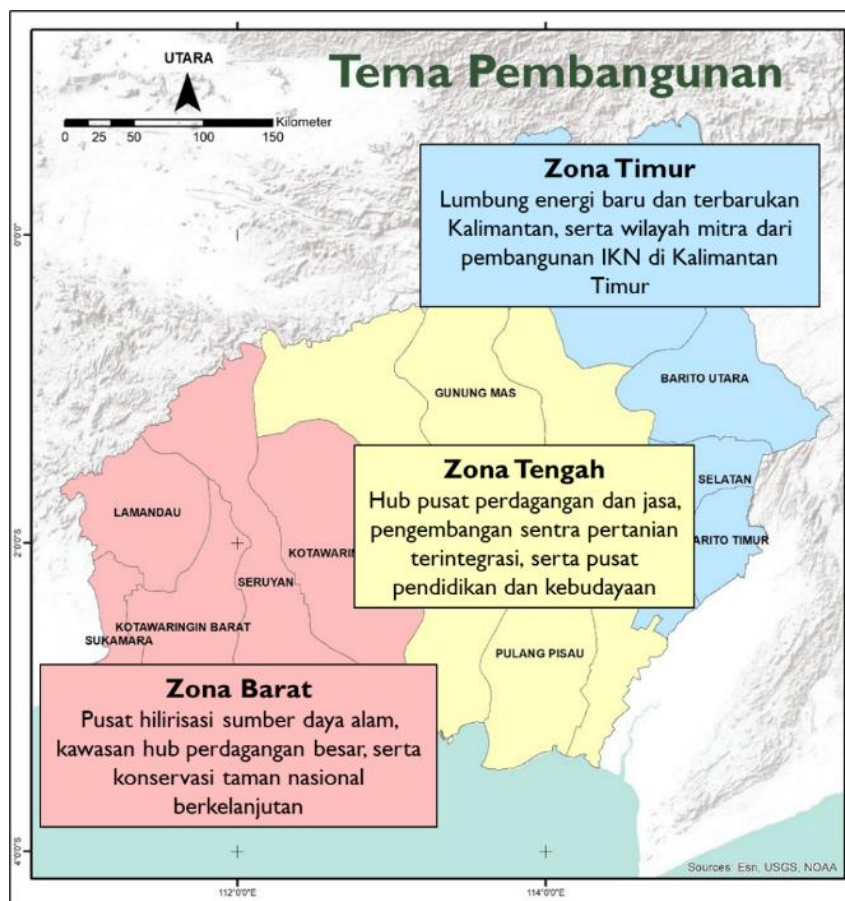
Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Serupa dengan Klaster Buntok, Klaster Muara Teweh juga dapat difokuskan pada sektor sekunder yang berkaitan dengan industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Arah

kebijakan yang mampu mengakomodir tren pergeseran kontribusi ekonomi dan percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini sangat dibutuhkan di masing-masing klaster di masa mendatang agar mampu saling melengkapi dan komplementari.

Tema Zona Pembangunan Kalteng

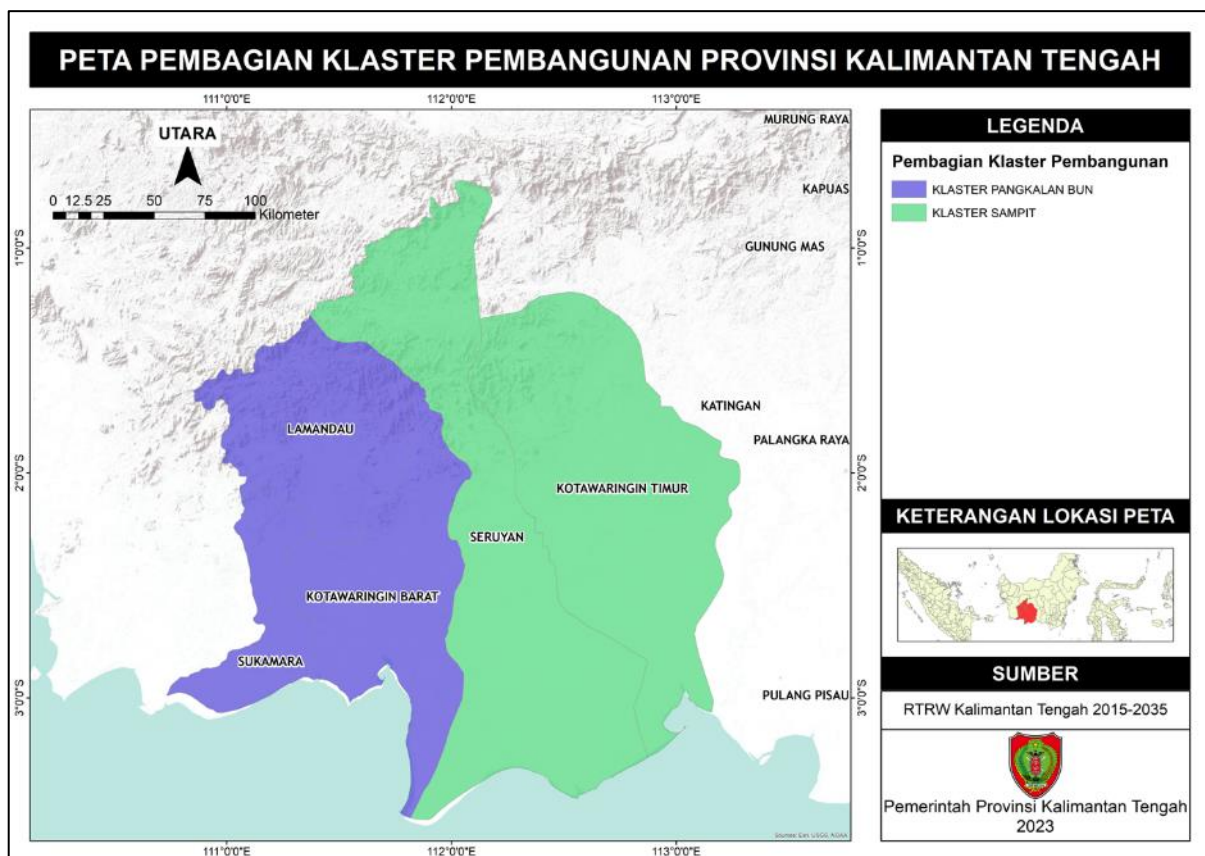
Sebagai tindak lanjut arah kebijakan kewilayahan disusunlah tema zona Pembangunan Provinsi. Secara umum tiap zona pembangunan Kalimantan Tengah memiliki Tema Pembangunan yang berbeda. Hal ini sebagai wujud pemerataan serta pembagian peran antar daerah dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun pembagian tema per zona adalah sebagai berikut



Gambar IV.2. Pembagian Tema Pembangunan Menurut Zona

A. Zona Barat

Zona Barat Pembangunan Kalimantan Tengah tersusun dari dua klaster yakni klaster Pangkalan Bun dan Klaster Sampit. Zona ini memiliki penciri tema utama pembangunan yakni sebagai pusat hilirisasi sumber daya alam dan kawasan hub perdagangan besar serta konservasi taman nasional berkelanjutan. Daerah ini secara eksisting memiliki konsentrasi baik penduduk dan juga kontribusi PDRB yang paling tinggi namun belum secara maksimal dapat mengungkit potensi sumber daya ekonomi di Kalimantan Tengah.



Gambar IV.3. Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Barat

Secara spesifik arah kebijakan dari masing-masing klaster di Zona Barat Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

KLASTER PANGKALAN BUN

Klaster ini terletak di Zona Barat yang terdiri dari Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pusat dari kegiatan pada klaster

ini terletak di PKW Pangkalan Bun yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara tematik pembangunan Klaster Pangkalan Bun memiliki tema Konservasi taman nasional berkelanjutan, Hilirisasi Sumber Daya Alam, dan Sentra perikanan terintegrasi. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:

Tabel IV.12. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Pangkalan Bun

No	Aspek	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor 3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi. 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 6. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi. 7. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif. 8. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i>. 9. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah 10. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal. 11. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 13. Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) 14. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 15. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu. 16. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 17. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. 18. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
2	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing. 2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. 3. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi. 4. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan <i>ecotourism</i> berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting. 5. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional.

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> serta transisi <i>school-to-work</i>. 7. Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. 8. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 9. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. 10. Peningkatan produktivitas BUMD. 11. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. 12. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja. 13. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. 14. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 15. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii)

No	Aspek	Arah Kebijakan
		peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
3	Reformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional. 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 5. Penguatan integritas partai politik.
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi. 4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda.

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya. 6. Pengembangan diversifikasi pangan. 7. Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis. 8. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. 9. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal. 10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll. 11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana. 12. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim. 13. Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan. 14. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. 15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 19. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya. 20. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin. 21. Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan. 22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.

No	Aspek	Arah Kebijakan
	Implementasi Transformasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan. 2. Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis. 3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 5. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 6. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah. 7. Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah. 8. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. 9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi. 10. Pengembangan transportasi umum perkotaan. 11. Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. 12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. 13. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal. 14. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. 15. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. 16. Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air. 17. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana. 18. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). 19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.</p> <p>20. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.</p> <p>21. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>22. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>23. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.</p> <p>24. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p> <p>25. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.</p> <p>26. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</p> <p>27. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.</p> <p>28. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.</p> <p>29. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>.</p>

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:

Tabel IV.13. Sasaran Pembangunan Klaster Pangkalan Bun

No	Sasaran Pokok	Baseline 2022	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	LPE	6,04	5,60	5,63	5,68	5,73
2	Share PDRB Klaster	20,14%	19,92%	19,55%	19,04%	18,25%

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

KLASTER SAMPIT

Klaster ini terletak di Zona Barat yang terdiri dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten

Kotawaringin Timur. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Sampit yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Sampit adalah sebagai berikut:

Tabel IV.14. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Sampit

No	Aspek	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor 3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi. 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 6. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi. 7. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif. 8. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i>. 9. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah 10. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal. 11. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 13. Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) 14. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 15. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu. 16. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 17. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. 18. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
2	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing. 2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. 3. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi. 4. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan melibatkan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan <i>ecotourism</i> berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting. 5. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional. 6. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> serta transisi <i>school-to-work</i>. 7. Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>8. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>9. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</p> <p>10. Peningkatan produktivitas BUMD.</p> <p>11. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.</p> <p>12. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.</p> <p>13. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.</p> <p>14. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>15. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p>

No	Aspek	Arah Kebijakan
3	Reformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional. 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 5. Penguatan integritas partai politik.
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi. 4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda. 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya. 6. Pengembangan diversifikasi pangan. 7. Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis.

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. 9. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal. 10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll. 11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana. 12. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim. 13. Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan. 14. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. 15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 19. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya. 20. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin. 21. Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan. 22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
6	Implementasi Transformasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan. 2. Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis.

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 5. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 6. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah. 7. Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah. 8. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. 9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi. 10. Pengembangan transportasi umum perkotaan. 11. Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. 12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. 13. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal. 14. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. 15. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. 16. Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air. 17. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana. 18. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). 19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>20. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.</p> <p>21. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>22. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>23. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.</p> <p>24. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p> <p>25. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.</p> <p>26. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</p> <p>27. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.</p> <p>28. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.</p> <p>29. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>.</p>

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Sampit adalah sebagai berikut:

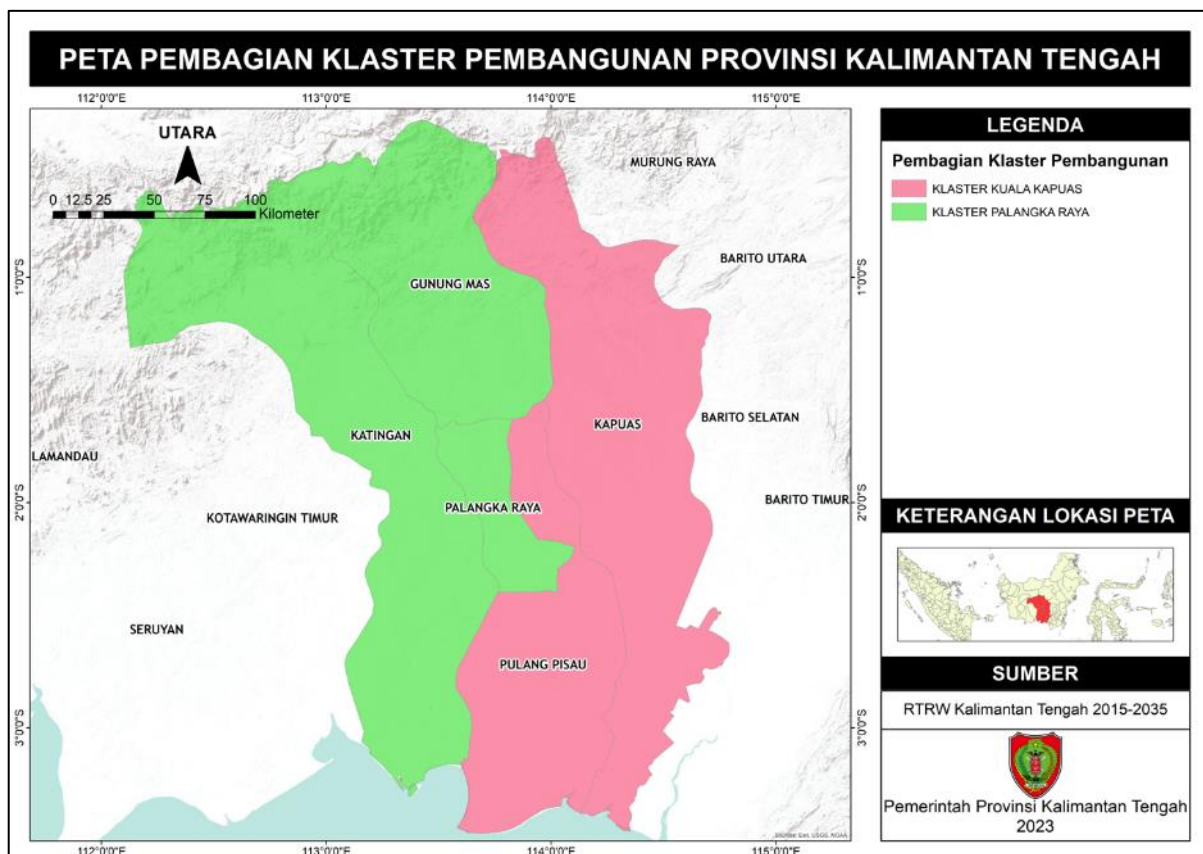
Tabel IV.15. Sasaran Pembangunan Klaster Sampit

No	Sasaran Pokok	Baseline 2022	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	LPE	6,83	5,60	5,63	5,68	5,73
2	Share PDRB Klaster	23,77%	23,32%	22,77%	22,08%	21,12%

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

B. ZONA TENGAH

Zona Tengah Pembangunan Kalimantan Tengah tersusun dari dua klaster yakni klaster Palangkaraya dan Klaster Kuala Kapuas. Zona ini memiliki penciri tema utama pembangunan yakni sebagai hub pusat perdagangan dan jasa, pengembangan sentra pertanian terintegrasi serta pusat riset dan pendidikan. Daerah ini secara eksisting memiliki konsentrasi baik penduduk dan juga kontribusi PDRB kedua di Kalimantan Tengah namun belum secara maksimal dapat mengungkit potensi sumber daya ekonomi di Kalimantan Tengah.



Gambar IV.4. Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Tengah

Secara spesifik arah kebijakan dari masing-masing klaster di Zona Tengah Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

KLASTER PALANGKARAYA

Klaster ini terletak di Zona Tengah yang terdiri dari Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kota Palangkaraya. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di

PKN Palangkaraya yang terletak di Kota Palangkaraya. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Palangkaraya adalah sebagai berikut:

Tabel **Error! No text of specified style in document..** Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Palangkaraya

No	Aspek	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor 3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi. 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 6. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi. 7. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global. 8. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif. 9. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment. 10. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal. 12. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. 13. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 14. Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) 15. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 16. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu. 17. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 18. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. 19. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
2	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing. 2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. 3. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi. 4. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam di Taman Nasional Sebangau. 6. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional. 7. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work. 8. Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan khususnya di PKN Palangkaraya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. 9. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 10. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. 11. Peningkatan produktivitas BUMD. 12. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. 13. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja. 14. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. 15. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan

No	Aspek	Arah Kebijakan
		bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 16. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
3	Reformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD),

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 5. Penguatan integritas partai politik.
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi. 4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda. 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya. 6. Pengembangan diversifikasi pangan. 7. Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis. 8. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. 9. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal. 10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll. 11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana. 12. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim. 13. Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan. 14. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. 15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 19. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya. 20. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin. 21. Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan. 22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
6	Implementasi Transformasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan. 2. Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis. 3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 5. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 6. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan sungai secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah. 7. Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah. 8. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. 9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi. 10. Pengembangan transportasi umum perkotaan. 11. Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. 12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>13. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.</p> <p>14. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.</p> <p>15. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.</p> <p>16. Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.</p> <p>17. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.</p> <p>18. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).</p> <p>19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.</p> <p>20. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.</p> <p>21. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>22. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>23. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.</p> <p>24. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p> <p>25. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.</p> <p>26. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</p> <p>27. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.</p> <p>28. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.</p> <p>29. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>.</p>

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045



Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Palangkaraya adalah sebagai berikut:

Tabel I **Error! No text of specified style in document.** 1. Sasaran Pembangunan Klaster Palangkaraya

No	Sasaran Pokok	Baseline 2022	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	LPE	6,12	5,60	5,63	5,68	5,73
2	Share PDRB Klaster	19,36%	19,47%	19,05%	18,51%	17,72%

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

KLASTER KUALA KAPUAS

Klaster ini terletak di Zona Tengah yang terdiri dari Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Kuala Kapuas yang terletak di Kabupaten Kapuas. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Kuala Kapuas adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Kuala Kapuas

No	Aspek	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi. 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 6. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi. 7. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global. 8. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif. 9. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment. 10. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah 11. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal. 12. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. 13. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 14. Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) 15. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.</p> <p>16. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.</p> <p>17. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.</p> <p>18. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.</p> <p>19. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.</p>
2	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing. 2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. 3. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi. 4. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani. 5. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan melibatkan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam di Taman Nasional Sebangau. 6. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional. 7. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work. 8. Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. 9. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 10. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. 11. Peningkatan produktivitas BUMD.

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>12. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.</p> <p>13. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.</p> <p>14. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.</p> <p>15. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>16. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p>
3	Reformasi Tata Kelola	<p>1. Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.</p> <p>2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.</p>

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional. 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 5. Penguatan integritas partai politik.
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi. 4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda. 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya. 6. Pengembangan diversifikasi pangan. 7. Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis. 8. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. 9. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll. 11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana. 12. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim. 13. Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan. 14. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. 15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 19. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya. 20. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin. 21. Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan. 22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
6	Implementasi Transformasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan. 2. Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis.

No	Aspek	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 5. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 6. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah. 7. Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah. 8. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. 9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi. 10. Pengembangan transportasi umum perkotaan. 11. Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. 12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. 13. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal. 14. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. 15. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. 16. Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air. 17. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana. 18. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). 19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.

No	Aspek	Arah Kebijakan
		20. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik. 21. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. 22. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. 23. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi. 24. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 25. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota. 26. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. 27. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko. 28. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. 29. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Kuala Kapuas adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3. Sasaran Pembangunan Klaster Kuala Kapuas

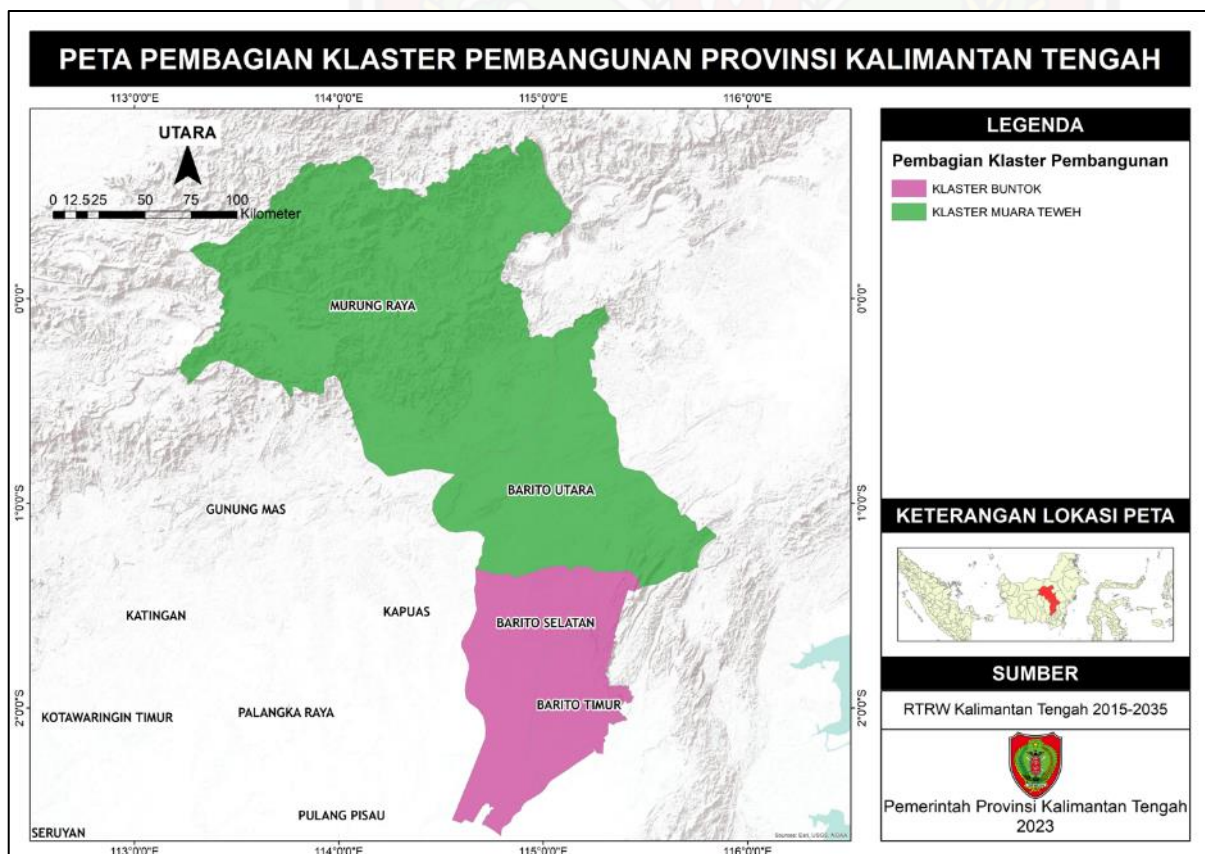
No	Sasaran Pokok	Baseline 2022	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	LPE	6,47	5,60	5,63	5,68	5,73
2	Share PDRB Klaster	14,53%	14,44%	14,21%	13,87%	13,33%

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045



C. ZONA TIMUR

Zona Timur Pembangunan Kalimantan Tengah tersusun dari dua klaster yakni klaster Buntok dan Klaster Muara Teweh. Zona ini memiliki penciri tema utama pembangunan yakni sebagai lumbung energi baru dan terbarukan Kalimantan, serta wilayah mitra dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Daerah ini secara eksisting memiliki konsentrasi baik penduduk dan juga kontribusi PDRB yang paling rendah sehingga perlu *big push* dalam pembangunan guna mengungkit potensi sumber daya ekonomi di Kalimantan Tengah.



Gambar IV.5. Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Timur

Secara spesifik arah kebijakan dari masing-masing klaster di Zona Timur Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

KLASTER BUNTOK

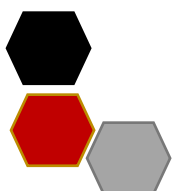
Klaster ini terletak di Zona Timur yang terdiri dari Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Buntok yang terletak di Kabupaten Barito Selatan. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut.

**Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan**

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Buntok adalah sebagai berikut:

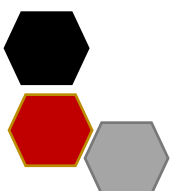
Tabel IV.4. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Buntok

No	Aspek	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor 3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi. 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 6. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi. 7. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi. 8. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif. 9. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment. 10. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah 11. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal. 12. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.



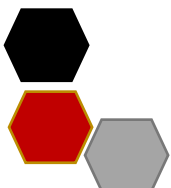


No	Aspek	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none">13. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.14. Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)15. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.16. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.17. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.18. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.19. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
2	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.3. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi.4. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.5. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan melibatkan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam.6. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional.7. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work.8. Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.9. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.10. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber





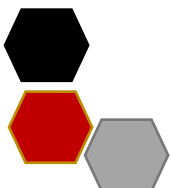
No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Peningkatan produktivitas BUMD. 12. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. 13. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja. 14. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. 15. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 16. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
3	Reformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal





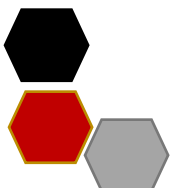
No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional. 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 5. Penguatan integritas partai politik.
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi. 4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda. 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya. 6. Pengembangan diversifikasi pangan. 7. Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis. 8. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. 9. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal. 10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll. 11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan,

R
K
P
D
2
0
2
5





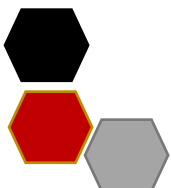
No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.13. Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan.14. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana.15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.19. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.20. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin.21. Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan.22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
6	Implementasi Transformasi	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan.2. Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis.3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.5. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.6. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan sungai secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah.7. Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah.8. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.





No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.</p> <p>10. Pengembangan transportasi umum perkotaan.</p> <p>11. Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.</p> <p>12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.</p> <p>13. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.</p> <p>14. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.</p> <p>15. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.</p> <p>16. Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.</p> <p>17. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.</p> <p>18. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).</p> <p>19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.</p> <p>20. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.</p> <p>21. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>22. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>23. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.</p> <p>24. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p> <p>25. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.</p> <p>26. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</p> <p>27. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.</p> <p>28. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.</p> <p>29. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>.</p>

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045





Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Buntok adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5. Sasaran Pembangunan Klaster Buntok

No	Sasaran Pokok	Baseline 2022	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	LPE	6,16	5,60	6,35	9,90	8,90
2	Share PDRB Klaster	9,40%	9,76%	11,01%	12,57%	14,88%

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

KLASTER MUARA TEWEH

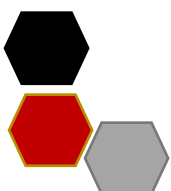
Klaster ini terletak di Zona Timur yang terdiri dari Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Muara Teweh yang terletak di Kabupaten Barito Utara. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Muara Teweh adalah sebagai berikut:

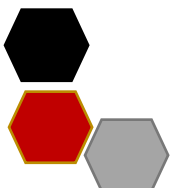
Tabel IV.6. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Muara Teweh

No	Aspek	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor 3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi. 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).



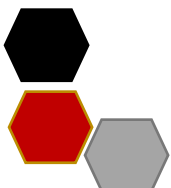


No	Aspek	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none">6. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebecerjaan tinggi.7. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi.8. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif.9. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment.10. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah11. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.12. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.13. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.14. Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)15. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.16. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.17. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.18. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.19. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
2	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota



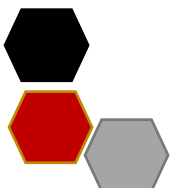


No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.3. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi.4. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.5. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam.6. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional.7. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work.8. Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.9. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.10. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.11. Peningkatan produktivitas BUMD.12. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.13. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.14. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.15. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi;



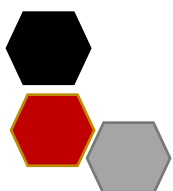


No	Aspek	Arah Kebijakan
		<p>(vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>16. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p>
3	Reformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional. 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.



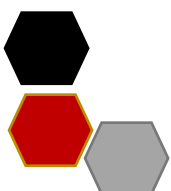


No	Aspek	Arah Kebijakan
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<p>5. Penguatan integritas partai politik.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda.5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya.6. Pengembangan diversifikasi pangan.7. Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis.8. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi.9. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll.11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.12. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.13. Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan.14. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana.15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.19. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.





No	Aspek	Arah Kebijakan
		20. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin. 21. Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan. 22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
6	Implementasi Transformasi	1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan. 2. Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis. 3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 5. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 6. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan sungai secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah. 7. Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah. 8. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. 9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi. 10. Pengembangan transportasi umum perkotaan. 11. Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. 12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. 13. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal. 14. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. 15. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. 16. Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air. 17. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana. 18. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di





No	Aspek	Arah Kebijakan
		fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). 19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman. 20. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik. 21. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. 22. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. 23. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi. 24. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 25. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota. 26. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. 27. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko. 28. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. 29. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Muara Teweh adalah sebagai berikut.

Tabel IV **Error! No text of specified style in document.** 7. Sasaran Pembangunan Klaster Muara Teweh

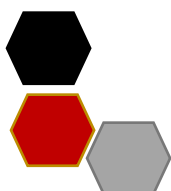
No	Sasaran Pokok	Baseline 2022	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	LPE	6,60	5,60	6,30	9,90	8,90
2	Share PDRB Klaster	12,81%	13,09%	13,41%	13,93%	14,70%

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

4.2.7 Prioritas Penanganan

Tujuan utama dari kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari pengurangan

R
K
P
D
2
0
2
5

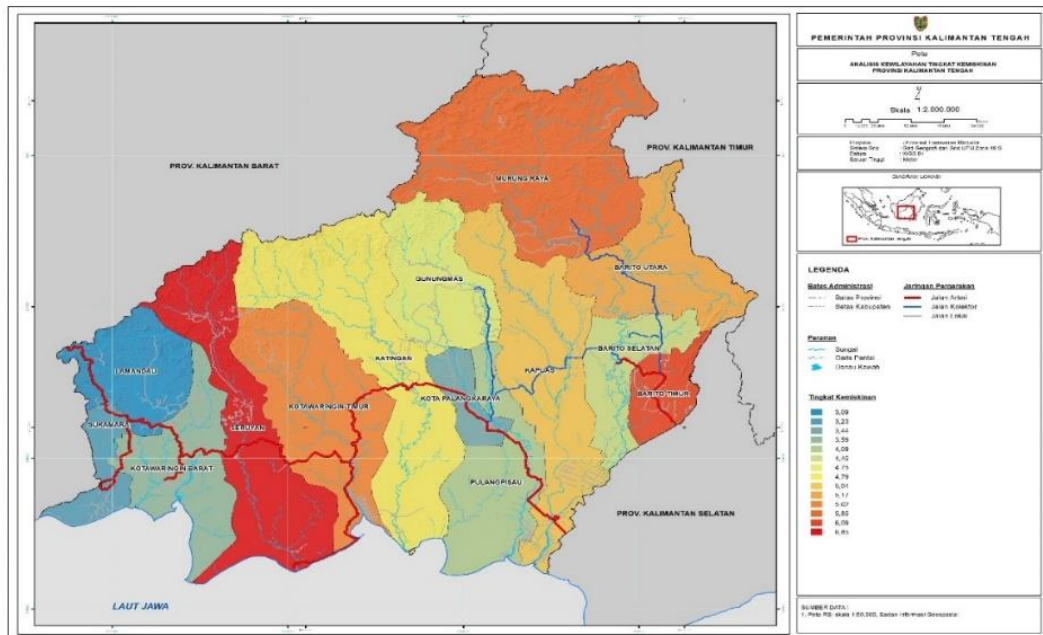




kemiskinan, pengurangan pengangguran dan pemerataan pembangunan ekonomi. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, didapatkan prioritas lokasi penanganan kewilayahan dengan fokus pada tiga permasalahan antara lain :

A. Prioritas Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu prioritas permasalahan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan di Kalimantan Tengah permasalahan kemiskinan diprioritaskan untuk daerah berikut:



Gambar 4.6 Peta Sebaran Kondisi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah

Prioritas Pertama:

1. Kabupaten Seruyan
2. Kabupaten Barito Timur Kabupaten Murung Raya
3. Kabupaten Kotawaringin Timur
4. Kabupaten Barito utara

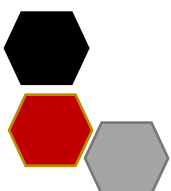
Prioritas Kedua:

1. Kabupaten Kapuas
2. Kabupaten Katingan
3. Kabupaten Gunung Mas
4. Kabupaten Barito Selatan
5. Kabupaten Pulang Pisau

Prioritas Ketiga:

1. Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kota Palangka Raya
3. Kabupaten Sukamara

R
K
P
D
2
0
2
5



**Prioritas Pertama:**

1. Kota Palangka Raya
2. Kabupaten Katingan
3. Kabupaten Kapuas
4. Kabupaten Sukamara
5. Kabupaten Seruyan

Prioritas Kedua:

1. Kabupaten Waringin Timur
2. Kabupaten Barito Selatan
3. Kabupaten Barito Utara
4. Kabupaten Murung Raya
5. Kabupaten Barito Timur

Prioritas Ketiga

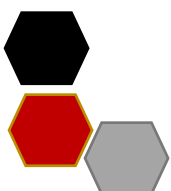
1. Kabupaten Gunung Mas
2. Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Kabupaten Lamandau
4. Kabupaten Pulang Pisau

Upaya untuk mengatasi permasalahan pengangguran daerah pada wilayah prioritas dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya:

1. Pengembangan sektor prioritas yang dapat menyerap tenaga kerja secara besar.
2. Optimalisasi program pengembangan UMKM potensial
3. Pengembangan ekonomi kreatif
4. Optimalisasi pelatihan kerja dengan pengembangan balai latihan kerja.
5. Optimalisasi kurikulum berbasis kewirausahaan serta sinkronisasi kurikulum dengan dunia kerja.

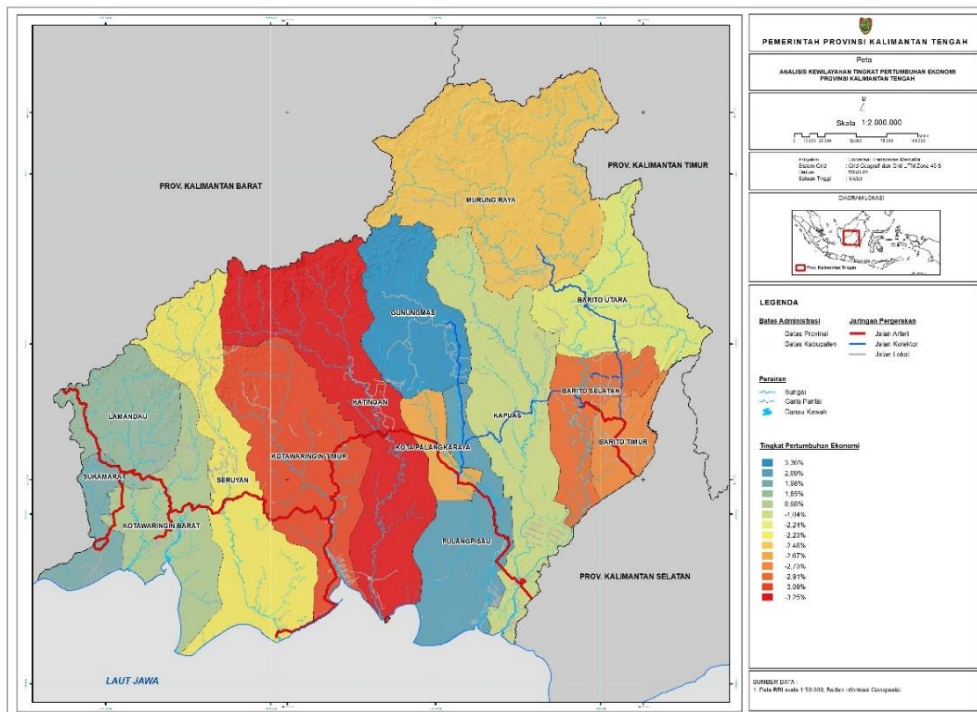
C. Prioritas Penanganan Pembangunan Ekonomi

Tahun 2024 pembangunan ekonomi semakin meningkat dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam 2 tahun ini fokus untuk melakukan stabilisasi dan pemulihan ekonomi dalam program kerjanya. Wilayah yang dapat menjadi prioritas dalam penanganan Pembangunan ekonomi adalah wilayah berikut:





R
K
P
D
2
0
2
5



Gambar 4.8 Peta Sebaran Kondisi Ekonomi

Prioritas Pertama:

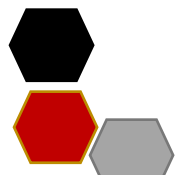
1. Kabupaten Katingan
2. Kabupaten Kotawaringin Timur
3. Kabupaten Barito Selatan
4. Kabupaten Barito Timur
5. Kota Palangka Raya

Prioritas Kedua:

1. Kabupaten Murung Raya
2. Kabupaten Barito Utara
3. Kabupaten Seruyan
4. Kabupaten Kapuas
5. Kabupaten Kotawaringin Barat

Prioritas Ketiga:

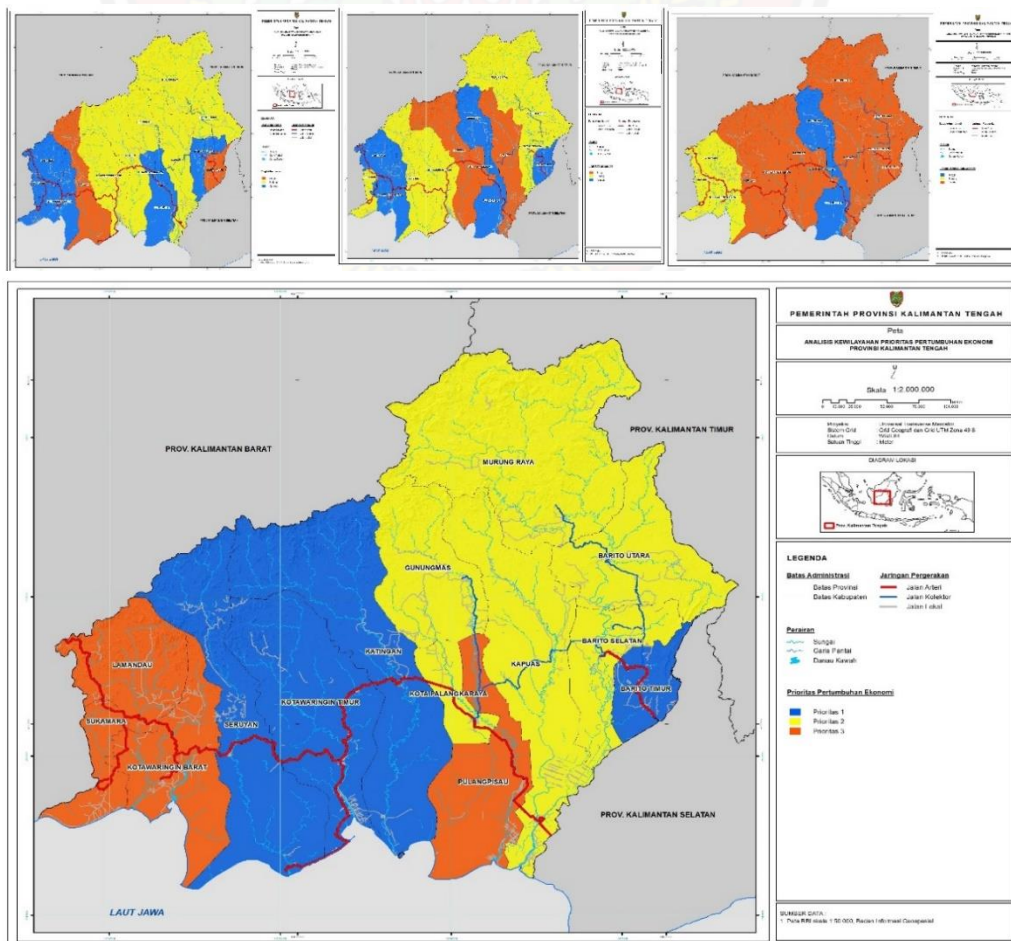
1. Kabupaten Lamandau
2. Kabupaten Sukamara
3. Kabupaten Pulang Pisau
4. Kabupaten Gunung Mas





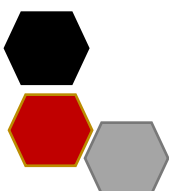
Wilayah-wilayah prioritas utama dalam penanganan pembangunan ekonomi adalah Kabupaten atau Kota yang saat ini kondisi perekonomiannya mengalami kontraksi cukup dalam. Upaya penanganan pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya :

1. Pemulihan konsumsi masyarakat dengan jalan meningkatkan pemberian dan ketepatan bantuan sosial khususnya bagi masyarakat miskin yang terdampak.
2. Pemberian stimulus ekonomi kepada pelaku usaha potensial yang menjadi motor penggerak ekonomi. Berupa keringanan bunga pinjaman serta stimulus keringanan pajak untuk mendorong peningkatan investasi.
3. Meningkatkan belanja pemerintah khususnya belanja modal dan jasa.
4. Stimulus ekspor baik antar daerah maupun luar negeri untuk memperbaiki kondisi net ekspor daerah.



Gambar 4.9 Prioritas Pembangunan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan pemetaan tingkat kondisi Kemiskinan, Pengangguran, serta kondisi pertumbuhan ekonomi dari kabupaten dan kota di provinsi





Kalimantan Tengah dengan membagi dalam tiga kategori didapatkan prioritas pembangunan ekonomi adalah di wilayah berikut:

Prioritas pertama

1. Kota Palangka Raya
2. Kabupaten Barito Timur
3. Kabupaten Katingan
4. Kabupaten Kotawaringi Timur
5. Kabupaten Seruyan

Prioritas Kedua

1. Kabupaten Kapuas
2. Kabupaten Barito Selatan
3. Kabupaten Barito Utara
4. Kabupaten Gunung Mas
5. Kabupaten Murung Raya

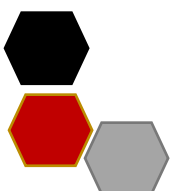
Prioritas Ketiga

1. Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kabupaten Sukamara
3. Kabupaten Lamandau
4. Kabupaten Pulang Pisau

4.2.8 Pengembangan Kawasan Strategis Pembangunan Ekonomi

Kawasan strategis adalah kawasan budidaya yang berperan penting untuk perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan maupun pertahanan dan keamanan dilihat secara nasional dan daerah. Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pulau Kalimantan ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang terdiri dari:

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa (Provinsi Kalimantan Barat), Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat), Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (Provinsi Kalimantan Barat), Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung

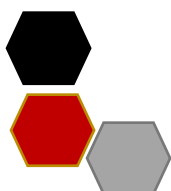




Kalimantan (Heart of Borneo) (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito (Provinsi Kalimantan Tengah), Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (Provinsi Kalimantan Tengah), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin (Provinsi Kalimantan Selatan), dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur). Untuk mewujudkan pengembangan KSN secara efisien dan efektif, diperlukan suatu proses perencanaan untuk setiap KSN secara baik dan benar. Selanjutnya, Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

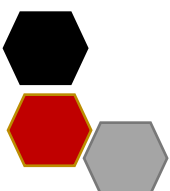
Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan strategis provinsi berfungsi: Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan; dan Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Penetapan kawasan strategis provinsi (KSP) meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan yaitu: pertumbuhan ekonomi, social budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun kawasan stategis yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito dan Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Uraian masing-masing kawasan strategis di Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Kota Palangka Raya;



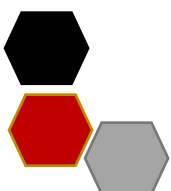


- b. Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya
- c. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis yang terdapat di Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Lamandau;
- d. Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak berlokasi di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya;
- e. Kawasan pertanian lahan gambut di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya;
- f. Kawasan pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya;
- g. Kawasan perikanan dan kelautan pengembangan shrimp estate di 6 (enam) kabupaten pesisir, dengan fokus utama di Kabupaten sukamara
- h. Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao) di 14 Kabupaten/Kota;
- i. Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, peti kemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara berupa KSP Pangkalan Bun - Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat, KSP Sampit - Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur, KSP Batanjung - Kapuas di Kabupaten Kapuas, Sigintung di Kabupaten Seruyan dan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;



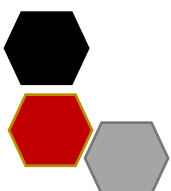


- j. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Lamunti Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Pulang Pisau; dan
 - k. Kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Seruyan.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya, meliputi:
- a. Kawasan Strategis Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi Kabupaten Gunung Mas;
 - b. Kawasan Strategis sekitar Pahewan, seperti Pahewan Kalawa di Kabupaten Pulang Pisau, Pahewan Kalaru di Kabupaten Katingan dan Pahewan Tabalien di Kota Palangka Raya;
 - c. Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi Umat Hindu Kaharingan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kawasan Strategis Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, meliputi:
Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:



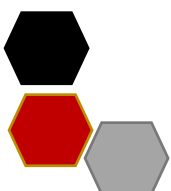


- a. Kawasan Strategis Ekosistem Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi: - Kawasan Ekosistem Air Hitam di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau; - Kawasan Ekosistem Pantai (mangrove) di sepanjang jalur pantai selatan Provinsi Kalimantan Tengah; dan - Kawasan Ekosistem Gambut terdiri atas kawasan rawa gambut, kawasan kubah gambut, dan kawasan gambut tebal yang tersebar di dataran bagian Selatan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Kawasan Strategis DAS meliputi DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Katingan, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai dan DAS Sebangau.
 - c. Kawasan Strategis Heart of Borneo (HoB) meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara.
5. Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:
- a. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung dan Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya;
 - b. Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya;
 - d. Cagar Alam Pararawen I dan II di Kabupaten Barito Utara;
 - e. Suaka Margasatwa Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara;
 - f. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan;
 - g. Taman Nasional Sebangau, Pahewan Kalawa, Danau Sabuah di Kabupaten Pulang Pisau;
 - a. Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, Pahewan Kalaru, Danau Kamipang di Kabupaten Katingan;
 - b. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. Konservasi Anggrek Hitam di Kabupaten Barito Timur; j. Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan;
 - d. Danau Burung di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan
 - e. Hutan Monumental Nyaru Menteng, Danau Rawet, Danau Tahai, Pulau Kaja, Pahewan Tabalien, Danau Tundai, Danau Lewu di Kota Palangka Raya





6. Kawasan Strategis Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Area)
- a. Kawasan Lindung (kawasan yang menyediakan fungsi pendukung keanekaragaman hayati untuk kawasan lindung atau konservasi) di seluruh kabupaten/kota kecuali Barito Timur dan sebagian besar terkonsentrasi di kawasan gambut dan rawa campuran di bagian selatan dan relatif kecil di sepanjang bagian utara pada hutan lahan kering (berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Timur).
 - b. Lanskap alamiah yang luas (lanskap alamiah dengan kapasitas untuk memelihara proses dan dinamika ekologi alamiah) berada di dua benteng utama yaitu: - Bagian utara khususnya Kabupaten Murung Raya dan melebar ke bagian barat daerah pegunungan di Kabupaten Katingan - Bagian tengah dan selatan yang mencakup kawasan gambut dan rawa campuran, termasuk kawasan konservasi (khususnya Kabupaten Katingan, Kapuas dan Pulang Pisau)
 - c. Ekosistem transisi (kawasan yang terdiri dari dua atau lebih ekosistem berdekatan) - Transisi elevansi pada kawasan pegunungan di bagian utara - Keranggas ke non keranggas pada bagian tengah dan bagian utara - Rawa ke non rawa pada bagian tengah dan selatan
 - d. Ekosistem langka dan terancam pada umumnya di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Katingan yang merupakan kawasan dengan tingkat deforestasi yang cukup besar namun ekosistem masih terjaga. Di kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat dan Barito Utara, serta di Kabupaten Murung Raya dengan deforestasi yang masih terbatas.
 - e. Jasa lingkungan tertentu (Kawasan penting untuk perlindungan terhadap erosi dan sedimentasi) tingkat kemiringan yang tinggi dan solum tanah yang dangkal yang tersebar di hamper seluruh kawasan Kalimantan Tengah dengan resiko tertinggi di bagian utara.





4.3. KEGIATAN STRATEGIS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

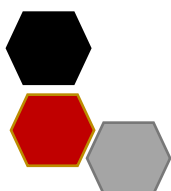
Provinsi Kalimantan Tengah saat ini merupakan provinsi terluas di Indonesia, dengan luas 153.443 km² atau sekitar 1,5 kali luas Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 2,773 juta jiwa, dan kepadatan penduduk 18 jiwa/km², terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, dan 1.576 desa/kelurahan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Visi pembangunan Kalimantan Tengah adalah **"Kalteng Makin BERKAH"** (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis), yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misi. Mengacu pada Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Tema atau Agenda Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah **"MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN MELALUI PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENUJU KALTENG UNGGUL DAN BERMARTABAT"** dengan prioritas pembangunan fokus pada:

- A. Sektor Pendidikan (Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia)
- B. Sektor Kesehatan (Penurunan Angka Stunting dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan)
- C. Infrastruktur
- D. Perekonomian dalam arti luas (hilirisasi hasil pertambangan, hasil perikanan/kelautan dan hasil pertanian mencakup perkebunan dan tanaman pangan), pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan, serta bidang/sektor strategis lainnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.

1. Isu strategis pada RKPD Provinsi Kalteng tahun 2025 yaitu:

- a. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan, baik untuk kepentingan lokal Provinsi Kalimantan Tengah maupun untuk kepentingan nasional
- b. Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam
- c. Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar dan konektivitas





- d. Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan kebutuhan produksi maupun pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah
- e. Peningkatan upaya mitigasi bencana,
- f. Penurunan angka stunting dan penanggulangan kemiskinan
- g. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan

2. Zonasi Pembangunan Kalimantan Tengah

Pembangunan Kalimantan Tengah 20 tahun ke depan di bagi ke dalam **3 Zonasi Wilayah Pembangunan**, yaitu **Zona Barat** meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Sukamara, Seruyan dan Lamandau; **Zona Tengah** meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau, Kapuas dan Palangka Raya; serta **Zona Timur** meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya.

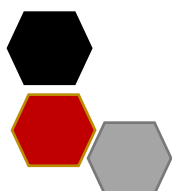
Setiap Zona dibagi menjadi **dua klaster** dengan pusat kegiatan yang ditentukan berdasarkan status Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRW Provinsi.

- a. **Zona Timur** meliputi **klaster PKW Muara Teweh** (Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara) dan **Klaster PKW Buntok** (Barito Selatan dan Barito Timur).
- b. **Zona Tengah** meliputi **klaster PKN Palangka Raya** (Kota Palangka Raya, Gunung Mas, dan Katingan) dan **Klaster PKW Kapus** (Kapuas dan Pulang Pisau).
- c. **Zona Barat** meliputi **klaster PKW Pangkalan Bun** (Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau) dan **Klaster PKW Sampit** (Kotim dan Seruyan)

3. Kegiatan Strategis Kalimantan Tengah

Selain Pemenuhan *Mandatory Spending* anggaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ada juga penganggaran untuk **Program Strategis Kalimantan Tengah** dalam rangka mendukung Kalimantan Tengah sebagai Lumbung Pangan dan Konservasi Internasional, antara lain:

- a. Pengembangan Kawasan Food Estate
- b. Pengembangan Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi
- c. Pembangunan Universitas Unggulan





- d. Pembangunan RS Rujukan
- e. Pengembangan Industri Hilirisasi (pertambangan, industri, pertanian dan perikanan(Shrimp Estate)
- f. Peningkatan Infrastruktur (Jalan, Bandara, Pelabuhan dan Bendaungan)
- g. Pengembangan PLTA Muara Joloi dan PLTA Lainnya di Kalimantan Tengah
- h. Pengembangan wisata alam (Segintung, Sebangau, Bukit Raya/Bukit Baka dan wisata lainnya) dan Wisata-wisata lainnya
- i. Peningkatan UMKM dan 1 Desa 1 Produk Unggulan atau 1 Kawasan Strategis
- j. Penurunan Stunting di Kalteng
- k. Penurunan Angka Kemiskinan
- l. Pemenuhan Desa berlistrik 2025
- m. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dll

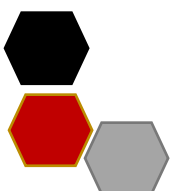
4.4. INOVASI DAERAH

Pelaksanaan *Good Governance* harus didukung oleh sistem informasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Implementasi dari konsep *e-government* pada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengembangan sistem informasi yang relevan dengan kebutuhan birokrasi dan administrasi Pemerintah Daerah. Sistem Informasi tersebut ditujukan untuk membantu manajemen dalam pemerintahan guna mengatur hal-hal yang dapat dilakukan secara komputerisasi. Untuk meningkatkan perencanaan dan pelayanan prima dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja serta memudahkan pimpinan dalam mengontrol pekerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah dibutuhkan inovasi yang dapat mendukung itu semua.

1. Inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

a. Geoportal "LAUT BERKAH"

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut yaitu tumpang tindih pemanfaatan ruang, pemanfaatan tak seimbang, dampak aktivitas manusia, dan pencemaran wilayah di pesisir dan laut. Konsep pemanfaatan ruang perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam sektor kegiatan dan

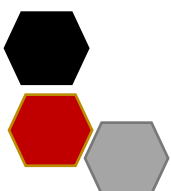




antar level pemerintahan. Sementara itu, batas kegiatan perlu ditentukan. Dengan demikian pertentangan antar kegiatan dalam jangka panjang dapat dihindari atau diperkecil. Upaya penanggulangan permasalahan dibuat acuan pengelolaan dan pemanfaatan yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Lambatnya implementasi RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Pergub Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pergub Nomor 34 Tahun 2019 Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan “Dalam rangka pelayanan informasi dan data base perizinan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dibentuk aplikasi Geoportal “Laut Berkah”.

Geoportal "LAUT BERKAH" merupakan sebuah aplikasi untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses pemanfaatan ruang laut di perairan Provinsi Kalimantan Tengah, berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dikembangkan dengan maksud membuat terobosan berupa aplikasi proses perizinan yang diharapkan bisa mewujudkan proses perizinan yang efektif, terbuka dan efisien serta akuntabel, yang dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan lanjutannya.

Pada awal tahun 2021, dilakukan pengembangan website yaitu berupa penambahan Menu/Konten DOKUMEN yang berfungsi untuk sharing document milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah baik berupa E-Book, Dokumen Kerja Sama, Dokumen Pengelolaan, Artikel. Selain itu dibuat aplikasi pendukung untuk Admin Web untuk melihat Statisti kunjungan websita sehingga data tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan selanjutnya. OPD berkomitmen untuk terus mengembangkan Website Geoportal "LAUT BERKAH" sesuai denga perubahan regulasi, konektifiktas dengan aplikasi DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan pengkayaan menu. Metodologi dan Pendekatan yang dipergunakan dalam Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dilakukan dengan memperhatikan teknologi terbaru yang berkembang saat ini. Pada pengembangannya





digunakan model prototype, dimulai dengan pengumpulan kebutuhan dan perbaikan, desain cepat terhadap fasilitas, pembentukan prototype, valuasi end user terhadap prototype dan produk akhir. Komponen Sistem yang digunakan adalah:

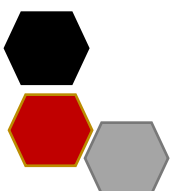
- 1) Arsitektur Sistem : berbasis web application menggunakan framework OctoberCMS dan Laravel yang mendukung pengembangan metode prototyping serta leaflet dan OpenStreetMap untuk loading terhadap pemetaan secara online.
- 2) Database : MySQL / MariaDB
- 3) Server : Berbasis Linux
- 4) Client : berbasis web browser
- 5) Digital Map Source : Google Map / OpenStreetMap

a. Tujuan Aplikasi Website Geoportal "LAUT BERKAH" adalah:

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan justifikasi terkait permohonan KKPRL melalui overlay titik koordinat;
- 2) Menyediakan peta online RZWP-3-K Provinsi Kalteng sebagai informasi terkait potensi investasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha/calon investor;
- 3) Memberikan akses kepada pelaku usaha dalam proses KKPRL;
- 4) Memberikan kepastian proses yang dapat terpantau secara kekinian / realtime oleh para pelaku usaha terkait KKPRL;
- 5) Sebagai Pustaka digital pengelolaan KKPRL, dokumen, informasi dan berita yang bisa diakses dengan lebih cepat tanpa terkendala aspek geografis;
- 6) Memudahkan bagi pelaku usaha/calon investor yang berminat untuk mendapatkan informasi terkait potensi investasi di perairan Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Manfaat yang diperoleh

Memberikan kemudahan dan kejelasan bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses KKPRL Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana website Geoportal "LAUT BERKAH" dapat diakses kapan saja dan dimana saja tanpa harus mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, apalagi di





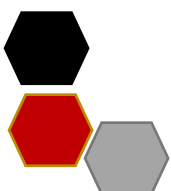
zaman pandemi Covid-19 sangat membantu karena mengurangi mobilitas pengguna. Dan data dan informasi yang diperoleh pengguna melalui website Geoportal "LAUT BERKAH" tidak dikenakan biaya.

b. SIBAJAKAH (SISTEM INFORMASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH KALIMANTAN TENGAH BERKAH)

Lebih dari 91 % populasi siswa dunia telah dipengaruhi oleh penutupan sekolah karena Pandemi Covid – 19 (UNESCO). Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Belajar dari Rumah melalui Pembelajaran Jarak Jauh. Edaran ini mengacu kepada 4 (empat) hal, yaitu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan, memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai Pandemi Covid – 19, memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing – masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dari rumah, serta memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kualitatif.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau pembelajaran secara online ini merujuk pada kebijakan pemerintah yang tertuang dalam SKB 4 Menteri tentang pelaksanaan pembelajaran ditahun ajaran baru 2020-2021 ditengah pandemic Covid-19 ini. Bagi Sekolah yang berada pada zona selain hijau, wajib melaksanakan proses pembelajaran secara daring atau jarak jauh (PJJ).

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Dalam jaringan (Daring). PJJ atau Daring merupakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan dengan perangkat komputer atau gadget dimana guru dan siswa berkomunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi.





Semenjak April 2020, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan membentuk Tim Pengelola Daring untuk mengelola Pelayanan Pendidikan via Sinkronus Learning. Layanan yang diberikan adalah KIBAR atau Kita Berbagi Daring yang merupakan kelas dalam jaringan, dimana guru dapat berbagi ilmu dengan sesama guru, praktisi atau narasumber lainnya. Selanjutnya pada triwulan ketiga, layanan yang diberikan dikembangkan ke dalam sebuah sistem informasi menggunakan LMS atau Learning Management System, yang dinamakan SI- BAJAKAH atau Sistem Informasi Belajar Jarak Jauh Kalimantan Tengah Berkah.

SI-BAJAKAH dibuat dengan filosofi BAJAKAH yaitu sebagai obat. Melalui SI BAJAKAH ini diharapkan dapat membantu para pengajar dan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajar – mengajar walaupun di tengah Pandemi Covid-19. SI BAJAKAH hadir sebagai alternative sistem daring yang dapat digunakan oleh guru – guru selain rumah belajar, google classroom dan lainnya.

a. Tujuan Inovasi Daerah

Membangun sistem informasi berbasis LMS berupa platform pembelajaran jarak jauh yang dapat untuk mengelola proses pembelajaran jarak jauh, membuat dan menjalankan kelas online serta interaksi dengan siswa secara asinkronus. Dengan demikian akan memberikan alternative platform PJJ bagi guru – guru yang dapat diakses secara gratis, mudah, cepat, dan dikelola sendiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng.

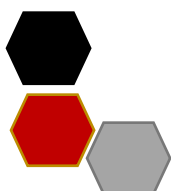
b. Manfaat Inovasi Daerah

Manfaat utama dari SIBAJAKAH adalah sebagai alat untuk mengelola proses PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) dengan ruang lingkup manfaat meliputi :

- 1) Membuat kelas online
- 2) Interaksi dengan siswa

c. Hasil Inovasi Daerah

Hasil inovasi ini adalah menyediakan kebutuhan informasi minimum sebagai berikut : o Mengelola profil





- 1) Membuat kelas/kursus online
- 2) Menambahkan sumber belajar / konten dalam kelas
- 3) Berinteraksi dengan siswa
- 4) Data tersimpan di database sehingga pencarian data mudah dan cepat

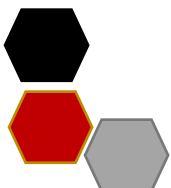
c. SISTEM APLIKASI TERAMPIL DAN TANGGUH (SITAGUH)

Sistem Aplikasi Tangguh yang selanjutnya disingkat SiTaguh adalah kumpulan proses yang algoritmik, basis data, alur kejadian interaksi manusia dengan menggunakan teknologi yang diorganisasikan secara terpadu untuk dapat memecahkan masalah dan pengambilan keputusan secara online, akurat dan real time berkaitan dengan manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga nantinya mengasillkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.

Dalam suatu pemutakhiran data yang merupakan kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini. Sehingga dengan adanya SiTAGUH ini dapat digunakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk dapat memutakhiran datanya sendiri secara sendiri

Kehadiran SiTaguh sebagai implementasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh layanan kepegawaian yang akan mengurangi intensitas pertemuan antar Pegawai Badan Kepegawaian Daerah dengan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan usulan kepegawaian, hal ini akan mengurangi resiko terjadinya gratifikasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan adanya sistem tersebut setiap layanan kepegawaian tidak akan memakan kertas untuk mengusul dan mencetak surat keputusan.

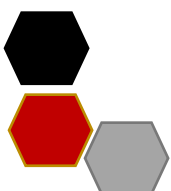
Dalam aplikasi dilapangan Sitaguh dirancang untuk mampu menerjemahkan segala kebutuhan dari sistem layanan kepegawaian yang selama ini telah berjalan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya





- 1) Memiliki import data menggunakan file excel dari system aplikasi Kepegawaian milik Badan Kepegawaian Negara, untuk menjamin keakuratan data Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Memiliki menu layanan yang telah di bagi menjadi dua kategori, yaitu
 - i. Layanan Mandiri yang merupakan layanan kepegawaian yang penetapannya menjadi wewenang penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi ijin belajar, tugas belajar, keputusan pengakuan gelar akademik, keputusan pengangkatan kedalam jabatan fungsional, pendaftaran mengikuti ujian dinas, pendaftaran mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, usul cuti, dan keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - ii. Layanan usul merupakan Layanan kepegawaian yang penetapannya dapat di lakukan setelah mendapat persetujuan dari instansi vertical meliputi usulan kenaikan pangkat/golongan, usulan mutasi, usulan pensiun, usulan penyesuaian masa kerja, usulan pencantuman gelar akademik, usulan kartu istri/kartu suami, dan usulan perbaikan Basis Data Kepegawaian
 - 3) Memiliki barcode yang dapat digunakan untuk memvalidasi dan menjamin keaslian dari setiap hasil layanan kepegawaian;
 - 4) Memiliki tandatangan digital di setiap hasil layanan kepegawaian;
 - 5) Memiliki sistem pemberitahuan informasi layanan menggunakan pengiriman email secara otomatis yang dilakukan oleh system informasi;
 - 6) Memiliki kedinamisan dalam mengubah atau mengganti template untuk mencetak hasil dari layanan kepegawaian;
 - 7) Memiliki fungsi unggah dan unduh berkas PDF/JPG;
 - 8) Mempunyai kedinamisan website dimana system informasi dapat digunakan berbagai perangkat komputer dan ponsel pintar
- Penambahan Menu Baru Sistem Informasi Pensiun Pada Sistem Aplikasi Sitaguh

Implementasi rencana aksi perubahan dilakukan dengan mengembangkan sebuah Sistem Informasi daring yang dapat





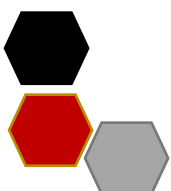
memfasilitasi layanan informasi dan pensiun di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan Sistem Informasi merupakan bentuk upaya untuk mempercepat dan mempermudah proses pengusulan pensiun Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan Tengah.

Sistem Informasi yang telah dikembangkan mentransformasi metode pengusulan, perencanaan dan pencatatan yang selama ini dilakukan secara manual tanpa bantuan komputer menjadi otomatis dan terkomputerisasi. Transformasi layanan pensiun akan menjadikan layanan pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih cepat dan minim kesalahan. adapun Fungsi dan menu dari Sistem Informasi yang telah dirancang dan dibangun diantaranya.

- 1) Menghitung Usia ASN;
- 2) Menghitung TMT Tahun Pensiun;
- 3) Melakukan filter dan sorting Tahun tertentu;
- 4) Melakukan filter dan sorting Unit Kerja;
- 5) Melakukan sorting Usia ASN;
- 6) Melakukan Pencarian / Searching berdasarkan objek tertentu (Nama, NIP, Jabatan dan Unit Kerja.
- 7) Visualisasi Grafik data Usia Aparatur Sipil Negara;
- 8) Menu Layanan pensiun yang terintegrasi langsung dengan Aplikasi Terampil dan Tangguh (SITAGUH);
- 9) Menu Layanan Whatsapp, dimana user dapat langsung berkonsultasi dengan Operator
- 10) Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah.

Sistem Informasi yang telah dikembangkan juga memiliki kelebihan, diantaranya :

- 1) Melakukan query dengan sistem server-side query;
- 2) Web-Based, dapat diakses oleh beragam device (Komputer, Smartphone dan Tablet);
- 3) Dynamic UI, dimana sistem informasi tetap nyaman untuk diakses di berbagai jenis layar alat komunikasi.



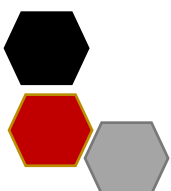


a. Tujuan Inovasi Daerah

- - Mendukung terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian
- - Menyediakan layanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat, transparan, mandiri, adil, akuntabel, real time serta tanpa adanya KKN
- - Rapat koordinasi internal
- - Rapat koordinasi efektif
- - Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder;
- - Penambahan menu baru sistem informasi pensiun pada Aplikasi Sitaguh R
- - Rapat pembahasan sosialisasi;
- - Sosialisasi penggunaan menu baru (basis data ASN yang memasuki usia pensiun) pada aplikasi SITAGUH;
- - Penyempurnaan Menu Baru Basis Data ASN yang Mencapai BUP;
- - Penginputan database ASN yang akan memasuki BUP
- - Pengembangan penambahan menu baru sistem informasi pensiun pada Aplikasi Sitaguh yang ditegrasikan ke Aplikasi Sitaguh
- - Tersedianya surat persetujuan dari ketua tim anggaran untuk tambahan menu database pada aplikasi SITAGUH

b. Manfaat Inovasi Daerah

- Mewujudkan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi dan tanpa adanya KKN
- Menjaga integritas petugas pelayanan
- Dengan terwujudnya aksi perubahan ini akan membantu meningkatkan Efektifitas dan efisensi pelaksanaan Kinerja menjadi Terukur dalam mengemban tugas memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan ASN.
- Mempermudah pengelola kepegawaian Perangkat Daerah untuk mengecek data PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).
- terselesainya SK pensiun bagi PNS tepat waktu
- Masyarakat akan memperoleh pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan kompeten serta profesional sesuai dengan visi misi dan motto pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Tengah.

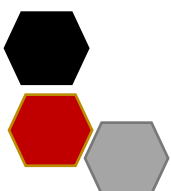




- Sebagai sarana Pembelajaran Menambah wawasan dan pengalaman untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, kreatif, inovatif, dan mempunyai loyalitas tinggi, serta dapat sebagai role model dalam membangun organisasi
- c. Hasil Inovasi Daerah
- Merupakan sistem informasi yang menyediakan layanan kepegawaian berbasis berkas elektronik. Dengan Sitaguh dapat melakukan cetak SK secara mandiri dan melakukan usulan layanan kepegawaian jarak jauh melalui berkas digital, serta dapat digunakan dimana dan kapan saja
 - Optimalisasi proses pengusulan pensiun bagi Apratur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga meningkatkan kinerja pelayanan BKD Prov. Kalteng serta memudahkan PNS yang mau pensiun untuk mengakses data, mempercepat waktu pengurusan pensiun, mempermudah dalam mengakses database pensiun ASN oleh masing-masing pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah juga efisien dalam anggaran.

4.5. USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran dan usulan program/kegiatan DPRD tersebut memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Pokok-pokok pikiran dan usulan program/kegiatan DPRD tersebut akan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD. Usulan program/kegiatan pembangunan melalui pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah diinput melalui aplikasi SIPD dengan alamat *SIPD.RI* dan paling lambat disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat

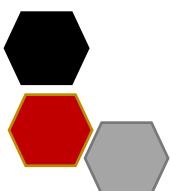




seminggu sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2025 ini usulan yang berasal dari pokok pikiran sesuai tabel 4.23 Pokok-Pokok pikiran DPRD.



R
K
P
D
2
0
2
5



TABEL 4.23
USULAN KEGIATAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
PADA RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Permohonan Pembangunan Kantor Desa Harapan Baru	Desa Harapan Baru, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ditolak	Untuk pembangunan kantor desa, kewenangan berada di pemerintah kabupaten. Karena pada Tahun 2015, pernah dilakukan pembangunan kantor desa oleh pemerintah provinsi dan menjadi temuan	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Untuk pembangunan kantor desa, kewenangan berada di pemerintah kabupaten. Karena pada Tahun 2015, pernah dilakukan pembangunan kantor desa oleh pemerintah provinsi dan menjadi temuan.	-	1	unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
2	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Permohonan Bantuan Pembangunan/Perbaikan Jalan dan Pengaspalan Jl. Pelita 1 - 3 Desa Mentaren II	Desa Mentaren II, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
3	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Permohonan Perbaikan dan Peningkatan Pengaspalan Jalan Umum Penghubung Antar Desa di Wilayah Desa Harapan Baru	Desa Harapan Baru, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
4	Ir. ARTABAN, MH	perbaikan jalan provinsi pelantaran - parenggean	desa pelantaran-kec parenggean, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	km	20.000.000.000	Rekonstruksi Jalan

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
5	Ir. ARTABAN, MH	perbaikan ruas parenggean - tumbang sangai	kec parenggean - kec Telaga antang , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	25	km	20.000.000.000	Rekonstruksi Jalan
6	Ir. ARTABAN, MH	perbaikan ruas jalan Tumbang Sangai - Antang Kalang	kec parenggean - kec telaga antang , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	30	km	20.000.000.000	Rekonstruksi Jalan
7	Ir. ARTABAN, MH	Pembangunan Jalan Handel Sahari RT 02 Desa Bagendang Hulu	desa bagendang hulu, jalan handel sahari Rt 02, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
8	Ir. ARTABAN, MH	Peningkatan Jalan di Wilayah RT II Jalan Sumber Makmur (Jalan poros Trans) Desa Bagendang Hulu	Wilayah RT II Jalan Sumber Makmur (Jalan poros Trans) Desa Bagendang Hulu, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
9	Ir. ARTABAN, MH	Usulan Pembangunan Siring Sungai pada jalan menuju kantor desa Bapanggang Raya	jalan menuju kantor desa Bapanggang Raya , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
10	Ir. ARTABAN, MH	Permohonan Pembangunan Jalan BBU desa Bapeang	Jalan BBU desa Bapeang , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	3	km	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
11	Ir. ARTABAN, MH	Peningkatan Gg mawar RT 02 Kelurahan Baamang Tengah	Gg mawar RT 02 Kelurahan Baamang Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
12	Ir. ARTABAN, MH	peningkatan Gg Batang Kampung sepanjang 200 meter Kelurahan Tanah Mas	Gg Batang Kampung Kelurahan Tanah Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
13	Ir. ARTABAN, MH	Peningkatan Jalan Kutung Mistur RT.12-RT.009 desa Patai	alan Kutung Mistur RT.12-RT.009 desa Patai, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
14	Ir. ARTABAN, MH	Jalan Poros Desa Bandar Agung	Jalan Poros Desa Bandar Agung, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
15	Ir. ARTABAN, MH	Pembangunan Drainase RT.08, RT.12 desa sumber makmur	RT.08, RT.12 desa sumber makmur, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
16	Ir. ARTABAN, MH	Pembangunan Jembatan Jalan Usaha Tani desa Karang Tunggal	desa Karang Tunggal, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
17	Ir. ARTABAN, MH	Permohonan Drainase Jalan Lingkungan RT 08/RW VII Kelurahan Pasir Putih	Jalan Lingkungan RT 08/RW VII Kelurahan Pasir Putih, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
18	Ir. YULILIS	Permohonan Kursi plastic dan Tenda Gereja Katolik SANTO FRANSISKUS ASISI Stasi Benangin	Jln Lintas Provinsi (Benangin Muara Teweh)RT. 04 Desa Benangin I Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Validasi Mitra Bappeda	-	disetujui	-	-	-	1	PAKET	-	-
19	Ir. YULILIS	Bantuan Penanganan Kerawanan Pangan (desa lokus stunting) Kelompok Tani Maju Bersama	Desa dirung lingkin kecamatan tanah siang Selatan Kabupaten Murung Raya , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Dapat di akomodir dengan menyesuaikan dana anggaran	Usulan diakomodir dan anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
20	Ir. YULILIS	Permohonan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Bolom Pio	Desa Dirung Kec. Murung , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
21	Ir. YULILIS	Permohonan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Makmur Jaya	Desa Muara Tupuh Kec. Laung Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
22	Ir. YULILIS	Proposal Rumah Pendeta (Pastori)	Desa Konut Kecamatan Tanah Siang, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalteng No. 42 Tahun 2021, Bahwa usulan yang disampaikan terlebih dahulu dilakukan verifikasi melalui Proposal yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Up. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalteng.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	UNIT	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
23	Ir. YULILIS	Perlengkapan Alat Gereja Jemaat Smirna	Desa Konut, Kec. Tanah Siang, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
24	Ir. YULILIS	Penataan Halaman dan Pagar Gereja GPDi Jemaat Smirna	Desa Konut Kec. Tanah Siang, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
25	Ir. YULILIS	Usulan Perbaikan Jalan Simpang sayang – Maliau	Desa Patas 1 Kec. Gunung Bintang Awai, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	20	km	-	-
26	Ir. YULILIS	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Rumah layak Huni	RT 1 Desa mahanyan, Kec. Tanah Siang, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Tidak termasuk pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Unit Rumah	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
27	Ir. YULILIS	Pembangunan Gereja GPDi Jemaat Kristus	Desa Oreng, Kec. Tanah Siang, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
28	Ir. YULILIS	Pengadaan Alat Gereja GPDi Jemaat Kristus	Desa Oreng, Kec. Tanah Siang , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
29	Ir. YULILIS	Penataan Halaman dan Pagar Gereja GPDi Jemaat Kristus	Desa Oreng, Kec. Tanah Siang Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
30	Ir. YULILIS	Pengadaan Alat Musik Gereja GPDI Agape	Desa Tumbang Ulu, Kec. Tanah Siang, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
31	Ir. YULILIS	Sarana Prasarana Gereja GPDI Mahanaim	Desa Mantiat Pari, Kec. Tanah Siang, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
32	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Permohonan Kelanjutan Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Desa Harapan Baru, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas	Desa Harapan Baru, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Validasi Mitra Bappeda	-	disetujui	-	-	-	1	unit	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
33	HERI SANTOSO, ST	peningkatan	Desa Lada Mandala Jaya, RT 04, RW 01, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
34	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Desa Lada Mandala Jaya, RT 04, RW 01, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
35	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Camar 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 04, RW 01, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
36	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Camar 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 07, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
37	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Parkit 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 05, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data dukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
38	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Parkit 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 07, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
39	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Sriti 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 05, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
40	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Sriti 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 07, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
41	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Beo 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 05, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
42	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Beo 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 09, RW 02, Dusun I, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
43	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. PrenjakDesa Lada Mandala Jaya, RT 21, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
44	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. PelajarDesa Lada Mandala Jaya, RT 24, RW 03, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
45	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. ElangDesa Lada Mandala Jaya, RT 21, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
46	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. BeringinDesa Lada Mandala Jaya, RT 24, RW 03, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
47	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Nuri Desa Lada Mandala Jaya, RT 22, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
48	HERI SANTOSO, ST	Peningkatan jalan	Jl. Perkutut 1 Desa Lada Mandala Jaya, RT 23, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
49	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Perkutut 2 (Pasar) Desa Lada Mandala Jaya, RT 24, RW 03, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
50	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Podang 1 Desa Lada Mandala Jaya, RT 23, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
51	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Podang 2 Desa Lada Mandala Jaya, RT 13, RW 06, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
52	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Kutilang 1 Desa Lada Mandala Jaya, RT 20, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
53	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Kutilang 2 Desa Lada Mandala Jaya, RT 13, RW 06, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
54	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Jalak 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 20, RW 05, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
55	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Jalak 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 13, RW 06, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
56	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Merpati 1Desa Lada Mandala Jaya, RT 16, RW 04, Dusun III, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
57	HERI SANTOSO, ST	peningkatan jalan	Jl. Merpati 2Desa Lada Mandala Jaya, RT 15, RW 06, Dusun II, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
58	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi	Kelompok Tani Sri Agung Desa Lada Mandala Jaya RT. 1, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
59	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi	Kelompok tani Maju MakmurDesa Lada Mandala Jaya RT. 2, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
60	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi	Kelompok tani Tri LaksonoDesa Lada Mandala Jaya RT. 3, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
61	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Rukun JayaDesa Lada Mandala Jaya RT. 4, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
62	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Margo MulyoDesa Lada Mandala Jaya RT. 5, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
63	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Tri SaktiDesa Lada Mandala Jaya RT. 6, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
64	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Sido MulyoDesa Lada Mandala Jaya RT. 7, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
65	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Sido MajuDesa Lada Mandala Jaya RT. 8, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
66	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Sido MakmurDesa Lada Mandala Jaya RT. 9, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
67	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Tunggul JayaDesa Lada Mandala Jaya RT. 10, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
68	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Tunas JayaDesa Lada Mandala Jaya RT. 11, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
69	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Harapan JayaDesa Lada Mandala Jaya RT. 12, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
70	HERI SANTOSO, ST	Kelompok tani Tani MakmurDesa Lada Mandala Jaya RT. 13	Kelompok tani Tani MakmurDesa Lada Mandala Jaya RT. 13, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	300.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
71	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Tani MajuDesa Lada Mandala Jaya RT. 14, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
72	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Bangun KaryoDesa Lada Mandala Jaya RT. 15, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
73	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Jaya BaktiDesa Lada Mandala Jaya RT. 16, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
74	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Pantun Tani MajuDesa Lada Mandala Jaya RT. 17, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
75	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Karya UsahaDesa Lada Mandala Jaya RT. 18, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
76	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Usaha TaniDesa Lada Mandala Jaya RT. 19, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
77	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Kidang KenconoDesa Lada Mandala Jaya RT. 20, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
78	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Sawung GalingDesa Lada Mandala Jaya RT. 21, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
79	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Mugi MakmurDesa Lada Mandala Jaya RT. 22, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
80	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Sido MakmurDesa Lada Mandala Jaya RT. 23, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
81	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Putra MandalaDesa Lada Mandala Jaya RT. 24, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
82	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Sidodadi BDesa Persiapan Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
83	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Karya Tunggal ADesa Persiapan Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
84	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Karya Tunggal BDesa Persiapan Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
85	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Margo MulyoDesa Persiapan Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
86	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Harapan Desa Persiapan Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
87	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Tunggal JayaDesa Persiapan Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
88	HERI SANTOSO, ST	ternak Sapi□	Kelompok tani Bantul BaruDesa Persiapan Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
89	HERI SANTOSO, ST	Sound Sistem dan Alat Musik	PAGUYUBAN LAMAJA PUTRADesa Lada Mandala Jaya, RT 17, RW 04 Kec. Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	Akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	200.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
90	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Masjid Roudlotul	Masjid Roudlotul , PANGKALAN DURINHuda SUKARMANTO08 21-4153-9511, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
91	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Masjid Nurul Hidayah	SUNGAI RANGIT JAYA Masjid Nurul Hidayah, Khumaidi (081545085687) , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
92	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Masjid BAITUR ROHIM	SUMBER AGUNG, Masjid BAITUR ROHIM, M. SALAMAUN(082156934964), Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
93	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi MASJID BAITUL MU'MIN	SUNGAI MELAWEN, MASJID BAITUL MU'MIN, DWI WIDODO (082256333413) , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
94	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Masjid Al-Falah	PURBASARI, Masjid Al-Falah, Arkham(085249057721) , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
95	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Masjid Al-Iftah	PURBASARI ; Masjid Al-Iftah, Warsito(082158300511), Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
96	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Masjid An Nur:	PERSIAPAN PANGKALAN LADA, Masjid An Nur: Ahmad Bakri0895306458 29, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
97	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Musholla At Taqwa	PERSIAPAN PANGKALAN LAD,A Musholla At Taqwa, Sugito085643351 335 , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
98	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Musholla Al Mu'min	PERSIAPAN PANGKALAN LADA; Musholla Al Mu'min Surya Budi Utama081328770 348, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
99	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Masjid Al Istiqomah	KADIPI ATAS, Masjid Al Istiqomah SUGYANTO0853 49944325 , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
100	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Masjid Al Mukminun	LADA MANDALA JAYA, Masjid Al Mukminun Moh Nohtoha, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
101	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Masjid Al Amin□	LADA MANDALA JAYA,Masjid Al Amin□ Samuji, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
102	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Mushola Al Khoiriyah□	LADA MANDALA JAYA,Mushola Al Khoiriyah□ Ali Nurdin , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
103	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Mushola Al Ikhlas□	LADA MANDALA JAYA, Mushola Al Ikhlas□ Nino Poniran, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
104	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Mushola Miftahul Jannah□	LADA MANDALA JAYA, Mushola Miftahul Jannah,□ Mujayin, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
105	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Mushola Al Barokah□	LADA MANDALA JAYAMushola Al Barokah□ Tohat, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
106	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Mushola Nurul Iman	LADA MANDALA JAYA, Mushola Nurul Iman Giaman, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
107	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Mushola Al Azhar	LADA MANDALA JAYA, Mushola Al Azhar Misngad, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
108	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Mushola Al-Hidayah	LADA MANDALA JAYA, Mushola Al-Hidayah, Naryanto, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
109	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Gereja Bethel Indonesia	LADA MANDALA JAYA, Gereja Bethel Indonesia, Yohanes Luther M., Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
110	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi MASJID DARUSSALAM	MAKARTI JAYAMASJID DARUSSALAM SEPTIYO HARI WAHYONO08125 167193, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
111	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi DARUL MUTTAQIN	PANGKALAN DEWA, DARUL MUTTAQIN RT 16 RW04, □ ABDUL GOPUR,0813-4939-2268 , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
112	HERI SANTOSO, ST	Rehabilitasi Masjid BAITUL A'LA □	PANGKALAN TIGA, Masjid BAITUL A'LA, □ NUR KHOLIS0858-4569-2953, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	1	-	-
113	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Jalan dan jembatan kewenangan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi ke Kabupaten Gunung Mas sebagian besar masih dalam kondisi rusak sehingga sering menimbulkan antrian dan memperpanjang waktu tempuh, sehingga memerlukan penanganan perbaikan sesegera mungkin	Jalan Lintas Palangka Raya ke Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Km	20.000.000.000	Rekonstruksi Jalan
114	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Adanya aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dan agama terkait permohonan pembangunan maupun rehabilitasi rumah ibadah seperti Masjid, Mushola, Gereja, Balai Hindu dan sebagainya	Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	Kegiatan	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
115	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Keagamaan, Kelembagaan dan Organisasi KemasyarakatanA danya aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dan agama terkait permohonan pembangunan maupun rehabilitasi rumah ibadah seperti Masjid, Mushola, Gereja, Balai Hindu dan sebagainya	Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	Kegiatan	-	-
116	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Keagamaan, Kelembagaan dan Organisasi KemasyarakatanA danya aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dan agama terkait permohonan pembangunan maupun rehabilitasi rumah ibadah seperti Masjid, Mushola, Gereja, Balai Hindu dan sebagainya	Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	Kegiatan	-	-
117	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Minimnya peralatan evakuasi masyarakat terdampak bencana berupa motor boat di daerah rawan bencana	Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Unit	500.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
118	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Minimnya bantuan permodalan bagi komunitas pemuda dan pembinaan kepemudaan di bidang perekonomian	Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	Tidak sesuai kewenangan, Permodalan usaha ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1	Kegiatan	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
119	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Minimnya bantuan bibit dan pupuk bagi gabungan maupun kelompok tani di daerah	Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	250.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
120	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Minimnya bantuan bibit dan pupuk bagi gabungan maupun kelompok tani di daerah	Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	250.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
121	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Minimnya bantuan bibit dan pupuk bagi gabungan maupun kelompok tani di daerah	Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	250.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
122	WIYATNO., S.P	Alih fungsi lahan pertanian tradisional/rakyat menjadi perkebun	jl. diponegoro, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomdir dan anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Ha	10.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anak-anak

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
123	FAJAR HARIADY	UNIT SEKOLAH BARU SMA KARENA JARAK TEMPUH DENGAN SEKOLAH TERLAMPAU JAUH DENGAN SISTEM ZONASI BANYAK CALON SISWA TIDAK DI TERIMA DI SEKOLAH NEGERI YANG TERKONSENTRASI DI KOTA SAMPIT	DESA BENGKUANG MAKMUR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	1. Lengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Terkait usulan USB akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kemampuan dan sumber dana. Dan tentunya dengan terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan	1	UNIT	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
124	HERI SANTOSO, ST	Ternak Sapi	Kelompok Tani HARAPAN MAKMUR Desa : Berambai Makmur Kec : Pangkalan Banteng, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
125	FAJAR HARIADY	HIBAH LPM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK LENTERA KARTINI SAMPIT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	SAMPIT, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ditolak	Belum direkomendasikan karena bukan merupakan kewenangan dan tugas fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Belum direkomendasikan untuk Tahun 2025, Hibah Kabupaten/Kota belum merupakan kewenangan Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng	-	1	Unit	-	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
126	FAJAR HARIADY	PENINGKATAN JALAN PEMUKIMAN DESA BENGKUANG MAKMUR INDUK KE DESA BENGKUANG MAKMUR BAWAH-DINAS PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN	KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	UNIT	-	-
127	FAJAR HARIADY	SIRING, DRAINASE, SARANA PRASARANA PERTANIAN JALAN LABORATORIUM PHP SAMPIT	DESA BAPEANG KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	350.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
128	Hj. MARYANI SABRAN	pemeliharaan saluran induk pengendali banjir pangkalan bun - kotawaringin lama, mendawai seberang, Kec Arut Selatan	Mendawai Sebreang, kecamatan Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Bukan Kewenangan Provinsi	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Bukan Kewenangan Provinsi	-	25	km	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
129	Hj. MARYANI SABRAN	Perlunya bantuan bibit ternak, Sapi, Kambing, Babi dan Unggas	Untuk masyarakat Peternak di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	300.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
130	H. SUDARSONO	Perlu bantuan hibah hand tracktor untuk petani, di Kabupaten Kotim dan Seruyan	Kotawaringin Timur, Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	20	unit	400.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
131	H. SUDARSONO	Perlu bantuan kolam iksn biofloc untuk masyarakat	Pembuang Hulu Kecamatan Hanau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomdir, agar melengkapi data dukung dan spesifik/mendetail	4	Buah	30.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
132	H. SUDARSONO	Perlunya bantuan bibit ternak kambing untuk masyarakat	kecamatan seruyan hilir timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik),serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	200	ekor	250.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
133	H. SUDARSONO	Perlunya bantuan bibit ternak kambing untuk masyarakat	Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	200	Ekor	250.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
134	Hj. MARYANI SABRAN	Perlu bantuan mesin pengolahan es batu kristal dan kelengkapannya (frezer, mesin RO, Tandon dan lain-lain) untuk masyarakat pelaku industri kecil	Jl, Mahir Mahar, Rajawali Ujung, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomodir dengan melengkapi data dukung (proposal, data penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	Paket	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
135	H. ACHMAD RASYID	Bantuan permesinan industri kecil untuk masyarakat	Buntok, Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	lengkapi data dukung : e proposal	10	unit	20.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
136	H. ACHMAD RASYID	Perlu bantuan pengadaan kolam dan keramba untuk masyarakat pembudidaya ikan	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, agar melengkapi data dukung dan spesifik/mendetail	20	paket	20.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
137	H. ACHMAD RASYID	Perlu bantuan sarana prasarana perbengkelan mesin	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	Paket	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
138	HERI SANTOSO, ST	Ternak Sapi	Poktan jaya mandiri Ds. Pangkalan durin kab, kotawaringin barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
139	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Masih banyak kelompok peternak membutuhkan bantuan bibit ternak sapi, kambing, kerbau dan babi beserta infrastrukturnya	Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	300.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
140	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Masih banyak kelompok peternak membutuhkan bantuan bibit ternak sapi, kambing, kerbau dan babi beserta infrastrukturnya	Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	300.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
141	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Masih banyak kelompok peternak membutuhkan bantuan bibit ternak sapi, kambing, kerbau dan babi beserta infrastrukturnya	Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	300.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
142	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Perlunya pemberdayaan komunitas adat di daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan adat, agar masyarakat adat dapat memiliki inovasi dalam promosi kebudayaan dan khas daerah serta pengembangan perkebunan wisata (pelatihan peningkatan kompetensi komunitas adat) sehingga usaha yang dilakukan masyarakat adat tidak hanya bergantung kepada hasil hutan	Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	Merupakan kewenangan Kabupaten	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	200.000.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
143	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Perlunya peningkatan sarana dan prasarana SMA Negeri 1 Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas	Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran, lengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomdir pada sub kegiatannya masing2.	1	kegiatan	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
144	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Masih rendahnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat di daerah	Kecamatan Manuhing Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria, DED, Peta Jaringan Air serta RISPAM Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	1.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
145	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Perlunya peningkatan jalan keweangan provinsi yang menghubungkan Tumbang Tukau dan Tumbang Samba sepanjang 130 km	Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	kegiatan	-	-
146	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Masih banyak program pertanian masyarakat terkendala minimnya tenaga teknis, permodalan dan infrastruktur pertanian seperti jembatan gantung yang menghubungkan beberapa desa menjadi kendala pemasaran hasil pertanian	Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	1	kegiatan	-	-
147	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Minimnya ketersediaan alat dan mesin pertanian bagi kelompok tani di daerah	Desa Bangun Sari, Kecamatan Manuhing, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	350.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
148	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Masih banyak program pertanian masyarakat terkendala minimnya tenaga teknis, permodalan dan infrastruktur pertanian seperti jembatan gantung yang menghubungkan beberapa desa menjadi kendala pemasaran hasil pertanian	Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	300.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
149	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Minimnya Apresiasi dan penghargaan bagi atlet penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah	Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Dalam bentuk hibah ke NPC Kalteng	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	tahun	300.000.000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
150	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan	Kecamatan Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomdir, agar melengkapi data dukung dan spesifik/mendetail	1	kegiatan	15.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
151	FERRY KHAIDIR	Akses Jalan Desa Cempaka Baru Rusak Parah sehingga butuh peningkatan agar dapat lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan maupun peningkatan ekonomi	Desa Cempaka Baru, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengka\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	12	KM	-	-
152	WIYATNO., S.P	rehabilitasi saluran	kecamatan pandih batu, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	dialihkan	-	-	Paket	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
153	WIYATNO., S.P	rehabilitasi saluran	kecamatan maliku, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	dialihkan	-	-	Paket	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
154	WIYATNO., S.P	rehabilitasi saluran	kecamatan tamban catur, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	dialihkan	-	-	Paket	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
155	WIYATNO., S.P	peningkatan jalan menuju pemakaman	kecamatan basarang, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	2,5E+09	Rupiah	-	-
156	WIYATNO., S.P	peningkatan jalan	desa mulyasari kecamatan pandih batu, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	5E+09	Rupiah	-	-
157	WIYATNO., S.P	rehabilitasi saluran	kecamatan mantangai, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	dialihkan	-	-	Paket	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
158	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Hibah untuk PMI Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan	Dikembalikan	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	-	1	kegiatan	-	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
159	Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE	Perlunya bantuan dana hibah untuk melanjutkan pembangunan renovasi atap Masjid AL-ABROR	Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	Kegiatan	-	-
160	Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE	Perlunya penyelesaian pembangunan gedung kantor SMA Negeri 3 Muara Teweh	Jl. Nusa Indah No. 7 Desa Trahean, Kecamatan Teweh Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan sumber dana yang tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
161	Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE	Perlunya revitalisasi objek diduga/cagar budaya dalam rangka pelestarian dan pemajuan kebudayaan	Desa Nihan Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Belum merupakan sasaran prioritas di TA 2025	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	200.000.000	Pelindungan Cagar Budaya
162	Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE	Bantuan Dana Hibah untuk Yayasan Azzahra Nugraha	Jl. Pendreh No 07 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Tewehe Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	Kegiatan	-	-
163	Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE	Lanjutan pembangunan jembatan gantung untuk keperluan warga lintas desa dan kecamatan	Desa Nihan Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	Kegiatan	-	-
164	Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE	Perlunya bantuan dana hibah untuk Yayasan Insan Cendikia guna pembangunan ruang belajar santri Pondok Pesantren Imam Asy-Syafi'i	Kelurahan Lanjas, Kecamatan Tewehe Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	Kegiatan	-	-
165	Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE	Perlu bantuan operasional penyelenggara DAK satuan PAUD "SETIA" PAUD Anak Bekebutuhan Khusus	Jl. A. Yani RT 16B No. 117 Muara Tewehe, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	dapat diusulkan sebagai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana sekolah	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2.	1	Kegiatan	150.000.000	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
166	Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE	Bantuan Dana Hibah untuk Renovasi Total Gedung Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Kandui	Jl. Janit RT 1 Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	Kegiatan	-	-
167	Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE	Pembangunan Pagar Sekolah SLB Negeri 1 Muara Teweh	Jl. Panti Ajar V, Kelurahan Lanjas, Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	400.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
168	Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE	Bantuan Hibah untuk Renovasi Bangunan Pasar Desa Trahean	Desa Trahean, Kecamatan Teweh Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	berdasarkan UU 23 Tahun 2014, terkait pembangunan dan pengelolaan pasar menjadi kewenangan kabupaten/kota, bukan kewenangan provinsi.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	Kegiatan	-	-
169	Hj. SRI NENI TRIANAWATI, SE	Bantuan Dana Hibah untuk Komunitas Rombongan Seni Reog Ponorogo KRIDA BUDAYA Desa Trahean	Desa Trahean, Kecamatan Teweh Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	Akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	200.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
170	HENRY, SE, MH	Pembangunan Kandang ayam Petelur	kecamatan murung , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	300.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
171	HENRY, SE, MH	Pembangunan Kandang ayam Petelur	kecamatan laung Tujuh, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	300.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
172	HENRY, SE, MH	Pembangunan Kandang ayam Buras	kecamatan laung tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	300.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
173	HENRY, SE, MH	Pengadaan Pakan Ayam Buras	murung raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
174	Drs. DUWEL RAWING	Pembangunan Unit sekolah baru SMK di Desa Hampalam kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan	Desa Hampalam kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan pembangunan sekolah baru memerlukan studi kelayakan atau kajian, ketersediaan lahan serta status lahan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan	1	PAKET	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
175	Drs. DUWEL RAWING	Pembangun SMK baru di Desa tbg Dakei, kec. Marikit Kab. Katingan	Desa tbg Dakei, kec. Marikit Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan pembangunan sekolah baru memerlukan studi kelayakan atau kajian, ketersediaan lahan serta status lahan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan. USB SMK agar jurusannya memperhatikan potensi lapangan pekerjaan agar link n match	1	PAKET	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
176	Drs. DUWEL RAWING	Usulan pendirian Unit Sekolah Baru SMK baru di Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan	Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan pembangunan sekolah baru memerlukan studi kelayakan atau kajian, ketersediaan lahan serta status lahan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan. USB SMK agar jurusannya memperhatikan potensi lapangan pekerjaan agar link n match	1	PAKET	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
177	Drs. DUWEL RAWING	pembangunan bak penampungan air bersih dan pipa untuk distribusi ke rumah masyarakat	Kelurahan Tehang, ibukota kec. Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas, KAB. GUNUNG MAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria, DED, Peta Jaringan Air serta RISPAM Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	1.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
178	Drs. DUWEL RAWING	"Akses angkutan hasil produksi sawit (CPO) untuk 8 PBS di Kab Gunung Mas menuju Pelabuhan Kereng Pakahi (Kab. Katingan) atau Pelabuhan Bagendang (Kab. Kotim) Jarak tempuh ± 150Km" (Jalan lintas kabupaten antara Desa Bereng Jun/UPT SP 4 (Kab Gunung Mas) Menuju Desa Tewang Rangkang (Kab. Katingan), KAB. KATINGAN), Provinsi Kalimantan Tengah	(Jalan lintas kabupaten antara Desa Bereng Jun/UPT SP 4 (Kab Gunung Mas) Menuju Desa Tewang Rangkang (Kab. Katingan), KAB. KATINGAN), Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	Lengkapi data dukung	Infrastruktur Jalan Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	-	1	PAKET	-	Rekonstruksi Jalan
179	Drs. DUWEL RAWING	"Rehabilitasi jalan Kabupaten dari Tbg Lahang-Tbg Samba-Tbg Kaman"	Tbg Lahang-Tbg Samba-Tbg Kaman, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
180	HENRY, SE, MH	Pengadaan pakan Ayam Petelur	murung raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
181	HENRY, SE, MH	Pengadaan Bibit Ayam Buras	kecamatan murung, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
182	Drs. DUWEL RAWING	"Jalan lintas Kabupaten antara Desa Penda Tanggaring (Kab.Katingan) Menuju Desa Tbg Gagu (Kab. Kotim) ±7 Km sebagai Akses jalan menuju situs cagar budaya/objek wisata Betang Antang Kalang"	Desa Penda Tanggaring (Kab.Katingan) Menuju Desa Tbg Gagu (Kab. Kotim) , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
183	Drs. DUWEL RAWING	Pemasangan jaringan dan distribusi PLN dari Tbg Talaken-Kelurahan Tehang (Kec. Manuhing Raya)	Tbg Talaken-Kelurahan Tehang (Kec. Manuhing Raya) , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ditolak	pembangunan/per luasan jaringan listrik JTR JTM kewenangan PLN	disetujui	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	1	PAKET	-	-
184	Drs. DUWEL RAWING	Pemasangan Jaringan listrik PLN dari desa Telangkah menuju Desa Tewang Baringin, Hampalam, Tewang Rangas dan Bangkuang	desa Telangkah menuju Desa Tewang Baringin, Hampalam, Tewang Rangas dan Bangkuang. Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ditolak	pembangunan/per luasan jaringan listrik JTR JTM kewenangan PLN	disetujui	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	1	PAKET	-	-
185	Drs. DUWEL RAWING	Rehabilitasi jalan Kabupaten di Desa Tbg Lahang-Tbg Samba-Tbg Kaman	Desa Tbg Lahang-Tbg Samba-Tbg Kaman , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Bukan Kewenangan Disperkimtan	-	-	PAKET	-	Pembangunan Jalan
186	Drs. DUWEL RAWING	Pembangunan Jembatan penghubung diatas sungai Hiran, penghubung desa Tbg Hiran dan Desa Rangan surai	desa Tbg Hiran dan Desa Rangan surai, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
187	Drs. DUWEL RAWING	Pembangunan Rice Milling Unit dapat meningkatkan Ketahanan Pangan Mendukung Program Ketahanan Pangan Kab. Gunung Mas dengan 4 lokasi (Tbg Miri, Tewah, Gohong rawai, hambuyung) sebagai penunjang Teknis dan memacu minat masyarakat untuk berladang	Tbg Miri, Tewah, Gohong rawai, hambuyung), Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	500.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
188	Drs. DUWEL RAWING	Bantuan hibah pembangunan rumah ibadah Balai Kaharingan di Rabambang Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas. Anggaran	Balai Kaharingan di Rabambang Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
189	Drs. DUWEL RAWING	Bantuan hibah pembangunan rumah ibadah Gereja Shinta di Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas. Anggaran Rp.200jt	Gereja Shinta di Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
190	Drs. DUWEL RAWING	Bantuan hibah pembangunan rumah ibadah Masjid di Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas. Anggaran Rp.25jt	Masjid di Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas., Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
191	Drs. DUWEL RAWING	Bantuan pembangunan rumah ibadah/Gereja GKE Tbg Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan. Anggaran Rp.150jt	Gereja GKE Tbg Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
192	Drs. DUWEL RAWING	Dalam upaya mendukung kegiatan perekonomian masyarakat, perlu upaya Peningkatan jalan usaha tani untuk membantu aktifitas usaha tani yang dikelola kelompok tani di Desa Dahian Tunggal, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan. Sepanjang 5 Km.	Desa Dahian Tunggal, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
193	Drs. DUWEL RAWING	Peningkatan Jaringan Listrik PLN Tbg Samba - Tbg Hiran-Tbg Sanamang	Tbg Samba -Tbg Hiran-Tbg Sanamang, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ditolak	pembangunan/perluasan jaringan listrik JTR JTM kewenangan PLN	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	1	paket	-	-
194	H. SUHARDI, S.Ag	Rehab total Pembangunan SMA NU Palangka Raya	SMA NU Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan akan ditindak lanjuti sesuai kemampuan anggaran, lengkap proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	375.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
195	H. SUHARDI, S.Ag	Lanjutan Pembangunan Masjid Al-Hayanah, Palangka Raya	Masjid Al-Hayanah, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
196	H. SUHARDI, S.Ag	Pembangunan serana dan prasarana Pendidikan di yayasan Alma'arif NU Palangka Raya	yayasan Alma'arif NU Palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	usulan akan ditindak lanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia/ akan lebih relevan usulan disampaikan ke Biro kesra	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	PAKET	350.000.000	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
197	HENRY, SE, MH	Pengadaan Bibit Ayam Petelur	mura, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
198	HENRY, SE, MH	Pembangunan Jalan Perkebunan	mura, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	Dikembalikan	1. Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan	disetujui	Lengkapi data dukung	Infrastruktur Jalan Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	-	500	juta	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
199	HENRY, SE, MH	Jalan Usaha Tani Kota Palangka Raya	palangka, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
200	HENRY, SE, MH	Jalan Usaha Tani kabupaten Murung Raya	mura, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	500	juta	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
201	HENRY, SE, MH	Pengadaan Alat Exavator Mini (Unit) Kab. Murung Raya	mura, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1,2	milyard	1.200.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
202	HENRY, SE, MH	Hibah pengadaan 1 unit mobil pick up roda empat utk gereja GKE elioteria kabupaten murung raya	, kec. Murung, kelurahan beriwit, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	UNIT	-	-
203	HENRY, SE, MH	hibah pengadaan satu unit mobil operasional roda empat utk yayasan pendidikan filia gracia kab. Murung raya	yayasan pendidikan filia gracia kec. Murung, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	UNIT	-	-
204	Ir. ARTABAN, MH	Peningkatan Jalan Denok Kota Palangka Raya	kelurahan menteng, kecamatan jekan raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
205	INA PRAYAWATI	Pembangunan Ruang Kantor Kepala Sekolah SMKN 2 BATAGUH Kapuas, Rp 900.000.000	SMKN 2 BATAGUH Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	RUANG	900.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
206	INA PRAYAWATI	Rehabilitasi Ruang Kelas SMKN 2 BATAGUH Kapuas 2 Ruang, Rp 700.000.000	SMKN 2 BATAGUH Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	RUANG	700.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
207	INA PRAYAWATI	Penataan dan Penimbunan Halaman Sekolah SMKN 1 KAPUAS MURUNG Kapuas 1 Paket Rp 900.000.000	SMKN 1 KAPUAS MURUNG, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	PAKET	900.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
208	INA PRAYAWATI	Pembangunan Pagar Sekolah SMKN 1 KAPUAS KUALA Kapuas 1 Paket Rp 500.000.000	SMKN 1 KAPUAS KUALA , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	PAKET	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
209	INA PRAYAWATI	Pembangunan Toilet dan sanitasi SMKN 1 PULANG PISAU, Pulang Pisau 2 Ruang Rp 250.000.000	SMKN 1 PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	RUANG	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
210	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Jembatan kewenangan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi ke Kabupaten Gunung Mas sebagian besar masih dalam kondisi rusak sehingga sering menimbulkan antrian dan memperpanjang waktu tempuh, sehingga memerlukan penanganan perbaikan sesegera mungkin	Jalan Lintas Palangka Raya ke Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	Kegiatan	-	-
211	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Pentingnya kesetaraan dan keseluruhan pencapaian dalam berbagai aspek literasi.	Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	1. lengkapi data dukung 2. menyesuaikan anggaran dan kewenangan	usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2.	1	Kegiatan	5.000.000.000	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
212	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Penyediaan pelatihan intensif dan bimbingan bagi para guru. Melalui kolaborasi antar guru, baik dalam bentuk forum diskusi atau program sharing best practice, akan memungkinkan pertukaran pengalaman dan pengalaman	Kalteng, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	1. lengkapi data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2.	1	Kegiatan	500.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
213	INA PRAYAWATI	Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman SMKN 1 PULANG PISAU, Pulang	SMKN 1 PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	paket	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
214	INA PRAYAWATI	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 5 PALANGKA RAYA	SMKN 5 PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	ruang	500.000.000	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik
215	INA PRAYAWATI	Pembangunan Pagar Sekolah SMKN 1 KUALA KURUN, Gunung Mas	SMKN 1 KUALA KURUN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	paket	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
216	JAINUDIN KARIM, SE	Lanjutan peningkatan Jalan Rambutan dan sekitarnya Jl. Rambutan, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah Rp 1,450,000,000	Jl. Rambutan, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
217	JAINUDIN KARIM, SE	Peningkatan Jalan Martapura 2 dan sekitarnya Kel. Baamang Hilir, Kec. Baaamang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah Rp 400,000,000	Jalan Martapura 2 Kel. Baamang Hilir, Kec. Baaamang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
218	JAINUDIN KARIM, SE	Lanjutan peningkatan Jalan Desa Luwuk Ranggan Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Kab. Kotim Rp 300,000,000	Jalan Desa Luwuk Ranggan Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
219	JAINUDIN KARIM, SE	Peningkatan Jalan Barito Jl. Barito, Kel. Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa baru Ketapang, Kab. Kotim Rp 300,000,000	Jl. Barito, Kel. Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa baru Ketapang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
220	JAINUDIN KARIM, SE	Lanjutan Peningkatan Jalan Teratai 5, Jalur 5 Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Rp 200,000,000	Jalan Teratai 5, Jalur 5 Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
221	JAINUDIN KARIM, SE	Peningkatan Jalan Garuda No 2 menuju Padepokan PSHT Pimpinan Dr Sigit Kel. Kelampangan, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya Rp 200,000,000	Jalan Garuda No 2, Kel. Kelampangan, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data-data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
222	JAINUDIN KARIM, SE	Pengadaan alat Mesin Sablon dan Mesin Cetak Serta Komputer Lengkap untuk Kelompok SUKSES di Kotim Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Rp 400,000,000	untuk Kelompok SUKSES di Kotim Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	Tidak sesuai kewenangan, diarahkan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1	PAKET	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
223	JAINUDIN KARIM, SE	Pengadaan Alat Cetak Batako Lengkap untuk Kelompok di Kotim Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Rp 150,000,000	untuk Kelompok di Kotim Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Tidak sesuai kewenangan, diarahkan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1	PAKET	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
224	JAINUDIN KARIM, SE	Pengadaan Ayam Pulet Petelur dan Obat-obatan untuk Kelompok Ternak di Kotim Kabupaten Kotim Rp 400,000,000	Kelompok Ternak di Kotim Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	400.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
225	JAINUDIN KARIM, SE	Pengadaan Sapi untuk Kelompok Ternak di Kotim Kabupaten Kotim Rp 300,000,000	Kelompok Ternak di Kotim Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	300.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
226	JAINUDIN KARIM, SE	Pengadaan Bibit Jahe Merah, Pupuk, Obat-obatan, dan Pengolahan Lahan untuk Kelompok Tani di Desa Karang Tunggal, Kec. Parenggean, Kab. Kotim Rp 400,000,000	Kelompok Tani di Desa Karang Tunggal, Kec. Parenggean, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	400.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
227	JAINUDIN KARIM, SE	Pengadaan Bibit Ikan Patin, Gurami, Bawal, Pakan, obat-obatan untuk Kelompok Perikanan Pokdakan Bawo Jawehan dan Pokdakan Geronggang Batuah Kec. MB Ketapang Kab. Kotim Kel. MB Hilir dan Kel. Pasir Putih Kec. MB Ketapang, Kab. Kotim Rp 200,000,000	Kelompok Perikanan Pokdakan Bawo Jawehan dan Pokdakan Geronggang Batuah Kec. MB Ketapang Kab. Kotim Kel. MB Hilir dan Kel. Pasir Putih Kec. MB Ketapang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir dan anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	PAKET	40.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
228	JAINUDIN KARIM, SE	Hibah Dana untuk Pesantren Ma'had Islam Tarbiyatu Sibyan Jl. Bumi Ayu Barat, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah Rp 50,000,000	Pesantren Ma'had Islam Tarbiyatu Sibyan Jl. Bumi Ayu Barat, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
229	JAINUDIN KARIM, SE	Hibah Dana untuk Pesantren Telaga Kautsar Desa Telaga Baru, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah Rp 50,000,000	Pesantren Telaga Kautsar Desa Telaga Baru, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
230	JAINUDIN KARIM, SE	Hibah Dana untuk Pesantren Nurul Hidayah Sabilillah Jl. Kenan Sandan, Gg Nurul Hidayah, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah Rp 100,000,000	Pesantren Nurul Hidayah Sabilillah Jl. Kenan Sandan, Gg Nurul Hidayah, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
231	JAINUDIN KARIM, SE	Hibah Dana untuk Masjid Jami Babusalam Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Kab. Kotim Rp 100,000,000	Masjid Jami Babusalam Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
232	SENGKON, SE	sulitnya para petani menuju lokasi tanah garapan	tumbang miwan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
233	SENGKON, SE	sulitnya para petani menuju lokasi tanah garapan	katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
234	SENGKON, SE	DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA TEWANG MANYANGEN RP.200.000.000	Desa Tawang Manyangen, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	-	-	1	paket	-	-
235	SENGKON, SE	DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA GERAGU, TUMBANG TUNGKU, KATINGAN RP.220.000.000	Desa Geragu Tumbang Tungku Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	-	-	1	paket	-	-
236	SENGKON, SE	DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA TEWANG GERAGU-TEWANG PAJARI, KATINGAN RP.220.000.000	Desa Tawang Derayu-Tewang Pajari, Kab Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	-	-	1	paket	-	-
237	SENGKON, SE	Sulitnya masyarakat memperoleh bibit untuk dikembangkan biakkan	Desa Tawang Menyangen, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	100.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
238	SENGKON, SE	sulitnya memenuhi air minum yang layak di desa samba danum	desa samba danum, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria, DED, Peta Jaringan Air serta RISPAM Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	1.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
239	NATALIA, ST	Bantuan bibit sapi untuk Kelompok Tani di Kab. Katingan Rp 200,000,000	Kelompok Tani di Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
240	NATALIA, ST	Bantuan bibit sapi untuk Kelompok Tani di Palangka Raya Rp 200,000,000	Kelompok Tani di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
241	NATALIA, ST	Bantuan 1 Set alat percetakan digital (Komputer, mesin printing, tinta, dll) untuk kelompok di Palangka Raya Rp 400,000,000	PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	usulan diakomdir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	PAKET	40.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
242	NATALIA, ST	Bantuan mesin obras untuk kelompok di Palangka Raya Rp 200,000,000	Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomdir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e Proposal	1	PAKET	6.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
243	NATALIA, ST	Bantuan mesin jahit untuk kelompok di Palangka Raya (Disperindag) Rp 200,000,000	Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomdir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e Proposal	1	PAKET	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
244	NATALIA, ST	Bantuan Vacum Sealer untuk kelompok di Palangka Raya (Disperindag) Rp 200,000,000	PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomdir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	PAKET	5.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
245	NATALIA, ST	Bantuan 2 set mesin kopi untuk kelompok di Palangka Raya (Disperindag) Rp 150,000,000	PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	2	PAKET	20.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
246	NATALIA, ST	Bantuan bibit babi untuk Kelompok Tani di Kab. Katingan Rp 200,000,000	KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
247	NATALIA, ST	Bantuan bibit babi untuk Kelompok Tani di Palangka Raya Rp 200,000,000	Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
248	NATALIA, ST	Bantuan alat pertukangan untuk kelompok di Palangka Raya (Disperindag) Rp 200,000,000	Palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	PAKET	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
249	NATALIA, ST	Bantuan bibit untuk gereja Efrata di desa Batu Badinding, Kab. Katingan (Kesra) Rp 150,000,000	desa Batu Badinding, Kab. Katingan , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	100.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
250	NATALIA, ST	Bantuan hibah untuk yayasan Al-Datih Darul Ilmi Palangka Raya (Kesra) Rp 100,000,000	Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
251	NATALIA, ST	Bantuan hibah untuk TPQ Al-Quran Raudhatul Quran desa Petak Bahandang Kab. Katingan (Kesra) Rp 100,000,000	desa Petak Bahandang Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
252	NATALIA, ST	Hibah untuk DPW KSNB Prov. Kalteng (Disbudpar) Rp 200,000,000	Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	Akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	100.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
253	NATALIA, ST	Pembangunan teater tertutup di Taman Budaya Palangka Raya, Rp 5,000,000,000	palangka raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	10.000.000.000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
254	NATALIA, ST	Bantuan mesin cetak batako untuk kelompok di Palangka Raya (Disperindag) Rp 200,000,000	palangka raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	usulan diakomodir, menyesuaikan anggaran	1	paket	45.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
255	NATALIA, ST	Bantuan untuk perlengkapan Salon Melati di Palangka Raya di Palangka Raya (Disperindag) Rp 150,000,000	PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ditolak	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	-	1	paket	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
256	H. PURMAN JAYA, S.Sos	bantuan pengadaan bibit sawit	barito utara , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir dan anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	10.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anak-anak

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
257	H. PURMAN JAYA, S.Sos	pengadaan bibit jagung	barito utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	100.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
258	H. PURMAN JAYA, S.Sos	peningkatan jalan usaha tani	barito utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
259	H. PURMAN JAYA, S.Sos	peningkatan jalan kelurahan tumpang laung menuju arah palangkaraya	kecamatan montallat, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
260	H. PURMAN JAYA, S.Sos	lanjutan jalan munardi kelurahan tumpang Laung II kecamatan montallat	kelurahan tumpang laung II kecamatan montallat, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
261	H. PURMAN JAYA, S.Sos	pengadaan bibit sapi	barut, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
262	NATALIA, ST	BANTUAN BOX FREEZER UNTUK KELOMPOK DI PALANGKA RAYA	PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomdir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	PAKET	5.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
263	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Peningkatan jalan Lingkungan Handil Alai, Desa Kupang Kec. Bataguh, Kab. Kapuas, Rp.1.000.000.000	Desa Kupang Kec. Bataguh, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
264	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Peningkatan jalan Lingkungan Handil Dumanap, Rp.1000.000.000.	Desa Anjir Serapat Tengah, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
265	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Peningkatan jalan Lingkungan Handil Suarga, Rp.1.000.000.000	Desa Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
266	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Peningkatan jalan Lingkungan/pelebaran Dusun Sampui, Rp.750.000.000	Desa Baranggau, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
267	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Peningkatan Jalan Lingkungan Majelis Talim Asmaul Husna Rp.500.000.000	Desa Anjir Serapat Tengah, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
268	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Pembuatan Turap jalan lingkungan Rp.250.000.000	Desa Sei Hanyu, Kec. Kapuas Hulu, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
269	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Pengadaan alat percetakan terpadu yayasan (14 unit) Rp400.000.000	Jalan Melati No. 13 Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	lengkapi data dukung : e proosal	1	paket	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
270	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Pengadaan gerobak kelompok pedagang kecil 12 bh Rp.75.000.000	Kec. Selat dan Kec Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ditolak	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	-	12	paket	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
271	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Pembangunan Pasar Desa 1 unit Rp1.000.000.000	Desa Kanamit, Kec.Maliku, Kab. Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Ditolak	berdasarkan UU 23 Tahun 2014 pembangunan pasar merupakan kewenangan kabupaten/kota, bukan provinsi. usulan dapat disampaikan ke pemerintah kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.	disetujui	Lengkapi data dukung	-	-	1	paket	-	-
272	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Pengadaan alat cukur rambut 15 unit Rp.90.000.000	Kec. Selat dan Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ditolak	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	-	15	paket	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
273	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Pengadaan alat press cetak batak (1 unit) Rp.100.000.000	Desa Kupang, Kec. Bataguh, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	paket	90.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
274	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Pengadaan benih kecambah sawit untuk yayasan sebanyak 20 rb Rp.25.000.000	Desa Anjir Serapat Tengah, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	paket	10.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
275	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Pengadaan hand Traktor 2 unit Rp.125.000.000	Desa Pulau Kupang, Kec. Bataguh, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	Unit	125.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
276	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Pengadaan power thresher 4 unit Rp.60.000.000	Desa Pulau Kupang, Kec. Bataguh, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	4	Unit	60.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
277	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Pengadaan combine 1 unit Rp.650.000.000	Desa Terusan, Kec. Bataguh, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	650.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
278	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Bantuan Benih bibit sayur, polibag, tanah subur Rp.20.000.000	Kelurahan Selat Tengah, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	20.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
279	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	bantuan hibah untuk yayasan pendidikan Islam Madrasah Darus Inayah (12 Unit) Rp.200.000.000	Desa Anjir Mambulau Timur, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	12	paket	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
280	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Bantuan Hibah Masjid Al Muhajirin Nor Rp150.000.000	Desa Maju Bersama, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
281	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Bantuan Hibah Masjid Nurul Huda Rp.150.000.000	Desa Sei Dusun, Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
282	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Bantuan Hibah Masjid Al Kautshar Rp.200.000.000	Desa Kaladan, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
283	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Bantuan Hibah Masjid Al Qoyyum Rp.50.000.000	Desa Rantau jaya (A5) Kec. Mantangai, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
284	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Bantuan Hibah yayasan Islam Betang Qur'an Rp.100.000.000	Kec. Selat, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
285	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Pengadaan alat olah raga untuk yayasan Islam Betang Qur'an Rp.25.000.000	Kec. Selat, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	Dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	10.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
286	Ir. H. MUHAJIRIN, M.P.	Bantuan Hibah rumah ibadah umat kaharingan Balai Basarah (1 unit) Rp.200.000.000	Desa Sei tatas Kec. Pulau petak Hilir, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
287	H. SUDARSONO	Sulitnya ekonomi masyarakat untuk mendapatkan bibit sapi	seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	1	paket	-	-
288	H. SUDARSONO	minimnya permodalan masyarakat untuk mendapatkan bibit ternak kambing	seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	1	paket	-	-
289	H. SUDARSONO	daya beli masyarakat untuk mendapatkan bibit ternak itik	seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	1	paket	-	-
290	H. SUDARSONO	masyarakat kesulitan untuk sarpras perikanan bioflok	serruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	15.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
291	H. SUDARSONO	mesin ces 6,5 HP membantu mobilitas ,masyarakat perairan	seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	40.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
292	H. SUDARSONO	membantunmasyarakat mmendapatkan bibit ternak sapi	seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	250.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
293	H. SUDARSONO	masyarakat kesulitan mendapatkan bibit buah-buahan	seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	1	paket	-	-
294	H. SUDARSONO	bantuan masyarakat untuk mesin jahit dan mesin obras	seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ditolak	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	-	1	paket	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
295	H. SUDARSONO	bantuan alat cetak batak hidrolik	seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proosal	1	paket	90.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
296	H. SUDARSONO	Mengembangkan usaha pertukangan masyarakat	seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	1	paket	-	-
297	H. SUDARSONO	lingkungan masyarakat belum teraliri listrik untuk usaha kandang ayam	seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	paket	200.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
298	H. SUDARSONO	kondisi Jalan Lingkungan Jl. Grya Prima Pembuang Hulu I Kecamatan Hanau Panjang 300 mtr / Lebar 5 mtr rusak berlubang	Jl. Grya Prima Pembuang Hulu I Kecamatan Hanau , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
299	H. SUDARSONO	perlunya perbaikan RKB SMK Miftahussalam Desa Paren Kec. Danau Sembukuh	desa paren kecamatan danau sembukuh, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	paket	500.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
300	Hj. RUSITA IRMA, S.Pi	Rehab saluran sekunder paduran 3 desa paduran mulya 20km	desa paduran mulya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Bukan Kewenangan Provinsi	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Bukan Kewenangan Provinsi	-	1	PAKET	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
301	Hj. RUSITA IRMA, S.Pi	Rehab saluran tanggul banjir paduran 2 desa sebangau jaya 20 km	desa sebangau jaya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dialihkan	-	-	PAKET	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
302	Hj. RUSITA IRMA, S.Pi	Rehab saluran desa sebangau mulya 10 km	desa sebangau mulya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	dialihkan	-	-	PAKET	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
303	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Lanjutan peningkatan jalan Puruk Cahu - Muara Bumban RP.1.500.000.000	Desa Muara Bumban Kab. Murung Raya , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
304	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Lanjutan peningkatan jalan baru Desa Juking Pajang RP.3.000.000.000	Desa Juking Pajang Kab. Murung Raya , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
305	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan jalan Cendrawasih dalam Kelurahan Puruk Cahu RP.500.000.000	jalan Cendrawasih dalam Kelurahan Puruk Cahu, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
306	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan jalan dalam Kelurahan Puruk Cahu - Muara Sumpoi RP.1.500.000.000	Kelurahan Puruk Cahu - Muara Sumpoi, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
307	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan jalan Veteran dalam Kelurahan Muara Laung I RP.1.000.000.000	jalan Veteran dalam Kelurahan Muara Laung I, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
308	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan cor beton jalan Isran AS 3x1,250 meter Kelurahan Muara Tuhup RP.1.000.000.000	jalan Isran, Kelurahan Muara Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
309	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan jalan dari Jalan Negara menuju Desa Batu Putih 4 KM RP.2.000.000.000	Desa Batu Putih, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkaupan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
310	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Rehab Masjid Nurul Fajar Jl. Ibunda 1 Kota Buntok RP.250.000.000	Jl. Ibunda 1 Kota Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
311	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Penambahan ruang kelas Pondok Pesantren Bina Insan Pangkalanbun RP.250.000.000	Pondok Pesantren Bina Insan Pangkalanbun, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	usulan akan ditindaklanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia/ akan lebih relevan usulan disampaikan ke Biro Kesra	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	PAKET	250.000.000	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
312	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan jalan kelurahan dalam Kelurahan Batu Bua I RP.1.000.000.000	Kelurahan Batu Bua I, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
313	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Rehab Jembatan Gantung Batu Bua I dan Batu Bua II RP.3.000.000.000	Batu Bua I dan Batu Bua II, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	1	PAKET	-	-
314	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Rehab Masjid Desa Batu Karang RP.250.000.000	Desa Batu Karang, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
315	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pembangunan Menara dan Teras Masjid Jami Mujahidin di Desa Ketab. RP.250.000.000	Masjid Jami Mujahidin di Desa Ketab., Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
316	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Rehab Masjid desa Magantis RP.250.000.000	Masjid desa Magantis, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
317	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pengadaan tanah Pemakaman Umum Kelurahan Tumbang Lahung RP.200.000.000	Kelurahan Tumbang Lahung, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ditolak	Merupakan Kewenangan Kabupaten	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Merupakan Kewenangan Kabupaten	-	-	PAKET	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
318	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pembuatan sumur bor 3 titik di Desa Sungai Bakanon RP.300.000.000	Desa Sungai Bakanon, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak		disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Ditolak, bukan kewenangan	-	3	PAKET	-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
319	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	pembangunan jalan Batu Bua - Desa Tumbang Bondang, Provinsi Kalimantan Tengah RP.1.000.000.000	jalan Batu Bua - Desa Tumbang Bondang, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
320	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Bantuan sarana ibadah Desa Tahujan Laung RP.100.000.000	Desa Tahujan Laung, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
321	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan jalan tembus Desa Muara Tupuh - Puruk Cahu RP.1.000.000.000	Desa Muara Tupuh - Puruk Cahu, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
322	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pembangunan Masjid Desa Bumban Tuhup RP.500.000.000	Masjid Desa Bumban Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
323	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pengadaan sarana Air Bersih Desa Makunjung RP.500.000.000	Desa Makunjung, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria, DED, Peta Jaringan Air serta RISPAM Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	500.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
324	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pelebaran pembangunan bahu jalan negara di Desa Pamait RP.1.000.000.000	Desa Pamait, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
325	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pembangunan Siring Beton Jalan Umum Kel. Rantau Kujang Kec. Jenamas RP.500.000.000	Kel. Rantau Kujang Kec. Jenamas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
326	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Rehab Masjid dan Halaman Masjid Desa Babai RP.500.000.000	Masjid Desa Babai, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
327	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Rehab masjid Talio RP.500.000.000	masjid Talio, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
328	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Perbaikan Jalan antar Desa dari Murung Paken - Desa Danau Masura. RP.500.000.000	Desa dari Murung Paken - Desa Danau Masura., Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
329	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pembangunan Masjid Baru yang berada di pinggir jalan Negara Desa Kalahien RP.500.000.000	Desa Kalahien, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
330	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pembentukan sekolah Satu Atap untuk SMA di Desa Muara Plantau. RP.500.000.000	Desa Muara Plantau., Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Terkait usulan USB akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kemampuan dan sumber dana. Dan tentunya dengan terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan	1	PAKET	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
331	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Rehab dan perbaikan jalan jembatan Baruh Desa Muara Plantau yang menuju kearah Desa Dayu. RP.500.000.000	Desa Muara Plantau yang menuju kearah Desa Dayu., Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
332	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Penggantian jembatan kayu dengan beton Kelurahan Jambu RT 1A, Provinsi Kalimantan Tengah R.1.000.000.000	Kelurahan Jambu RT 1A, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
333	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pengaspalan jalan ± 10.km dan perbaikan jembatan kearah Desa Sabuh yang masih sangat rusak. RP.1.000.000.000	Desa Sabuh , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
334	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan Jalan Pelajar dalam Kelurahan Tumbang Lahung RP.1.000.000.000	Kelurahan Tumbang Lahung, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
335	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan Jalan lingkungan Desa Tumbang Mulut RP.1.000.000.000	Desa Tumbang Mulut, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
336	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pengadaan tarbang Hadrah desa Tumbang Masao RP.25.000.000	desa Tumbang Masao, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
337	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan jalan dalam Desa Tumbang masao RP.1.000.000.000	Desa Tumbang masao, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
338	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan jalan tembus antar desa Kalapeh Baru hingga ibu kota kecamatan Permata Intan RP.2.000.000.000	desa Kalapeh Baru hingga ibu kota kecamatan Permata Intan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
339	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan jalan dalam Desa Pantai Laga Rp.1.000.000.000	Desa Pantai Laga, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
340	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pembangunan Masjid Desa Pantai Laga Rp.500.000.000	Masjid Desa Pantai Laga, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
341	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	rehab Masjid Desa Baratu Rp.300.000.000	Masjid Desa Baratu, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Ditolak, bukan kewenangan (diteruskan ke Biro Kesra Prov. Kalteng)	-	1	PAKET	-	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
342	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Rehab Jembatan Sukang Desa Juking Sopan Rp2.000.000.000	Desa Juking Sopan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	1	PAKET	-	-
343	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Rehab Langgar Al Hikmah Desa Juking Sopan Rp500.000.000	Langgar Al Hikmah Desa Juking Sopan, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
344	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan infrastruktur jalan sepanjang 18 KM Tumbang Lahung - Desa Sungai Gula Rp3.000.000.000	Desa Sungai Gula, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
345	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pembuatan pagar dan mimbar masjid Sungai Batang Rp500.000.000	masjid Sungai Batang, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
346	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pembangunan 4 kubah Masjid Al Itikad Kelurahan Pendang Rp500.000.000	Masjid Al Itikad, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
347	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pelebaran dan Perbaikan Jalan di SDN-3 Kelurahan Pendang. Rp1.000.000.000	Jalan di SDN-3 Kelurahan Pendang., Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
348	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pembangunan dan perbaikan akses Jalan Desa serta Jalan Penghubung antar Desa Marawan Lama Rp1.000.000.000	Desa Marawan Lama, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
349	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Rehab Masjid "Nurul Hikmah" Desa Tanjung Jawa Rp500.000.000	Masjid "Nurul Hikmah" Desa Tanjung Jawa, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
350	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pembangunan jalan Desa dari Teluk Mampun ke desa Penda Asam Rp1.000.000.000	Desa Teluk Mampun Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
351	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pengadaan mesin Kelotok cis Kelompok tani Desa Marawan Lama, Provinsi Kalimantan Tengah Rp300.000.000	Kelompok tani Desa Marawan Lama, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	50.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
352	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Rehab Masjid dan Pengadaan Ambal masjid Al-Mu'min Desa Muara Sumpoi, Rp500.000.000	masjid Al-Mu'min Desa Muara Sumpoi, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
353	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan jalan AIS Nasution Kelurahan Beriwit Puruk Cahu, Rp1.000.000.000	jalan AIS Nasution Kelurahan Beriwit Puruk Cahu, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	PAKET	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
354	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Peningkatan Jalan Damang Pati Jaya Desa Talio Rp500.000.000	Jalan Damang Pati Jaya Desa Talio, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
355	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Pengadaan Bibit Ikan Patin Dan Pakan Untuk Kelompok Tani Di Desa Manduing Lama, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan Rp.200.000.000	Kelompok Tani Di Desa Manduing Lama, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	20.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
356	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Pengadaan Excavator Mini Untuk Kelompok Tani Di Desa Manduing Lama, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan	Desa Manduing Lama, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	400.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
357	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Pembuatan Sumur Bor Untuk SMKN - 1 Katingan Kuala Desa Jaya Makmur, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah	SMKN - 1 Katingan Kuala, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
358	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Pembuatan Sumur Bor Untuk SMKN - 1 Mendawai Jl. Dahlia li No. 05rt 4rw 2, Desa/Kelurahan: Mendawai, Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	SMKN - 1 Mendawai Jl. Dahlia li No. 05rt 4rw 2, Desa/Kelurahan: Mendawai, Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
359	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Pembuatan Sumur Bor Untuk Sman - 1 Bukit Raya Jl. Raden Sura Rakit, Desa Tumbang Kajamei, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan	SMAN - 1 Bukit Raya Jl. Raden Sura Rakit, Desa Tumbang Kajamei, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
360	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Pembuatan Sumur Bor Untuk SLB Negeri Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur	SLB Negeri Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
361	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	palangka raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Ditolak	Akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Kalteng dengan format yang akan dibahas lebih lanjut	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Kalteng dengan format yang akan dibahas lebih lanjut	-	1	paket	-	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
362	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Pembuatan Pagar Dan Lanjutan Penataan Halaman SMKN 1 Kamipang, Desa Baun Bango, Kab. Katingan	SMKN 1 Kamipang, Desa Baun Bango, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	PAKET	750.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
363	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Pembuatan Pagar Dan Penataan Halaman SMKN 1 Kuala Kurun, Jl. Tamanggung Panji V, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas.	SMKN 1 Kuala Kurun, Jl. Tamanggung Panji V, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas., Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	PAKET	750.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
364	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Bantuan bibit sapi untuk Kelompok Tani di Kab. Katingan	Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
365	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Bantuan bibit babi untuk Kelompok Tani di Kab. Katingan	Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
366	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Bantuan bibit babi untuk Kelompok Tani di Kab. Gunung Mas	Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
367	EVI KAHAYANTI, S.Sos	Bantuan bibit Itik untuk kelompok tani katingan	Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
368	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Peningkatan Jalan Budi Utomo 4.000 M Desa Talio Hulu	Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
369	Ir. H. WISMAN, M.Si	PENINGKATAN JALAN DESA KERAYA MENUJU DESA SABUAI RP.773.635.500	DESA KERAYA-DESA SEBUAI, KEC. KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
370	Ir. H. WISMAN, M.Si	PENINGKATAN JALAN DESA NATAI BARU MENUJU DESA KADIPI ATAS (LATERIT) 1 KM. RP.515.757.000	DESA NATAI BARU-DESA KADIPI ATAS, KEC. ARSEL, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
371	Ir. H. WISMAN, M.Si	PENINGKATAN JALAN DESA PANGKALAN DURIN MENUJU DESA SUNGAI RANGIT JAYA 1 KM RP.515.757.000	DESA PANGKALAN DURIN-DESA SUNGAI RANGIT JAYA, PANGKALAN LADA, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
372	Ir. H. WISMAN, M.Si	DRAINASE JALAN POROS DESA BUMI HARJO-PANGKALAN SATU 1KM. RP.1.635.519.000	DESA BUMI HARJO-PANGKALAN SATU, KEC. ARSEL, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
373	Ir. H. WISMAN, M.Si	REKONSTRUKSI JALAN DESA SAGU (KOBAR)-SIMPANG KENAWAN (LAMANDAU) 700KM. RP.1.750.000.000	DESA SAGU (KOBAR)-SIMPANG KENAWAN (LAMANDAU), KEC. ARSEL, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
374	Ir. H. WISMAN, M.Si	LANJUTAN PEMBANGUNA PEMECAH OMBAK (BREAK WATER) DESA SEBUAI TIMUR RP.1.250.000.000	DESA SEBUAI TIMUR, KEC. KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
375	Ir. H. WISMAN, M.Si	LANJUTAN PEMBANGUNA PEMECAH OMBAK (BREAK WATER) DESA TELUK BOGAM RP.1.250.000.000	DESA TELUK BOGAM, KEC. KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkaopian data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
376	Ir. H. WISMAN, M.Si	LANJUTAN PEMBANGUNAN PEMECAH ONBAK (BREAK WATER) DESA KUBU, KEC. KUMAI RP.1.250.000.000	DESA KUBU, KEC. KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkaopian data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
377	Ir. H. WISMAN, M.Si	BANTUAN TERNAK SAPI, KANDANG DAN RUMPUT PAKAN TERNAK, DESA BUMI HARJO, KEC. KUMAI, KOBAR RP.1.500.000.000	DESA BUMI HARJO, KEC. KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	1.500.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
378	Ir. H. WISMAN, M.Si	BANTUAN TERNAK SAPI, KANDANG DAN RUMPUT PAKAN TERNAK, DESA KEBUN AGUNG, KEC. PANGKALAN BANTENG, KOBAR RP.1.500.000.000	DESA KEBUN AGUNG, KEC. PANGKALAN BANTENG, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	1.500.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
379	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Permohonan Bantuan Pengadaan Ternak Sapi dan Kandang	Kelompok Tani Karya Mandiri Kelurahan Habaring Hujung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	20	Ekor	300.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
380	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MASJID MIFTAHUL KHOIR RT 32 KEL.BARU Rp.100.000.000	MASJID MIFTAHUL KHOIR RT 32 KEL.BARU, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
381	BRYAN ISKANDAR, SE	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JL.N SOFYAN DS UMPANG Rp 500.000.000	JL.N SOFYAN DS UMPANG, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
382	BRYAN ISKANDAR, SE	PENGADAAN MOBIL AMBULANCE RT 24 KEL.BARU Rp 300.000.000	RT 24 KEL.BARU, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan	Dikembalikan	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	-	1	PAKET	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
383	BRYAN ISKANDAR, SE	PENGADAAN MOBIL AMBULANCE RT13 KEL.RAJA Rp 300.000.000	RT13 KEL.RAJA, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan	Dikembalikan	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	-	1	PAKET	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
384	BRYAN ISKANDAR, SE	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JL ARWANA RT 13 KEL.BARU Rp 500.000.000	JL ARWANA RT 13 KEL.BARU, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
385	BRYAN ISKANDAR, SE	PENGADAAN SAPI BALI KELOMPOK TANI "UMPANG SEJAHTERA" DS UMPANG KEC ARUT SELATAN Rp 100.000.000	KELOMPOK TANI "UMPANG SEJAHTERA" DS UMPANG KEC ARUT SELATAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	100.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
386	BRYAN ISKANDAR, SE	PENATAAN HALAMAN MASJID (RUMAH IBADAH) BAITUL MU'MINI JI Jenderal Sudirman Rt/Rw 11/04 Pangkalan Bun Ds Kumpai Batu Bawah Kec Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Rp 2000.000.000	MASJID BAITUL MU'MINI JI Jenderal Sudirman Rt/Rw 11/04 Pangkalan Bun Ds Kumpai Batu Bawah Kec Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
387	BRYAN ISKANDAR, SE	REHAB RENOVAS PERUMAHAN KELOMPOK TANI DAN NELAYAN KARYABARU MANDIRI Desa Kubu Kecamatan Kumai Kab.Kobar Rp 2000.000.000	Desa Kubu Kecamatan Kumai Kab.Kobar, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ditolak	Tidak Masuk dalam kawasan kumuh kewenangan Provinsi. pemerintah provinsi tidak dapat melakukan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh kewenangan provinsi (luas 10 Ha sd 15 Ha)	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti setelah melengkapi data data pendukung dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi	-	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
388	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA NURUL ISLAH RT 21 RW 07 DS PANDU SANJAYA KEC.PANGKALAN LADA Rp 25.000.000	MUSHOLA NURUL ISLAH RT 21 RW 07 DS PANDU SANJAYA KEC.PANGKALAN LADA, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
389	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH KELOMPOK MAUID AL-HABSYI "DZATY SUDUR" DS.KUBU KEC.KUMAI Rp 25.000.000	DS.KUBU KEC.KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
390	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH PEMBANGUNAN MUSHOLLA "NURUL JANNAH" DS.BATU BELAMAN KEC KUMAI Rp 100.000.000	DS.BATU BELAMAN KEC KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
391	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA BAITUL MAKMUR RT 11 / RW 03 Pangkalan Lada RP.20.000.000	RT 11 / RW 03 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
392	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MASJID AN-NUR RT 14 / RW 03 Pangkalan Lada Rp 50.000.000	RT 14 / RW 03 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
393	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MASJID BAITUL MUTTAQIN RT 14 / RW 03 Pangkalan Lada. RP.50.000.000.	RT 14 / RW 03 Pangkalan Lada., Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
394	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AT-TAQWART 16 / RW 08 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MUSHOLA AT-TAQWART 16 / RW 08 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
395	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AL-IKHLAS RT 17 / RW 08 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MUSHOLA AL-IKHLAS RT 17 / RW 08 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
396	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AL-MUHAJIRIN RT 18 / RW 04 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MUSHOLA AL-MUHAJIRIN RT 18 / RW 04 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
397	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AL-FALAH RT 19 / RW 04 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MUSHOLA AL-FALAH RT 19 / RW 04 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
398	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MASJID MIFTHUL KHOIR RT 19 / RW 04 Pangkalan Lada Rp 50.000.000	MASJID MIFTHUL KHOIR RT 19 / RW 04 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
399	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH TPA MIFTAHUL KHOIR RT 19 / RW 04 Pangkalan Lada Rp 50.000.000	TPA MIFTAHUL KHOIR RT 19 / RW 04 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
400	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah MUSHOLA AL-MUKMIN RT 31 / RW 04 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MUSHOLA AL-MUKMIN RT 31 / RW 04 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
401	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AL-MUTTAQIIN RT 33/ RW 08 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MUSHOLA AL-MUTTAQIIN RT 33/ RW 08 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
402	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH YAYASAN PONDOK PESANTREN AS-SYUHADA RT 34 / RW 08 Pangkalan Lada Rp 50.000.000	YAYASAN PONDOK PESANTREN AS-SYUHADA RT 34 / RW 08 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
403	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AN-NAFI RW 05 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MUSHOLA AN-NAFI RW 05 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
404	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA NURUL HUDA RW 05 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MUSHOLA NURUL HUDA RW 05 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
405	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MUSHOLA AT-TAQWA RW 07 Pangkalan Lada Rp 20.000.0000	MUSHOLA AT-TAQWA RW 07 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
406	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUA DANA HIBAH MUSHOLA NURUL ISLAH RW 07 Pangkalan Lada Rp.20.000.000	MUSHOLA NURUL ISLAH RW 07 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
407	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah MUSHOLA AL-BAROKAH RW 07 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MUSHOLA AL-BAROKAH RW 07 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
408	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah TPA BAITUT TAALUM RW 05 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	TPA BAITUT TAALUM RW 05 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
409	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah TPA AL-BAROKAH RW 07 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	TPA AL-BAROKAH RW 07 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
410	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah MASJID TAMRINUL HUDA RW 01 Pangkalan Lada Rp 50.000.000	MASJID TAMRINUL HUDA RW 01 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
411	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah MUSHOLA MIFTAHUL JANAH RT 05 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MUSHOLA MIFTAHUL JANAH RT 05 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
412	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah MUSHOLA SABILUL MUHTADIN RT 06 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MUSHOLA SABILUL MUHTADIN RT 06 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
413	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah MASJID NURUL ISLAM RW 02 Pangkalan Lada RP.20.000.000	MASJID NURUL ISLAM RW 02 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
414	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah MUSHOLA AL-ISTIKOMAH RT 10 Pangkalan Lada RP.20.000.000	MUSHOLA AL-ISTIKOMAH RT 10 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
415	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah MUSHOLA ROUDHOTUL JANAH RT 28 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MUSHOLA ROUDHOTUL JANAH RT 28 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
416	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah MUSHOLA BAITUL MUTAQIN RT 09 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MUSHOLA BAITUL MUTAQIN RT 09 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
417	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah MASJID AL-HIDAYAH RW 05 Pangkalan Lada Rp 50.000.000	MASJID AL-HIDAYAH RW 05 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
418	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah MAJLIS SHOLAWAT / PAGUYUBAN RT 19 Pangkalan Lada Rp 20.000.000	MAJLIS SHOLAWAT / PAGUYUBAN RT 19 Pangkalan Lada, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
419	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Dana Hibah MASJID BAITUL MUTAQIN DESA PANDU SANJAYA RT.16/08 Rp 25.000.000	MASJID BAITUL MUTAQIN DESA PANDU SANJAYA RT.16/08, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
420	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Dana Hibah MASJID ARRAHMAT DS SUNGAI RANGIT JAYA RT. 04 Rp 20.000.000	MASJID ARRAHMAT DS SUNGAI RANGIT JAYA RT. 04, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
421	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah lembaga pendidikan islam MIFTAHUL ULUM SABILUL MUHTADIN Jl. Madrasah Rt 02 Ds.Sungai Tendang, Provinsi Kalimantan Tengah Rp 20.000.000	MIFTAHUL ULUM SABILUL MUHTADIN Jl. Madrasah Rt 02 Ds.Sungai Tendang, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
422	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Dana Hibah Mushola NURUL KAROMAH Jl Berdikari Rt 05, Ds.sungai Tendang Rp 20.000.000	Mushola NURUL KAROMAH Jl Berdikari Rt 05, Ds.sungai Tendang, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
423	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana hibah Mushola Baitul Muttaqin Jl Meden rt 02 Rp 20.000.000	Mushola Baitul Muttaqin Jl Meden rt 02, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
424	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan dana Hhibah Mushola Azzainuddin Jl Meden Rt 01 Rp 25.000.000	Mushola Azzainuddin Jl Meden Rt 01, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
425	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Hibah Untuk Pembuatan Masjid "Al-Muhajirin" Desa Pangkalan Tiga RT 19 RW 01	Masjid "Al-Muhajirin" Desa Pangkalan Tiga RT 19 RW 01, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
426	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Hibah Untuk pengadaan peralatan Rukun Kematian Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Rp 25.000.000	Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
427	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Hibah kepada Masjid Darussholihin Jl. Amang RT 18 RW 4 Desa Karang Mulya (Desa Persiapan Mulya Raya), Kab. Kotawaringin Barat Rp 25.000.000	Masjid Darussholihin Jl. Amang RT 18 RW 4 Desa Karang Mulya (Desa Persiapan Mulya Raya), Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
428	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Pengadaan Perlengkapan Pengurusan Jenazah dan Ta'ziah Rukun Kematian (RKM) Nurul Ikhlas Pengurusan Jenazah dan Ta'ziah Rukun Kematian (RKM) Nurul Ikhlas Desa Kebun Agung Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat Rp 25.000.000	Desa Kebun Agung Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
429	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Hibah Jamaah Yasin Az-Zikra Sungai Hijau, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin barat Rp 25.000.000	Sungai Hijau, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
430	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Renovasi Atap Musholla ' Darul Falah' Darul Falah RT.08, Natai Kerbau Rp 25.000.000	Musholla ' Darul Falah' Darul Falah RT.08, Natai Kerbau , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
431	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Pembuatan Pagar masjid Al-Muhajirin masjid Al-Muhajirin Rt.07 Desa Natai Kerbaau Rp 25.000.000	masjid Al-Muhajirin masjid Al-Muhajirin Rt.07 Desa Natai Kerbaau, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
432	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Pembuatan MCK TPA Al- Ma'arif TPA Al-Ma'arif Rt.07 Desa Natai Kerbau Rp 25.000.000	TPA Al- Ma'arif TPA Al-Ma'arif Rt.07 Desa Natai Kerbau , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
433	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Pembangunan Mushola Nurul Huda Rp 25.000.000	Mushola Nurul Huda, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
434	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Hibah untuk Kelompok Pengajian "Nur Jannah" Desa Kebun Agung (Pengadaan Tenda) Desa Kebun Agung, Kab. Kotawaringin Barat , Provinsi Kalimantan Tengah RP.25.000.000	Desa Kebun Agung (Pengadaan Tenda) Desa Kebun Agung, Kab. Kotawaringin Barat , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
435	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN ALAT MUSIK GAMELAN GRUP KESENIAN TARUNA MANUNGGAL DS.SEI RANGIT JAYA RT.01 KEC PANGKALAN LADA RP.50.000.000	GRUP KESENIAN TARUNA MANUNGGAL DS.SEI RANGIT JAYA RT.01 KEC PANGKALAN LADA , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	PAKET	50.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
436	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan untuk Kelompok Kesenian Kuda Kepang Turonggo Lestari "Asli Banyumasan" Desa Sido Mulyo, Kab. Kotawaringin Barat RP.50.000.000	Desa Sido Mulyo, Kab. Kotawaringin Barat , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	PAKET	50.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
437	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Pengadaan Ternak Sapi untuk kelompok tani "Sabah Terantang" Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai Rp 100.000.000	Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	100.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
438	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Hand tractor Rotary Quick Zena, 2 unit untuk Kelompok Tani "Tani Karya" Desa Karang Mulya RT 17 RW 04 (Desa Persiapan Mulya Raya), Kab. Kotawaringin Barat Rp 100.000.000	Desa Karang Mulya RT 17 RW 04 (Desa Persiapan Mulya Raya), Kab. Kotawaringin Barat , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir masuk pada sub kegiatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian. Data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik),serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	100.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
439	BRYAN ISKANDAR, SE	Bantuan Hand tractor Rotary Quick Zena, 2 unit untuk Kelompok Tani "MAKMUR ABADI" Desa Sungai Pakit Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat Rp 100.000.000	Desa Sungai Pakit Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	100.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
440	BRYAN ISKANDAR, SE	Pengadaan alat perbengkelan "Tiga Putra Jaya" Jl pasir putih Rt 12 Ds Sei Kapitan Kec Kumai Rp 50.000.000	Jl pasir putih Rt 12 Ds Sei Kapitan Kec Kumai, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomdir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	PAKET	90.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
441	BRYAN ISKANDAR, SE	Pengadaan alat pembuat batak "Sumber Riski" Jl Melati Rt 02 Ds Sei Kapitan Kec.Kumai Rp 50.000.000	Jl Melati Rt 02 Ds Sei Kapitan Kec.Kumai, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomdir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	PAKET	90.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
442	BRYAN ISKANDAR, SE	Pengadaan Mesin Fotocopy Percetakan Al-Wahdan Ds Sei Kapitan Kec.Kumai Rp 100.000.000	Al-Wahdan Ds Sei Kapitan Kec.Kumai, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomdir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	PAKET	40.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
443	BRYAN ISKANDAR, SE	Alat Tangkap Ikan KUB Nelayan Mandiri, Kab Kotawaringin Barat Rp 100.000.000	KUB Nelayan Mandiri, Kab Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	50.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
444	BRYAN ISKANDAR, SE	Peningkatan jalan ahmad yani dan jalan urip sumoharjo ds. Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Rp 2.000.000.000	ds. Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
445	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH KELOMPOK MAULID AL HABSUYI "BAITURRAHMAN" JL.PANGERAN SYARIF RT 14 KEL.KUMAI HILIR KEC KUMAI KAB.KOBAR, Provinsi Kalimantan Tengah Rp 25.000.000	JL.PANGERAN SYARIF RT 14 KEL.KUMAI HILIR KEC KUMAI KAB.KOBAR, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
446	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH PENGAJIAN MAJELIS TA'LIM "NURUL IMAN" JL.PANGLIMA UTAR RT.07 DS SEI TENDANG KEC.KUMAI KAB KOBAR Rp 25.000.000	MAJELIS TA'LIM "NURUL IMAN" JL.PANGLIMA UTAR RT.07 DS SEI TENDANG KEC.KUMAI KAB KOBAR, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
447	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN PERALATAN KUB BENGKEL LAS "KAPITAN INDAH" JL.PANGLIMA UTAR RT.04 DS SEI KAPITAN KEC KUMAI KAB.KOBAR	JL.PANGLIMA UTAR RT.04 DS SEI KAPITAN KEC KUMAI KAB.KOBAR, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	PAKET	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
448	BRYAN ISKANDAR, SE	PENGADAAN MOBIL PICK UP FARDU KIFAYAH "AL-JANNAH" JL.INPRES DS SEI BEDAUN KEC.KUMAI KAB.KOBAR, Provinsi Kalimantan Tengah Rp 200.000.000	JL.INPRES DS SEI BEDAUN KEC.KUMAI KAB.KOBAR, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
449	BRYAN ISKANDAR, SE	PEMBANGUNAN PENAMBAHAN KELAS BARU "DARUL JADID" JL.PADAT KARYA (1) RT.08 DS.SEI KAPITAN KEC.KUMAI KAB.KOBAR Rp 200.000.000	JL.PADAT KARYA (1) RT.08 DS.SEI KAPITAN KEC.KUMAI KAB.KOBAR , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	usulan akan ditindak lanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia/ akan lebih relevan usulan disampaikan ke Biro Kesra	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	PAKET	200.000.000	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
450	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN PENGADAAN BIBIT AYAM BROILER (DOC AYAM BROILER) JL.PANGERAN SUKMA KEL.PADANG Rp 50.000.000	JL.PANGERAN SUKMA KEL.PADANG, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir masuk pada sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah lain. Data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik),serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
451	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN PENGADAAN ALAT TANGKAP IKAN JARING MILINIUM KUB "KAPITAN MAKMUR" JL.SWADAYA RT.01 DS. SEI KAPITAN KEC.KUMAI Rp 25.000.000	JL.SWADAYA RT.01 DS. SEI KAPITAN KEC.KUMAI , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik),serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	25.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
452	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA MAJELIS PENGAJIAN "SIRAJUL MUHTADIN" KEC ARUT SELATAN Rp 25.000.000	MAJELIS PENGAJIAN "SIRAJUL MUHTADIN" KEC ARUT SELATAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
453	BRYAN ISKANDAR, SE	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JL.MATANWAR RT 26 KEL.MADUREJO KEC.ARUT SELATAN Rp 200.000.000	JL.MATANWAR RT 26 KEL.MADUREJO KEC.ARUT SELATAN , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data-data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	PAKET	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
454	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH MASJID BAITUL GHAFUR JL.PANGLIMA UTAR RT.04 DS SEI KAPITAN KEC.KUMAI Rp 25.000.000	MASJID BAITUL GHAFUR JL.PANGLIMA UTAR RT.04 DS SEI KAPITAN KEC.KUMAI , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
455	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH KUB CHATRING RONY JL.P.SYARIF RT 14 KEL.KUMAI HILIR KEC.KUMAI Rp.25.0000.000	L.P.SYARIF RT 14 KEL.KUMAI HILIR KEC.KUMAI , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
456	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN REHAB YAYASAN KOTAWARINGIN SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS ANTAKUSUMA Rp 1.000.000.000	YAYASAN KOTAWARINGIN , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
457	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN REHAB SMA NU PALANGKARAYA Rp 5000.000.000	SMA NU PALANGKARAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
458	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA UNTUK PELATIHAN "GURU TRANSFORMATIF" OLEH NICE INDONESIA Rp 500.000.000	PANGKALAN BUN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar bisa diketahui guru di jenjang pendidikan apa yang akan diberi pelatihan agar tidak salah kewenangan dan salah sub kegiatan	1	PAKET	250.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
459	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA UNTUK PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMUDA OLEH NICE INDONESIA Rp 500.000.000	PANGKALAN BUN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	Dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Organisasi	25.000.000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
460	BRYAN ISKANDAR, SE	BANTUAN DANA HIBAH PEMBANGUNAN MUSHOLLA "NURUL JANNAH" DS.BATU BELAMAN KEC KUMAI Rp 100.000.000	MUSHOLLA "NURUL JANNAH" DS.BATU BELAMAN KEC KUMAI, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
461	SIRAJUL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom	Pembangunan Masjid Al Wustha Desa Muara Talang, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah RP.200.000.000	Masjid Al Wustha Desa Muara Talang, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
462	Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P	PENINGKATAN JALAN/PENGASPA LAN DARI JLN.DESA SUKAMAKMUR, DESA IPUH BANGUN JAYA, DESA PALIH BARU KEC. KOLAM, KAB KOBAR TEMBUS SIMPANG KENAWAN KEC.PERMATA KECUBUNG KAB.SUKAMARA (SEPANJANG 27 KM)	DESA SUKAMAKMUR, DESA IPUH BANGUN JAYA, DESA PALIH BARU KEC. KOLAM, KAB KOBAR TEMBUS SIMPANG KENAWAN KEC.PERMATA KECUBUNG KAB.SUKAMARA, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
463	Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P	USULAN JLN LINGKUNGAN DESA BUKIT SINGKAI KEC.BALAI RIAM KAB SUKAMARA.	DESA BUKIT SINGKAI KEC.BALAI RIAM KAB SUKAMARA., Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
464	Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P	USULAN BANTUAN PERALATAN KUDA LUMPING TRI TURONGGO MUDO DESA BUKIT RAYA, KEC MENTHOBY RAYA, KAB LAMANDAU.	KUDA LUMPING TRI TURONGGO MUDO DESA BUKIT RAYA, KEC MENTHOBY RAYA, KAB LAMANDAU., Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	50.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
465	Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P	PENINGKATAN JLN.LINGKUNGAN DESA/LANJUTAN. LEBAR 4MTR TEBAL 20 CM, PANJANG 300MTR DESA PURWAREJA KEC.SEMATU JAYA KAB LAMANDAU	DESA PURWAREJA KEC.SEMATU JAYA KAB LAMANDAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
466	Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P	BANTUAN RUMAH IBADAH TERSEBAR DI 6 DESA KECAMATAN MENTHOBY RAYA.	KECAMATAN MENTHOBY RAYA., Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	6	paket	-	-
467	Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P	BANTUAN RUMAH IBADAH TERSEBAR DI 6 DESA KECAMATAN SEMATU JAYA	KECAMATAN SEMATU JAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	6	paket	-	-
468	Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P	PEMBANGUNAN MASJID AT TANWIR, LAMANDAU	MASJID AT TANWIR, NANGA BULIK, LAMANDAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
469	Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P	Usulan ZoSS, jln negara di Desa Purwareja, Kec Sematu Jaya Kab.Lamandau	jln negara di Desa Purwareja, Kec Sematu Jaya Kab.Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perhubungan	Ditolak	Bukan Jalan Provinsi	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan Jalan Provinsi	-	1	PAKET	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
470	H. SUDARSONO	masyarakat kesulitan mendapatkan bibit buah-buahan, seruyan,	SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	Dikembalikan	1. Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan	disetujui	Lengkapi data dukung	Sayur dan Buah Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	-	1	PAKET	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
471	H. SUDARSONO	Mengembangkan usaha pertukangan masyarakat, seruyan,	SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkap data dukung : Proposal	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkap data dukung : e proposal	1	PAKET	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
472	Ir. ARTABAN, MH	Peningkatan jalan Raden patah kota palangka raya	kelurahan menteng, kec jekan raya , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
473	Ir. ARTABAN, MH	Peningkatan jalan ujung pandaran-kuala pembuang	ruas jalan ujung pandaran menuju kuala pembuang , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Km	20.000.000.000	Rekonstruksi Jalan
474	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Perbaikan /Peningkatan Jalan Kalampanan - Bereng Bengkel Senilai Rp. 3.000.000.000,-	kalampanan-Bereng Bengkel Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	paket	-	-
475	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Pembangunan Lanjutan Jalan Tani di Desa Jaya Makmur, Senilai Rp. 1.000.000.000,-	Desa Jaya Makmur di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	paket	-	-
476	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Saluran Irigasi / Pengairan Pertanian di Desa Jaya Makmur, Senilai Rp. 1.000.000.000,-	Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Bukan Kewenangan Provinsi	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Usulan Sudah diakomodir di tahun 2024 SIMURP Pusat	-	1	paket	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
477	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Pembangunan Drainase di Jalan Adonis Samad (belakang kantor NasDem Provinsi Kalimantan Tengah) Senilai Rp. 1.000.000.000,-	Jalan Adonis Samad Palangka Raya, Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak		disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Ditolak, karena Jalan Adonis merupakan Kewenangan Pusat	-	1	paket	-	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
478	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Peningkatan/Rehab Gedung Olahraga di Desa Jaya Makmur, Senilai Rp. 600.000.000,-	Desa Jaya Makmur Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak		disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	ditolak, bukan kewenangan (diteruskan ke Pemerintah Kabupaten setempat)	-	1	paket	-	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
479	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Peningkatan Jalan lanjutan dari jalan jeruk-jalan durian-jalan manggis-jalan mawar-jalan erlangga sampai jalan mataram kalampangan, Senilai Rp. 750.000.000	Kalampangan Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	paket	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
480	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Peningkatan Jalan Kalimantan Sanggarahan RT.04/RW. 21 Palangka Raya, Senilai Rp. 750.000.000,-	Jalan Kalimantan Sanggarahan RT.04/RW. 21 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
481	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Rehab Lanjutan Peningkatan Gedung Museum Balanga, Provinsi Kalimantan Tengah Senilai Rp. 2.000.000.000,-	Museum Balanga Jl. Tjilik Riwut No.Km. 2.5, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	Akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	2.000.000.000	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
482	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Renovasi Objek Wisata Batu Alam, Bukit Batu-Tangkiling Senilai Rp. 750.000.000,-	Objek Wisata Bukit Batu Tangkiling Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	750.000.000	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
483	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Bantuan bibit babi 50 ekor untuk Desa Tumbang Habaon dan Tumbang Untung Kabupaten Gunung Mas	Desa Tumbang Habaon dan Tumbang Untung Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	100.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
484	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Bantuan bibit Kambing 50 ekor untuk Desa Tumbang Anjir Kabupaten Gunung Mas	Desa Tumbang Anjir Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	100.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
485	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Bantuan bibit 50 ekor kambing untuk Kelompok Tani Bukit Batu Tangkiling Kota palangka Raya	Kelompok Tani Tangkiling Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	100.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
486	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Bantuan bibit 50 ekor kambing untuk Kelompok Tani Pambelum Sejahtera Batu Badak	Batu Badak Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Indonesia., Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	100.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
487	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Renovasi Ruang Kelas dan Pembuatan Pagar SMK 1 Katingan, Senilai Rp. 750.000.000,-	SMKN 1 KASONGAN JL. TAMBANG, Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. jenis usulan agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2	1	paket	750.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
488	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Renovasi Ruang Kelas dan Pembuatan Pagar SMK 2 Katingan , Senilai Rp. 750.000.000,-	SMKN 2 KASONGAN Jl. JENDERAL SUDIRMAN NO 2 KM 8 KERENG HUMBANG KASONGAN, Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Jenis usulan agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2	1	paket	750.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
489	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Pembuatan atau Peningkatan Ruang Perpustakaan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senilai Rp. 750.000.000,-	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Jl. S. Parman No.2, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dikembalikan	Bukan Wewenang Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	Tidak Dapat diakomodir karena wewenang Setwan Provinsi Kalteng	-	1	paket	-	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
490	FARIDAWATY DARLAND ATJEH	Peningkatan Ruang Fraksi NasDem di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senilai Rp. 750.000.000,-	Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Jl. S. Parman No.2, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112, Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretariat DPRD	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Peningkatan (Rehab) Ruang Fraksi NasDem Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	paket	750.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
491	H. JIMMY CARTER	Belum selesainya pembuatan jalan usaha tani begur mandiri guna untuk membantu petani untuk meningkatkan SDM dan SDA	Desa Juju Baru Rt.03 Kec.Lahei Kab.Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perhubungan	Ditolak	Bukan Jalan Provinsi	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan jalan provinsi	-	1800	M	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
492	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Permohonan Perbaikan Jalan Utama Desa Tumbang Nusa Jl. Sagara yang rusak berat Pasca Banjir Tahun 2019 sd 2021	Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
493	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Pembangunan Pastori Jemaat GKE Tumbang Nusa Resort Pulang Pisau	Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Validasi Mitra Bappeda	-	disetujui	-	-	-	1	unit	-	-
494	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Permohonan Bantuan Masjid AL Muhajirin Desa Hanjak Maju	Jl. Jeruk RT. 03, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Validasi Mitra Bappeda	-	disetujui	-	-	-	1	unit	-	-
495	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Pura Dharma Sesana Desa Hanjak Maju	Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Validasi Mitra Bappeda	-	disetujui	-	-	-	1	Paket	-	-
496	RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc.	Peningkatan Jalan Desa	Desa Luwuk Ranggan, Kec. Cempaga, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1000	meter	-	-
497	RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc.	Pengadaan Bibit Ikan	Desa Parenggean, Kec. Parenggean, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	100000	Ekor	10.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
498	RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc.	Peningkatan Halaman Masjid	Sei Regei, Desa Regei Lestari, Kec. Mentaya Hilir Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	100	Meter Persegi	-	-
499	RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc.	Peningkatan Masjid	Desa Sebabi, Kec. Telawang, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	Buah	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
500	RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc.	Peningkatan Musholla	Kecamatan Baamang, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	buah	-	-
501	RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc.	Peningkatan Jalan	Jl. Wengga Agung Raya 1 Jalan Gunung Mas, Baamang Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	500	Meter	-	-
502	RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc.	Lanjutan peningkatan jalan ke perumahan warga RT 27 RT 31 RT 22	Jl. Cilik Riwt Km. 05 Jalan Pertemuan RT 027 dan RT 031 Baamang Hulu, Kec. Baamang, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
503	RIZKI AMALIA DARWAN ALI, BA (Hons), M.Sc.	Peningkatan Jalan rusak	Jl. Ahmad Yani Jalan Ulin Mentawa Baru Hulu, Kec. Ketapang, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	500	Meter	-	-
504	H. JIMMY CARTER	Belum adanya pembangunan Turap sepanjang 100 M di Bantaran Sungai Barito Desa Bintang Ninggi I	Desa Bintang Ninggi I Kec.Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perhubungan	Ditolak	Bukan Jalan Provinsi	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan Jalan Provinsi	-	100	Meter	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
505	H. JIMMY CARTER	belum dicornya jembatan Pano Raya di Desa Danau Usung, maka memohon bantuan untuk Cor Jembatan tersebut agar layak dan nyaman dilewati warga sekitar	Jembatan Pano Raya Desa Danau Usung Kec Murung Kab Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	6	meter	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
506	WIYATNO., S.P	Rehabilitasi Saluran	kecamatan kapuas barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	dialihkan	-	-	Paket	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
507	Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P	PENINGKATAN JALAN/PENGASPA LAN DARI JLN.DESA SUKAMAKMUR, DESA IPUH BANGUN JAYA, DESA PALIH BARU KEC. KOLAM, KAB KOBAR TEMBUS SIMPANG KENAWAN KEC.PERMATA KECUBUNG KAB.SUKAMARA (SEPANJANG 17 KM)	DESA SUKAMAKMUR, DESA IPUH BANGUN JAYA, DESA PALIH BARU KEC. KOLAM, KAB KOBAR TEMBUS SIMPANG KENAWAN KEC.PERMATA KECUBUNG KAB.SUKAMARA, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	paket	-	-
508	Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P	PEMBANGUNAN MASJID AT TANWIR, LAMANDAU	MASJID AT TANWIR, NANGA BULIK, LAMANDAU, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak		disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Ditolak, bukan kewenangan (diteruskan ke Biro Kesra Prov. Kalteng)	-	1	paket	-	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
509	Drs. H. SUGIYARTO, M.A.P	.Peningkatan Jln Lingkungan Rt 4, 6, 7 kel.Raja Seberang, kec.Arsel, Kab.Kobar, Panjang 1.135 mtr, lebar 4 mtr.	Jln Lingkungan Rt 4, 6, 7 kel.Raja Seberang, kec.Arsel, Kab.Kobar., Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI (Proposal tersedia)	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	paket	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
510	BRYAN ISKANDAR, SE	"PENGADAAN MOBIL PICK UP FARDU KIFAYAH ""AL-JANNAH"" JL.INPRES DS SEI BEDAUN KEC.KUMAI KAB.KOBAR Rp 200.000.000 "	JL.INPRES DS SEI BEDAUN KEC.KUMAI KAB.KOBAR, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
511	BRYAN ISKANDAR, SE	"Bantuan dana hibah lembaga pendidikan islam MIFTAHUL ULUM SABILUL MUHTADIN JL. Madrasah Rt 02 Ds.Sungai Tendang, Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah Rp 20.000.000 "	MIFTAHUL ULUM SABILUL MUHTADIN JL. Madrasah Rt 02 Ds.Sungai Tendang, Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	usulan akan ditindak lanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia/ akan lebih relevan usulan disampaikan ke Biro Kesra	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	PAKET	20.000.000	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
512	BRYAN ISKANDAR, SE	"BANTUAN DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN REHAB YAYASAN KOTAWARINGIN SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS ANTAKUSUMA Rp 1.000.000.000	YAYASAN KOTAWARINGIN , Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	usulan akan ditindak lanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia/ akan lebih relevan usulan disampaikan ke Biro Kesra	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	PAKET	500.000.000	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
513	BRYAN ISKANDAR, SE	"BANTUAN DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN REHAB SMA NU PALANGKARAYA Rp 5000.000.000	SMA NU PALANGKARAYA, Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	usulan akan ditindak lanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran, lengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	PAKET	300.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
514	NATALIA, ST	BANTUAN BOX FREEZER UNTUK KELOMPOK DI PALANGKA RAYA RP.200.000.000	PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	PAKET	5.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
515	NATALIA, ST	PERBAIKAN JALAN/SEMENISA SI JL.SIDOMULYO DAN SEKITARNYA RP.750.000.000	JL.SIDOMULYO , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
516	NATALIA, ST	PERBAIKAN JALAN/SEMENISA SI JL.BUKIT PARARAWEN DAN SEKITARNYA RP.750.000.000	JL.BUKIT PARARAWEN , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	PAKET	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
517	NATALIA, ST	PERBAIKAN JALAN/SEMENISA SI JL.WORTEL DAN SEKITARNYA RP.750.000.000	JL.WORTEL, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
518	NATALIA, ST	PENINGKATAN JALAN DAN DRAINASE JL.WORTEL- JL.JATI RAYA II DAN BROKOLI IV, PALANGKA RAYA RP.750.000.000	JL.WORTEL- JL.JATI RAYA II DAN BROKOLI IV, PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
519	NATALIA, ST	PENINGKATAN JL.G OBOS VIII UJUNG, PALANGKA RAYA RP.1.000.000.000	JL.G OBOS VIII UJUNG, PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
520	H. SUDARSONO	Sulitnya ekonomi masyarakat untuk mendapatkan bibit sapi	SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
521	Ir. H. ABDUL RAZAK	Memerlukan bantuan untuk sarana prasarana peribadatan	Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	Kegiatan	-	-
522	H. SUDARSONO	minimnya permodalan masyarakat untuk mendapatkan bibit ternak kambing	SERUYAN/KOTIM, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
523	Ir. H. ABDUL RAZAK	Memerlukan bantuan untuk sarana prasarana peribadatan	Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	Kegiatan	-	-
524	Ir. H. ABDUL RAZAK	Memerlukan bantuan untuk sarana prasarana peribadatan	Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	Kegiatan	-	-
525	H. SUDARSONO	daya beli masyarakat untuk mendapatkan bibit ternak itik	SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
526	Ir. H. ABDUL RAZAK	Memerlukan penanganan segera terhadap jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Kotawaringin Barat ke Sukamara	Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Km	20.000.000.000	Rekonstruksi Jalan

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
527	Ir. H. ABDUL RAZAK	Memerlukan penanganan segera terhadap jembatan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Kotawaringin Barat ke Sukamara	Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	50	m	1.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan
528	Ir. H. ABDUL RAZAK	Minimnya sarana dan prasarana belajar	Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	1. lengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran melalui sumber dana DAK/ PAD	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2.	1	Paket	2.000.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
529	H. JIMMY CARTER	minimnya sarana alat berat excavator untuk kegiatan pembukaan lahan sawah di Desa Bintang Ninggi I	Desa Bintang Ninggi I Kec Teweh Selatan Kab Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Ketahanan Pangan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	Tidak sesuai kewenangan, diarahkan ke Dinas Ketahanan Pangan	-	1	unit	-	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
530	Ir. H. ABDUL RAZAK	Belum memadainya jumlah sarana, prasarana dan peralatan kesehatan medis dan non medis	Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan	Dikembalikan	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	-	1	Kegiatan	-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
531	Ir. H. ABDUL RAZAK	Belum memadainya jumlah sarana, prasarana dan peralatan kesehatan medis dan non medis	Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan	Dikembalikan	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	-	1	Kegiatan	-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
532	Ir. H. ABDUL RAZAK	Belum memadainya jumlah sarana, prasarana dan peralatan kesehatan medis dan non medis	Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan	Dikembalikan	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	-	1	Kegiatan	-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
533	Ir. H. ABDUL RAZAK	Minimnya sarana dan prasarana belajar	Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	1. Lengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran melalui sumber dana DAK/ PAD	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2.	1	Kegiatan	2.000.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
534	Ir. H. ABDUL RAZAK	Minimnya sarana dan prasarana belajar	Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	1. Lengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran melalui sumber dana DAK/ PAD	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2.	1	Kegiatan	2.000.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
535	Ir. H. ABDUL RAZAK	Produksi dan mutu hasil pertanian masih rendah	Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Kegiatan	150.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
536	Ir. H. ABDUL RAZAK	Produksi dan mutu hasil pertanian masih rendah	Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Kegiatan	150.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
537	Ir. H. ABDUL RAZAK	Produksi dan mutu hasil pertanian masih rendah	Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung dan usulan agar lebih spesifik	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Kegiatan	150.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
538	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PENINGKATAN JALAN DESA, JALAN USAHA TANI-JABIREN SEPANJANG 3,5KM, DESA JABIREN, KAB. PULANG PISAU RP.5.000.000.000	DESA JABIREN, KAB. PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	5.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
539	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBUATAN JARINGAN PENGAIRAN UNTUK USAHA PERTANIAN DI DESA PILANG, KEC. JABIREN RAYA, KAB. PULANG PISAU. SEPANKANG 8KM RP.5.000.000.000	DESA PILANG, KEC. JABIREN RAYA, KAB. PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	5.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
540	Ir. H. ABDUL RAZAK	Peran organisasi kepemudaan dalam kegiatan kemasyarakatan masih rendah	se Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	40	Orang	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
541	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DESA KALAMPANGAN, KEC. MANTANGAI, KAB. PULANG PISAU RP.1.500.000.000	DESA KALAMPANGAN, KEC. MANTANGAI, KAB. PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
542	Ir. H. ABDUL RAZAK	Perlunya peningkatan kewirausahaan dan kompetensi Kapasitas SDM Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil	se Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	Akan di Akomodir menyesuaikan besaran DAK Non Fisik tahun 2025	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir dan menyesuaikan anggaran	1	Kegiatan	89.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
543	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN DESA PANTAI, KEC.KAPUAS BARAT, KAB. KAPUAS RP.1.500.000.000.	DESA PANTAI, KEC.KAPUAS BARAT, KAB. KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	PAKET	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
544	Ir. H. ABDUL RAZAK	Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak	se Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan dan melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
545	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN JALAN DESA TELUK HIRI, KEC. KAPUAS BARAT, SEPANJANG 500 METER RP.750.000.000	DESA TELUK HIRI, KEC. KAPUAS BARAT, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
546	Ir. H. ABDUL RAZAK	Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak	Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
547	Ir. H. ABDUL RAZAK	Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak	Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan dan melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
548	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN BERUPA JARING ANGKAT, JARING INSANG, MES CES 13HP, UNTUK KUB HAPAKAT ATEI, DESA TARANTANG, KEC. MANTANGAI, KAB. KAPUAS RP.450.000.000	KUB HAPAKAT ATEI, DESA TARANTANG, KEC. MANTANGAI, KAB. KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	50.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
549	Ir. H. ABDUL RAZAK	Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak	Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan dan melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
550	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak	Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
551	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN JEMBATAN BOX, DESA MANTANGAI HILIR, KEC. MANTANGAI, KAB. KAPUAS. PANJANG 15M, LEBAR 4M	DESA MANTANGAI HILIR, KEC. MANTANGAI, KAB. KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
552	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak	Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan dan Melengkapi data - data Pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
553	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak	Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan dan Melengkapi data - data Pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
554	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	BANTUAN PAKAN DAN BIBIT AYAM UNTUK KELOMPOK TANI MANTIR ADAT, DESA TARANTANG, KEC. MANTANGAI, KAB KAPUAS	KELOMPOK TANI MANTIR ADAT, DESA TARANTANG, KEC. MANTANGAI, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	400.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
555	H. JIMMY CARTER	kurangnya perawatan jalan ehingga menimbulkan kerusakan, maka melakukan permohonan bantuan pengadaan timbunan okes untuk perawatan jalan bebas banjir Desa Bintang Ninggi I	Desa Blntang Ninggi I Kec Tewehe Selatan Kab Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	Usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1950	M	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
556	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	BANTUAN TERNAK BABI UNTUK KELOMPOK TANI SEJAHTERA, DESA PALINGKAU JAYA, KEC. KAPUAS MURUNG, KAB KAPUAS	KELOMPOK TANI SEJAHTERA, DESA PALINGKAU JAYA, KEC. KAPUAS MURUNG, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
557	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Minimnya sarana dan prasarana belajar	Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	1. Lengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran melalui sumber dana DAK/ PAD	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomdir pada sub kegiatannya masing2.	1	Kegiatan	2.000.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
558	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	BANTUAN TERNAK SAPI, KELOMPOK TANI SEKATA JAYA, DESA LAMUNTI, KEC. MANTANGAI, KAB KAPUAS	KELOMPOK TANI SEKATA JAYA, DESA LAMUNTI, KEC. MANTANGAI, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
559	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Minimnya sarana dan prasarana belajar	Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	1. Lengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran melalui sumber dana DAK/ PAD	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomdir pada sub kegiatannya masing2.	1	Kegiatan	2.000.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
560	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	BANTUAN TERNAK KAMBING UNTUK KELOMPOK TANI KARYA MAJU, DESA SUMBER ALASKA, KEC. DADAHUP, KAB KAPUAS	KELOMPOK TANI KARYA MAJU, DESA SUMBER ALASKA, KEC. DADAHUP, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
561	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M. Si	Minimnya sarana dan prasarana belajar	Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	1. Lengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran melalui sumber dana DAK/ PAD	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perlu ada proposal agar jenis usulan yang dimaksud bisa lebih jelas untuk diakomodir pada sub kegiatannya masing2.	1	Kegiatan	2.000.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
562	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMASANGAN TIANG PENYANGGA JARINGAN KABEL LISTRIK PLN, JALAN URIA MAPAS, DESA TIMPAH, KEC. TIMPAH, KAB KAPUAS	JALAN URIA MAPAS, DESA TIMPAH, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ditolak	pembangunan/perluasan jaringan listrik JTR JTM kewenangan PLN	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	1	PAKET	-	-
563	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	BANTUAN BIBIT BABI PEDAGING/BABI BALI (100 EKOR), UNTUK MASYARAKAT DESA KAYU BULAN, KEC KAPUAS TENGAH, KAB KAPUAS	DESA KAYU BULAN, KEC KAPUAS TENGAH, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
564	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	BANTUAN PENGOLAHAN LAHAN DAN BIBIT SAWIT (50ha) UNTUK GAPOKTAN SIDOREJO TERPADU, DESA SIDOREJO, KEC. TAMBAN CATUR, KAB. KAPUAS	GAPOKTAN SIDOREJO TERPADU, DESA SIDOREJO, KEC. TAMBAN CATUR, KAB. KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	10.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anak-anak
565	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	BANTUAN TERNAK SAPI UNTUK GAPOKTAN SIDOREJO TERPADU, DESA SIDOREJO, KEC. TAMBAN CATUR, KAB KAPUAS	GAPOKTAN SIDOREJO TERPADU, DESA SIDOREJO, KEC. TAMBAN CATUR, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
566	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	BANTUAN BIBIT TERNAK AYAM KAMPUNG UNTUK GAPOKTAN SIDOREJO TERPADU, DESA SIDOREJO, KEC. TAMBAN CATUR, KAB KAPUAS	GAPOKTAN SIDOREJO TERPADU, DESA SIDOREJO, KEC. TAMBAN CATUR, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
567	H. JUBAIR ARIFIN	bantuan untuk kelompok usaha bersama nelayan BERKAT USAHA	Kelurahan kumai hulu kec kumai, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomdir, anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	20.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
568	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	SEMENISASI JALAN DESA SAKA TAMIANG, DESA SAKA TAMIANG, KEC. KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS (PANJANG 300M, LEBAR 3M)	DESA SAKA TAMIANG, DESA SAKA TAMIANG, KEC. KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
569	H. JIMMY CARTER	Rusaknya bangunan Rumah Ibadah, maka membuat permohonan bantuan dana untuk rehab total masjid	Desa Trahean Kec Tewehe Selatan Kab Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak		disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	ditolak, bukan kewenangan (diteruskan ke Biro Kesra Prov. Kalteng)	-	90	m2	-	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
570	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	BANTUAN TERNAK BABI, KELOMPOK TANI JURAN MANDIRI, DESA JABIREN, KEC. JABIREN RAYA, KAB. PULANG PISAU	KELOMPOK TANI JURAN MANDIRI, DESA JABIREN, KEC. JABIREN RAYA, KAB. PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
571	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN GEREJA GPDI EKLESIA, DESA TAHAWA, KEC. KAHAYAN TENGAH, KAB PULANG PISAU RP.245.648.640	GEREJA GPDI EKLESIA, DESA TAHAWA, KEC. KAHAYAN TENGAH, KAB PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
572	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN GEREJA GBI DESA ARUK, KEC. TIMPAH, KAB. KAPUAS RP.241.720.000	GEREJA GBI DESA ARUK, KEC. TIMPAH, KAB. KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
573	H. JUBAIR ARIFIN	bantuan mesin diesel 23 PK untuk KUB CAHAYA NURANI desa teluk bogam	desa teluk bogam, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	25.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
574	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN GEREJA KATOLIK SANTO YULIUS, DESA ANJIR KALAMPAN, KEC KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS RP.250.000.000	GEREJA KATOLIK SANTO YULIUS, DESA ANJIR KALAMPAN, KEC KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
575	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN GEREJA DAN PASTORI GKE PAKAT, DESA PATAI, KEC. KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS RP.167.700.000	GKE PAKAT, DESA PATAI, KEC. KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
576	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN GEREJA GPDI EL SHADDAI, DESA PILANG, KEC JABIREN RAYA, KAB PULANG PISAU RP.720.512.000	GPDI EL SHADDAI, DESA PILANG, KEC JABIREN RAYA, KAB PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
577	H. JUBAIR ARIFIN	bantuan mesin perahu nelayan Dong Feng 23 PK untuk KUB KUBU LESTARI	desa kubu kecamatan kumai , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	30.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
578	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	REHABILITASI GEREJA GKE DESA PILANG, KEC JABIREN RAYA, KAB PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah RP.122.500.000	GKE DESA PILANG, KEC JABIREN RAYA, KAB PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
579	H. JUBAIR ARIFIN	bantuan untuk kelompok usaha bersama nelayan BINTANG JAYA kel kumai hulu	kel kumai hulu kec kumai , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	15.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
580	H. JUBAIR ARIFIN	bantuan bantuan jaring rajungan untuk KUB NELAYAN PANTAI SEJAHTERA desa teluk bogam	desa teluk bogam , kec kumai , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	15.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
581	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN GEREJA GPDI VICTORY, DESA PUJON, KEC.KAPUAS TENGAH, KAB KAPUAS RP.337.120.000	GPDI VICTORY, DESA PUJON, KEC.KAPUAS TENGAH, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
582	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN GEREJA GPDI EKKLESIA, DESA TUMBANG SIRAT, KEC. KAPUAS HULU, KAB KAPUAS RP.194.185.000	GPDI EKKLESIA, DESA TUMBANG SIRAT, KEC. KAPUAS HULU, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
583	H. JUBAIR ARIFIN	bantuan dana untuk Sholawatan Majelis Ta'lim NURUS SALAM desa sungai kapitan	jalan pasir Putih RT 10 desa sungai kapitan, kec kumai , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	paket	-	-
584	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN GEREJA GPDI EIRENE, DESA LAWANG URU, KEC. BANAMA TINGANG, KAB PULANG PISAU RP.33.400.000	GPDI EIRENE, DESA LAWANG URU, KEC. BANAMA TINGANG, KAB PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
585	H. JUBAIR ARIFIN	bantuan mesin diesel 23 PK untuk KUB UMBANG LESTARI 02 desa sungai bakau	desa sungai bakau, kec kumai , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	30.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
586	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN GEREJA GBIS BETHESDA, DESA BUNTOI, KEC. KAHAYAN HILIR, KAB PULANG PISAU RP.513.940.000	GBIS BETHESDA, DESA BUNTOI, KEC. KAHAYAN HILIR, KAB PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
587	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN GEREJA GSJA ANUGERAH TRANS LUNGKUH LAYANG, KEC. TIMPAH, KAB KAPUAS RP.62.850.000	GSJA ANUGERAH TRANS LUNGKUH LAYANG, KEC. TIMPAH, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
588	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN MASJID AL KAUSAR, DESA SAKA TAMING, KEC. KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS RP.102.000.000	MASJID AL SAKA TAMING, KEC. KAPUAS BARAT, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
589	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	REHABILITASI MASJID JAMI NURUL IMAN, DESA PETAK PUTI, KEC TIMPAH, KAB KAPUAS RP.231.900.000	MASJID JAMI NURUL IMAN, DESA PETAK PUTI, KEC TIMPAH, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
590	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	RENOVASI LANGGAR AL IKHLAS, DESA MANTANGAI HILIR, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah RP.123.935.000	LANGGAR AL IKHLAS, DESA MANTANGAI HILIR, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
591	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	REHAB CHRISTIAN CENTER PALANGKA RAYA RP.3.437.500.000	CHRISTIAN CENTER PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	kawasan	3.500.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
592	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	SARPRAS GEREJA GPT KRISTUS PENEBUS, BUKIT LITI, KEC. KAHAYAN TENGAH, KAB PULANG PISAU RP.118.325.000	GEREJA GPT KRISTUS PENEBUS, BUKIT LITI, KEC. KAHAYAN TENGAH, KAB PULANG PISAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
593	Drs. YOHANES F. ERING, M.Si	PEMBANGUNAN BALE BANJAR PURA PUSEH BANJAR JAYA SARI, DESA TERUSAN MAKMUR, KEC, BATAGUH, KAB KAPUAS RP.228.000.000	BALE BANJAR PURA PUSEH BANJAR JAYA SARI, DESA TERUSAN MAKMUR, KEC, BATAGUH, KAB KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
594	SUWARNO, SE	PENGADAAN HANDTRACKTOR UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN	SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan d disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal d dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	350.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
595	SUWARNO, SE	PENGADAAN JONDER UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN	KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan d disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir masuk pada sub kegiatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian. Data dukung proposal d dilengkapi lebih mendetail/spesifik,se rta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	250.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
596	SUWARNO, SE	PENGADAAN KOMBEN UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN	KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan d disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal d dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	250.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
597	SUWARNO, SE	PENGADAAN ALAT SEMPROT HAMA ELEKTRIK UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN	UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan d disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal d dilengkapi lebih mendetail/spesifik,ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	250.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
598	SUWARNO, SE	PENGADAAN MESIN TEBAS KELOMPOK TANI DI SERUYAN	KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	250.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
599	SUWARNO, SE	PENGADAAN BIBIT AYAM, PAKAN DAN KANDANG UNTUK KELOMPOK TANI SERUYAN	KELOMPOK TANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	500.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
600	SUWARNO, SE	PENGADAAN BIBIT KAMBING UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN	KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
601	SUWARNO, SE	PENGADAAN BIBIT SAPI UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN	KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKAN	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
602	SUWARNO, SE	PENGADAAN BIBIT KELAPA PANDA WANGI UNTUK KELOMPOK SERUYAN	KELOMPOK SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	10.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
603	SUWARNO, SE	PENGADAAN BIBIT KELAPA KOPYOR UNTUK KELOMPOK TANI SERUYAN	KELOMPOK TANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	10.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
604	SUWARNO, SE	PENGADAAN PROFIL AIR 1100 LITER UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN	KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	Dikembalikan	1. Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan	disetujui	Lengkapi data dukung	Usulan Tidak spesifik untuk Dinas Perkebunan	-	1	PAKET	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
605	SUWARNO, SE	PENGADAAN BIBIT IKAN PATIN, NILA, BAWAL, GURAMI DAN PAKAN UNTUK KELOMPOK TANI DI SERUYAN	KELOMPOK TANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	25.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
606	SUWARNO, SE	PENGADAAN REMPA KENTONG 2,5 INCHI	SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	15.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
607	SUWARNO, SE	SIRING JALAN BETON DAN JEMBATAN SUNGAI MITAK DESA PERSIL RAYA, KEC. SERUYAN HILIR	DESA PERSIL RAYA, KEC. SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	dialihkan	-	-	PAKET	-	Rehabilitasi Jalan
608	SUWARNO, SE	SIRING JALAN BETON DESA TANJUNG RANGAS KECAMATAN SERUYAN HILIR	DESA TANJUNG RANGAS KECAMATAN SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	PAKET	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
609	SUWARNO, SE	SIRING JALAN BETON DESA MUARA DUA KECAMATAN SERUYAN HILIR	DESA MUARA DUA KECAMATAN SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
610	SUWARNO, SE	SIRING JALAN BETON DUSUN TAMPUDAU DESA MUARA DUA KECAMATAN SERUYAN HILIR	DUSUN TAMPUDAU DESA MUARA DUA KECAMATAN SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
611	SUWARNO, SE	SIRING JALAN BETON DESA PAREN KECAMATAN DANAU SAMBULUH	DESA PAREN KECAMATAN DANAU SAMBULUH, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
612	SUWARNO, SE	PEMBUATAN SIRING JALAN BETON DUSUN BELANTI, DESA MUARA BELANTI, DESA MUARA DUA, KEC. SERUYAN HILIR	DUSUN BELANTI, DESA MUARA DUA, KEC. SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
613	SUWARNO, SE	SIRING JALAN BETON DESA TANJUNG HANAU KECAMATAN HANAU	DESA TANJUNG HANAU KECAMATAN HANAU, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
614	SUWARNO, SE	CUCI PARIT PDAM DESA PEMATANG LIMA KECAMATAN SERUYAN HILIR	DESA PEMATANG LIMA KECAMATAN SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
615	SUWARNO, SE	CUCI PARIT DESA TANJUNG RANGAS KECAMATAN SERUYAN HILIR	DESA TANJUNG RANGAS KECAMATAN SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
616	SUWARNO, SE	JALAN SEMENISASI DESA PELINGKAU KE DESA ULAK BATU KECAMATAN DANAU SEMBULU	DESA PELINGKAU KE DESA ULAK BATU KECAMATAN DANAU SEMBULU, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	null	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	-	PAKET	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
617	SUWARNO, SE	PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN MAKMUR DESA PEMATANG LIMA KECAMATAN , SERUYAN HILIR	DESA PEMATANG LIMA KECAMATAN , SERUYAN HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
618	SUWARNO, SE	MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MASJID SMAN 1 KUALA PEMBUANG	MASJID SMAN 1 KUALA PEMBUANG, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak		disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Ditolak, bukan kewenangan (diteruskan ke Biro Kesra Prov. Kalteng)	-	1	PAKET	-	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
619	SUWARNO, SE	PEMBANGUNAN MASJID DI DESA ULAK BATU KECAMATAN DANAU SEMBULUH	DESA ULAK BATU KECAMATAN DANAU SEMBULUH, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	-	-	1	PAKET	-	-
620	SUWARNO, SE	PENGADAAN MESIN POMPA SEDOT AIR PERIKANAN	KELOMPOK TANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik, ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	25.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
621	SUWARNO, SE	PENGADAAN GILL NET 2-3 INCHI PERIKANAN MEREK ARIDA	KELOMPOK PETANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik, ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	20.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
622	SUWARNO, SE	PENGADAAN NET MILENIUM 4 INCHI PERIKANAN	KELOMPOK PETANI DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik, ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	20.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
623	SUWARNO, SE	JARING IKAN 2,5 INCHI MEREK ARIDA	KELOMPOK SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik, ser ta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	25.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
624	SUWARNO, SE	PENGADAAN MESIN POMPA SEDOT LUMPUR	SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak		disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	ditolak, bukan kewenangan (diteruskan ke Pemerintah Kabupaten setempat)	-	1	PAKET	-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
625	SUWARNO, SE	MESIN MEREK LONCHIN 10 HP REDAKSI	NELAYAN SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomudir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	40.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
626	SUWARNO, SE	KAIN TROLL	MASYARAKAT SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomudir masuk pada sub kegiatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian. Data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	100.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
627	SUWARNO, SE	MESIN SEMPROT HAMA ELEKTRIK	KELOMPOK PETANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomudir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	-	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
628	SUWARNO, SE	PENGADAAN PUPUK NPK 16 16	PETANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomudir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
629	dr. NIKSEN S. BAHAT	BANTUAN AMBULANCE JENAZAH, KEL BRIMBA, KEC KAPUAS HILIR, KAB KAPUAS (250 JT)	KEL BRIMBA, KEC KAPUAS HILIR, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan	Dikembalikan	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Mohon untuk dilengkapi surat proposalnya	-	1	PAKET	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
630	dr. NIKSEN S. BAHAT	BANTUAN PEMBANGUNAN GEREJA GKE HOSANA DS.SEI KAPAR KEC MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS (100 JT)	GEREJA GKE HOSANA DS.SEI KEC MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
631	dr. NIKSEN S. BAHAT	BANTUAN SUMUR BOR 10 UNIT UNTUK RT 01 - RT 010 KELURAHAN PALINGKAU LAMA KEC KAPUAS MURUNG KAB KAPUAS , Provinsi Kalimantan Tengah (500 JT)	RT 01 - RT 010 KELURAHAN PALINGKAU LAMA KEC KAPUAS MURUNG KAB KAPUAS , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak		disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengka\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	ditolak, bukan kewenangan	-	1	PAKET	-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
632	dr. NIKSEN S. BAHAT	PEMBUATAN LAPANGAN FUTSAL SEKOLAH SMAN-1 KAPUAS HILIR KEC KAPUAS HILIR KAB KAPUAS	SMAN-1 KAPUAS HILIR KEC KAPUAS HILIR KAB KAPUAS , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran dan Kewenangan	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan sumber dana yang tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	PAKET	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
633	dr. NIKSEN S. BAHAT	BANTUAN PEMBANGUNAN GEREJA GKE BARIMBA KEC. KAPUAS HILIR, KABUPATEN KAPUAS (100 JT)	GKE BARIMBA KEC. KAPUAS HILIR, KABUPATEN KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
634	dr. NIKSEN S. BAHAT	BANTUAN PEMBANGUNAN MESJID NOR SADIQIN DS SAKA TAMIANG KEC KAPUAS BARAT KAB KAPUAS (100 JT)	DS SAKA TAMIANG KEC KAPUAS BARAT KAB KAPUAS , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
635	dr. NIKSEN S. BAHAT	BANTUAN PEMBUATAN PAGAR DAN PENIMBUNAN HALAMAN GEREJA GKE HAMPATUNG JL. HAUSMAN BABOE, HAMPATUNG, KEC. KAPUAS HILIR, KABUPATEN KAPUAS (100 JT)	GKE HAMPATUNG JL. HAUSMAN BABOE, HAMPATUNG, KEC. KAPUAS HILIR, KABUPATEN KAPUAS , Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
636	dr. NIKSEN S. BAHAT	Bantuan unit motor Tossa, Gapoktan HATANTIRING ds. Pulau Telo Baru kec Selat Kab Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah (100 jt)	Gapoktan HATANTIRING ds. Pulau Telo Baru kec Selat Kab Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	100.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
637	H. JIMMY CARTER	Permohonan bantuan bangunan jembatan Sadarong dan Jembatan Barangan di Desa Bintang Ninggi I	Desa Bintang Ninggi I Kec Tewehe Selatan Kab Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	usulan tersebut berada diluar kewenangan dpupr prov kalteng	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	90	Meter	-	-
638	Dra. KUWU SENILAWATI	Optimalisasi Pengaringan Jalan Danau Sari, kelurahan bukit tunggal kec Jekan Raya, kota Palangkaraya	Jalan Danau Sari, kelurahan bukit tunggal kec Jekan Raya, kota Palangkaraya , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	dialihkan	-	-	PAKET	-	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
639	Dra. KUWU SENILAWATI	Penataan Makam Tokoh Dambung Jaya Angin yang berada di Komplek depan Gedung Perkantoran DPRD Provinsi Kalteng; jl S Parman no2 kelurahan langkai kec Pahandut	jl S Parman no2 kelurahan langkai kec Pahandut, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Ditolak	Bukan merupakan prioritas pembangunan TA 2025 dan bukan merupakan kewenangan Provinsi	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Belum menjadi prioritas pembangunan di TA 2025	-	1	PAKET	-	Pelindungan Cagar Budaya
640	Dra. KUWU SENILAWATI	Revitalisasi Betang Toyoi sebagai cagar budaya karena 4 tiang penyangga tdk berfungsi koropos dimakan usia ; alamat desa tumbang Malahoi kecamatan Rungan kab Gumas	Batang Toyoi , DESA TUMBANG MALAHOI, KEC. RUNGAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Ditolak	Belum menjadi prioritas pembangunan di TA 2025, Karena pernah dilakukan Revitalisasi oleh Disbudpar Provinsi pada tahun 2021	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Belum menjadi prioritas pembangunan di TA 2025, Karena pernah dilakukan Revitalisasi oleh Disbudpar Provinsi pada tahun 2021	-	1	PAKET	-	Pengembangan Cagar Budaya

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
641	Dra. KUWU SENILAWATI	HIBAH REHAB GEREJA GKE PARAPAH, JL. GAJAH MADA, KELURAHAN LANGKAI KEC PAHANDUT KOTA PALANGKARAYA	GEREJA GKE PARAPAH, JL. GAJAH MADA, KELURAHAN LANGKAI KEC PAHANDUT KOTA PALANGKARAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
642	Dra. KUWU SENILAWATI	REHAB GEDUNG KANTOR LEMBAGA TANDAK INTAN KAHARINGAN KOMPLEK BALAI KAHARINGAN JL TAMBUN BUNGAI KELURAHAN LANGKAI KEC PAHANDUT KOTA PALANGKARAYA	GEDUNG KANTOR LEMBAGA TANDAK INTAN KAHARINGAN KOMPLEK BALAI KAHARINGAN JL TAMBUN BUNGAI KELURAHAN LANGKAI KEC PAHANDUT KOTA PALANGKARAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
643	Dra. KUWU SENILAWATI	BANTUAN HIBAH REHAB GEREJA GKE IMMANUEL DESA KANDUI, KEC GUNUNG TIMANG BARUT	GEREJA GKE IMMANUEL DESA KANDUI, KEC GUNUNG TIMANG BARUT, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
644	H. SUDARSONO	bantuan alat cetak batako hidrolik	seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ditolak	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	-	1	PAKET	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
645	H. SUDARSONO	Mengembangkan usaha pertukangan masyarakat, seruyan,	SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	Akan di Akomodir menyesuaikan besaran DAK Non Fisik tahun 2025	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir dan menyesuaikan anggaran	1	PAKET	89.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
646	H. SUDARSONO	PENGADAAN BIBIT IKAN NILA DAN PAKAN UNTUK SERUYAN	SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	20.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
647	H. SUDARSONO	PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT UNTUK SERUYAN RP.800.000.	KELOMPOK TANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	1	PAKET	-	-
648	H. SUDARSONO	PENGADAAN BIBIT BUAH BUAHAN, PENGGARAPAN LAHAN, PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN RP.400.000.000	KELOMPOK TANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kehutanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	perlu melengkapi proposal/usulan tertulis ditujukan ke Dinas Kehutanan, memuat data/informasi: calon lahan, status lahan, data kelompok tani, deskripsi kegiatan dan usulan anggaran dan biaya termasuk jenis tanaman yang dikelola	usulan diakomodir, lengkapi proposal dengan menyesuaikan anggaran	1	PAKET	400.000.000	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
649	H. SUDARSONO	PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT RP.800.000.000	PETANI SAWIT SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	10.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
650	H. SUDARSONO	PENGADAAN MESIN JAHIT DAN OBRAS RP.300.000.000	PENJAHIT SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ditolak	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	-	1	PAKET	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
651	H. SUDARSONO	PENGADAAN HANDTRACKTOR RP.500.000.000	PETANI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	500.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
652	FERRY KHAIDIR	Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi listrik dengan memajukan permohonan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH)	Sungai Sekotu, wilayah Desa Tumbang Kasai, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ditolak	pembangunan/perluasan jaringan listrik JTR JTM kewenangan PLN	disetujui	Lengkapi data dukung	-	-	1	UNIT	-	-
653	H. SUDARSONO	PENGADAN TERNAK ITIK RP.500.000.000	PETERNAK ITIK SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	500.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
654	H. SUDARSONO	PENGADAAN TERNAK KAMBING UNTUK SERUYAN RP.500.000.000	PETERNAK KAMBING SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	500.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
655	H. SUDARSONO	PENGADAAN TERNAK KAMBING UNTUK KAB KOTIM RP.500.000.000	PETERNAK KAMBING KAB KOTIM, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	500.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
656	H. SUDARSONO	PENGADAAN TERNAK ITIK KAB SERUYAN RP.250.000.000.	PETERNAK ITIK KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	250.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
657	H. SUDARSONO	PENGADAAN TERNAK ITIK UNTUK KAB KOTIM RP.250.000.000	PETERNAK ITIK KAB KOTIM, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomdir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	250.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
658	H. SUDARSONO	PENGADAAN BIOFLOK BIBIT IKAN DAN PAKAN KAB SERUYAN RP.200.000.000	PETANI IKAN DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	30.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
659	H. SUDARSONO	PENGADAAN BIOFLOK BIBIT IKAN DAN PAKAN UNTUK KAB KOTIM RP.200.000.000	PETANI IKAN DI KAB KOTIM, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	30.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
660	H. SUDARSONO	PENGADAAN MESIN CES 6,5 HI UNTUK KAB SERUYAN RP.200.000.000	NELAYAN SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomdir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	40.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
661	H. SUDARSONO	PENGADAAN BIBIT IKAN NILA DAN PAKAN UNTUK KAB SERUYAN RP.200.000.000	PETANI IKAN SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	20.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
662	H. SUDARSONO	PENGADAAN MESIN CETAK BATAKO HYDROLIK UNTUK KAB SERUYAN RP.400.000.000	PEMUDA SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ditolak	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	disetujui	Lengkapi data dukung	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	-	1	PAKET	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
663	H. SUDARSONO	PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN KAYU UNTUK KAB SERUYAN RP.200.000.000	TUKANG DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ditolak	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	-	1	PAKET	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
664	H. SUDARSONO	PENGADAAN ALAT KANGEN WATER UNTUK SERUYAN RP. 200.000.000	KELOMPOK PEMUDA KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ditolak	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	-	1	PAKET	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
665	H. SUDARSONO	PENGADAAN ALAT PERBENGKELAN SEPEDA MOTOR DI SERUYAN RP.150.000.000	MONTIR SEPEDA MOTOR SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ditolak	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	disetujui	Lengkapi data dukung	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	-	1	PAKET	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
666	H. SUDARSONO	PENGADAAN LISTRIK TENAGA SURYA UNTUK KELOMPOK KANDANG AYAM DI SERUYAN RP.200.000.000	KEOMPOK KANDANG AYAM DI SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
667	FERRY KHAIDIR	Desa Tabiku Kecamatan Seruyan Raya Menyampaikan Permohonan Peningkatan Infrastruktur Jalan Di wilayah desa tersebut berupa semenisasi	Desa Tabiku, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Peningkatan Infrastruktur Jalan Di wilayah desa tersebut berupa semenisasi	disetujui	Lengkapi data dukung	-	-	1500	M	-	-
668	H. SUDARSONO	SEMENISASI DAN ASPAL JALAN LINGKUNGAN DI JL. GRIYA PRIMA PEMBUANG HULU I, KEC. HANAU, KEB SERUYAN. PANJANG 300M, LEBAR 5 M, RP. 700.000.000	JL. GRIYA PRIMA PEMBUANG HULU I, KEC. HANAU, KEB SERUYAN., Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
669	H. SUDARSONO	PEMBANGUNAN RKB SMK MIFTAHULSALAM, DESA PAREN, KEC. DANAU SEMBULUH, KAB SERUYAN. RP. 400.000.000	SMK MIFTAHULSALAM, DESA PAREN, KEC. DANAU SEMBULUH, KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	PAKET	400.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
670	H. SUDARSONO	PEMBANGUNAN RKB SMK MIFTAHULSALAM, DESA TUMBANG DARAF, KEC. SERUYAN HUL. KAB SERUYAN RP.425.000.000	SMK MIFTAHULSALAM, DESA TUMBANG DARAF, KEC. SERUYAN HUL. KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Agar di cek kembali karena nama SMK sama dengan usulan ID 940280, namun lokasi desa berbeda	1	PAKET	450.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru
671	H. SUDARSONO	PEMBANGUNAN PAGAR/TEMBOK BELAKANG DAN SAMPING SMK MIFTAHULSSALAM, PEMBUNAG HULU, KAB SERUYAN. PANJANG 220M. RP. 440.000.000	SMK MIFTAHULSSALAM, PEMBUNAG HULU, KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	PAKET	450.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
672	H. SUDARSONO	PENGADAAN PERLENGKAPAN SOFTBALL DAN BASEBALL UNTUK PERBASASI KALTENG RP.1.000.000.000	PERBASASI KALTENG, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan Anggaran	Dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Organisasi	25.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
673	H. SUDARSONO	BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN MUSHOLA HJ.MASNI AHMAD, JL NURHIDAYAH (PERUM GRIYA PERMAI), PEMBUANG HULU I, KEC. HANAU, SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	MUSHOLA HJ.MASNI AHMAD, JL NURHIDAYAH (PERUM GRIYA PERMAI), PEMBUANG HULU I, KEC. HANAU, SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
674	SENGKON, SE	JALAN KELOMPOK TANI TUMBANG MIWAN, GUNUNG MAS RP.220.000.000	TUMBANG MIWAN, GUNUNG MAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
675	SENGKON, SE	JALAN KELOMPOK TANI KABUPATEN KATINGAN RP.220.000.000	JALAN KELOMPOK TANI KABUPATEN KATINGAN , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
676	SENGKON, SE	DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA TEWANG MANYANGEN RP.200.000.000	DES A TEWANG MANYANGEN , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perhubungan	Ditolak	Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas	-	1	paket	-	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
677	SENGKON, SE	DERMAGA FERI PENYEBERANGAN DESA GERAGU TUMBANG TUNGKU, KATINGAN RP.220.000.000	DES A GERAGU TUMBANG TUNGKU, KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perhubungan	Ditolak	Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas	-	1	PAKET	-	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
678	SENGKON, SE	DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA TEWANG DERAYU-TEWANG PAJARI, KAB KATINGAN RP.220.000.000	DES A TEWANG DERAYU-TEWANG PAJARI, KAB KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perhubungan	Ditolak	Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas	-	1	PAKET	-	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
679	SENGKON, SE	PENGADAAN BIBIT SAPI UNTUK KELOMPOK TANI DESA TEWANG MANYANGEN, KAB KATINGAN RP.220.000.000	KELOMPOK TANI DESA TEWANG MANYANGEN, KAB KATINGAN , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomdir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	220.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
680	SENGKON, SE	PENGADAAN MESIN ISI ULANG AIR MUNUM DI DESA SAMBA DANUM, KAB KATINGAN RP.150.000.000	DESA SAMBA DANUM, KAB KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ditolak	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	-	1	PAKET	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
681	SENGKON, SE	RANOVASI GEREJA GKE TUMBANG MIWAN RP.200.000.000	GKE TUMBANG MIWAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
682	SENGKON, SE	RENOVASI MASJID AL QOMAR, DESA TUMBANG BULAN, KAB KATINGAN RP.200.000.000	MASJID AL QOMAR, DESA TUMBANG BULAN, KAB KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur KalTeng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
683	SENGKON, SE	PENGADAAN BIBIT KAMBING KELOMPOK TANI SAMBA BAKUMPAL, KAB KATINGAN RP.200.000.000	KELOMPOK TANI SAMBA BAKUMPAL, KAB KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
684	SENGKON, SE	DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DESA HAMPALAM-T. BARINGIN, KAB KATINGAN RP.220.000.000	DESA HAMPALAM-T. BARINGIN, KAB KATINGAN , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	PAKET	220.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
685	SENGKON, SE	PENGADAAN MESIN ISI ULANG AIR MINUM UNTUK KAB GUNUNG MAS RP.150.000.000	PEMUDA KAB GUNUNG MAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ditolak	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	disetujui	Lengkapi data dukung : Proposal	Tidak di Akomodir karena bukan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permenkop 13 Tahun 2016 melaikan Kewenangan Kab/Kota Utk Usaha Mikro	-	1	PAKET	-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerintahan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
686	SENGKON, SE	PENGADAAN BIBIT BABI UNTUK KAB GUNUNG MAS RP.200.000.000	PETERNAK BABI KAB GUNUNG MAS, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
687	SENGKON, SE	PEMBUATAN KANDANG SAPI DI TUMBANG SAMBA BAKUMPAI, KAB KATINGAN RP.200.000.000	UMBANG SAMBA BAKUMPAI, KAB KATINGAN , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PALET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
688	SENGKON, SE	BANTUAN GEREJA KAHANJAK, KOTA PALANGKA RAYA RP.200.000.000	GEREJA KAHANJAK, PALANGKA RAYA, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	PAKET	-	-
689	SENGKON, SE	DERMAGA PERI PENYEBERANGAN DI DESA DEHES, KAB KATINGAN RP.220.000.000	DESA DEHES, KAB KATINGAN , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perhubungan	Ditolak	Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas	disetujui	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, Sesuaikan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Usulan untuk dapat dilengkapi dengan data dukung dalam pemenuhan readiness criteria dan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas	-	1	PAKET	-	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHI	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
690	SENGKON, SE	PENGADAAN BIBIT SAPI UNTUK DESA TEWANG MANYANGEN, KAB KATINGAN RP.220.000.000	KELOMPOK TANI DESA TEWANG MANYANGEN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	220.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
691	SENGKON, SE	PENGADAAN BIBIT BABI UNTUK DESA PETAK PUTI, KAB KATINGAN RP.200.000.000	DESA PETAK PUTI, KAB KATINGAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
692	WIYATNO., S.P	Alih fungsi lahan pertanian tradisional/rakyat menjadi perkebun	jl. diponegoro, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Lahan	10.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anak-anak
693	WIYATNO., S.P	rehabilitasi saluran Rp. 5.000.000.000	Kecamatan Pandih Batu, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	dialihkan	-	-	Paket	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
694	WIYATNO., S.P	rehabilitasi saluran Rp. 5.000.000.000	Kecamatan Mantangai, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	dialihkan	-	-	Paket	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
695	WIYATNO., S.P	Peningkatan jalan menuju pemakaman Rp. 2.500.000.000	Kecamatan Basarang, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	Paket	-	-
696	WIYATNO., S.P	rehabilitasi saluran Rp. 5.000.000.000	Kecamatan Tamban Catur, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	dialihkan	-	-	Paket	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
697	WIYATNO., S.P	Peningkatan Jalan Rp. 5.000.000.000	Desa Mulyasari Kecamatan Pandih Batu, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	Paket	-	-
698	WIYATNO., S.P	rehabilitasi saluran Rp. 5.000.000.000	Kecamatan Maliku, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	dialihkan	-	-	Paket	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
699	H. SUDARSONO	PENGADAAN TERNAK KAMBING UNTUK SERUYAN RP.1.000.000.000	PETERNAK KAMBING DI KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	1.000.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
700	WIYATNO., S.P	rehabilitasi saluran Rp. 5.000.000.000	Kecamatan Kapuas Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	dialihkan	-	-	Paket	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
701	H. SUDARSONO	PENGADAAN TERNAK ITIK KAB SERUYAN RP.500.000.000	PETERNAK ITIK DI KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	500.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
702	H. SUDARSONO	PENGADAAN BIOFLOK BIBIT IKAN DAN PAKAN KAB SERUYAN RP.400.000.000	KELOMPOK TANI IKAN DI KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi dan lainnya lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	30.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
703	H. SUDARSONO	PENGADAAN BIBIT TERNAK SAPI UNTUK KELOMPOK TANI DI KAB SERUYAN RP.2.000.000.000	KELOMPOK PETERNAK SAPI DI KAB SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan, dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	PAKET	2.000.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
704	TOMY IRAWAN DIRAN, SE	Peningkatan Semenisasi Jalan Doris Silvanus di RT. 04 Sepanjang 0,20 x 4,00 x 200 Meter dan Pembuatan Box Culvert Type 2 x 2 x 6	Jalan Doris Silvanus di RT. 04 Desa Maliku Baru, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI (Proposal tersedia)	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
705	SISWANDI	tidak akses jalan menuju perkebunan	Kelurahan jingah, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	24000	M2	-	-
706	SISWANDI	perlu alat mekanis	kelurahan jningah, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	1	unit	-	-
707	TOGA HAMONANGAN NADA EK, S.H., M.H	UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA DENGAN BETERNAK BABI	DESA TUMBANG KOLING, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	500	juta rupiah	-	-
708	H. ACHMAD RASYID	Perlunya Peningkatan jalan pemukiman di Kabupaten Barito Selatan, Rp.1.500.000.000,-	buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	2	km	-	-
709	TOGA HAMONANGAN NADA EK, S.H., M.H	KURANG LAYAKNYA DAN MEMBAHAYAKAN GEREJA NAFIRI SUKAMANDANG UNTUK BERIBADAH KARENA SUDAH LAPUK DAN TIDAK MEMADAI KAPASITASNYA	DESA SUKAMANDANG, KECAMATAN SERUYAN TENGAH, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	250	juta rupiah	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
710	TOGA HAMONANGAN NADA EK, S.H., M.H	ADANYA KELOMPOK TANI KOLING MAKMUR DI DESA TUMBANG KOLING YANG BERGERAK DI PETERNAKAN SAPI YANG INFRASTRUKTURNYA KURANG MEMADAI SEPERTI PAGAR BERDURI DAN SUMUR AIR KARENA DIBUTUHKAN SAAT MUSIM KEMARAU, DAN MESIN PENCACAH YANG BISA MENCACAH APA SAJA UNTUK DIJADIKAN ALTERNATIF PAKAN	DESA TUMBANG KOLING, KECAMATAN CEMPAGAN HULU, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	500	juta rupiah	-	-
711	TOGA HAMONANGAN NADA EK, S.H., M.H	KURANGNYA LAMPU JALAN DI DESA SEBAGAI PENERANG JALAN YANG RAWAN AKAN KECELAKAAN DI SETIAP PEREMPATAN JALAN JADI DIPERLUKAN LAMPU PENERANG JALAN BIOSURYA YANG HEMAT ENERGI	DESA SUKAMAJU, KECAMATAN SERUYAN TENGAH, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	6	BLU	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
712	TOGA HAMONANGA N NADA EK, S.H., M.H	KURANGNYA LAMPU JALAN DI DESA SEBAGAI PENERANG JALAN YANG RAWAN AKAN KECELAKAAN DI SETIAP PEREMPATAN JALAN JADI DIPERLUKAN LAMPU PENERANG JALAN BIOSURYA YANG HEMAT ENERGI	DESA BUMIJAYA, KECAMATAN SERUYAN TENGAH, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	4	BLJI	-	-
713	TOGA HAMONANGA N NADA EK, S.H., M.H	UNTUK MENINGKATKAN TARAF EKONOMI MELALUI BETERNAK SAPI MASYARAKAT DESA	DESA CAMBA, KECAMATAN KOTA BESI, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	250	juta rupiah	-	-
714	TOGA HAMONANGA N NADA EK, S.H., M.H	AKSES JALAN KELOMPOK TANI YANG KURANG MENDUKUNG UNTUK KEGIATAN BERTANI JADI PERLU DIPERBAKI DAN DITINGKATKAN	DESA CAMBA, KECAMATAN KOTA BESI, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	100	juta rupiah	-	-
715	H. MARUADI, SH., S.Sos	semenisasi jalan desa RT1 - RT 3 desa henda	desa henda kec jabiren, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
716	H. MARUADI, SH., S.Sos	bantuan semenisasi pelebaran jalan desa Garantung kec maliku	desa garantung, kec maliku, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
717	H. MARUADI, SH., S.Sos	semenisasi jalan usaha tani jalan karet desa talio	desa talio kec pandih batu, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
718	H. MARUADI, SH., S.Sos	bantuan semenisasi jalan banuang panjang desa manen paduran	desa manen paduran kec banama tingang, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
719	H. MARUADI, SH., S.Sos	bantuan semenisasi jalan permukiman rey 8-rey 14 dusun sidodadi desa tahai jaya kec maliku	dusun sidodadi desa tahai jaya kec maliku, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
720	H. MARUADI, SH., S.Sos	bantuan semenisasi jalan baru dan jembatan RT 11 kelurahan pulang pisau	kelurahan pulang pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
721	H. MARUADI, SH., S.Sos	bantuan semenisasi jalan permukiman TKBM komp buruh RT 11	kelurahan pulang pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
722	H. MARUADI, SH., S.Sos	bantuan semenisasi jalan lingkungan kmplek pulang pisau permai	komplek pulang pisau permai kelurahan pulang pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
723	H. MARUADI, SH., S.Sos	bantuan semenisasi gang sepakat RT. 12 kel pulang pisau	gang sepakat RT 12 kel pulang pisau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
724	H. JIMMY CARTER	kurang layak nya rumah ibadah atau Mushola Baitush Sholihin di Desa Trahean, maka membuat permohonan bantuan dana untuk perbaikan Mushola	Desa Trahean Kec Tewe Selatan Kab Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkao\pan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	ditolak, bukan kewenangan (diteruskan ke Biro Kesra Prov. Kalteng)	-	1	bantuan	-	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
725	H. MARUADI, SH., S.Sos	bantuan semenisasi Jalan Gg Abraham RT 12 kel pulang pisau	jalan Gg Abraham RT 12 kel pulang Pisau , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
726	H. JIMMY CARTER	belum adanya adana untuk mengadakan kegiatan Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama Tehew Selatan, maka membuat permohonan bantuan dana untuk mengadakan kegiatan tersebut	Kecamatan Tehew Selatan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	bantuan	-	-
727	H. MARUADI, SH., S.Sos	bantuan semenisasi jalan serumpun desa bahaur tengah	desa bahaur tengah kec kahayan kuala , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
728	H. JIMMY CARTER	belum adanya jalan yang layak untuk usaha tani, maka membuat permohonan bantuan pembuatan jalan rt.001 rw.001 Desa Trahean	jl. usaha tani rt.001 rw.001 Desa Trahean Kec.Tehew Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
729	FERRY KHAIDIR	terdapat Permasalahan Kekurangan Alsintan di Kabupaten Seruyan, sehingga menjadi kendala petani dalam melakukan kegiatan pertanian sehingga kelompok masyarakat tani Rembang Lestari mengajukan permohonan hibah Mesin Panen Padi Combine Harvester DC-93 Kubota	Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	500.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
730	FERRY KHAIDIR	Petani di Kabupaten Seruyan masih memerlukan pengadaan alsintan untuk menunjang kegiatan pertanian dan alat yang diusulkan adalah Mesin Tractor Roda 4 Jhonder	Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	disetujui	Lengkapi data dukung	Diakomodir, volume dan anggaran akan disesuaikan , dengan catatan melampirkan file proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	4	UNIT	1.000.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
731	H. JIMMY CARTER	keadaan sungai yang memprihatinkan berpotensi banjir, maka membuat permohonan bantuan pembersihan sungai di RT.005 sampai dg Rt.009 di Desa Trahean	DEsa Trahean Kec Tewe Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Lingkungan Hidup	Ditolak	Belum tersedianya anggaran dan kegiatan untuk pembersihan sungai	disetujui	Lengkapi data dukung	-	-	1	bantuan	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
732	H. JIMMY CARTER	belum adanya akses jembatan untuk warga sekitar, maka membuat permohonan pembuatan jembatan baru (kerangka baja beton) dan turap jalan di jalan arah pemukiman Rt.006 Rw.002 Desa Trahaen	Desa Trahaen Kec Tewe Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	bantuan	-	-
733	H. JIMMY CARTER	belum selesainya jalan swadaya, maka membuat permohonan bantuan untuk pembangunan rabat beton di jalan swadaya Rt.002 sampai dengan Rt.003 di Desa Trahaen	jalan Swadaya Desa Trahaen Kec Tewe Selatan Kab Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
734	H. JIMMY CARTER	belum lengkapnya sarana dan prasarana Masjid Baitil Atiq, maka membuat permohonan bantuan dana untuk pembuatan falapon, perakitan instalasi listrik, dan pembelian karpet dan ac	Jln. Wira Praja Muara Tewe, Provinsi Kalimantan Tengah	-	Validasi Mitra Bappeda	-	disetujui	-	-	-	1	bantuan	-	-
735	H. JIMMY CARTER	belum selesainya pembangunan Masjid Baitul Mutaqin Desa Sei Liju, maka membuat permohonan bantuan dana untuk pembangunan Masjid tersebut	Jl.K.H Hasan Basri Rt.03/01 Desa Sei Liju, Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Ditolak	Sesuai dengan Pergub No. 42 Tahun 2021, bahwa usulan disampaikan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Kalteng Up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	1	bantuan	-	-

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
736	H. JIMMY CARTER	Kurangnya dana untuk mengadakan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan, maka pengurus cabang korwil IMI Barut membuat permohonan bantuan dana hibah untuk bisa terlaksananya kegiatan dan program tersebut, adapun dana yang dibutuhkan sebanyak Rp.650.000.000,- rincian terlampir di proposal	Jl.Pendreh (Depan Bidan Leni) Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	disetujui	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Hibah dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Organisasi	25.000.000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
737	H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH	LANJUTAN PENIMBUNAN JALAN DESA SAMBA BAKUMPAI	JALAN DESA SAMBA BAKUMPAI, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	-	PAKET	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
738	H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH	Jalan permukiman desa camba Kec. Kota besi	desa camba Kec. Kota besi, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
739	H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH	Jalan desa kandan	DESA KANDAN, KAB KOTIM, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	PD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
740	H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH	Jl. Hiu Putih XVII Palangka Raya	Jl. Hiu Putih XVII Palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
741	H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH	Jl. Hiu Putih Raya (RT. 12, RT13) Palangka Raya	Jl. Hiu Putih Raya (RT. 12, RT13) Palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
742	H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH	Pembangunan Gg Bima Kota palangka Raya	Gg Bima Kota palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	PAKET	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
743	H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH	Pembangunan jalan Bukit sepan RT. 04/RW.XIII Jekan Raya	Jalan Bukit sepan RT. 04/RW.XIII Jekan Raya , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
744	H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH	Rehab Jembatan patake, Kecamatan Montalat	Rehab Jembatan patake, Kecamatan Montalat , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak	sudah di tangani pada TA 2024	disetujui	sesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kelengkapan data dukung usulan, sesuaikan dengan prioritas	-	-	1	PAKET	-	-
745	H. M.SRIOSAKO, S.Sos, MH	LANJUTAN PENIMBUNAN JALAN DESA SAMBA BAKUMPA	JALAN DESA SAMBA BAKUMPA, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	disetujui	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	PAKET	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman



4.6. USULAN KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TENGAH

Dalam mendukung tahapan perencanaan berupa *bottom-up*, Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan slot untuk usulan kabupaten/kota se Kalimantan Tengah dalam mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut rincian usulan kabupaten/kota yang telah disetujui yang tercantum pada tabel sesuai tabel 4.24 dibawah ini.

TABEL 4.24
USULAN KEGIATAN KABUPATEN/KOTA
PADA RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	12-02-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Jalan Rusak	Kab. Pulang Pisau	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13-02-2024	Matias Sandi	Kelurahan / Desa	Perlunya Rabat Beton Jalan masuk SMK kurang lebih 200 Meter, karena pada saat Musim penghujan jalan masuk SMK Licin sehingga sering terjadi yang menyebabkan kecelakaan	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Dikembalikan	Kewenangan pembangunan jalan yang berada di luar lingkungan sekolah berada pada Dinas PUPR	1. Perlu ada tambahan data dukung 2. Menyesuaikan kewenangan dan anggaran	-	-	-	-	-	-
3	14-02-2024	Matias Sandi	Kelurahan / Desa	Kurangnya Ruangan Kelas SMKN 1 Belantikan Raya sehingga berdampak terhadap proses belajar mengajar	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung usulan	Bukan wewenang Dinas Kelautan Perikanan	3	Ruang	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
4	14-02-2024	Matias Sandi	Kelurahan / Desa	Perlunya penambahan Ruangan Laboratorium SMKN 1 Belantikan Raya, karena berdampak kurang maksimalnya pembelajaran bagi siswa/siswi SMKN 1 Belantikan Raya	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan	ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung	Bukan wewenang Dinas Kelautan Perikanan	1	Ruang	-	Pembangunan Ruang Laboratorium
5	14-02-2024	Matias Sandi	Kelurahan / Desa	Perlunya penambahan rumah dinas Guru SMKN 1 Belantikan Raya, karena banyak guru yang belum memiliki tempat tinggal	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan	Usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Bukan wewenang Dinas Kelautan Perikanan	2	Ruang	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
6	15-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Listrik 50 KVA/ PLTMH (Rp. 1.750.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi data dukung	1. menyesuaikan anggaran 2. dilengkapi dengan data berupa FS dan DED	Akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan Rentra PD	1	unit	1.750.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
7	15-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Membuat (Rp. 75.000.000,-)	Kab. Seruyan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	20	Orang	-	Perluasan Kesempatan Kerja
8	15-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Pakan Ikan (Rp. 80.000.000,-)	Kab. Seruyan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	20	Orang	-	Perluasan Kesempatan Kerja
9	15-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Anyaman daun purun (Rp. 75.000.000,-)	Kab. Seruyan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	20	Orang	-	Perluasan Kesempatan Kerja
10	15-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Otomotif (Rp. 175.000.000,-)	Kab. Seruyan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	75.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
11	16-02-2024	Frans Aria Mika, S. IP	Kelurahan / Desa	Perlunya Perumahan Penduduk / Bina Desa 85 Unit dalam rangka upaya penambahan penyebaran penduduk	Kab. Lamandau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
12	16-02-2024	Kepala Desa Biwan	Kelurahan / Desa	jembatan sudah tidak layak untuk dilewati mobil pengangkut	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan kegiatan merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-
13	16-02-2024	Kepala Desa Biwan	Kelurahan / Desa	rusaknya jembatan penghubung antar desa	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan kegiatan merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-
14	17-02-2024	DENI,S.Pd	Kelurahan / Desa	Pembangunan Gedung SMA sebanyak 1 Paket	Kab. Kapuas	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Perlu tambahan data dukung (proposai dll)	Terkait Usulan Unit Sekolah Baru memerlukan studi kelayakan dulu.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelavakan	1	unit	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
15	18-02-2024	RUBIE, A.Md. Kep	Kelurahan / Desa	Sarana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 1 paket	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	- Menyesuaikan anggaran - Perlu adanya penjelasan apa jenis sarana yang diusulkan	Pemenuhan Supras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok masyarakat peduli api MPA di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Set	200.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
16	19-02-2024	Kepala Desa Hayaping	Kelurahan / Desa	JALAN PROVINSI DI DESA HAYAPING RUSAK BERAT	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	DISETUJUI DENGAN MENYESUAIKAN ANGGARAN. MELENGKAPI READINESS CRITERIA/DOKUMEN TEKNIS	-	Km	-	Rekonstruksi Jalan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
17	19-02-2024	Kepala Desa Tangkan	Kelurahan / Desa	Titik lokasi rawan Banjir perlu dibangun Drainase sepanjang 200 meter	Kab. Barito Timur	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
18	19-02-2024	Toyong	Kelurahan / Desa	Belum adanya embung air,jalan masuk arah SMK masih licin ketika hujan,tidak ada perumahan guru SMKN,belum adanya wifi untuk penunjang belajar siswa	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Usulan yang disetujui pembangunan rabat beton, untuk usulan lain agar diusulkan secara spesifik berdasarkan uraian masing-masing masalah	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
19	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Lanjutan Peningkatan Jalan Inspeksi DIR. Seruyan I (Tahap II) (Rp. 1.000.000.000)	Kab. Seruyan	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20-02-2024	KASMAT	Kelurahan / Desa	Tidak tersedianya Tower WTS sehingga jaringan internet tidak ada.	Kab. Pulang Pisau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dikembalikan	Usulan dikembalikan karena terkait permasalahan tidak tersedianya tower jaringan komunikasi (BTS) bukan merupakan kewenangan DPMPPTSP Provinsi	1. Bukan Hanya Kewenangan Prov tetapi dpat dilaksanakan oleh Kab/kota 2. Menyesuaikan anggaran	-	-	-	-	-	-
21	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Mesin 25 HP untuk kelompok nelayan laut (Rp. 480.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan data dukung yang lengkap berupa Proposal dan lainnya	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama bukan perorangan)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
22	20-02-2024	KASMAT	Kelurahan / Desa	Gandang Barat sangat memerlukan Air Bersih atau Layak Konsumsi.	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	1.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
23	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR. Seruyan II (Rp. 1.000.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	500	m	1.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
24	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan SPAM IKK Terawan (Rp. 15.000.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Kabupaten	15.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
25	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan SPAM IKK Telaga Pulang (Rp. 15.000.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Kabupaten	15.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
26	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan SPAM IKK Hanau (Rp. 35.000.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Kabupaten	15.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
27	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Lanjutan Peningkatan Jalan Inspeksi DIR. Seruyan I (Tahap II) (Rp. 1.000.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	500	m	10.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
28	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan SPAM IKK Sandul (Rp. 15.000.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Kabupaten	15.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
29	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan SPAM IKK Suling Tambun (Rp. 15.000.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Kabupaten	15.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
30	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jaringan SPAM IKK Suka Jaya (Rp. 5.000.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiapan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Kabupaten	5.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
31	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK Rantau Pulut (Rp. 15.000.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiapan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Kabupaten	15.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
32	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan SPAM IKK Asam Baru (Rp. 15.000.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiapan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Kabupaten	15.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
33	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan SPAM IKK Sembuluh (Rp. 15.000.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiapan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Kabupaten	15.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
34	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan A.Yani Bundaran 1 - Jembatan Keramat Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (Rp. 10.071.733.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Pending dan perlu konfirmasi dari pihak kabupaten untuk status kewenangan jalan.	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
35	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi 100 ekor (Rp. 1.300.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal kegiatan Pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	30	ekor	480.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
36	20-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Kambing PE 150 ekor (Rp. 525.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	150	Ekor	525.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
37	21-02-2024	Kepala Desa Tangkan	Kelurahan / Desa	5 km jalan lintas Provinsi kondisi rusak berat	Kab. Barito Timur	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
38	21-02-2024	Kepala Desa Tangkan	Kelurahan / Desa	Belum adanya tersedia sumur untuk SDN Tangkan	Kab. Barito Timur	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
39	21-02-2024	Kepala Desa Tangkan	Kelurahan / Desa	Perlunya normalisasi sungai awang agar tidak terjadinya pendangkalan dan banjir Sepanjang 1 km	Kab. Barito Timur	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
40	21-02-2024	Kepala Desa Tangkan	Kelurahan / Desa	Perlunya tempat untuk kegiatan adat dan budaya dengan ukuran bangunan 6mx6m	Kab. Barito Timur	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
41	21-02-2024	Kepala Desa Tangkan	Kelurahan / Desa	Perlunya Peningkatan kesejahteraan lembaga Pemerintah Desa	Kab. Barito Timur	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
42	21-02-2024	Kepala Desa Tangkan	Kelurahan / Desa	Perlunya pengadaan pupuk dan herbisida untuk masyarakat	Kab. Barito Timur	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
43	21-02-2024	Kepala Desa Tangkan	Kelurahan / Desa	Pengadaan bibit karet untuk peremajaan bibit karet untuk warga masyarakat	Kab. Barito Timur	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
44	21-02-2024	Kepala Desa Tangkan	Kelurahan / Desa	Postu dalam keadaan rusak berat dan harus segera dilakukan perbaikan agar dapat digunakan untuk pelayan kesehatan secara maksimal	Kab. Barito Timur	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
45	21-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Babi 150 ekor (Rp. 450.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	150	Ekor	450.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
46	22-02-2024	LASARUS WANI	Kelurahan / Desa	Perubahan status kawasan dari hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi khusus menjadi kawasan APL (Area Penggunaan Lainnya) di sekitar Desa Lubuk Hiju yang bisa diakses secara legal oleh masyarakat dan pada akhirnya masyarakat dapat menguasai sepenuhnya tanah terbut	Kab. Lamandau	Dinas Kehutanan	Usulan disetujui	-	1. Menyesuaikan anggaran 2. Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait	1. Penganggaran untuk pengumpulan data/Recek lokasi usulan 2. Perlu kelengkapan dokumen terkait kegiatan yang diusulkan 3. Sumber dana DBH-DR	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	60.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
47	22-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Itik 300 ekor (Rp. 30.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	300	Ekor	30.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
48	22-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Ayam Buras 300 ekor (Rp. 30.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	30	Ekor	30.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
49	22-02-2024	Willem Hengki	Kelurahan / Desa	Pupuk Kebun Sawit 2 Ton, dikarenakan Petani Sawit pemula di Desa Kinipan belum mampu membeli pupuk dalam masa sebelum panen.	Kab. Lamandau	-	Validasi Mitra Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-
50	22-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Obat obatan Ternak 1 Paket (Rp. 150.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	150.000.000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
51	23-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Pematang Limau sebanyak 18 unit (Rp. 360.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	12	unit	360.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
52	23-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Alat dan Bahan Inseminasi Buatan (IB) 3 Paket (Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Disetujui : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e-proposal kementan (Aplikasi Bima)	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	3	Paket	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
53	23-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan N2 Cair 500 Liter (Rp. 32.500.000)	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Disetujui : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e-proposal kementan (Aplikasi Bima)	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	500	liter	32.500.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
54	23-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis (Vaksin Anjing, Kucing Dan Kera 500 Dosis (Rp. 100.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Disetujui : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e-proposal kementan (Aplikasi Bima)	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	500	dosisi	100.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
55	23-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis (Pengadaan Obat-obatan Ternak 1 Paket (Rp. 150.000.000))	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	150.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
56	23-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengobatan Ternak, Pengadaan Obat Obatan Ternak dan Penanggulangan Kesehatan Hewan 1 Paket (Rp. 150.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Disetujui, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	150.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
57	23-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat Hewan (5 unit usaha obat hewan Rp. 75.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e-proposal kementan (Aplikasi Bima)	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	5	UNIT	75.000.000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
58	23-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengawasan dan Penjaminan Hewan dan Produk Hewan serta Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 1 Kegiatan (Rp. 30.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e-proposal kementan (Aplikasi Bima)	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Kegiatan	30.000.000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
59	23-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembinaan Higiene dan Sanitasi Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (7 unit usaha Rp. 70.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e-proposal kementan (Aplikasi Bima)	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	7	UNIT	70.000.000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
60	23-02-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Alat Fogging	Kab. Barito Utara	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	usulan diterima namun 1 kabupaten hanya mendapat 2 mesin fogging dan menyesuaikan dengan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	unit	16.667.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
61	23-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan) 2 kegiatan (Rp. 100.000.000,-)	Kab. Seruyan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Uraian usulan kegiatan dan permasalahan terbalik	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Seruyan, sedangkan penganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
62	23-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Kewirausahaan Perempuan (Menurunnya Indeks Pembangunan Gender) 2 kegiatan (Rp. 150.000.000,-)	Kab. Seruyan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Uraian usulan kegiatan dan permasalahan terbalik	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Seruyan, sedangkan penganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	40.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
63	24-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 25 orang (Rp. 25.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan data dukung yang lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Agar dapat dilengkapi data dukung terkait dengan usulan serta proposal usulan	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Kegiatan	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
64	24-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Sosialisasi Pengetahuan Masyarakat untuk Mengonsumsi Anekaragam Pangan dengan Prinsip Gizi Seimbang 50 orang (Rp. 75.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Agar dapat dilengkapi data dukung dan proposal kegiatan terkait	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Kegiatan	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
65	24-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Keterampilan Dalam Pengembangan Olahan Pangan Lokal 2 Kegiatan (Rp. 50.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Agar dapat melengkapi data dukung dan proposal kegiatan terkait	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	Kegiatan	-	Penguatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
66	24-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 10 Sampel (Rp. 50.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Mohon agar kiranya dapat dilengkapi proposal usulan agar dapat dijelaskan lebih detail terkait usulan tersebut	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	Sampel	-	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
67	24-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 5 Kegiatan (Rp. 37.500.000)	Kab. Seruyan	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Agar dapat dilengkapi data dukung dan proposal usulan kegiatan terkait	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	5	Kegiatan	-	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
68	24-02-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 6 Alat (Rp. 100.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Ketahanan Pangan	Dikembalikan	Bukan menjadi kewenangan Provinsi	Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan dikembalikan karena bukan menjadi kewenangan Provinsi	-	6	Paket	-	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
69	25-02-2024	Bob Haryadi,S.Sos	Kelurahan / Desa	pembuatan gedung atau kantror Badan permusyawaratan Desa	Kab. Murung Raya	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
70	26-02-2024	Domer Hardiyono, S.Pd	Kelurahan / Desa	susahnya informasi dan komunikasi sehingga perlunya bantuan tower 4g/5g telokmsel 1 unit.	Kab. Lamandau	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
71	26-02-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Jalan Tapin Bini-Suja-Penopa dgn panjang 20.500 meter merupakan jalan Provinsi yang dalam kondisi tidak bisa dilalui, sehingga masyarakat cenderung melalui jalan melalui perusahaan perkebunan. Untuk itu diusulkan penanganan ruas jalan tersebut sepanjang 3.200 meter	Kab. Lamandau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Km	20.000.000.000	Rekonstruksi Jalan
72	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehabilitasi/pemeliharaan berkala Jalan Tumbang Samba KM. 30	Kab. Katingan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Km	10.000.000.000	Rehabilitasi Jalan
73	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pembentukan Desa Tangguh Bencana di 3 Kawasan	Kab. Katingan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Uraian Usulan kegiatan dan permasalahan terbalik	Pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, Provinsi bersifat fasilitasi / pendukung	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	100.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
74	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana sebanyak 30 Orang	Kab. Katingan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	BPB-PK Prov Kalteng memfasilitasi peningkatan kapasitas TRC kabupaten/ Kota secara bertahap setiap tahun dengan kouta yang ditentukan untuk setiap kabupaten kota sehingga tidak ada anggaran khusus untuk memfasilitasi satu kabupaten/ Kota.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	30	orang	200.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
75	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penyediaan Logistik Beras sebanyak 100.000 Kg	Kab. Katingan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Logistik berupa beras tersedia dalam bentuk cadangan beras pemerintah (CBP) yang merupakan kewenangan dinas ketahanan pangan sedangkan BPB-PK prov. Kalteng menyediakan buper stock paket sembako yang akan didistribukaan sesuai dengan bencana di lapangan.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	10000	Kg	200.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
76	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Truk Tangki dan mesin pompa sebanyak 1 unit	Kab. Katingan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	1.000.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
77	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan perahu polyethylene dan mesin tempel sebanyak 5 unit	Kab. Katingan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	5	Unit	875.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
78	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Bimbingan Teknis pasca bencana sebanyak 40 orang	Kab. Katingan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	1. TA 2025 BPBPK Prov. tidak menganggarkan kegiatan Bimtek pascabencana 2. Dukungan BPBPK Prov. berupa fasilitasi narasumber Bimtek 3. TA 2024 BPBPK Prov. akan melaksanakan Bimtek Jitupasna dan R3P pada triwulan 3	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	40	orang	250.000.000	Penanganan Pasca Bencana Provinsi
79	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Jalan Titian Desa Telaga	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
80	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan/pengaspalan jalan akses permukiman Desa Talingke	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
81	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan/pengaspalan jalan akses permukiman desa asem kumbang	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
82	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan/pengaspalan jalan lingkungan kereng pangi/hampalit (jalan gembala induk dan jalan I-VII)	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
83	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan jalan lingkungan dalam kota Kecamatan Mendawai	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
84	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan jalan lingkungan dalam kota kasongan (Komplek Kampung Banjar dan Komplek Pata)	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
85	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan/pengaspala n jalan lingkungan desa samba katung	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
86	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan/pengaspala n jalan lingkungan desa samba bakumpai	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Agar dapat diakomodir dan melengkapi data data dukung.	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
87	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan jalan lingkungan, jalan BRI dan gang kenangan Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hlir	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
88	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penanganan jalan 1 ingkungan Singam Atasw - Singam Bawah Desa Singam Raya	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
89	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penanganan jalan lingkungan Desa Singam Raya	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
90	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penanganan jalan lingkungan desa bakung raya	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
91	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penanganan jalan lingkungan, jalan camar kelurahan kasongan lama	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
92	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penanganan jalan lingkungan Kampung Tengah - Subur Indah	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
93	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penanganan jalan lingkungan dalam Desa Mendawai	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
94	27-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penanganan jalan lingkungan dalam Desa Mekar Tani	Kab. Katingan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
95	27-02-2024	KADES KARTIKA BHAKTI	Kelurahan / Desa	Pengusulan Perkebunan Kelapa Dalam	Kab. Seruyan	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Ha	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
96	27-02-2024	KADES MEKAR INDAH	Kelurahan / Desa	Kurangnya fasilitas Olahraga yang belum layak dengan ini Pemerintah Desa Mekar Indah Mengusulkan Taman Mini Olahraga Desa	Kab. Seruyan	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
97	27-02-2024	KADES MEKAR INDAH	Kelurahan / Desa	belum adanya tempat wisata desa dan berpotensi unruk wisata air/susur sungai pukun dengan keindahan alam,plora dan pauna,serta tempat mancing ikan,maka kami megusulkan pembuatan jembatan ,dermaga dan pendopo tempat santai	Kab. Seruyan	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
98	27-02-2024	KADES HALIMAUNG JAYA	Kelurahan / Desa	Kurangnya Fasilitas Olahraga Yang Memadai, Pemerintah Desa Halimaung Jaya Mengusulkan Pembangunan GOR Desa	Kab. Seruyan	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
99	28-02-2024	LUSIAM MARHANI	Kelurahan / Desa	Rusak Beratnya Jembatan Penghubung Antar Desa	Kab. Pulang Pisau	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
100	28-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penyediaan Perumahan/ Sembako sebanyak 5 LKS	Kab. Katingan	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Uraian usulan kegiatan dan permasalahan terbalik	Diterima dengan melengkapi proposal dari LKS dan data anak di dalam LKS	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	100	anak	20.000.000	Penyediaan Makanan
101	28-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penyediaan Paket Sandang/ Pakaian sebanyak 5 LKS	Kab. Katingan	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	- Perlu Tambahan Data Dukung - Menyesuaikan Anggaran	Diterima dengan melengkapi proposal dari LKS dan data anak dalam LKS yang memerlukan sandang serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	100	anak	25.000.000	Penyediaan Sandang

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
102	28-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Layanan Dukungan Psikososial bagi korban bencana sebanyak 250 orang	Kab. Katingan	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Menyesuaikan kewenangan pemenuhan SPM dan alokasi anggaran	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	50.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial
103	28-02-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan berusaha bagi keluarga miskin sebanyak 50 orang	Kab. Katingan	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Agar dilengkapi proposal usulan dan memastikan KPM terdaftar dalam DTKS serta menyesuaikan alokasi anggaran	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	50	KPM	125.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
104	28-02-2024	KADES KARTIKA BHAKTI	Kelurahan / Desa	Bantuan Bibit Padi Unggul	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
105	28-02-2024	KADES KARTIKA BHAKTI	Kelurahan / Desa	Bantuan Bibit Sawit Unggul Untuk Petani Sawit Swadaya	Kab. Seruyan	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
106	28-02-2024	KADES KARTIKA BHAKTI	Kelurahan / Desa	Bantuan Mesin Panen Padi/Combine Harvester	Kab. Seruyan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
107	28-02-2024	TOMO.S.PD LANDAY	Kelurahan / Desa	Jalan Rusak, becek. dan berlubang	Kab. Barito Selatan	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
108	28-02-2024	TOMO.S.PD LANDAY	Kelurahan / Desa	Pengembangan dan pengelolaan wisata desa yang perlu bimbingan dan pendanaan	Kab. Barito Selatan	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
109	28-02-2024	ETIANI	Kelurahan / Desa	<p>1. Jalan antar desa yang menghubungkan desa Sarimbuah dan Desa Gagatur Dalam merupakan prasarana transportasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat kedua desa.</p> <p>Dikarenakan jalan antar desa tersebut mengalami kerusakan parah menyebabkan beberapa kegiatan atau usaha masyarakat desa menjadi terhambat bahkan sampai tidak dapat dilakukan karena ada beberapa titik yang sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat.</p>	Kab. Barito Selatan	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
110	28-02-2024	ETIANI	Kelurahan / Desa	<p>2. Perkembangan jaman telah menuntut masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi telekomunikasi yang sedang terjadi diberbagai bidang, baik dibidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan dan beragam kegiatan atau usaha masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi yang dapat mendukung kebutuhan tersebut berupa pembangunan Tower jaringan.</p>	Kab. Barito Selatan	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
111	28-02-2024	ETIANI	Kelurahan / Desa	Sampah merupakan salah satu permasalahan yang sangat sulit ditanganin baik dari tingkat desa sampai tingkat kota. Karena hal tersebut dibutuhkan fasilitas untuk pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desa.	Kab. Barito Selatan	Dinas Kesehatan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	-Agar diperjelas inti usulannya -Pengelolaan sampah masyarakat secara umum bukan kewenangan Dinas Kesehatan -Menyesuaikan anggaran	Permasalahan sampah tetapi Usulan berupa sarana, prasarana dan peralatan kesehatan medis dan non medis	-	-	-	-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
112	28-02-2024	KECEWACIANO	Kelurahan / Desa	Meningkatkan aktifitas masyarakat dan kemajuan jaman, dimana hampir setiap masyarakat desa Kayumban maupun pendatang ke desa Kayumban memerlukan akses jalan yg memadai dalam hal peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.	Kab. Barito Selatan	-	Validasi Mitra Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-
113	28-02-2024	SUTRISNO	Kelurahan / Desa	Kantor Desa Rusak Berat	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dikembalikan	Usulan kegiatan merupakan wewenang Kabupaten Kota	Usulan kegiatan merupakan wewenang Kabupaten Kota	-	-	-	-	-	-
114	29-02-2024	JENGKIN, SE	Kelurahan / Desa	Kondisi jalan masih tanah kuning dan tidak layak di lalui masyarakat	Kab. Murung Raya	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
115	29-02-2024	MISLI	Kelurahan / Desa	SDM masyarakat yang rendah diperlukan pelatihan menjahit dan bantuan mesin jahit	Kab. Barito Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	1. Lengkapi data dukung seperti profosal 2. menyesuaikan anggaran	diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK Non Fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
116	29-02-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Belum Optimalnya Pengembangan Budidaya Jagung	Kab. Murung Raya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal.	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
117	29-02-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengembangan Budidaya Padi Gogo	Kab. Murung Raya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung yaitu proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
118	29-02-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengembangan Budidaya Cabe Rawit	Kab. Murung Raya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal.	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
119	29-02-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Ternak Rakyat di Kabupaten Murung Raya masih kurang dan relatif terbatas	Kab. Murung Raya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
120	29-02-2024	MARJONO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Perlunya Bantuan Keagamaan Hari Raya Haji, Hari Natal, dan Hari Nyepi	Kab. Katingan	-	Validasi Mitra Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
121	01-03-2024	SUMARTON O	Kelurahan / Desa	Pembukaan jalan baru Ruhing Raya ke Wungkur Baru	Kab. Barito Selatan	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
122	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai jenis serta karakter kopi, keterampilan teknik meracik dan menyeduh kopi mulai tugging, manual brew, membuat espresso, capucino, latte art dan lain-lain	Kab. Murung Raya	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Pelatihan Barista di Kabupaten Murung Raya	usulan diakomodir, menyesuaikan anggaran	30	peserta	90.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
123	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Perbaikan Kendaraan Roda 2 (Masih kurangnya skill dan ilmu mekanik dalam merawat dan mereparasi sepeda motor sesuai standar reparasi bengkel)	Kab. Murung Raya	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	tidak terkait dengan kegiatan industri pengolahan karena tidak menghasilkan produk. untuk pelatihan keterampilan perbaikan kendaraan roda 2, lebih tepat diarahkan ke Dinas Tenaga Kerja.	menyesuaikan anggaran	-	-	-	-	-	-
124	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	3.Masih kurang tukang las listrik dan kurangnya keterampilan tukang listrik	Kab. Murung Raya	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Pelatihan Las Listrik Kabupaten Murung Raya	usulan diakomodir, menyesuaikan anggaran	30	peserta	90.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
125	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang ada, baik oleh Dinas Koperasi dan Dewan Koperasi belum memberikan arah yang jelas mengenai kurikulum, proses dan capaian pembelajarannya	Kab. Murung Raya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik	Usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
126	01-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Mobil Operasional Lapangan Double Kabin untuk Pelayanan Keliling satu-satunya milik Dinas DUKCAPIL Kab. Barito Selatan yang dibeli pada tahun anggaran 2013 saat sekarang sering rusak dan tidak layak pakai untuk operasional jemput bola pelayanan perekaman KTP-el dan pelayanan pencatatan sipil ke desa-desa diwilayah kabupaten barito selatan, sehingga diperlukan mobil operasional lapangan Double Kabin yang baru sebanyak 1 (SATU) unit	Kab. Barito Selatan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir karena memudahkan pelaksanaan jemput bola	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	600.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
127	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pengurus dan Pengawas yang tidak memahami tugas dan fungsinya dalam koperasi, sehingga setiap pengambilan Keputusan yang terkait pinjaman anggota tidak memperhatikan kemampuan keuangan koperasi	Kab. Murung Raya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dikembalikan	karena Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait	Bisa dilaksanakan di Kab/Kota	Dikembalikan ke Kabupaten karena Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait	-	-	-	-	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
128	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Masih Banyak Terdapat UMKM yang belum memiliki NIB.	Kab. Murung Raya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Bisa dilaksanakan di Kab/Kota	sudah terakomodir di tahun anggaran 2024 kegiatan Sosialisasi NIB bagi pelaku usaha	Usulan diakomodir, pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
129	01-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan alat perekaman KTP-el milik Dinas DUKCAPIK Kab. Barito selatan yang tinggal 1 (satu) sehingga untuk pelayanan jemput bola perekaman KTP-el ke pelosok desa-desa hanya dapat dilakukan pada hari-hari libur (sabtu dan minggu) agar tidak mengganggu pelayanan pada hari kerja, sehingga diperlukan tambahan alat perekaman KTP-el yang baru sebanyak 2 (dua) set	Kab. Barito Selatan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir karena memudahkan pelaksanaan jemput bola	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	14	Unit	221.531.250	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
130	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Masih banyak ditemukan Produk UMKM yang secara kemasan tidak berlabel dan tidak mencantumkan	Kab. Murung Raya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Bisa dilaksanakan di Kab/Kota	sudah terakomodir dengan adanya aplikasi TABE di tahun anggaran 2024	usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
131	01-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Peralatan Cetak KTP-el (printer KTP-el dan KIA) yang dimiliki dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten barito selatan sangat terbatas dan tinggal 1 (unit) disebabkan adanya peralatan rusak berat karena sudah usang dan dibutuhkan tambahan printer yang baru untuk mengganti yang rusak dengan keperluan minimal 2 (dua) unit	Kab. Barito Selatan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, perlu alat baru dikarenakan yang lama sudah tidak layak pakai untuk pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	124.800.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
132	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Dalam manajemen keuangan masih banyak UMKM yang tidak bisa membedakan antara keuntungan modal dan cara mengatur agar usahanya tetap berjalan	Kab. Murung Raya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Bisa dilaksanakan di Kab/Kota	akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025	usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
133	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Banyak ditemukan packing produk yang tidak sesuai dengan kandungan isi produknya, sehingga sering ditemukan produk tidak aman dan menyebabkan produk rusak.	Kab. Murung Raya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025	usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
134	01-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Personal Komputer untuk Operasional SIAK yang dimiliki Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten barito selatan saat ini sangat terbatas (kurang), yang disebabkan kerusakan dan usang dari pengadaan tahun 2012, 2016, 2018 dan diperlukan tambahan baru sebanyak 2 (dua) unit	Kab. Barito Selatan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir karena perlu alat baru dikarenakan yang lama sudah tidak layak pakai untuk pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	34.800.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
135	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	5.Masih bayak pelaku UMKM yang tidak memiliki media soaial atau katalog produknya , kebanyakan masih menjual produk secara langsung dipasar, sehingga sulit untuk interaksi dan membuat konten disosial media	Kab. Murung Raya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	sudah terakomodir dengan adanya aplikasi TABE di tahun anggaran 2024	usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
136	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Pencegahan dan Pengendalian bencana sehingga masih rendahnya Kesiapsiagaan dalam menanggulangi Bencana dilanangan	Kab. Murung Raya	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	- Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov. Kalteng - Perlu adanya penjelasan apa jenis sarana yang diusulkan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	1.500.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
137	01-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Jumlah penduduk usia 15+ tahun yang sudah melakukan perekaman KTP-el untuk diterbitkan KTP-el kabupaten Barito Selatan setelah usia 17 tahun pada tahun 2025, sehingga diperlukan tambahan bahan cetak KTP-el (Ribbon dan Film Printer) sebanyak 20 Ribbon, 20 Film Printer	Kab. Barito Selatan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	40	Unit	145.346.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
138	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Masih rendahnya daya minat masyarakat akan pentingnya olah raga karna kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada	Kab. Murung Raya	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Dapat dilaksanakan untuk sarana olahraga cabang tertentu yang diminati oleh masyarakat	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	20	Unit	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
139	01-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kondisi Rusak Berat Jalan Lingkar Selatan Kota Sampit Sepanjang 1,92 Km dengan Keperluan Dana RP. 38.000.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1,92	Km	20.000.000.000	Rekonstruksi Jalan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
140	01-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Untuk optimalisasi pelayanan kependudukan hingga ke desa dan kecamatan, diperlukan tambahan peralatan dan perlengkapan pendukung. Berikut terlampir proposal untuk sarana dan peralatan yang diperlukan	Kab. Lamandau	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, perlu alat baru dikarenakan yang lama sudah tidak layak pakai untuk pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	55	Unit	1.263.345.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
141	01-03-2024	SUPRATMO	Kelurahan / Desa	tidak layak	Kab. Barito Selatan	Dinas Kehutanan	Dikembalikan	- usulan bukan kewenangan Dinas Kehutanan - usulan agar lebih jelas	1. Apa yang diusulkan masih tidak jelas 2. Agar usulan dapat disampaikan kembali dengan jelas	-	-	-	-	-	-
142	01-03-2024	SUPRATMO	Kelurahan / Desa	Usulan Baru untuk Gedung SMA	Kab. Barito Selatan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan perangkat daerah	Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu.	Bukan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
143	01-03-2024	SUPRATMO	Kelurahan / Desa	Tidak Layak	Kab. Barito Selatan	Dinas Kehutanan	Dikembalikan	- usulan bukan kewenangan Dinas Kehutanan - usulan agar lebih jelas	1. Apa yang diusulkan masih tidak jelas 2. Agar usulan dapat disampaikan kembali dengan jelas	-	-	-	-	-	-
144	01-03-2024	SUPRATMO	Kelurahan / Desa	Pembuatan Baru	Kab. Barito Selatan	Dinas Kehutanan	Dikembalikan	- usulan bukan kewenangan Dinas Kehutanan - usulan agar lebih jelas	1. Apa yang diusulkan masih tidak jelas 2. Agar usulan dapat disampaikan kembali dengan jelas	-	-	-	-	-	-
145	01-03-2024	Kepala Desa Wungkur Nanakan	Kelurahan / Desa	AKSES JALAN MASIH KURANG MAKSIMAL	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
146	01-03-2024	SEPTHA	Kelurahan / Desa	rusak berat Jl. Pati Jaya Desa Talio	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	null	-	-	-	-	Rehabilitasi Jalan
147	01-03-2024	SEPTHA	Kelurahan / Desa	rusak berat Jl. Singa Pamarat Desa Talio	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	null	-	-	-	-	Rehabilitasi Jalan
148	01-03-2024	Kepala Desa Wungkur Nanakan	Kelurahan / Desa	Tidak maksimalnya akses jalan antar Desa	Kab. Barito Timur	-	Validasi Mitra Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-
149	01-03-2024	Kepala Desa Wungkur Nanakan	Kelurahan / Desa	Alih fungsi lahan perkebunan karet menjadi perkebunan buah, dikarenakan penurunan hasil (diganti dengan Sawit unggul dan Kakao)	Kab. Barito Timur	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	1. Usulan masih belum jelas 2. Menyesuaikan dengan kewenangan SOPD	Usulan Tidak spesifik, ambigu antara Komoditas Buah atau Komoditas Perkebunan	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
150	01-03-2024	Kepala Desa Wungkur Nanakan	Kelurahan / Desa	Tidak dimanfaatkannya jalur-jalur sungai yang ada di Desa, sehingga diusulan untuk membuat KERAMBA	Kab. Barito Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
151	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Alat Tangkap ikan Ramah Lingkungan masih kurang dan realtif terbatas	Kab. Murung Raya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Bahan dan data dukung lengkap	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama bukan perorangan)	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
152	01-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pertanian yang ada dikabupaten Murung Raya	Kab. Murung Raya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
153	02-03-2024	Suparto	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Pertanian Hendtrakctor SMK Tarung Riwut. Alat Praktek Kerja Siswa dalam menunjang peningkatan Ketahanan Pangan Desa Luwuk Kanan.	Kab. Katingan	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
154	02-03-2024	EMAN	Kelurahan / Desa	Pembangunan pagar keliling Kantor UPTD Desa Petak Bahandang Belum ada pagar keliling Kantor UPTD untuk keamanan fasilitas bangunan pemerintah.	Kab. Katingan	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
155	02-03-2024	EMAN	Kelurahan / Desa	Gedung Puskesmas Baru. Bangunan Gedung yang ada sekarang tidak sesuai dengan permenkes No 75 tahun 2014. terpisah dengan gedung rawat inap (dapat membahayakan saat transport pasien)	Kab. Katingan	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-	-	-	-
156	04-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Untuk mengurangi tingkat pengangguran maka diperlukan pembukaan lapangan pekerjaan. untuk memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan maka dipandang perlu untuk melakukan terhadap masyarakat dalam meningkatkan skill	Kab. Murung Raya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran. Perlu ada penjelasan apa jenis pelatihan yang diusulkan	5 dari 6 kejuruan yang diusulkan berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Namun tidak semua dapat diakomodir. Anggaran menyesuaikan. Sementara: alat berat 150jt; tata rias/otomotif/las/lis trik 70jt	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	2	Paket	220.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
157	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ayam Kampung / Ayam Buras sebanyak 2.500 Ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2500	Ekor	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
158	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Kambing sebanyak 60 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	30	Ekor	120.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
159	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Babi sebanyak 100 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	50	Ekor	150.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
160	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Ternak Unggas Ayam sebanyak 2.000 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	500	Ekor	100.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
161	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi Lokal, Babi dan Kambing	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	150.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
162	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Vaksinasi Rabies Gratis sebanyak 250 dosis	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e-proposal kementan (Aplikasi Bima)	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
163	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Babi sebanyak 100 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	50	Ekor	150.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
164	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 20 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	20	Ekor	320.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
165	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 100 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	20	Ekor	320.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
166	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Babi sebanyak 50 pasang	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	50	Ekor	150.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
167	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ayam sebanyak 500 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	500	Ekor	80.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
168	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Mentok sebanyak 500 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	500	Ekor	100.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
169	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 100 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	100	Ekor	160.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
170	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Babi sebanyak 100 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	50	Ekor	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
171	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Bebek sebanyak 500 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	500	Ekor	100.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
172	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Pakan Ternak Unggas Ayam dan Bebek sebanyak 10 ton	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
173	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi Lokal sebanyak 80 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	20	Ekor	300.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
174	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Babi sebanyak 200 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	50	Ekor	150.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
175	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Kambing sebanyak 50 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	50	Ekor	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
176	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 50 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	20	Ekor	320.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
177	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Kambing Etawa sebanyak 500 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	50	Ekor	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
178	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Bebek Peking sebanyak 1.000 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1000	Ekor	200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
179	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 1.000 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	20	Ekor	320.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
180	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 60 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	Ekor	160.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
181	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Babi sebanyak 25 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	25	Ekor	75.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
182	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Unggas sebanyak 18.000 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1000	Ekor	160.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
183	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Babi sebanyak 85 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	50	Ekor	150.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
184	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 32 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	20	Ekor	3.200.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
185	04-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Peternakan 1.035 ekor	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal Usulan kegiatan bisa lebih detail (bantuan peternakan apa ?)	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1000	Ekor	160.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
186	04-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlengkapan jalan berupa rambu-rambu dan PJU masih minim, sehingga diperlukan perlengkapan jalan dan PJU di beberapa titik pada Jalan Yos Sudarso Desa Kujan (proposal terlampir) untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas.	Kab. Lamandau	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	16	Unit	432.500.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
187	04-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	PSU pada kawasan permukiman rumah tidak layak huni belum dapat ditingkatkan secara optimal dengan menggunakan APBD Kabupaten. Sehingga Pemkab. Lamandau mengusulkan Peningkatan Jalan Lingkungan pada 5 (lima) lokasi jalan lingkungan (proposal terlampir).	Kab. Lamandau	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI (Proposal Tersedia)	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
188	04-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	RTLH di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik masih cukup banyak yaitu 25 rumah (proposal terlampir). Sehingga Pemkab Lamandau mengajukan permohonan untuk bantuan RTLH sesuai dengan proposal.	Kab. Lamandau	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	25	Unit	750.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
189	04-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pemberian Nutrisi Tambahan untuk Posyandu	Kab. Barito Utara	Dinas Ketahanan Pangan	Dikembalikan	Mohon agar dapat dijelaskan lebih detail terkait lokasi pelaksanaan, detail pemberian nutrisi, nilai usulan. Direkomendasikan penjelasan terperinci menggunakan proposal yang diajukan	Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya	-	-	-	-	-	-
190	04-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Kab. Barito Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Usulan kurang spesifikasi dan Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
191	04-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Sarana berupa alat pengolahan hasil ikan serta kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk para pelaku usaha pengolahan perikanan	Kab. Barito Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
192	04-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Bantuan untuk pembentukan pengolah dan pemasaran untuk mendaftarkan Nomor Ijin Berusaha (NIB) serta kegiatan sosialisasi untuk para pelaku UMKM Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Kab. Barito Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
193	04-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan/Peningkatan Jalan dalam Kota Muara Teweh (Jl. Tamban Sari RT. 30 Wonorejo)	Kab. Barito Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
194	04-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan/Peningkatan Jalan dalam Kota Muara Teweh (Jl. Persemaian I Kelurahan Lanjas)	Kab. Barito Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
195	04-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan/Peningkatan Jalan Solai (Jl. Desa Sikan-Desa Pandran Permai)	Kab. Barito Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
196	04-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Drainase Jl. Tamban Sari RT. 30 Wonorejo	Kab. Barito Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
197	04-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Drainase Jl. Persemaian I Kelurahan Lanjas	Kab. Barito Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
198	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Septik Tank Individual di Desa Batuah Kec. Seranau Sebanyak 292 Unit Rp. 4.088.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiediaan menerima hibah, DED.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	87,6	m3/hari	4.088.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
199	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Septik Tank Individual di Desa Hanjalipan Kec. Kota Besi Sebanyak 223 Unit Rp. 3.345.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiediaan menerima hibah, DED	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	66,9	m3/hari	3.345.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
200	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Septik Tank Individual di Desa Kandan Kec. Kota Besi Sebanyak 262 Unit Rp. 3.930.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiediaan menerima hibah, DED	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	78,6	m3/hari	3.930.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
201	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Tinggi nya Idle Kapasitas Spam Ikk Kota Sampit, Sehingga Perlu penambahan Jaringan Distribusi dan SR untuk mengurangi idle kapasitas SPAM Ikk Kota Sampit. Rp 10.000.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Kabupaten	10.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
202	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Tinggi nya Idle Kapasitas Spam Ikk Kota Sampit, Sehingga Perlu penambahan Jaringan Distribusi dan SR untuk mengurangi idle kapasitas SPAM Ikk Kota Sampit. Rp 5.000.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Kabupaten	5.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
203	04-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Kegiatan pelatihan industri rumah tangga ini dilaksanakan di Desa Samuda Besar Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan Dana Alokasi Rp 100.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik	usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
204	04-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kegiatan pelatihan industri rumah tangga ini dilaksanakan di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranaudengan Dana Alokasi Rp 100.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik	Usulan di akomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
205	04-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kegiatan pelatihan industri rumah tangga ini dilaksanakan di Desa Bapinang Hilir Kecamatan Pulau Hanaut Dana Alokasi Rp 100.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik	Usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
206	04-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kegiatan pelatihan industri rumah tangga ini dilaksanakan di Sei Ijum Raya Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan Dana Alokasi Rp 100.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik	Usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
207	04-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kegiatan pelatihan industri rumah tangga ini dilaksanakan Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang dengan Dana Alokasi Rp 100.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik	Usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
208	04-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Sosialisasi Kepatuhan Koperasi dan Aparatur Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Dana Alokasi Rp 100.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Bisa dilaksanakan di Kab/Kota	diterima dengan menyesuaikan anggaran APBD	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
209	04-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan perbengkelan dan bantuan alat sebanyak 4 kelompok Dana Alokasi Rp 150.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	Tidak ada proposal. Agar melengkapi proposal disertai data : profil kelompok IKM penerima bantuan alat, spesifikasi peralatan yg diusulkan.	menyesuaikan anggaran	-	-	-	-	-	-
210	04-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan petukangan dan bantuan alat sebanyak 4 kelompok Dana Alokasi Rp 150.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	Tidak ada proposal. Agar segera melengkapi proposal disertai data pendukung : profil kelompok IKM penerima bantuan peralatan, spesifikasi alat yang diusulkan.	1. Lengkapi data dukung seperti profosal 2. menyesuaikan anggaran	-	-	-	-	-	-
211	04-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan menjahit dan bantuan alat sebanyak 20 unit Dana Alokasi Rp 150.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	Tidak ada proposal. Agar segera melengkapi proposal disertai data pendukung : profil kelompok IKM penerima bantuan peralatan, spesifikasi alat yang diusulkan.	1. Lengkapi data dukung seperti profosal 2. menyesuaikan anggaran	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
212	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurang optimalnya penguatan kelembagaan BUMDesa melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, pelatihan bagi pengelola BUMDesa dan aparatur desa serta masyarakat / pelaku usaha di desa. Pelaksanaan di 22 Desa Pada 4 Kecamatan, Rp. 100.000.000;	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan diakomodir, Anggaran dan Tempat menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
213	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dan fasilitasi serta monev terhadap pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga. Pelaksanaan di 19 Desa pada 4 Kecamatan. Rp. 100.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan diakomodir, Anggaran dan Tempat menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
214	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurang optimalnya penguatan kelembagaan Posyandu melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, pelatihan bagi Kader Posyandu Untuk 75 orang/ 15 Posyandu Rp. 112.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan diakomodir, tetapi kegiatan dilaksanakan untuk 14 kab/kota	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	75	Orang	112.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
215	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurang optimalnya kegiatan pembinaan, pendampingan, pelatihan bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) Untuk 168 orang Rp. 252.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	168	Orang	252.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
216	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurang optimalnya penguatan kelembagaan Posyandu melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, pelatihan bagi anggota Pokjanal Posyandu Untuk 50 orang Rp. 75.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan diakomodir, tetapi kegiatan dilaksanakan untuk 14 kab/kota	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	50	Orang	75.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
217	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	pembangunan lab kimia 1 Ruang SMAN 1 Kota Besi Rp. 250.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ada Perbaikan	1. Data dukung perlu dilengkapi 2. Menyeauaikan anggaran	Usulan akan diproses melalui usulan DAK	Akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan Rentra PD	1	Ruang	500.000.000	Pembangunan Ruang Laboratorium
218	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar Sekolah 200 Meter Rp 200.000.000 SMKN 3 Sampit	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	1.000.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
219	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar sekolah SLBN 2 Sampit 100 Meter Rp. 100.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Usulan akan ditindaklanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia, pengajuan usulan agar dilengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
220	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Ruang Guru SMAN 1 Antang Kalang 1 Unit Rp, 400.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	ruang	450.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
221	04-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Toilet/Jamban SMAN 1 Antang Kalang 5 Unit Rp. 250.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
222	05-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Perkuatan Tebing di Desa Bahu Palawa Kecamatan Kahayan Tengah 500 meter Rp. 5.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
223	05-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Perkuatan Tebing di Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir 300 meter Rp. 3.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
224	05-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 25 Lt/dtk Rp. 2.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-
225	05-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 25 Lt/dtk Rp. 1.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-
226	05-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 25 Lt/dtk Rp.1.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-
227	05-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	DED Drainase utama kota Pulang Pisau di Kecamatan Kahayan Hilir 1 Paket Rp. 800.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum	Pending dan perlu konfirmasi dari pihak kabupaten untuk status kewenangan jalan.	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
228	05-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Jaringan irigasi Rawa 20 Km Rp. 30.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum	Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	20	Km	30.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
229	05-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Jaringan irigasi Rawa 20 Km Rp. 30.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-
230	05-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Jaringan irigasi Rawa 10 Km Rp. 10.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum	Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	10	Km	10.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
231	05-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Jaringan irigasi Rawa 10 Km Rp. 10.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan Merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
232	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Stabilitas barang dan kebutuhan Pokok (Pasar Murah/ Penyeimbang) (20.500 Paket Rp 3.075.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Pasar Murah Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah Barito Timur	Lengkapi data dukung : e proposal	1	kegiatan	150.000.000	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
233	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pangan B2SA, dan kurangnya peran BUMDES sebagai Penyedia Pangan B2SA untuk meningkatkan pemahaman dan penurunan stunting maka diadakan keg. Desa B2SA (Beragam, Bewrgizi, Seimbang dan Aman) sebanyak 10 Desa @Rp 75.000.000 = Rp 750.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Agar dapat dilengkapi data dukung dan proposal usulan kegiatan terkait	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	Lokasi	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
234	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pengolahan bahan pangan lokal menjadi pangan yang sehat dan aman dengan komposisi gizi yang seimbang, dan masih banyak anak-anak sekolah jajan yang tidak sehat, untuk mengatasi hal tersebut keg. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan pada 10 Sekolah Dasar @Rp 50.000.000 = Rp 500.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran yang tersedia. Agar dapat dilengkapi data dukung dan proposal usulan kegiatan terkait	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	Lokasi	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
235	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Diduga masih ada Residu Pestisida pada Pangan Asal Tumbuhan untuk itu diperluakan Alat Sarana sebanyak 10 Paket @Rp 10.000.000 = Rp 100.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Ketahanan Pangan	Dikembalikan	Bukan kewenangan Provinsi	Agar dilengkapi dengan dokumen yang lengkap berupa proposal dan lainnya	Bukan menjadi kewenangan Provinsi, menjadi kewenangan kabupaten	-	10	Paket	-	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
236	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan SDM Perkoperasian (100 Orang Rp 200.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	telah terakomodir di DAK Non Fisik tahun 2024	lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	200.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
237	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Press Plastik FR-880P Horizontal Segel pembungkus makanan (30 Unit Rp 59.850.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	1. Lengkapi data dukung seperti profosal 2. Menyesuaikan anggaran	ditolak karena kewenangan kabupaten untuk usaha Mikro sesuai UU No.23 tahun 2014	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	59.850.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
238	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya modal petani untuk pengembangan kawasan buah naga seluas 5 Ha. Rp. 75.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	-	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
239	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya modal petani untuk pengembangan kawasan buah naga seluas 5 Ha. Rp. 75.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Data dukung lengkap	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
240	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya sarana mesin pengurai sabut kelapa Cocopeat sebanyak 1 unit Rp. 54.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
241	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya sarana mesin pengurai sabut kelapa Cocopeat sebanyak 1 unit Rp. 54.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
242	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya prasarana berupa bangunan pengering / Unit Pengering (Solar Dryer Dome) sebanyak 1 unit Rp. 165.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomudir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
243	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan UMKM (150 orang Rp 26.250.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	telah terakomodir di DAK Non Fisik tahun 2024□	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomudir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	26.250.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
244	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya prasarana berupa bangunan pengering / Unit Pengering (Solar Dryer Dome) sebanyak 1 unit Rp. 165.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan titik koordinat lokasi, data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomudir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
245	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi Jantan 2 ekor dan Betina 12 ekor Rp. 210.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Proposal sudah ada	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomudir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	14	Ekor	210.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
246	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak kambing Jantan 5 ekor dan Betina 25 ekor Rp. 150.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Proposal sudah ada	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomudir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	30	Ekor	150.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
247	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Ayam Buras Jantan 50 ekor dan Betina 250 ekor Rp. 30.000.000,- Pakan Ayam 300 kg	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Proposal sudah ada	Diakomodir Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	30.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
248	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan alat pencacah / Shreeder 1 unit dan alat pencampur / Mixer 1 unit Rp. 150.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Proposal sudah ada	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	150.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
249	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Nitrogen Cair 300 Liter Rp. 24.000.000,- dan Straw 1000 Dosis Rp.20.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e-proposal kementan (Aplikasi Bima)	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
250	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Vaksin Rabies 3000 Dosis Rp. 60.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e-proposal kementan (Aplikasi Bima)	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	3000	Dosis	60.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
251	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Obat- obatan, Vitamin dan Obat Cacing Rp. 150.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir : Pembiayaan diupayakan pada APBN Dana Tugas Pembantuan, usulan bisa di teruskan ke e-proposal kementan (Aplikasi Bima)	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	150.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
252	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 1 unit Rp. 200.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
253	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 1 unit Rp. 200.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
254	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Rehab/pembuatan baru Cek DAM/Pintu Air sebanyak 1 unit Rp. 150.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	-	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
255	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Rehab/pembuatan baru Cek DAM/Pintu Air sebanyak 1 unit Rp. 150.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
256	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Rehab/pembuatan baru Cek DAM/Pintu Air sebanyak 1 unit Rp. 150.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
257	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Hand Traktor/Traktor Roda 2 sebanyak 10 Unit Rp. 350.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	UNIT	350.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
258	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Hand Traktor/Traktor Roda 2 sebanyak 10 Unit Rp. 350.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Di Tolak, Karena Usulan sudah ada/Double Usulan dengan Lokasi yang Sama	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
259	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Hand Traktor/Traktor Roda 2 sebanyak 10 Unit Rp. 350.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Di Tolak, Karena Usulan sudah ada/Double Usulan dengan Lokasi yang Sama	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
260	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Hand Traktor/Traktor Roda 2 sebanyak 10 Unit Rp. 350.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	UNIT	350.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
261	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Hand Traktor/Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit Rp. 175.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	5	UNIT	175.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
262	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit Rp. 60.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	60.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
263	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit Rp. 60.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dikembalikan	Usulan kegiatan sama (lokasi, pagu, masalah, usulan)	Kegiatan yang di usulkan ter double (masalah, lokasi, pagu)	-	-	-	-	-	-
264	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit Rp. 60.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	60.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
265	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Irigasi Air Tanah Dalam sebanyak 1 unit Rp.200.000.000.-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal dan titik koordinat	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
266	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Normalisasi saluran primer dan sekunder sebanyak 1 unit Rp. 150.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	-	Dikembalikan	Usulan kegiatan ter double (masalah, usulan, lokasi dan pagu)	-	-	-	-	-	-	-
267	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Normalisasi saluran primer dan sekunder sebanyak 1 unit Rp. 150.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	-	Dikembalikan	Usulan kegiatan ter double (masalah, usulan, lokasi dan pagu)	-	-	-	-	-	-	-
268	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Adanya beberapa daerah rawan pangan berdasarkan peta FSVA perlu dilakukan intervensi dan untuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha ekonomi produktif ayam buras sebanyak 2000 ekor Rp. 400.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan peternakan	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir pada sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah lain, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana,	1000	Ekor	400.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
269	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	LPM Rukun Sentosa belum memiliki cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok sebanyak 1 unit Rp. 200.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Ketahanan Pangan	Dikembalikan	Bukan kewenangan dari DKP Provinsi	Usulan kegiatan merupakan kewenangan Kabupaten Kota	-	-	-	-	-	-
270	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	LPM Gemuk Sari I belum memiliki cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok sebanyak 1 unit Rp. 200.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Ketahanan Pangan	Dikembalikan	Bukan menjadi kewenangan DKP Provinsi	Usulan kegiatan merupakan kewenangan Kabupaten Kota	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
271	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Tidak adanya subsidi harga pada gerakan pangan murah yang telah dilaksanakan tidak memberikan perbedaan harga yang signifikan antara harga jual GPM dan pasar @Rp. 500.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan dapat di lanjutkan apabila dana tersedia dan menyesuaikan Pagu anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	9	Kegiatan	-	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi
272	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Akuntansi dan Laporan Pertanggung Jawaban Koperasi sebesar Rp. 61.810.600	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik	Usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	61.810.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
273	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Akuntansi dan Laporan Pertanggung Jawaban Koperasi sebesar Rp. 61.810.600	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik	Usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	61.810.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
274	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Mesin Giling dan Kemasan Kopi Bubuk Rp. 87.200.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Bantuan Peralatan Mesin Giling dan Kemasan Kopi Bubuk di Desa Bapinan Hulu, Kab. Kotawaringin Timur	usulan diakomodir, menyesuaikan anggaran	1	paket	87.200.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
275	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Buah-buahan se-Kec. Katingan Tengah sebanyak 1 paket	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar lebih detail (bibit buah apa) dan dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
276	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan bibit padi sebanyak 1 ton	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
277	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan bibit buah-buahan, hansprayer elektrik dan herbisida sebanyak 1 paket	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
278	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan bibit padi, jagung dan mesin perontok padi 10 unit sebanyak 1 paket	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
279	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan mesin perontok padi sebanyak 1 paket	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
280	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan mesin perontok padi sebanyak 1 paket	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
281	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Sosialisasi, Pembinaan dan Pembentukan KIM) 3 KIM	Kab. Katingan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ditampung dalam APBD Provinsi jika anggaran mencukupi	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	3	Kelompok Masyarakat	-	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
282	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan alat penggiling padi sebanyak 1 unit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
283	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan bibit padi dan alat perontok padi (15 buah) sebanyak 2 paket	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	Paket	75.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
284	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan penggilingan padi, benih padi, bibit buah-buahan dan handsprayer sebanyak 4 paket	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
285	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan mesin perontok padi dan penggilingan tepung sebanyak 2 paket	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	Paket	60.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
286	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	pengadaan bibit buah-buahan sebanyak 10.000 pohon	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
287	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan alat perontok padi sebanyak 1 unit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	35.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
288	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan alat perontok padi sebanyak 5 unit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	UNIT	65.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
289	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan mesin panen padi sebanyak 5 unit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	UNIT	150.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
290	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan mesin pengolah pupuk organik sebanyak 10 unit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	100.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
291	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan mesin perontok padi sebanyak 1 paket	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
292	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Combine Harvester sebanyak 1 unit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	45.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
293	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan bibit petai dan jengkol sebanyak 10.000 bibit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	5000	Batang	250.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
294	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan mesin penggiling padi sebanyak 2 unit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	Unit	200.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
295	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan bibit petai dan mangga sebanyak 1 paket	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	100.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
296	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan bibit buah mangga, rambutan dan petai sebanyak 1 paket	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	100.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
297	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan bibit rambutan dan mangga sebanyak 1 paket	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	100.000.000	Perbanyak an Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
298	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Cultivator sebanyak 1 unit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	25.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
299	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Hand sprayer elektrik sebanyak 20 unit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	Unit	20.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
300	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Hand traktor sebanyak 4 unit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	Unit	75.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
301	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Hand sprayer elektrik sebanyak 27 unit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	Unit	20.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
302	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Hand sprayer elektrik sebanyak 20 unit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	Unit	20.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
303	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Hand sprayer elektrik sebanyak 15 unit	Kab. Katingan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	Unit	20.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
304	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Kegiatan Rumah Pangan sebanyak 1 paket	Kab. Katingan	Dinas Ketahanan Pangan	Dikembalikan	Detail lokasi kurang lengkap, agar kiranya dapat dijelaskan lebih terperinci dan direkomendasikan agar membuat penjelasan lebih rinci melalui fitur upload proposal	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
305	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Kegiatan go to school sebanyak 2 sekolah	Kab. Katingan	Dinas Ketahanan Pangan	Dikembalikan	Detail lokasi kurang lengkap, agar kiranya dapat dijelaskan lebih terperinci dan direkomendasikan agar membuat penjelasan lebih rinci melalui fitur upload proposal	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	-	-	-	-	-	-
306	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Pupuk Sawit sebanyak 100 ton	Kab. Katingan	Dinas Perkebunan	Dikembalikan	1. Usulan Terlalu Besar 2. Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan Terlalu Besar, dikembalikan ke Kabupaten	-	-	Kg	-	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
307	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Pupuk Sawit sebanyak 5 ton	Kab. Katingan	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	kg	-	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
308	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sawit	Kab. Katingan	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
309	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sawit	Kab. Katingan	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
310	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sawit	Kab. Katingan	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
311	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sawit sebanyak 29.800 bibit	Kab. Katingan	Dinas Perkebunan	Dikembalikan	1. Usulan Terlalu Besar 2. Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Usulan terlalu besar, dikembalikan ke Kabupaten	-	-	Batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
312	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sawit sebanyak 4.000 pohon	Kab. Katingan	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
313	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sawit sebanyak 300 pohon	Kab. Katingan	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
314	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sawit sebanyak 10.000 pohon	Kab. Katingan	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Menyesuaikan anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
315	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sawit untuk 8 kelompok	Kab. Katingan	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
316	05-03-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Sawit sebanyak 1.000.000 pohon	Kab. Katingan	Dinas Perkebunan	Dikembalikan	1. Usulan Terlalu Besar 2. Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal	Usulan Terlalu Besar, dikembalikan Ke Kabupaten	-	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
317	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Rambu Lalu Lintas Jalan Tidak Bersuar (100 unit Rp 200.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	100	unit	350.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
318	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Rambu Lalu Lintas Jalan Tidak Bersuar (80 unit Rp 160.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	80	Unit	280.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
319	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Rambu Lalu Lintas Jalan Tidak Bersuar (80 unit Rp 160.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	80	Unit	280.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
320	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Rambu Lalu Lintas Jalan Tidak Bersuar (80 unit Rp 160.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	80	Unit	280.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
321	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Rambu Lalu Lintas Jalan Tidak Bersuar (90 unit Rp 180.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	90	Unit	315.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
322	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Rambu Lalu Lintas jalan - Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (2 unit Rp 20.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	2	Unit	45.282.590	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
323	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (1 Paket Rp 7.873.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Kehutanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan Merupakan wewenang Dinas lingkungan hidup	sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-	1	paket	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
324	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Penyusunan Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca (1 Dokumen Rp 150.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan perangkat daerah	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
325	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembinaan ke Desa-Desa Proklim, Sosialisasi, Pembagian Bibit dan Bak Sampah (1 Desa Rp 50.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	- Menyesuaikan anggaran - Diperjelas (spesifik) usulan kegiatan yang akan dilakukan	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Usulan diakomodir, agar melengkapi data dukung dan spesifik/mendetail dengan menyesuaikan anggaran	1	Paket	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
326	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembinaan ke Desa-Desa Proklam, Sosialisasi, Pembagian Bibit dan Bak Sampah (1 Desa Rp 50.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran - Diperjelas (spesifik) usulan kegiatan yang akan dilakukan	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Usulan diakomodir, agar melengkapi data dukung dan spesifik/mendetail dengan menyesuaikan anggaran	1	Paket	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
327	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (1 Paket Rp 1.279.024.712)	Kab. Barito Timur	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas lingkungan hidup	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	Paket	1.279.024.172	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
328	05-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (1 Paket Rp 10.530.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Lingkungan Hidup	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	Paket	10.530.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
329	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	rehabilitasi ruang kelas 3 Ruang SMAN 1 Kota Besi Rp 450.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	450.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
330	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Peralatan TIK 15 Unit MAN 1 Kota Besi Rp. 150.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	15	Unit	225.000.000	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik
331	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 USB Rp. 1.500.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Terkait Usulan Unit Sekolah Baru memerlukan studi kelayakan dulu.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta telah dilakukan study kelayakan	1	unit	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
332	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Peralatan TIK 20 Unit SMAN 4 Sampit Rp. 200.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	200.000.000	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
333	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabot 2 Ruang SMAN 1 Cempaga Rp. 300.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	750.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
334	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Rumah Dinas Penjaga Sekolah SLBN 2 Sampit 1 Unit Rp 125.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Usulan akan ditindaklanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia, pengajuan usulan agar dilengkapi dengan proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
335	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMKN 1 Cempaga Hulu 3 Unit Rp. 375.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Ruang	1.000.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
336	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Alat Praktik TIK Siswa SMKN 1 Cempaga Hulu 20 Set Rp. 315.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	20	Set	315.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
337	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Ruang Kelas Siswa SMAN 1 Antang Kalang 3 Ruang Rp. 400.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	800.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
338	05-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Turap Sungai Barito di Kecamatan Dusun Utara karena sering Longsornya tebing sungai	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
339	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Ruang Guru SMAS PGRI Pulau Hanaut 1 Unit Rp. 400.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	450.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
340	05-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitas ruang kelas beserta perabotnya SLBN 1 Sampit 3 Ruang Rp. 450.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Usulan akan ditindaklanjuti menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia, pengajuan usulan agar dilengkapi dengan proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	3	Ruang	450.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
341	05-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Turap Sungai Barito di Kecamatan Gunung Bintang Awai karena seringnya Longsornya tebing sungai	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
342	05-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Turap Sungai Barito di Kecamatan Gunung Bintang Awai karena seringnya Longsornya tebing sungai	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
343	05-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Turap Sungai Barito di Kecamatan Karau Kuala karena sering Longsornya tebing sungai	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
344	05-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Turap Sungai Barito di Kecamatan Dusun Hilir karena sering Longsornya tebing sungai	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
345	05-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Turap Sungai Barito di Kecamatan Jenamas karena sering Longsornya tebing sungai	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
346	05-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Perkuatan Tebing Jalan Karau karena sering Longsornya tebing sungai	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
347	05-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	perlu Penataan Sungai Tabuk dikarenakan Lokasi yang padat hunian penduduk	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
348	05-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Rumah Adat (Rumah Betang) Kecamatan Dusun Hilir karena Belum Tersedianya Rumah Adat yang layak	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
349	06-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya akses informasi kepada masyarakat luas, sehingga kesenjangan yang selama ini masih dirasakan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi dari Pemerintah Daerah, bersama ini kami mohon bantuan sarana dan prasarana media luar ruangan berupa 1 (satu) unit Videotron ukuran 4 m x 8 m yang pendanaannya melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025	Kab. Barito Selatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ditampung dalam APBD Prov.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
350	06-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Jembatan Dan Dermaga Khusus Puskesmas Bangkuang	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
351	06-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Perkuatan Tebing Penahan Abrasi Tanah Longsor dengan volume 150m	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
352	06-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Jembatan dengan volume 10 M	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
353	06-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Jembatan Saranpanji dengan volume (100 M)	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
354	06-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pemeliharaan Drainase di Jl SMAN 1 RT.014 RW.004 Samuda Sepanjang 2000 m	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Ditindakkanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
355	06-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Rengge). Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 150.000.000,-	Kab. Pulang Pisau	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	bahan dan data dukung lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
356	06-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan Alat Tangkap Ikan Serta Mesin dan Body Perahu Penangkapan Ikan. Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 180.000.000,-	Kab. Pulang Pisau	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	1. Dicek kembali, karena Proposal tahun 2016	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
357	06-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan Sarana dan Prasarana Pendukung Berupa Mesin Diesel 26 Hp Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 120.000.000,-	Kab. Pulang Pisau	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Dicek kembali karena Proposal tahun 2021	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
358	06-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan Alat Tangkap Ikan Serta Mesin dan Body Perahu Penangkapan Ikan. Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 200.000.000,-	Kab. Pulang Pisau	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dicek kembali karena Proposal tahun 2021	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
359	06-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Rempa) Total Anggaran yang diperlukan sebesar Rp.200.000.000,-	Kab. Pulang Pisau	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dicek kembali karena Proposal tahun 2021	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
360	06-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan pengadaan sarana penunjang usaha budidaya ikan masyarakat berupa benih ikan dengan pagu dana sebesar Rp. 400.000.000	Kab. Pulang Pisau	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dilengkapi dengan data dukung yang lengkap seperti proposal dan lainnya	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
361	06-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan pembangunan prasarana budidaya ikan untuk menunjang usaha budidaya ikan masyarakat berupa Pembuatan Kolam sebanyak 28 Unit dengan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000	Kab. Pulang Pisau	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung yang lengkap berupa proposal dan lainnya	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
362	06-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan pembangunan prasarana budidaya ikan untuk menunjang usaha budidaya ikan masyarakat berupa Pembuatan Kolam Karamba 33 unit dengan pagu dana sebesar Rp. 600.000.000,-.	Kab. Pulang Pisau	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi dengan data dukung yang lengkap berupa proposal dan lainnya	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
363	06-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan peningkatan kualitas rumah warga masyarakat berpenghasilan rendah / pra sejahtera total anggaran Sebanyak Rp 3.025.000.000,-	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaiakan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
364	06-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya dukungan PSU pada Kawasan Permukiman untuk mendukung Permukiman yang layak dengan total Rp. 5.883.939.600 ,-	Kab. Pulang Pisau	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaiakan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
365	07-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya Anggaran Yang Berdampak Tidak Terlaksana Kegiatan Tersebut	Kab. Murung Raya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaiakan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
366	07-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya Anggaran Yang Berdampak Tidak Terlaksana Kegiatan Tersebut	Kab. Murung Raya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaiakan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
367	07-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya Anggaran Yang Berdampak Tidak Terlaksana Kegiatan Tersebut	Kab. Murung Raya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaiakan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
368	07-03-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya Anggaran Yang Berdampak Tidak Terlaksana Kegiatan Tersebut	Kab. Murung Raya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran serta prioritas penanganan provinsi	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
369	07-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Tidak Tersedianya obat-obatan ODGJ (1 paket)	Kab. Sukamara	RSJ Kalawa Atei	Usulan disetujui	-	-Perlu tambahan data dukung -Menyesuaikan anggaran	null	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	25.000.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
370	07-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya kunjungan Dokter Spesialis Jiwa RSJ Kalawe Atei (2 kali)	Kab. Sukamara	RSJ Kalawa Atei	Usulan disetujui	-	-Perlu tambahan data dukung -Menyesuaikan anggaran	Usulan ini dialihkan ke Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	40.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
371	07-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya Peralatan/APD Tenaga Kesehatan untuk bencana daerah (perahu karet, sepatu, rompi, alat kesehatan dan obat-obatan) karena merupakan kewenangan SPM Provinsi (5 paket)	Kab. Sukamara	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	-	-Perlu tambahan data dukung -Menyesuaikan anggaran	Usulan ini diakomodir utk APD dan perahu karet, mohon untuk melengkapi data dukung berupa rincian APD, ukuran, dll	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	5	paket	150.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
372	07-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya mobil patroli dalam rangka kegiatan patroli dan yustisi kebencanaan (1 unit)	Kab. Sukamara	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	700.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
373	07-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya Mobil Komodo KD250 X Damkar pada saat penanganan kebakaran karhutla (1 unit)	Kab. Sukamara	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	700.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
374	07-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya alat mini steker Alat Penembak Api (5 unit)	Kab. Sukamara	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	5	Unit	50.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
375	07-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana selang kebakaran 1,5 Inc 30 meter (5 buah)	Kab. Sukamara	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	5	Buah	50.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
376	07-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana kebakaran berupa mesin pompa apung selang 1,5 inch (2 buah)	Kab. Sukamara	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Buah	300.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
377	07-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya mesin jinjing pemadam kebakaran GXH 50 (3 buah)	Kab. Sukamara	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	3	Buah	150.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
378	07-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan pengendalian bahaya kebakaran (1 kegiatan)	Kab. Sukamara	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	BPB-PK Prov Kalteng memfasilitasi peningkatan kapasitas TRC kabupaten/ Kota secara bertahap setiap tahun dengan kouta yang ditentukan untuk setiap kabupaten kota sehingga tidak ada anggaran khusus untuk memfasilitasi satu kabupaten/ Kota.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	200.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
379	07-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Sosialisasi pengurangan resiko bencana (1 kegiatan)	Kab. Sukamara	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Pelaksanaan utama dilakukan langsung oleh Kab/Kota, Provinsi hanya bersifat pendukung dan peningkatan SDM dalam memberikan pembekalan, monitoring dan evaluasi.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	200.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
380	07-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya bimbingan teknis kajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten (1 kegiatan)	Kab. Sukamara	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	1. TA 2025 BPBPK Prov. tidak menganggarkan kegiatan Bimtek pascabencana 2. Dukungan BPBPK Prov. berupa fasilitasi narasumber Bimtek 3. TA 2024 BPBPK Prov. akan melaksanakan Bimtek Jitupasna dan R3P pada triwulan 3	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	200.000.000	Penanganan Pasca Bencana Provinsi
381	07-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Masih kurangnya pelatihan kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Pasca Bencana Kabupaten (1 kegiatan)	Kab. Sukamara	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	1. TA 2025 BPBPK Prov. tidak menganggarkan kegiatan Bimtek pascabencana 2. Dukungan BPBPK Prov. berupa fasilitasi narasumber Bimtek 3. TA 2024 BPBPK Prov. akan melaksanakan Bimtek Jitupasna dan R3P pada triwulan 3	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	200.000.000	Penanganan Pasca Bencana Provinsi
382	07-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Kurang optimalnya pengembangan sektor perikanan sehingga memerlukan bantuan peralatan penangkapan ikan sebanyak 1 paket	Kab. Lamandau	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar dicek dan diproses kelengkapan data dukungunya	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
383	07-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan sektor perikanan belum optimal, sehingga memerlukan Bantuan Alat dan Mesin Pembuatan Pakan Ikan sebanyak 4 unit untuk 4 desa	Kab. Lamandau	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar dicek dan diproses data dukungannya	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
384	08-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Sarana pertanian yang masih terbatas, sehingga diusulkan Bantuan Hand Sprayer guna mendukung Pembukaan Lahan Tanpa Bakar sebanyak 40 unit untuk 2 (dua) desa	Kab. Lamandau	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Proposal berupa KAK sudah ada	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	Unit	20.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
385	08-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Sarana pertanian yang masih terbatas, sehingga diusulkan Bantuan Cultivator sebanyak 9 unit untuk 9 (sembilan) desa	Kab. Lamandau	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Proposal berupa KAK sudah ada	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	5	Unit	125.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
386	08-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Produksi dan mutu hasil pertanian yang belum optimal, sehingga diusulkan Bantuan Bibit Tanaman Buah Mangga sebanyak 1.500 pohon untuk 3 (tiga) desa	Kab. Lamandau	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1500	Batang	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
387	08-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Produksi dan mutu hasil pertanian yang belum optimal, sehingga diusulkan Bantuan Bibit Buah Lengkeng sebanyak 1.000 pohon untuk 2 (dua) desa	Kab. Lamandau	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Proposal berupa KAK sudah ada	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1000	Batang	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
388	08-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Produksi dan mutu hasil pertanian yang belum optimal, sehingga diusulkan Bantuan Bibit Tanaman Buah Durian sebanyak 1.000 pohon untuk 2 (dua) desa	Kab. Lamandau	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Proposal berupa KAK sudah ada	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1000	Batang	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
389	08-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Masyarakat lokal memiliki kecenderungan ternak Babi, Untuk optimalisasi sektor peternakan diperlukan bibit/benih ternak berupa babi batam sebanyak 100 ekor yang direncanakan untuk diberikan kepada kelompok tani di 5 (lima) desa/kelurahan	Kab. Lamandau	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Proposal berupa KAK sudah ada	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	60	Ekor	180.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
390	08-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Masyarakat ex transmigran preferensi dalam ternak berupa kambing, Untuk optimalisasi sektor peternakan diperlukan bibit/benih ternak berupa kambing sebanyak 75 ekor yang direncanakan untuk diberikan kepada kelompok tani di 3 (tiga) desa	Kab. Lamandau	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Proposal berupa KAK sudah ada	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	50	Ekor	150.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
391	08-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Produksi dan mutu hasil pertanian di Kabupaten Lamandau masih memerlukan dorongan atau bantuan bagi para kelompok tani, untuk itu diusulkan bantuan bibit tanaman lada sebanyak 1.600 pohon.	Kab. Lamandau	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
392	08-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Produksi dan mutu hasil pertanian di Kabupaten Lamandau masih memerlukan dorongan atau bantuan bagi para kelompok tani, untuk itu diusulkan bantuan bibit tanaman kakao sebanyak 1.300 pohon.	Kab. Lamandau	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
393	08-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Produksi dan mutu hasil pertanian di Kabupaten Lamandau masih memerlukan dorongan atau bantuan bagi para kelompok tani, untuk itu diusulkan bantuan bibit tanaman kelapa hibrida sebanyak 320 pohon.	Kab. Lamandau	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
394	08-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Produksi dan mutu hasil pertanian di Kabupaten Lamandau masih memerlukan dorongan atau bantuan bagi para kelompok tani, untuk itu diusulkan bantuan bibit tanaman sawit sebanyak 4.200 pohon.	Kab. Lamandau	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
395	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Tempat Penjemuran Ikan Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai (3 paket)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dibatalkan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
396	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya pelatihan K3 terhadap masyarakat kabupaten barito selatan	Kab. Barito Selatan	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
397	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Cool Box Ikan Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai (104 Buah)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
398	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	diperlukan nya Sosialisasi UMK untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angka Kerja masyarakat kabupaten barito selatan	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans. Agar jangan menggunakan bahasa singkatan untuk UMK yang mungkin kepanjangannya Upah Minimum Kabupaten	Usulan Mengenai Sosialisasi UMK, Peraturan Pengupahan, dan Bimtek Susu, dijadikan 1 menjadi Kebijakan Pengupahan. Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	100.000.000	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
399	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Air Dua RT. 1 ke RT 2 (700 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
400	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	diperlukannya Bimtek Struktur dan Skala Upah untuk masyarakat kabupaten barito selatan	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Usulan Mengenai Sosialisasi UMK, Peraturan Pengupahan, dan Bimtek Susu, dijadikan 1 menjadi Kebijakan Pengupahan. Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Kegiatan dijadikan satu untuk semua kab/kota.	-	-	-	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
401	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adaya Keranjang/Troy Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai (100 Buah)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
402	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sukamara, Diperlukan Kegiatan Pelatihan Tata Rias (Make Up Artist Comercial/MUA). (1 Kegiatan)	Kab. Sukamara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	80.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
403	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan Jalan lingkungan desa Sekunigan Baru Kec. Balai Riam (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
404	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Pengadaan Penerangan Jalan Umum Kawasan Perumahan / Permukiman pada 17 lokasi di Kabupaten Sukamara	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
405	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Sosialisasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Usulan Mengenai Sosialisasi UMK, Peraturan Pengupahan, dan Bimtek Susu, dijadikan 1 menjadi Kebijakan Pengupahan. Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Kegiatan dijadikan satu untuk semua kab/kota.	-	-	-	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
406	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya pelatihan untuk Pembangunan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans. Jenis pelatihan yang diusulkan belum tersirat	7 dari 9 kejuruan yang diusulkan berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan. Sementara: otomotif/las/listrik/processing/komputer, menjahit @60jt	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	2	Paket	120.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
407	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Pempaning Kec. Balai Riam (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
408	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatkan jalan poros SP.3 Sungai Baru Fungsional untuk akses keseharian warga dan memperlancar mobilisasi pembangunan SP.3 Sungai Baru, Diperlukan Pembuatan Jalan Masuk SP.3 Sungai Baru Sebelah Barat. (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan.	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
409	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Penimbunan jembatan jl.arah balai riam (1Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
410	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan poros SP.3 Sungai Baru Fungsional untuk akses keseharian warga dan memperlancar mobilisasi pembangunan SP.3 Sungai Baru, Diperlukan Pembuatan Doble Box Culvert SP.3 Sungai Baru. (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan.	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
411	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Jihing - Air Dua Kec. Balai Riam (1Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
412	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Pembuatan Jalan Lingkungan Ds. Jihing - Petarikan Ds. Jihing Kec. Balai Riam (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
413	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan - jalan Provinsi di Kabupaten Sukamara sehingga diperlukan Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (Uk. 90 x 90 cm) (150 buah)	Kab. Sukamara	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	150	unit	525.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
414	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Masuk menuju SDT bisa Fungsional dan memperlancar mobilisasi Pembangunan SDT 90 KK, Diperlukan Penimbunan Jalan Masuk Menuju Jalan SDT 90 KK. (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan.	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
415	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Bangun Jaya (1,8 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
416	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan jalan lingkungan Jl. KH. Ali Afifi RT 01 ke RT 07, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1,8 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
417	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Permintaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan dan Zebra Cross (30.000 meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	30000	M'	1.500.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
418	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya RPPJ di lokasi tersebut sehingga perlu permintaan Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) Uk. 120 x 180 cm (13 buah)	Kab. Sukamara	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	13	Unit	283.400.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
419	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Dalam upaya peningkatan kemampuan dan produktivitas warga transmigrasi, Diperlukan Pengembangan budidaya perikanan Unggulan Kawasan Transmigrasi. (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan.	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	30.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
420	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Masih terbatasnya deliniator yang terpasang perlu permintaan Pengadaan & Pemasang Patok Tikungan Pipa Besi (Deliniator) (250 buah)	Kab. Sukamara	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	250	Unit	412.750.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
421	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Penggilingan Ikan Kelompok Nelayan Rt. 06 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai (14 Unit)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
422	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan jalan lingkungan Jl. Anggrek 4 RT 01 keRT 06, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1,8 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
423	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan jalan lingkungan Jl. Anggrek 2 RT 11 ke RT 07, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1,8 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
424	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Chest Freezer untuk Poklachsar Lestari Jaya (Jl. Pasir Panjang RT. 02 Desa Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci) (10 Buah)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
425	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan jalan lingkungan Jl. Anggrek 5 RT 12, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (600 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
426	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Agar Jalan Masuk menuju SDT bisa Fungsional dan memperlancar mobilisasi Pembangunan SDT 90 KK, Diperlukan Peningkatan Jalan Masuk SDT. (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan.	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
427	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedia ZOSS dilokasi tersebut sehingga perlu bantuan Pembuatan ZOSS SMA 1 Pantai Lunci dan SDN 1 Desa Sungai Damar (2 paket)	Kab. Sukamara	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	2	Lokasi	841.318.000	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rejayasa Lalu Lintas
428	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan jalan lingkungan Jl. Anggrek I RT 2 ke RT 4, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1,8 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
429	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Agar Tertatanya halaman Balai Pertemuan SP.1 Pulau Nibung yang bersih aman dan indah sebagai wadah pertemuan masyarakat Transmigrasi, Diperlukan Penataan Halaman Balai Pertemuan SP. 1 Pulau Nibung. (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan.	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
430	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Anggrek I RT 2 ke RT 4, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (600 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
431	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Lagsat I RT 1 keRT 17, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
432	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya akses yang aman menuju Lahan Pekarangan (LP) RTJK Transmigran, Diperlukan Pembangunan Jembatan Titian Depan rumah 55 KK. (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan.	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
433	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 14, Kel. Padang , Kec. Sukamara (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
434	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Chest Freezer untuk Poklachsar Putri Mandiri (Jl. Pasir Panjang RT. 03 Desa Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci) (10 Buah)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
435	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Bengkoang RT 14, Kel. Padang , Kec. Sukamara (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
436	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Chest Freezer untuk Poklachsar Citra Bahari (Jl. Pasir Panjang RT. 03 Desa Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci) (10 Buah)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
437	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Pembuatan Jalan Lingkungan Samping Sahidul RT 14, Kel. Padang , Kec. Sukamara (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
438	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Chest Freezer untuk Poklahsar Putri Harapan (Jl. Pasir Panjang RT. 03 Desa Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci) (10 Buah)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
439	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Jago RT 14, Kel. Padang , Kec. Sukamara (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
440	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Chest Freezer untuk Poklahsar Cempaka (Jl. Pasir Panjang RT. 03 Desa Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci) (10 Buah)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
441	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Dalam upaya peningkatan kemampuan dan produktivitas warga transmigrasi, Diperlukan Pelatihan Olahan Pangan Lokal dan Pengemasannya bagi warga UPT SP.1 Pulau Nibung. (1 Kegiatan)	Kab. Sukamara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Pelatihan pada Kawasan Transmigrasi sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas SDM. Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	150.000.000	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
442	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Papuyu RT 5, Kel. Padang , Kec. Sukamara (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
443	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Breakwater Pantai Sebelah Barat Rt. 02 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaiakan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
444	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Jetty Muara Saluran Pembuang Ke Laut Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaiakan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
445	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Jalan Inspeksi DIR Kuala Jelai (1Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaiakan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	500	m	10.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
446	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Dalam upaya peningkatan kemampuan dan produktivitas warga transmigrasi, Diperlukan Pengembangan budidaya perikanan darat bagi warga transmigrasi UPT SP.1 Pulau Nibung. (1 Kegiatan)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembali kan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Kewenangan transmigrasi prov dalam UU 23/2014 yaitu pada pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan Satuan Permukiman tahap pemantapan.	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
447	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan lingkungan Gg Binjau di Jalan Matnur RT 11, Mendawai, Kec. Sukamara (200 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
448	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	pembuatan jembatan titian DIR Basarang RT 11, Mendawai, Kec. Sukamara (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
449	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Lingkungan H. Matnur RT 11, Mendawai, Kec. Sukamara (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
450	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	peningkatan Jalan Lingkungan Gg Mandiri RT 12, Mendawai, Kec. Sukamara (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
451	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Petai RT 12, Mendawai, Kec. Sukamar (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
452	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Jalan lingkugnan Gang Nyatuh RT 12, Mendawai, Kec. Sukamara (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
453	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Jalan Lingkungan Belabar RT 13, Mendawai, Kec. Sukamara (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
454	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02 Nibung Terjun Kec .Permata Kecubung (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
455	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
456	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02 dan RT 5 Natai Kondang Kec .Permata Kecubung (1.000 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
457	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
458	08-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
459	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 1 ke RT 3 Ds. Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci (11,25 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
460	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Imanuddin Ds. Sungai Baru Kec. Jelai (1.000 meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
461	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Sungai Baru Kec. Jelai (1.000 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
462	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Badan Jalan Lingkungan Ds. Sungai Baru Kec. Jelai (3.000 meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
463	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Badan Jalan Lingkungan Ds. Sungai Baru Kec. Jelai (3.000 meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
464	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sukarman Al Gani, Pulau Nibung Kec. Jelai (600 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
465	08-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
466	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (20 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
467	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Air Dua RT. 1 ke RT 2 (700 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
468	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan jalan lingkungan Ds. Sekuningan Baru RT. 1 ke RT. 7 RT. 10 ke RT 12 (1 Paket)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
469	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (20 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
470	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (50 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
471	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (30 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
472	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (30 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
473	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (30 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
474	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (50 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
475	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (30 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
476	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan Peningkatan Jalan Tambak Rt. 3, 4 dan RT, 5 Ds. Sungai Pasir Kec. Pantai Lunci (600 Meter)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
477	08-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
478	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan tempat penjemuran ikan, penggilingan ikan, Chest Freezer, cool box dan keranjang/troy untuk Poklhasar Mitra Usaha (Jl.Husin Hamzah RT.05 Kel Kuala Jelai)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
479	08-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
480	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Chest Freezer, cool box dan keranjang/troy untuk Poklhasar Cabe Rawit (Jl. A. Yani RT.02 Kelurahan Kuala Jelai Kec. Jelai) 1 Paket	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
481	08-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
482	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Kapal Penangkap Ikan Lebih Kecil dari 3 GT Beserta Mesin Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Sungai Damar (6 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan lainnya yang lengkap	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status depending)	-	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
483	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
484	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
485	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Bengkel Nelayan di Kel. Jelai (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dikembalikan	Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain.	Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Tenaga kerja	Dikembalikan. Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain.	-	-	-	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
486	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Jalan Produksi Nelayan (Penataan Kampung Nelayan) di Desa Sungai Cabang Barat (4 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Perumahan	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Bukan wewenang Dinas Kelautan Perikanan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
487	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
488	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belu adanya Bangsal Perbaikan Jaring di Desa Sungai Tabuk (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dikembalikan	Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain.	Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Tenaga Kerja	Dikembalikan. Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain.	-	-	-	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
489	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Bangsal Perbaikan Jaring di Desa Sungai Cabang Barat (2 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dikembalikan	Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain.	Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Tenaga Kerja	Dikembalikan. Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain.	-	-	-	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
490	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Bangsal Perbaikan Jaring di Desa Sungai Damar (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dikembalikan	Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain.	Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Tenaga Kerja	Dikembalikan. Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain.	-	-	-	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
491	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
492	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Tambat Labuh Kapal Nelayan di Desa Sungai Damar (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
493	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Jaringan Infrastruktur Jalan Permukiman masih Belum Fungsional	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
494	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Tambat Labuh Kapal Nelayan di Kel. Jelai (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
495	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
496	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Tambat Labuh Kapal Nelayan di Desa Sungai Cabang Barat (2 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
497	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Cool Storage di Desa Sungai Tabuk (mendukung kampung nelayan maju) 1 Paket	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
498	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
499	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
500	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
501	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
502	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
503	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
504	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
505	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
506	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
507	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
508	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
509	08-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
510	08-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Jalan Permukiman Masih Rendah	Kab. Barito Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
511	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Hand Traktor Rd 2 Rotary (prapanen) (UPJA Desa Sungai Pasir dan UPJA Desa Pulau Nibung) (15 Unit)	Kab. Sukamara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	3	Unit	105.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
512	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Comben Harvester Kecil (Yanmar YH 150) (pasca panen) (UPJA Desa Sungai Pasir dan UPJA Desa Pulau Nibung) (4 Unit)	Kab. Sukamara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	Unit	250.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
513	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedia anggaran Ibu hamil dan anak stunting dari keluarga miskin, Diperlukan Bantuan Pengadaan paket makanan dan atau minuman. (50 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Melakukan pemutakhiran DTKS agar warga miskin/kurang mampu dapat diusulkan mendapatkan bantuan sosial PKH atau BPNT	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	20.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
514	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	PC yang digunakan saat ini lelet/lambat loading membuka aplikasi SIAK, Diperlukan Bantuan PC All In One Memori 16 Gb. (5 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
515	08-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Karena Laptop dalam Keadaan Rusak, Maka Diperlukan Bantuan Laptop ram 16 Gb. (3 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
516	08-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Kabel LAN Tidak Ada, Diperlukan Bantuan Kabel LAN. (1 Rol)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
517	09-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi 1 Kegiatan Rp. 200.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Jenis usulan sosialisasi agar bisa diperjelas apakah terkait dokumen kependudukan	Diakomodir, untuk pemahaman kepada stakeholder akan pentingnya kepemilikan dokumen dan data kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Laporan	200.000.000	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk
518	09-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya kesadaran Perusahaan untuk pembuatan Peraturan Perusahaan dan perjanjian kerja bersama Rp. Rp. 26.500.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Usulan terkait HI dijadikan 1 kegiatan menjadi Sosialisasi Sarana HI dan Pengupahan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	100.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
519	09-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sosialisasi pencegahan perselisihan hubungan industrial di perusahaan Rp. 30.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Usulan terkait HI dijadikan 1 kegiatan menjadi Sosialisasi Sarana HI dan Pengupahan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Kegiatan dijadikan satu untuk semua kab/kota.	-	-	-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
520	09-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya Sosialisasi UMK di perusahaan dan kurangnya perusahaan yang belum melaksanakan Upah Minimum Kabupaten Rp. 50.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Usulan terkait HI dijadikan 1 kegiatan menjadi Sosialisasi Sarana HI dan Pengupahan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Kegiatan dijadikan satu untuk semua kab/kota.	-	-	-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
521	09-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Rendahnya Pembekalan Pendidikan Bagi Tenaga kerja Mandiri dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Rp. 200.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	20	Orang	200.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
522	09-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Terbatasnya pelatihan teknisi sepeda motor RP. 75.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	75.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
523	09-03-2024	SUNARDI,Si.,M.Sc.,M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Power Treser Multiguna (pasca panen) (Desa Sungai Pasir, Desa Pulau Nibung, Desa Sungai Cabang Barat, Desa Sungai Bundung, Desa Sungai Baru) (20 Unit)	Kab. Sukamara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	Unit	35.000.000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
524	09-03-2024	SUNARDI,Si.,M.Sc.,M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Ayam Buras dan Pakan untuk Masyarakat (Poktan) (5 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
525	09-03-2024	SUNARDI,Si.,M.Sc.,M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Bantuan Benih Jagung Pipil (900 Kg)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
526	09-03-2024	SUNARDI,Si.,M.Sc.,M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
527	09-03-2024	SUNARDI,Si.,M.Sc.,M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
528	09-03-2024	SUNARDI,Si.,M.Sc.,M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Bantuan Bibit Aalpukat (500 Batang)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
529	09-03-2024	SUNARDI,Si.,M.Sc.,M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
530	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Bantuan Insektisida (300 Liter)	Kab. Sukamara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	300	Liter	100.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
531	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Bantuan Fungisida (30 Kg)	Kab. Sukamara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	30	Kg	75.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
532	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Rehab Anjungan Pantai Anugerah (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	250.000.000	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
533	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Menara Pandang di Pantai Anugerah (1 Buah)	Kab. Sukamara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	500.000.000	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
534	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Warung Kuliner di Pantai Anugerah (10 Pintu)	Kab. Sukamara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	250.000.000	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
535	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Penyusunan Dokumen KEHATI (1 Dokumen)	Kab. Sukamara	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	Dokumen	1.100.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
536	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Obeng, karena Alat Tidak Ada. (1 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
537	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Tang, Karena Alat Tidak Ada. (1 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
538	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Router, Karena Router yang ada Rusak. (2 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
539	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Card Reader, Karena Alat Rusak. (4 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
540	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Printer Epson L14150 Print A3+ Scan Copy F4 Legal, Karena Alat Tidak Ada. (2 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
541	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Printer ID Card Evolis Promacy, Karena Alat Tidak Ada. (5 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
542	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan EVOLIS RIBBON KTP EL AVANSIA RT4F010P00308. (10 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
543	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Alat PITA EVOLIS KIA / PITA EVOLIS R5FP03008 / PITA EVOLIS PN R5FP03008 YCMKO 200 Image / PITA EVOLIS PRIMACY R5FP00308. (10 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
544	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan AC (AIR CONDITIONER), Karena AC Belum ada. (2 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
545	09-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan STAVOL SVC 1000 N, Karena Stavol Tidak Ada. (5 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
546	09-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Rambu-rambu lalu lintas sebanyak 64 buah, ramburambu petunjuk 4 buah, marka Zoss 2 titik, dan Perbaiki Apil (Alat Pemberi Isarat Lalu Lintas) 1 buah dengan total pagu anggaran Rp, 150.000.000	Kab. Pulang Pisau	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
547	09-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha volume 2000 NIB (Pagu Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Bisa dilaksanakan di Kab/Kota	sudah terakomodir di tahun anggaran 2024 kegiatan Sosialisasi NIB bagi pelaku usaha□	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	200.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
548	09-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pemberdayaan UMKM dalam pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Pelatihan/Pendampingan volume 100 PUMK (Pagu Rp. 150.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Kewenangan Kab/Kota	akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	150.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
549	09-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pemberdayaan UMKM melalui pendampingan kepada UMKM volume 2 Tenaga Pendamping UMKM (Rp. 69.600.000)	Kab. Seruyan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	69.600.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
550	09-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pemberdayaan UMKM melalui pendampingan penerbitan Seritikat Halal, Sertifikat Merek, BPOM volume 500 sertifikat (Rp. 75.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	telah terakomodir di APBD tahun 2024	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	75.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
551	09-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan Kewirausahaan volume 300 PUMKM (Rp. 500.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	500.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
552	09-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan diversifikasi Produk Olahan Berbasis Hasil Kelautan dan Perikanan (Frozen Food dan Pangan Kalengan) volume 60 Orang (Rp. 225.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Berbasis Hasil Kelautan dan Perikanan (Frozen Food dan Pangan Kalengan) (3 hari)	Lengkapi data dukung : e proposal	30	orang	120.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
553	09-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan diversifikasi Produk Olahan Berbasis Hasil Pertanian dan Perkebunan (Pisang, Aren dan Kopi) volume 60 Orang (Rp. 225.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Pelatihan diversifikasi Produk Olahan Pangan Hasil Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Seruyan	Lengkapi data dukung " e proposal	30	peserta	85.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
554	09-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Pengolahan Produk Pangan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dan Potensi dan Potensi Daerah (Makanan Ringan) volume 20 Orang (Rp. 75.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Pelatihan Pengolahan Produk Pangan Potensial di Kabupaten Seruyan	Lengkapi data dukung : e proposal	20	peserta	75.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
555	10-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian volume 120 Orang (Rp. 240.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	240.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
556	10-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pasar Murah Bersubsidi volume 10.000.000 Paket (Rp. 1.500.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Pasar Murah Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah Kabupaten Seruyan	Lengkapi data dukung : e proposal	1	kegiatan	150.000.000	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
557	10-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Pengolahan Kerajinan Tangan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dan Potensi Daerah (Purun, Sabut/Tempurung Kelapa, Batik) volume 60 Orang (Rp. 225.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Pelatihan Pengolahan Kerajinan Tangan Purun di Kabupaten Seruyan (4 hari)	Lengkapi data dukung : e proposal	30	orang	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
558	10-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Penyediaan Mesin dan Peralatan Produksi bagi Pelaku IKM volume 5 Kelompok IKM (Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	1. Lengkapi data dukung seperti profosal 2. menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Usulan diakomodir, menyesuaikan anggaran	1	paket	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
559	10-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Masih belum selesainya pembangunan jalan posros masuk ke TPA (lanjutan) sebesar Rp. 7.000.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED serta masuk dalam dokumen JAKSTRADA persampahan Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	unit	7.000.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
560	10-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Saluran Drainase di TPA belum seluruhnya dilakukan penyirangan Rp. 5.000.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Di proses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria (lahan CNC, surat minat dan kesiadaan menerima hibah, serta DED)	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Unit	5.000.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
561	10-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya pegara TPA sebagai tanda batas sekaligus untuk pengamanan di TPA sebesar Rp. 1.200.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED serta masuk dalam dokumen JAKSTRADA persampahan Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	unit	1.200.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
562	10-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya pelaksanaan kegiatan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 500.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, dengan menyesuaikan anggaran	1	Paket	20.000.000	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
563	11-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Gudang Logistik BPBD-PK Kabupaten Barito Timur (ukuran 8 x 10 meter = Rp. 250.000.000)	Kab. Barito Timur	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
564	11-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Perahu Penyelamat bermesin dan peralatan lainnya (3 Unit x 64.000.000 = Rp. 192.000.000)	Kab. Barito Timur	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Pemenuhan Saprass Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	3	Unit	192.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
565	11-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan unit mobil Water Supply PTO 4x4 Karhutla (2 unit x 1.653.900.032 = Rp. 3.307.800.064)	Kab. Barito Timur	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	3.307.800.064	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
566	11-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Unit Pemadam Kebakaran Kapasitas 3000 liter (2 Unit x 1.500.000.000 = Rp. 3.000.000.000)	Kab. Barito Timur	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	3.000.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
567	11-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan mobil patroli Pemadam Kebakaran (2 unit x 489.510.000 = Rp. 979.020.000)	Kab. Barito Timur	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	979.020.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
568	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Mesin 30 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 388.500.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
569	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Mesin 26 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 310.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
570	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Mesin 24 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 232.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
571	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Alat Tangkap Gill Net 4 Inchi untuk kelompok nelayan (Rp. 126.350.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
572	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Mesin 27 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 160.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
573	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Mesin 30 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 198.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
574	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Mesin 28 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 416.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
575	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah perahu/kapal penangkap ikan lengkap untuk kelompok nelayan (Rp. 450.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
576	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Alat Tangkap Gill Net 2 Inc untuk kelompok nelayan (Rp. 227.400.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
577	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Mesin 28 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 192.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
578	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Mesin 26 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 160.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
579	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Alat Tangkap Kepiting/Rajungan untuk kelompok nelayan (Rp. 150.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
580	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Mesin 28 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 320.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
581	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Mesin 27 HP untuk kelompok nelayan (Rp. 160.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
582	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Alat Tangkap Gill Net 4 Inchi untuk kelompok nelayan (Rp. 150.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
583	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Hibah Alat Tangkap Trammel Net untuk kelompok nelayan (Rp. 170.800.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
584	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Kolam Terpal / Kolam Tanah Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
585	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Kolam Terpal / Kolam Tanah Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 800.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
586	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Kolam Terpal / Kolam Tanah Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
587	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Kolum Terpal / Kolum Tanah Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
588	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Kolum Terpal / Kolum Tanah Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
589	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
590	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
591	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
592	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Sarana Prasarana Pembuatan Wadah Budidaya Pakan Alami Benih Ikan (Cacing Sutera) Untuk SMKN 1 Kuala Pembuang (Rp. 150.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan merupakan wewenang Dinas Pendidikan	Usulan akan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, pengajuan usulan agar dilengkapi dengan proposal dan data dukung	Bukan Wewenang Dinas Kelautan perikanan	1	Paket	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
593	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
594	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
595	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
596	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
597	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
598	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 1.000.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
599	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
600	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	'Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp.600.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
601	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	'Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
602	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	'Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
603	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	'Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
604	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 400.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
605	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belanja Hibah Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Rp. 800.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
606	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
607	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Tempat Parkir Roda 4 dan Roda 2 di Tempat Pelelangan Ikan (Rp. 250.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
608	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Kios Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
609	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Armada Speedboat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
610	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Drone Peralatan Pemetaan Potensi Perikanan (Rp. 50.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
611	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sarana Prasarana POKMASWAS (Rp. 36.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
612	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan ASN Pengawas / PPNS / Bimbingan Teknis untuk Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Rp. 50.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
613	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk unit usaha perikanan (Rp. 35.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
614	12-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar (Rp. 40.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dilengkapi dengan data dukung berupa Proposal dan lainnya yang lengkap	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
615	12-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Sarana untuk optimalisasi produksi pertanian masih terbatas, sehingga diusulkan power thresher sebanyak 2 (dua) unit	Kab. Lamandau	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	Unit	60.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
616	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan HUB USB MINIMALA 8 LOBANG, Karena PC All In One yang digunakan kurang lubang USB. (5 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
617	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan BATERAI KAMERA CANON EOS 1100 D, Karena Batrei Kamera Rusak. (1 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
618	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan UPS /APC BX650LI-MS 325 W (650 VA), Karena Alat Tidak Ada. (5 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
619	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan ALAT REKAM PORTABEL, Karena Alat Tidak Ada. (5 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
620	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan DISPENCER AIR, Karena Dispenser Tidak Ada. (4 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
621	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Peralatan e KTP. (7 Set)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
622	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan CPU Intel Core i5-13400. (7 Set)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
623	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Printer Epson L3210 A4. (7 Set)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
624	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Scanner ADF A4 F4 - Epson WorkForce DS410 / DS-410 / DS410. (4 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
625	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Papper Shredder - Origin Paper Shredder Soho 5. (2 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
626	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Laptop HSS SSD - Asus ROG. (4 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
627	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Kursi Pelayanan Putar. (10 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
628	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan CCTV - Hikvision IP Camera DS-2CD2942F- IS. (2 Set)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
629	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan AC 2PK - Panasonic. (2 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
630	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan Modem GSM. (2 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
631	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Bantuan UPS - UPS PROLINK PRO850SU. (7 Unit)	Kab. Sukamara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
632	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (20 Unit)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	20	Unit	600.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
633	13-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Adanya kejadian kasus penyakit menular yang ditularkan melalui vektor nyamuk di Kabupaten Barito Selatan yang menyebabkan penyakit DBD, Malaria dll. Maka perlu dilakukan penyemprotan (fogging) yang dilakukan oleh Puskesmas. Akan tetapi ketersediaan alat fogging di Kabupaten Barito Selatan terbatas dan hampir semua Puskesmas tidak memiliki sehingga perlu diusulkan melalui anggaran APBD I Provinsi Kalteng	Kab. Barito Selatan	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	usulan diterima namun 1 kabupaten hanya mendapat 2 mesin fogging dan menyesuaikan dengan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	unit	16.667.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
634	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Peningkatan Kualitas (50 Unit)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	30	Unit	900.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
635	13-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Masih terbatasnya pelayanan kesehatan mata di Kab. Barito Selatan, dimana ada beberapa kondisi pasien yang perlu dilakukan penanganan/ tindakan menggunakan peralatan yang sesuai yang tidak dimiliki oleh RSUD di Kabupaten, sehingga tidak bisa ditangani dan dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lain yang memiliki alat tersebut. Maka untuk bisa melayani pasien dalam kondisi tersebut perlu diadakan Operasi Katarak gratis di Kab. Barito Selatan dengan mendatangkan alat yang lebih memadai.	Kab. Barito Selatan	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan dan RENJA Dinas Kesehatan	usulan ini diakomodir namun untuk pelaksanaan akan ditentukan kemudian dan menyesuaikan anggaran dinas kesehatan provinsi kalimantan tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	15	mata	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
636	13-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Bantuan Benih Jagung Pipil (900 kg)	Kab. Sukamara	Dinas Perkebunan	Dikembalikan	1. Usulan Terlalu Besar 2. Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Bukan Kewenangan, Usulan Dikembalikan	-	-	kg	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
637	13-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang)	Kab. Sukamara	Dinas Perkebunan	Dikembalikan	1. Usulan Terlalu Besar 2. Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan, Dikembalikan	-	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
638	13-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang)	Kab. Sukamara	Dinas Perkebunan	Dikembalikan	1. Usulan Terlalu Besar 2. Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan, Dikembalikan	-	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
639	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang)	Kab. Sukamara	Dinas Perkebunan	Dikembalika n	1. Usulan Terlalu Besar 2. Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposals dan lainnya	Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan, Dikembalikan	-	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
640	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Bantuan Bibit Alpukat (500 Batang)	Kab. Sukamara	Dinas Perkebunan	Dikembalika n	1. Usulan Terlalu Besar 2. Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposals dan lainnya	Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan, Dikembalikan	-	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
641	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sekuningan Baru Kecamatan Balai Riam (18 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
642	13-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan, diperlukan Pengadaan Mobil Pelayanan keliling dan pengadaan peralatan E-KTP di delapan (8) Kecamatan sebagaimana proposal terlampir	Kab. Lamandau	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk memudahkan pelaksanaan jemput bola	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	765.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
643	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sekuningan Baru RT. 1 ke RT. 7, RT.10 ke RT.12 (10 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
644	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pempaning Kec. Balai Riam (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
645	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jihing Kec.Balai Riam (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
646	13-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk Cabang Olahraga yang berprestasi yang akan di jadikan Cabang Prioritas Kabupaten Lamandau ada 5 cabang olahraga 1. Panaham 2. Taekwondo 3. Pencak Silat 4. Catur 5. Tinju	Kab. Lamandau	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Dapat dilaksanakan untuk sarana olahraga cabang tertentu yang diminati oleh masyarakat	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	20	Unit	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
647	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jihing Air Dua Kec.Balai Riam (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
648	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Pembuatan Jalan Lingkungan Desa Jihing Petarikan Desa Jihing Kec. Balai Riam (1 Paket)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
649	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bangun Jaya (1.800 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
650	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. KH. ALI AFIFI Rt. 1 ke RT. 7 Bukit Sungkai, Kec.Balai Riam (1.800 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
651	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL. ANGGREK 4 RT. 1 ke RT. 6, Bukit Sungkai, Kec.Balai Riam (1.800 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
652	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar SMKN 1 Seruyan Raya Volume 250 M (Rp. 350.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
653	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL. ANGGREK 2 RT. 11 ke RT. 7, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1.800 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
654	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	kurangnya kemampuan pelaku usaha pengolahan dalam pengembangan dan pemasaran produk, Mesin press/ Sealer, mesin vakum, bahan kemasan plastik bersablon dan botol kemasan 3 paket. Rp100.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	Proposal tidak lengkap. Agar melengkapi proposal disertai data dukung : profil kelompok IKM penerima bantuan, spesifikasi peralatan yang diusulkan.	Usulan merupakan wewenang Dinas Perdagangan	-	-	-	-	-	-
655	13-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL. ANGGREK 5 RT. 12, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (600 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
656	13-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL. ANGGREK 1 RT. 2 ke RT. 4, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (1.800 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
657	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	keterbatasan kemampuan dan informasi pengolahan dalam mengakses perizinan untuk legalitas produk, Kegiatan Sosialisasi Pelatihan dan pendampingan bagi Pengolah hasil perikanan 3 kegiatan. Rp 100.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	Usulan tidak spesifik. Agar diperjelas topik dan ruang lingkup kegiatan yang diusulkan terkait pengolahan perikanan, misalnya tentang pemasaran/ produksi/ pengemasan?	Usulan merupakan wewenang Dinas Perdagangan	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
658	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL.ANGGREK 1 RT. 11, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (600 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
659	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana Pelabuhan ASDP Kumai Hulu (termasuk Perencanaan dan pengawasan) 1 Paket	Kab. Kotawaringin Barat	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
660	13-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Toilet di SMA Negeri 2 Lamandau mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan rehabilitasi	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
661	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengadakan/ memperbarui sarana dan prasarana penangkapan yang dimiliki, Perahu/ Kapal Perikanan, API dan ABPI, 1 Paket Rp 1.800.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan Agar dicek kembali dan ditindaklanjuti	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
662	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL. LANGSAT 1 RT. 1 ke RT. 17, Bukit Sungkai, Kec. Balai Riam (2.000 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
663	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengadakan/ memperbarui sarana dan prasarana penangkapan yang dimiliki, Perahu/Kapal perikanan lengkap lebih Kecil dari 3 GT 5 paket, Rp. 150.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar diteliti kembali dan diproses	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
664	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 2, Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung (2 Km)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
665	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengadakan/ memperbarui sarana dan prasarana penangkapan yang dimiliki, Perahu/Kapal perikanan lengkap lebih Kecil dari 3 GT 5 paket, Rp. 150.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
666	13-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
667	13-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
668	13-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
669	13-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
670	13-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
671	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 2 dan RT. 5, Natai Kondang, Kec. Permata Kecubung (1.000 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
672	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
673	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
674	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
675	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 1 ke RT. 3, Desa Sungai Tabuk, Kec. Pantai Lunci (11.250 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
676	13-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali, agar dapat diproses	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
677	13-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali, agar dapat diproses	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
678	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL. PEMUDA Desa Sungai Cabang Barat, Kec. Pantai Lunci (500 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
679	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali, agar dapat diproses	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
680	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan modal untuk kelengkapan sarana penangkapan ikan di PUD, Gillnet Permukaan (Monofilament) 50 Piece, Rp. 22.500.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali, agar dapat diproses	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
681	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengadakan/memperbarui sarana dan prasarana penangkapan yang dimiliki, Mesin Perahu/Kapal 10 Unit, Rp. 150.000.000	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Lengkapi Data Dukung (Nama Kelompok, DED, Foto Lokasi, Proposal, Gambar)	Agar Usulan kegiatan dicek dan diteliti kembali, agar dapat diproses	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
682	13-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Pembuatan Jembatan Titian Arah Ben Pantai RT. 1 ke RT. 2, Kuala Jelai, Kec. Jelai (1.500 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
683	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL.IMANUDDIN Desa Sungai Baru, Kec. Jelai (1.300 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
684	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Baru, Kec. Jelai (1.000 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
685	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Pembuatan Badan Jalan Lingkungan Desa Sungai Baru, Kec. Jelai (3.000 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
686	13-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	SMA Negeri 2 Lamandau memerlukan Guru Agama Islam sebanyak 1 (satu) orang	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan kewenangan	Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik.	Agar dipetakan kebutuhan tenaga pendidik untuk diusulkan dalam formasi pengadaan CPNS atau pemenuhan melalui skema P3K atau GTT	1	orang	-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
687	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan JL. SUKARMAN AL GANI, Pulau Nibung Kec. Jelai (600 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
688	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi gedung sekolah SMA Asseruyaniyah, Kuala Pembuang, Volume 1 Paket (Rp. 450.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	450.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
689	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan pagar sekolah SMA Asseruyaniyah Kuala Pembuang, Volume 250 M (Rp. 350.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
690	13-03-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Air Dua RT. 1 ke RT. 2 (700 Meter)	Kab. Sukamara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
691	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Mushola SMA N-2 Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Volume 1 Paket (Rp. 700.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	700.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
692	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Bali untuk KT. KARYA MUKTI II (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
693	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Bali untuk KT. FAJAR HARAPAN (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
694	13-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga perlu dilaksanakan pelatihan ketrampilan dalam pengolahan bahan baku lokal untuk peningkatan kapasitas sehingga mampu meningkatkan peran serta perempuan	Kab. Lamandau	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Uraian usulan kegiatan dan permasalahan terbalik	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Lamandau, sedangkan penganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	40.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
695	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Sumur Dan Tempat Profil Tank Sarana Air Bersih, Volume 1 Paket (Rp.600.000.000)	Kab. Seruyan	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
696	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Bali untuk KT. KARYA SARI II (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
697	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Bali untuk KT. LAKSANA JAYA (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
698	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Bali untuk KT. SEBULU JAYA (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
699	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Bali untuk KT. BINA HARAPAN (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
700	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Sumur Dan Tempat Profil Tank Sarana Air Bersih SMK Kertapati, Sembuluh 1, Volume 1 Paket (Rp.600.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
701	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Bali untuk KT. SUMBER MAKMUR (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
702	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Bali untuk KT. KARYA SEJATI (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
703	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pemberian bantuan alat kesenian dan/atau meubel kepada sanggar seni dan lembaga pelestari kebudayaan, 6 Kegiatan Rp. 90.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	90.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
704	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Bali untuk KT. SRI REJEKI (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
705	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Sumur Dan Tempat Profil Tank Sarana Air Bersih SMAN 1 Danau Sembuluh, Desa/Kelurahan Sembuluh 1, Volume 1 Paket (Rp.600.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
706	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Bali untuk KT. TANI SUBUR (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
707	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Bali untuk KT. PANTAI KETUMBAR (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
708	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Bali untuk KT. CUKUP LUMAYAN (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
709	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Fasilitasi Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah untuk menyediakan ruang apresiasi, ekspresi serta kreasi seni dan budaya bagi pelajar dan mahasiswa, 1 Kegiatan, Rp. 350.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	dilaksanakan di Provinsi dengan melibatkan seluruh Kabupaten/Kota	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	1.500.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
710	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Bali untuk KT. TANI MAKMUR (1 Jantan, 9 Betina, Rp 143.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
711	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK (USB), Desa Rungau Raya KM. 102, RT.005/RW.001, Volume 1 Paket (Rp.3.500.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	usulan pembangunan sekolah baru memerlukan studi kelayakan atau kajian, ketersediaan lahan serta status lahan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan agar jurusan SMK bisa link n match dengan potensi n kebutuhan lanangan keria	1	Unit	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
712	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Ternak Kambing PE untuk KT. KARYA BARU (2 Jantan, 22 Betina, Rp 100.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	65.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
713	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Ternak Kambing PE untuk KT. PESONA BAHARI (2 Jantan, 22 Betina, Rp 100.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	65.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
714	13-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Masih kurangnya pelatihan pustakawan sehingga diusulkan pelatihan untuk para pustakawan	Kab. Lamandau	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Permintaan Dapat saja terakomodir, Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersedian anggaran	1	kegiatan	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
715	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Ternak Kambing PE untuk KT. SRI REJEKI (2 Jantan, 22 Betina, Rp 100.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
716	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Ternak Kambing PE untuk KT. KARYA BAKTI (2 Jantan, 22 Betina, Rp 100.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
717	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pendidik/Guru Per-Mata Pelajaran, SMA Negeri Suling Tambun, Desa Tumbang Langkai, Kecamatan Suling Tambun, Volume 10 Pendidik/Guru	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik.	Agar dilakukan pemetaan kebutuhan untuk diajukan dalam formasi pengadaan CPNS, P3K, atau GTT	10	Orang	-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
718	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Ternak Babi untuk GAPOKTAN KARYA BERSAMA (2 Jantan, 10 Betina, Rp 86.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
719	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Ternak Itik untuk KT. SIDO TANI MAKMUR (20 Jantan, 180 Betina)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
720	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar Sekolah SMAN 2 Seruyan Tengah, Desa Sukorejo, Volume 250 M (Rp.350.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
721	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Ternak Itik untuk KT. JAYA MANDIRI (20 Jantan, 180 Betina)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
722	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Ternak Ayam Buras untuk GAPOKTAN MEKAR JAYA (20 Jantan, 180 Betina, Rp 32.614.960)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	25.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
723	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pemberian hibah uang insentif bagi pengelola sanggar seni agar tetap eksisting, 5 sanggar seni, Rp. 50.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	50.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
724	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Ternak Ayam Buras untuk KT. KELUARGA SEJAHTERA (20 Jantan, 180 Betina, Rp 32.614.960)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	25.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
725	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Video Promosi Pariwisata, 6 Lokasi Wisata, Rp. 90.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan dibuat video promosi destinasi unggulan se - Kalimantan Tengah, akan diakomodir oleh Provinsi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	1.000.000.000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
726	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Budidaya BAWANG MERAH untuk Kelompok Tani SRI SUBUR LESTARI (1 Ha, Rp 75.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
727	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Dukungan promosi event Festival Budaya Habaring Hurung dan Festival Bubur Asyura	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	diakomodir dalam kegiatan pendukung Event Provinsi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	150.000.000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
728	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Budidaya BAWANG MERAH untuk KWT. BINA HARAPAN Desa Natai Kerbau (0,5 Ha, Rp 37.500.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
729	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Budidaya BAWANG MERAH untuk POKTAN SUMBER MAKMUR Desa Karang Sari (1 Ha, Rp 75.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
730	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Budidaya BAWANG MERAH untuk KELOMPOK TANI SUMBER MAKMUR DESA SUNGAI KAPITAN (2 Ha, Rp 150.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
731	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Budidaya BAWANG MERAH untuk KELOMPOK TANI TUNAS HARAPAN JAYA DESA IPUH BANGUN JAYA (1 Ha, Rp 75.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
732	13-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Ruas Jalan Pasar Panas Bentot (9,78 Km Rp 22.126.620.000,00)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	9,78	Km	22.126.620.000	Rekonstruksi Jalan
733	13-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Ruas Jalan Hayaping-Bentot (9,07 Km Rp 34.923.830.000,00)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	9,07	Km	34.923.820.000	Rekonstruksi Jalan
734	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Budidaya CABAI RAWIT untuk GAPOKTAN RUKUN MULYA DESA NATAI BARU (3 Ha, Rp 105.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
735	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya pengembangan obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat (Peningkatan dan Pembangunan Sarana Parasarana Objek Wisata Tebing Tinggi, 1 Paket senilai Rp. 5.695.000.000.-)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	5.695.000.000	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
736	13-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Ruas Jalan Hayaping-Patung (8,50 Km Rp 33.079.110.000,00)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	8,5	Km	33.079.110.000	Rekonstruksi Jalan
737	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Budidaya CABAI RAWIT untuk KELOMPOK TANI BUNTAR MAKMUR KELURAHAN MADUREJO (2 Ha, Rp 70.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
738	13-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Ruas Jalan Bentot-Kambitin (Batas KALSEL) (5,00 Km Rp 12.916.850.000,00)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	5	Km	12.916.850.000	Rekonstruksi Jalan
739	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Budidaya CABAI RAWIT untuk KELOMPOK TANI MARGO JOYO DESA SUNGAI MELAWEN (2 Ha, Rp 70.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
740	13-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Ruas Jalan Telang Siong-Bangkuang (Batas BARSEL) (7,60 Km Rp 21.478.600.000,00)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	7,6	Km	21.478.600.000	Rekonstruksi Jalan
741	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Budidaya CABAI RAWIT untuk KWT. BOUGENVILE DESA SUKA MAKMUR (1Ha, Rp 35.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
742	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Budidaya CABAI RAWIT untuk POKTAN LESTARI MUKTI DESA SUNGAI HIJAU (3 Ha, Rp 105.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
743	13-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Kumuh Simpang Brombot (97,00 Buah Rp 1.940.000.000,00)	Kab. Barito Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	50	Unit	1.500.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
744	13-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Jaringan Irigasi Karau wilayah Desa bambulung (9.835 m Rp 14.500.000.045,65)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
745	13-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Jaringan Irigasi Karau wilayah Desa Tuyau (6.392 m Rp 9.423.894.284,88)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
746	13-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Bronjong/Pengamanan Sepadan Sungai Paku (637 m ³ Rp 1.000.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
747	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Mebler (Meja Kursi) Peserta didik SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Volume 1 Paket, (Rp. 250.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	250.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah
748	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan WC Siswa SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut, Volume 4 Unit (Rp. 500.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
749	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar, SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut, Volume 250 M (Rp. 350.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
750	13-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Penerangan jalan PJU, perbaikan jalan,semenisasi kondisi yang rusak ringan dan berat	Kota Palangkaraya	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
751	13-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Penerangan jalan PJU, perbaikan jalan,semenisasi kondisi yang rusak ringan dan berat	Kota Palangkaraya	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
752	13-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Penerangan jalan PJU, perbaikan jalan,semenisasi kondisi yang rusak ringan dan berat	Kota Palangkaraya	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
753	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Sumur Gali, SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut Volume 1 Paket (Rp. 250.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
754	13-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya perbaikan Kondisi kondisi kerusakan jalan,jembatan baik ringan maupun berat	Kota Palangkaraya	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
755	13-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya perbaikan Kondisi kondisi kerusakan jalan,jembatan baik ringan maupun berat	Kota Palangkaraya	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
756	13-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Bagi Pengurus BUMDesa (172 Orang Pagu 300,000,000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	300.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
757	13-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya rehap kantor kelurahan atap yg bocor	Kota Palangkaraya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaiakan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
758	13-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Drainase yang belum terbangun di Jalan Temanggung Tilung pada sisi Jalan Menteng sehingga menyebabkan kondisi Banjir disaat musim Penghujan	Kota Palangkaraya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaiakan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ditolak, bukan kewenangan dan akan diteruskan ke Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
759	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan marka jalan Volume 1500 km (Rp. 750.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	150000	M'	7.500.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
760	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas angkutan jalan Volume 200 unit (Rp. 500.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan harus didasarkan data dukung dan yang akan diakomodir/masuk skala prioritas adalah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan SK Jalan Provinsi No. 188.44/313/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	200	Unit	700.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
761	13-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Kota Palangkaraya	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di provinsi dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	20.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial
762	13-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Kota Palangkaraya	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Pelaksanaan bimbingan teknik peningkatan kemampuan PSM dilaksanakan di provinsi dengan melibatkan PSM dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	30.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
763	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Memenuhi semua Sarana pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota, Diperlukan Pengadaan 1 Perangkat Peralatan KTP Elektronik Mobile lengkap. (1 Set)	Kab. Sukamara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	9	Unit	176.440.625	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
764	13-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan bagi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)	Kota Palangkaraya	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Pelaksanaan bimbingan teknis di Provinsi dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	30.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
765	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Memenuhi semua Sarana pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota, Diperlukan Pengadaan 1 Perangkat Peralatan KTP Elektronik Mobile lengkap. (1 Set)	Kab. Sukamara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	9	Unit	176.440.625	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
766	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Memenuhi semua Sarana pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota, Diperlukan Pengadaan 1 Perangkat Peralatan KTP Elektronik Mobile lengkap. (1 Set)	Kab. Sukamara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	9	Unit	176.440.625	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
767	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Memenuhi semua Sarana pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota, Diperlukan Pengadaan 1 Perangkat Peralatan KTP Elektronik Mobile lengkap. (1 Set)	Kab. Sukamara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	9	Unit	176.440.625	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
768	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Memenuhi semua Sarana pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota, Diperlukan Pengadaan 1 Perangkat Peralatan KTP Elektronik Mobile lengkap. (1 Set)	Kab. Sukamara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	9	Unit	176.440.625	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
769	13-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Memenuhi semua Sarana pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota, Diperlukan Pengadaan 1 Perangkat Peralatan KTP Elektronik Mobile lengkap. (1 Set)	Kab. Sukamara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	9	Unit	176.440.625	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
770	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni bagi masyarakat Desa pematang Panjang senayak 50 unit dengan nilai Rp. 1.000.000.000	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
771	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat Desa Sungai Undang sebanyak 54 unit dengan nilai Rp. 1.080.000.000	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
772	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Rumah tidak Layak huni bagi masyarakat desa Lampasa senayak 10 unit dengan nilai Rp. 200.000.000	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
773	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni bagi masyarakat desa Bangun Harja sebanyak 20 unit dengan nilai Rp. 400.000.000	Kab. Seruyan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	-	-	-	-	-	-
774	13-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya peralatan pengujian logam berat dan senyawa pencemaran kualitas air berupa Instrumen ICP atau AAS sebanyak 1 unit beserta alat penunjangnya sebesar Rp 2.300 .000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Usulan masih belum bisa diakomodir oleh SOPD yang berwenang	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, dan menyesuaikan anggaran	1	Unit	2.300.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
775	13-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Belum dilakukannya Tata Batas Kawasan TAHURA seluas ± 1.513,19 Ha Rp. 500.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kehutanan	Usulan disetujui	-	1. Menyesuaikan anggaran 2. Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait	- Dinas kehutanan sebagai fasilitasi kegiatan tata batas TAHURA - Kegiatan tata batas merupakan kewenangan KLHK - Penganggaran untuk koordinasi dan cek lapangan sebagai bahan pendukung usulan tata batas - Sumber dana DBH-DR	usulan diakomodir, menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	60.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
776	13-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA Rp. 700.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kehutanan	Usulan disetujui	-	1. Menyesuaikan anggaran 2. Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait	- Penyusunan Rencana Pengelolaan TAHURA kewenangan Kabupaten/Kota sepenuhnya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota - Dinas Kehutanan sebagai fasilitasi usulan tata batas (rapat koordinasi dan atau ricek lapangan - bahan rapat) - Sumber dana DBH-DR	Usulan di Akomodir, dengan menyesuaikan anggaran	1	paket	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
777	13-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Rendahnya peran organisasi kepemudaan dalam kegiatan masyarakat sehingga diusulkan Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Pengurus Organisasi Kepemudaan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Kab. Lamandau	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Dapat dilaksanakan dengan sharing anggaran bersama Dispora Lamandau	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	60	Orang	200.000.000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
778	13-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	1. Rekonstruksi Jalan Pulang Pisau - Pangkoh 2. Rekonstruksi Jalan Pangkoh - Bahaur	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	null	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Km	10.000.000.000	Rekonstruksi Jalan
779	13-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi. Dengan alokasi Anggaran Rp. 250.000.000,-	Kab. Pulang Pisau	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dikembalikan	Usulan tdak jelas (minimal ada kejuruan pelatihan yang diusulkan)	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Usulan tdak jelas (minimal ada kejuruan pelatihan yang diusulkan)	-	-	-	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
780	13-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Menara Pantau Karhutla sebanyak 5 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	5	Unit	1.250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
781	13-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Se- Kabupaten Pulang Pisau dengan Pagu Anggaran Rp. 800.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Pembentukan Forum PRB di Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, Provinsi hanya bersifat pendampingan.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	200.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana
782	13-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 2 Ruang di SMAN 1 Maluku dengan pagu 400.000.000,-	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	400.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
783	13-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Semenisasi Halaman Sekolah SMAN 1 Maluku Rp. 200.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
784	13-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar Mushola Sekolah SMAN-1 Maluku 100 Meter Rp. 150.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	150.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
785	13-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Gapura sekolah dan penataan lapangan olah raga SMAN-2 Pandih Batu Rp. 250.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
786	13-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar Sekolah SMAN 2 Pandih Batu 100 Meter Rp. 250.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
787	13-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Rumah Dinas Guru / Kepala Sekolah SMAN-2 Pandih Batu sebanyak 4 Pintu dengan pagu Rp. 900.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	4	ruang	1.600.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
788	13-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Penimbunan Halaman Sekolah SMAN Terusan Batu Raya Rp. 170.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	170.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
789	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Rumah tidak Layak huni bagi masyarakat desa Lanpasa sebanyak 10 unit dengan nilai Rp. 200.000.000	Kab. Seruyan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	10	Unit	300.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
790	13-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni bagi masyarakat desa Bangun Harja sebanyak 20 unit dengan nilai Rp. 400.000.000	Kab. Seruyan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	20	Unit	600.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
791	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Operasi Katarak	Kab. Gunung Mas	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	-	-Perlu tambahan data dukung -Menyesuaikan anggaran, kewenangan dan RENJA	usulan ini diakomodir namun untuk pelaksanaan akan ditentukan kemudian dan menyesuaikan anggaran dinas kesehatan provinsi kalimantan tengah. Mohon untuk melengkapi data dukung berupa jumlah pasien, dll	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	15	mata	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
792	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Masih rendahnya kemampuan Koperasi dan UMK dalam menjalankan Digital Marketing. Pelatihan Digital Marketing Online Bagi Koperasi dan UMKM. 2 kegiatan	Kab. Kapuas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
793	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Lapangan Futsal Out Door SMAN 2 Danau Sembuluh, Desa Telaga Pulang, Volume 1 Paket (Rp. 400.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	400.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
794	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Lapangan Bola Volly Out Door SMAN 2 Danau Sembuluh Desa/Kelurahan Telaga Pulang, Volume 1 Paket (Rp. 250.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
795	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Lapangan Badminton Out door SMAN 2 Danau Sembuluh, Desa/Kelurahan Telaga Pulang, Volume 1 Paket (Rp. 250.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
796	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Masih rendahnya kemampuan Pelaku Usaha dalam mengolah hasil potensi lokal. Pelatihan Pemberdayaan UMKM. 2 kegiatan	Kab. Kapuas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik	Lengkapi data dukung : e proposal usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
797	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar Sekolah SMAN 2 Danau Sembuluh, Desa Telaga Pulang, Volume 250 M (Rp. 350.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
798	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Masih lemahnya kualitas SDM pengurus/pengawas dan pengelola koperasi. Pelatihan Manajemen Perkoperasian. 1 kegiatan	Kab. Kapuas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
799	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Masih sedikitnya koperasi yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.	Kab. Kapuas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
800	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pavingnisasi depan Ruang Kelas SMAN 2 Danau Sembuluh, Desa Telaga Pulang, Volume 450 M2 (Rp. 450.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	450.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
801	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pendidik/Guru Per-Mata Pelajaran, SMA Negeri Suling Tambun, Desa Tumbang Langkai, Kecamatan Suling Tambun, Volume 10 orang Pendidik/Guru	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik.	Agar dilakukan pemetaan kebutuhan untuk diajukan melalui formasi pengadaan CPNS, P3K, atau GTT	10	Orang	-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
802	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar SMKN 1 Seruyan Raya, Desa/kelurahan Lanpasa, Volume 250 M (Rp. 350.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
803	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Mushola SMA N-2 Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur volume 1 Unit (Rp. 700.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	700.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
804	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Sumur Dan Tempat Profil Tank Sarana Air Bersih SMAN 1 Danau Sembuluh, Desa/Kelurahan Sembuluh 1, Volume 1 Paket (Rp. 600.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	600.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
805	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar Sekolah SMAN 2 Seruyan Tengah, Desa Sukorejo, Volume 250 M (Rp. 350.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
806	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Parade Seni dan Budaya Pemuda Kabupaten Barito Utara	Kab. Barito Utara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan diakomodir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Provinsi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	100.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
807	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Workshop Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Barito Utara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan dilaksanakan dikegiatan Provinsi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	500.000.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
808	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia dan UPS	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	35.637.438	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
809	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar, SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut, Volume 250 M (Rp. 350.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
810	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia dan UPS	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	35.637.438	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
811	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan WC Siswa SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut, Volume 4 Unit (Rp. 500.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
812	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia dan UPS	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	35.637.438	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
813	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia dan UPS	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	35.637.438	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
814	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia dan UPS	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	35.637.438	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
815	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia dan UPS	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	35.637.438	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
816	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia dan UPS	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	35.637.438	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
817	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia dan UPS	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	35.637.438	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
818	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Sumur Gali, SMAN 1 Seruyan Tengah, Desa/Kelurahan Rantau Pulut Volume 1 Paket (Rp. 250.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
819	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia dan UPS	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	35.637.438	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
820	14-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM pelatih fisik olahraga dengan total anggaran Rp. 200.000.000	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Dapat dilaksanakan dengan sharing anggaran bersama Dispora Pulang Pisau	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	50	Orang	165.000.000	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
821	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Unit Power Supply 10.000VA, 230V	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan adminduk	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	155.626.662	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
822	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer E KTP	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan KTP	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	121.178.700	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
823	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Alat Rekam KTP Elektronik Fortabel	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan KTP ke wilayah yang susah dijangkau	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	18	Unit	233.100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
824	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan Desain Grafis berbasis Kompetensi untuk Pencari Kerja. Pelatihan Desain Grafis. 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	65.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
825	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan Menjahit berbasis Kompetensi untuk Pencari Kerja. Pelatihan Menjahit . 1 Paket	Kab. Kapuas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	70.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
826	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Tidak tersedianya anggaran Pelatihan berbasis non kompetensi dan padat karya untuk pencari kerja yang ingin berwirausaha. Penyebarluasan Penempatan Tenaga Kerja melalui Pelatihan Padat Karya. 1 Paket	Kab. Kapuas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	20	Orang	200.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
827	14-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Diperlukannya untuk pengadaan dragon boat buat cabang olahraga dayung dengan total anggaran Rp. 200.000.000,00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Dapat dilaksanakan untuk sarana olahraga cabang tertentu yang diminati oleh masyarakat (olahraga rekreasi)	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	20	Unit	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
828	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan job fair. Job Fair/Bursa Kerja di Kabupaten Kapuas	Kab. Kapuas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Berdasar UU 23/2014 kewenangan Provinsi job fair tingkat Provinsi, kewenangan Kab/Kota job fair tingkat Kab/Kota. Lokus kegiatan akan dikaji dahulu.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Job fair yang dilakukan adalah yang tingkat provinsi	-	-	-	Job Fair/Bursa Kerja
829	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Perumahan Guru, SMA PGRI Seruyan Raya, Desa/kelurahan Bangkal, Volume 2 Unit (Rp. 500.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	ruang	800.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
830	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar SMA PGRI Seruyan Raya Desa/kelurahan Bangkal Volume 250 M (Rp. 350.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
831	14-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Bangunan Pengaman Pantai di Desa Keraya Kecamatan Kumai (Panjang 760 meter, Pagu Rp. 26.800.000.000,-)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
832	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Cor Jalan Beton Objek Wisata Dam Trinsing	Kab. Barito Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
833	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Perahu Wisata	Kab. Barito Utara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	150.000.000	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
834	14-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Bangunan Pengaman Pantai di Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai (Panjang 240 meter, Pagu Rp. 8.470.000.000,-)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
835	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Penataan Aliran Sungai Objek Wisata Air Terjun Jantur Doyam	Kab. Barito Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Menyesuaikan Anggaran	diarahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
836	14-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Bangunan Pengaman Pantai di Desa Sebuai Timur Kecamatan Kumai (Panjang 500 meter, Pagu Rp. 17.500.000.000,-)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
837	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Alat Olah Raga untuk 9 Kecamatan	Kab. Barito Utara	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Dapat dilaksanakan untuk sarana olahraga cabang tertentu yang diminati oleh masyarakat	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	20	Unit	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
838	14-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Bangunan Pengaman Pantai di Desa Sei Bakau Kecamatan Kumai (Panjang 150 meter, Pagu Rp. 5.600.000.000,-)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
839	14-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Bangunan Pengaman Pantai di Desa Kubu Kecamatan Kumai (Panjang 200 meter, Pagu Rp. 7.000.000.000,-)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
840	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurang pelatihan yang memiliki sertifikasi lesensi disetiap cabang olahraga. Sertifikasi Pelatih Fisik Dasar. 1 kegiatan	Kab. Kapuas	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Dapat dilaksanakan dengan sharing anggaran bersama Dispora Kapuas	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	50	Orang	165.000.000	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi
841	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Workshop Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Barito Utara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Akan dilaksanakan oleh Provinsi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	100.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
842	14-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Tanggul Banjir pada Daerah Kumpai Batu Atas, Kumpai Batu Bawah dan Tanjung Terantang (1 Daerah Irigasi Rawa, Pagu Rp. 10.000.000.000,-)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
843	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Tata Rias (Rias Pengantin)	Kab. Gunung Mas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Kabupaten tidak memiliki BLK, agar mencari tempat yang sesuai (LPK swasta, kab. terdekat). Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	70.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
844	14-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa DIR. Kumpai Batu Atas, Kumpai Batu Bawah dan Tanjung Terantang (1 Daerah Irigasi Rawa, Pagu Rp. 5.000.000.000,-)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	6	Km	5.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
845	14-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Embung Bengaris (1 Buah, Pagu Rp. 3.000.000.000,-)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
846	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan/Bimtek bagi Pemandu Wisata dan Kelompok Sadar Wisata Belum Pernah dilaksanakan di Kabupaten mengingat Kabupaten Kapuas memiliki Potensi dan Objek Wisata yang dapat dikembangkan kedepannya. Pelatihan/Bimtek Bagi Pemandu Wisata dan Kelompok Sadar Wisata. 40 orang	Kab. Kapuas	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Kegiatan Provinsi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kapuas	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	250.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
847	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan/Bimtek Digital Marketing Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif belum pernah dilaksanakan di Kabupaten dan Pelaku Ekonomi Kreatif sangat mengharapkan sistim penjualan berbasis digital menyesuaikan eranya. Pelatihan/Bimtek Digital Marketing Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. 40 orang	Kab. Kapuas	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan dilaksanakan oleh Provinsi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	300.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
848	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya SDM Pelaku Ekraf. Peningkatan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. 20 orang	Kab. Kapuas	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan dilaksanakan oleh Provinsi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	400.000.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
849	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Menjahit	Kab. Gunung Mas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Kabupaten tidak memiliki BLK, agar mencari tempat yang sesuai (LPK swasta, kab. terdekat). Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	70.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
850	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya pengrajin dan sudah sepuh. Pelatihan Pembuatan Produk Getah Nyatu & Upak Nyamu. 20 orang	Kab. Kapuas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Akan di akomodir menyesuaikan DAK Non Fisik tahun 2025	Usulan diakomodir dengan memperhatikan ketersediaan anggaran melalui skema DAK non fisik. Agar melengkapi data dukung dan proposal.	20	Orang	150.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
851	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Komputer	Kab. Gunung Mas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Kabupaten tidak memiliki BLK, agar mencari tempat yang sesuai (LPK swasta, kab. terdekat). Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	70.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
852	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Jati Diri Koperasi	Kab. Gunung Mas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025 □ □	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
853	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Manajemen Koperasi dan Akuntansi Koperasi	Kab. Gunung Mas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025 □ □	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
854	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Pemasaran dan Pendampingan Legalitas Produk UMKM	Kab. Gunung Mas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025 □ □	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
855	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Pengembangan Usaha dan Optimalisasi Kreativitas UMKM	Kab. Gunung Mas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	akan diakomodir pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan tahun anggaran 2025 dengan menyesuaikan pagu DAK Non Fisik 2025 □ □	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
856	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan bahan pustaka. Pelatihan Pengelolaan Bahan Pustaka/Pengolahan Buku. 1 kegiatan	Kab. Kapuas	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Permintaan dapat saja terakomodir, dalam bentuk kegiatan pembinaan pengolahan bahan pustaka dan pengolahan buku	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	50.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
857	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan perpustakaan. Pelatihan Pengelola Perpustakaan. 25 orang	Kab. Kapuas	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Permintaan dapat saja terakomodir, Dispersip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
858	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Desa Linau	Kab. Gunung Mas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Km	10.000.000.000	Rekonstruksi Jalan
859	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Jembatan Sei Kurun	Kab. Gunung Mas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	50	m	1.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan
860	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Jembatan Sei Ripi	Kab. Gunung Mas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	50	m	1.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
861	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya perbaikan Kondisi kondisi kerusakan jalan,jembatan baik ringan maupun berat	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaiakan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
862	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya perbaikan Kondisi kondisi kerusakan jalan,jembatan baik ringan maupun berat	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaiakan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung (Hanya dapat mengakomodir 1 Ruas Jalan Saja = Jalan G.Obos XIV Gg. Sabrina)	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
863	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pakaian Belum Memenuhi Standar. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Perlengkapannya (PDL 2 Damkar) □ 38 Stel	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	- TA 2025 BPBPK Prov. tidak ada Pengadaan Pakaian Damkar yang secara khusus untuk hibah - Disarankan menganggarkan pada APBD Kabupaten/Kota masing masing	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Khusus untuk pakaian perlengkapan kebencanaan.	38	Stel	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
864	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya pagar sekolah SMKN - 1 Rungan Hulu, demi keamanan dan kenyamanan tenaga pendidik dan peserta didik serta memberikan suatu wadah yang bisa melindungi Aset pemerintah.	Kab. Gunung Mas	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
865	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Akses SMA terdekat terlalu jauh. Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMA). 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta berdasar hasil study kelavakan	1	unit	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
866	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Akses SMA terdekat terlalu jauh. Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMA). 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan	1	unit	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
867	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Akses SMA/SMK terdekat terlalu jauh. Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMA/SMK). 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan. Untuk USB SMK, jurusan agar memperhatikan link n match dengan potensi lapangan pekerjaan	1	unit	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
868	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor SMAN 3 Muara Teweh (Desa Trahean)	Kab. Barito Utara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	450.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
869	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar SMAN 3 Muara Teweh (Desa Trahean)	Kab. Barito Utara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
870	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya SMA terdekat. Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMA) Mandau Talawang. 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan	1	unit	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
871	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar SMAN-2 Gunung Timang RT.002/RW.001 Batu Raya I	Kab. Barito Utara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	400.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
872	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar Keliling SMAN-1 Montallat	Kab. Barito Utara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	400.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
873	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik. Penambahan Tenaga Pendidik / Guru SMKN - 1 Pasak Talawang. 2 orang	Kab. Kapuas	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik.	Agar dilakukan pemetaan kebutuhan untuk diusulkan melalui pengadaan formasi CPNS, P3K, atau GTT	2	Orang	-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
874	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Penimbunan Tanah Halaman Sekolah SMAN-2 Montallat	Kab. Barito Utara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
875	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Penambahan Ruang Kelas Sman-2 Montallat Kel. Montallat II	Kab. Barito Utara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	3	ruang	1.350.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru
876	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Musholla SMAN-2 Montallat Kel. Montallat II	Kab. Barito Utara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
877	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Rigit Beton SMKN-1 Tewed Timur Desa Mampuk I	Kab. Barito Utara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
878	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar Beton SMAN-1 Tewed Timur	Kab. Barito Utara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
879	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian yang terlalu lama. (Pengadaan Alat Cetak KTP-el Spesifikasi : Printer Fargo HDP 5600 Encorder = 3 Buah)	Kab. Kapuas	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
880	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian yang terlalu lama. (Printer Cetak Kartu Identitas Anak Spesifikasi : Evolis Primacy Simplex SP00308 = 2 Buah)	Kab. Kapuas	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
881	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian yang terlalu lama. (Pengadaan Ribbon Pencetak KTP-el Spesifikasi : Ribbon HDP 5000/5600 = 45 Buah)	Kab. Kapuas	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
882	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian yang terlalu lama. (Pengadaan Retransfer film KTP-el Spesifikasi : Retransfer Film HDP 5000/5600 = 15 Buah)	Kab. Kapuas	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
883	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian yang terlalu lama. (Pengadaan Ribbon Kartu Identitas Anak Spesifikasi : Evolis Ribbon Color YMCKO R5fp00308 = 20 Buah)	Kab. Kapuas	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
884	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kondisi alat cetak terbatas dan telah usang karena waktu pemakaian yang terlalu lama. (Pengadaan Pembersih (Cleaning Kit) Printer KIA Spesifikasi : Cleaning Kit Evolis CK-A0308 = 10 Buah)	Kab. Kapuas	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
885	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan IPA 20 L/Detik Beserta Jaringan Distribusi Utama 1 Kegiatan Rp. 10.000.000.000	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
886	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Perpipaan SPAM IKK Dusun Tengah 1 Kegiatan Rp. 2.000.000.000	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
887	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah 1 Kegiatan Rp. 500.000.000	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
888	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau 1 Kegiatan Rp. 500.000.000	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
889	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan IPA 20 L/Detik Beserta Jaringan Distribusi Utama (1 Kegiatan Rp. 10.000.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	10.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
890	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Perpipaan SPAM IKK Dusun Tengah (1 Kegiatan Rp. 2.000.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Kabupaten	2.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
891	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah (1 Kegiatan Rp.500.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiediaan menerima hibah, DED	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	m3/hari	500.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
892	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau (1 Kegiatan Rp. 500.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	m3/hari	500.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
893	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau (1 Kegiatan Rp. 500.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	m3/hari	500.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
894	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Kupang Bersih Kecamatan Pematang Karau (1 Kegiatan Rp. 500.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	m3/hari	500.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
895	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan SPALD-S berupa Tangki Septik Individu dan WC di Desa Ketab Kecamatan Pematang Karau (1 Kegiatan Rp. 500.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	m3/hari	500.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
896	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Operator Alat Berat (Excavator) (30 Orang Rp. 180.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Berbasis kompetensi. Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	180.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
897	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur Skala Upah (50 orang (3 hari) Rp. 125.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	75.000.000	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
898	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Sosialisasi Teknik Negosiasi Penyelesaian Hubungan Industrial (50 orang (3 hari) Rp. 125.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	75.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
899	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Mesin dan Body Speedboat (1 Paket Rp. 120.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
900	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Garasi Speedboat (1 Unit Rp. 80.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
901	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pos Pengawasan Perairan (1 Unit Rp. 100.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
902	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pos Pengawasan Perairan (1 Unit Rp. 100.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
903	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Masih rendahnya pemahaman Forum Anak tentang 2P. (Pelatihan Peran Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) = 1 Kegiatan)	Kab. Kapuas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Kapuas, sedangkan penganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	40.000.000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
904	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Peralatan POKMASWAS (1 Paket Rp. 80.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
905	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Peralatan POKMASWAS (1 Paket Rp. 80.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
906	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Peralatan POKMASWAS (1 Paket Rp. 80.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
907	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Perahu Dayung 20 unit Kelompok pembudidaya "Sumber Rezeki" (20 unit Rp. 100.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
908	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Karamba Apung, Pakan dan Benih Ikan 1 paket (1 Paket Rp. 250.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
909	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Tani MIRA PAKAT (Pengadaan Ternak Ayam Petelur) (200 ekor Rp. 30.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
910	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Ternak TAKAM MAJU (Pengadaan Ternak Ayam Petelur) (200 ekor Rp. 30.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
911	14-03-2024	Drs. CATUR FERİYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Masih tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap Anak. Advokasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak = 1 Kegiatan	Kab. Kapuas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Kapuas, sedangkan penganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
912	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	KWT TETEI PAMELUM (Pengadaan Ternak Ayam Petelur) (300 ekor Rp. 45.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
913	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Ternak ROJO KOYO (Pengadaan Bibit Kambing) (15 ekor Rp. 75.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	65.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
914	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Tani Peternak SIRAU BERKEMBANG (Pengadaan Bibit Kerbau) (25 ekor Rp. 625.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	300.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
915	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Usaha Ternak SEWANGUN (Pengadaan Bebek,Ayam Bangkok, Dan Pakan) (1.600 ekor Rp. 240.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	100.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
916	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Tani MAPE (Pengadaan Bibit Babi) (28 ekor Rp. 84.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
917	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Ternak Babi GANG SAWIT (Pengadaan Ternak Babi) (10 ekor Rp. 30.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
918	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Tani KALA AHENG (Pengadaan Ternak Babi) (25 ekor Rp. 75.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
919	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Tani TERNAK MEKAR (Pengadaan Bibit Babi) (50 ekor Rp. 150.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
920	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Ternak PUTUT WILAS JARI(Pengadaan Babi Batam) (10 ekor Rp. 30.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
921	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Ternak Babi SASAMEH (Pengadaan Ternak Babi) (10 ekor Rp. 30.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
922	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Ternak LOBOK KAJANG (Pengadaan Ternak Babi) (10 ekor Rp. 30.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
923	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Wanita TANI LESTARI (Pengadaan Bibit Babi) (15 ekor Rp. 45.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
924	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Peternak & Perikanan JANAH MAJU BERSAMA (Pengadaan Ayam Buras) (1.500 ekor Rp. 225.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
925	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Masih lemahnya kualitas SDM. Pelatihan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) = 1 Kegiatan	Kab. Kapuas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Kapuas, sedangkan penganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	40.000.000	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi
926	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Peternak JATA MENUJU MAKMUR (Pengadaan Ayam Buras) (1.500 ekor Rp. 225.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
927	14-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan alat laboratorium untuk pengujian kualitas lingkungan (7 unit, Rp 2.120.000.000,-)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Usulan masih belum bisa diakomodir oleh SOPD yang berwenang	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	7	Unit	2.120.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
928	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Ternak ISA BAHUM (Pengadaan Ayam Buras) (380 ekor Rp. 57.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
929	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Ternak GAMBAH RAYA I (Pengadaan Ternak Ayam KUB) (420 ekor Rp. 63.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
930	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Ternak TUNAS MAKMUR (Pengadaan Ternak Ayam Kampung) (200 ekor Rp. 30.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
931	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Tani ISA PAKAT (Pengadaan Ternak Ayam Buras) (420 ekor Rp. 63.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
932	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Beras bagi anak dalam panti dan luar panti 3 (tiga) LKS. 20 paket	Kab. Kapuas	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Diterima dengan melengkapi proposal dari LKS dan data anak yang berada di dalam LKSA	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	30	anak	5.000.000	Penyediaan Makanan
933	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Beras bagi anak dalam panti dan luar panti 3 (tiga) LKS. 20 paket	Kab. Kapuas	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Diterima dengan melengkapi proposal dari LKS dan data anak yang berada di dalam LKSA	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	20	anak	5.000.000	Penyediaan Makanan
934	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Beras bagi anak dalam panti dan luar panti 3 (tiga) LKS. 19 paket	Kab. Kapuas	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Diterima dengan melengkapi proposal dari LKS dan data anak yang berada di dalam LKSA	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	19	anak	4.750.000	Penyediaan Makanan
935	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Patin Kelompok pembudidaya "Luja Jaya Mufakat" (Benih Patin 17.000 ekor, Pakan Benih 20 kg, Pakan Pembesaran 3000 kg Rp. Rp. 76.795.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
936	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Tunai anak keluarga miskin. 50 orang	Kab. Kapuas	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Melakukan pemutakhiran DTKS agar warga miskin/kurang mampu dapat diusulkan mendapatkan bantuan sosial PKH	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	25.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
937	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Tunai anak keluarga miskin	Kab. Kapuas	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Melakukan pemutakhiran DTKS agar warga miskin/kurang mampu dapat diusulkan mendapatkan bantuan sosial PKH	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	10.000.000	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
938	14-03-2024	Drs. CATUR FERİYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Perlunya kemasan produk yang menarik dan kekinian. Pelatihan Pengemasan Produk □ 20 orang	Kab. Kapuas	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Pelatihan Pengemasan Produk di Kabupaten Kapuas	Usulan diakomodir dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Agar melengkapi data dukung dan proposal.	20	orang	85.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
939	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Penerangan jalan PJU, perbaikan jalan, semenisasi kondisi yang rusak ringan dan berat	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
940	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Mobil Pelayanan e- KTP Keliling Volume 1 Unit (Rp. 1.000.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk memudahkan pelaksanaan jemput bola	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	1.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
941	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Penerangan jalan PJU, perbaikan jalan, semenisasi kondisi yang rusak ringan dan berat	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
942	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Penerangan jalan PJU, perbaikan jalan, semenisasi kondisi yang rusak ringan dan berat	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
943	14-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	- Tinta Ribbon Colour Hdp 5000 ymck printer Fargo Hdp e-ktip Volume 22 Buah (Rp.109.000.000) - Retransper Flim Ribbon Hdp 5000 Volume 14 buah (Rp. 40.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan KTP baik dari printer maupun tinta	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	36	Unit	149.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
944	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan dan Drainase	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
945	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
946	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
947	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
948	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
949	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
950	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
951	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI (Proposal Tersedia)	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
952	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Garasi Speedboat (1 Unit Rp. 80.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
953	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan	Kota Palangkaraya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
954	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pos Pengawasan Perairan (Desa Kali Napu dan Desa Pulau Patai 2 Unit Rp. 400.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
955	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pos Pengawasan Perairan (1 Unit Rp. 200.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
956	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Peralatan POKMASWAS (Desa Kali Napu, Desa Tampu Langit, Desa Magantis 1 Paket Rp. 200.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya	Dapat dipertimbangan sebagaimana usulan proposal	Usulan diakomudir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	-	-	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
957	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Buah-Buahan (bibit durian, bibit jambu kristal dan bibit jeruk)	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomudir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomudir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
958	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Buah-Buahan (bibit durian, bibit jambu kristal dan bibit jeruk)	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomudir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomudir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
959	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan bibit Pisang Pulau Laut (Pisang Kepok) sebanyak 2000 bibit.	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomudir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomudir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	25.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
960	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Durian Musang King Sebanyak 80 Bibit untuk Delapan Kelompok Tani.	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomudir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomudir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
961	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Buah Lengkek	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomudir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomudir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
962	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan bibit durian sebanyak kurang lebih 2000 batang.	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
963	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan bibit buah Lengkeng, Jengkol, jambu Kristal, Rambutan	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
964	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Buah Rambutan dan Mangga	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
965	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Untuk Bibit Kopi sebanyak 20.000 Batang	Kab. Gunung Mas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
966	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Buah Rambutan dan Mangga	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
967	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Buah Durian dan Lengkeng	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
968	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Kopi	Kab. Gunung Mas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomudir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
969	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Sawit	Kab. Gunung Mas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomudir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
970	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Alat Perontok Padi sebanyak 1 unit	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomudir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	3	Unit	125.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
971	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan bibit Kelapa sawit	Kab. Gunung Mas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomudir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
972	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan bibit babi	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomudir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
973	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan bibit ayam petelor sebanyak 1500 Ekor	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
974	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Banyaknya Koperasi tidak berbadan hukum	Kota Palangkaraya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dikembalikan	Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait	Bisa dilaksanakan di Kab/Kota	dikembalikan ke Kabupaten/Kota karena Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait	-	-	-	-	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
975	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan bibit buah	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
976	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan bibit sawit sebanyak 5000 Bibit	Kab. Gunung Mas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
977	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Banyaknya Koperasi yang tidak aktif	Kota Palangkaraya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dikembalikan	Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait	Bisa dilaksanakan di Kab/Kota	dikembalikan ke Kabupaten karena Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait	-	-	-	-	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
978	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Koperasi	Kota Palangkaraya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dikembalikan	Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait	Menyesuaikan anggaran	dikembalikan ke Kabupaten karena Pengawasan dan Pembinaan Koperasi yang ada di Kabupaten diawasi dan dibina terlebih dahulu oleh Dinas terkait	-	-	-	-	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
979	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Buah-Buahan	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
980	14-03-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi	Kota Palangkaraya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	diterima dengan menyesuaikan anggaran DAK Non Fisik	Lengkapi data dukung : e proposal usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
981	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Buah-Buahan	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
982	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Ternak Babi dan Ternak Sapi	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
983	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Padi Ladang dan Bibit Jengkol	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
984	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Kambing	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	80.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
985	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit bebek Petelur	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	60.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
986	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Mesin Penggiling Padi	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
987	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Ternak (Babi, Sapi dan Ayam)	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
988	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bibit Buah Durian, Mangga, dan Rambutan	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
989	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Sosialisasi tentang Pentingnya Keberadaan BUMDes bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat di Perdesaan	Kab. Barito Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
990	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan alat perontok dan penggilingan padi	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
991	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Bibit Padi Ladang	Kab. Gunung Mas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
992	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Alat - alat Olahraga 1. Net Volly Ball (10), 2.Bola kaki (20), 3.Meja Pingpong (2Set), 4.Bola Basket (10), 5.Bola Bulu Tangkis (25 Tabung), 6.Cone Kerucut (24), 7. Paket Baju Kaos Tim Sepak Bola dan Sepatu Sepak Bola. (2 Paket Rp. 100.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Kebutuhan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	93	Unit	100.000.000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
993	14-03-2024	Drs. CATUR FERİYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Beras bagi anak dalam panti dan luar panti 3 (tiga) LKS. 59 Paket	Kab. Kapuas	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Diterima dengan melengkapi proposal dari LKS dan data anak yang berada di dalam LKSA	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	59	Paket	14.750.000	Penyediaan Makanan
994	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda Kader Kabupaten/Kota. (1 Kegiatan Rp. 100.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Dapat dilaksanakan dengan sharing anggaran dengan Dispora Barito Timur	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	75	Orang	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
995	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Baterai Tambahan Tipe LP-E6NH pada Kamera Operasional Canon EOS 760D	Kab. Barito Utara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
996	14-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Baterai Tambahan Tipe Sony Baterai NP-FW50 pada Kamera Operasional Sony Alpha A7 II	Kab. Barito Utara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
997	14-03-2024	EDI KESUMAJAY A, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Handy Talky tipe HT WLN UHF	Kab. Barito Utara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
998	14-03-2024	EDI KESUMAJAY A, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Microphone Tipe Audio Tecnica AT2020 XLR	Kab. Barito Utara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
999	14-03-2024	EDI KESUMAJAY A, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Headphone tipe Audio Technica ATH-M20X	Kab. Barito Utara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	14-03-2024	EDI KESUMAJAY A, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Alat Dokumentasi Aerial	Kab. Barito Utara	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1001	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Hibah Alat Kesenian untuk Desa Wuram dan Gumpa (2 Paket Rp. 100.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	agar melengkapi data dukung, berupa proposal dan data lainnya	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	100.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
1002	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Petani Belum Seluruhnya menggunakan pembeku anjuran. Pembeku Latek (Asam Formiat). 139 Ha	Kab. Kapuas	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1003	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata Se Kabupaten Barito Timur (1 Kegiatan Rp. 60.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	200.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
1004	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan dan Sertifikasi Pelaku Pariwisata Sub Sektor Ekonomi Kreatif Photograpy (1 Kegiatan Rp. 50.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan dilaksanakan oleh Provinsi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	250.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
1005	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Petani Belum Seluruhnya menggunakan pembeku anjuran. Pembeku Latek (Asam Formiat). 50 Ha	Kab. Kapuas	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1006	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Pelaku Pariwisata Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kuliner (1 Kegiatan Rp. 65.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	akan dilaksanakan oleh Provinsi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	200.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
1007	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Petani Belum Seluruhnya menggunakan pembeku anjuran. Pembeku Latek (Asam Formiat). 139 Ha	Kab. Kapuas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1008	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Petani Belum Seluruhnya menggunakan pembeku anjuran. Pembeku Latek (Asam Formiat). 50 Ha	Kab. Kapuas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1009	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Petani Belum Seluruhnya menggunakan pembeku anjuran. Pembeku Latek (Asam Formiat). 100 Ha	Kab. Kapuas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
1010	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pencurian Bokar di Tingkat Petani dan Pengumpul. Bangunan Bokar Ukuran 5 x 10 M . 1 Unit	Kab. Kapuas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1011	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pencurian Bokar di Tingkat Petani dan Pengumpul. Bangunan Bokar Ukuran 5 x 10 M . 1 Unit	Kab. Kapuas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1012	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Sarana pendukung kegiatan inseminasi buatan, 1 paket. Minat masyarakat untuk inseminasi buatan tinggi, namun dukungan APBD Kabupaten terbatas	Kab. Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	25.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
1013	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pekebun tidak memakai mangkok. pisau sadap tidak standart. Peralatan sadap tanaman karet. 3 Paket	Kab. Kapuas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1014	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Sarana pendukung kegiatan inisiasi pembibitan sapi di masyarakat, 1 Paket. Permasalahan : Permintaan bibit sapi tinggi setiap tahun dan selalu didatangkan dari luar daerah, disamping dapat memberdayakan kelompok tani yang eksis	Kab. Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	25.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
1015	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Hijauan Pakan Ternak, 1 paket. Permasalahan: Perlunya Dukungan terhadap kegiatan inisiasi pembibitan sapi masyarakat	Kab. Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1016	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Peralatan kebun tidak memadai. Peralatan pasca panen sawit. 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1017	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Peralatan kebun tidak memadai. Peralatan pasca panen sawit. 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1018	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Peralatan tradisional. Peralatan pasca panen pengolahan kelapa. 2 unit	Kab. Kapuas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1019	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Meningkatnya kasus gangguan usaha perkebunan. Sosialisasi Gangguan Usaha Perkebunan. 2 kali	Kab. Kapuas	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi (proposal dan lainnya lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	kasus	-	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
1020	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Bantuan pupuk dan kapur pertanian, 5000 Ha. Permasalahan : Masih rendahnya produktivitas komoditas padi yang salah satu penyebabnya adalah penggunaan pupuk yang belum memenuhi rekomendasi	Kab. Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1021	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Combine Harvester, 4 unit. Waktu panen serempak mengakibatkan kurangnya tenaga kerja untuk panen dan pasca panen	Kab. Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	500.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1022	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Power Thresher, 25 Unit. Permasalahan : Waktu panen serempak mengakibatkan kurangnya tenaga kerja untuk panen dan pasca panen	Kab. Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	Unit	350.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1023	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Cultivator, 15 Unit. Terbatasnya sarana pengolahan tanah untuk komoditas hortikultura	Kab. Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	5	Unit	175.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
1024	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Traktor Roda 2 sebanyak 50 unit karena Rasio antara ketersediaan alat dengan kebutuhan baru mencapai 25%	Kab. Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	135.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
1025	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan jalan pertanian 9 km, karena Sulitnya akses ke lahan berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan angka kehilangan hasil	Kab. Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	Unit	450.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1026	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Bantuan obat-obatan pertanian, 4 paket. Karena Terbatasnya stok obat-obatan pada gudang obat-obatan sebagai antisipasi DPI dan serangan OPT	Kab. Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1027	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan aneka cabe 25 Ha. Sentra-sentra produksi cabai perlu dukungan untuk penguatan dalam rangka mendukung kebijakan terkait inflasi	Kab. Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	100.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1028	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan jeruk 20 Ha. Pemanfaatan lahan-lahan potensial untuk pengembangan komoditas prioritas provinsi Kalteng dan didukung oleh usulan desa dalam Musrenbang Kecamatan	Kab. Kapuas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
1029	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Meningkatnya masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kapuas terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan PSU yang memadai. Perumahan Griya Sederhana Desa Pulau Telo Baru / Kecamatan Selat 1 Paket Rp 5.000.000.000	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1030	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (1 Paket Rp. 7.873.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1031	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (1 Dokumen Rp. 150.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1032	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat Kabupaten/Kota (Desa Mangkarap, Desa Balawa, Desa Muruduyung, Desa Tangkan, Desa Tamba 5 Desa Rp. 250.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1033	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati (a. Kendaraan Roda 4 (Empat)/Pick Up 1 Unit, b. Mobil Ski Lift (Pemangkas Dahan Pohon 1 unit, Rp. 2.350.000.000)	Kab. Barito Timur	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1034	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (1 Paket Rp. 7.873.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Kehutanan	Usulan disetujui	-	1. Menyesuaikan anggaran 2. Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait	- usulan harus berupa proposal dari kepala daerah kabupaten/kota - usulan harus dibuat pada tahun 2024 - Sumber dana DBH-DR	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dengan menyesuaikan anggaran	1	paket	7.873.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
1035	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (1 Dokumen Rp. 150.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Kehutanan	Dikembalikan	- agar dapat diusulkan ke Dinas Lingkungan Hidup	1. Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait	-	-	-	-	-	-
1036	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat Kabupaten/Kota (Desa Mangkarap, Desa Balawa, Desa Muruduyung, Desa Tangkan, Desa Tamba 5 Desa Rp. 250.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Kehutanan	Dibatalkan	-	1. Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1037	14-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati (a. Kendaraan Roda 4 (Empat)/Pick Up 1 Unit, b. Mobil Ski Lift (Pemangkas Dahan Pohon 1 unit, Rp. 2.350.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Kehutanan	Dikembalikan	- agar dapat diusulkan ke Dinas Lingkungan Hidup	1. Menyesuaikan kewenangan SOPD terkait	-	-	-	-	-	-
1038	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Untuk penyuluhan penanganan Karhutla dan Banjir karena Wilayah Kabupaten Kapuas Cukup Luas. Mobil Penyuluhan (Lengkap Set LED dan Proyektor). 1 unit	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	700.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1039	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Untuk Penanganan Karhutla dan Banjir di dukung armada angkutan personil TRC. Mobil Angkutan Personil TRC (Mini Bus) Kapasitas 25 Orang. 1 unit	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	800.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1040	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Untuk menjangkau atau menyisir sungai kecil ketika bencana Karhutla dan bencana yang lain. Speed Boat Karet dan Mesin Tempel 25 PK. 1 unit	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	150.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1041	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Untuk pengamanan personil dalam pelaksanaan pemadaman. Alat Pelindung Diri (APD) Sarpras Karhutla untuk 25 Orang Personil. 25 set	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	- TA 2025 BPBPK Prov. tidak ada Pengadaan Pakaian Damkar yang secara khusus untuk hibah - Disarankan menganggarkan pada APBD Kabupaten/Kota masing masing	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	25	Set	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
1042	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Makanan Siap Saji. 1 paket	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Penyediaan Makanan Siap Saji untuk korban bencana di usulkan saat terjadi tanggap bencana. BNPB memberikan bantuan logistik ke Pemerintah Provinsi Kalimantan yang di salurkan ke Kabupaten yang terdampak bencana.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Dengan menyesuaikan status tanggap kebencanaannya	500	Paket	250.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1043	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	50.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1044	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	50.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1045	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	50.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1046	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	50.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1047	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	50.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1048	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	50.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1049	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Tossa dan 1 Set Alat Pemadam Kebakaran. 1 unit	Kab. Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	50.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1050	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Truk Sampah 2 Unit x 700jt = 1,4M. Dibutuhkan dalam upaya penguatan pengelolaan persampahan	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	1. Menyesuaikan anggaran 2. Menyesuaikan kewenangan dengan SOPD terkait	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	2	Unit	1.165.428.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1051	14-03-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kendaraan Roda 3 sebanyak 10 Unit x 50jt = 500 jt. Dibutuhkan dalam upaya penguatan pengelolaan persampahan	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	1. Menyesuaikan anggaran 2. Menyesuaikan kewenangan dengan SOPD terkait	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	10	Unit	600.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1052	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Masih adanya kekurangan Bantuan Paket Permakanan Untuk Masa Tanggap Darurat (Banjir)	Kab. Gunung Mas	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Menyesuaikan dengan kewenangan pemenuhan SPM Sosial dan alokasi anggaran	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	30.000.000	Penyediaan Permakanan
1053	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya pengetahuan SDM kearsipan perangkat daerah tentang pembuatan data arsip	Kab. Gunung Mas	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Peningkatan kapasitas yang diusulkan terakomodir dalam bentuk sosialisasi tata kelola arsip yang dimulai tahun 2024 oleh Dispersip Kalteng ke semua kab/kota se kalteng	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	100.000.000	Akuisisi Arsip Statis

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1054	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Masih kurangnya pelatihan pustakawan, pengelola perpustakaan, penyuluh perpustakaan terhadap pengembangan dan penguasaan berbasis teknologi /IPTEK dan sistem seleksi serta pengolahan buku perpustakaan	Kab. Gunung Mas	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap serta melaksanakan pembinaan pengolahan buku	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
1055	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Masih kurangnya pelatihan untuk tenaga perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah tentang tata cara Membuat buku induk, klasifikasi tajuk subjek, kelengkapan buku, memberi stempel kepemilikan, input data ke sistem, memasang label barcode, salving/penyusunan buku sesuai klasifikasi	Kab. Gunung Mas	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap serta melaksanakan pembinaan pengolahan buku	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
1056	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Sulitnya medan yang dilalui sehingga diperlukan peralatan yang memadai alat transportasi Quick	Kab. Gunung Mas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	150.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1057	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Sulitnya medan yang dilalui sehingga diperlukan peralatan yang memadai pengadaan Jonder	Kab. Gunung Mas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	400.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1058	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya alat angkut personil dan Sapras alat transportasi Pick Up	Kab. Gunung Mas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	300.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1059	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Sedikitnya sumber air pada musim kemarau, membutuhkan tambahan alat transportasi Truck Tangki Air	Kab. Gunung Mas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	700.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1060	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Alat Penyelamatan Dan Evakuasi Perahu Karet	Kab. Gunung Mas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	250.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1061	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Tenda Pengungsi	Kab. Gunung Mas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	100.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1062	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Pompa Apung	Kab. Gunung Mas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	60.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1063	14-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Selang Pelempar	Kab. Gunung Mas	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Pemenuhan Sapras Karhutla dapat dilaksanakan melalui mekanisme Hibah ke BPBD Kabupaten dan mekanisme bansos ke kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menggunakan dana DBHDR.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	10	Unit	100.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1064	15-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Prasarana pembelajaran olahraga di MTS pada Desa Jangkar Prima masih terbatas, sehingga diusulkan pembangunan Lapangan Voli	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Dikembalikan	Usulan bukan merupakan kewenangan, usulan dapat disampaikan kepada instansi vertikal Kementerian Agama	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	-	-	-	-	-	-
1065	15-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Toilet yang ada pada MTS Bustanul Ulum kurang layak sehingga diusulkan renovasi toilet	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Dikembalikan	Usulan bukan merupakan kewenangan, usulan dapat disampaikan kepada instansi vertikal Kementerian Agama	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran dan kewenangan	-	-	-	-	-	-
1066	15-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Terbatasnya ketersediaan air di SMKN 1 Sematu Jaya, sehingga diusulkan pembangunan sumur Bor	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1067	15-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Anak-anak yang bersekolah di jenjang SMA/SMK dari Desa Sungai Buluh sangatlah banyak mereka bersekolah tersebar di beberapa SMA/SMK di Kabupaten Lamandau, mengingat banyaknya jumlah siswa yang berasal dari Desa Sungai Buluh sudah seharusnya dilakukan pembangunan Gedung SMA/SMK di Desa Sungai Buluh dimana diharapkan nantinya SMA/SMK tersebut tidak hanya menampung Siswa dari Desa Sungai Buluh tapi juga Desa di sekitarnya.	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan. Jika USB nya berupa SMK agar dilakukan analisa link n match nya dengan potensi lapangan pekerjaan	1	unit	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1068	15-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	SMKN 1 Lamandau tidak memiliki MCK (1 Unit) dan Alat UKS (1 Paket)	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti adalah penyediaan toilet, dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, sedangkan untuk penyediaan alat UKS agar diusulkan tersendiri	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran untuk penyediaan toilet. Sedangkan alat UKS memiliki sub kegiatan tersendiri	1	Paket	150.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1069	15-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	SMKN 1 Lamandau mengusulkan penambahan guru sebanyak 3 (tiga) orang	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik.	Agar dilakukan pemetaan kebutuhan untuk diusulkan melalui pengadaan formasi CPNS, P3K, atau GTT	3	orang	-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1070	15-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Beasiswa bagi siswa berprestasi dan beasiswa bagi siswa kurang mampu	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	pemberian bantuan kepada siswa dalam bentuk bantuan penyediaan pakaian seragam, buku bacaan dan peralatan sekolah	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1071	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) SMK Sumbermas Sarana, 2 unit (950.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Ruang	1.000.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1072	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Ruang OSIS SMK SUMBERMAS SARANA Jl. Negara KM 30,4 Desa Runtu 1 Unit (165.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1073	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Lab. Bahasa SMK SUMBERMAS SARANA Jl. Negara KM 30,4 desa Runtu 1 Unit (Rp 455.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	350.000.000	Pembangunan Ruang Laboratorium
1074	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Peralatan Praktik Desain Komunikasi Visual dan TIK SMKS MUHAMMADIYAH PANGKALAN BUN Jl. Jenderal Sudirman No.13 Pangkalan Bun 1 Paket (Rp. 94.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	100.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1075	15-03-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan Bantuan Kapal Susur Sungai Wisata	Kab. Sukamara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Akan dibahas lebih lanjut, agar disiapkan data dukung	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	500.000.000	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1076	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar Sekolah, Bangunan Selasar antar kelas, Bangunan Paving Halaman, Perbaikan Plafon Kelas, Penambahan Alat Praktek Siswa SMK NEGERI 3 PANGKALAN BUN Jalan. A. Yani No.53 RT.14 Desa Kumpai Batu Atas Telp/HP : 082220565642 Pangkalan Bun Kode Pos 74151 Kalimantan Tengah 1 Paket (Rp.679.200.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Usulan ditindaklanjuti Pembangunan Pagar Sekolah, Bangunan Selasar antar kelas, Bangunan Paving Halaman, Perbaikan Plafon Kelas, Penambahan Alat Praktek Siswa SMK NEGERI 3 PANGKALAN BUN	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Usulan yang diakomodir agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing-masing.	1	Paket	2.000.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1077	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Perbaikan/Rehab Bangunan Sekolah SMA NEGERI 2 PANGKALAN BUN JL. PASANAH 15, KAB.KOTAWARINGIN BARAT 74111 1 Unit (Rp.767.290.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	767.290.000	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1078	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Pemavingan halaman SMAN 2 KUMAI JL. A. Yani KM 18 Desa Bumi Harjo 1 Paket 900000000	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Usulan yang diakomodir agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing-masing	1	paket	900.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1079	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Komputer/ Laptop SMA ABDI PANGKALAN BUN Jl. Kawitan I No. 34 Pangkalan Bun 74111; RT/RW: 017/002 1 Paket (Rp.139.300.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	150.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1080	15-03-2024	EDI KESUMAJAY A, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Bimbingan Teknis IKM Pengolahan Anyaman Rotan	Kab. Barito Utara	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Bimbingan Teknis IKM Pengolahan Anyaman Rotan di Kabupaten Barito Utara (3 hari)	Lengkapi data dukung : e proposal	25	peserta	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
1081	15-03-2024	EDI KESUMAJAY A, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Sarana Prasarana IKM	Kab. Barito Utara	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	Usulan tidak spesifik dan tidak ada proposal.	1. Lengkapi data dukung seperti profosal 2. menyesuaikan anggaran	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1082	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	PEMBANGUNAN RUANG BK, OSIS, UKS, AULA GUDANG, KANTIN SEHAT, PAVING LAPANGAN, PAGAR KELILING, PENAMBAHAN GURU DAN PTT SMAN 1 PANGKALAN LADA JL. AHMAD YANI KM. 40, 9 Unit (9.600.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Terkait banyaknya rincian dalam 1 usulan, akan diseleksi dengan memperhatikan prioritas kebutuhan di sekolah. Usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Usulan yang diakomodir agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2	1	paket	1.350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1083	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Kemasan Olahan Rumah Tangga	Kab. Barito Utara	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	usulan tidak spesifik dan tidak ada proposal	1. Lengkapi data dukung seperti profosal 2. menyesuaikan anggaran	-	-	-	-	-	-
1084	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pasar Murah	Kab. Barito Utara	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Pasar Murah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah Kabupaten Barito Utara	Lengkapi data dukung : e proposal	1	kegiatan	150.000.000	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1085	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	"Rehabilitasi Bangunan Dan Ruang Kelas SMKN 1 PANGKALAN LADA Jalan A Yani KM 22 Desa Sumber Agung, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah Email : smkn1pangkalanlada@gmail.com 2 Unit (Rp.498.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Paket	1.000.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
1086	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengujian Mutu Barang	Kab. Barito Utara	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	usulan tidak spesifik perihal bentuk kegiatan dan komoditas yang diuji.	Usulan kegiatan perlu dilengkapi data dukung	1. menyesuaikan pagu anggaran	-	1	kegiatan	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1087	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pemasangan Paving Lapangan Upacara SMA NEGERI 1 KUMAI Jl. Padat Karya 1 Kumai , 1 Paket (Rp.278.628.536)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	450.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1088	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Usulan Penambahan Guru P3K SMA NEGERI 1 KUMAI Jl. Padat Karya 1 Kumai 7 Orang (TIK, Sejarah, Biologi, Geografi, Sosiologi, BK)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemetaan kebutuhan tenaga pendidik.	Agar dilakukan pemetaan kebutuhan untuk diajukan dalam pengadaan formasi CPNS, P3K, atau GTT	7	Orang	-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1089	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan USB SMA KUMAI Kumai Seberang 1 Unit (Rp.12.705.147.200)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan	1	unit	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1090	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 40 Unit di Kelurahan Raja Kec. Arut Selatan dengan total Pagu Anggaran Rp. 800.000.000,-	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	40	Unit	1.200.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1091	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan USB SMK PANGKALAN LADA Desa Kadipi Atas 1 Unit (Rp.12.705.147.200)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelayakan. USB SMK agar di analisa link n match jurusannya dengan potensi lapangan pekerjaan	1	Paket	12.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1092	15-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Wirausaha Muda volume 1 kegiatan (Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Dapat dilaksanakan dengan sharing anggaran bersama Dispora Seruyan	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	75	Orang	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
1093	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan USB SMA PANGKALAN BUN Desa Pasir Panjang 1 Unit (Rp.12.705.147.200)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelavakan	1	unit	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1094	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan operator desa pada aplikasi SIKS-NG	Kab. Barito Utara	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Bimbingan teknis dilaksanakan pada tahun 2024	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	20	orang	50.000.000	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1095	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan USB SMA KOTAWARINGIN LAMA Kotawaringin Lama ,1 Unit (Rp.12.705.147.200)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Terkait usulan Unit sekolah Baru memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta hasil study kelavakan	1	unit	7.000.000.000	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1096	15-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pelaku Seni Kebudayaan volume 1 kegiatan (Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Akan dilaksanakan oleh Provinsi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	300.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
1097	15-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Pedestrian tempat wisata Sungai bakau dan Danau Seluluk volume 350M2 (Rp. 200.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	200.000.000	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
1098	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	"Pembangunan Perpustakaan dan Isinya SMKS Dar Al-Raudhah Pangkalan Bungur Sungai Tatas,RT / RW : 26 / 10 Desa / Kelurahan : BARU Kecamatan : Kec. Arut Selatan 1 Unit (Rp. 400.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Ruang	750.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1099	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	"Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKS DAR AL-RAUDHAH Pangkalan Bungur Sungai Tatas,RT / RW : 26 / 10 Desa / Kelurahan : BARU Kecamatan : Kec. Arut Selatan 1 Unit (Rp.380.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Ruang	400.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1100	15-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Gazebo di Sungai Bakau dan Danau Seluluk volume 5 Buah (Rp. 500.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	500.000.000	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
1101	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	"Pembangunan Ruang Guru dan TU SMKS DAR AL-RAUDHAH Pangkalan Bungur Sungai Tatas,RT / RW : 26 / 10 Desa / Kelurahan : BARU Kecamatan : Kec. Arut Selatan 1 Unit (Rp.380.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Ruang	400.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1102	15-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Tata Kelola Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Seruyan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Akan dilaksanakan oleh Provinsi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	250.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
1103	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	"Pembangunan Ruang Kantor SMKN 4 PANGKALAN BUN Alamat : JL. H. AHMAD SALEH LINTAS PANGKALAN BUN - KOTAWARINGIN LAMA KM. 05 RT / RW : 3 / 0Desa / Kelurahan : Mendawai Seberang Kecamatan : Kec. Arut Selatan 1 Unit (Rp.285.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Ruang	400.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1104	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	"Pembangunan Toilet SMKN 4 PANGKALAN BUN Alamat : JL. H. AHMAD SALEH LINTAS PANGKALAN BUN - KOTAWARINGIN LAMA KM. 05 RT / RW : 3 / 0Desa / Kelurahan : Mendawai Seberang Kecamatan : Kec. Arut Selatan 1 Unit (Rp.150.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	150.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1105	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	"Timbunan halaman SMKN 4 PANGKALAN BUN Alamat : JL. H. AHMAD SALEH LINTAS PANGKALAN BUN - KOTAWARINGIN LAMA KM. 05 RT / RW : 3 / 0Desa / Kelurahan : Mendawai Seberang Kecamatan : Kec. Arut Selatan 1 Paket (Rp.200.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	200.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1106	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Perumahan Bintang Sembilan, Perumahan Bumi Mas Residence dan Perumahan Wisma Danau Biru Volume 1500 Meter Lokasi Rp. 1.155.670.500	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1107	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Penataan PSU di TPU Km. 12 Pangkalan Bun (LPA + LPB + Lataston) Volume 1 Lokasi Rp. 3.000.000.000	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1108	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Penataan PSU di TPU KM. 8 Desa Kumpai Batu Atas Volume 1 Lokasi Rp. 3.000.000.000	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1109	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Penataan PSU di TPU Sungai Tatas Volume 1 Lokasi Rp. 3.000.000.000	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1110	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Penataan PSU di TPU Karang Anyar Jl. Sintang Sejahtera RT. 25 Kelurahan Mendawai Volume 1 Pagu Anggaran Rp. 3.000.000.000	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1111	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tk. Daerah Kabupaten/kota	Kab. Barito Utara	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Permintaan dapat saja diakomodir. Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
1112	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Penataan PSU di TPU Samari Volume 1 Lokasi Pagu Anggaran Rp. 1.000.000.000	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1113	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tk. Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Barito Utara	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Permintaan dapat saja diakomodir. Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
1114	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembinaan Perpustakaan sekabupaten barito utara	Kab. Barito Utara	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Permintaan dapat saja diakomodir. Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
1115	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Teknis maupun kegiatan lomba perpustakaan Se-Kabupaten Barito Utara	Kab. Barito Utara	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dikembalikan	untuk Teknis maupun kegiatan lomba perpustakaan Se-Kabupaten Barito Utara di serahkan ke kabupaten	Menyesuaikan Anggaran	untuk Teknis maupun kegiatan lomba perpustakaan Se-Kabupaten Barito Utara di serahkan ke kabupaten	-	-	-	-	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
1116	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Monitoring/evaluasi ke Desa, Kelurahan, Sekolah-sekolah	Kab. Barito Utara	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dikembalikan	tidak terakomodir karena monitoring ke desa/kelurahan merupakan wewenang kabupaten	Menyesuaikan Anggaran	tidak terakomodir karena monitoring ke desa/kelurahan merupakan wewenang kabupaten	-	-	-	-	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1117	15-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Infrastruktur lapangan sepak bola SMAN 1 Paku masih belum memadai	Kab. Barito Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Agar melengkapi data dukung 2. Menyesuaikan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1118	15-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Tidak terdapatnya Drainase di Jl.SMAN 1 Paku	Kab. Barito Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	400.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1119	15-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Tidak Terdapat gapura SMAN 1 paku	Kab. Barito Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1120	15-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pagar SMAN 1 Paku yang perlu perbaikan	Kab. Barito Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1121	15-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar Keliling SMA 1 Pematang Karau	Kab. Barito Timur	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	1. Perlu tambahan data dukung 2. Menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	450.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1122	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Benih Padi Sawah	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1123	15-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Mesin Fogging volume 6 Puskesmas (Rp. 300.000.000)	Kab. Seruyan	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	-	-Perlu tambahan data dukung -Menyesuaikan anggaran, kewenangan dan RENJA	usulan diterima namun 1 kabupaten hanya mendapat 2 mesin fogging dan menyesuaikan dengan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	unit	16.667.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1124	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Benih Jagung Hibrida	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1125	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Pupuk	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
1126	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Obat-Obatan Tanaman Pangan	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1127	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1128	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan obat-obatan Fungisida, Insektisida, Moluskasida, Pestisida, Rodentisida.	Kab. Barito Utara	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	liter	-	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
1129	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Pupuk	Kab. Barito Utara	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik(detail)	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	kg	-	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1130	15-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Bronjong/Pengamanan Sepadan Sungai Paku	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan Kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1131	15-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	1. Pelaksanaan Diklat/ Bimbingan Teknis pustakawan berbasis teknologi/ IPTEK dan sistem seleksi dan pengolaan buku perpustakaan 2. Workshop untuk pustakawan untuk penguasaan berbasis teknologi/IPTEK dan sistem seleksi serta pengolaan buku perpustakaan 3. Kaji Tiru tentang teknologi/IPTEK dan sistem seleksi serta pengolaan buku perpustakaan bagi Pustakawan 4. Pelaksanaan Uji kompetensi untuk tenaga Pustakawan	Kab. Pulang Pisau	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawa dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
1132	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Benih/ Bibit	Kab. Barito Utara	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik(detail)	Usulan tidak spesifik menyebut komoditas, Menyesuainya Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	batang	-	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
1133	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Bimtek Penyuluh Kelapa Sawit	Kab. Barito Utara	Dinas Perkebunan	Dikembalikan	1. Usulan Terlalu Besar 2. Bukan Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Penyuluh ada dibawah Dinas TPHP Provinsi, Dikembalikan	-	-	keg	-	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1134	15-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	1. Pelaksanaan Diklat/ Bimbingan Teknis Sumberdaya manusia sesuai standar dalam hal pendataan dan penataan arsip 2. Workshop untuk Sumber Daya Manusia dalam bidang pendataan dan penataan arsip 3. Kaji Tiru tentang pendataan dan penataan arsip	Kab. Pulang Pisau	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Dispursip provinsi melaksanakan Peningkatan kapasitas arsiparis yang diusulkan dalam bentuk sosialisasi tata kelola arsip yang dimulai tahun 2024 oleh Dispursip Kalteng ke semua kab/kota se kalteng, untuk kaji tiru belum dapat diakomodir	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	50.000.000	Akuisisi Arsip Statis
1135	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Obat Obatan Pembasmi Hama pada Kakao	Kab. Barito Utara	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Usulan merupakan kewenangan dinas perkebunan Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	Liter	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1136	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Alat Pasca Panen Karet	Kab. Barito Utara	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik(detail)	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1137	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Alat Pasca Panen Kakao	Kab. Barito Utara	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik(detail)	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1138	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Alat Pasca Panen Kelapa Sawit	Kab. Barito Utara	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik(detail)	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1139	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Pupuk	Kab. Barito Utara	Dinas Perkebunan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik(detail)	Menyesuaikan Anggaran	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	-	kg	-	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
1140	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
1141	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1142	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Jalan Produksi	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1143	15-03-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pemberian pelatihan ketrampilan menjahit beserta peralatan menjahit, bantuan modal usaha warung sembako, dan bantuan peralatan untuk pembuatan kue.	Kab. Pulang Pisau	Dinas Sosial	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Menyampaikan proposal calon penerima bantuan dan sesuai DTKS	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	10.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1144	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1145	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Embung Pertanian	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
1146	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Kartu Berkah	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	150.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
1147	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Mesin Penepung Jagung (Peternakan)	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	25.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1148	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Mesin Pencacah Rumput (Peternakan)	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	35.000.000	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
1149	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan kambing jantan/ betina Dara	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	50.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
1150	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Ternak Babi (Peternakan)	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1151	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sapi Jantan/betina, Persilangan Bali, Madura, Bali PO Dara	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	125.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
1152	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Kab. Barito Utara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	35.000.000	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
1153	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan IKK Kandui	Kab. Barito Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	1.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
1154	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Perluasan Jaringan Perpipaan dalam Kota Muara Teweh	Kab. Barito Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	1.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
1155	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Perluasan dan Pemasangan Pipa Distribusi 6" Lengkap Aksesoris di Desa Trahean	Kab. Barito Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	1.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1156	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan IPA Kapasitas 50 l/dtk SPAM IKK Jingah	Kab. Barito Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Kabupaten	1.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
1157	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan IPAL Muara Teweh	Kab. Barito Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED serta masuk dalam dokumen SSK Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	50	m3/hari	5.000.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
1158	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan IPLT Muara Teweh	Kab. Barito Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED serta masuk dalam dokumen SSK Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	30	m3/hari	5.000.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
1159	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Montallat Desa Majangkan s.d Desa Baliti	Kab. Barito Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1160	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Barito Bintang Ninggi	Kab. Barito Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, disesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1161	15-03-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Butong	Kab. Barito Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan dengan skala prioritas pada Renja/Renstra, Agar memperhatikan data dukung.	Bukan kewenangan provinsi (menyesuaikan skala prioritas dengan pagu tahun 2025)	-	-	-	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1162	15-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Usulan Alat Mesin Pasca Panen (Perontok Padi - 4 Unit Rp.15.380.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	30.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1163	15-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Usulan Alat Mesin Pasca Panen (Rice Milling Unit (RMU) Mini - 1 Unit) - Rp.150.000.000	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	150.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1164	15-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Usulan Pupuk Besubsidi (NPK - Rp.200.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	75.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
1165	15-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Hand Tractor (Traktor Roda 2) - Volume : 148 unit - Pagu Rp.4.440.000.000	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	175.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1166	15-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Tingginya pernikahan usia dini di Kabupaten Lamandau sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan sasaran Siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MAN	Kab. Lamandau	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Lamandau, sedangkan penganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
1167	15-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Cultivator 144 Unit - Pagu Rp.3.420.000.000	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	Unit	45.000.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
1168	15-03-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pelaku usaha di desa memerlukan sosialisasi tentang BUMDes untuk peningkatan kapasitas pengurus	Kab. Lamandau	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
1169	15-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier - 3.199 meter - Rp.5.598.250.000	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
1170	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Alat Laboratorium untuk Pengujian Kualitas Lingkungan (7 Unit Pagu 2.120.000,000)	Kab. Kotawaringin Barat	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1171	15-03-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier - 3.161 meter - Pagu Rp.3.951.250.000	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1172	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sepeda Motor Operasional Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (4 Unit Pagu 130,000,000)	Kab. Kotawaringin Barat	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1173	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Mobil Operasional Pemantauan Kualitas Lingkungan (1 Unit Pagu 550,000,000)	Kab. Kotawaringin Barat	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1174	15-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Melakukan Sosialisasi Progam dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab. Gunung Mas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Gunung Mas, sedangkan penganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	40.000.000	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
1175	15-03-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kegiatan Bimbingan Teknis Kovensi Hak Anak	Kab. Gunung Mas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Gunung Mas, sedangkan penganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	40.000.000	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
1176	15-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1177	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1178	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1179	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1180	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi JUT	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1181	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi JUT	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1182	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1183	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Belum tersosialisasinya menu B2SA kepada anak-anak sekolah	Kab. Barito Selatan	Dinas Ketahanan Pangan	Dikembalikan	Detail lokasi kurang lengkap, agar kiranya dapat dijelaskan lebih terperinci dan direkomendasikan agar membuat penjelasan lebih rinci melalui fitur upload proposal	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	-	-	-	-	-	-
1184	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1185	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kelompok Wanita Tani (KWT) masih belum memahami tentang pentingnya desa B2SA	Kab. Barito Selatan	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan dapat dilanjutkan apabila dana tersedia dan tetap menyesuaikan Pagu anggaran. Mohon dapat melengkapi berkas proposal agar usulan dapat dijelaskan lebih terperinci	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	Lokasi	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
1186	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1187	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi JUT	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1188	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Modal Usaha Terbatas mohon Bantuan Kemasan Produk Kerupuk	Kab. Barito Selatan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	tidak ada proposal dan usulan kurang spesifik. agar melampirkan proposal disertai data : kelompok IKM penerima bantuan, dan spesifikasi peralatan yang diusulkan.	Usulan kegiatan merupakan wewenang dari Dinas Perdagangan dan perindustrian	-	-	-	-	-	-
1189	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Modal Usaha Terbatas, mohon Bantuan Alat Pengolah Kerupuk	Kab. Barito Selatan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	tidak ada proposal. agar melengkapi proposal disertai data dukung : profil kelompok IKM penerima bantuan dan spesifikasi peralatan yang diusulkan.	Usulan kegiatan merupakan wewenang dari Dinas Perdagangan dan perindustrian	-	-	-	-	-	-
1190	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT Perkebunan	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dikembalikan	Bukan kewenangan Dinas TPHP	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan agar usulan lebih spesifik (detail)	Dikembalikan Kegiatan Kewenangan Dinas Perkebunan	-	-	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1191	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Modal Usaha Terbatas, mohon Bantuan Alat Pengolah Bakso	Kab. Barito Selatan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	tidak ada proposal. agar melengkapi proposal disertai data dukung : profil kelompok IKM penerima bantuan dan spesifikasi peralatan yang diusulkan.	Usulan kegiatan merupakan wewenang dari Dinas Perdagangan dan perindustrian	-	-	-	-	-	-
1192	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Modal Usaha Terbatas Pakan dan Benih untuk Usaha Budidaya	Kab. Barito Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal yang spesifik dan detail, serta lainnya	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1193	15-03-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), 8 Desa Wisata, Rp. 200.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Akan dibahas lebih lanjut	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	200.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1194	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Modal Usaha Terbatas, mohon Bantuan Alat Pengolah Bakso	Kab. Barito Selatan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dikembalikan	tidak ada proposal. agar melengkapi proposal disertai data dukung : profil kelompok IKM penerima bantuan dan spesifikasi peralatan yang diusulkan.	Usulan kegiatan merupakan wewenang dari Dinas Perdagangan dan perindustrian	-	-	-	-	-	-
1195	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1196	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Sarana Penangkapan Tidak Memadai, mohon bantuan Pengadaan Kelontok Lengkap	Kab. Barito Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
1197	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi JUT	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1198	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Modal Usaha Terbatas Pakan dan Benih untuk Usaha Budidaya	Kab. Barito Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal yang spesifik dan detail, serta lainnya	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1199	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi JUT	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1200	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan / Peremajaan Alat Tangkap Ikan, mohon bantuan Pengadaan Alat Tangkap Ikan (Tampirai Kawat)	Kab. Barito Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
1201	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan Anggaran, mohon bantuan Peningkatan Sarana Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	Kab. Barito Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
1202	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Modal Usaha Terbatas Pakan dan Benih untuk Usaha Budidaya	Kab. Barito Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal yang spesifik dan detail, serta lainnya	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1203	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT Kelompok Tani Sunsang Raya	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Unit	225.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1204	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan / Peremajaan Alat Tangkap Ikan, mohon bantuan Pengadaan Alat Tangkap Ikan(Rengge)	Kab. Barito Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1205	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Sarana Penangkapan Tidak Memadai, mohon bantuan Pengadaan Mesin Ces	Kab. Barito Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
1206	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT Kelompok Tani Harapan	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1207	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Modal Usaha Terbatas Pakan dan Benih untuk Usaha Budidaya	Kab. Barito Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal yang spesifik dan detail, serta lainnya	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1208	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT Kelompok Tani Makmur	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1209	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Keterbatasan / Peremajaan Alat Tangkap Ikan, mohon bantuan Pengadaan Alat Tangkap Ikan(Bubu)	Kab. Barito Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
1210	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi JUT Kelompok Tani Mufakat	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1211	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kekurangan Induk (Calon Induk Ikan Mas)	Kab. Barito Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1212	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT Kelompok Tani Suka Maju	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1213	15-03-2024	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Peningkatan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif, 1 Kegiatan, Rp. 75.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	Akan dilaksanakan oleh Provinsi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	kegiatan	200.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
1214	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kekurangan Induk Calon Induk Ikan Nila	Kab. Barito Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dikembalikan	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung	Usulan kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung berupa proposal dan data lainnya	Tidak ada proposal dan nama kelompok tidak ada, agar dilengkapi data dukung (status dipending)	-	-	-	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1215	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	mohon bantuan benih semangka	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	25.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
1216	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	mohon bantuan benih padi	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	25.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1217	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT Kelompok Tani Kupang Jaya	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1218	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	mohon bantuan rehabilitasi jalan usaha tani	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1219	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT Kelompok Tani Roda Maju	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1220	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	mohon bantuan rehabilitasi jalan usaha tani	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1221	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	mohon bantuan rehabilitasi jalan usaha tani	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1222	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT Gapoktan T. Jawa	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1223	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	mohon bantuan rehabilitasi jalan usaha tani	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1224	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT Gapoktan T. Jawa II	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1225	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT Sawah Serunai	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1226	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan JUT SDG	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal, titik koordinat dan lahan c and c	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
1227	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	perluunya Perontok Padi (Power Thresher) alat pascapanen untuk mempermudah petani	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	30.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1228	15-03-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	perluunya Perontok Padi (Power Thresher) alat pascapanen untuk mempermudah petani	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	30.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1229	15-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	perlunya Perontok Padi (Power Thresher) alat pascapanen untuk mempermudah petani	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	30.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1230	15-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	perlunya Perontok Padi (Power Thresher) alat pascapanen untuk mempermudah petani	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	UNIT	30.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1231	15-03-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	perlunya Perontok Padi (Power Thresher) alat pascapanen untuk mempermudah petani	Kab. Barito Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Usulan disetujui	-	Usulan agar dilengkapi data dukung berupa proposal,	Diakomodir, Apabila dana tersedia, serta menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	UNIT	60.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
1232	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pembuatan Teras pangan B2SA: instalasi dan bahan penanaman hidroponik di 10 desa/kelurahan terdampak stunting dan rawan pangan (pagu sebesar Rp.110.000.000,00)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan dapat diakomodir dengan menyesuaikan Pagu anggaran tersedia	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	10	Lokasi	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
1233	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengembangan desa beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) di 2 desa/kelurahan terdampak stunting (pagu sebesar Rp.150.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan dapat diakomodir dengan menyesuaikan Pagu anggaran tersedia	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	2	Lokasi	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1234	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) goes to school di 5 sekolah terdampak stunting (pagu sebesar Rp. 75.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan dapat di akomodir apabila dana tersedia dan menyesuaikan Pagu anggaran	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik,serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	5	Lokasi	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
1235	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	penyediaan sarana dan prasarana pengujian pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di 6 kecamatan (sebesar Rp250.000.000,00)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Ketahanan Pangan	Dikembalikan	Bukan kewenangan provinsi	Agar dilengkapi dengan dokumen data lengkap berupa proposal dan lainnya	Usulan di kembalikan karena bukan menjadi kewenangan provinsi	-	6	Paket	-	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
1236	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	pengadaan kendaraan operasional pengamanan Tahura Kab Kobar	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Kehutanan	Usulan disetujui	-	1. Menyesuaikan dengan kewenangan SOPD terkait	- usulan berupa proposal dari kepala daerah kabupaten/kota - proposal dibuat pada tahun 2024 - Sumber dana DBH-DR	usulan diakomodir, lengkapi data dukung	1	Unit	550.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
1237	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran di lahan calon transmigrasi	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Usulan Pelepasan Kawasan Hutran untuk Calon Lokasi Transmigrasi Rangka seluas 325 Ha. Agar kabupaten menyiapkan data pendukung untuk pengusulan Pelepasan Kawasan Hutan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	100.000.000	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
1238	15-03-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pelaksanaan Canvasing, Job Fair dan Bazaar, serta Sosialisasi ke Perusahaan	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja Disnakertrans	Berdasar UU 23/2014 kewenangan Provinsi job fair tingkat Provinsi, kewenangan Kab/Kota job fair tingkat Kab/Kota. Lokus kegiatan akan dikaji dahulu	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Job fair yang dilakukan adalah yang tingkat provinsi	-	-	-	Job Fair/Bursa Kerja

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1239	20-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Jalan Desa Bangun Harja Semenisasi sepanjang 100 m dengan lebar 3 meter dengan total anggaran 200.000.000	Kab. Seruyan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1240	20-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Jalan Lingkungan pada Desa Riam Batang sepanjang 200 M dengan nilai Rp 260.000.000	Kab. Seruyan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1241	20-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Jalan Lingkungan Budi Utomo IV dengan panjang 200 m lebar 3 meter tinggi 20 cm dengan nilai Rp 300.000.000	Kab. Seruyan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1242	20-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Pembangunan Jalan Lingkungan bagi masyarakat Gang Mangga KP II dengan panjang 150 m lebar 2,3 m dan tinggi 20 dengn nilai Rp 350.000.000	Kab. Seruyan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1243	20-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya pembangunan jalan lingkungan Jalan Depan SMP Desa Tumbang Darap dngan panjang 200 m lebar 3 m tinggi 20 cm dengan nilai Rp 350.000.000	Kab. Seruyan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1244	20-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Nur Hidayah Pмбуang Hulu I sepanjang 350 m lebar 3 m tinggi 20 cm	Kab. Seruyan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuaiakan dengan kewenangan Provinsi, sesuai skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1245	20-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Perlu nya Pembangunan jalan Semenisasi Jalan Lingkungan Desa Tumbang Swei dengan panjang 280 m lebar 3 m tinggi 20 cm	Kab. Seruyan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai kan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1246	20-03-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Takaras KP II dengan panjang 150 m lebar 2, 3 m tinggi 20 cm	Kab. Seruyan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai kan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1247	01-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Usulan bantuan Usaha Ekonimi Produktif untuk 100 orang	Kab. Katingan	Dinas Sosial	Dikembalikan	Dilengkapi data usulan dan proposal	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	-	-	-	-	-	-
1248	01-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	PENGADAAN TINTA/RIBBON, PEMBERSIH (CLEANING KIT) DAN FILM PRINTER KTP-EL DAN KIA	Kab. Katingan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	80	Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1249	01-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	PENGADAAN PRINTER KTP-EL DAN KIA	Kab. Katingan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	4	Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1250	01-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	PENGADAAN ALAT PEREKAMAN MOBILE ENROLLMENT sebanyak 5 buah	Kab. Katingan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	5	Unit	600.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1251	01-04-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan pelatihan dan Bimtek untuk mendukung SDM Kelompok Pengrajin Anyaman Rotan dibutuhkan anggaran Sebesar Rp. 150.000.000.00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung : proposal	Akan di akomodir menyesuaikan dengan anggaran dana DAK-Non Fisik 2025	Lengkapi data dukung: e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	1	paket	150.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
1252	01-04-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan pelatihan dan Bimtek untuk mendukung SDM Kelompok Pengolahan makanan ringan dibutuhkan anggaran Sebesar Rp. 100.000.000.00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung : proposal	Akan di akomodir menyesuaikan dengan anggaran dana DAK-Non Fisik 2025	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	40	Orang	100.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
1253	01-04-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Masih Tingginya Perkawinan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan Pagu Anggaran Rp. 31.290.000 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)	Kab. Pulang Pisau	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Detil jenis usulan agar saling koordinasi antar perangkat daerah teknis. Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Direkomendasikan mengingat prevalansi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Pulang Pisau masih cukup tinggi namun pelaksanaannya tetap di ibu kota kabupaten	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
1254	02-04-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya aula (pembangunan aula)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	ruang	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1255	02-04-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya pagar sekolah bagian belakang (pembangunan pagar sekolah bagian belakang)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1256	02-04-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Lapangan olahraga (pembangunan lapangan basket, voli dan takraw)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Kewenangan dan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1257	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Normalisasi dan pengerukan irigasi di Malang Tanggul sepanjang 5.000 meter Rp 655.500.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1258	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Normalisasi irigasi sungai Pamurus sepanjang 5.000 meter Rp 655.500.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1259	02-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan fasilitas parkir SMA Negeri 2 Laung Tuhup	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	150.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1260	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Normalisasi sungai badidih, sepanjang 4.500 meter (RT.04) Rp 589.950.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1261	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Normalisasi sungai Bujur menuju ke laut, sepanjang 4.000 m (RT.05) Rp 524.400.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1262	02-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Gedung Serbaguna/Aula SMA Negeri 2 Laung Tuhup	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	ruang	450.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1263	02-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Pagar SMA Negeri 2 Laung Tuhup	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1264	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Normalisasi sungai Bejarau Kecil, sepanjang 4.000 meter (RT.03) Rp 524.400.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1265	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Normalisasi sungai Bejarau Besar, sepanjang 4.500 meter (RT.012) Rp 589.950.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1266	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Pengerukan / Normalisasi Malang Baru sepanjang 3.000 meter Desa Kuin Permai Rp 393.300.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1267	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Pengerukan / Normalisasi Malang Etok sepanjang 3.000 meter Desa Kuin Permai Rp 393.300.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1268	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jl. Padat Karya RT.1 & RT 6, sepanjang 5.000 meter Rp 500.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1269	02-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Asrama Siswa SMA Negeri 2 Laung Tuhup	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	ruang	400.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1270	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jl. Padat Karya RT.6 & RT. 7, sepanjang 3.000 meter Rp 300.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1271	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai Bunut (RT. 9 - RT. 13), sepanjang 3.000 meter Rp 300.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1272	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi, RT.01, RT. 02, Desa Pondok Damar sepanjang 10.000 meter Rp 1.000.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1273	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Pengerukan/Normalisasi Malang Etok Desa Kuin Permai, sepanjang 3.000 meter Rp 330.279.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1274	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Pengerukan/Normalisasi Malang Baru Desa Kuin Permai, sepanjang 3.000 meter Rp 330.279.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1275	02-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Prasarana Gedung Kurang Memadai (Rehab gedung)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	500.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1276	02-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Muebeler (meja dan kursi guru 10 buah)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	250.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah
1277	02-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Pagar Sekolah (Pembangunan Pagar Sekolah)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1278	02-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya fasilitas lapangan olah raga (pembangunan lapangan Bola voly untuk putra/putri, Lapangan takraw, Lapangan basket)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Kewenangan dan Anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1279	02-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Rumah Kepala Sekolah kurang memadai (Rehab perumahan Kepala Sekolah)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	350.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1280	02-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Ruang Seni yang belum memadai (Rehab Ruang Seni)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung seperti Proposal, Foto lokasi dll	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	ruang	250.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1281	02-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya alat praktik (pengadaan Kamera DSLR Canon RP KIT 24 - 105 mm (3 unit), Kamera Video HC-PV100 HD Camcorder (2 unit), Alat Press 5 In 1 RHINOTEC HEAT (1 paket), Paket Print DTF Riecat Alfa All New Lite (1 paket), Printer Cutting Jinka NXL 721 AC (1 unit), Hollyland Mars 300 Pro HDMI Wireless Video Transmitter/Receiver Set (2 set), Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus (DJI RC 2), Laptop MSI Prestige 13 Evo A13M (Core i7-1360P, 16GB, 512 (20 unit), Mesin Laminating (2 unit)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Kewenangan dan Anggaran	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	500.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1282	02-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya alat Praktik AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (pengadaan Mesin Pemotong Rumput (4 buah), Hand Sprayer Listrik (4 buah), Mesin Air Hydroponik (4 buah), Bak Air Hydroponik (4 buah), Selang Air (2 gulung), Tosa (1 buah), Rehap Gren House (1 unit), Traktor Mini (1 buah)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Anggaran	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	500.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1283	02-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya alat PRAKTIK OLAH RAGA DAN FISIKA (Rehab Bangunan Laboratorium Fisika (1 unit), Rehab Lapangan Basket (1 unit), pembangunan Lapangan Volly Ball (1 unit), Pembangunan Lapangan Takraw (1 unit)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan Kewenangan dan Anggaran	usulan ditindaklanjuti adalah rehabilitasi laboratorium fisika, dengan menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran tersedia, sedangkan untuk usulan dapat diusulkan tersendiri	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran untuk rehab Lab. Fisika	1	Paket	500.000.000	Rehabilitasi Ruang Laboratorium

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1284	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehabilitasi Sungai Babaung Kecil sepanjang 6.000 meter Rp 664.664.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1285	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehabilitasi Sungai Kabuau sepanjang 6.000 meter Rp 664.664.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1286	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Sekunder mengalami kedangkalan akibat penumpukan material lumpur dan rumput pengerukan dan pemeliharaan sekunder sepanjang 3.000 Meter, lebar 2 Meter dan Kedalaman 3 meter Rp 329.220.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1287	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Normalisasi Primer dan Sekunder sepanjang 40.000 M Rp 4.430.960.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1288	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Lempuyang Kec. Teluk Sampit sepanjang 10.000 meter Rp 1.000.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1289	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Quin Kec. Teluk Sampit sepanjang 6.000 meter Rp 600.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1290	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Penyugan Kec. Pulau Hanaut sepanjang 12.000 meter Rp 1.200.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1291	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Hanaut Kec. Pulau Hanaut sepanjang 15.000 meter Rp 1.500.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1292	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Makarti Jaya Kec. Pulau Hanaut sepanjang 3.000 meter Rp 300.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1293	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Rawa Sari Kec. Pulau Hanaut sepanjang 40.000 Rp 4.000.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1294	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kondisi Jalan dan Drainase Perlu Peningkatan 350 Meter Rp. 500.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI (Proposal tersedia)	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1295	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kondisi Jalan dan Drainase Perlu Peningkatan 330 Meter Rp. 500.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI (Proposal tersedia)	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1296	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kondisi Jalan Perlu Peningkatan 600 Meter Rp. 1.000.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1297	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kondisi Jalan Perlu Peningkatan 315 Meter Rp. 850.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1298	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kondisi Jalan Perlu Peningkatan 350 Meter Rp. 500.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1299	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kondisi Jalan Perlu Peningkatan 1.000 Meter Rp. 1.500.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1300	02-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kondisi Jalan Perlu Peningkatan 1.050 M2 Rp. 1.200.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1301	02-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Belum lengkapnya Guru Mata Pelajaran Agama Kristen di SMA Negeri 2 Laung Tuhup	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Usulan kebutuhan tenaga pendidikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik.	agar dipetakan kebutuhannya untuk diajukan dalam pengadaan formasi CPNS, P3K, atau GTT	1	Kegiatan	-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1302	02-04-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Barito Timur (1 Kegiatan : Rp. 45.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Dibahas lebih lanjut mengingat ada beberapa Kabupaten mengajukan Bimtek yang sama, sehingga nantinya akan dilaksanakan oleh Provinsi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	50.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
1303	02-04-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Rumah Pangan B2SA (Rp. 150.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, seperti Proposal dan lainnya	Usulan dapat diakomodir dengan catatan menyesuaikan dana Pagu anggaran tersedia	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik, serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Lokasi	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
1304	02-04-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Teras Pangan B2SA (Rp. 375.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, seperti Proposal dan lainnya	Usulan dapat diakomodir dengan catatan menyesuaikan anggaran tersedia. Agar dapat dilengkapi data dukung terkait lokasi pelaksanaan dan proposal usulan kegiatan terkait	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Kegiatan	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
1305	02-04-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Rp. 150.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, seperti Proposal dan lainnya	Usulan dapat diakomodir dengan menyesuaikan pagu anggaran tersedia. Agar dapat dilengkapi data dukung dan proposal usulan kegiatan terkait	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Dokumen	-	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
1306	02-04-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitas Lumbung Pangan Masyarakat (Rp. 150.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dikembalikan	Bukan kewenangan Dinas TPHP	Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, seperti Proposal dan lainnya	Di Kembalikan Kegiatan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan	-	1	Unit	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
1307	02-04-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten (Rp. 200.000.000)	Kab. Barito Timur	Dinas Ketahanan Pangan	Usulan disetujui	-	Agar dilengkapi dengan Data dukung yang lengkap, seperti Proposal dan lainnya	Usulan dapat diakomodir dengan menyesuaikan pagu anggaran tersedia. Agar dapat dilengkapi data dukung dan proposal usulan kegiatan terkait	Usulan diakomodir, data dukung proposal dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1308	02-04-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Bak Reservoir IKK Jaar (100 M3)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	1.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
1309	02-04-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Bak penampungan air baku IPA Haringen, Tamiang Layang (300 M3)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Catatan : Lengkapi RAB, Koordinat Lokasi, Dan Foto Lokasi Air Baku	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	-	-	Rehabilitasi Unit Air Baku
1310	02-04-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Bak air baku Unit IKK Dayu (100 M3)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Catatan : Dilengkapi RAB, Kooordinat Lokasi, dan Foto tempat Air Baku	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	-	-	Rehabilitasi Unit Air Baku
1311	03-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kondisi Jalan Perlu Peningkatan 2.058 M2 Rp. 950.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1312	03-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kondisi Jalan dan Drainase Perlu Peningkatan 424 Meter Rp. 1.161.336.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1313	03-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Kondisi Jalan dan Drainase Perlu Peningkatan 390 Meter Rp. 1.068.210.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1314	03-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 30 Unit Rp. 900.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	30	Unit Rumah	900.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1315	03-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Kabupaten Barito Selatan rawan akan bencana alam banjir tahunan hal ini disebabkan barito selatan merupakan daerah DAS Barito sehingga diperlukannya bantuan Logistik Banjir untuk masyarakat yang terdampak	Kab. Barito Selatan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	BPB-PK Prov. Kalteng menyediakan paket sembako yang akan didistribukaan apabila terjadi bencana dengan penetapan Status Tanggap Darurat di Kabupaten.	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Dengan menyesuaikan status tanggap kebencanaannya	500	Paket	250.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1316	03-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Dalam melaksanakan tugas turun lapangan tim BPBD sulit menempuh medan ekstrem tempat terjadi bencana alam menggunakan Kendaraan roda 4, bersama ini kami sampaikan usulan kendaraan roda dua jenis Motor Trail sebanyak 2 unit yang sumber pendanaannya berasal dari APBD PProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	Kab. Barito Selatan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	2	Unit	100.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1317	03-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	masih minimnya tenda pengungsi milik BPBD Kabupaten Barito Selatan untuk menampung korban bencana alam sehingga dengan ini kami sampaikan usulan Tenda pengungsi sebanyak 2 unit bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	Kab. Barito Selatan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	2	Unit	200.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1318	03-04-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Masih kurangnya inventaris penunjang kegiatan BPBD seperti kantong mayat untuk tim lapangan mengevakuasi korban bencana alam, bersama ini kami sampaikan usulan Kantong Mayat yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	10	Buah	3.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1319	03-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Bantuan Untuk rumah warga yang tidak layak huni (Rehab Rumah Warga 35 Unit)	Kab. Murung Raya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	10	Unit Rumah	300.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1320	03-04-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	terbatasnya Flexible Water Tank milik BPBD sebagai cadangan menampung air untuk kesiagaan bencana alam kebakaran hutan, bersama ini kami sampaikan usulan Flexible Water Tank Kapasitas 5000 Liter sebanyak 5 buah bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Buah	1.000.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1321	03-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan Yos Sudarso Puruk Cahu	Kab. Murung Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Km	10.000.000.000	Rekonstruksi Jalan
1322	03-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan Sudirman Puruk Cahu	Kab. Murung Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Km	10.000.000.000	Pemeliharaan Berkala Jalan
1323	03-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 15 Unit Rp. 450.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	15	Unit Rumah	450.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1324	03-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Jendral Sudirman (Rehab Median Jalan)	Kab. Murung Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Km	10.000.000.000	Rekonstruksi Jalan
1325	03-04-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Penambahan Jaringan PIPA Sepanjang 3.189 m dan Sambungan Rumah Sebanyak 100 SR dengan pagu usulan Rp.1,125,000,000	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	1.125.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
1326	03-04-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Penambahan Jaringan PIPA Sepanjang 3.875 m dan Sambungan Rumah Sebanyak 100 SR dengan pagu usulan Rp.1,500,000,000	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	1.500.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
1327	03-04-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Penambahan Jaringan PIPA Sepanjang 11.291 m dan Sambungan Rumah Sebanyak 100 SR dengan pagu usulan Rp.2,000,000,000	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	2.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1328	03-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Perkuatan Tebing Sungai Barito di Desa Juking Pajang	Kab. Murung Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1329	03-04-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Chest Freezer, cool box dan keranjang/troy untuk Poklahsar Usaha Baru Jelai (Jl. A. Yani RT.02 Kelurahan Kuala Jelai Kec. Jelai) 1 Paket	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Verifikasi PD	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama bukan perorangan)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
1330	03-04-2024	SUNARDI, S. Si., M.Sc., M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Chest Freezer, cool box dan keranjang/troy untuk Poklahsar Putri tunggal (Jl. A. Yani RT.02 Kelurahan Kuala Jelai Kec. Jelai)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Verifikasi PD	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama bukan perorangan)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	Paket	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1331	03-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Chest Freezer, cool box dan keranjang/troy untuk Poklahsar Ebi Jaya Jelai (Jl. A. Yani RT.02 Kelurahan Kuala Jelai Kec. Jelai)	Kab. Sukamara	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Verifikasi PD	Diterima namun dengan catatan perlu dilakukan verifikasi terhadap kelompok karena persyaratan hibah adalah berbadan hukum dan menjalankan usaha perikanan dengan baik (bermata pencaharian tetap nelayan, berorientasi kelompok usaha bersama bukan perorangan)	Usulan diakomodir, data dukung dilengkapi lebih mendetail/spesifik), serta anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana	1	paket	-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
1332	03-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jaringan Drainase Anak Sungai Musak (Drainase Tersier)	Kab. Murung Raya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1333	03-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Drainase Jalan Pulau Landan (Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan)	Kab. Murung Raya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI (Proposal Tersedia)	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1334	03-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Permohonan pelaksanaan kegiatan bimtek/workshop Pembinaan Pustakawan dan Pengembangan SDM Pengelola Perpustakaan Kabupaten Murung Raya	Kab. Murung Raya	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Permintaan dapat saja diakomodir. Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1335	03-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Permohonan Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop dan Diklat untuk Arsiparis dan Pengelola Arsip Kabupaten Murung Raya	Kab. Murung Raya	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Dispursip provinsi melaksanakan Peningkatan kapasitas arsiparis yang diusulkan dalam bentuk sosialisasi tata kelola arsip yang dimulai tahun 2024 oleh Dispursip Kalteng ke semua kab/kota se kalteng	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	100.000.000	Akuisisi Arsip Statis
1336	03-04-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Alat Perekaman Mobile (Mobile Enrollment)	Kab. Barito Utara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	210.678.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1337	03-04-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer KIA	Kab. Barito Utara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	24.550.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1338	03-04-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Tinta Printer KIA COLOR FILM	Kab. Barito Utara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	100	Unit	120.900.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1339	03-04-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Tinta Printer KIA BLACK MONOCHROME	Kab. Barito Utara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	30	Unit	11.655.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1340	03-04-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Tinta Printer KIA Cleaning	Kab. Barito Utara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	10	Unit	5.802.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1341	03-04-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Personal Computer	Kab. Barito Utara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	4	Unit	53.856.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1342	03-04-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Card Reader	Kab. Barito Utara	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	7.031.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1343	03-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya sarana dan prasarana belajar pada SMA Negeri 5 Tanah Siang	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, lengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Usulan yang diakomodir dalam proposal yang telah diupload agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2	1	Paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1344	03-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Aula SMA Negeri 1 Tanah Siang Selatan	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	450.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1345	03-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Pemeliharaan Wilayah Pengamat Pengairan Pulau Hanaut sepanjang 50.000 meter Rp 500.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1346	03-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Pemeliharaan Wilayah Pengamat Pengairan Teluk Sampit sepanjang 50.000 meter Rp 500.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1347	03-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Pembangunan pintu air fungsi ganda sebanyak 3 buah Rp 2.400.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1348	03-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya sarana dan prasarana belajar pada SMA Negeri 1 Puruk Cahu	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. jenis usulan yang diakomodir agar disesuaikan dengan sub kegiatan masing2.	1	Paket	300.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1349	03-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Teknik Otomotif di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
1350	03-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Teknik Listrik di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
1351	03-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Teknik Las di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
1352	03-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Processing di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1353	03-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Teknik Komputer di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
1354	03-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Menjahit di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
1355	03-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Tata Boga di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	20	Orang	-	Perluasan Kesempatan Kerja
1356	03-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Ayaman Rotan/Purun di kalangan masyarakat buntok	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	20	Orang	-	Perluasan Kesempatan Kerja
1357	03-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak di kalangan masyarakat buntok	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	20	Orang	-	Perluasan Kesempatan Kerja

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1358	03-04-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Budi Daya Jamur Tiram di kalangan masyarakat buntok	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	20	Orang	-	Perluasan Kesempatan Kerja
1359	03-04-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Pupuk Organik di kalangan masyarakat buntok	Kab. Barito Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	20	Orang	-	Perluasan Kesempatan Kerja
1360	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Alat transportasi pengangkut sampah (Tossa). 2 Unit	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	2	Unit	120.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1361	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan truk pengangkut sampah. (1 Unit)	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	Unit	582.714.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1362	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan truk pengangkut sampah. (1 Unit)	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	Unit	582.714.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1363	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 1 Unit	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	Unit	60.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1364	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 3 Unit	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	3	Unit	180.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1365	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit)	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	Unit	582.714.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1366	03-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Masih Kurangnya armada Truk Amrol untuk mengangkut sampah ke TPA sebanyak 2 unit	Kab. Katingan	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	2	Unit	1.350.396.500	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1367	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Paket)	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	Unit	582.714.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1368	03-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Masih Kurangnya bak Amrol tempat pembuangan sampah sementara sebanyak 10 unit	Kab. Katingan	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	10	Unit	820.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1369	03-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Masih Kurangnya Kendaraan roda 3 untuk mengangkut sampah rumah tangga ke TPS sebanyak 5 unit	Kab. Katingan	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	5	Unit	300.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1370	03-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Jalan Menuju TPA Kecamatan Tewang Sangalang Garing sepanjang 3500 meter	Kab. Katingan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED serta masuk dalam dokumen JAKSTRADA Persampahan Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	unit	5.000.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
1371	03-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penyediaan Jamban sehat dan Tangki Septik Desa Bangun Jaya sebanyak 30 KK	Kab. Katingan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria serta masuk dalam SK Lokasi Stunting dan Dokumen SSK Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	18	m3/hari	1.000.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1372	03-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penyediaan Jamban sehat dan Tangki Septik Desa Kampung Melayu sebanyak 30 kk	Kab. Katingan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria serta masuk dalam SK Lokasi Stunting dan Dokumen SSK Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	18	m3/hari	1.000.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
1373	03-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penyediaan Jamban sehat dan Tangki Septik Desa Karuing sebanyak 30 KK	Kab. Katingan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria serta masuk dalam SK Lokasi Stunting dan Dokumen SSK Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	18	m3/hari	1.000.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
1374	03-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penyediaan Jamban sehat dan Tangki Septik Desa Samba Bakumpai sebanyak 30 KK	Kab. Katingan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria serta masuk dalam SK Lokasi Stunting dan Dokumen SSK Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	18	m3/hari	1.000.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
1375	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 1 Paket	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	Unit	60.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1376	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit)	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	Unit	582.714.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1377	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit)	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	Unit	582.714.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1378	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan Tempat Penampungan Akhir Sampa. (1 Paket)	Kab. Kapuas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Lengkapi data dukung	null	-	-	-	-	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1379	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Program Kampung Iklim. (1 Kegiatan)	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	1	Kegiatan	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1380	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 10 Unit	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	10	Unit	600.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1381	03-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (2 Unit)	Kab. Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	Menyesuaikan kegiatan prioritas DLH dan menyesuaikan anggaran yang tersedia	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	2	Unit	1.165.428.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
1382	03-04-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Peningkatan Fasilitas dan Sarana di TPA Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED serta masuk dalam dokumen JAKSTRADA Persampahan Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	unit	1.000.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
1383	03-04-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana meliputi peralatan dan perlengkapan yang memadai untuk kegiatan jemput bola melayani masyarakat	Kota Palangkaraya	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja. Detil jenis usulan agar saling koordinasi antar perangkat daerah teknis	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	320	Unit	1.116.948.885	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1384	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Masih minimnya sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Sumber Barito	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. jenis usulan dalam proposal yang telah di upload agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2	1	Paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1385	04-04-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Drainase dangkal dan tersumbat, diperlukan rehab dan peningkatan kapasitas drainase untuk menampung debit air jaringan yang lain	Kota Palangkaraya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut, lengkapi readiness kriteria	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
1386	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya sarana dan prasarana belajar di SMA Negeri 2 Puruk Cahu	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. usulan dalam proposal yang diupload yang akan diakomodir agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2	1	Paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1387	04-04-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Drainase dangkal dan tersumbat, diperlukan lanjutan pembangunan drainase mengingat belum terkoneksi	Kota Palangkaraya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut, lengkapi readiness kriteria	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	unit	1.000.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
1388	04-04-2024	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Akses ke Ibukota kecamatan hanya lewat angkutan sungai rungan, jalan sudah ada tapi belum ada jembatan, diperlukan jembatan permanen rangka baja menyebrang sungai rungan sepanjang kurang lebih 200m	Kota Palangkaraya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1389	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan mobil water supply	Kab. Murung Raya	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Unit	1.000.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1390	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya sarana dan prasarana belajar di SMK Negeri 1 Tanah Siang	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. jenis usulan dalam proposal yang akan diakomodir agar disesuaikan dengan sub kegiatannya masing2	1	Paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1391	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Mobil Fire Jeep Slip on Portable Mitsubishi 600 Liter Single Cabin 1 Unit	Kab. Murung Raya	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Unit	1.300.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1392	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan alat pemadam api ringan untuk dibagikan ke UMKM 100 Buah	Kab. Murung Raya	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Menyesuaikan Anggaran, Kewenangan, dan Renja BPB-PK Prov Kalteng	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	100	Buah	110.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
1393	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya sarana dan prasarana belajar (Pagar dan Server ANBK) di SMA Negeri 3 Tanah Siang	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1394	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan truk pengangkut personil 1 Unit	Kab. Murung Raya	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1395	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya sarana dan prasarana belajar di SMA Muhammadiyah Puruk Cahu	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran dan kewenangan	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1396	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Belum adanya Rumah Dinas Guru, Ruang Guru, Renovasi Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan dan Toilet pada SMA Negeri 3 Tanah Siang	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	untuk usulan rehab ruang kelas ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	600.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1397	04-04-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Penguatan pelaku usaha dikawasan perdesaan Agro Mina Wisata (30 orang, Pagu 150.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	30	Orang	150.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
1398	04-04-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Tapal batas Desa (40 Desa, Pagu 320.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	40	desa	320.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
1399	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya sarana dan prasarana belajar (Toilet) di SMA Negeri 1 Tanah Siang	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1400	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya sarana dan prasarana belajar (Penambahan Ruang Kelas) di SMA Negeri 4 Laung Tuhup	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	800.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1401	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Minimnya sarana dan prasarana belajar (Toilet) di SMA Negeri 5 Laung Tuhup	Kab. Murung Raya	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1402	04-04-2024	JONIANTO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Bumdes Sekabupaten Katingan	Kab. Katingan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
1403	04-04-2024	JONIANTO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Jemput Bola dan fasilitasi percepatan BUMDes menjadi Bumdes yang berbadan Hukum	Kab. Katingan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1404	04-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Kab. Katingan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
1405	04-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dan desa di wilayah pesisir	Kab. Katingan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	100.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
1406	04-04-2024	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Fasilitasi dan pembinaan kerjasama desa di wilayah Kabupaten Katingan	Kab. Katingan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Usulan diakomodir, anggaran dan tempat menyesuaikan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
1407	04-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Kegiatan Pelatihan Wirausaha Muda - Bantuan Modal usaha Wira Usaha Muda - Bantuan penunjang usaha untuk Organisasi Kepemudaan	Kab. Murung Raya	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1408	04-04-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Bendung Karau, 6.782,76 meter (APBN : Rp. 10.000.000.000,00)	Kab. Barito Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-
1409	04-04-2024	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Ampah Kota, 118 Rumah (APBN : 2.360.000.000,00)	Kab. Barito Timur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	10	Unit Rumah	300.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1410	04-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian/ Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi untuk 40 Peserta dengan anggaran Rp. 100.000.000,-	Kab. Lamandau	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung : Proposal	Akan di akomodir menyesuaikan dengan anggaran dana DAK-Non Fisik 2025	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	40	Orang	100.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
1411	04-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Sosialisasi dan Pelatihan Digital Marketing untuk UKM Wil kab. Lamandau dengan sasaran 40 peserta, usulan anggaran sebesar Rp. 83.000.000,-	Kab. Lamandau	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung :Proposal	Akan di akomodir menyesuaikan dengan anggaran dana DAK-Non Fisik 2025	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	40	Orang	83.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
1412	04-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Sosialisasi Tertib Niaga Bagi Pelaku Usaha dengan target 40 peserta, usulan anggaran sebesar Rp.	Kab. Lamandau	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	04-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Pengembangan Ekspor Hasil Industri Unggulan Untuk Daerah dan Negara dengan target 40 pelaku UMKM, usulan anggaran sebesar Rp.	Kab. Lamandau	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1414	04-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan produksi peningkatan desain dan penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran produk pelaku kerajinan anyaman rotan dan ukiran kayu dengan target 40 peserta, usulan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-	Kab. Lamandau	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung : Proposal	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data proposal : e proposal	1	kegiatan	60.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1415	04-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bagi para pengrajin dengan target 40 peserta. Usulan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-	Kab. Lamandau	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	usulan diakomodir dengan melengkapi proposal (data kelompok IKM penerima, spesifikasi teknis dan harga peralatan), anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	kegiatan	50.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1416	04-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Terbatasnya Tenaga Operator Komputer Muda. Sebanyak 15 Peserta Rp.38.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	38.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
1417	04-04-2024	RAMADANSY AH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Terbatasnya pelatihan Menjahit Pakaian. Sebanyak 15 Peserta Rp.38.000.000,-	Kab. Kotawaringin Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	38.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
1418	04-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sanitasi dan Air Bersih Betang Damang Batu	Kab. Gunung Mas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesediaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	1.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
1419	04-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Penataan Halaman Betang dan Pagar	Kab. Gunung Mas	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Belum masuk dalam rencana program prioritas TA 2025	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Kegiatan	200.000.000	Pelindungan Cagar Budaya
1420	04-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1421	04-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1422	04-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1423	04-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1424	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1425	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1426	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1427	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1428	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1429	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1430	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1431	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1432	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1433	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1434	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1435	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1436	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1437	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1438	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1439	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1440	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1441	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1442	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1443	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1444	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1445	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1446	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1447	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1448	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1449	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1450	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1451	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1452	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1453	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1454	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1455	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Listrik untuk Desa	Kab. Gunung Mas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	menyesuaikan anggaran	usulan diakomodir, lengkapi data dukung dan menyesuaikan anggaran	200	unit	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
1456	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Perluasan jaringan SPAM IKK	Kab. Gunung Mas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuaikan dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	-	-	-	-	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1457	05-04-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Ribbon (Evolis) sebanyak 150 roll dengan Usulan Pagu Rp.360.000.000,-	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	150	Unit	360.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1458	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan WC dan Tangki Septik Individual	Kab. Gunung Mas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Diproses lebih lanjut dan lengkapi readiness kriteria serta masuk dalam SK Lokasi Stunting dan Dokumen SSK Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	18	m3/hari	1.000.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
1459	05-04-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Sosialisasi tentang Pernikahan anak dibawah umur	Kab. Barito Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Direkomendasikan mengingat Prevalansi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Barito Utara cukup tinggi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
1460	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	cek	Kab. Gunung Mas	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	05-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Murung Raya yang masih rendah	Kab. Murung Raya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Detil jenis usulan agar saling koordinasi antar perangkat daerah teknis. Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Perlu dijelaskan kegiatan pelatihan TTG seperti apa yang dibutuhkan. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji terlebih dahulu. Besar anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. jenis usulan agar dikoordinasikan dengan jelas agar tidak salah sub kegiatan	1	Paket	-	Perluasan Kesempatan Kerja
1462	05-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Setengah Menganggur	Kab. Murung Raya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Detil jenis usulan agar saling koordinasi antar perangkat daerah teknis. Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Perlu dijelaskan kegiatan pelatihan TKM seperti apa yang dibutuhkan. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji terlebih dahulu. Besar anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. jenis usulan agar dikoordinasikan dengan jelas agar tidak salah sub kegiatan	1	Paket	-	Perluasan Kesempatan Kerja

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1463	05-04-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Sosialisasi Pernikahan Anak Dibawah Umur	Kab. Seruyan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Direkomendasikan mengingat Prevalansi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Seruyan cukup tinggi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
1464	05-04-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan) 2 kegiatan (Rp. 100.000.000,-)	Kab. Seruyan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Seruyan, sedangkan penganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
1465	05-04-2024	BUDI PURWANTO, SP., M. Si (BAPPEDALI TBANG TAPD)	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Kewirausahaan Perempuan (Menurunnya Indeks Pembangunan Gender) 2 kegiatan (Rp. 150.000.000,-)	Kab. Seruyan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Seruyan, sedangkan penganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
1466	05-04-2024	BAKHZAR EFENDI, SE., M.Si	Bappeda Kab/Kota	Dibutuhkan Semenisasi untuk jalan lingkungan sepanjang 4,3 Km dengan pagu sebesar Rp. 7,535,589,600.00	Kab. Pulang Pisau	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1467	05-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan 1 unit Toilet di SMKN 1 Nanga Bulik	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1468	05-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan jalan beton menuju SMKN 1 Batang Kawa	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran dan kewenangan	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1469	05-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pembangunan 1 unit Sumur Bor pada SMKN 1 Sematu Jaya	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	usulan ditindaklanjuti menyesuaikan sumber dana dan kemampuan anggaran yang tersedia, agar melengkapi proposal dan data dukung	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Paket	250.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1470	05-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Masih Kurangnya buku bahan bacaan sebagai bahan rujukan bagi pelajar dan masyarakat	Kab. Barito Selatan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	menyesuaikan kewenangan	Untuk kurangnya bahan bacaan dispursip prov dapat mengakomodir dengan cara pinjam pakai buku untuk kabupaten	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	50.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
1471	05-04-2024	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Penambahan bahan pustaka	Kab. Barito Selatan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	menyesuaikan kewenangan	Dispursip prov kalteng dapat mengakomodir penambahan bahan bacaan dengan cara pinjam pakai buku untuk kabupaten	diakomodir dengan sistem pinjam pakai buku	1	paket	-	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
1472	05-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Rehab Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SMAN I Sematu Jaya	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	ruang	400.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1473	05-04-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pustakwan melalui diklat dan bimtek untuk pengembangan dan penguasaan berbasis teknologi/IPTEK	Kab. Barito Selatan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Permintaan dapat saja diakomodir. Dispursip Prov Kalteng mengadakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawa dalam bentuk Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan bertahap	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
1474	05-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	di SMAN I Sematu Jaya belum tersedia Rumah Dinas Guru, sehingga diperlukan pembangunan Rumah Dinas Guru sebanyak 2 unit	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	800.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1475	05-04-2024	JAYA WARDANA, AP, S.E., M.EC. Dev	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan kapasitas SDM Kearsipan	Kab. Barito Selatan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran dan kewenangan	Dispursip provinsi melaksanakan Peningkatan kapasitas arsiparis yang diusulkan dalam bentuk sosialisasi tata kelola arsip yang dimulai tahun 2024 oleh Dispursip Kalteng ke semua kab/kota se kalteng	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	50.000.000	Akuisisi Arsip Statis
1476	05-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Perlunya Perbaikan Toilet Guru dan Murid serta septik Tank pada SMAN 2 Lamandau sebesar Rp. 350.000.000,-	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	paket	350.000.000	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1477	05-04-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	mobil operasional yang tersedia sudah tidak bisa berfungsi atau digunakan walaupun sudah diperbaiki maka dimohon pengadaan Mobil Operasional Double Gardan 1 Unit dengan Pagu Rp.750.000.000	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	750.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1478	05-04-2024	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	kondisi alat pencetakan yang ada rusak walau sudah dilakukan pemeliharaan maka dimohon pengadaan Alat Pencetakan KTP-el (Evolis) 4 Set dengan Pagu Rp.520.000.000	Kab. Kotawaringin Barat	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	4	Unit	520.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1479	05-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Kemasan dan Branding untuk Wirausaha Baru UKM Boga/Makanan dengan target peserta 40 orang, dengan usulan anggaran Rp. 82.000.000,-	Kab. Lamandau	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung : Proposal	Akan di akomodir menyesuaikan dengan anggaran dana DAK-Non Fisik 2025	Lengkapi data dukung : e proposal, usulan diakomodir pada DAK non fisik 2025 menyesuaikan anggaran	40	Orang	82.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
1480	05-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Bimbingan Teknis SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk peningkatan Mutu Produk UMKM dengan target 20 peserta, usulan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-	Kab. Lamandau	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung	anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas	Lengkapi data dukung : e proposal	1	kegiatan	60.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
1481	05-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Pengembangan Ekspor Hasil Industri Unggulan Untuk Daerah dan Negara dengan target 20 peserta, usulan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-	Kab. Lamandau	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan disetujui	-	Lengkapi data dukung : Proposal	anggaran menyesuaikan pagu dan skala prioritas.	Lengkapi data dukung : e proposal	1	kegiatan	60.000.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor
1482	05-04-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pameran Kesempatan Kerja (JOB FAIR)	Kab. Barito Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Berdasar UU 23/2014 kewenangan Provinsi job fair tingkat Provinsi, kewenangan Kab/Kota job fair tingkat Kab/Kota. Lokus kegiatan akan dikaji terlebih dahulu	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Job fair yang dilakukan adalah yang tingkat provinsi	1	Paket	-	Job Fair/Bursa Kerja

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1483	05-04-2024	EDI KESUMAJAYA, SE., MM	Bappeda Kab/Kota	Pelatihan Operator Alat Berat Excavator	Kab. Barito Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja.	Berbasis kompetensi. Anggaran menyesuaikan.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.	1	Paket	180.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
1484	05-04-2024	FERRY HARDI, S.T., M.T.	Bappeda Kab/Kota	Konveksi Hak Anak, Pembentukan Forum Anak di 10 Kecamatan, Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak, dan Permainan PUSPAGA.	Kab. Murung Raya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Direkomendasikan mengingat Prevalansi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Murung Raya cukup tinggi dan prevalansi stuntingnya juga cukup tinggi	direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
1485	05-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	SEMENISASI DESA TAMBAN LUPAK. 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1486	05-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	SEMENISASI DESA NANING KECAMATAN BASARANG. 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1487	05-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	SEMENISASI JALAN ALAI MUARA RT. 028 KELURAHAN PULAU KUPANG. 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1488	05-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	SEMENISASI JALAN ALAI PANTAI RT. 025 KELURAHAN PULAU KUPANG. 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1489	05-04-2024	Drs. ABISUA, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Penghapusan dan Pembongkaran Bangunan ex ruang kelas di SMAN 1 Sematu Jaya	Kab. Lamandau	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan kewenangan	Proses Penghapusan Barang Milik Daerah harus melalui persetujuan kepala daerah, ajukan usulan penghapusan ke Dinas dan selanjutnya akan diproses melalui BKAD	Bangunan sekolah menengah idealnya aset prov. Disdik Prov. agar berkoordinasi dengan BKAD dalam penghapusan aset.	1	Kegiatan	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1490	05-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	SEMENISASI JALAN DESA TAMBAH LUPAK KECAMATAN KAPUAS KUALA□ paket□	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1491	05-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	USULAN JALAN KABUPATEN DESA BUDI MUFAKAT KECAMATAN BATAGUH. 1 paket□	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1492	05-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	PERBAIKAN/SEMENISASI JALAN/TEMPAT PARKIR ALKAH HKKBM KABUPATEN KAPUAS□	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1493	05-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN TAMBUN BUNGAI GG. 2□ .1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1494	05-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	SEMENISASI JALAN USAHA TANI PALINGKAU LAMA KAPUAS MURUNG. 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1495	05-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	SEMENISASI JALAN DESA LAWANG TAMANG KECAMATAN MANDAU TALAWANG. 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1496	05-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Halaman Sekolah yang belum memadai (timbunan halaman sekolah SMA MUHAMMADIYAH Sukamara 80 x 100 m)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	500.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1497	05-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	PENGASPALAN JALAN SULAWESI GG. IV RT. 12 RW. 04 KELURAHAN SELAT BARAT KECAMATAN SELAT. 1 paket	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	DITINDAKLANJUTI setelah melengkapi data - data pendukung	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1498	05-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	JALAN MASUK PERUMAHAN NSD HANDEL BERE□ paket□	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1499	05-04-2024	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN GRIYA SEDERHANA DI JALAN JEPANG□1 paket□	Kab. Kapuas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Dapat ditindaklanjuti jika terdapat penambahan anggaran yang mengakomodir kebutuhan	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan. Pada sub kegiatan 1.04.05.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	-	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1500	05-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya gedung Laboratorium IPA (pembangunan gedung Laboratorium IPA dengan ukuran 15 M x 9 M)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	ruang	400.000.000	Pembangunan Ruang Laboratorium
1501	05-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya gedung Laboratorium Bahasa (pembangunan gedung Laboratorium Bahasa dengan ukuran 15 M x 9 M)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	ruang	400.000.000	Pembangunan Ruang Laboratorium
1502	05-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya ruang Kepala Sekolah (pembangunan ruang Kepala Sekolah)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	400.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1503	05-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Kurang nya jumlah WC untuk siswa (pembangunan WC untuk siswa 8 ruangan)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	paket	400.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1504	05-04-2024	SUNARDI,S. Si.,M.Sc.,M. Eng	Bappeda Kab/Kota	Belum tersedianya gedung laboratorium komputer (pembangunan gedung laboratorium komputer dengan ukuran 15 M x 9 M)	Kab. Sukamara	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui	-	menyesuaikan anggaran	Ditindaklanjuti dengan menyesuaikan Sumber dana dan Kemampuan anggaran yang tersedia.	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	ruang	400.000.000	Pembangunan Ruang Laboratorium
1505	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Desa Linau, Ruas jalan belum sepenuhnya fungsional, sehingga belum dapat dilewati secara aman dan lancar	Kab. Gunung Mas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	Km	10.000.000.000	Rekonstruksi Jalan
1506	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Rehabilitasi Jembatan Sei Kurun, Terjadi kerusakan pada lantai jembatan akibat beban yang melintasi jembatan melebihi beban yang dapat diterima lantai jembatan	Kab. Gunung Mas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi kalteng sesuai dengan SK Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, mohon agar rincian volume kegiatan, pagu usulan, dan kelengkapan usulan seperti proposal, foto lokasi dll.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	50	m	1.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1507	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	'Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Gunung Mas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Usulan disetujui	-	Sesuai dengan kewenangan Provinsi, sesuaikan skala prioritas pada Renja dan Renstra, agar memperhatikan data dukung	Usulan dapat diproses jika dilengkapi dengan BNBA, Foto Rumah, Koordinat Lokasi dan Kesesuaian Dengan kewenangan Provinsi yang terdapat dalam SK Kumuh Kabupaten	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	10	Unit Rumah	300.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1508	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan DED SPAM IKK	Kab. Gunung Mas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	-	sesuaikan kewenangan provinsi, sesuaikan prioritas renja renstra, perhatikan kelengkapan data dukung	Diproses lebih lanjut dan dilengkapi Readiness Criteria, Lahan CNC, Surat Minat & Kesiadaan menerima hibah, DED dan Peta Jaringan Air Minum, serta masuk dalam dokumen RISPAM Kabupaten.	Disetujui dengan menyesuaikan anggaran, agar melengkapi dokumen teknis dan persyaratan	1	KABUPATEN /KOTA	1.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
1509	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308)	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	33.583.938	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1510	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308)	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	33.583.938	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1511	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308)	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	33.583.938	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1512	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308)	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	33.583.938	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1513	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308)	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	33.583.938	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1514	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308)	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	33.583.938	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1515	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308)	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	33.583.938	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1516	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308)	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	33.583.938	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1517	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Printer Kia (Evolis Primacy Simple SP00308)	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	33.583.938	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1518	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	2.053.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1519	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	2.053.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1520	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	2.053.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1521	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	2.053.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1522	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	2.053.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1523	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	2.053.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	KABUPATEN / KOTA	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1524	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	2.053.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1525	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	2.053.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1526	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	System/Power Supply Spesifikasi: UPS ICA 1200 VA/600 W	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	1	Unit	2.053.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1527	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Unit Power Supply 10.000VA, 230V	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	155.626.662	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1528	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Printer E KTP (HDP56000)	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	121.178.700	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1529	05-04-2024	YANTRIO AULIA, M. Ec. Dev	Bappeda Kab/Kota	Alat Rekam KTP Elektronik Fortabel, untuk kegiatan Jemput Bola	Kab. Gunung Mas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	-	Menyesuaikan anggaran, kewenangan, dan renja	Diakomodir, untuk mendukung pelayanan publik dalam pencetakan dokumen kependudukan	Direkomendasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran	2	Unit	233.100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Perencanaan yang harmonis dan bersinergi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah dapat terwujud dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka sinkronisasi target dan capaian indikator makro untuk mewujudkan keberhasilan perencanaan pembangunan. Keberhasilan perencanaan pembangunan tidak lepas dari pencapaian atau keberhasilan pembangunan dari tingkatan wilayah terkecil yakni kabupaten/kota. Dibutuhkan sinkronisasi antara target-target pembangunan untuk mencapai keberhasilan pembangunan bersama dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut Provinsi Kalimantan Tengah mencoba merumuskan arah kebijakan dengan memprioritaskan pembangunan kewilayahan dan pembagian zonasi.

Rumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi dan sebagai pedoman dalam menyusun RKPD masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2025. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan prioritas, fokus dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan sasaran makro.

Berdasarkan target pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025, terdapat beberapa indikator makro merupakan kontribusi dan akumulasi dari target kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun beberapa indikator makro Provinsi Kalimantan Tengah yang ditargetkan pada tahun 2025 dapat dijabarkan pada tabel berikut:





Tabel 5. 1
Target Indikator makro pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2025

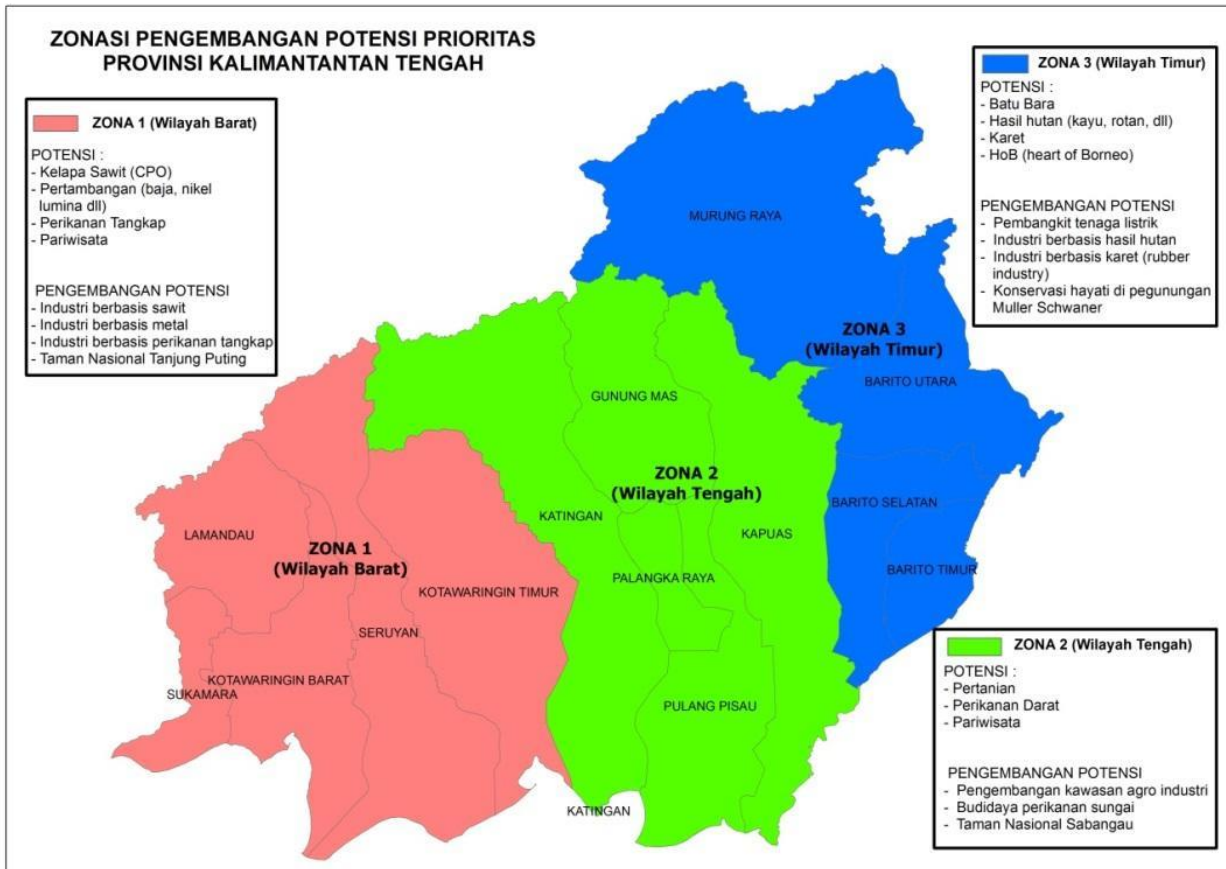
No	Nama Kabupaten/ Kota	Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Kemiskinan	Rasio Gini (Indeks)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Manusia Membangun	Penurunan Intensitas Emisi GRK
		(%)	(%)	(%)	(%)				
1	Kotawaringin Barat	-	6,56	-	3,17	-	73,97	-	-
2	Kotawaringin Timur	-	4,68	4,86	4,84	<0,35	74,35	-	-
3	Kapuas	-	7,91	4,53	5,11	0,26	72,11	-	-
4	Barito Selatan	-	2,90	3,70	4,84	0,256	70,40	-	-
5	Barito Utara	-	5,21	3,40	5,07	0,295	71,85	-	-
6	Sukamara	-	6	2,33	3,2	-	71	-	-
7	Lamandau	-	6,80	2,77	3,06	0,290	-	-	-
8	Seruyan	-	4,75	3,81	6,36	0,283	69,25	-	-
9	Katingan	-	5,90	4,70	4,90	0,226	69,85	-	-
10	Pulang Pisau	-	6,42	1,80	4,18	0,273	70,17	-	-
11	Gunung Mas	-	7	2,8	5	0,257	74	-	-
12	Barito Timur	-	4,5	2,64	4,8	0,25	73,75	-	-
13	Murung Raya	-	5,95	2,66	5,67	0,265	69,01	-	-
14	Kota Palangka Raya	-	7,22	4,80	3,34	0,30	82,2	-	-
Kalimantan Tengah			5,6	3,32-3,91	4,11-4,61	0,311-0,315	-	0,54	76,00
Nasional			5,3-5,6	4,5-5,0	4,11-4,61	0,311-0,315	-	0,56	38,6

Sumber : Usulan Target Kabupaten/Kota (diolah)

Untuk mendorong target capaian tersebut Provinsi Kalimantan Tengah tetap berfokus pada Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perekonomian dalam arti luas. Hal ini dapat mendorong percepatan integrasi pembangunan antara pusat dan daerah.

5.1. Kebijakan Umum Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Tahun 2025 ini ditujukan untuk mewujudkan kesesuaian ruang guna pemerataan wilayah pembangunan dengan memprioritaskan infrastruktur, pertanian, perkebunan, peternakan, industri, pariwisata melalui keterpaduan dan terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terbagi menjadi 3 (tiga) zona yaitu Zona 1 (Barat), Zona 2 (Tengah) dan Zona 3 (Timur). Secara spasial pengembangan kewilayahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Gambar 5.1
Pembagian Wilayah ke dalam 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan pembagian 3 (tiga) zona pengembangan potensi wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, berikut adalah pembagian pengembangan potensi, antara lain :

5.1.1. Zona 1 (Wilayah Barat)

Zona 1 (wilayah barat) ini terdiri dari 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.

a. Kondisi Umum Saat ini

Kondisi umum wilayah barat (zona 1) saat ini dilihat dari 4 (empat) indikator Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diuraikan sebagai berikut :

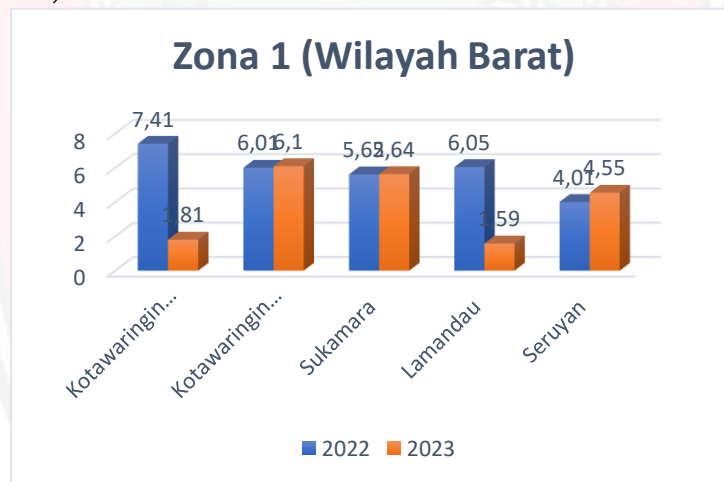
1) Pertumbuhan Ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi rata-rata wilayah barat tahun 2023 meningkat jika di bandingkan dengan pertumbun ekonomi tahun 2022. Namun demikian terdapat 2 kabupaten yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.





- Terdapat 2 (dua kabupaten di wilayah ini tahun 2022 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yakni sebesar 4,14.
- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 masih cukup tinggi dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten di wilayah barat ini sebesar 6,10. Kabupaten Lamandau merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2023 sebesar 1,59. Untuk kabupaten lain juga mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diantaranya Kabupaten Sukamara menjadi 5,64; dan Kabupaten Seruyan sebesar 4,55; sedangkan Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami penurunan menjadi 1,81.



Sumber : kalteng.bps.go.id 2024

Gambar 5.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023

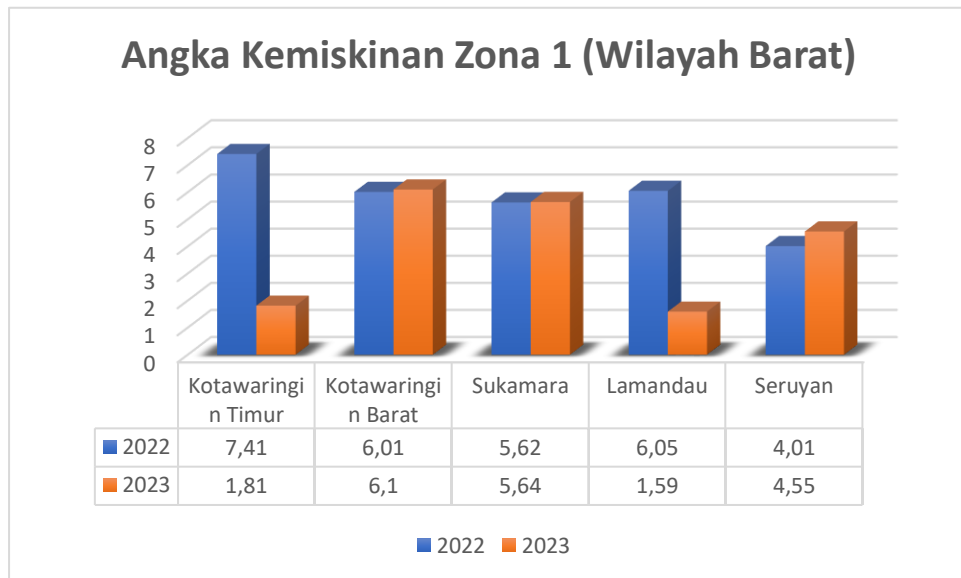
2) Angka Kemiskinan

- Tahun 2023 angka kemiskinan mulai menurun dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan mulai adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembentukan UMKM di tiap kabupaten. Meskipun begitu terdapat kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah angka kemiskinan.





- Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kabupaten yang angka kemiskinannya tertinggi di wilayah barat dimana angka kemiskinannya mencapai 6,1 dan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan terendah yakni 1,81.

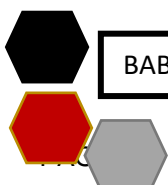


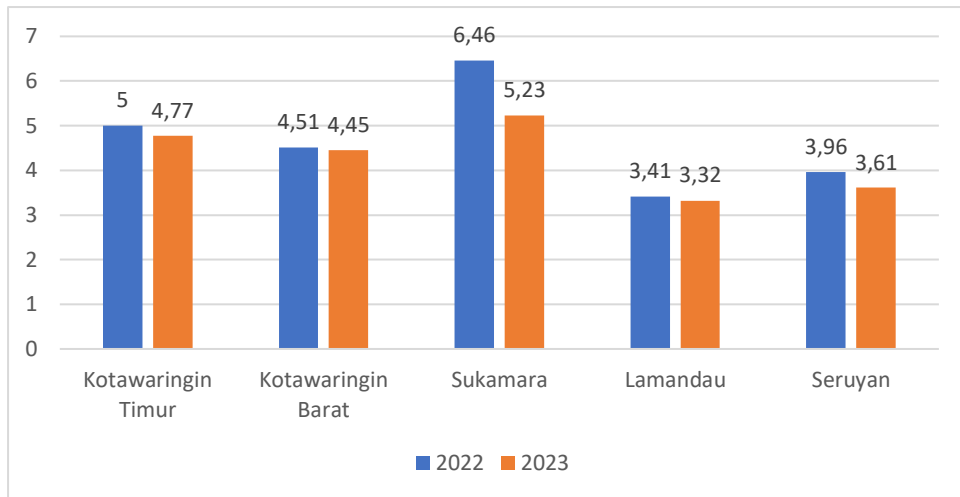
Gambar 5.3
Angka Kemiskinan Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%)

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

- Seiring dengan angka kemiskinan di wilayah barat Provinsi Kalimantan Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka segaris lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- TPT tertinggi di wilayah ini berada di Kabupaten sukamara sebesar 6,46 ditahun 2023. Sedangkan untuk kabupaten dengan TPT terendah adalah Kabupaten Lamandau sebesar 3,32* dan untuk kabupaten dengan tingkat kenaikan TPT terendah yaitu Kotawaringin Timur yakni di tahun 2022 senilai 4,51 dan di tahun 2023 sebesar 4,45.

R
K
P
D
2
0
2
5

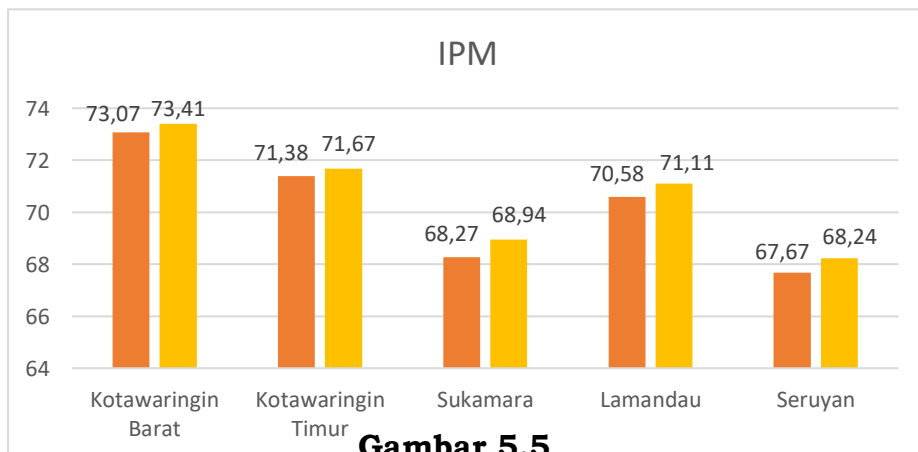




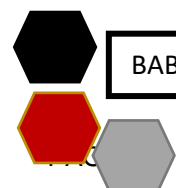
Gambar 5.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%)

4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- IPM di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan yang tertinggi di wilayah barat ini. Tahun 2023 IPM Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 70,75, dimana IPM tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2023 yakni 72,20. Selain itu kabupaten dengan IPM terendah terdapat pada Kabupaten seruyan dimana pada tahun 2023 hanya dapat mencapai 68,68. Rendahnya capaian IPM di Kabupaten seruyan ini disebabkan masih sulitnya infrastruktur di daerah tersebut.
- Faktor pembentuk dari IPM ini merupakan kunci dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Pendidikan, kesehatan dan perekonomian.



Gambar 5.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Wilayah Barat (Zona 1), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%)





Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian keempat indikator yang merupakan salah satu cara untuk mengetahui kondisi yang terdapat di wilayah barat ini. Selain itu wilayah barat memiliki potensi yang nantinya akan dikembangkan guna membantu peningkatan kesejahteraan. Adapun potensi dan pengembangan potensi yang terdapat pada zona 1 (wilayah barat) ini antara lain :

Tabel 5.2
Potensi dan Pengembangan Potensi pada Zona 1 (Wilayah Barat)
di Provinsi Kalimantan Tengah

Potensi	Pengembangan Potensi
Kelapa Sawit (CPO)	Industri Berbasis Sawit
Pertambangan (baja, nikel, alumina, dll)	Industri Berbasis Metal
Perikanan Tangkap	Industri Berbasis Perikanan Tangkap
Pariwisata	Taman Nasional Tanjung Puting
Kopi, Tebu	Pengembangan Pelabuhan Samudra Sebuai, Kab.
Pertanian TPH	Kotawaringin Barat

Selain itu, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan bedah rumah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat
2. Peningkatan infrastruktur kelistrikan
3. Melakukan bantuan fungsi Pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada putra daerah, bantuan pendung pembelajaran jarak jauh dan bantuan uang kuliah tunggal mahasiswa
4. Memberikan jaminan kesehatan nasional kartu sehat Kalteng Berkah, program bantuan layanan rawat inap gratis bagi warga miskin tahun 2023.





b. Sasaran Pengembangan Wilayah Barat

Wilayah Barat dengan potensi yang sangat besar dalam rangka mendukung pencapaian sasaran wilayah barat Tahun 2022, maka harus di dukung oleh seluruh kabupaten di Wilayah Barat. Dengan kondisi pasca pandemic Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sektor, maka diharapkan kabupaten di wilayah barat melakukan pemulihan ekonomi untuk menekan meningkatnya pengangguran terbuka, angka kemiskinan dan perkonomian Kembali bangkit dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Adapun sasaran pengembangan wilayah barat dan sasaran per kabupaten tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. 3
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka
Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten
Tahun 2025

No	Nama Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Kemiskinan	Rasio Gini (Indeks)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		(%)	(%)	(%)		
1	Kotawaringin Barat	6,56	-	3,17	-	73,97
2	Kotawaringin Timur	4,68	4,86	4,84	<0,35	74,35
3	Sukamara	5,80	3,20	3,10	0,27	71,55
4	Lamandau	6,80	2,77	3,06	0,29	-
5	Seruyan	4,75	3,81	6,36	0,283	69,25
Rata-Rata						

Sumber : Bappeda kabupaten/kota, 2024 (diolah)

5.1.2. Zona 2 (wilayah Tengah)

Zona 2 (wilayah tengah) ini terdiri dari 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya.

a. Kondisi Umum Saat ini

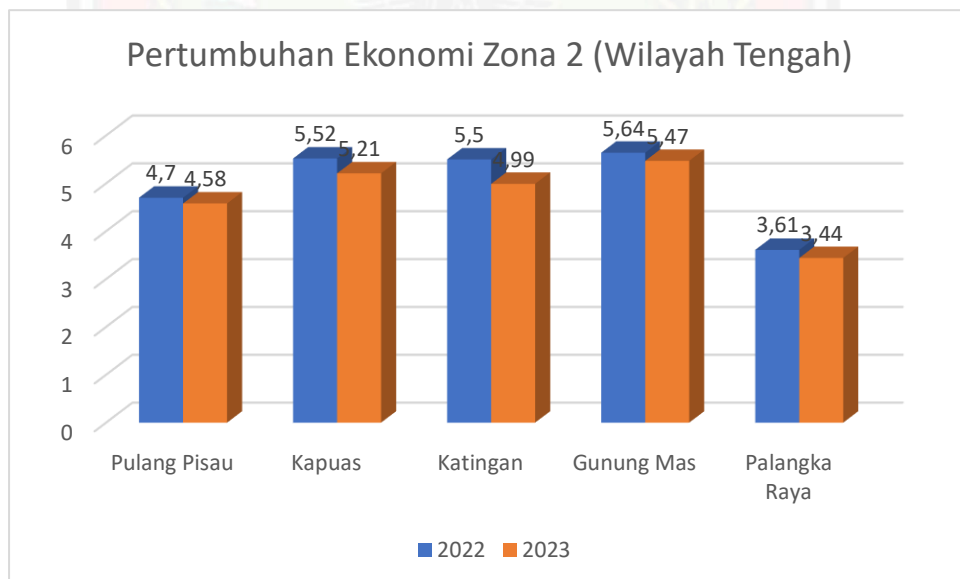
Kondisi umum wilayah tengah (zona 2) saat ini dilihat dari 4 (empat) indikator Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi





- Pertumbuhan ekonomi rata-rata wilayah tengah tahun 2023 menurun jika di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022.
- Namun demikian pertumbuhan kabupaten di wilayah ini tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yakni mengalami kontraksi sebesar - 4,14.
- Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2023 cukup tinggi dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten di wilayah tengah ini dengan pertumbuhan 6,57 %. Kabupaten Gunung Mas merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2023 dimana Kabupaten Katingan meskipun mengalami pertumbuhan sebesar 4,25% dibanding tahun 2022.



Gambar 5.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2),
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023

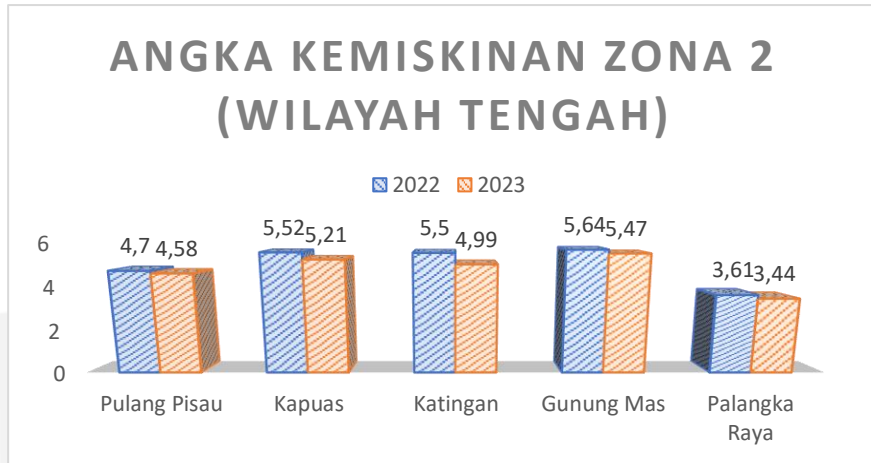
2) Angka Kemiskinan

- Angka Kemiskinan rata-rata wilayah tengah tahun 2023 menurun jika di bandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2022.
- Namun demikian angka kemiskinan kabupaten di wilayah ini tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah yakni mengalami kontraksi sebesar - 5,11.
- Angka kemiskinan Kota Palangka Raya tahun 2023 terendah dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten di wilayah tengah ini dengan angka kemiskinan senilai 3,44 %. Kabupaten Gunung Mas





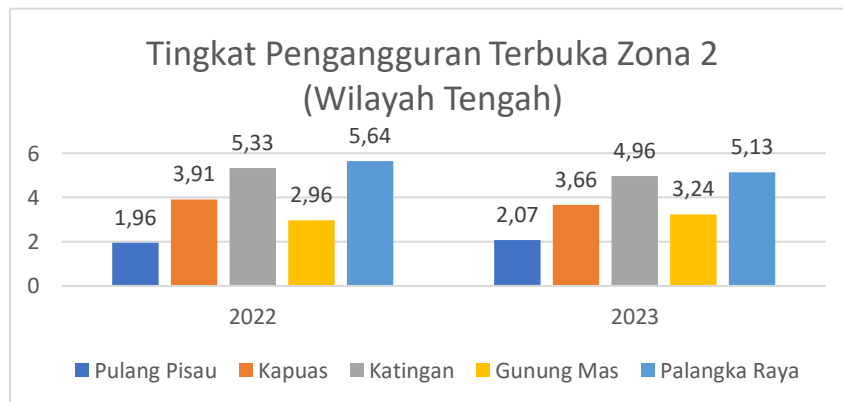
merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di tahun 2023 sebesar 5,47% meskipun mengalami dibanding tahun 2022.



Gambar 5.7
Angka Kemiskinan Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%)

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

- Seiring dengan angka kemiskinan di wilayah tengah Provinsi Kalimantan Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka segaris lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- TPT tertinggi di wilayah ini berada di Kota Palangka Raya sebesar 5,13 ditahun 2023. Sedangkan untuk kabupaten dengan TPT terendah adalah Kabupaten Pulang Pisau sebesar 2,07, dimana TPT di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, TPT di Kabupaten Gunung Mas masih terbilang cukup kecil dibandingkan dengan Kabupaten yang berada dalam wilayah tengah ini.



Gambar 5.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022 (%)

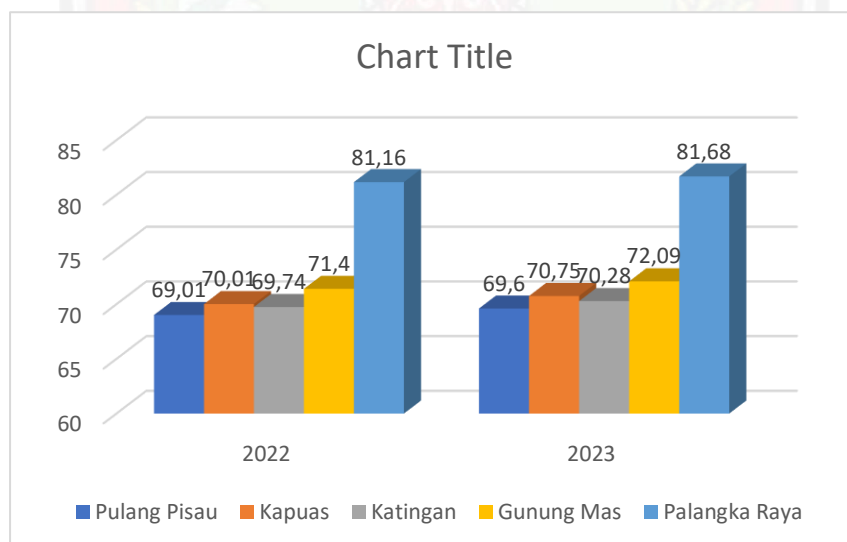
R
K
P
D
2
0
2
5





4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- IPM di Kota Palangka Raya merupakan yang tertinggi di wilayah tengah ini. Tahun 2023 IPM Kota Palangka Raya mencapai 81,68, dimana IPM tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2023 yakni 72,20. Selain itu kabupaten dengan IPM terendah terdapat pada Kabupaten Pulang Pisau dimana pada tahun 2023 hanya dapat mencapai 69,6. Rendahnya capaian IPM di Kabupaten Pulang Pisau ini disebabkan masih sulitnya infrastruktur di daerah tersebut.
- Faktor pembentuk dari IPM ini merupakan kunci dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
- Namun demikian, secara keseluruhan IPM di 5 (lima) kabupaten di wilayah tengah mengalami peningkatan di Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.



Gambar 5.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Wilayah Tengah (Zona 2), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%)

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian keempat indikator yang merupakan salah satu cara untuk mengetahui kondisi yang terdapat di wilayah tengah ini. Selain itu wilayah tengah memiliki potensi yang nantinya akan dikembangkan guna membantu peningkatan kesejahteraan. Adapun potensi dan pengembangan potensi yang terdapat pada zona 2 (wilayah tengah) ini antara lain :





Tabel 5.4
Potensi dan Pengembangan Potensi pada Zona 2 (Wilayah Tengah)
di Provinsi Kalimantan Tengah

Potensi	Pengembangan Potensi
Pertanian TPH	Pengembangan kawasan agro industri
Kopi, Sawit dan Tebu	Budidaya perikanan sungai
Tambang	Taman Nasional Sebangau (Ekowisata)
Rencana <i>Food Estate</i>	Pengembangan Kawasan Perfilman Asia Tenggara di Kec.Tewang Rangkang, Kab.Katingan.

Selain itu, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan bedah rumah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat
2. Peningkatan infrastruktur kelistrikan
3. Melakukan bantuan fungsi Pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada putra daerah, bantuan pendung pembelajaran jarak jauh dan bantuan uang kuliah tunggal mahasiswa.
4. Pembangunan Rs. Kelas A Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), memberikan jaminan kesehatan nasional kartu sehat Kalteng Berkah.

b. Sasaran Pengembangan Wilayah Tengah

Wilayah Tengah dengan potensi yang sangat besar diarahkan sebagai Cadangan Pangan Nasional (*Food Estate*). Untuk mendukung program ini Kabupaten Pulang Pisau didorong menjadi pusat kegiatan wilayah. Selain itu untuk kabupaten yang berdpmpingan langsung dapat menjadi penyangga dalam mendukung program nasional tersebut. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran wilayah tengah Tahun 2025, maka harus di dukung oleh seluruh kabupaten di Wilayah Tengah. Dengan kondisi pemulihan ekonomi, maka diharapkan kabupaten di wilayah tengah dapat menekan meningkatnya





pengangguran terbuka, angka kemiskinan dan perkonomian Kembali bangkit dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Adapun sasaran pengembangan wilayah tengah dan sasaran per kabupaten tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. 5
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka
Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten
Tahun 2025

No	Nama Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Kemiskinan	Rasio Gini (Indeks)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		(%)	(%)	(%)		
1	Kapuas	7,91	4,53	5,11	0,26	72,11
2	Katingan	5,90	4,70	4,90	0,226	69,85
3	Pulang Pisau	6,42	1,80	4,18	0,273	70,17
4	Gunung Mas	7	2,8	5	0,257	74
5	Kota Palangka Raya	7,22	4,80	3,34	0,257	74
Rata-Rata						

Sumber : Bappeda kabupaten/kota, 2024 (diolah)

5.1.3. Zona 3 (wilayah Timur)

Zona 3 (wilayah timur) ini terdiri dari 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur.

a. Kondisi Umum Saat ini

Kondisi umum wilayah timur (zona 3) saat ini dilihat dari 4 (empat) indikator Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diuraikan sebagai berikut :

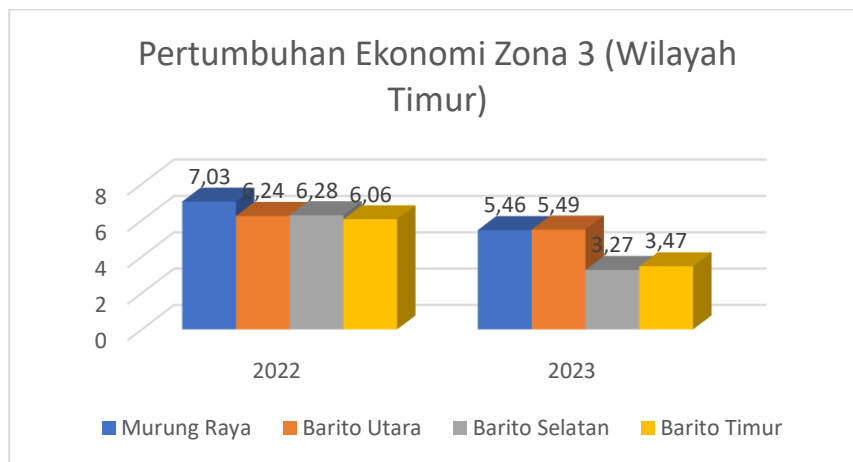
1) Pertumbuhan Ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi rata-rata wilayah timur tahun 2023 meningkat jika di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 hal ini disebabkan adanya inovasi dari pemerintah daerah dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi.
- Pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada Kabupaten Barito Utara dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten di wilayah timur ini dengan pertumbuhan 5,49%. Kabupaten Barito Selatan merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah di





tahun 2023 dimana Kabupaten Barito Timur mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49.

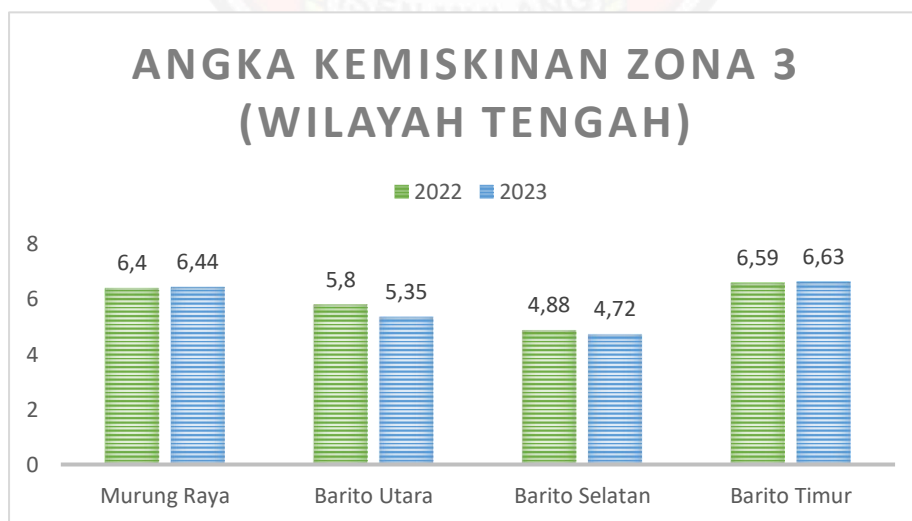


Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Gambar 5.10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024

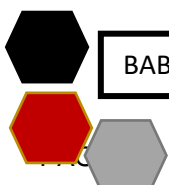
2) Angka Kemiskinan

- Angka Kemiskinan di wilayah timur untuk tahun 2023 di kabupaten Murung Raya mengalami peningkatan sebesar 6,44, sedangkan untuk 3 kabupaten yang lain mengalami penurunan. Dimana untuk Kabupaten Barito Selatan di tahun 2023 mencapai 4,72, Kabupaten Barito Utara mencapau 5,35, dan Kabupaten Barito Timur mencapai 6,63.



Gambar 5.11
Angka Kemiskinan Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%)

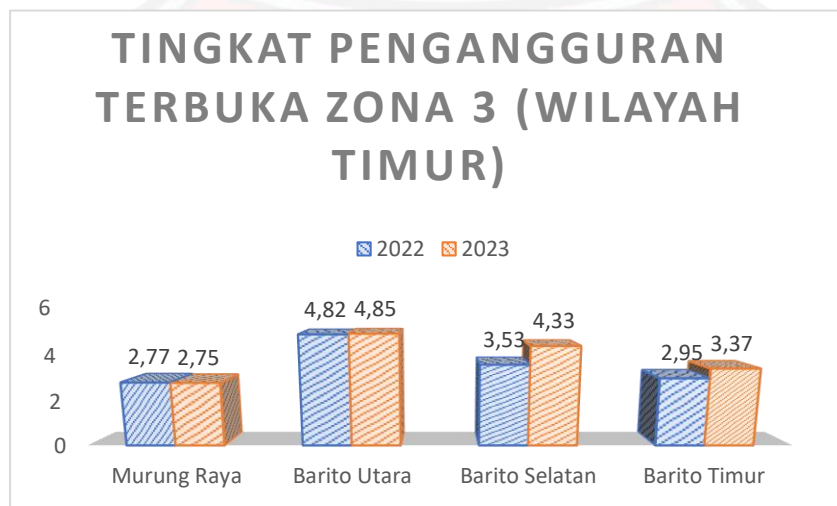
R
K
P
D
2
0
2
5





3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

- Seiring dengan angka kemiskinan di wilayah tengah Provinsi Kalimantan Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka segaris lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- TPT tertinggi di wilayah ini berada di Kabupaten Barito Utara sebesar 4,85 ditahun 2023. Sedangkan untuk kabupaten dengan TPT terendah adalah Kabupaten Murung Raya sebesar 2,75.



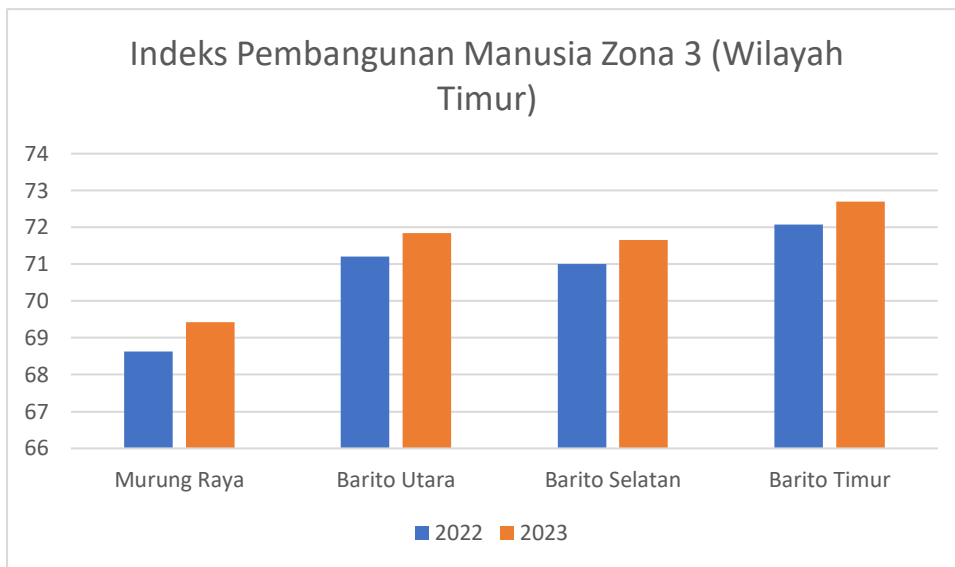
Gambar 5.12

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%)

4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- IPM di Kabupaten Barito Utara merupakan yang tertinggi di wilayah timur ini. Tahun 2023 IPM Kabupaten Barito Utara mencapai 71,84, Selain itu kabupaten dengan IPM terendah terdapat pada Kabupaten Murung Raya dimana pada tahun 2023 hanya dapat mencapai 69,42. Rendahnya capaian IPM di Kabupaten Murung Raya ini disebabkan masih sulitnya infrastruktur di daerah tersebut.
- Faktor pembentuk dari IPM ini merupakan kunci dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
- Namun demikian, secara keseluruhan IPM di 4 (lima) kabupaten di wilayah timur mengalami peningkatan di Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.





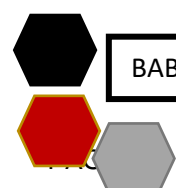
Gambar 5.13
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Wilayah Timur (Zona 3), Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 (%)

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian keempat indikator yang merupakan salah satu cara untuk mengetahui kondisi yang terdapat di wilayah tengah ini. Selain itu wilayah tengah memiliki potensi yang nantinya akan dikembangkan guna membantu peningkatan kesejahteraan. Adapun potensi dan pengembangan potensi yang terdapat pada zona 3 (wilayah timur) ini antara lain :

Tabel 5.6
Potensi dan Pengembangan Potensi pada Zona 3 (Wilayah Timur) di Provinsi Kalimantan Tengah

Potensi	Pengembangan Potensi
Tambang (Batu Bara)	Pengembangan tenaga listrik
Hasil Hutan (kayu, rotan, dll) Karet	Industri berbasis hasil hutan Industri berbasis hasil hutan
Kopi Cokelat dan tebu	Industri berbasis karet (<i>rubber industry</i>) Konservasi hayati di pegunungan <i>Muller-Schwaner</i>

a.





Selain itu, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan bedah rumah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat
2. Peningkatan infrastruktur kelistrikan
3. Melakukan bantuan fungsi Pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada putra daerah.
4. Memberikan jaminan kesehatan nasional kartu sehat Kalteng Berkah.

b. Sasaran Pengembangan Wilayah Timur

Wilayah Timur dengan potensi yang cukup besar yang nantinya akan menjadi penyangga Ibu Kota Negara Republik Indonesia akan diarahkan sebagai salah satu Kawasan Industri di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Murung Raya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dengan meningkatkan dan mengembangkan potensi yang terdapat di daerah tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran wilayah tengah Tahun 2025, maka harus di dukung oleh seluruh kabupaten di Wilayah Timur. Diharapkan kabupaten di wilayah timur melakukan pemulihan ekonomi untuk menekan meningkatnya pengangguran terbuka, angka kemiskinan dan perkonomian Kembali bangkit dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Adapun sasaran pengembangan wilayah tengah dan sasaran per kabupaten tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. 7
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka
Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten
Tahun 2025

No	Nama Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Kemiskinan	Rasio Gini (Indeks)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		(%)	(%)	(%)		
1	Barito Selatan	2,90	3,70	4,84	0,256	70,40
2	Barito Utara	5,21	3,40	5,07	0,295	71,85
3	Barito Timur	4,5	2,64	4,8	0,25	73,75
4	Murung Raya	5,95	2,66	5	0,257	69,01

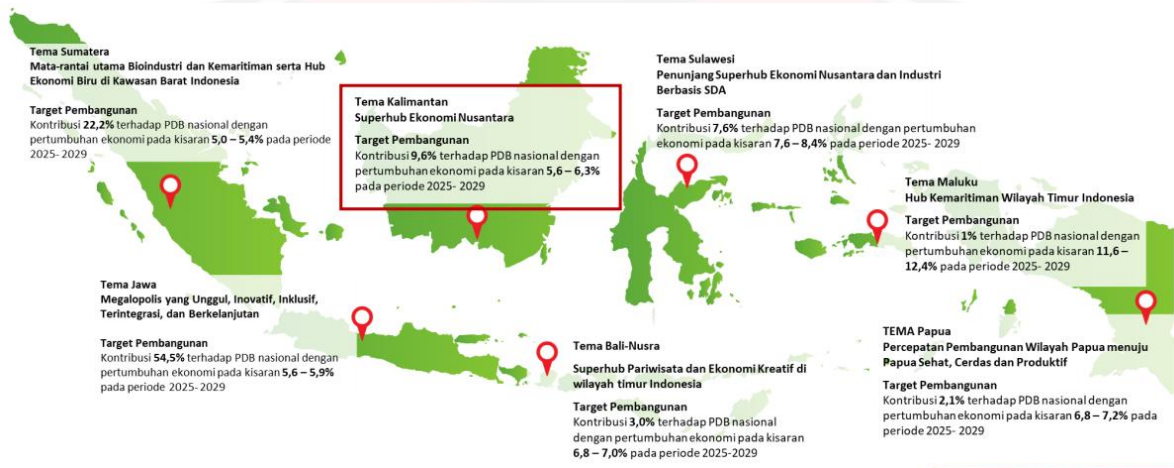
Sumber : Bappeda kabupaten/ kota, 2024 (diolah)





5.2. Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045

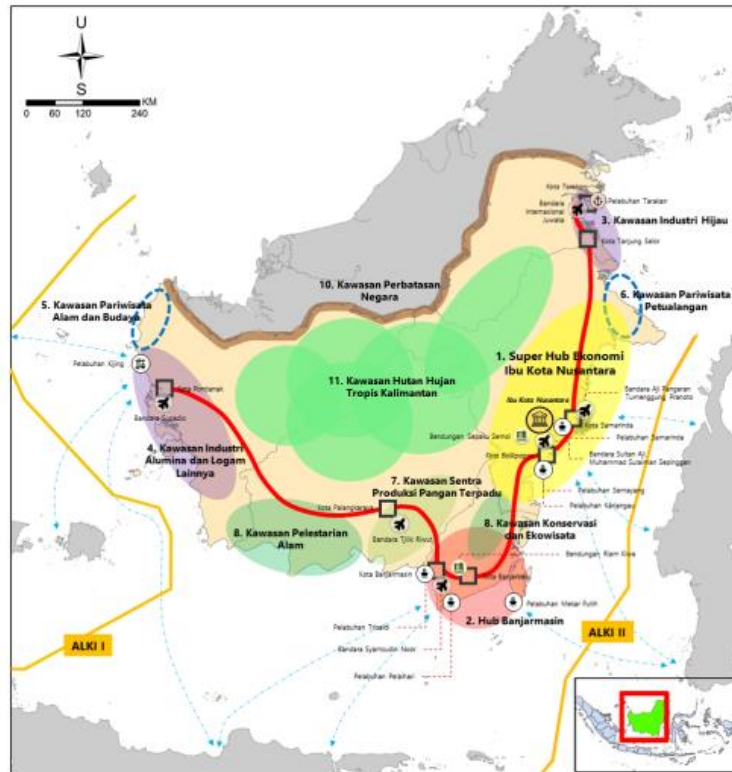
Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian pengembangan regional Pulau Kalimantan dalam Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045. Adapun regional Pulau Kalimantan dalam RPJPN 2025-2045 termasuk dalam Kawasan Timur Indonesia (KTI) bersama dengan regional Pulau Bali-Nusra dan Sulampua. Hal ini berkonsekuensi bahwa Kalimantan Tengah memiliki kewajiban untuk menjawab amanah pembangunan regional sebagai proses cascading RPJPN ke RPJPD Provinsi.



Gambar **Error! No text of specified style in document.** 1 Tema Pembangunan Regional

Secara tematik regional Pulau Kalimantan memiliki tema sebagai Superhub Ekonomi Nusantara. Hal ini terkait dengan pengembangan IKN sebagai hub ekonomi baru di Pulau Kalimantan. IKN direncanakan menjadi trigger pengembangan perekonomian Kalimantan. Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dalam regional ini perlu menjawab amanah tema pembangunan Kalimantan Tengah. Secara lebih mendetail arah pembangunan kewilayahan dari regional Pulau Kalimantan tertampil dalam peta berikut.





Gambar **Error! No text of specified style in document.** 2 Arah Pembangunan Pulau Kalimantan

Peta di atas menyajikan secara spasial arah kebijakan kewilayahan dalam regional Pulau Kalimantan. Pembangunan IKN berpotensi mewujudkan aglomerasi perekonomian dan pembangunan baru di Pulau ini. Kalimantan Tengah dalam peta tersebut memiliki dua peran utama yakni sebagai sentra produksi pangan terpadu dan juga kawasan pelestarian alam. Dua hal ini menjadikan Kalteng memiliki posisi maupun peran strategis yang penting bagi pengembangan Nusantara.

Kalimantan Tengah memiliki peran penyedia pangan bagi regional Kalimantan menjadikan peran strategis untuk menyediakan, mengolah, dan mendistribusikan pangan di seluruh Kalimantan ada pada tanggung jawab Kalimantan Tengah. Selain itu, peran untuk pelestarian alam menjadikan Kalteng memiliki posisi strategis dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan serta komitmen pembangunan rendah karbon dan berprinsip hijau yang sedang dan akan terus digaungkan di era ke depan di mana isu lingkungan menjadi isu strategis di tiap forum-forum antarnegara. Tidak menutup kemungkinan pula pelestarian lingkungan ini tidak hanya dilihat sebagai penghambat upaya pembangunan melainkan perlu dilihat peluang ‘hijaunya’. Kalimantan Tengah dapat turut andil dalam skema perdagangan karbon maupun berbagai green funding lainnya untuk dapat menjaga kelestarian alamnya dan memacu perekonomiannya, Dengan kata lain, peran Kalteng ke depan dalam pembangunan Kalimantan akan menjadi strategis sebagai *safe guard* pembangunan.





5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan fokus kebijakan pembangunan yang memberi panduan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan provinsi. Dalam kerangka rencana pembangunan Tahunan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target sasaran prioritas pembangunan Tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 5.8

Arah Kebijakan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
1	BARITO SELATAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif; 3. Pelayanan Publik; 4. Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik; 5. Perbaiki Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah; 6. Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan; 7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 8. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan;
2	BARITO UTARA	Visi : “Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri” misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah. 3. Memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal 2. Mengembangkan pelatihan kerja melalui lembaga/balai latihan kerja/produktivitas, baik milik pemerintah maupun swasta. 3. Mengembangkan pariwisata berbasis seni budaya dan kearifan lokal 4. Meningkatkan investasi dan kemudahan iklim berusaha yang dapat memberikan kesempatan kerja masyarakat. 5. Mengembangkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan masyarakat 6. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat

R
K
P
D
2
0
2
5





R
K
P
D
2
0
2
5

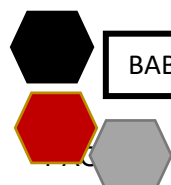
NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
		4. Mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari. 5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.	7. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan 8. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup; 9. Meningkatkan pembuatan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha 10. Penurunan penderita stunting 11. Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim menjadi 0% 12. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparatur 13. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 14. Meningkatkan sistem pelayanan publik 15. Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan asset daerah 16. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian berbasis pasar 17. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perikanan berbasis pasar 18. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perkebunan berbasis pasar 19. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur dasar lainnya 20. Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal
3	SUKAMARA	Visi : “Kabupaten Sukamara Sebagai Pintu Gerbang Bagian Barat Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera” Misi : 1. Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Publik Kabupaten Sukamara yang Memadai dan Berkualitas Baik. 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sukamara yang Baik dengan memanfaatkan Kemajuan Teknologi dan Keterbukaan Informasi.	1. Peningkatan Kuantitas dan kualitas ketersediaan jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan 2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang memperhatikan keselamatan dan keamanan berlalu lintas 3. Pemantapan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana IT menuju Transformasi Teknologi di Bidang Pelayanan Publik 4. Penyediaan SumberF=Daya Manusia IT yang memenuhi Kompetensi yang dibutuhkan





NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>3. Mewujudkan Kabupaten Sukamara yang Mandiri dalam Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam sebagai Basis Perekonomian Daerah dengan Tetap Memperhatikan Keberlanjutan Kelestarian Lingkungan Hidup.</p> <p>4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara yang Sejahtera dan Berdaya Saing.</p>	<p>5. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak</p> <p>6. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan</p> <p>7. Pemenuhan kualitas dan AIR Baku Aman Berkelanjutan</p> <p>8. Pemenuhan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana air limbah dan sanitasi</p> <p>9. Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyediaan rumah layak huni</p> <p>10. Peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang dan peningkatan sistem manajemen pertanahan</p> <p>11. Membangun orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas bagi seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan bangunan gedung</p> <p>12. Peningkatan Kinerja UMKM dan Pembangunan Industri berbasis sumberdaya lokal</p> <p>13. Peningkatan kinerja sektor perdagangan</p> <p>14. Peningkatan kunjungan wisatawan melalui Diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata serta kerjasama promosi dan pemasaran pariwisata</p> <p>15. Peningkatan produksi perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan</p> <p>16. Diversifikasi pangan yang bergizi seimbang dan aman</p> <p>17. Pengembangan iklim PM melalui Peningkatan Pelayanan PM dan Promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah</p> <p>18. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</p> <p>19. Peningkatan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat</p>

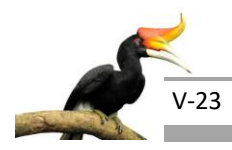
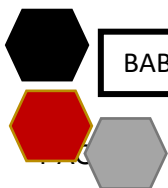
R
K
P
D
2
0
2
5





R
K
P
D
2
0
2
5

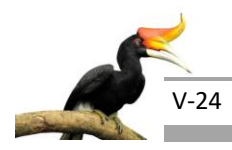
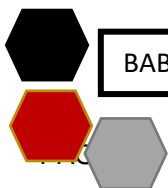
NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
			20. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian tradisional 21. Pembinaan sejarah serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 22. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan 23. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan 24. Peningkatan Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 25. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak 26. Penyelenggaraan Perlindungan dan rehabilitasi sosial secara maksimal 27. Penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera 28. Efektivitas perencanaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja 29. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui perencanaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja 30. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui perencanaan, pemantauan, dan pengendalian, pengelolaan KEHATI serta pemberdayaan masyarakat dan swasta 31. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kelembagaan pemerintahan daerah 32. Penyediaan data statistik serta hasil riset dan inovasi daerah yang memadai 33. Penyediaan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 34. Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan barang milik daerah 35. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 36. Pemberian Early Warning Pencegahan Korupsi dan pelaksanaan fungsi konsultasi





NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)</p> <p>37. Inovasi pelayanan publik yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi</p> <p>38. Minimalisasi kejadian gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>39. Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan serta peran serta partai politik</p> <p>40. Penguatan Peran Pemerintah dan Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan dan penanganan bencana</p>
4	GUNUNG MAS	<p>VISI:</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional 2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) 3. Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah 4. Mempercepat reformasi birokrasi 5. Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement) 6. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 7. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) 8. Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman 2. Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan 3. Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas 4. Peningkatan keterampilan perempuan dan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA) 5. Mendukung 8 aksi konvergensi KP2S 6. Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas (d disesuaikan dengan kebutuhan daerah) 7. Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi 8. Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat 9. Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah 10. Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik

R
K
P
D
2
0
2
5





NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>dalam kerangka NKRI</p>	<p>11. Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian 12. Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan 13. Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya 14. Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan</p>
5	KATINGAN	<p>VISI: Kabupaten Katingan Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mengutamakan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri agar terwujud perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing tinggi 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pendidikan yang terencana agar tercipta produktivitas penduduk yang tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan yang semakin meningkat 3. Membuka isolasi daerah melalui Pembangunan Infrastruktur sehingga terjamin kelancaran arus barang, manusia, modal dan informasi dari dan ke Kabupaten Katingan secara cepat dan murah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produktivitas, peningkatan total produksi dengan ekstensifikasi pertanian, diverifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketahanan pangan 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan Perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok 3. Peningkatan kapasitas pelaku usaha 4. Peningkatan daya tarik pariwisata 5. Peningkatan kapasitas kewirausahaan, UMKM dan koperasi 6. Peningkatan daya tarik dan iklim investasi yang kondusif serta Individualisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 7. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dengan menerapkan prinsip Merdeka belajar 8. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

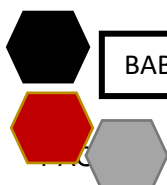
R
K
P
D
2
0
2
5





NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>4. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya (termasuk kemitraan sosial dan kesetiakawanan sosial), Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban agar supaya terwujud masyarakat Kabupaten Katingan yang bermoral, beretika, berbudaya dan berdaya saing tinggi.</p> <p>5. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara bijaksana, menstabilkan keseimbangan ekosistem, menghemat penggunaan SDA, menghentikan pemborosan penggunaan berbagai sumber daya, menghentikan kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pembangunan Kabupaten Katingan yang berkelanjutan</p> <p>6. Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai NKRI, meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah semakin nyata dan bertanggung jawab</p>	<p>menuju cakupan kesehatan semesta</p> <p>9. Penanggulangan kemiskinan daerah 100 secara terpadu dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, serta pelaksanaan perlindungan sosial</p> <p>10. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan pemberdayaan tenaga kerja</p> <p>11. Peningkatan kualitas anak dan peran perempuan dalam pembangunan</p> <p>12. Peningkatan konektivitas winter dan indra kabupaten</p> <p>13. Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan air minum</p> <p>14. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan</p> <p>15. Peningkatan kualitas dan cakupan irigasi daerah</p> <p>16. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) melalui penyediaan akses Perumahan dan permukiman layak</p> <p>17. Pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan fasilitas kerukunan umat beragama</p> <p>18. Peningkatan koordinasi dan pengawasan trantiblum linmas dalam penegakan peraturan daerah</p> <p>19. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan ekspresi kebudayaan dan kearifan lokal</p> <p>20. Pembinaan, Pemantauan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3</p> <p>21. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</p> <p>22. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</p>

R
K
P
D
2
0
2
5





NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
		sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik dan bersih	23. Peningkatan pengelolaan mitigasi dan bencana 24. Peningkatan pengelolaan mitigasi bencana 25. Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel 26. Penguatan implementasi manajemen ASN 27. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah 28. Penguatan implementasi SPBE dan kualitas pelayanan komunikasi dan Informatika 29. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat 30. Penguatan pembinaan dan pengawasan desa
6	MURUNG RAYA	VISI: 1. Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri dan Sejahtera MISI: 1. Meningkatkan kualitas penduduk agar memiliki daya saing tinggi; 2. Meningkatkan ketersediaan prasarana (infrastruktur fisik) untuk kepentingan pelayanan publik; 3. Melaksanakan pembangunan ekonomi dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk mencapai kemakmuran; 4. Melakukan penyerasian pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah; 5. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola	1. Peningkatan kapasitas usaha UMKM dan IKM melalui perbaikan kualitas produk, peningkatan kreativitas dan inovasi produk, strategi pemasaran dan pemasaran digital, kerudahan akses permodalan, serta perbaikan manajemen usaha 2. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha UMKM, IKM dan sektor unggulan lainnya melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan. Fasilitasi pemasaran dan perluasan jaringan pasar produk UMKM dan IKM Kabupaten Murung Raya. 3. Fasilitasi pemasaran dan perluasan jaringan pasar produk UMKM dan IKM Kabupaten Murung Raya 4. Hilirisasi Industri berbasis potensi daerah Kabupaten Murung Raya. 5. Peningkatan dan pengembangan perwilayahan industri Kawasan Industri/ Peruntukan Industri dan sentra industri potensial). 6. Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.

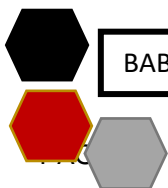
R
K
P
D
2
0
2
5





R
K
P
D
2
0
2
5

NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>keperintahan yang baik dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan daerah;</p> <p>6. Melaksanakan pembangunan sosial-budaya politik dan hukum agar terwujud kehidupan sosial budaya masyarakat yang harmonis, bermartabat, dan meningkatnya kesadaran serta partisipasi politik masyarakat;</p> <p>7. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar terwujud kondisi geomorfologi yang baik dan kondisi lingkungan hidup yang lestari.</p>	<p>7. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebun dan perikanan.</p> <p>8. Pengembangan pasca panen hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.</p> <p>9. Pengembangan, publikasi, dan sosialisasi peta potensi investasi dan peluang usaha di Kabupaten Murung Raya.</p> <p>10. Menciptakan iklim usaha / iklim investasi yang kondusif.</p> <p>11. Meningkatkan pelayanan perizinan dan optimalisasi penggunaan Sistem OSS (Online Single Submsttion).</p> <p>12. Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan investasi.</p> <p>13. Optmalisasi pembangunan ekonomi di pedesaan berbasis partisipasi masyarakat dan potensi desa.</p> <p>14. Pengembangan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat.</p> <p>15. Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban bidan pertambangan.</p> <p>16. Peningkatan kapasitas penambang (khususnya penambang kecil untuk melakukan langkahlangkah sesuai kaidah lingkungan.</p> <p>17. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi setelah kegiatan penutupan tambang.</p> <p>18. Validasi keakuratan DIKS terintegrasi</p> <p>19. Evaluasi Kunerja Pemerintah Bidang Sosial dalam Penanganan PPKS</p> <p>20. Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi masyarakat Tidak Mampu dalam bidang kesehatan, pendidikan dan rumah layak</p> <p>21. pemberian bantuan sosial bagi masyarakat rentan</p>





NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>22. Edukasi dan Sosialisasi kecukupan dan gizi pangan dalam rangka pengentasan stunting</p> <p>23. Stabilisasi harga pangan pokok</p> <p>24. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum serta Pejabat Pengelola Pertanahan dalam rangka penjaminan hak-hak pengelolaan wilayah</p> <p>25. Harmonisasi Kelompok kelompok masyarakat adat</p> <p>26. Dukungan terhadap percepatan reforma agraria</p> <p>27. Akses pendidikan gratis bagi kejar paket A, Paket B maupun Paket C</p> <p>28. pelatihan keahlian bagi Calon Tenaga Kerja</p> <p>29. Fasilitas Pemberdayaan masyarakat miskin potensial</p> <p>30. Pemberian bantuan permodalan usaha bagi wirausaha baru</p> <p>31. Penyediaan informasi lapangan kerja</p> <p>32. Kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan perusahaan untuk penyerapan tenaga kerja</p> <p>33. pembentukan kLuster kluser kelompok tani wilayah</p> <p>34. Pengoptimalan Alokasi Keuangan Daerah maupun Desa pada Perungkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat</p> <p>35. Peningkatan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan yang Berkualitas dan Terstandarisasi</p> <p>36. Peningkatan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan yang Berkualitas dan Terstandarisasi</p> <p>37. Peningkatan Kemudahan Akses Menuju Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeselamatan</p> <p>38. Peningkatan Pemerataan Ketersediaan Tenaga</p>

R
K
P
D
2
0
2
5





R
K
P
D
2
0
2
5

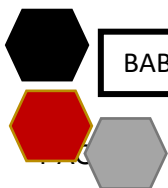
NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
			Pendidikan dan Tenaga Kesehatan yang Berkompeten 39. Peningkatan Jamunan Pendidikan dan Sekolah 40. Inklusi 41. Peningkatan Pemenuhan Media Pembelajaran yang Tepat Guna 42. Peningkatan Daya Dukung Pada Lingkungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Pendidikan dan Literasi 43. Penguatan Kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan, Organisasi Masyarakat dan Swasta dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 44. Pengoptimalan Faskes dalam Pengawasan dan Pengendalian mutu Kesehatan Masyarakat 45. Pengoptimalan Aksi Gerak Cepat Penanganan Permasalahan Kesehatan Masyarakat 46. Menciptakan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak dan Sehat 47. Pemenuhan Kebutuhan Gizi, Nutrisi, dan Vaksin Bagi Seluruh masyarakat 48. Program wajib asuransi kesehatan bagi masyarakat 49. Penguatan kebijakan penerapan SAKIP 50. Penguatan kebijakan implementasi manajemen ASN berbasis merit 51. Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan 52. Penguatan perencanaan dan pengadaan berbasis prioritas strategis 53. Penguatan manajemen kinerja 54. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan pada pegawai pemerintahan
7	KOTAWARINGIN TIMUR	VISI:	1. Mewujudkan akselerasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang





R
K
P
D
2
0
2
5

NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
		Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju Dan Sejahtera Misi: 1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan 2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance) 5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya	berorientasi pada pro-equity, Pro-Growth, Pro-ENVIRONMENT 2. Meningkatkan dukungan dalam penciptaan ikm dan UMKM yang berkompetitif dalam rangka pemulihan ekonomi pasca covid-19 revitalisasi sektor pangan strategis meningkatkan perlindungan sosial pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan membuka kesempatan kerja 3. Meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas fasilitas maupun pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas pengaruh tambahan gender meningkatkan daya saing Pemuda dan angkatan kerja meningkatkan ketertiban keamanan dan ketentraman 4. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah kualitas dan sistem pelayanan publik meningkatkan dan mengembangkan keseimbangan dan inovasi daerah 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya serta pengelolaan cagar budaya
8	LAMANDAU	VISI: Misi: 1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul 2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian	1. Percepatan, pemerataan pembangunan di segala bidang





NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
		Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
9.	Seruyan	VISI: Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Adil Dan Sejahtera. Misi: 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan local 3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan Proporsional 4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif 5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi	1. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi 2. Pemulihan daya saing ekonomi.
10.	Pulang Pisau.	VISI: Kabupaten Pulang Pisau Yang Maju Dan Menjadi Pintu Gerbang Perekonomian Kalimantan Tengah Bagian Timur Yang Berwawasan Lingkungan. Misi: 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya	1. Peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT 2. Pemerataan kualitas layanan Kesehatan 3. Pembangunan berbasis gender 4. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura

R
K
P
D
2
0
2
5





R
K
P
D
2
0
2
5

NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
		manusi secara berkelanjutan 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju; 3. Meningkatkan pembangunan prasarana transportasi; 4. Mendorong kehidupan masyarakat; 5. Mewujudkan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 6. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih.	5. Peningkatan Kompetensi UMKM 6. Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis 7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan, perumahan, dan daya dukung destinasi wisata 8. Peningkatan pembangunan sarana fisik pemerintahan yang komprehensif 9. Penguatan perijinan dan pengawasan aktivitas perekonomian yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup 10. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat 11. Peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah 12. Peningkatan kualitas sarana/prasarana dan keterampilan angkatan kerja 13. Penguatan tata kelola kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi 14. Peningkatan system pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan 15. Digitalisasi tata kelola keuangan daerah 16. Optimalisasi digitalisasi pelayanan public 17. Peningkatan kondusivitas keamanan daerah
11.	Murung Raya	Visi : Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri dan Sejahtera Misi : 1. Meningkatkan kualitas penduduk	1. Peningkatan kapasitas usaha UMKM dan IKM melalui perbaikan kualitas produk, peningkatan kreativitas dan inovasi produk, strategi pemasaran dan pemasaran





R
K
P
D
2
0
2
5

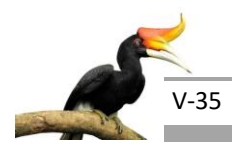
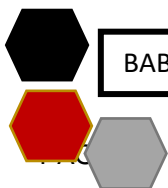
NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>agar memiliki daya saing tinggi;</p> <p>2. Meningkatkan ketersediaan prasarana (infrastruktur fisik) untuk kepentingan pelayanan publik;</p> <p>3. Melaksanakan pembangunan ekonomi dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk mencapai kemakmuran;</p> <p>4. Melakukan penyerasian pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah;</p> <p>5. Melaksanakan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan daerah;</p> <p>6. Melaksanakan pembangunan sosial-budaya politik dan hukum agar terwujud kehidupan sosial budaya masyarakat yang harmonis, bermartabat, dan meningkatnya kesadaran serta partisipasi politik masyarakat;</p> <p>7. Melaksanakan Pembangunan berkelanjutan agar terwujud kondisi geomorfologi yang baik dan kondisi lingkungan hidup yang lestari.</p>	<p>digital, kemudahan akses permodalan, serta perbaikan manajemen usaha</p> <p>2. Hilirisasi Industri berbasis potensi daerah Kabupaten Murungraya.</p> <p>3. Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.</p> <p>4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan.</p> <p>5. Pengembangan pasca panen hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.</p> <p>6. Menciptakan iklim usaha/ iklim investasi yang kondusif.</p> <p>7. Meningkatkan pelayanan perizinan dan optimalisasi penggunaan Sistem OSS (Online Single Submsttion).</p> <p>8. Optimalisasi pembangunan ekonomi di pedesaan berbasis partisipasi masyarakat dan potensi desa.</p> <p>9. Akses pendidikan gratis bagi kejar paket A, Paket B maupun Paket C.</p> <p>10. pelatihan keahlian bagi Calon Tenaga Kerja</p> <p>11. Fasilitas Pemberdayaan masyarakat miskin potensial.</p> <p>12. Pemberian bantuan permodalan usaha bagi wirausaha baru.</p> <p>13. pembentukan kluster kluser kelompok tani wilayah.</p> <p>14. Validasi keakuratan DTKS terintegrasi.</p> <p>15. Evaluasi Kinerja Pemerintah Bidang Sosial dalam Penanganan PPKS</p> <p>16. Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi masyarakat Tidak Mampu dalam bidang kesehatan, pendidikan dan rumah layak.</p> <p>17. pemberian bantuan sosial bagi masyarakat rentan.</p> <p>18. Edukasi dan Sosialisasi kecukupan dan gizi pangan</p>





R
K
P
D
2
0
2
5

NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>dalam rangka pengentasan stunting.</p> <p>19. Stabilisasi harga pangan pokok.</p> <p>20. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum serta Pejabat Pengelola Pertanahan dalam rangka penjaminan hak-hak pengelolaan wilayah.</p> <p>21. Harmonisasi Kelompok kelompok masyarakat adat.</p> <p>22. Dukungan terhadap percepatan reforma agrarian</p> <p>23. Pengoptimalan Alokasi Keuangan Daerah maupun Desa pada Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat</p> <p>24. Peningkatan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan yang Berkualitas dan Terstandarisasi</p> <p>25. Peningkatan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan yang Berkualitas dan Terstandarisasi</p> <p>26. Peningkatan Kemudahan Akses Menuju Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeselamatan</p> <p>27. Peningkatan Pemerataan Ketersediaan Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan yang Berkompeten</p> <p>28. Peningkatan Jaminan Pendidikan dan Sekolah Inklusi</p> <p>29. Peningkatan Daya Dukung Pada Lingkungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Pendidikan dan Literasi</p> <p>30. Penguatan Kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan, Organisasi Masyarakat dan Swasta dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat</p> <p>31. Pengoptimalan Faskes dalam Pengawasan dan Pengendalian Mutu Kesehatan Masyarakat</p> <p>32. Pengoptimalan Aksi Gerak Cepat Penanganan</p>





R
K
P
D
2
0
2
5

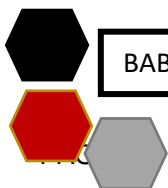
NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>Permasalahan Masyarakat Kesehatan</p> <p>33. Menciptakan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak dan Sehat</p> <p>34. Pemenuhan Kebutuhan Gizi, Nutrisi, dan Vaksin Bagi Seluruh masyarakat</p> <p>35. Penguatan kebijakan penerapan SAKIP</p> <p>36. Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting)</p> <p>37. Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja</p> <p>38. Peningkatan Sinergitas Pengawasan</p> <p>39. Penguatan Manajemen Resiko</p> <p>40. Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik yang menjangkau masyarakat</p> <p>41. Pembangunan sistem layanan administrasi penduduk berbasis IT</p> <p>42. Peningkatan Layanan berbasis Kecamatan</p> <p>43. Penguatan kebijakan implementasi manajemen ASN berbasis merit</p> <p>44. Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan</p> <p>45. Penguatan perencanaan dan pengadaan berbasis prioritas strategis</p> <p>46. Penguatan manajemen kinerja</p> <p>47. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan pada Pegawai Pemerintah</p>
12.	Barito Timur		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan sarana dan prasarana pelaku usaha pariwisata 2. Meningkatkan pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dengan memperhatikan aksesibilitas 3. Kemudahan investasi 4. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan





R
K
P
D
2
0
2
5

NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>dengan penerapan SPM dan tata kelola yang transparan dan akuntabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan literasi masyarakat 6. Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik 7. Meningkatkan program 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan penunjang program SPM lainnya 8. Meningkatkan promosi dan informasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat 9. Meningkatkan bangunan Puskesmas dan Jaringannya (Pustu/Poskesdes) melalui realokasi maupun renovasi 10. Meningkatkan pelatihan dan mendorong SDM meningkatkan jenjang pendidikannya. 11. Penguatan Struktur Pengawasan 12. Pengembangan kualifikasi Pelaksana Pekerjaan 13. Peningkatan SDM Pelaksana dan Pengawas 14. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah 15. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Barito Timur 16. Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan 17. Meningkatnya Pemeliharaan, Penyelenggaraan Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Umum Masyarakat Barito Timur
13.	Kotawaringin Barat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi pilkada dan pilpres 2. Peningkatan perbaikan infrastruktur dasar dan





NO.	KABUPATEN/KOTA	VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>perekonomian dalam menunjang SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pendampingan pelaku usaha local yang berdaya saing di bidang UMKM dan Pariwisata 4. Penguatan sarana-prasarana lingkungan dan kesiapsiagaan bencana 5. Penerapan inovasi pelayanan public yang efektif dan efisien
14.	Palangka Raya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Maupun Sosial Antar Kecamatan 2. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja 3. Meningkatnya Kualitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan 4. Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis 5. Meningkatnya Investasi Daerah 6. Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas 7. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

5.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :



1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota :

Pendidikan

Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan menengah 2. Pendidikan khusus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan anak usia dini 2. Pendidikan dasar 3. Pendidikan kesetaraan

SPM Kesehatan

Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
<ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi 2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan kesehatan ibu hamil 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
<ol style="list-style-type: none"> 1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

R
K
P
D
2
0
2
5





2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
---	--

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

SPM Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
<p>pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. pelayanan informasi rawan bencana 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

SPM Sosial

Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
----------------------------	-----------------------------

R
K
P
D
2
0
2
5





1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di dalam panti	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar panti
2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalampanti	2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luarpanti
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti	3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di dalam panti	4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di luar panti
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana provinsi	5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten/kota

R
K
P
D
2
0
2
5

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.





BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan masa Awal Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pelaksanaan PILKADA Serentak pada Tahun 2024. Visi pembangunan Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 untuk mendukung capaian visi pembangunan maka fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yaitu “Memantabkan Pembangunan Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul dan Bermartabat”.

6.1. Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan merupakan poin penting dalam penyusunan dan berkaitan langsung terhadap pencapaian target perencanaan pembangunan daerah berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi kriteria pokok dan isu strategis di tahun 2025 yang telah disepakati bersama dengan Menteri PPN/Bappenas RI, berikut 5 isu strategis untuk mendukung capaian tema tahunan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Belum Optimalnya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan,

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi alam yang menjanjikan untuk mengembangkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pengembangan sumber daya alam potensial dapat diarahkan untuk agribisnis yang bertujuan untuk agroindustri maupun ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Selain pengembangan pertanian dalam arti luas, potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah namun belum optimal dikembangkan yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan daya saing pariwisata perlu dilakukan dengan strategi yang tepat baik dari aspek pengelolaan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menghidupkan industry pariwisata dan ekonomi kreatif.

2. Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Unggulan dan Hilirisasi Komoditas Berbasis Sumber Daya Alam





Pembangunan daerah tidak terlepas dari aktivitas untuk mengisi atau memanfaatkan ruang. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan seringkali menemui masalah kepentingan ekonomi yang berbenturan dengan lingkungan hidup ataupun sosial budaya. Pembangunan wilayah yang identik dengan aktivitas pemanfaatan ruang tentu harus mempedomani rencana tata ruang, baik struktur maupun pola ruang. Selain itu, pembangunan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, aspek sosial dan kelembagaan untuk keberlanjutan hidup manusia pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara serasi, selaras, seimbang dan lestari demi terjaminnya keberlanjutan pembangunan daerah harus menjadi syarat penting dalam pembangunan terutama dalam pembangunan fisik dan infrastruktur wilayah. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, maka keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam perlu terus dipelihara dan dimanfaatkan. Upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan penyempurnaan atas pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA sehingga diharapkan pengelolaan sumber daya berbasis lahan dapat lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Masih Rendahnya Pemenuhan Pelayanan Dasar, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting terlebih untuk Pendidikan dan kesehatan yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah terkait pelayanan dasar dan harus diberikan kepada masyarakat yang berhak secara minimal sesuai standar pelayanan minimal. Salah satu unsur penting dalam pembangunan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan, sehingga perlu terus dilakukan peningkatan kualitas. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di sebuah wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar 73,73, yang berarti masuk kategori Tinggi. Selain itu, Infrastruktur wilayah





merupakan pendukung pembangunan di berbagai aspek. Sampai dengan tahun 2023, masih banyak ditemui kekurangan pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah. Selain itu, dengan kondisi infrastruktur yang sudah ada saat ini, masih ditemui belum optimalnya kualitas pelayanan, dimana terdapat konektivitas wilayah yang terputus. Pemenuhan kebutuhan dan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah dikembangkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pelayanan umum/publik, dan daya saing daerah perlu diprioritaskan untuk pembangunan dalam mewujudkan Kalteng Makin Berkah.

4. Masih Rendahnya Kualitas SDM Dalam Pemenuhan Kebutuhan Produksi Maupun Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang bersih, professional dan dapat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, diharapkan dapat mewujudkan good governance.

Good governance memiliki makna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan clean and good governance terutama dari segi akuntabilitas dan transparansi publik, maka dibutuhkan suatu langkah kebijakan yang terarah dalam perubahan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan Information and Communication Technologies (ICT) yaitu e-government atau Pemerintahan Elektronik. Sehingga tujuan penyelenggaraan e-government adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

5. Belum Optimalnya Mitigasi Bencana Akibat Sumber Daya Alam Yang Tidak Terkendali

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah diberbagai sektor. Melihat potensi tersebut sehingga





mengakibatkan tingginya permintaan terhadap SDA di Provinsi Kalimantan Tengah. Akibat hal tersebut yang berdampak pada eksploitasi yang dilakukan secara masif dan tidak terkendali tanpa melihat penurunan fungsi lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Eksploitasi kekayaan alam di Provinsi Kalimantan Tengah sejurus dengan ketimpangan dalam hal penguasaan. Perusahaan-perusahaan besar asing maupun dalam negeri, menguasai jutaan hektar lahan untuk perkebunan dan pertambangan. Izin perusahaan tersebut diperkirakan banyak terhubung dengan lokasi rawan bencana terutama kebakaran hutan, banjir dan longsor. Untuk meminimalisir dampak yang terjadi dibutuhkan mitigasi bencana yang baik untuk mengantisipasi kejadian luar biasa akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Dibutuhkan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

6.2. Usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang Mendukung Pelaksanaan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Prioritas Strategis Nasional

Provinsi Kalimantan Tengah telah mengusulkan kegiatan yang mendukung pelaksanaan PN dan/atau PP dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2025. Usulan ini telah diusulkan dalam Rapat Rakortekrenbang dan Pembahasan Desk Musrenbangnas. Berikut adalah usulan dari Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilakukan pembahasan dalam desk Musrenbangnas Tahun 2025.

**Tabel 6.1**

Usulan dari Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilakukan pembahasan dalam desk Musrenbangnas Tahun 2025

N O	USULAN	VOLUME USULAN	VOLUME KESEPAKATAN	SATUAN	LOKASI KAB / KOTA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	HASIL KESEPAKATAN
1	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (BSPS) di 14 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	14359	14359	Unit	62 - Provinsi Kalimantan Tengah	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir
2	Pembangunan Rumah Susun Ponpes Al-Wafa Palangka Raya, Kel. Kalampangan, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	96	0	Unit	62 - Provinsi Kalimantan Tengah	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Ditolak
3	Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya	96	96	Unit	62 - Provinsi Kalimantan Tengah	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir
4	Pembangunan Rumah Susun Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kec. Sebangau, Kel. Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya	96	96	Unit	62 - Provinsi Kalimantan Tengah	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir
5	TORA lintas daerah	243000	243000	Ha	62 - Provinsi Kalimantan Tengah	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir
6	Rehabilitasi sungai Lampuyang Besar dan tanggul banjir Kewenangan BWS Kalimantan II sepanjang ± 8000 meter	8000	8000	m	6202 - Kab. Kotawaringin Timur	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir
7	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Di Desa Keraya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat	760	760	M	6201 - Kab. Kotawaringin Barat	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir
8	Percepatan peningkatan Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah	1	1	Lokasi	6201 - Kab. Kotawaringin Barat	022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Diakomodir
9	Penanganan jalan nasional lintas tengah Kalteng-batas Kalbar (ruas Kuala KurunTewah-Tumbang Jutuh-Sp. Rabambang-Tumbang Samba-Tumbang HiranTumbang Sanamang-batas Kalbar)	302,7	302,7	Km	62 - Provinsi Kalimantan Tengah	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir





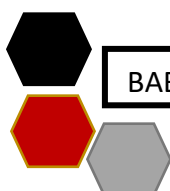
N O	USULAN	VOLUME USULAN	VOLUME KESEPAKATAN	SATUAN	LOKASI KAB / KOTA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	HASIL KESEPAKATAN
10	Percepatan peningkatan Bandar Udara H. Asan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah	1	1	Lokasi	6202 - Kab. Kotawaringin Timur	022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Diakomodir
11	Pembangunan Jembatan Timbang Simpang Runtu Di Kabupaten Kotawaringin Barat	1	1	Lokasi	6202 - Kab. Kotawaringin Timur	022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Diakomodir
12	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Di Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat	240	240	M	6201 - Kab. Kotawaringin Barat	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Diakomodir
13	Pengadaan Alat Kesehatan Layanan KJSO dan KIA	1	1	Paket	6271 - Kota Palangkaraya	024 - KEMENTERIAN KESEHATAN	Diakomodir
14	Pengembangan Kampung Nelayan Modern	3	0	Lokasi	6202 - Kab. Kotawaringin Timur, 6208 - Kab. Seruyan	032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ditolak
15	Pengembangan perikanan budi daya berorientasi ekspor dengan komoditas udang melalui modelling budidaya berbasis kawasan	9	0	Paket	6206 - Kab. Sukamara	032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ditolak
16	Rintisan Penerbitan STDB Kelapa Sawit	43540	43540	STDB	6202 - Kab. Kotawaringin Timur, 6201 - Kab. Kotawaringin Barat, 6209 - Kab. Katingan, 6208 - Kab. Seruyan, 6207 - Kab. Lamandau	018 - Kementerian Pertanian	Diakomodir
17	Pengadaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat : Padi (45.000 ha) dan Jagung (30.000 ha)	75000	75000	Ha	62 - Provinsi Kalimantan Tengah	018 - Kementerian Pertanian	Diakomodir
18	Pelatihan Berbasis Kompetensi di seluruh BLK yang ada di Kalimantan Tengah	1600	1600	Orang	62 - Provinsi Kalimantan Tengah	026 - Kementerian Ketenagakerjaan	Diakomodir
19	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Di Desa Sebuai Timur Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat	1	1	Lokasi	6201 - Kab. Kotawaringin Barat	033 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir

R
K
P
D
2
0
2
5





N O	USULAN	VOLUME USULAN	VOLUME KESEPAKATAN	SATUAN	LOKASI KAB / KOTA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	HASIL KESEPAKATAN
20	Perluasan Tanaman Kopi Robusta	100	100	Ha	6207 - Kab. Lamandau	018 - Kementerian Pertanian	Diakomodir
21	Pembangunan Installasi Pengolahan Air Bersih (IPA) Kapasitas 50 Itr/detik Kota Muara Teweh	1	1	Lokasi	6205 - Kab. Barito Utara	033 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir





6.3. Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

6.3.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang dimuat dalam RKPD Tahun 2025 merupakan rencana program yang telah diusulkan dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut rekapitulasi program menurut perangkat daerah Tahun 2025

Tabel 6.2
Rekapitulasi Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	KODE OPD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU	URAI OPD
1	2	4	5	6	3
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	5	14	1.763.057.252.440	Dinas Pendidikan
2	1.02.0.00.0.00.02.0000	3	13	260.309.710.125	RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)
3	1.02.0.00.0.00.03.0000	1	1	250.000.000.000	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)
4	1.02.0.00.0.00.04.0000	3	12	49.163.145.699	RSJ Kalawa Atei
5	1.02.0.00.0.00.05.0000	1	1	3.000.000.000	RSJ Kalawa Atei (BLUD)
6	1.02.0.00.0.00.07.0000	2	8	125.332.707.341	RSUD HANAU (APBD)
7	1.02.0.00.0.00.08.0000	1	1	22.000.000.000	RSUD HANAU (BLUD)
8	1.02.2.14.0.00.01.0000	5	21	90.988.332.545	Dinas Kesehatan
9	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	23	1.594.818.818.676	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	1.04.2.10.0.00.01.0000	3	17	205.280.362.135	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11	1.05.0.00.0.00.02.0000	2	10	26.794.560.795	Satuan Polisi PAmong Praja
12	1.05.0.00.0.00.03.0000	3	14	100.639.639.657	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
13	1.05.8.01.0.00.01.0000	6	13	38.555.323.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14	1.06.0.00.0.00.01.0000	7	17	92.560.696.417	Dinas Sosial
15	2.07.3.32.0.00.01.0000	9	22	36.369.178.236	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	2.08.2.14.0.00.01.0000	10	25	17.984.560.982	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	2.09.3.27.0.00.01.0000	5	15	16.827.859.945	Dinas Ketahanan Pangan
18	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	21	78.688.984.371	Dinas Lingkungan Hidup
19	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	18	14.631.919.318	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
20	2.13.0.00.0.00.01.0000	4	11	56.315.505.326	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa





NO	KODE OPD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU	URAI OPD
1	2	4	5	6	3
21	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	18	58,053,048,570	Dinas Perhubungan
22	2.16.2.21.2.20.01.0000	5	13	49.079.741.215	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
23	2.17.0.00.0.00.01.0000	8	17	46.447.637.965	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
24	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	14	19.244.974.970	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
25	2.19.0.00.0.00.01.0000	4	15	95.828.994.204	Dinas Pemuda dan Olah Raga
26	2.22.3.26.0.00.01.0000	9	21	198.915.043.571	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	21	19.928.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
28	3.25.0.00.0.00.01.0000	7	26	110.718.309.935	Dinas Kelautan dan Perikanan
29	3.27.0.00.0.00.01.0000	7	21	183.899.967.136	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
30	3.27.0.00.0.00.02.0000	6	16	38.658.289.634	Dinas Perkebunan
31	3.28.0.00.0.00.01.0000	5	18	560.897.050.367	Dinas Kehutanan
50	3.29.0.00.0.00.01.0000	5	20	177.934.046.330	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
51	3.30.3.31.0.00.01.0000	10	24	218.029.385.624	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
52	4.01.0.00.0.00.01.0000	0	0	353.335.803.340	Sekretariat Daerah
53	4.01.0.00.0.00.01.0001	2	7	8.276.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
54	4.01.0.00.0.00.01.0002	2	8	157.209.446.638	Biro Kesejahteraan Rakyat
55	4.01.0.00.0.00.01.0003	2	8	5.086.438.700	Biro Hukum
56	4.01.0.00.0.00.01.0004	2	9	4.085.047.688	Biro Perekonomian
57	4.01.0.00.0.00.01.0005	2	9	4.315.039.152	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
58	4.01.0.00.0.00.01.0006	2	6	3.793.827.707	Biro Administrasi Pembangunan
59	4.01.0.00.0.00.01.0007	2	7	2.751.910.175	Biro Organisasi
60	4.01.0.00.0.00.01.0008	1	10	142.355.386.131	Biro Umum
61	4.01.0.00.0.00.01.0009	1	6	7.241.488.081	Biro Administrasi Pimpinan
62	4.02.0.00.0.00.01.0000	2	12	100.685.464.153	Sekretariat DPRD
63	5.01.5.05.0.00.01.0000	4	18	60.842.171.883	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
64	5.02.0.00.0.00.01.0000	3	14	1.416.827.231.745	Badan Keuangan dan Aset Daerah
65	5.02.0.00.0.00.03.0000	4	11	150.663.674.541	Badan Pendapatan Daerah
66	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	12	21.591.908.845	Badan Kepegawaian Daerah
67	5.04.0.00.0.00.01.0000	2	11	42.342.928.787	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
68	5.07.0.00.0.00.01.0000	2	8	11.100.000.000	Badan Penghubung

R
K
P
D
2
0
2
5





NO	KODE OPD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU	URAI OPD
1	2	4	5	6	3
69	6.01.0.00.0.00.01.0000	3	11	39.792.510.433	Inspektorat
JUMLAH		216	688	8.799.913.521.188	

Berdasarkan rekapitulasi jumlah program/kegiatan/sub kegiatan diatas berikut adalah rekapitulasi program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Tahun 2025 pendukung prioritas nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sesuai Tabel 6.3 dibawah ini:

TABEL 6.3
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dinas Pendidikan						1.763.057.252.440,00							1.838.320.271.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.763.057.252.440,00							1.838.320.271.000,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.763.057.252.440,00							1.838.320.271.000,00	
1	1	01	01					899.081.959.721,00							1.058.650.000.000,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
1	01	01	1.01					1.085.000.000,00							1.220.000.000,00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing														
1	01	01	1.01	000												
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	705.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing														
1	01	01	1.01	000												
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing														
1	01	01	1.01	000												
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing														
1	01	01	1.01	000												
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing														
1	01	01	1.01	000												
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing														
1	01	01	1.01	000												
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.02				-	829.169.459.721,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	987.600.000.000,00		
1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7800 Orang/Bulan	826.698.459.721,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		985.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.680.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	216.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	1.580.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	1.840.000.000,00	
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian											
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.227.500.000,00	-	-	-	-	1.270.000.000,00				
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi														
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	577.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	13.620.000.000,00	-	-	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	14.230.000.000,00			
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	770.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	880.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.06	001	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	6.550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang										
			Urusan Pemerintah Daerah					25.600.000.000,00				Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		25.600.000.000,00		
1	01	01	1.07	000	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.07	000	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				900 Unit	22.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		22.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.07	000	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud										
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-									13.980.000.000,00			
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10.780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	10.780.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-												
											12.910.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	12.910.000.000,00		
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	12.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
2	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-												
											776.761.263.469,00			-		-	691.503.271.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-														
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				5 Unit	87.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-			87.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				12 Ruang	10.834.524.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-			10.834.524.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				11 Ruang	2.399.591.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-			2.399.591.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	645.348.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-			645.348.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				70 Unit	46.286.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-			46.286.664.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				33 Ruang	14.468.747.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-			14.468.747.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	1.564.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-			1.564.748.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					1 Ruang	616.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	616.835.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				80 Paket	5.067.846.997,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	5.067.846.997,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				7 Paket	507.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	507.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				9000 Paket	9.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	15.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				20 Paket	1.935.950.003,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	1.935.950.003,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				45000 Peserta didik	104.642.037.269,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				4000 Peserta Didik	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	20.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500 Orang	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	005	2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				245 Satuan Pendidikan	4.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		4.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	005	3	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				245 Satuan Pendidikan	99.766.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		100.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	005	4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				420 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	005	7	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	005	8	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	005	9	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	006	0	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	01	02	1.01	006	1	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					2 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	006	3	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					3 Komunitas	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	006	5	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					1 Kegiatan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	006	6	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					14000 Buku	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	006	8	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					14 Unit	4.424.153.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	4.424.153.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	007	0	Pembangunan Ruang Laboratorium					39 Ruang	25.523.877.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	25.523.877.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	007	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium					5 Ruang	1.761.137.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	1.761.137.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	007	2	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				26 Ruang	11.914.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		11.914.212.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan															
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik															
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				245 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	262.397.202.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	264.151.803.000,00			
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)															
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				5 Unit	43.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		43.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa															
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				1 Ruang	2.099.659.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium															
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				52 Ruang	35.302.074.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		35.302.074.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				8 Ruang	1.872.294.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		1.872.294.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah															
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	1.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		1.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				35 Unit	18.951.294.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		18.951.294.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium															
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				4 Ruang	1.015.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		1.015.884.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah															
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				60 Paket	3.302.228.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		3.302.228.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah															
							Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	826.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik															
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				9000 Paket	9.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		9.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik															
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				18 Paket	12.158.003.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		12.158.003.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	01	02	1.02	003	7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				5000 Peserta didik	8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	8.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	004	1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1000 Peserta Didik	4.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	004	3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				300 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	004	5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				140 Satuan Pendidikan	3.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	3.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	004	6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				140 Satuan Pendidikan	58.119.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	60.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	005	0	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	005	1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				5 Konten Digital	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	005	2	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan															
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK															
							Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi				35000 Orang	9.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		9.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan															
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi															
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik															
							Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				1500 Orang	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik															
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				4000 Buku	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	01	02	1.02	006	2	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				11 Unit	6.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	6.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	006	3	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				16 Ruang	20.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	20.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	006	4	Pembangunan Ruang Kelas Baru				7 Ruang	3.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	3.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	006	9	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				15 Ruang	6.350.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	6.350.026.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	007	2	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				140 Satuan Pendidikan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.02	007	3	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				50 Orang	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-		-	44.404.201.200,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	44.800.335.000,00			
1	01	02	1.03	000	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				1 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	01	02	1.03	000	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				9 Ruang	1.066.971.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		1.066.971.650,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	000	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				3 Ruang	476.297.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		476.297.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	000	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				2 Ruang	573.623.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		573.623.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	000	8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				16 Unit	3.881.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		3.881.485.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	001	0	Pembangunan Kantin Sekolah				5 Unit	1.769.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		1.769.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	003	5	Pengadaan Mebel Sekolah				7 Paket	945.016.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		945.016.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	003	7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				3 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	003	8	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
							Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	004	0	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik														
							Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				7 Paket	540.317.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		540.317.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	004	4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														
							Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1000 Peserta Didik	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	004	8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	005	0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	005	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
							Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				26 Satuan Pendidikan	3.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		3.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	005	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
							Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				26 Satuan Pendidikan	6.077.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	005	6	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	01	02	1.03	005	7	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				5 Konten Digital	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03	005	8	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				100 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03	005	9	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03	006	0	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				2 Dokumen	525.896.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03	006	6	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03	006	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				8 Unit	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03	007	0	Pembangunan Ruang Kelas Baru				12 Ruang	6.263.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	6.263.924.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03	007	1	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				26 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	0073			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				50 Orang	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				5 Ruang	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				2 Ruang	183.480.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		183.480.600,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	0081			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				2 Komunitas	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	0083			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				1000 Buku	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
3	1	01	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-		-	8.650.000.000,00						-	8.650.000.000,00	
1	01	03	1.01				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-		-	8.650.000.000,00				Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		-	8.650.000.000,00	
1	01	03	1.01	0004			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				250 Orang	8.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		8.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-									7.517.000.000,00			
	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-									7.517.000.000,00		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	
	1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	4.607.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			4.607.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing
	1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	2.910.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			2.910.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-									71.047.029.250,00			
	1	01	05	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-									71.047.029.250,00			Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing
	1	01	05	1.02	0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				12 Dokumen	71.047.029.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			72.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing
						RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)						260.309.710.125,00							281.291.211.802,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						260.309.710.125,00							281.291.211.802,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						260.309.710.125,00							281.291.211.802,00	
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				152.537.526.362,00								
	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				222.900.000,00						161.641.809.663,00		Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan
	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			165.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan
	1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	16.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			18.040.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan
	1	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	42.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	46.200.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.01	000	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7.500.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	8.250.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.01	000	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	7.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	7.700.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	131.493.786.712,00		Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	138.093.696.048,00		
1	02	01	1.02	000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				800 Orang/ Bulan	130.989.386.712,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	137.538.856.048,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.02	000	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	461.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	507.540.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.02	000	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	7.700.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.02	000	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	19.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	20.900.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.02	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	6.600.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.02	000	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	5.500.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	6.600.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	194.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	213.400.000,00		
1	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	5.500.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	165.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	18.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	19.800.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	21.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	23.100.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1.053.700.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.159.070.000,00		
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut					1 Paket	46.500.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	51.150.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi					1 Dokumen	14.600.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	16.060.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen	17.600.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	19.360.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja					1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	82.500.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				400 Orang	750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	825.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.05	001	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	82.500.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.05	001	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	82.500.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.950.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	3.245.000.000,00		
1	02	01	1.06	000	1	Penyediaan Komponen Instalasi										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	550.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.06	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	550.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.06	000	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	550.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.06	000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	550.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	330.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	55.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	450.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	495.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.06	001	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	165.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.07				-	5.260.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	6.186.000.000,00		
1	02	01	1.07	000												
				1												
							4 Unit	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai		-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.500.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.07	000												
				2												
							1 Unit	1.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.650.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.07	000												
				5			1 Paket	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	550.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.07	000												
				6			10 Unit	750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	825.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.07	000												
				7			1 Unit	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	11.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.07	001												
				1			1 Unit	1.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.650.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.08					7.043.139.650,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	7.747.453.615,00		
1	02	01	1.08	000												
				1			1 Laporan	43.139.650,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	47.453.615,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.08	000												
				2			1 Laporan	5.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	5.500.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.08	000												
				3												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	550.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.08	000												
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.650.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.09					4.320.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	4.752.000.000,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
1	02	01	1.09	000												
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				70 Unit	400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	440.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.09	000												
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	510.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	561.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.09	000												
			Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	55.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.09	000												
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	385.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.09	000												
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	11.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	01	1.09	001												
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	3.300.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
7	1	02	02					105.272.183.763,00						116.899.402.139,00		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1	02	02	1.01					83.782.183.763,00						93.260.402.139,00		
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1	02	02	1.01	000												
			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	2.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	2.200.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1 Unit	4.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	4.950.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	56.282.183.763,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	61.910.402.139,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi											
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dinelihara				500 Unit	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.100.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				50 Unit	2.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	2.750.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit											
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	15.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	17.600.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan				1 Paket	2.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	2.750.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
			-	-			-	19.490.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	21.439.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	385.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)		
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1 Dokumen	750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	825.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)		
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	365.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	401.500.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)		
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1 Dokumen	18.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	19.800.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)		
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	27.500.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)		
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					2.000.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	2.200.000.000,00			
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	2.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	2.200.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)		
8	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.500.000.000,00			-		-	2.750.000.000,00			
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					1.000.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.100.000.000,00			
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvankes)			500 Orang	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.100.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)		
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.500.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.650.000.000,00			
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			500 Orang	1.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.650.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (APBD)		
					RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)					250.000.000.000,00						275.000.000.000,00			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					250.000.000.000,00						275.000.000.000,00			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					250.000.000.000,00						275.000.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	250.000.000.000,00				-	275.000.000.000,00				
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	250.000.000.000,00			Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	275.000.000.000,00				
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	250.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	275.000.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS (BLUD)			
						RSJ Kalawa Atei				49.163.145.699,00						36.037.500.000,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				49.163.145.699,00						36.037.500.000,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				49.163.145.699,00						36.037.500.000,00				
10	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	32.579.145.699,00				-	32.322.500.000,00				
	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	50.000.000,00			Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	42.500.000,00				
	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	10.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI			
	1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	10.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI			
	1	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	10.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI			
	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	12.500.000,00	RSJ KALAWA ATEI			
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	22.364.145.699,00			Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	25.025.000.000,00				
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2324 Orang/ Bulan	22.349.145.699,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	25.010.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI			
	1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	15.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	360.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	360.000.000,00			
1	02	01	1.05	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	250.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	250.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
1	02	01	1.05	000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi														
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kenepegawaian			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	10.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
1	02	01	1.05	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	100.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	100.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.295.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.020.000.000,00			
1	02	01	1.06	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	70.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	70.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
1	02	01	1.06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	250.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
1	02	01	1.06	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	200.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	200.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
1	02	01	1.06	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	100.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	65.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
1	02	01	1.06	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	225.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	225.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
1	02	01	1.06	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	50.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
1	02	01	1.06	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	60.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	100.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	1.250.000.000,00			-	-	-	250.000.000,00		
1	02	01	1.07	000	2	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	0,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	01	1.07	000	5	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	250.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	250.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.680.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	4.625.000.000,00		
1	02	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	25.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	600.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	4.000.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.580.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.000.000.000,00		
1	02	01	1.09	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	580.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	500.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	01	1.09	000	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	100.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 Unit	700.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	300.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 Unit	100.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	100.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
11	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	15.734.000.000,00			-	-	-	2.915.000.000,00			
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	14.875.000.000,00			-	-	-	2.100.000.000,00			
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				0 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	0,00		RSJ KALAWA ATEI		
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan			2 Unit	175.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	200.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan			2 Unit	100.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	100.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	100.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			1 Unit	11.500.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	200.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	02	02	1.01	002	7	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					2 Paket	1.500.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.500.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	02	1.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	494.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	450.000.000,00		
1	02	02	1.02	000	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	50.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	02	1.02	001	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	100.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	02	1.02	001	6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					1 Dokumen	344.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	300.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	02	1.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	365.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	365.000.000,00		
1	02	02	1.04	000	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan					1 Unit	65.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	65.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	02	1.04	000	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					1 Unit	300.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	300.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
12	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	-	-	850.000.000,00			-		-	800.000.000,00		
1	02	03	1.01			Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-	-	-	-	600.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	550.000.000,00		
1	02	03	1.01	000	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan					5 Orang	600.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	550.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI	
1	02	03	1.02			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	250.000.000,00			-		-	250.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	02	03	1.02	000	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				30 Orang	250.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	250.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI		
						RSJ Kalawa Atei (BLUD)					3.000.000.000,00						5.000.000.000,00			
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.000.000.000,00						5.000.000.000,00			
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.000.000.000,00						5.000.000.000,00			
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			3.000.000.000,00						5.000.000.000,00			
1	02	01	1.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			3.000.000.000,00			Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	-	5.000.000.000,00			
1	02	01	1.10	000	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	5.000.000.000,00	RSJ KALAWA ATEI (BLUD)		
						RSUD HANAU (APBD)					125.332.707.341,00						126.432.707.341,00			
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					109.333.799.934,00						110.433.799.934,00			
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					109.333.799.934,00						110.433.799.934,00			
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			33.171.678.983,00						33.171.678.983,00			
1	02	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			2.881.921.589,00			Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	2.881.921.589,00			
1	02	01	1.06	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	1.274.427.805,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pemuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.274.427.805,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	01	1.06	000	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	1.607.493.784,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pemuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.607.493.784,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			4.874.225.620,00			Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	-	4.874.225.620,00			
1	02	01	1.07	000	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	3.500.000.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pemuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	3.500.000.000,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	01	1.07	000	5	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	1.374.225.620,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pemuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	1.374.225.620,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			23.915.531.774,00			Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	-	23.915.531.774,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	5.004.000.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pempuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	5.004.000.000,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Laporan	208.680.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pempuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	208.680.000,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	18.702.851.774,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pempuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	18.702.851.774,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			1.500.000.000,00			-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	1.500.000.000,00			
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20 Unit	400.000.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pempuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	400.000.000,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20 Unit	500.000.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pempuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	500.000.000,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10 Unit	600.000.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pempuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	600.000.000,00	RSUD HANAU (APBD)		
15	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			76.162.120.951,00			-		-	77.262.120.951,00			
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			73.662.120.951,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	74.762.120.951,00			
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pempuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	100.000.000,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				70 Unit	69.562.120.951,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pempuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	69.562.120.951,00	RSUD HANAU (APBD)		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	02	02	1.01	001	3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				2 Unit	500.000.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pemuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	600.000.000,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	02	1.01	001	7	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara Sesuai Standar			100 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pemuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	3.000.000.000,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	02	1.01	002	6	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			12 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pemuang Hulu I	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	1.500.000.000,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	02	1.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				-	2.000.000.000,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	2.000.000.000,00			
1	02	02	1.02	001	6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			12 Dokumen	2.000.000.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pemuang Hulu I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	2.000.000.000,00	RSUD HANAU (APBD)		
1	02	02	1.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				-	500.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	500.000.000,00			
1	02	02	1.03	000	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pemuang Hulu I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	500.000.000,00	RSUD HANAU (APBD)		
X						NON URUSAN					15.998.907.407,00							15.998.907.407,00		
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					15.998.907.407,00							15.998.907.407,00		
16	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				-	15.998.907.407,00							15.998.907.407,00		
X	XX	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	15.998.907.407,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		15.998.907.407,00		
X	XX	01	1.02	000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/Bulan	15.998.907.407,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pemuang Hulu I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.998.907.407,00	RSUD HANAU (APBD)	
			RSUD HANAU (BLUD)					22.000.000.000,00						22.000.000.000,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					22.000.000.000,00						22.000.000.000,00		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					22.000.000.000,00						22.000.000.000,00		
17	1	02	01					22.000.000.000,00						22.000.000.000,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-											
1	02	01	1.10					22.000.000.000,00				Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-		22.000.000.000,00	
1	02	01	1.10	000												
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	22.000.000.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Pemuang Hulu I	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	22.000.000.000,00	RSUD HANAU (BLUD)	
			Dinas Kesehatan					90.988.332.545,00						177.972.284.110,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					90.988.332.545,00						177.972.284.110,00		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					90.988.332.545,00						177.972.284.110,00		
18	1	02	01					40.695.546.245,00						47.404.669.575,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-											
1	02	01	1.01					274.643.700,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.033.907.914,00		
1	02	01	1.01	000												
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	195.966.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	760.990.754,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.01	000												
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	18.250.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.01	000												
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	23.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	23.847.320,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.01	000												
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	11.406.563,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.01	000												
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	16.729.625,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.01	000												
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	34.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	52.045.863,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.01	000	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	20.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.637.289,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	26.425.526.451,00		
1	02	01	1.02	000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/ Bulan	26.700.355.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	22.774.100.250,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.02	000	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.542.887.070,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.02	000	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.02	000	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	4.346.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	22.037.479,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.02	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	66.495.644,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.02	000	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	9.059.852,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.02	000	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	5.422.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	10.946.156,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.02	000	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				39.107.900,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	729.532.370,00		
1	02	01	1.03	000	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.121.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.607.325,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.03	000	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	40.227.144,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.03	000	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	375.161.841,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.03	000	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	308.699.603,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.03	000	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.986.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.836.457,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.03	000	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.03	000	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-				0,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	30.000.000,00		
1	02	01	1.04	000	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi				1 Dokumen	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.04	000	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.04	000	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				2.355.665.090,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	616.120.844,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	02	01	1.05	000	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	95.054.688,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.05	000	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				1 Paket	292.163.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	104.940.375,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.05	000	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi				1 Dokumen	627.501.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	104.940.375,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.05	000	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.05	000	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja				1 Dokumen	386.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	87.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.05	000	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun				2 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.05	000	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.05	000	8	Pemindahan Tugas ASN				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.05	000	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	163.685.406,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.05	001	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.05	001	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.580.356.700,00	-	-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.877.342.177,00		
1	02	01	1.06	000	1	Penyediaan Komponen Instalasi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	543.833.050,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.06	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	445.994.845,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.06	000	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	634.014.766,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.06	000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	411.016.469,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	120.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	148.665.531,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.06	000	7	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.06	000	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	162.222.516,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	825.356.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.166.773.875,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.06	001	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	314.821.125,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.06	001	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang										
			Urusan Pemerintah Daerah				-	2.661.576.855,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	6.337.191.303,00		
1	02	01	1.07	000	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.07	000	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.07	000	5	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.956.354.375,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.07	000	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	314.977.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.407.950.031,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.07	000	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.003.400.435,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.646.655.313,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.07	001	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	258.199.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.07	001	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	286.231.584,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan										
							-	4.537.072.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	5.765.534.263,00		
1	02	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	13.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	18.232.594,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.648.154.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.930.593.266,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.08	000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	57.122.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.775.917.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.759.586.403,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	1.527.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.589.514.253,00			
1	02	01	1.09	000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	01	1.09	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	314.709.027,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	01	1.09	000	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	452.314.845,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	667.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	849.515.631,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	01	1.09	001	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	571.220.000,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	01	1.09	001	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	401.754.750,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	01	1.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00			
1	02	01	1.10	000	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1 Unit Kerja	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN		
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	42.575.263.730,00			-		-	117.794.027.385,00			
1	02	02	1.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	12.047.262.130,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	21.710.572.085,00			
1	02	02	1.01	000	1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				2 Unit	1.040.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	000	2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	000	4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	000	6	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)										
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	000	7	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center										
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan				1 Unit	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	000	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				1 Unit	137.789.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	114.244.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	000	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit										
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1 Unit	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	001	0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan										
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	11.760.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	001	3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
							Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	125.385.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan															
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center															
							Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan															
							Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	1.147.096.367,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	7.922.595.085,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit															
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3.471.991.263,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.513.733.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	29.408.028.800,00	-	-	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	88.620.204.524,00			
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				988567 Orang	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	5.067.803.496,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11475 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	936.256.664,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	1.025.088.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	8.023.291.850,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	324.911.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	4.169.906.000,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.570.855.000,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1.075.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	24.359.242.153,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	130.209.856,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	4.152.154.400,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	318.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	807.376.629,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	330.632.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.072.249.100,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1.845.911.142,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	15.157.296.049,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	2.763.396.706,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA									
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis				127 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	001			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	14.986.819.278,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	15.392.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	001			Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	902.231.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	001			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.857.837.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	992.865.371,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	001			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	2.359.723.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	3.620.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	002			Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	71.619.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	002			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1 Dokumen	450.358.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	002	3	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)										
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (segar)				14 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	349.801.250,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	002	4	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	002	5	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional										
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	9.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	002	6	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	003	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga										
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				429028 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.02	003	1	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	295.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	467.043.276,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.03	000	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	295.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	467.043.276,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										
			Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				-	824.972.800,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	6.996.207.500,00		
1	02	02	1.04	000	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				31 Unit	297.509.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	214.207.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.04	000	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit										
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				31 Unit	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.04	000	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan										
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				31 Unit	302.463.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	6.282.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
20	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	6.893.092.300,00					-	11.126.845.659,00		
1	02	03	1.01			Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	4.947.000.000,00				Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	5.711.688.800,00		
1	02	03	1.01	000	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvankes)				407 Orang	4.855.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	5.628.525.800,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	1.01	000	2	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				407 Orang	92.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	83.163.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	1.02			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	1.946.092.300,00				Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	5.415.156.859,00		
1	02	03	1.02	000	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				1135 Orang	678.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	4.193.478.577,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	1.02	000	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1.267.592.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	1.221.678.282,00	DINAS KESEHATAN	
21	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	117.930.270,00					-	169.103.550,00		
1	02	04	1.01			Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	117.930.270,00				Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	169.103.550,00		
1	02	04	1.01	000	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
						Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan				28 Sarana	117.930.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	169.103.550,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00			
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional															
						Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				0 Sarana	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN		
22	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	706.500.000,00			-		-	1.477.637.941,00			
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	145.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	609.536.794,00			
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi															
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	609.536.794,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	395.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	868.101.147,00			
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
						Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	222.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	868.101.147,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
						Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	172.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	166.500.000,00			-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00			
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM															
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				1 Dokumen	166.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	-	0,00	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						1.594.818.818.676,00						474.298.345.058,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.594.818.818.676,00							474.298.345.058,00		
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1.594.818.818.676,00							474.298.345.058,00		
23	1	03	01											50.169.345.058,00			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
1	03	01	1.01											242.277.400,00			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
1	03	01	1.01	000	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	242.277.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				242.277.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	1.02											25.378.551.319,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
1	03	01	1.02	000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			201 Orang/ Bulan	25.148.551.319,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				25.148.551.319,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	1.02	000	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan											
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				172.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	1.02	000	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			20 Laporan	57.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				57.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	1.03											753.805.000,00			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
1	03	01	1.03	000	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	328.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				328.325.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	1.03	000	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian											
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	287.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				287.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	1.03	000	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	137.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				137.980.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	1.05											345.000.000,00			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
1	03	01	1.05	000	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			201 Orang	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				172.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	03	01	1.05	001	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan					201 Orang	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	172.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.956.799.405,00			-	-	-	1.956.799.405,00		
1	03	01	1.06	000	1	Penyediaan Komponen Instalasi					1 Paket	80.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	80.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.06	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	484.799.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	484.799.405,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.06	000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	184.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	184.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	155.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	155.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					1 Dokumen	189.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	189.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.06	000	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	172.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					1 Laporan	690.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	690.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-			-	1.989.107.850,00			-	-	-	1.989.107.850,00		
1	03	01	1.07	000	2	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit	1.759.107.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1.759.107.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.07	000	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-			-	12.796.192.738,00			-	-	-	12.796.192.738,00		
1	03	01	1.08	000	1	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	5.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	5.175.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.500.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1.500.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	11.290.267.738,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	11.290.267.738,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
							-	-			-	6.707.611.346,00			-	-	-	6.707.611.346,00		
1	03	01	1.09	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	880.331.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	880.331.890,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.09	000	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	4.166.633.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	4.166.633.456,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	759.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	759.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	1.09	001	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	901.646.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	901.646.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
24	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
							-	-			-	62.000.000.000,00			-	-	-	0,00		
1	03	02	1.01			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
							-	-			-	3.350.000.000,00			-	-	-	0,00	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	
1	03	02	1.01	004	8	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan														
							Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Bendungan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	0,00	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	
1	03	02	1.01	007	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
							Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				4 Lembaga	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	0,00	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	
1	03	02	1.01	009	5	Rehabilitasi Unit Air Baku														
							Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi				4 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	0,00	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	58.650.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	0,00			
1	03	02	1.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa				2,001.85 KM	54.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	02	1.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa				133.33 KM	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	02	1.02	0039	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa				22 DI	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
25	1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	-	-	25.000.000.000,00			-		-	25.000.000.000,00			
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	25.000.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	25.000.000.000,00			
1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota				10 Kabupaten/Kota	24.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	24.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
26	1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	-	-	14.500.000.000,00			-		-	14.500.000.000,00			
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	-	-	14.500.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	14.500.000.000,00			
1	03	04	1.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan				3 Unit	14.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	14.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
27	1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	7.200.000.000,00				-	-	7.200.000.000,00		
	1 03 05 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-	-			-	7.200.000.000,00				Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	7.200.000.000,00	
1	03 05 1.01 001 0	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				14 Kabupaten/Kota	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 05 1.01 001 3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun				39 M ³ /Hari	6.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	6.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	11.000.000.000,00				-	-	12.000.000.000,00		
	1 03 06 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-	-			-	11.000.000.000,00				Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	12.000.000.000,00	
1	03 06 1.01 001 0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				11 Sistem Drainase Perkotaan	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 06 1.01 001 1	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				1 Unit	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	118.929.000.000,00				-	-	123.179.000.000,00		
	1 03 08 1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-			-	118.929.000.000,00				Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	123.179.000.000,00	
1	03 08 1.01 001 9	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				14 Dokumen	118.929.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	123.179.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
30	1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	-	231.137.980.711,00				-	231.300.000.000,00				
	1	03	09	1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	231.137.980.711,00			Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	231.300.000.000,00			
	1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
					Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				15 Kawasan	228.837.980.711,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	229.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	2.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
31	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	-	-	1.063.882.492.907,00				-	0,00				
	1	03	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-	-	-	1.063.882.492.907,00			Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	0,00			
	1	03	10	1.01	0025	Rehabilitasi Jembatan													
					Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				1 Jembatan	2.373.356.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan													
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1 Jembatan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan													
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan													
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi				51.733 KM	1.035.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan													
					Jumlah Jembatan yang Dibangun				0 Jembatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	03	10	1.01	003	3	Pemeliharaan Rutin Jalan													
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1218.63 KM	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	1.01	003	6	Penggantian Jembatan													
						Jumlah Jembatan yang Diganti				0 Jembatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	1.01	003	8	Pemeliharaan Berkala Jalan													
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	1.01	004	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	13.509.136.907,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	1.01	004	2	Pembangunan Jalan													
						Panjang Jalan yang Dibangun				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	1.01	004	3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1218.63 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	1.01	004	4	Pengelolaan Leger Jalan													
						Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
32	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			7.000.000.000,00								7.900.000.000,00
1	03	11	1.01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-			2.850.000.000,00				Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-			3.350.000.000,00
1	03	11	1.01	000	9	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
						Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				40 Orang	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli															
						Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli															
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				160 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi															
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				14 Lembaga	1.220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli															
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				230 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi															
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya				1 Lembaga	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi															
						-	-			-	3.450.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	3.650.000.000,00			
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi															
						Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
							Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				3 Perangkat Pendukung	3.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi															
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI															
							Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				28 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi															
							-				-	700.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		900.000.000,00		
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota															
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi															
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				3 Lembaga	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota															
							Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				3 Badan Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi															
							Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
33	1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG															
							-				-	4.000.000.000,00			-			3.050.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-	-	-	-	1.200.000.000,00			-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	-	750.000.000,00		
1	03	12	1.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	-	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang														
						Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	-	950.000.000,00				Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	-	800.000.000,00		
1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
						Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	-	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	1.02	0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota														
						Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	1.02	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-	-	-	450.000.000,00				Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	-	300.000.000,00		
1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
						Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
						Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-	-	-	1.400.000.000,00				Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	-	1.200.000.000,00		
1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	-	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	03	12	1.04	000	006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
						Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	12	1.04	001	005	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal														
						Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan					205.280.362.135,00							329.470.000.000,00		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					203.080.362.135,00								326.970.000.000,00	
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					203.080.362.135,00								326.970.000.000,00	
34	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		-	20.473.698.135,00							26.720.000.000,00		
1	04	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	655.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	1.300.000.000,00		
1	04	01	1.01	000	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.01	000	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.01	000	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.01	000	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.01	000	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.01	000	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.512.667.135,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	7.050.000.000,00			
1	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					43 Orang/ Bulan	6.502.667.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	7.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	310.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	450.000.000,00			
1	04	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	310.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00			
1	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut					1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi					1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja					1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	-	2.400.000.000,00		
1	04	01	1.06	000		Penyediaan Komponen Instalasi										
				1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.06	000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.06	000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
				5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.06	000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
				6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.06	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
				9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.06	001		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
				1		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang										
1	04	01	1.07	000		Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.07	000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				2		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	1.07	000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				9		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	5.205.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	8.020.000.000,00				
1	04	01	1.08	000	1														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.08	000	2														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.08	000	4														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	6.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	861.031.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.000.000.000,00				
1	04	01	1.09	000	1														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajaknya			4 Unit	294.152.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.09	000	2														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	230.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.09	000	9														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	229.209.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04	01	1.09	001	0														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	107.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
35	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	100 %			100 %	5.250.000.000,00				100 %	1.200.000.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen hasil identifikasi perumahan di lokasi arawan bencana atau terkena relokasi program provinsi Dokumen Hasil Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-			100 % 1 Dokumen	250.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	200.000.000,00		
1	04	02	1.01	001	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi														
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	5.000.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00		
1	04	02	1.03	000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
						Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi				20 Unit Rumah	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
36	1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	93.790.000.000,00			-		-	61.350.000.000,00		
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-			-	1.790.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	6.350.000.000,00		
1	04	03	1.01	000	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				1 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	03	1.01	001	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman														
						Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara				1 Sistem Informasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	03	1.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	03	1.01	001	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				100 Orang	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	03	1.01	001	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				0 Rumah Tangga	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	03	1.02				-	92.000.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	55.000.000.000,00		
1	04	03	1.02	0003			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha									
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				1000 Unit Rumah	32.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	40.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	03	1.02	0014			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha									
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				50 Ha	60.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	15.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
37	1	04	05				-	83.466.664.000,00			-		-	237.500.000.000,00		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													
1	04	05	1.01				-	83.466.664.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	237.500.000.000,00		
1	04	05	1.01	0001			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				1 Dokumen	6.006.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	7.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	05	1.01	0002			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman									
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				50 Lokasi	50.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	200.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	05	1.01	0003			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	05	1.01	0006			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman									
			Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan				4 Lokasi	26.960.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	30.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
38	1	04	06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	100.000.000,00			-	-	200.000.000,00				
	1	04	06	1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	-	-	-	-	100.000.000,00			-	-	200.000.000,00				
	1	04	06	1.01	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah													
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.200.000.000,00					2.500.000.000,00		
	2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							2.200.000.000,00					2.500.000.000,00		
39	2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	-	-	450.000.000,00				-	-	500.000.000,00			
	2	10	04	1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	450.000.000,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	500.000.000,00		
	2	10	04	1.01	000	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
						Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
40	2	10	06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ARSENTIF	-	-	-	-	1.250.000.000,00				-	-	1.400.000.000,00			
	2	10	06	1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	1.250.000.000,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	1.400.000.000,00		
	2	10	06	1.01	000	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	2	10	06	1.01	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.				1 Berita Acara	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	2	10	06	1.01	000	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria				1 Berita Acara	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
2	10 06	1.01 000 6	Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Berita Acara	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
41	2 10 10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-		-	500.000.000,00					-	600.000.000,00		
	2 10 10	1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-		-	500.000.000,00				Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	600.000.000,00		
2	10 10	1.01 000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Satuan Polisi Pamong Praja					26.794.560.795,00						28.380.000.000,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					26.794.560.795,00						28.380.000.000,00		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					26.794.560.795,00						28.380.000.000,00		
42	1 05 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		-	25.104.462.671,00					-	25.880.000.000,00		
	1 05 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	290.000.000,00				Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	290.000.000,00		
1	05 01	1.01 000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	45.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01	1.01 000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01	1.01 000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01	1.01 000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	85.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.938.347.336,00		-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	12.295.000.000,00		
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/ Bulan	11.903.347.336,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	12.250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	15.000.000,00			-	-	20.000.000,00				
1	05	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	312.500.000,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	175.000.000,00			
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			275 Paket	302.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi														
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	1.731.677.581,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	1.665.000.000,00			
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	65.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			7 Paket	646.732.246,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	70.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01	1.06 000 8	Facilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01	1.06 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	774.945.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	850.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	9.776.937.754,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	10.285.000.000,00		
1	05 01	1.08 000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01	1.08 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	230.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	265.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01	1.08 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	9.536.937.754,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	10.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1.040.000.000,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	1.150.000.000,00		
1	05 01	1.09 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01	1.09 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	125.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	415.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
43	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-					-	2.500.000.000,00		
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-		-	1.145.098.124,00			-	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	1.750.000.000,00		
1	05	02	1.01	001	4	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	1.01	001	5	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	76.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	1.01	001	6	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	1.01	001	7	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan										
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				35 laporan	159.098.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	1.01	001	8	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang benuansa Hak Asasi Manusia										
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja				100 Orang	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	05	02	1.01	001	9	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				35 Laporan	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	02	1.02			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	-	-	-	322.000.000,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	450.000.000,00			
1	05	02	1.02	000	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	123.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	02	1.02	000	2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	99.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	02	1.02	000	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	99.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	02	1.03			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-	-	-	223.000.000,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	300.000.000,00			
1	05	02	1.03	000	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				1 Laporan	155.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	02	1.03	000	5	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				1 laporan	68.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
			Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran						100.639.639.657,00						111.379.525.000,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.639.639.657,00							111.379.525.000,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						100.639.639.657,00							111.379.525.000,00	
44	1 05 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		-	44.605.639.657,00						-	48.958.500.000,00		
	1 05 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	1.215.000.000,00						-	1.315.000.000,00		
	1 05 01 1.01 000 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			-	800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 1.01 000 2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			-	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 1.01 000 3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			-	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 1.01 000 4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			-	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 1.01 000 5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			-	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 1.01 000 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			-	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 1.01 000 7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			-	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	9.133.989.657,00						-	11.318.500.000,00		
	1 05 01 1.02 000 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/Bulan	7.528.989.657,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9.600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.02	000												
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.520.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.02	000												
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.02	000												
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.02	000												
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	103.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.03	000												
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	13.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	17.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.03	000												
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	17.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.03	000												
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.05	000												
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.05	000												
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kewazawalan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	175.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.05	000	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.05	001	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1	05	01	1.06	000	1	Penyediaan Komponen Instalasi										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.06	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.06	000	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.06	000	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang										
1	05	01	1.07	000	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.07	000												
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.07	001												
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.08													
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-		-	3.195.000.000,00			-	-	-	3.365.000.000,00		
1	05	01	1.08	000												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.08	000												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.08	000												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.630.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.09													
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-		-	9.150.000.000,00			-	-	-	9.850.000.000,00		
1	05	01	1.09	000												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	3.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3.250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.09	000												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	01	1.09	000												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	5.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
45	1	05	03													
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-		-	53.209.000.000,00			-	-	-	59.186.025.000,00		
1	05	03	1.01													
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-	-		-	400.000.000,00			-	-	-	450.000.000,00		
1	05	03	1.01	000												
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				200 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	4.995.000.000,00			-	-	-	5.950.000.000,00		
1	05	03	1.02	001	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														
						Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				14 Kawasan	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.02	002	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
						Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalikan				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.02	002	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
						Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				200 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.02	002	Penyusunan Rencana Kontijensi														
						Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.02	002	Pengelolaan Risiko Bencana														
						Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.02	002	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
						Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				7 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.02	002	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				14 Keluarga	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.02	002	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.02	003	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana											
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				50 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											
								42.100.000.000,00			-	-	-	46.075.025.000,00		
1	05	03	1.03	000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas											
			Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.03	002	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	115.025.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.03	002	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.03	002	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				5000 Orang	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.03	003	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana											
											-	-	-			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				2 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.03	003	1	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	36.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.04			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana														
							-	-			-	5.714.000.000,00			-	-	-	6.711.000.000,00		
1	05	03	1.04	000	6	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				1 Keluarga	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.04	000	7	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
							Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.04	000	8	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														
							Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.04	000	9	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi														
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				1 Kegiatan	1.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.04	001	0	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi														
							Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				1 Lembaga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	03	1.04	001	6	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 03 1.04 001 8	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah														
			Jumlah Dokumen yang dilegalikan				1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	586.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 03 1.04 001 9	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana														
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen	414.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 03 1.04 002 2	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIDP)				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 03 1.04 002 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				14 kabupaten/kota	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	325.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
46	1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
			-	-			-	2.825.000.000,00			-	-	-	3.235.000.000,00		
1	05 04 1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran														
			-	-			-	2.625.000.000,00			-	-	-	3.035.000.000,00		
1	05 04 1.01 000 2	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 04 1.01 000 4	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 04 1.01 000 6	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal				10 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 04	1.01 000 7	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi													
			Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				10 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 04	1.01 000 9	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota				50 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 04	1.01 001 2	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 04	1.01 001 3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				1 Keluarga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 04	1.01 001 9	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran													
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 04	1.01 002 2	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran													
			-				-	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 04	1.01 002 3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				25 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 04	1.01 002 4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				5 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	04	1.01	002			Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi									
							14 Kabupaten/Kota	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	04	1.01	002			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									
							10 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	04	1.01	002			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									
							10 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	04	1.02					200.000.000,00			-	-		200.000.000,00		
1	05	04	1.02	000			Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran									
							1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	04	1.02	000			Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran									
							1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
								38.555.323.000,00						39.095.323.000,00		
8								38.535.323.000,00						39.075.323.000,00		
8	01							38.535.323.000,00						39.075.323.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
47	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	11.318.360.400,00					-	11.858.360.400,00			
	8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	228.929.000,00				Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	228.929.000,00		
	8	01	01	1.01	000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.01	000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.01	000	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen													
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.01	000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.01	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.01	000	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	1.01	000	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	143.929.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		143.929.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-									5.441.611.000,00			
8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/ Bulan	5.395.611.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	5.395.611.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				10.000.000,00								
8	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.05				-	217.000.000,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	217.000.000,00		
8	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin											
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	88.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	88.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi											
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	54.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja											
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.06				-	1.090.708.000,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	1.090.708.000,00		
8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.546.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	120.546.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	10.162.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		10.162.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-				Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		1.509.756.000,00		
8	01	01	1.07	000	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	728.116.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		728.116.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.07	001	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	781.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		781.640.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		1.030.000.000,00		
8	01	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.09					1.790.356.400,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	2.330.356.400,00		
8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				21 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1.280.356.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	1.820.356.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
48	8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											
8	01	02	1.01					3.841.270.000,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	3.841.270.000,00		
8	01	02	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											
8	01	02	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	02	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang				1 Dokumen	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		360.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02	1.01 000 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02	1.01 000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02	1.01 000 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				4 Laporan	150.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		150.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02	1.01 000 6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				1 Dokumen	141.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		141.070.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02	1.01 000 7	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila													
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02	1.01 000 8	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02	1.01 0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka													
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02	1.01 0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila													
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02	1.01 0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila													
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 02	1.01 0012	Pembentukan Paskibraka													
			Jumlah Paskibraka				0 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
49	8 01 03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-		-	19.058.572.500,00						19.058.572.500,00		
8	01 03	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-		-	19.058.572.500,00				Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		19.058.572.500,00		
8	01 03	1.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	273.906.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	273.906.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 03	1.01 000 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 03	1.01 000 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	574.658.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	574.658.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 03	1.01 000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	17.657.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	17.657.050.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 03	1.01 000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	382.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		382.958.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
50	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	-	-	713.514.000,00					-		713.514.000,00	
	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	713.514.000,00				Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	713.514.000,00	
8	01	04	1.01	0001		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
						Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	1.01	0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
						Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		140.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	1.01	0003		Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	1.01	0004		Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	173.514.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		173.514.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
8	01	04	1.01	000	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
51	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	-	-	-		1.512.060.000,00					-	1.512.060.000,00			
8	01	05	1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	-		1.512.060.000,00				Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	1.512.060.000,00			
8	01	05	1.01	000	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Dokumen	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	05	1.01	000	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
						Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Dokumen	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	05	1.01	000	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	1.157.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	1.157.894.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	05	1.01	000	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 05	1.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				4 Laporan	69.166.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		69.166.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
52	8 01 06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-		-	2.091.546.100,00					-	2.091.546.100,00		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-		-	2.091.546.100,00				Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	2.091.546.100,00	
8	01 06	1.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 06	1.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	217.762.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		217.762.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 06	1.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	335.961.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	335.961.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 06	1.01 000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di				56 Orang	591.499.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	591.499.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 06	1.01 000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di				4 Laporan	365.533.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	365.533.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 06	1.01 000 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				4 Dokumen	480.791.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	480.791.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
X			NON URUSAN													
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
53	X XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
X	XX	01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	20.000.000,00		
X	XX	01 1.03 000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Dinas Sosial					92.560.696.417,00						95.957.260.600,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					92.560.696.417,00						95.957.260.600,00		
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					92.560.696.417,00						95.957.260.600,00		
54	1	06	01					28.173.254.949,00						30.113.466.800,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
1	06	01	1.01					410.000.000,00					Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah		440.000.000,00	
1	06	01	1.01	000												
				1												
							5 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah		32.500.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	000												
				6												
							5 Laporan	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah		32.500.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	000												
				7												
							1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah		375.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.02					16.319.131.232,00						16.450.000.000,00		
1	06	01	1.02	000												
				1												
							103 Orang/Bulan	15.868.491.232,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			16.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.02	000												
				2												
							1 Dokumen	450.640.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			450.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.03					110.000.000,00						112.000.000,00		
1	06	01	1.03	000												
				2												
							9 Dokumen	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			22.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.03	000												
				6												
							1 Laporan	90.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			90.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.05					788.000.000,00						788.000.000,00		
1	06	01	1.05	000												
				2												
							143 Paket	205.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			225.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.05	000												
				9												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.05	001	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	363.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	-	1.407.500.000,00		
1	06	01	1.06	000	1	Penyediaan Komponen Instalasi										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	160.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.06	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	375.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	85.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	90.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1000 Dokumen	165.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	165.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.06	000	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	27.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	550.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.06	001	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	37.500.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-			-	-	-	3.870.000.000,00		
1	06	01	1.07	000	2	Unsur Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.07	000	5	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	450.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.07	000	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	70.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.07	000			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.07	001			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	350.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.08				-	2.997.166.800,00			-	-	-	3.028.966.800,00		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan													
1	06	01	1.08	000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	18.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	19.800.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.08	000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	780.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.08	000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2.229.166.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.229.166.800,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.09				-	3.564.456.917,00			-	-	-	4.017.000.000,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan													
1	06	01	1.09	000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	396.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.09	000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	3.054.456.917,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3.500.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.09	001			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	110.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	121.000.000,00	DINAS SOSIAL	
55	1	06	02				-	1.424.566.700,00			-	-	-	1.541.000.000,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													
1	06	02	1.01				-	50.000.000,00			-	-	PSKS binaan Dinas Sosial	55.000.000,00		
			Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
1	06	02	1.01	000			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang									

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	PSKS binaan Dinas Sosial	55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-	-			-	1.374.566.700,00			-	-	PSKS binaan Dinas Sosial	1.486.000.000,00		
1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi														
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				30 Orang	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	PSKS binaan Dinas Sosial	363.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi														
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				136 Orang	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	PSKS binaan Dinas Sosial	363.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				1 Lembaga	714.566.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	PSKS binaan Dinas Sosial	760.000.000,00	DINAS SOSIAL	
56	1	06	03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-			-	180.000.000,00					-	200.000.000,00		
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-	-			-	180.000.000,00					PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	200.000.000,00		
1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
						Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				150 Orang	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
57	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	5.648.380.968,00					-	6.193.300.000,00		
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	-	-			-	1.141.680.000,00					PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	1.232.400.000,00		
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				40 Orang	650.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	700.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				40 Orang	90.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti		99.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	000	4	Penyediaan Alat Bantu										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				10 Orang	28.318.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	000	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				40 Orang	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti		44.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	000	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial										
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				40 Orang	57.160.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti		63.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	000	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari										
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				40 Orang	85.802.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti		90.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	000	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas										
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				5 Orang	4.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti		4.400.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	000	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				40 Orang	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti		110.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	001	0	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	43.200.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti		47.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	001	1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	43.200.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti		45.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti												
			-	-	-	-	-	1.849.101.968,00			-	-	-	-	2.012.000.000,00	
1	06	04	1.02	000	1	Pengasuhan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				80 Orang	120.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	120.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.02	000	2	Penyediaan Makanan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				580 Orang	950.904.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.02	000	3	Penyediaan Sandang										
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	180.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.02	000	4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses										
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				80 Orang	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.02	000	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				80 Orang	18.173.268,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.02	000	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial										
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	24.820.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	28.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.02	000	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari										
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				80 Orang	82.144.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	85.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.02	000	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	13.060.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.02	001	0	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				80 Orang	110.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	131.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.02	001	1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				80 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	131.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.02	001	2	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				80 Orang	45.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.02	001	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	132.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.03				-	1.423.599.000,00			-	-	-	1.552.800.000,00		
1	06	04	1.03	000	1	Penyediaan Permakanan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	900.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	990.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.03	000	2	Penyediaan Sandang										
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	103.065.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	115.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.03	000	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses										
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	60.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	70.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.03	000	4	Penyediaan Alat Bantu										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				15 Orang	9.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	9.900.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.03	000	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	36.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	40.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.03	000	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial										
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	24.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	26.400.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.03	000	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari										
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.03	000	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				10 Orang	5.320.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	5.500.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.03 000 9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				20 Orang	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	17.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.03 001 0	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	44.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.03 001 1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	45.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.03 001 2	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				8 Orang	74.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	78.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.03 001 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	95.214.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	97.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti														
1	06 04 1.04 000 1	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				20 Orang	55.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	60.500.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.04 000 2	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				20 Orang	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	11.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.04 000 4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				20 Orang	5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	5.500.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.04 000 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				20 Orang	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.04 000 6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.04 000 7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				20 Orang	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.04 000 9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				20 Orang	5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.500.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.04 001 0	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				20 Orang	78.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	82.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.04 001 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti														
			-				-	831.000.000,00			-	-	-	916.600.000,00		
1	06 04 1.05 000 1	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				20 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	330.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.05 000 2	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				20 Orang	36.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	39.600.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.05 000 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				20 Orang	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	110.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.05 000 6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				20 Orang	145.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	164.500.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.05	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				20 Orang	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	16.500.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				20 Orang	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	135.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				1 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	121.000.000,00	DINAS SOSIAL	
58	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
										-	53.107.493.800,00						53.208.493.800,00		
1	06	05	1.01		Penggantian Anak antar WNI dan Pengantian Anak oleh Orang Tua Tunggal														
1	06	05	1.01	0001	Penggantian Anak antar WNI														
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				10 Orang	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi														
										-	53.057.493.800,00						53.153.493.800,00		
1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				50000 Keluarga	734.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	800.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				100 Keluarga	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	330.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				100320 Orang	52.023.493.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	52.023.493.800,00	DINAS SOSIAL	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
59	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	3.577.000.000,00					-	4.243.000.000,00		
	1	06	06	1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-	-			-	3.577.000.000,00			Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan sosial	-		4.243.000.000,00		
	1	06	06	1.01	000	Penyediaan Permakanan													
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				4000 Orang	547.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan sosial		575.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	000	Penyediaan Sandang													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				1000 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan sosial		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi													
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				3 Unit	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan sosial		198.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				1000 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan sosial		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	000	Pelayanan Dukungan Psikososial													
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				4000 Orang	2.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan sosial		3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
60	1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	450.000.000,00					-	458.000.000,00		
	1	06	07	1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	-			-	450.000.000,00			Makam Taman Pahlawan Kewenangan Provinsi	-		458.000.000,00		
	1	06	07	1.01	000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi													
						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Makam Taman Pahlawan Kewenangan Provinsi		142.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	07	1.01	000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Makam	220.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Makam Taman Pahlawan Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06 07 1.01 000 3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Laporan	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Makam Taman Pahlawan Kewenangan Provinsi	66.000.000,00	DINAS SOSIAL	
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi													
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
61	2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
								25.194.178.236,00							38.294.629.785,00	
2	07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
								570.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			615.397.000,00	
2	07 01 1.01 000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			312.648.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07 01 1.01 000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			40.264.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07 01 1.01 000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			40.264.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07 01 1.01 000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			65.897.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07 01 1.01 000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			156.324.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
								17.492.361.726,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			18.255.192.785,00	
2	07 01 1.02 000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ Bulan	17.187.361.726,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			17.911.281.785,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07 01 1.02 000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			312.648.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	10.421.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	10.421.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	10.421.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					90.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	96.161.000,00			
2	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.632.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	80.529.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					475.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	524.123.000,00			
2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			3 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	88.583.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
2	07	01	1.05	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan					4 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	985.000.000,00		-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.062.310.000,00			
2	07	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi					1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.632.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	104.216.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	26.054.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	31.264.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					3000 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.632.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	104.216.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					2 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	556.864.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.06	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	208.432.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-	-	-	1.335.000.000,00		-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.386.489.000,00			
2	07	01	1.07	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					3 Unit	570.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	585.869.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.07	000	Pengadaan Mebel														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	175.324.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.07	000	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	625.296.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.920.464.000,00	
2	07	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	20.843.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	514.966.763,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	536.678.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.311.849.747,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.362.943.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.706.916.000,00	
2	07	01	1.09	000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diharapkan Paiknya				4 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	156.324.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.09	000	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	104.216.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.09	000	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	104.216.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.521.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.09	001	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	821.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
62	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-			643.188.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-									643.188.000,00			
2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	362.648.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07	02	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
						Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro				28 Orang	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	280.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
63	2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-				3.000.000.000,00						3.165.942.000,00		
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	-	-				2.750.000.000,00							2.905.402.000,00	
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi														
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				250 Orang	2.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	2.384.322.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	521.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07	03	1.03		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-	-				250.000.000,00							260.540.000,00	
2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah														
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
64	2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-				1.650.000.000,00							1.763.240.000,00	
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-				1.150.000.000,00							1.224.268.000,00	
2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
						Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				1000 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	312.648.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				75 Orang	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	755.296.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07	04	1.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD				20 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah		156.324.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 04 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	250.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	278.432.000,00		
2	07 04 1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja													
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah		278.432.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 04 1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	260.540.000,00		
2	07 04 1.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				100 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah		260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
65	2 07 05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-		-	1.500.000.000,00					-	1.563.240.000,00		
2	07 05 1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	260.540.000,00		
2	07 05 1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja													
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				20 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah		260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 05 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	750.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	781.620.000,00		
2	07 05 1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah		260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 05 1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				10 Perkara	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah		260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 05 1.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				364 Asosiasi dan Serikat Pekerja	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 05 1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-			-	500.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	521.080.000,00		
2	07 05 1.03 000 1	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)					1 Surat Keputusan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 05 1.03 000 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					526.190 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
66	2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-			-	1.700.000.000,00			-		-	1.771.674.000,00		
2	07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	1.700.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	1.771.674.000,00		
2	07 06 1.01 000 1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan					60 Perusahaan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	729.513.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 06 1.01 000 2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				10 Kasus	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	312.648.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 06 1.01 000 3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				60 Perusahaan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	729.513.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.700.000.000,00						2.820.293.000,00		
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						2.700.000.000,00						2.820.293.000,00		
67	3 32 02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	900.000.000,00			-		-	931.728.000,00		
3	32 02 1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	900.000.000,00			-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan	-	931.728.000,00		
3	32 02 1.01 000 1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	465.864.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3	32	02	1.01	000	2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan											
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				1 Kawasan Transmigrasi	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	465.864.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
68	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-					-	465.918.000,00			
	3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-				Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	465.918.000,00			
3	32	03	1.01	000	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	465.918.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
69	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-					-	1.422.647.000,00			
	3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-	-				Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	1.422.647.000,00			
3	32	04	1.01	000	1	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman											
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				271 Kepala Keluarga	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	556.864.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3	32	04	1.01	000	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman											
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				2 Satuan Permukiman	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	865.783.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							17.984.560.982,00					17.275.818.787,03		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.984.560.982,00						17.275.818.787,03	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							17.422.146.396,00						16.713.404.201,03	
70	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-					-	13.542.629.635,99			
															12.833.887.441,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	451.138.605,75			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	451.138.605,75		
2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen Dokumen	86.471.088,93	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		86.471.088,93	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	78.863.288,94	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		78.863.288,94	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan Laporan	81.433.688,94	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		81.433.688,94	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan Laporan	204.370.538,94	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		204.370.538,94	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	7.525.901.390,75			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	7.525.901.390,75		
2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/Bulan Orang/ Bulan	7.307.134.220,25	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		7.307.134.220,25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan Laporan	80.133.585,25	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		80.133.585,25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen Dokumen	138.633.585,25	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	138.633.585,25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	230.900.755,75			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	230.900.755,75		
2	08 01 1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen Dokumen	230.900.755,75	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	230.900.755,75	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	270.542.752,74			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	270.542.752,74		
2	08 01 1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12.00 Orang	270.542.752,74	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	270.542.752,74	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.987.567.301,75			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	1.278.825.106,75		
2	08 01 1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket Paket	58.061.250,83	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	58.061.250,83	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 01 1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	71.557.250,82	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	71.557.250,82	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 01 1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	66.557.250,82	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	66.557.250,82	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 01 1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	70.807.250,82	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	70.807.250,82	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 01	1.06 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	61.557.250,82	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	61.557.250,82	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 01	1.06 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.525.259.796,82	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	816.517.601,82	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 01	1.06 001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	133.767.250,82	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	133.767.250,82	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					820.369.755,75						820.369.755,75		
2	08 01	1.07 000 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				14 Unit	560.919.377,88	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	560.919.377,88	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 01	1.07 001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	259.450.377,87	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	259.450.377,87	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.945.468.317,75						1.945.468.317,75		
2	08 01	1.08 000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	78.633.585,25	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	78.633.585,25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	607.178.747,25	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	607.178.747,25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.259.655.985,25	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	1.259.655.985,25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			-	-			-	310.740.755,75			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	310.740.755,75		
2	08	01	1.09	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	160.450.377,88	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	160.450.377,88	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	1.09	000	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	150.290.377,87	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	150.290.377,87	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
71	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
			-	-			-	1.495.314.023,00			-		-	1.495.314.023,02		
2	08	02	1.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi										
			-	-			-	294.391.336,50			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	294.391.336,51		
2	08	02	1.01	000	5	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi				25 Kebijakan	105.297.112,17	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	105.297.112,17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 02	1.01 0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi													
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi				9 Laporan	105.297.112,16	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	105.297.112,17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 02	1.01 0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi													
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				1 Dokumen	83.797.112,17	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	83.797.112,17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 02	1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	1.128.625.574,33			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	1.128.625.574,34		
2	08 02	1.02 0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi													
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				5 Orang	994.297.112,16	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	994.297.112,17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 02	1.02 0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi													
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				3 Lembaga	134.328.462,17	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	134.328.462,17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 02	1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	72.297.112,17			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	72.297.112,17		
2	08 02	1.03 0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi				30 Orang	72.297.112,17	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	72.297.112,17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
72	2 08 03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-			-	853.165.173,00				-	-	853.165.173,00		
	2 08 03 1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-			-	422.555.184,00				-	-	422.555.184,00		
2	08 03 1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				9 Dokumen	68.060.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	68.060.092,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 03 1.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				9 Perangkat Daerah	354.495.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	354.495.092,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 03 1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-			-	265.455.761,00				-	-	265.455.761,00		
2	08 03 1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				50 Orang	154.796.669,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	154.796.669,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 03 1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				85 Layanan	110.659.092,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	110.659.092,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 03 1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-			-	165.154.228,00				-	-	165.154.228,00		
2	08 03 1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				25 Orang	120.015.136,00	Kota Palangkaraya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	120.015.136,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 03	1.03 000 3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				100 Orang	45.139.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	45.139.092,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
73	2 08 04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-		-	183.543.129,00					-	183.543.129,00		
2	08 04	1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-		-	87.396.439,50			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	87.396.439,50		
2	08 04	1.01 000 3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	87.396.439,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	87.396.439,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 04	1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	96.146.689,50			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	96.146.689,50		
2	08 04	1.03 000 1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen Layanan	96.146.689,50	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	96.146.689,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
74	2 08 05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-		-	254.255.425,00					-	254.255.425,00		
2	08 05	1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	254.255.425,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	254.255.425,00		
2	08 05	1.01 000 1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi													
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	85.325.212,50	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	85.325.212,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 05	1.01 000 2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				1 Dokumen	168.930.212,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	168.930.212,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
75	2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	419.797.699,00					-	419.797.699,00		
	2 08 06 1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	-	-			-	219.414.814,00				Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	219.414.814,00		
2	08 06 1.01 000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				10 Kab/kota Dokumen	87.472.081,50	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	87.472.081,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 06 1.01 000 3	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														
			jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				10 Kab/kota perangkat daerah	131.942.732,50	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	131.942.732,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 06 1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-	-			-	200.382.885,00				Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	200.382.885,00		
2	08 06 1.02 000 5	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota														
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				10 Kab/kota Kegiatan	79.925.802,50	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	79.925.802,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 06 1.02 000 7	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi														
			jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi				10 Kab/kota Dokumen	120.457.082,50	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	120.457.082,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
76	2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	673.441.311,01					-	673.441.311,01		
	2 08 07 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	124.066.366,67				Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	124.066.366,67		
2	08 07 1.01 000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	124.066.366,67	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	124.066.366,67	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 07	1.01 000 4	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi													
			Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu Kewenangan Provinsi				14 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 07	1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	549.374.944,34			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	549.374.944,34		
2	08 07	1.02 000 5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi													
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi				30 Orang	149.518.366,67	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	149.518.366,67	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08 07	1.02 000 7	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi													
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi				30 Layanan	399.856.577,67	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	399.856.577,67	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					562.414.586,00						562.414.586,00		
77	2 14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	-	-	231.226.055,00						231.226.055,00		
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					231.226.055,00				Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah		231.226.055,00		
2	14 02	1.01 000 2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi													
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				1 Dokumen	166.374.377,50	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	166.374.377,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14 02	1.01 000 3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK				1 Laporan	64.851.677,50	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	64.851.677,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
78	2 14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	-	-	159.598.593,00						159.598.593,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	-	63.326.546,50			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	63.326.546,50		
2	14	03	1.01	001	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
						Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.				1 Dokumen	63.326.546,50	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	63.326.546,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	-	-	96.272.046,50			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	96.272.046,50		
2	14	03	1.02	000	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana														
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				40 Organisasi	96.272.046,50	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	96.272.046,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
79	2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	-	-	171.589.938,00			-		-	-	171.589.938,00		
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	171.589.938,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	171.589.938,00		
2	14	04	1.01	001	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK														
						Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				1 Dokumen	171.589.938,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	171.589.938,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Dinas Ketahanan Pangan						16.827.859.945,00							16.436.500.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						16.767.859.945,00							16.436.500.000,00	
80	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	10.682.859.945,00			-		-	-	10.894.500.000,00		
2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	365.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	390.000.000,00		
2	09	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	265.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01	1.01 000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01	1.01 000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		37.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01	1.01 000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		27.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01	1.01 000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		17.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	7.649.295.244,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	7.689.000.000,00		
2	09 01	1.02 000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/ Bulan	7.418.935.244,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		7.450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01	1.02 000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	186.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		190.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01	1.02 000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01	1.02 000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	24.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	30.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	33.000.000,00		
2	09	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	25.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	27.500.000,00		
2	09	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	27.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	650.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	676.000.000,00		
2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	17.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	195.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	17.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan											
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	32.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan											
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	415.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-	100.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	110.000.000,00		
2	09	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			9 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
2	09 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	830.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	857.000.000,00		
2	09 01 1.08 000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01 1.08 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	285.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01 1.08 000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01 1.08 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	460.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.033.564.701,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.112.000.000,00		
2	09 01 1.09 000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihavarkan Pajaknya				5 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01 1.09 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01 1.09 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 01 1.09 001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	833.564.701,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
81	2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	-	-			-	15.000.000,00			-		-	17.000.000,00		
2	09 02 1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	15.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	17.000.000,00		
2	09 02 1.01 000 3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia				2 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	17.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
82	2 09 03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-		-	5.185.000.000,00					-	4.580.000.000,00		
	2 09 03 1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-		-	2.050.000.000,00				Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.380.000.000,00		
2	09 03 1.01 000 2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.01 000 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.01 000 6	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.01 000 8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.01 000 9	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.01 001 0	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi														
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.01 001 1	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi														
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				11 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	815.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.01 001 3	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-			-	1.115.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.145.000.000,00		
2	09 03 1.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal													
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi													
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				65 Ton	235.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	240.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.02	0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi													
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				65 Ton	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	715.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi													
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	155.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-				2.020.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	2.055.000.000,00		
2	09 03 1.04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	710.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)													
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	615.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun													
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	655.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 03 1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
83	2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-	345.000.000,00					-	375.000.000,00		
	2 09 04 1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	-	-			-	35.000.000,00				Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	40.000.000,00		
	2 09 04 1.01 000 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2 09 04 1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	-			-	310.000.000,00				Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	335.000.000,00		
	2 09 04 1.02 000 3	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2 09 04 1.02 000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Laporan	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	185.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2 09 04 1.02 000 5	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi														
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
84	2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	540.000.000,00					-	570.000.000,00		
	2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	540.000.000,00				Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	570.000.000,00		
	2 09 05 1.01 000 6	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				4 Sertifikat	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2 09 05 1.01 000 7	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				3 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2 09 05 1.01 000 8	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 05 1.01 000 9	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		155.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09 05 1.01 001 0	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan		260.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
X			NON URUSAN											0,00		
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX											0,00		
85	X XX 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											0,00		
X	XX 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	60.000.000,00			-	-	-	0,00		
X	XX 01 1.05 000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Dinas Lingkungan Hidup											80.369.602.000,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											80.369.602.000,00		
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											80.369.602.000,00		
86	2 11 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											18.689.602.000,00		
2	11 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	611.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	687.500.000,00		
2	11 01 1.01 000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan		550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 1.01 000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 1.01 000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 1.01 000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
2	11	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	56.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	17.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	10.020.554.871,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	10.080.000.000,00			
2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/ Bulan	10.000.554.871,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	10.050.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	60.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	70.000.000,00			
2	11	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
2	11	01	1.03	000	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada														
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	45.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	460.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	490.000.000,00			
2	11	01	1.05	000	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.05	000	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi														
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.05	000	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.488.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.660.000.000,00			
2	11	01	1.06	000	01	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.06	000	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	650.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.06	000	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.06	000	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.06	000	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01	1.06 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01	1.06 001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			0				10	53.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			2.517.102.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.567.102.000,00		
2	11 01	1.07 000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	717.102.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	717.102.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01	1.07 000 5	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01	1.07 000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01	1.07 001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			1.760.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.760.000.000,00		
2	11 01	1.08 000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01	1.08 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan	1.250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	1.260.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.375.000.000,00			
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20 Unit	700.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	60.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
87	2	11	02		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	500.000.000,00			-		-	580.000.000,00			
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-	-	-	350.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	380.000.000,00			
2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	02	1.01	0005	Penetapan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	325.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-	-	-	150.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00			
2	11	02	1.02	0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	02	1.02	0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS								-		-				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				3 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
88	2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	15.005.000.000,00					-	15.375.000.000,00		
	2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	14.805.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	15.175.000.000,00		
2	11 03 1.01 000 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 03 1.01 000 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 03 1.01 000 4	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				1 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 03 1.01 000 5	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi														
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 03 1.01 000 9	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				12 Lokasi	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 03 1.01 001 1	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 03 1.01 001 2	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
2	11	03	1.01	001	3	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi													
						Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan			1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	03	1.01	001	4	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi													
						Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan			1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	03	1.01	001	5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi													
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan			1 Dokumen	12.120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	12.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	03	1.02			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	200.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00			
2	11	03	1.02	000	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat													
						Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
89	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-	-	500.000.000,00			-		-	1.400.000.000,00			
2	11	04	1.01			Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	-	-	-	500.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.400.000.000,00			
2	11	04	1.01	000	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati													
						Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	04	1.01	000	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi			1 Ha	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	04	1.01	000	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati													
						Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati			50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	04	1.01	000	9	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
90	2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	15.580.000.000,00					-	15.675.000.000,00		
	2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	15.580.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	15.675.000.000,00		
2	11 05 1.01 000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 05 1.01 000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	15.570.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	15.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
91	2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	2.700.000.000,00					-	2.650.000.000,00		
	2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	2.700.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.650.000.000,00		
2	11 06 1.01 000 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				3 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 06 1.01 000 5	Pembangunan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
							Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				5 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				162 Badan Usaha	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	06	1.01	0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup															
							Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD				1 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
92	2	11	07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-				-	400.000.000,00					-	400.000.000,00		
2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-	-				-	200.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00		
2	11	07	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-	-				-	200.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00		
2	11	07	1.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH															
							Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
93	2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-				-	825.000.000,00					-	925.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	825.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	925.000.000,00			
2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				1 Dokumen	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	08	1.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				60 Orang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	08	1.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				1 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
94	2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-		-	650.000.000,00			-		-	650.000.000,00			
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	650.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	650.000.000,00			
2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				3 Entitas	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
95	2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-		-	1.350.000.000,00			-		-	1.200.000.000,00			
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-	-		-	1.350.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.200.000.000,00			
2	11	10	1.01	0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi				1 Perkara	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	10	1.01	0004	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
							Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya				12 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan		275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	10	1.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi															
							Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi				1 Perkara	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	10	1.01	0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi															
							Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi				1 Perkara	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan		375.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi															
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Pengaduan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
96	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-				-	23.002.327.500,00						-	22.825.000.000,00	
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-				-	23.002.327.500,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan		22.825.000.000,00		
2	11	11	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	1.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	1.01	0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi															
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan		1.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	1.01	0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional															
							Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional				1 Unit	14.602.327.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan		14.650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	1.01	0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani				866,03 Ton	6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	6.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	1.01	001	4	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota										
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					14.631.919.318,00						19.109.299.930,00		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		14.620.769.318,00						17.794.299.930,00		
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI		14.620.769.318,00						17.794.299.930,00		
97	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		13.550.769.318,00						15.974.299.930,00		
2	12	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		185.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	255.000.000,00		
2	12	01	1.01	000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI	
2	12	01	1.01	000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI	
2	12	01	1.01	000	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI	
2	12	01	1.01	000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI	
2	12	01	1.01	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI	
2	12	01	1.01	000	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.01	0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.02					4.155.126.797,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	4.453.451.897,00		
2	12	01	1.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/Bulan	4.085.126.797,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	4.373.451.897,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.02	0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.02	0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.02	0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.02	0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.02	0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.02	0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	165.000.000,00		
2	12 01 1.03 000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.03 000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.03 000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.03 000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.03 000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.03 000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.03 000 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	185.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	240.000.000,00		
2	12 01 1.05 000 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.05 000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.05 000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	15.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.05 000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.05 000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	75.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.05 001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	10.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.05 001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
								444.848.033,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	534.848.033,00		
2	12 01 1.06 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.06 000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	20.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 01 1.06 000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12	01	1.06	000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12	01	1.06	000	7	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12	01	1.06	000	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	249.848.033,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	324.848.033,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12	01	1.06	001	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12	01	1.06	001	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	9.545.000.000,00		
2	12	01	1.07	000	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.07	000	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	1.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.07	000	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	6.313.794.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	7.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.07	000	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.07	000	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud										
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.07	000	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.07	001	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.07	001	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	431.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	470.000.000,00		
2	12	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	420.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI	
2	12 01	1.08 000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Laporan	10.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI
2	12 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	276.000.000,00				-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	311.000.000,00	
2	12 01	1.09 000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2 Unit	76.000.000,00		Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	76.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI
2	12 01	1.09 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2 Unit	40.000.000,00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI
2	12 01	1.09 000 5	Pemeliharaan Mebel				1 Unit	10.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI
2	12 01	1.09 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20 Unit	40.000.000,00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI
2	12 01	1.09 000 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1 Unit	10.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI
2	12 01	1.09 000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				1 Unit	20.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI
2	12 01	1.09 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	20.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI
2	12 01	1.09 001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.09	001	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	01	1.09	001	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah										
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
98	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-						600.000.000,00		
			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-	-		-	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	100.000.000,00		
2	12	02	1.01	000	1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional										
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	02	1.01	000	2	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi										
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	02	1.01	000	3	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi										
			Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	02	1.01	000	4	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12	02	1.01	000	5	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admindak terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12 02 1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-	-			-	240.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	400.000.000,00		
2	12 02 1.02 000 1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	240.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12 02 1.02 000 2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12 02 1.02 000 3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12 02 1.02 000 4	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12 02 1.02 000 5	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12 02 1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-	-			-	65.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	100.000.000,00		
2	12 02 1.03 000 1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12 02 1.03 000 2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
99	2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	215.000.000,00				-	500.000.000,00			
	2 12 03 1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	0,00				Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00		
2	12 03 1.01 000 1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12 03 1.01 000 2	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12 03 1.01 000 3	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12 03 1.01 000 4	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12 03 1.01 000 5	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admindak terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admindak terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12 03 1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-	-			-	165.000.000,00				Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	300.000.000,00		
2	12 03 1.02 000 1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				0 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12 03 1.02 000 2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 03	1.02 000 3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 03	1.02 000 4	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 03	1.02 000 5	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 03	1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	50.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	200.000.000,00		
2	12 03	1.03 000 1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 03	1.03 000 2	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
100	2 12 04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	-	-	400.000.000,00			-		-	570.000.000,00		
2	12 04	1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	0,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00		
2	12 04	1.01 000 1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 04	1.01 000 2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 04	1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	-	-	-	335.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	490.000.000,00		
2	12 04	1.02 000 1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 04	1.02 000 2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 04	1.02 000 3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 04	1.02 000 4	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 04	1.02 000 5	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII	
2	12 04	1.02 000 6	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12 04	1.02 000 7	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12 04	1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	-	-	-	65.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	80.000.000,00		
2	12 04	1.03 000 1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12 04	1.03 000 2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
101	2 12 05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	-	-	150.000.000,00			-		-	150.000.000,00		
2	12 05	1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	-	-	-	-	150.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	150.000.000,00		
2	12 05	1.01 000 1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
2	12 05	1.01 000 2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
X			NON URUSAN					11.150.000,00						1.315.000.000,00		
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					11.150.000,00						1.315.000.000,00		
102	X XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	11.150.000,00			-		-	1.315.000.000,00		
X	XX	01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	10.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00		
X	XX	01 1.05 000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
X	XX	01	1.08					1.150.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	1.300.000.000,00		
X	XX	01	1.08	0004												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.150.000,00	-	-	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	1.300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	
								56.315.505.326,00						56.260.619.983,00		
2								56.315.505.326,00						56.260.619.983,00		
2	13							56.315.505.326,00						56.260.619.983,00		
103	2	13	01					31.740.505.326,00						31.625.619.983,00		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.383.756.497,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	8.492.000.000,00		
2	13	01	1.01	0001												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	15.750.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.01	0004												
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	19.146.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.01	0005												
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				40 Dokumen	37.125.135,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.01	0006												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	10.284.783,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.01	0007												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25 Laporan	8.301.450.079,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	8.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.02					7.168.926.099,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	7.260.000.000,00		
2	13	01	1.02	0001												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/Bulan	7.110.571.638,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		7.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.02	000	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2300 Dokumen	34.854.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.02	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	13.499.985,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.02	000	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	9.999.876,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		63.500.000,00		
2	13	01	1.03	000	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				10 Dokumen	9.767.099,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.03	000	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.03	000	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	8.345.148,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		1.093.000.000,00		
2	13	01	1.05	000	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	461.867.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		465.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.05	000	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kenepegawaian				10 Dokumen	8.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.05	000	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	240.004.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.05	001	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	375.029.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	380.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.06				-	3.966.015.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.988.325.000,00		
2	13	01	1.06	000			Penyediaan Komponen Instalasi									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	250.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.06	000			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	692.325.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.06	000			Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan				12 Paket	66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.06	000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.06	000			Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.06	000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	810.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.06	001			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.610.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.07				-	4.800.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	4.450.000.000,00		
2	13	01	1.07	000			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.07	000			Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	1.07	000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	700.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
2	13	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	3.378.794.983,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.378.794.983,00			
2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	29.120.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	29.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Laporan	849.674.983,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	849.674.983,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	2.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	2.900.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.900.000.000,00			
2	13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				28 Unit	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71 Unit	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	2.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24 Unit	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
104	2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-	-	-	650.000.000,00			-		-	700.000.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)										
														Nasional					Daerah								
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-						-	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan	-	700.000.000,00							
2	13	03	1.01	000 2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																						
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan	-											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	1.01	000 3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																						
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan	-											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
105	2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-																				
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-																				
2	13	04	1.01	000 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa																						
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa				1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan	-											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	1.01	000 2	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa																						
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan	-											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	1.01	000 5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																						
						Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan	-											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	1.01	000 6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																						
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan	-											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
2	13	04	1.01	0007	Facilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				40 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	04	1.01	0008	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	04	1.01	0009	Facilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa				180 Orang	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				160 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				2 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	04	1.01	0016	Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
106	2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	-	-	14.200.000.000,00					-	14.200.000.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
2	13	05	1.01	000	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	14.200.000.000,00			-	-	14.200.000.000,00				
2	13	05	1.01	000	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					1 Dokumen	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	7.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	1.01	000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya					2 Lembaga	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	1.01	000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	1.01	000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	1.01	000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa														
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa					1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	1.01	000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Dinas Perhubungan					58.053.048.570,00						74.119.459.823,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					58.053.048.570,00						74.119.459.823,00		
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					58.053.048.570,00						74.119.459.823,00		
107	2	15	01					17.766.573.891,00						19.344.459.823,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
2	15	01	1.01					2.070.014.068,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.300.000.000,00		
2	15	01	1.01	000												
			1													
							8 Dokumen	1.770.014.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	1.01	000												
			6													
							3 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	1.02					8.283.459.823,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	8.483.459.823,00		
2	15	01	1.02	000												
			1													
							69 Orang/ Bulan	8.273.459.823,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	8.473.459.823,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	1.02	000												
			5													
							0 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	1.03					30.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00		
2	15	01	1.03	000												
			2													
							1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	1.03	000												
			5													
							1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	1.05					936.100.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	946.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
2	15	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				1 Paket	336.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	346.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	1.992.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.045.000.000,00			
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				3 Dokumen	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				10 Laporan	725.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-		-	90.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00			
2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2 Unit	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-		-	2.315.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.520.000.000,00			
					Pemerintahan Daerah														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.050.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.000.000.000,00		
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					20 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2 Unit	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
108	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	37.836.474.679,00			-		-	53.325.000.000,00		
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	10.200.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	15.200.000.000,00		
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					100 Unit	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	15.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
							Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				6 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	1.03				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-		-	14.961.474.679,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	25.400.000.000,00		
2	15	02	1.03	0001			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B													
							Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	1.03	0006			Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B													
							Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi				2 Unit	179.893.679,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	1.03	0010			Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang													
							Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	14.081.581.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		15.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	1.03	0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)													
							Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		10.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	1.05				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-		-	2.050.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	2.100.000.000,00		
2	15	02	1.05	0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi													
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				2 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	1.05	0005			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi													
							Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				2 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	1.05	0007			Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas													
							Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan				20 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	-	-	-	-	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	100.000.000,00			
2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-	-	-	50.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	50.000.000,00			
2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	10.175.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	10.175.000.000,00			
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				3 Laporan	10.175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	10.175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	300.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	300.000.000,00			
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				2 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
109	2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	-	-	1.400.000.000,00			-		-	1.400.000.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	1.400.000.000,00			-	-	1.400.000.000,00				
2	15	03	1.10	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan				2 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	03	1.10	0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia				40 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
110	2	15	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-	-	-	-	1.050.000.000,00						50.000.000,00			
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	-	-	-	-	1.000.000.000,00				-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00		
2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian														
						Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	05	1.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	-	-	-	-	50.000.000,00				-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	50.000.000,00		
2	15	05	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah														
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
						Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					49.079.741.215,00						49.151.838.132,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						46.915.179.241,00						47.931.838.132,00		
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						45.806.671.241,00						47.023.330.132,00		
111	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	18.712.194.598,00							21.095.084.709,00		
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	72.861.000,00				-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	73.000.000,00		
2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	72.861.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	73.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.02					9.403.276.323,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	9.794.167.854,00		
2	16	01	1.02	000												
				1												
							91 Orang/ Bulan	9.124.956.323,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	9.515.667.854,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.02	000												
				2												
							1 Dokumen	278.320.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	278.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.03					99.310.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	99.310.000,00		
2	16	01	1.03	000												
				2												
							1 Dokumen	99.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	99.310.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.05					290.900.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	310.000.000,00		
2	16	01	1.05	000												
				2												
							196 Paket	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.05	000												
				3												
							2 Dokumen	100.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.05	000												
				9												
							50 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.06					687.965.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	597.700.000,00		
2	16	01	1.06	000												
				1												
							1 Paket	30.700.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	37.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.06	000												
				5												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	627.265.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	530.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	4.447.077.420,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	8.017.102.000,00		
			Urusan Pemerintah Daerah													
2	16	01	1.07	000	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				8 Unit	995.967.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	717.102.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.07	000	5	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	351.110.420,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.07	000	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.07	000	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	7.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	1.943.873.122,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.655.873.122,00		
			Pemerintahan Daerah													
2	16	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.928.873.122,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.640.873.122,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.766.931.733,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	547.931.733,00		
2	16	01	1.09	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				24 Unit	416.931.733,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	266.931.733,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.09	000	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunjung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunjung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	151.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
112	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-					-	16.870.027.735,00		
2	16	02	1.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	-	-				Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	16.870.027.735,00		
2	16	02	1.01	001	4	Relasi Media										
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				63 Laporan	13.924.925.235,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	13.995.265.235,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	02	1.01	001	5	Penyusunan Konten										
			Jumlah Konten Informasi Publik				500 Konten	1.042.521.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	644.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	02	1.01	001	6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik										
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				30 Orang	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	02	1.01	001	8	Diseminasi Informasi										
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	02	1.01	001	9	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik										
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	02	1.01	002	0	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik										
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				2 Laporan	1.600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
2	16	02	1.01	002	1	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				20 Komunitas	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	02	1.01	002	2	Pelayanan Informasi Publik				2 Permohonan	482.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	282.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	02	1.01	002	3	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				1 Rekomendasi	63.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	63.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	02	1.01	002	4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Media	175.312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	175.312.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
113	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-	-	-	9.336.717.688,00					-	9.058.217.688,00			
2	16	03	1.02			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	9.336.717.688,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	9.058.217.688,00			
2	16	03	1.02	001	3	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	03	1.02	001	6	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				4 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	03	1.02	002	0	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				1 Aplikasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	03	1.02	002	3	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				10 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	03	1.02	002	6	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE				26 Perangkat Daerah	5.128.314.803,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	5.128.314.803,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	03	1.02	002	9	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1.808.402.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunjung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.529.902.885,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					550.000.000,00						550.000.000,00		
114	2	20	02					550.000.000,00						550.000.000,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL													
2	20	02	1.01					550.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	550.000.000,00		
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi													
2	20	02	1.01	0007												
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral													
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				10 Orang	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunjung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	20	02	1.01	0008												
			Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral													
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunjung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	20	02	1.01	0009												
			Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional													
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	20	02	1.01	0010												
			Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar													
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunjung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	20	02	1.01	0011												
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia													
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunjung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	21							558.508.000,00						558.508.000,00		
115	2	21	02					558.508.000,00						558.508.000,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI													
2	21	02	1.01					443.508.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	343.508.000,00		
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi													
2	21	02	1.01	0001												
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi													
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	21	02	1.01	0003												
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	166.508.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	166.508.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	21	02	1.01	000	4		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				1 Perangkat Daerah	152.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	152.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	21	02	1.02				-	115.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00		
2	21	02	1.02	000	1		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				1 Perangkat Daerah	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
X							NON URUSAN							1.220.000.000,00		
X	XX						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.220.000.000,00		
116	X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1.220.000.000,00		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.242.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	470.000.000,00		
X	XX	01	1.06	000	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.242.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	470.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
X	XX	01	1.08				-	922.561.974,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	750.000.000,00		
X	XX	01	1.08	000	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	922.561.974,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							13.515.076.055,00		
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.515.076.055,00		
2	17						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							13.515.076.055,00		
117	2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							10.402.059.855,00		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	42.327.565,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	81.940.000,00		
2	17	01	1.01	000	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.01	000	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.01	000	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.01	000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.857.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	5.450.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.01	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	8.140.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.01	000	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	4.350.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.01	000	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	3.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	38.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	6.223.441.405,00		
2	17	01	1.02	000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	5.943.050.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	6.168.616.405,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.02	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.785.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	34.825.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.02	000	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				18 Laporan	9.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	45.339.600,00	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	61.000.000,00		
2	17	01	1.03	000	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10 Dokumen	40.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	43.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.03	000	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4.839.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	17.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	50.112.000,00	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	257.132.000,00		
2	17	01	1.05	000	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	94.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.05	000	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	25.472.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	152.832.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.05	001	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	11.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	5.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
2	17	01	1.05	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan				30 Orang	13.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	4.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	566.420.222,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	673.406.000,00			
2	17	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi				634 Paket	18.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	32.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	17	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1611 Paket	79.590.222,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	90.478.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	17	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	17	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				757 Paket	29.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	36.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	17	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				1152 Dokumen	12.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	10.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	17	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu				360 Laporan	31.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	6.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	17	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				1474 Laporan	394.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	477.828.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-									773.148.050,00			
2	17	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	588.348.050,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	352.653.278,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	184.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-										2.081.426.400,00		
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				952 Laporan	7.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	256.675.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	180.055.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1957 Laporan	1.740.590.502,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	1.886.371.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	310.941.573,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	250.566.000,00		
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				62 Unit	261.689.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	195.416.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				170 Unit	49.251.645,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.150.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
118	2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-			-	109.252.500,00						110.000.000,00		
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	45.000.000,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	45.000.000,00		
2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
						Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				42 Unit Usaha	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	64.252.500,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	65.000.000,00		
2	17	02	1.02	0003	Fasilitasi izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
						Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				55 Unit Usaha	64.252.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
119	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	1.453.646.360,00				-	1.453.336.200,00				
	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	251.310.160,00			Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	-	251.000.000,00			
	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi															
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi					87 Unit Usaha	251.310.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	-	251.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.202.336.200,00			Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	-	1.202.336.200,00			
	2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi															
							Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan					30 Unit Usaha	1.202.336.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	-	1.202.336.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
120	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-			-	125.000.000,00					-	125.500.000,00			
	2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	125.000.000,00			Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	-	125.500.000,00			
	2	17	04	1.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan															
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan					91 Unit Usaha	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	-	125.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
121	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	675.741.750,00					-	675.800.000,00			
	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	675.741.750,00			Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	-	675.800.000,00			
	2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi															
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					240 Orang	675.741.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	-	675.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
122	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-			-	13.076.188.778,00					-	527.310.000,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
2	17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	13.076.188.778,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	527.310.000,00		
2	17 06 1.01 000 2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				96 Unit Usaha	13.076.188.778,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	527.310.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
123	2 17 07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	21.006.137.483,00			-		-	191.070.000,00		
2	17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	21.006.137.483,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	191.070.000,00		
2	17 07 1.01 000 1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				104674 Unit Usaha	21.006.137.483,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	191.070.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
124	2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-			-	671.145.749,00			-		-	30.000.000,00		
2	17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-	-			-	671.145.749,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	30.000.000,00		
2	17 08 1.01 000 1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				480 Unit Usaha	671.145.749,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						19.244.974.970,00						16.744.617.062,00	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
125	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %			100 %	15.853.930.773,00						100 %	13.822.920.897,00	
2	18 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-			65 Dokumen	60.500.000,00			-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	55.500.000,00		
2	18 01 1.01 000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				65 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25 Laporan	20.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	20.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 %	9.003.757.067,00			-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	9.003.757.067,00		
2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/Bulan	8.978.757.067,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	8.978.757.067,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				25 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-				100 %	60.000.000,00			-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	80.000.000,00		
2	18	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				25 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
2	18	01	1.05	000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	260.539.000,00			-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	225.539.000,00		
2	18	01	1.05	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
				2		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.05	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
				9		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	70.539.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	95.539.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.05	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan														
				1		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.021.796.293,00			-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	777.912.927,00		
2	18	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi														
				1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	57.912.927,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
				2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
				4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
				5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														
				6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2000 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
				8															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01	1.06 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	486.796.293,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	1.742.536.961,00			-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	1.073.910.451,00		
2	18 01	1.07 000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1.221.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	323.910.451,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01	1.07 001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	294.253.592,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01	1.07 001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	227.283.369,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	1.724.801.452,00			-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	1.786.301.452,00		
2	18 01	1.08 000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25 Laporan	27.102.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	27.102.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01	1.08 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	299.055.052,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	360.555.052,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01	1.08 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				35 Laporan	1.398.643.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	1.398.643.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	1.980.000.000,00			-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	820.000.000,00		
2	18 01	1.09 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		320.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01	1.09 001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
126	2 18 02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya dokumen peta potensi Investasi	2 Kabupaten/Kota		2 Kabupaten/Kota	788.567.658,00					2 Kabupaten/Kota	718.119.918,00		
2	18 02	1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Data Kebijakan Daerah yang dikeluarkan Kab/Kota se Kalimantan Tengah terkait Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	-		2 Kabupaten/Kota	134.756.000,00			-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		134.756.000,00		
2	18 02	1.01 000 1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	134.756.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		134.756.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 02	1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi	-		2 Kabupaten/Kota	653.811.658,00			-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		583.363.918,00		
2	18 02	1.02 000 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi													
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	123.585.127,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		153.137.387,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 02	1.02 000 5	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	530.226.531,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		430.226.531,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
127	2 18 03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	595.000.000,00					4 Kegiatan	327.027.942,00		
2	18 03	1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	-		4 Kegiatan	595.000.000,00			-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		327.027.942,00		
2	18 03	1.01 000 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				3 Dokumen	470.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		271.968.211,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 03	1.01 000 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				4 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	55.059.731,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
128	2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang Terbit Tepat Waktu Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan	82% 595Dokumen			595 Dokumen 82 %	845.333.803,00					82% 595Dokumen	632.356.713,00		
	2 18 04 1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Jumlah Perizinan Yang Terbit Tepat Waktu	-			82 % 595 Dokumen	845.333.803,00				Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	632.356.713,00		
2	18 04	1.02 000 6	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				25 Pelaku Usaha	340.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 04	1.02 000 7	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				200 Pelaku Usaha	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	235.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 04	1.02 000 8	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko													
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				30 Kegiatan Usaha	280.333.803,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	172.356.713,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
129	2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PMA dalam US \$ Ribu Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN dalam Juta Rupiah Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit) Jumlah nilai investasi berskala nasional (juta Rupiah)	9.630.000Juta Rupiah 197.876.71US \$ Ribu 6.370.000Juta Rupiah 6.741.000Juta Rupiah 807 Unit 9.100.000Juta Rupiah			186.986.30 US \$ Ribu 5,20 % 6.370.000Juta Rupiah 807 Unit 9.100.000Juta Rupiah	1.012.142.736,00						9.630.000Juta Rupiah 197.876.71US \$ Ribu 6.741.000Juta Rupiah 867Unit 5,82%	1.061.941.592,00	
	2 18 05 1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMA Dalam US \$ Ribu PMDN Dalam Juta Rupiah	-			807 Unit 9.100.000Juta Rupiah 5,20 % 186.986,30 US \$ Ribu 6.370.000Juta Rupiah	1.012.142.736,00				Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,	-	1.061.941.592,00		
2	18 05	1.01 000 4	Pengawasan Penanaman Modal													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				16 Kegiatan usaha	531.142.736,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		93.701.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya												
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				450 Kegiatan usaha	127.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		497.624.052,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha												
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				100 Pelaku Usaha	353.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		470.616.240,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
130	2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Informasi data Perizinan berusaha yang terkelola dengan baik	5 Kabupaten/Kota	150.000.000,00					5 Kabupaten/Kota	182.250.000,00			
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Informasi Data Perizinan Berusaha Yang Terkelola Dengan Baik	5 Kabupaten/Kota	150.000.000,00				Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		182.250.000,00			
2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik												
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				7 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		182.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
			Dinas Pemuda dan Olahraga						95.828.994.204,00						23.385.755.499,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						94.228.994.204,00							21.210.755.499,00	
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						94.228.994.204,00							21.210.755.499,00	
131	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	17.513.994.204,00							10.190.043.589,00		
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	228.000.000,00							145.000.000,00		
2	19	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD												
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	142.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	45.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	7.885.152.591,00		-	-	-	7.257.607.206,00		
2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/ Bulan	7.867.152.591,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7.232.607.206,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	153.000.000,00		-	-	-	170.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
2	19	01	1.03	000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.03	000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.03	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	195.000.000,00			-	-	-	300.000.000,00		
2	19	01	1.05	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				79 Paket	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.05	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.869.841.613,00			-	-	-	683.636.358,00		
2	19	01	1.06	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	634.841.613,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	44.571.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.06	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.06	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	22.919.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.06	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4382 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	725.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	366.146.158,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	1.06	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
2	19	01	1.06	001	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
2	19	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-	-	-	950.000.000,00			-	-	-	918.800.000,00		
						Urusan Pemerintah Daerah														
2	19	01	1.07	000	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan														
2	19	01	1.07	000	5	Pengadaan Mebel					5 Paket	575.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan														
2	19	01	1.07	000	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan														
2	19	01	1.07	001	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					30 Unit	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	248.800.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
2	19	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	-	528.000.000,00			-	-	-	525.000.025,00		
						Pemerintahan Daerah														
2	19	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25.000.025,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
2	19	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					7 Laporan	510.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
2	19	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	5.705.000.000,00			-	-	-	190.000.000,00		
						Pemerintahan Daerah														
2	19	01	1.09	000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					3 Unit	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya														
2	19	01	1.09	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan														
2	19	01	1.09	000	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					26 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.495.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
132	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	-	-	5.710.000.000,00					-	1.277.348.750,00			
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	4.460.000.000,00					-	802.348.750,00			
2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														
					Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				1150 Orang	2.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	37.459.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	02	1.01	0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi														
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termantapkan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	47.600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
					Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				6 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	230.982.275,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														
					Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi														
					Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				100 Persentase	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	58.395.475,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				134 Orang	485.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	123.962.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	02	1.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi														
					Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi				14 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				400 Orang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	83.950.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	02	1.02				-	1.250.000.000,00			-	-	-	475.000.000,00		
2	19	02	1.02	000	4	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi										
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				9 Organisasi	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	475.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
133	2	19	03				-	68.005.000.000,00			-	-	-	6.098.363.160,00		
2	19	03	1.01				-	56.495.000.000,00			-	-	-	2.907.284.246,00		
2	19	03	1.01	000	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha										
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	149.182.282,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	1.01	000	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				2 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	106.009.470,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	1.01	000	4	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi										
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				9 Unit	55.995.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.652.092.494,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	1.02				-	2.750.000.000,00			-	-	-	1.306.059.224,00		
2	19	03	1.02	000	4	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga										
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				210 Orang	2.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	367.650.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	1.02	000	5	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi										
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				1 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	163.859.224,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	1.02	000	6	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				2 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	774.550.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19 03 1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Seleksi Atlet Daerah	-	-			-	1.500.000.000,00			-	-	-	1.645.000.000,00		
2	19 03 1.03 000 1		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19 03 1.03 000 6	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19 03 1.03 000 7	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1 Pelatda	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19 03 1.03 000 9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				15 Orang	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.145.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19 03 1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	7.260.000.000,00			-	-	-	240.019.690,00		
2	19 03 1.04 000 3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				6 Dokumen	6.380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	140.019.690,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19 03 1.04 000 5	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi														
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				4 Dokumen	880.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
134	2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	3.000.000.000,00			-	-	-	3.645.000.000,00		
2	19 04 1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	3.000.000.000,00			-	-	-	3.645.000.000,00		
2	19 04 1.01 000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19 04 1.01 000 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19 04 1.01 000 3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	111.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19 04	1.01 000 5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi													
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	183.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19 04	1.01 000 7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi													
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang dikelola dan dimanfaatkan				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19 04	1.01 000 8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan													
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				0 Organisasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
X			NON URUSAN													
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
135	X XX 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
X	XX 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	1.600.000.000,00			-	-	-	2.175.000.000,00		
X	XX 01	1.08 000 4	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.175.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata													
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
136	2 22 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
2	22 01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	690.000.000,00			-	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	872.600.000,00		
2	22 01	1.01 000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	518.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01	1.01 000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	259.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 01	1.01 000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.01	0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.02					11.789.189.071,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	12.241.200.000,00		
2	22	01	1.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/Bulan	11.289.189.071,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	11.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.02	0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	691.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.02	0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.02	0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.03					275.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	275.000.000,00		
2	22	01	1.03	0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.03	0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.03	000	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	275.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	275.000.000,00		
2	22	01	1.05	000	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.05	000	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.750.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.450.000.000,00		
2	22	01	1.06	000	1	Penyediaan Komponen Instalasi										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.06	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.06	000	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				200 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.06	000	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.900.000.000,00		
2	22	01	1.07	000	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.07	000	5	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.07	000	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.07	000	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.07	001	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.170.000.000,00		
2	22	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.225.000.000,00		
2	22	01	1.09	000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diharapkan Pajaknya				2 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.09	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.09	000	5	Pemeliharaan Mebel										
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	1.09	001	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
137	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-		-	10.823.000.000,00		
2	22	02	1.01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.323.000.000,00		
2	22	02	1.01	000	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan										
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				10 Objek	1.523.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.523.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
2	22	02	1.01	000	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				30 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	02	1.01	000	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				5 Unit	5.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	02	1.02			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-		-	7.400.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	8.500.000.000,00			
2	22	02	1.02	000	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				10 Objek	6.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	5.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	02	1.02	000	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	3.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
138	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-		-	300.000.000,00			-		-	1.000.000.000,00			
2	22	03	1.01			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	300.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.000.000.000,00			
2	22	03	1.01	000	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
139	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-		-	700.000.000,00			-		-	900.000.000,00			
2	22	04	1.01			Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-		-	700.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	900.000.000,00			
2	22	04	1.01	000	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														
						Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	04	1.01	000	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 04	1.01 000 4	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal													
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal													
140	2 22 05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	-	-	3.850.000.000,00					-	6.300.000.000,00		
2	22 05	1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	-	-	200.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00		
2	22 05	1.01 000 2	Penetapan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 05	1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	-	-	3.650.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	6.100.000.000,00		
2	22 05	1.02 000 1	Pelindungan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				4 Objek	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	4.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 05	1.02 000 2	Pengembangan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				4 Objek	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22 05	1.02 000 4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya													
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
141	2 22 06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	-	-	5.750.000.000,00					-	3.700.000.000,00		
2	22 06	1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	-	-	-	-	5.750.000.000,00				Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	3.700.000.000,00		
2	22 06	1.01 000 1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu													
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				600 Unit	450.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
2	22	06	1.01	000	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
						Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				20 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	06	1.01	000	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum														
						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				5 Unit	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	850.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	06	1.01	000	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				2 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	06	1.01	000	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				5 Unit	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					153.227.854.500,00							109.400.000.000,00		
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					153.227.854.500,00							109.400.000.000,00		
142	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					137.427.854.500,00							102.150.000.000,00		
3	26	02	1.01			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-	-		-	1.000.000.000,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	1.000.000.000,00			
3	26	02	1.01	000	5	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi														
						Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				1 Lokasi	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3	26	02	1.02			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-		-	135.927.854.500,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	100.000.000.000,00			
3	26	02	1.02	000	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				2 Unit	135.927.854.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	100.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3	26	02	1.03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-		-	350.000.000,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	950.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi					1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3	26	02	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi					25 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3	26	02	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					6 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	150.000.000,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	200.000.000,00			
3	26	02	1.04	0008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar					10 Usaha Pariwisata	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
143	3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	10.850.000.000,00			-		-	5.750.000.000,00			
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-	-	-	-	10.850.000.000,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	5.750.000.000,00			
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					1 Dokumen	3.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	2.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	1.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
144	3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	4.950.000.000,00					-	1.500.000.000,00		
	3 26 05 1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	-	-			-	4.700.000.000,00				Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	1.250.000.000,00		
3	26 05 1.01 000 4	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				25 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 05 1.01 000 8	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				5 Laporan	4.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 05 1.01 001 4	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				75 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26 05 1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	250.000.000,00				Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	250.000.000,00		
3	26 05 1.02 000 7	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				25 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	-	250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X			NON URUSAN													
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
145	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	600.000.000,00					-	500.000.000,00		
X	XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	500.000.000,00		
X	XX 01 1.08 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Dinas Perpustakaan dan Arsip					19.928.000.000,00						20.835.000.000,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					19.928.000.000,00						20.835.000.000,00		
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					19.278.000.000,00						20.040.000.000,00		
146	2	23	01					16.520.000.000,00						17.270.000.000,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
2	23	01	1.01					370.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	370.000.000,00		
2	23	01	1.01	000												
			1													
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.01	000												
			2													
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.01	000												
			3													
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.01	000												
			4													
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.01	000												
			5													
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.01	000												
			6													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	120.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.01	000												
			7													
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.02					8.800.000.000,00						8.800.000.000,00		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
2	23	01	1.02	000												
			1													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	8.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	8.800.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.03					15.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00		
2	23	01	1.03	000												
			Perangkat Daerah													
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.03	000												
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.03	000												
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.05					450.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	450.000.000,00		
2	23	01	1.05	000												
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.05	000												
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.06					1.580.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.590.000.000,00		
2	23	01	1.06	000												
			Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.06	000												
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			0				10	1.200.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	1.200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.06	000												
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.06	000												
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	1.06	000												
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	270.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
2	23	01	1.07	000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-	-	900.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	900.000.000,00			
					Urusan Pemerintahan Daerah														
2	23	01	1.07	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2 Unit	900.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	900.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan														
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	2.255.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.555.000.000,00			
					Pemerintahan Daerah														
2	23	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
2	23	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Laporan	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
2	23	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
2	23	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan	1.600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.900.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan														
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	2.950.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.590.000.000,00			
					Pemerintahan Daerah														
2	23	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25 Unit	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibavarkan Pakainya														
2	23	01	1.09	000	Pemeliharaan Mebel				5 Unit	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
					Jumlah Mebel yang Dipelihara														
2	23	01	1.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	2.560.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
2	23	01	1.09	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10 Unit	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
147	2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	2.278.000.000,00			-		-	2.340.000.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-									1.870.000.000,00			
2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi														
						Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				14 Perpustakaan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi														
						Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				200 Eksemplar	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
						Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				2 Perpustakaan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
						Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				20 Orang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
						Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				2 Layanan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit														
						Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				15 Perpustakaan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				750 Eksemplar	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	270.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.01	0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi														
						Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi				61 Nilai	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.01	0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi				57 Indeks	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.01	001	4	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi										
			Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi				2 Dokumen	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.01	001	5	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik										
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.01	001	6	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan										
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.01	001	7	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi										
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				2 Perpustakaan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi										
			-	-	-	-	-	458.000.000,00	-	-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	470.000.000,00		
2	23	02	1.02	000	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat										
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				2 Lokus	138.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.02	000	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca										
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				25 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.02	000	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial										
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				2 Perpustakaan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	1.02	000	6	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi										
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
148	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO										
			-	-	-	-	-	480.000.000,00	-	-	-	-	-	430.000.000,00		
2	23	03	1.01			Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi										
			-	-	-	-	-	160.000.000,00	-	-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	160.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
2	23	03	1.01	000	1	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam					300 Eksemplar	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
						Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR														
2	23	03	1.01	000	2	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam					10 Penerbit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
						Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														
2	23	03	1.02			Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	-	-	-	-	-	60.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00		
2	23	03	1.02	000	1	Penerbitan Katalog Induk Daerah					300 Entry	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
						Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan														
2	23	03	1.02	000	2	Penerbitan Bibliografi Daerah					2 Naskah	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
						Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan														
2	23	03	1.03			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	150.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00		
2	23	03	1.03	000	3	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan					15 Eksemplar	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
						Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan														
2	23	03	1.03	000	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					14 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
						Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno														
2	23	03	1.04			Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	110.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00		
2	23	03	1.04	000	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara					80 Eksemplar	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi														
2	23	03	1.04	000	2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				150 Eksemplar	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					650.000.000,00						795.000.000,00		
149	2	24	02					380.000.000,00						520.000.000,00		
2	24	02	1.01					170.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	300.000.000,00		
2	24	02	1.01	0005												
							150 Arsip	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	24	02	1.01	0006												
							500 Arsip	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	24	02	1.01	0012												
							10 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	24	02	1.02					100.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00		
2	24	02	1.02	0005												
							50 Arsip	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	24	02	1.03					110.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	120.000.000,00		
2	24	02	1.03	0001												
							7 Pengguna	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	24	02	1.03	0002												
							2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
150	2	24	03					270.000.000,00						275.000.000,00		
2	24	03	1.01					50.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00		
2	24	03	1.01	0004												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				500 Arsip	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	24	03	1.03				-	135.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	140.000.000,00		
2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi											
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				5 Daftar	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	24	03	1.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi											
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi				100 Arsip	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	24	03	1.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota											
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota				14 Arsip	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	24	03	1.04				-	35.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	35.000.000,00		
2	24	03	1.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip											
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				10 Arsip	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	24	03	1.05				-	50.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00		
2	24	03	1.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)											
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				10 Arsip	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
			Dinas Kelautan dan Perikanan							110.718.309.935,00					136.019.525.935,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							110.518.309.935,00					135.769.525.935,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							110.518.309.935,00					135.769.525.935,00	
151	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %							100 %	29.042.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			7 Dokumen	1.230.716.030,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.455.000.000,00		
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	265.716.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	63.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	317.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	526.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tahun layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			1 Tahun	13.617.526.816,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	14.070.000.000,00		
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				88 Orang/Bulan	12.621.886.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		13.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.02	000	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	905.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		950.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.02	000	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	30.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.02	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.02	000	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah	-						635.000.000,00		
3	25	01	1.03	000	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.03	000	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.03	000	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.03	000	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	144.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.05				2 Paket	604.075.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		635.000.000,00		
3	25	01	1.05	0001			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin									
							1 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		85.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.05	0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut									
							1 Paket	143.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.05	0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi									
							1 Dokumen	37.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.05	0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja									
							1 Dokumen	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.05	0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							10 Orang	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.05	0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan									
							10 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.06					1.357.307.600,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		1.535.000.000,00		
3	25	01	1.06	0001			Penyediaan Komponen Instalasi									
							1 Paket	22.707.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.06	0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	67.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang							247.500.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	310.000.000,00		
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target		Pagu Indikatif (Rp)
3	25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.374.700.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	3.857.000.000,00	
3	25 01 1.08 000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	6.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25 01 1.08 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25 01 1.08 000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25 01 1.08 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1.368.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.997.310.336,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	6.545.000.000,00	
3	25 01 1.09 000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					10 Unit	1.960.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	2.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25 01 1.09 000 5	Pemeliharaan Mebel					4 Unit	19.985.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25 01 1.09 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10 Unit	17.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25 01 1.09 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					6 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	4.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
152	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	6 Lokasi			6 Lokasi	4.877.209.023,00					6 Lokasi	5.420.000.000,00		
	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah lokasi dalam rangka pengelolaan ruang laut Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-			6 Lokasi 6 Lokasi	3.430.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	-	3.840.000.000,00		
	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
							Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				2,5 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
							Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi				0 Ha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-		700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
							Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				100 Orang	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/														
							Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	2.130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-		2.140.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir														
							Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam RTRWP				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan														
							Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi														
							Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kegiatan untuk penerbitan izin pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-			1 Kegiatan 1 Kegiatan	320.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	380.000.000,00		
3	25	02	1.02	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan														
						Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				2 Dokumen	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	380.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir	-			1 Kegiatan	1.127.209.023,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.200.000.000,00		
3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
						Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	877.209.023,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
						Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				1 Kelompok	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	02	1.03	0006	Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha														
						Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha				5 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
153	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun)	113,25NTN/NTBi 149.486,44Ton			112 NTN/NTBi 145.481,98 Ton	66.737.934.905,00			-			113,25NTN/NTBi 149.486,44Ton	66.957.525.935,00	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut	-			2 Kegiatan	31.499.283.970,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	31.630.000.000,00		
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
						Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	310.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	380.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional					Daerah			
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				3 Unit	439.283.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3	25	03	1.01	000	5	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur													
			Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur				7 Unit	30.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		30.200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3	25	03	1.01	000	6	Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur													
			Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3	25	03	1.01	000	7	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur													
			Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur				5 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3	25	03	1.01	000	8	Penerbitan rekomendasi surat tanda penangkapan ikan andon / Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon													
			Jumlah Surat rekomendasi tanda penangkapan ikan andon yang diterbitkan				5 Rekomendasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3	25	03	1.01	001	0	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap													
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				7 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3	25	03	1.02			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air	-				1 Kegiatan	250.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		300.000.000,00	
3	25	03	1.02	000	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan													
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3	25	03	1.02	000	4	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap													
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				7 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kegiatan dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap 10-30 GT yang menjadi kewenangan provinsi Jumlah kegiatan untuk Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-			1 Kegiatan 1 Kegiatan	250.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	250.000.000,00		
3	25	03	1.03	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														
						Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	-			3 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan dalam rangka pendaftaran armada perikanan dibawah 10 GT yang menjadi kewenangan provinsi	-			1 Kegiatan	100.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00		
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT														
						Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	-			4 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang di dikelola dan dibangun	-			7 Pelabuhan	34.088.650.935,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	34.127.525.935,00		
3	25	03	1.06	0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan														
						Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	-			1 Pelabuhan Perikanan	32.277.525.935,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	33.277.525.935,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	-			1 Unit	911.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	-			1 Layanan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kegiatan untuk penerbitan izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-			1 Kegiatan	100.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
3	25	03	1.07	0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)				4 Rekomendasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan untuk penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	-		1 Kegiatan	100.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00			
3	25	03	1.08	0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)				3 Rekomendasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kegiatan untuk pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-		1 Kegiatan	100.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00			
3	25	03	1.09	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)				5 Rekomendasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan untuk pendaftaran Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	-		1 Kegiatan	250.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	250.000.000,00			
3	25	03	1.10	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT				3 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	03	1.10	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)				5 Rekomendasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
154	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) Jumlah kebutuhan benih (ekor)	78.580Ekor 78.580Ekor 160.537.50Ton 160.537.50Ton		152.405.21 Ton 76.390 Ekor	10.858.341.000,00						78.580Ekor 78.580Ekor 160.537.50Ton 160.537.50Ton	12.000.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan untuk Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Kegiatan	100.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00		
3	25	04	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan														
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				6 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kegiatan pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, Payau dan Tawar	-			5 Kegiatan	8.050.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	9.100.000.000,00		
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				3 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	5.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	5.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
						Jumlah Pembudidaya				30 Orang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
						Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-			-	2.708.341.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	2.800.000.000,00		
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	708.341.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
155	3	25	05				58 Kelompok 90 %	1.246.000.000,00					60Kelompok 90% 60Kelompok 90%	1.350.000.000,00		
3	25	05	1.01				3 Kegiatan	1.246.000.000,00				Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		1.350.000.000,00		
3	25	05	1.01	0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi											
				Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani			4 Perkara	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi											
				Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani			5 Perkara	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											
				Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk			4 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi											
				Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			0 Pelaku Usaha	196.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi											
				Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			1 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi											
				Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			5 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
3	25	05	1.01	001	7	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				1 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
156	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%) Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun) Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	36.009.20Ton 3,60% 36.009.20Ton 3,60% 63,04Kg/Kap/Tahun 63,04Kg/Kap/Tahun 36.009.20Ton 63,04Kg/Kap/Tahun 3,60%			3,50 % 35.697.36 Ton 61,23 Kg/Kap/Tahun						36.009.20Ton 3,60% 36.009.20Ton 3,60% 63,04Kg/Kap/Tahun 63,04Kg/Kap/Tahun 36.009.20Ton 63,04Kg/Kap/Tahun 3,60%	21.000.000.000,00		
3	25	06	1.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-			1 Kegiatan	367.189.225,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	-	20.200.000.000,00		
3	25	06	1.02	000	3	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				1 Kegiatan	117.189.225,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	06	1.02	000	4	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				0 Kegiatan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	20.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	06	1.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	-			1 Kegiatan	750.000.000,00			Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	-	800.000.000,00		
3	25	06	1.03	000	1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas				1 Unit Usaha	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	06	1.03	0004	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku											
			Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan				20 Ton	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
X					NON URUSAN				200.000.000,00						250.000.000,00	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				200.000.000,00						250.000.000,00	
157	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				200.000.000,00						250.000.000,00	
	X	XX	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			200.000.000,00		Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-		250.000.000,00	
X	XX	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan						183.899.967.136,00						171.470.553.221,00	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						154.444.611.915,00						142.835.198.000,00	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						154.444.611.915,00						142.835.198.000,00	
158	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			6.920.000.000,00					7.310.198.000,00	
	3	27	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			500.000.000,00		Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-		675.000.000,00	
3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD											
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	125.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.01	0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	820.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	909.500.000,00		
3	27	01	1.02	0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				16 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	599.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.02	0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.02	0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.02	0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	60.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.02	0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	90.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	115.000.000,00		
3	27	01	1.03	0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.03	000	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.03	000	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		35.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		350.000.000,00		
3	27	01	1.05	000	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				280 Paket	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.05	000	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.05	000	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		609.500.000,00		
3	27	01	1.06	000	1	Penyediaan Komponen Instalasi										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		275.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.06	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					1 Dokumen	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					100 Laporan	550.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		259.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.06	0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	900.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		900.000.000,00		
3	27	01	1.07	0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3 Unit	750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		750.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	2.410.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		2.410.000.000,00		
3	27	01	1.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					100 Laporan	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	825.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	825.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.08	000												
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.560.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.560.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.09					900.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.341.198.000,00		
3	27	01	1.09	000												
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihavakan Paiknnya				20 Unit	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.09	000												
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.09	000												
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	01	1.09	000												
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	941.198.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
159	3	27	02					117.715.829.779,00						111.625.000.000,00		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
3	27	02	1.01					10.000.000.000,00						5.675.000.000,00		
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian													
3	27	02	1.01	000												
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	10.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	5.400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	02	1.01	000												
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian													
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1 Dokumen	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	275.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-				55.800.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	54.700.000.000,00		
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih					5 Sertifikat	800.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	700.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih					300 Ton	45.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	45.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	02	1.02	0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi					25 Ton	10.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	9.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-				1.050.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.250.000.000,00		
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					1 laporan	800.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner					5 Orang	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	-	-				50.865.829.779,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	50.000.000.000,00		
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain					1500 Ekor	50.865.829.779,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	50.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
160	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-				16.850.000.000,00			-		-	20.400.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	16.650.000.000,00			-	-	20.200.000.000,00				
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
					Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	1.125.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	3.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	3.500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		
3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				13 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	3.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
					Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				3 Unit	10.825.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	12.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		
3	27	03	1.02		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	200.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	200.000.000,00			
3	27	03	1.02	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		
161	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	-	-	1.450.000.000,00			-	-	-	1.550.000.000,00			
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	650.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	650.000.000,00			
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
					Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
3	27	04	1.01	0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				14 Wilayah	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		
3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	-	-		-	800.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	900.000.000,00			
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	800.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	900.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		
162	3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-		-	850.000.000,00			-		-	1.100.000.000,00			
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-		-	850.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.100.000.000,00			
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				250 Ha	800.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				50 Ha	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		
163	3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-		-	10.658.782.136,00			-		-	850.000.000,00			
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-		-	400.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	600.000.000,00			
3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Unit	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				25 Orang	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
3	27	07	1.02				-	10.258.782.136,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	250.000.000,00		
3	27	07	1.02	0001			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian									
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	10.258.782.136,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
X			NON URUSAN						29.455.355.221,00						28.635.355.221,00	
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						29.455.355.221,00						28.635.355.221,00	
164	X	XX	01				-	29.455.355.221,00						28.635.355.221,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
X	XX	01	1.01				-	1.000.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	180.000.000,00		
X	XX	01	1.01	0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	180.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
X	XX	01	1.02				-	28.405.355.221,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	28.405.355.221,00		
X	XX	01	1.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/Bulan	28.405.355.221,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	28.405.355.221,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
X	XX	01	1.08				-	50.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	50.000.000,00		
X	XX	01	1.08	0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	
			Dinas Perkebunan						38.658.289.634,00						27.131.387.255,00	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						38.643.289.634,00						27.111.387.255,00	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						38.643.289.634,00						27.111.387.255,00	
165	3	27	01				-	17.470.289.634,00						17.836.387.255,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
3	27	01	1.01				-	123.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	166.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	21.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.01	0008	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	75.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.304.289.634,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	14.062.387.255,00		
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	14.029.289.634,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	13.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	240.387.255,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	22.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	125.000.000,00	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	200.000.000,00		
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	40.000.000,00	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	60.000.000,00		
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	735.000.000,00	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	840.000.000,00		
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	255.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	55.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	55.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		55.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	140.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.06	000	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		325.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
							-	100.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		200.000.000,00		
3	27	01	1.07	001	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
							-	1.808.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		2.058.000.000,00		
3	27	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		8.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.450.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		1.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	235.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	250.000.000,00			
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihavarkan Pajaknya				10 Unit	190.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
166	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	2.060.000.000,00			-		-	2.040.000.000,00			
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	310.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	370.000.000,00			
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian															
						Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian															
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	70.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	1.750.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.670.000.000,00			
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih															
						Jumlah Sertifikat Benih				2000 Sertifikat	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	70.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
3	27	02	1.02	0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan				10000 Anakan	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
167	3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	17.650.000.000,00					-	1.675.000.000,00		
	3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	17.650.000.000,00				Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.675.000.000,00		
3	27 03 1.01 000 1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				2 Dokumen	8.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27 03 1.01 000 9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	8.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27 03 1.01 001 0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				2 Unit	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27 03 1.01 001 7	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
168	3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	698.000.000,00					-	805.000.000,00		
	3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	698.000.000,00				Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	805.000.000,00		
3	27 05 1.01 000 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				20 Ha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	175.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27 05 1.01 000 2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				10 Ha	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27 05 1.01 000 3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				20 Ha	470.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
169	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-			-	350.000.000,00			-		-	420.000.000,00		
	3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	350.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	420.000.000,00		
3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian															
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				25 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	420.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
170	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	415.000.000,00			-		-	4.335.000.000,00		
	3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	55.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00		
3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian															
							Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				5 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	275.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	4.100.000.000,00		
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian															
							Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				4 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	2.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani															
							Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				10 Kelompok	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	2.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-			-	85.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	135.000.000,00		
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani															
							Jumlah korporasi petani yang didampingi				5 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	75.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				5 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
X			NON URUSAN					15.000.000,00						20.000.000,00		
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					15.000.000,00						20.000.000,00		
171	X XX 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		-	15.000.000,00					-	20.000.000,00		
X	XX 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	15.000.000,00				Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	20.000.000,00		
X	XX 01 1.02 000 5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	20.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
			Dinas Kehutanan					378.697.050.367,00						249.425.214.792,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					378.697.050.367,00						249.425.214.792,00		
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					378.697.050.367,00						249.425.214.792,00		
172	3 28 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		-	73.429.979.573,00					-	78.042.792.392,00		
3	28 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	2.030.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.015.200.000,00		
3	28 01 1.01 000 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.680.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28 01 1.01 000 2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	22.400.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28 01 1.01 000 3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	22.400.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28 01 1.01 000 4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	22.400.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28 01 1.01 000 5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	22.400.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28 01 1.01 000 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	145.600.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.01	0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.02					65.374.979.573,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	70.535.332.584,00		
3	28	01	1.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6958 Orang/Bulan	65.254.979.573,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	70.379.332.584,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.02	0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	156.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.03					245.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	274.400.000,00		
3	28	01	1.03	0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	28.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.03	0004			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	246.400.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.05					220.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	287.800.000,00		
3	28	01	1.05	0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kewewajaan				19 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	167.200.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.05	0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.05	0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	70.600.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	680.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	493.307.808,00		
3	28	01	1.06	000		Penyediaan Komponen Instalasi										
				1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	69.385.120,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.06	000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	33.600.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.06	000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
				5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	31.922.688,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.06	000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
				6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	33.600.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.06	000		Fasilitasi Kunjungan Tamu										
				8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	33.600.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.06	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
				9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	224.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.06	001		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
				1		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	67.200.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	220.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	73.360.000,00		
3	28	01	1.07	000		Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel										
				5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	22.400.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.07	000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
				6		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.960.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	4.250.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.640.000.000,00		
3	28	01	1.08	000		Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				1												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	33.600.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	660.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	739.200.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.08	000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	67.200.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.800.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	410.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	723.392.000,00		
3	28	01	1.09	000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diharapkan Pajaknya				7 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	84.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.09	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				23 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	84.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.09	000	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	11.200.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	444.192.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	01	1.09	001	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
173	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	275.867.070.794,00			-		-	147.896.000.000,00		
3	28	03	1.01			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	29.767.070.794,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	25.060.000.000,00		
3	28	03	1.01	000	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				10 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	1.01	000	5	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)										
			Dokumen RKTP yang disahkan				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	560.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	1.01	000	6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH										
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				18 Unit	20.217.070.794,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	14.200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	1.01	000	7	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH										
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				18 Dokumen	3.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	5.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	1.01	000	8	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor										
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				5 Unit	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	5.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	1.02			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	-	-	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	600.000.000,00		
3	28	03	1.02	000	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				66 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	1.02	000	6	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Dokumen Perubahan				33 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	1.03			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	-	-	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.404.000.000,00		
3	28	03	1.03	000	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi										
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				16 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
3	28	03	1.03	000	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung				2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	168.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		
3	28	03	1.03	001	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi				30 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		
3	28	03	1.03	001	4	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P				18 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		
3	28	03	1.03	001	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung				18 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		
3	28	03	1.04			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-		-	54.250.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	37.856.000.000,00			
3	28	03	1.04	000	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				20 Dokumen	1.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		
3	28	03	1.04	000	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				800 Ha	16.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	10.960.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		
3	28	03	1.04	000	3	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara				200 Ha	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	10.600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		
3	28	03	1.04	000	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	3.360.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		
3	28	03	1.04	000	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				10 Laporan	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.336.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	1.04	000	9	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan										
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				250 Ha	12.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	10.600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	1.05			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	32.000.000.000,00		
3	28	03	1.05	000	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan										
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				18 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	3.360.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	1.05	000	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan										
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				18 Laporan	90.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	22.400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	1.05	000	6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan										
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				20 Operasi	6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	6.240.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	1.06			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	-			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00		
3	28	03	1.06	000	8	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi										
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				50 Unit Managemen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	1.07			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	-			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	304.000.000,00		
3	28	03	1.07	000	4	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi										
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				50 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	304.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	-	-				90.500.000.000,00											
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit																	
						Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-			224.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		
3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan																	
						Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				50000 Batang	90.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-			50.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		
3	28	03	1.09	0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan																	
						Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun				12 Kali	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-			224.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		
174	3	28	04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	-				2.300.000.000,00											
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	-	-				1.000.000.000,00											
3	28	04	1.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA																	
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan				2 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-			896.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	-	-				300.000.000,00											
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES																	
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				12 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-			280.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	-				1.000.000.000,00											
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				120 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	560.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	04	1.03	000	6	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi										
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				120 Ha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	560.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
175	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-					-	19.510.422.400,00		
3	28	05	1.01			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-					-	19.510.422.400,00		
3	28	05	1.01	000	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				20 Kelompok	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.456.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	05	1.01	000	4	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan										
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				60 Orang	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.240.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	05	1.01	000	6	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial										
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				20 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.240.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	05	1.01	000	7	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan										
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				350 Orang	13.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	11.670.422.400,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	05	1.01	000	8	Penyiapan Perhutanan Sosial										
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				40000 Hektar	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.904.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
176	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	-	-					-	1.680.000.000,00		
3	28	06	1.01			Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-					-	1.680.000.000,00		
3	28	06	1.01	000	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				60 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	06	1.01	000	5	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS										
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				1 Lembaga	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	06	1.01	000	7	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah										
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				2 Dokumen	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.008.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	06	1.01	000	8	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS										
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				15 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
						KPHP MURUNG RAYA		13.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		13.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
3	28					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		13.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
177	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-					-	5.779.200.000,00		
3	28	03	1.01			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	3.651.200.000,00		
3	28	03	1.01	000	6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH										
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP MURUNG RAYA	
3	28	03	1.01	000	7	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH										
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	7.100.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP MURUNG RAYA	
3	28	03	1.02			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	560.000.000,00		
3	28	03	1.02	000	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP MURUNG RAYA	
3	28	03	1.02	000	6	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Dokumen Perubahan				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP MURUNG RAYA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	-	-	600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00			
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP MURUNG RAYA		
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP MURUNG RAYA		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-	-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00			
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP MURUNG RAYA		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP MURUNG RAYA		
3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP MURUNG RAYA		
178	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	-	1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-	-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	784.000.000,00			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP MURUNG RAYA		
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan								-		-				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	200.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP MURUNG RAYA	
3	28	05	1.01	000	6	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial										
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP MURUNG RAYA	
3	28	05	1.01	000	8	Penyiapan Perhutanan Sosial										
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP MURUNG RAYA	
								13.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
3								13.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
3	28							13.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
179	3	28	03					11.900.000.000,00							5.779.200.000,00	
3	28	03	1.01					9.100.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		3.651.200.000,00	
3	28	03	1.01	000	6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH										
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP BARITO HULU	
3	28	03	1.01	000	7	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH										
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	7.100.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP BARITO HULU	
3	28	03	1.02					600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		560.000.000,00	
3	28	03	1.02	000	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP BARITO HULU	
3	28	03	1.02	000	6	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Dokumen Perubahan				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP BARITO HULU	
3	28	03	1.03					600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		224.000.000,00	
3	28	03	1.03	000	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP BARITO HULU	
3	28	03	1.03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi											
							5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP BARITO HULU	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00	
3	28	03	1.05	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan											
							5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP BARITO HULU	
3	28	03	1.05	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
							10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP BARITO HULU	
3	28	03	1.05	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
							10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP BARITO HULU	
180	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	784.000.000,00	
3	28	05	1.01	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan											
							5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP BARITO HULU	
3	28	05	1.01	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan											
							3 Orang	200.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP BARITO HULU	
3	28	05	1.01	000	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP BARITO HULU	
3	28	05	1.01	000	8	Penyiapan Perhutanan Sosial										
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP BARITO HULU	
						KPHP BARITO TENGAH		8.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		8.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
3	28					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		8.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
181	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	6.900.000.000,00							5.779.200.000,00	
3	28	03	1.01			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	4.100.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		3.651.200.000,00	
3	28	03	1.01	000	6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH										
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP BARITO TENGAH	
3	28	03	1.01	000	7	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH										
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	2.100.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP BARITO TENGAH	
3	28	03	1.02			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	560.000.000,00		
3	28	03	1.02	000	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP BARITO TENGAH	
3	28	03	1.02	000	6	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Dokumen Perubahan				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP BARITO TENGAH	
3	28	03	1.03			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00		
3	28	03	1.03	000	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP BARITO TENGAH	
3	28	03	1.03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP BARITO TENGAH	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00	
3	28	03	1.05	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan											
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP BARITO TENGAH	
3	28	03	1.05	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP BARITO TENGAH	
3	28	03	1.05	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP BARITO TENGAH	
182	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	784.000.000,00	
3	28	05	1.01	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan											
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP BARITO TENGAH	
3	28	05	1.01	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan											
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	200.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP BARITO TENGAH	
3	28	05	1.01	000	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP BARITO TENGAH	
3	28 05 1.01 000 8	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP BARITO TENGAH	
								13.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
3								13.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
3	28							13.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
183	3 28 03							11.900.000.000,00							5.779.200.000,00	
3	28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-				9.100.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	-	3.651.200.000,00	
3	28 03 1.01 000 6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP BARITO HILIR	
3	28 03 1.01 000 7	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	7.100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP BARITO HILIR	
3	28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-				600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	-	560.000.000,00	
3	28 03 1.02 000 1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP BARITO HILIR	
3	28 03 1.02 000 6	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Perubahan				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP BARITO HILIR	
3	28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-				600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	-	224.000.000,00	
3	28 03 1.03 000 1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP BARITO HILIR	
3	28	03	1.03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP BARITO HILIR
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00	
3	28	03	1.05	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan											
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP BARITO HILIR
3	28	03	1.05	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP BARITO HILIR
3	28	03	1.05	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP BARITO HILIR
184	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	784.000.000,00	
3	28	05	1.01	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan											
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP BARITO HILIR
3	28	05	1.01	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan											
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP BARITO HILIR
3	28	05	1.01	000	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP BARITO HILIR	
3	28	05	1.01	000	8	Penyiapan Perhutanan Sosial										
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP BARITO HILIR	
						KPHL GERBANG BARITO		13.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		13.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
3	28					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		13.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
185	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-							5.779.200.000,00	
3	28	03	1.01			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	-	3.651.200.000,00	
3	28	03	1.01	000	6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH										
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHL GERBANG BARITO	
3	28	03	1.01	000	7	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH										
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	7.100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHL GERBANG BARITO	
3	28	03	1.02			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	-	560.000.000,00	
3	28	03	1.02	000	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHL GERBANG BARITO	
3	28	03	1.02	000	6	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Dokumen Perubahan				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHL GERBANG BARITO	
3	28	03	1.03			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	-	224.000.000,00	
3	28	03	1.03	000	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung										
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHL GERBANG BARITO	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
3	28	03	1.03	001	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung					5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHL GERBANG BARITO	
3	28	03	1.05			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-	-	-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00		
3	28	03	1.05	000	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan					5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHL GERBANG BARITO	
3	28	03	1.05	000	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan					10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHL GERBANG BARITO	
3	28	03	1.05	000	6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan					10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHL GERBANG BARITO	
186	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	-	-	1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01	000	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan					5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHL GERBANG BARITO	
3	28	05	1.01	000	4	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan					3 Orang	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHL GERBANG BARITO	
3	28	05	1.01	000	6	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial					5 Unit	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHL GERBANG BARITO	
3	28	05	1.01	000	8	Penyiapan Perhutanan Sosial									-		-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHL GERBANG BARITO	
		KPHP KAPUAS HULU						8.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						8.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
187	3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	6.900.000.000,00				-	-	5.779.200.000,00		
	3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	4.100.000.000,00				-	-	3.651.200.000,00		
	3 28 03 1.01 000 6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP KAPUAS HULU	
	3 28 03 1.01 000 7	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	2.100.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP KAPUAS HULU	
	3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	600.000.000,00				-	-	560.000.000,00		
	3 28 03 1.02 000 1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAPUAS HULU	
	3 28 03 1.02 000 6	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Perubahan				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAPUAS HULU	
	3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	600.000.000,00				-	-	224.000.000,00		
	3 28 03 1.03 000 1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAPUAS HULU	
	3 28 03 1.03 001 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAPUAS HULU	
3	28	03	1.05				-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan											
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAPUAS HULU	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAPUAS HULU	
3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP KAPUAS HULU	
188	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											
							-	1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											
							-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan											
							5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAPUAS HULU	
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan											
							3 Orang	200.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAPUAS HULU	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial											
							5 Unit	500.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAPUAS HULU	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAPUAS HULU	
			KPHP KAPUAS TENGAH					8.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					8.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					8.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
189	3	28	03					6.900.000.000,00						5.779.200.000,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-		-	6.900.000.000,00						5.779.200.000,00		
3	28	03	1.01					4.100.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	3.651.200.000,00		
			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-		-	4.100.000.000,00						3.651.200.000,00		
3	28	03	1.01	000												
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP KAPUAS TENGAH	
3	28	03	1.01	000												
			Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH				12 Dokumen	2.100.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP KAPUAS TENGAH	
3	28	03	1.02					600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	560.000.000,00		
			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-		-	600.000.000,00						560.000.000,00		
3	28	03	1.02	000												
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAPUAS TENGAH	
3	28	03	1.02	000												
			Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAPUAS TENGAH	
3	28	03	1.03					600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00		
			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-		-	600.000.000,00						224.000.000,00		
3	28	03	1.03	000												
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAPUAS TENGAH	
3	28	03	1.03	001												
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAPUAS TENGAH	
3	28	03	1.05				-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan											
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAPUAS TENGAH	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAPUAS TENGAH	
3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP KAPUAS TENGAH	
190	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											
							-	1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											
							-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan											
							5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAPUAS TENGAH	
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan											
							3 Orang	200.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAPUAS TENGAH	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial											
							5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAPUAS TENGAH	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAPUAS TENGAH	
			KPHL KAPUAS KAHAYAN					9.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					9.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					9.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
191	3 28 03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-		-	7.900.000.000,00					-	5.779.200.000,00		
	3 28 03 1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-		-	5.100.000.000,00					-	3.651.200.000,00		
	3 28 03 1.01 000 6		Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH													
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHL KAPUAS KAHAYAN	
	3 28 03 1.01 000 7		Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH													
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	3.100.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHL KAPUAS KAHAYAN	
	3 28 03 1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-		-	600.000.000,00					-	560.000.000,00		
	3 28 03 1.02 000 1		Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan													
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				6 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHL KAPUAS KAHAYAN	
	3 28 03 1.02 000 6		Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan													
			Jumlah Dokumen Perubahan				3 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHL KAPUAS KAHAYAN	
	3 28 03 1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-		-	600.000.000,00					-	224.000.000,00		
	3 28 03 1.03 000 2		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung													
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHL KAPUAS KAHAYAN	
	3 28 03 1.03 001 5		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHL KAPUAS KAHAYAN	
3	28	03	1.05				-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan											
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHL KAPUAS KAHAYAN	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHL KAPUAS KAHAYAN	
3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHL KAPUAS KAHAYAN	
192	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											
							-	1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											
							-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan											
							5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHL KAPUAS KAHAYAN	
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan											
							3 Orang	200.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHL KAPUAS KAHAYAN	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial											
							5 Unit	500.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHL KAPUAS KAHAYAN	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHL KAPUAS KAHAYAN	
			KPHP KAHAYAN HULU					9.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					9.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					9.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
193	3 28 03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-		-	7.900.000.000,00				-	-	5.779.200.000,00		
	3 28 03 1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-		-	5.100.000.000,00				-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	3.651.200.000,00	
	3 28 03 1.01 000 6		Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH													
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP KAHAYAN HULU	
	3 28 03 1.01 000 7		Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH													
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	3.100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP KAHAYAN HULU	
	3 28 03 1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-		-	600.000.000,00				-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	560.000.000,00	
	3 28 03 1.02 000 1		Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan													
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAHAYAN HULU	
	3 28 03 1.02 000 6		Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan													
			Jumlah Dokumen Perubahan				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAHAYAN HULU	
	3 28 03 1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-		-	600.000.000,00				-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	
	3 28 03 1.03 000 1		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi													
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAHAYAN HULU	
	3 28 03 1.03 001 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAHAYAN HULU	
3	28	03	1.05				-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan											
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAHAYAN HULU	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAHAYAN HULU	
3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP KAHAYAN HULU	
194	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											
							-	1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											
							-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan											
							5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAHAYAN HULU	
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan											
							3 Orang	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAHAYAN HULU	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial											
							5 Unit	500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAHAYAN HULU	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAHAYAN HULU	
			KPHP KAHAYAN TENGAH					14.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					14.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					14.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
195	3	28	03					12.900.000.000,00						5.779.200.000,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-											
3	28	03	1.01					10.100.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	3.651.200.000,00		
3	28	03	1.01	0006												
							5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP KAHAYAN TENGAH	
3	28	03	1.01	0007												
							12 Dokumen	8.100.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP KAHAYAN TENGAH	
3	28	03	1.02					600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	560.000.000,00		
3	28	03	1.02	0001												
							6 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAHAYAN TENGAH	
3	28	03	1.02	0006												
							6 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAHAYAN TENGAH	
3	28	03	1.03					600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00		
3	28	03	1.03	0001												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAHAYAN TENGAH	
3	28	03	1.03	001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAHAYAN TENGAH	
3	28	03	1.05				-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00		
3	28	03	1.05	000			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAHAYAN TENGAH	
3	28	03	1.05	000			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAHAYAN TENGAH	
3	28	03	1.05	000			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
			Jumlah operasi penangulangan kebakaran hutan dan lahan				10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP KAHAYAN TENGAH	
196	3	28	05				-	1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
3	28	05	1.01				-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01	000			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
				2												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAHAYAN TENGAH		
3	28	05	1.01	000													
				4	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan												
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	200.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAHAYAN TENGAH		
3	28	05	1.01	000													
				6	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial												
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAHAYAN TENGAH		
3	28	05	1.01	000													
				8	Penyiapan Perhutanan Sosial												
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAHAYAN TENGAH		
KPHP KAHAYAN HILIR								9.000.000.000,00								6.563.200.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								9.000.000.000,00								6.563.200.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								9.000.000.000,00								6.563.200.000,00	
197	3	28	03					7.900.000.000,00								5.779.200.000,00	
3	28	03	1.01					5.100.000.000,00								3.651.200.000,00	
				6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH												
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP KAHAYAN HILIR		
3	28	03	1.01	000													
				7	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH												
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	3.100.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP KAHAYAN HILIR		
3	28	03	1.02					600.000.000,00								560.000.000,00	
			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KAHAYAN HILIR		
3	28	03	1.02	0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAHAYAN HILIR		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00			
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAHAYAN HILIR		
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KAHAYAN HILIR		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00			
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAHAYAN HILIR		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KAHAYAN HILIR		
3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP KAHAYAN HILIR		
198	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-														
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		112.000.000,00	KPHP KAHAYAN HILIR		
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan																
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	200.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		224.000.000,00	KPHP KAHAYAN HILIR		
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		224.000.000,00	KPHP KAHAYAN HILIR		
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		224.000.000,00	KPHP KAHAYAN HILIR		
						KPHP KATINGAN HULU					10.000.000.000,00								6.563.200.000,00		
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					10.000.000.000,00									6.563.200.000,00	
3	28					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					10.000.000.000,00									6.563.200.000,00	
199	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			8.900.000.000,00									5.779.200.000,00	
3	28	03	1.01			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			6.100.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-				3.651.200.000,00	
3	28	03	1.01	0006		Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH															
						Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-				851.200.000,00	KPHP KATINGAN HULU
3	28	03	1.01	0007		Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH															
						Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	4.100.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-				2.800.000.000,00	KPHP KATINGAN HULU
3	28	03	1.02			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-				560.000.000,00	
3	28	03	1.02	0001		Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan															
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				4 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-				224.000.000,00	KPHP KATINGAN HULU

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
3	28	03	1.02	0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan					4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KATINGAN HULU	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	-	-	-	600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00		
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi					5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KATINGAN HULU	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi					5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KATINGAN HULU	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-	-	-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan					5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KATINGAN HULU	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan					8 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KATINGAN HULU	
3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan					10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP KATINGAN HULU	
200	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	-	-	1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KATINGAN HULU	
3	28	05	1.01	000												
				4												
							3	200.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KATINGAN HULU	
3	28	05	1.01	000												
				6												
							5	500.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KATINGAN HULU	
3	28	05	1.01	000												
				8												
							2200	300.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KATINGAN HULU	
								10.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
3								10.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
3	28							10.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
201	3	28	03					8.900.000.000,00							5.779.200.000,00	
3	28	03	1.01					6.100.000.000,00							3.651.200.000,00	
3	28	03	1.01	000												
				6												
							5	2.000.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP KATINGAN HILIR	
3	28	03	1.01	000												
				7												
							12	4.100.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP KATINGAN HILIR	
3	28	03	1.02					600.000.000,00							560.000.000,00	
3	28	03	1.02	000												
				1												
							4	300.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KATINGAN HILIR	
3	28	03	1.02	000												
				6												
							4	300.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KATINGAN HILIR	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	-	600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00				
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala			5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KATINGAN HILIR		
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi			5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KATINGAN HILIR		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00				
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KATINGAN HILIR		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun			8 Laporan	500.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP KATINGAN HILIR		
3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
						Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan			10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP KATINGAN HILIR		
202	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	1.100.000.000,00						784.000.000,00				
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	784.000.000,00				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan			5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KATINGAN HILIR		
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	200.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KATINGAN HILIR		
3	28	05	1.01	000	6	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial											
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KATINGAN HILIR		
3	28	05	1.01	000	8	Penyiapan Perhutanan Sosial											
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KATINGAN HILIR		
			KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH						8.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						8.000.000.000,00							6.563.200.000,00	
203	3	28	03					6.900.000.000,00							5.779.200.000,00		
3	28	03	1.01					4.100.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		3.651.200.000,00		
3	28	03	1.01	000	6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH											
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH		
3	28	03	1.01	000	7	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH											
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	2.100.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH		
3	28	03	1.02					600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	560.000.000,00			
3	28	03	1.02	000	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan											
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH		
3	28	03	1.02	000	6	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan											
			Jumlah Dokumen Perubahan				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-									224.000.000,00			
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-										1.344.000.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH	
3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
						Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH	
204	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-				1.100.000.000,00							784.000.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-				1.100.000.000,00							784.000.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH	
3	28	05	1.01	000	4	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan										
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	200.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH	
3	28	05	1.01	000	6	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial										
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH	
3	28	05	1.01	000	8	Penyiapan Perhutanan Sosial										
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH	
			KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR										6.563.200.000,00			
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										9.200.000.000,00			
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										9.200.000.000,00			
205	3	28	03					8.100.000.000,00						5.779.200.000,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-											
3	28	03	1.01					5.100.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	3.651.200.000,00		
3	28	03	1.01	000	6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH										
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	
3	28	03	1.01	000	7	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH										
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	3.100.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	
3	28	03	1.02					600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	560.000.000,00		
3	28	03	1.02	000	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				6 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
3	28	03	1.02	0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan						6 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-					800.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00		
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi						5 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi						5 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-					1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	
3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	
206	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-					1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-				1.100.000.000,00						784.000.000,00			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan					5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		112.000.000,00	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan					3 Orang	200.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		224.000.000,00	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial					5 Unit	500.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		224.000.000,00	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial					2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		224.000.000,00	KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR	
					KPHP SERUYAN HULU						8.000.000.000,00							6.563.200.000,00		
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8.000.000.000,00							6.563.200.000,00		
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						8.000.000.000,00							6.563.200.000,00		
207	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-				6.900.000.000,00							5.779.200.000,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-				4.100.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-			3.651.200.000,00	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		851.200.000,00	KPHP SERUYAN HULU	
3	28	03	1.01	0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH						2.100.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		2.800.000.000,00	KPHP SERUYAN HULU	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-				600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-			560.000.000,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP SERUYAN HULU	
3	28	03	1.02	000	6	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan										
			Jumlah Dokumen Perubahan				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP SERUYAN HULU	
3	28	03	1.03			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	-	600.000.000,00	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00		
3	28	03	1.03	000	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi										
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP SERUYAN HULU	
3	28	03	1.03	001	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP SERUYAN HULU	
3	28	03	1.05			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-	1.600.000.000,00	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00		
3	28	03	1.05	000	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan										
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP SERUYAN HULU	
3	28	03	1.05	000	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan										
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	500.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP SERUYAN HULU	
3	28	03	1.05	000	6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan										
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP SERUYAN HULU	
208	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	1.100.000.000,00	-		-	784.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-									784.000.000,00			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP SERUYAN HULU	
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	200.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP SERUYAN HULU	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP SERUYAN HULU	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP SERUYAN HULU	
						KPHP KOTAWARINGIN BARAT					10.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						10.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
209	3	28	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						10.000.000.000,00						6.563.200.000,00		
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						8.900.000.000,00						5.779.200.000,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						6.100.000.000,00						3.651.200.000,00		
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
						Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP KOTAWARINGIN BARAT	
3	28	03	1.01	0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
						Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	4.100.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP KOTAWARINGIN BARAT	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						600.000.000,00						560.000.000,00		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KOTAWARINGIN BARAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
3	28	03	1.02	000	000	6	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														
							Jumlah Dokumen Perubahan				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		336.000.000,00	KPHP KOTAWARINGIN BARAT	
3	28	03	1.03				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	-	600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	-	224.000.000,00			
3	28	03	1.03	000	000	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
							Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		112.000.000,00	KPHP KOTAWARINGIN BARAT	
3	28	03	1.03	001	001	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		112.000.000,00	KPHP KOTAWARINGIN BARAT	
3	28	03	1.05				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	-	1.344.000.000,00			
3	28	03	1.05	000	000	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
							Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		336.000.000,00	KPHP KOTAWARINGIN BARAT	
3	28	03	1.05	000	000	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
							Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				8 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		336.000.000,00	KPHP KOTAWARINGIN BARAT	
3	28	03	1.05	000	000	6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
							Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		672.000.000,00	KPHP KOTAWARINGIN BARAT	
210	3	28	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	1.100.000.000,00			-						784.000.000,00	
3	28	05	1.01				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	-	784.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
3	28	05	1.01	000	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP KOTAWARINGIN BARAT		
3	28	05	1.01	000	4	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	200.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KOTAWARINGIN BARAT		
3	28	05	1.01	000	6	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KOTAWARINGIN BARAT		
3	28	05	1.01	000	8	Penyiapan Perhutanan Sosial														
						Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP KOTAWARINGIN BARAT		
						KPHP SUKAMARA LAMANDAU					10.000.000.000,00							6.563.200.000,00		
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					10.000.000.000,00								6.563.200.000,00	
3	28					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					10.000.000.000,00								6.563.200.000,00	
211	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			8.900.000.000,00							5.779.200.000,00		
3	28	03	1.01			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			6.100.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		3.651.200.000,00		
3	28	03	1.01	000	6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
						Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	851.200.000,00	KPHP SUKAMARA LAMANDAU		
3	28	03	1.01	000	7	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
						Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				12 Dokumen	4.100.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2.800.000.000,00	KPHP SUKAMARA LAMANDAU		
3	28	03	1.02			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			600.000.000,00				Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		560.000.000,00		
3	28	03	1.02	000	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				6 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP SUKAMARA LAMANDAU		
3	28	03	1.02	000	6	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Perubahan				6 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP SUKAMARA LAMANDAU	
3	28	03	1.03				-	600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00		
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi											
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP SUKAMARA LAMANDAU	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				5 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP SUKAMARA LAMANDAU	
3	28	03	1.05				-	1.600.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1.344.000.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan											
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP SUKAMARA LAMANDAU	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				5 Laporan	500.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	336.000.000,00	KPHP SUKAMARA LAMANDAU	
3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				10 Operasi	600.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	672.000.000,00	KPHP SUKAMARA LAMANDAU	
212	3	28	05				-	1.100.000.000,00			-		-	784.000.000,00		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
3	28	05	1.01				-	1.100.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	784.000.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	112.000.000,00	KPHP SUKAMARA LAMANDAU	
3	28	05	1.01	000	4	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan										
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP SUKAMARA LAMANDAU	
3	28	05	1.01	000	6	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial										
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP SUKAMARA LAMANDAU	
3	28	05	1.01	000	8	Penyiapan Perhutanan Sosial										
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2200 Hektar	300.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	224.000.000,00	KPHP SUKAMARA LAMANDAU	
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					177.934.046.330,00								
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					177.934.046.330,00								
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					177.934.046.330,00								
213	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.771.780.511,00								
3	29	01	1.01					617.407.600,00								
3	29	01	1.01	000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	182.794.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	-	182.794.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.01	000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	139.869.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	-	139.869.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.01	000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.01	000	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	284.744.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	-	284.744.200,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.846.061.911,00								
3	29	01	1.02	000	1											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/ Bulan	15.824.061.911,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	-	15.824.061.911,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan					11 Dokumen	1.010.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	1.010.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					2 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	12.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	-	-	-	-	-	95.190.000,00						95.190.000,00		
3	29	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					1 Laporan	90.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	90.190.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	625.236.000,00						625.236.000,00		
3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					40 Orang	625.236.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	625.236.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	2.977.956.000,00						2.977.956.000,00		
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3 Paket	1.347.614.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	1.347.614.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	60.342.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	60.342.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	1.300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.06	001		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	5.142.414.000,00		-	-	-	-	5.142.414.000,00		
						Urusan Pemerintah Daerah										
3	29	01	1.07	000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	1.750.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.07	000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	3.392.414.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	3.392.414.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	1.993.243.000,00		-	-	-	-	1.993.243.000,00		
						Pemerintahan Daerah										
3	29	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	36.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	467.164.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	467.164.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.489.579.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	1.489.579.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	2.474.272.000,00		-	-	-	-	2.474.272.000,00		
						Pemerintahan Daerah										
3	29	01	1.09	000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diharapkan Pajaknya	21 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.09	000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.09	000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	299.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	299.272.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.09	001		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.895.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	1.895.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	01	1.09	001	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	155.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
214	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-	759.600.000,00					759.600.000,00		
3	29	02	1.01			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	500.000.000,00					500.000.000,00		
3	29	02	1.01	000	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah										
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				5 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	02	1.01	000	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				9 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	02	1.03			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	259.600.000,00					259.600.000,00		
3	29	02	1.03	000	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah										
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				1 Dokumen	259.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	259.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
215	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-	10.072.480.547,00					10.072.480.547,00		
3	29	03	1.01			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	3.020.820.000,00					3.020.820.000,00		
3	29	03	1.01	000	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil										
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah				10 Dokumen	2.516.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	2.516.820.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	03	1.01	000	2	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan				7 Dokumen	422.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	422.580.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	03	1.01	000	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Laporan	81.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	81.420.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	03	1.03			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	6.282.800.547,00		-	-	-	-	6.282.800.547,00		
3	29	03	1.03	000	3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				4 Dokumen	5.070.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	5.070.880.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	03	1.03	000	4	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				25 Laporan	933.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	933.900.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	03	1.03	000	5	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				3 Laporan	278.020.547,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	278.020.547,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	03	1.04				-	445.000.000,00						445.000.000,00		
3	29	03	1.04	0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat											
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				6 Dokumen	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	420.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	03	1.04	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat											
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				2 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	03	1.07				-	323.860.000,00						323.860.000,00		
3	29	03	1.07	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan											
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan				1 Dokumen	16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	16.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan											
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				15 Laporan	307.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	307.360.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
216	3	29	05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		-	126.004.685.272,00						126.004.685.272,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	-	-	125.554.685.272,00			-	-	-	125.554.685.272,00			
3	29	05	1.07	0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT														
						Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT				14 kab/kota laporan	260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	260.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3	29	05	1.07	0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
						Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT				14 Dokumen	957.545.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	957.545.272,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3	29	05	1.07	0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				14 kab/kota unit	124.137.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	124.137.140.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3	29	05	1.07	0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah														
						Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah				14 kab/kota Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3	29	05	1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	-	-	-	-	150.000.000,00			-	-	-	150.000.000,00			
3	29	05	1.08	0004	Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi														
						Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi				14 kab/kota Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3	29	05	1.10		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	-	-	-	-	300.000.000,00			-	-	-	300.000.000,00			
3	29	05	1.10	0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota														
						Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				14 kab/kota laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3	29	05	1.10	0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota														
						Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				14 kab/kota Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
217	3	29	06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-	-	-	10.325.500.000,00			-	-	-	10.325.500.000,00			
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	-	-	775.500.000,00			-	-	-	775.500.000,00			
3	29	06	1.02	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi											
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				14 kab/kota Laporan	275.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	275.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		-	100.000.000,00						100.000.000,00		
3	29	06	1.05	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri											
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				6 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		-	9.450.000.000,00						9.450.000.000,00		
3	29	06	1.06	0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu											
			Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				3000 Keluarga	8.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	8.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				7 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				14 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 TAHUN Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
			Dinas Perdagangan dan Perindustrian					218.029.385.624,00						22.664.590.925,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					218.029.385.624,00						22.664.590.925,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					213.884.685.624,00						20.085.990.925,00		
218	3	30	01					16.797.197.175,00						17.518.106.925,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.000.000,00						78.750.000,00		
			Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah													
3	30	01	1.01	000												
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			78.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah													
3	30	01	1.02					11.297.197.175,00						11.743.106.925,00		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
			Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah													
3	30	01	1.02	000												
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/ Bulan	11.257.197.175,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-			11.683.106.925,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah													
3	30	01	1.02	000												
			Pelaksanaan Penatausahaan dan													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah													
3	30	01	1.02	000												
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah													
3	30	01	1.03					75.000.000,00						78.750.000,00		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
			Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah													
3	30	01	1.03	000												
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			78.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah													
3	30	01	1.05					100.000.000,00						105.000.000,00		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
			Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah													
3	30	01	1.05	000												
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	105.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	892.500.000,00		
3	30	01	1.06	000		Penyediaan Komponen Instalasi										
				1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	01	1.06	000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	180.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	01	1.06	000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
				5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	85.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	01	1.06	000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
				6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	85.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	85.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	01	1.06	000		Fasilitasi Kunjungan Tamu										
				8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	01	1.06	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
				9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	462.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	262.500.000,00		
3	30	01	1.07	001		Urusan Pemerintah Daerah										
				1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	262.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.885.000.000,00		
3	30	01	1.08	000		Pemerintahan Daerah										
				1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	460.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				4												

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.220.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.360.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	450.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	472.500.000,00		
3	30	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	172.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
219	3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-			-	50.000.000,00			-		-	50.000.000,00		
3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	-	-			-	25.000.000,00			-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	25.000.000,00		
3	30	02	1.03	0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya														
						Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	-	-			-	25.000.000,00			-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	25.000.000,00		
3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
						Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
220	3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	88.773.000,00			-		-	92.583.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	-	-									92.583.000,00			
3	30	03	1.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1 Unit	38.773.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	42.583.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	03	1.01	0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas														
						Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi				1 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
221	3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	-	-				194.846.936.449,00						400.892.000,00		
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	-	-				96.452.000,00				Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	98.892.000,00		
3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	04	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 laporan	46.452.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	48.892.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-				194.705.484.449,00				Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	254.750.000,00		
3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	104.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	194.610.484.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	04	1.03				-	45.000.000,00			-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	47.250.000,00		
3	30	04	1.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi											
				Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			1 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	47.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
222	3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-							452.587.500,00		
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	-					Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	452.587.500,00		
3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional											
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			2 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	159.312.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	05	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan											
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			2 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	159.312.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor											
				Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi			1 Produk	193.962.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	133.962.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
223	3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-							964.321.500,00		
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-					Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	132.000.000,00		
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				2 BPSK	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	92.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	06	1.01	000	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen										
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				5 Pengaduan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	06	1.02				-	450.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	360.000.000,00		
3	30	06	1.02	000	4	Pengembangan Layanan Kalibrasi										
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				5 Sertifikat	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	105.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	06	1.02	000	5	Pengembangan Layanan Pengujian										
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				1 laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	06	1.02	000	6	Pemantauan Mutu Produk										
			Jumlah produk potensial yang dipantau				3 Produk	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	105.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	06	1.02	000	7	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi										
			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan				3 Sertifikat	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	06	1.03				-	445.316.500,00			-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	472.321.500,00		
3	30	06	1.03	000	3	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				1 Laporan	415.316.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	422.321.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	06	1.03	000	4	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
						Jumlah Kasus yang Ditangani				5 Kasus	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
224	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-		-	582.500.000,00					-	607.500.000,00			
	3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	-		-	195.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	202.500.000,00			
3	30	07	1.01	0002		Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				2 UMKM	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	202.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
	3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-		-	192.500.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	202.500.000,00			
3	30	07	1.02	0002		Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				2 UMKM	192.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	202.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
	3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-		-	195.000.000,00			-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	202.500.000,00			
3	30	07	1.03	0005		Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
						Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer				1 Laporan	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	-	202.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						4.144.700.000,00						2.578.600.000,00		
225	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-		-	3.878.200.000,00					-	2.357.100.000,00			
	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	-		-	3.878.200.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	2.357.100.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
3	31	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi					1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					2 Dokumen	1.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	1.750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					1 Dokumen	1.928.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	407.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
226	3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-			-	100.000.000,00			-		-	100.000.000,00		
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	100.000.000,00		
3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi					2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	31	03	1.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	0				00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
227	3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-	166.500.000,00			-		-	121.500.000,00		
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-			-	166.500.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	-	121.500.000,00		
3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	166.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,		121.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah					8.276.000.000,00						9.251.000.000,00		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					8.276.000.000,00						9.251.000.000,00		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					8.276.000.000,00						9.251.000.000,00		
228	4	01	01					2.176.000.000,00						2.226.000.000,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
4	01	01	1.05					150.000.000,00				Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing			150.000.000,00	
4	01	01	1.05	000												
				9												
							10 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing			150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.06					650.000.000,00				Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah			700.000.000,00	
4	01	01	1.06	000												
				2												
							19 Paket	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah			180.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.06	000												
				5												
							2 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			40.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.06	000												
				9												
							3 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			450.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.06	001												
				1												
							1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah			30.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.08					1.335.000.000,00				Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah			1.335.000.000,00	
4	01	01	1.08	000												
				1												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	5.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01 01	1.08 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	30.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01 01	1.08 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun Laporan	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.300.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	41.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	41.000.000,00		
4	01 01	1.09 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	31.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	31.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01 01	1.09 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	10.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
229	4 01 03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	6.100.000.000,00			-		-	7.025.000.000,00		
4	01 03	1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-	-	-	-	2.450.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	2.475.000.000,00		
4	01 03	1.01 000 1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	75.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01 03	1.01 000 2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01 03	1.01 000 3	Fasilitasi Penataan Wilayah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				5 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	2.000.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-									3.400.000.000,00			
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				2 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku		700.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				6 Dokumen	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		1.950.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				7 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		750.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-				1.050.000.000,00						1.150.000.000,00		
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
						Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				2 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
						Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				2 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah,		350.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
						Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				2 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
					Biro Kesejahteraan Rakyat						157.209.446.638,00						158.105.000.000,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						157.209.446.638,00						158.105.000.000,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						157.209.446.638,00						158.105.000.000,00		
230	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				4.175.000.000,00						4.255.000.000,00		
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				530.000.000,00				Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		530.000.000,00		
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		500.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	30.000.000,00		-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	30.000.000,00		
4	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	50.000.000,00		-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	75.000.000,00		
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		75.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.05				-	160.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		210.000.000,00	
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi											
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.06				-	2.300.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		2.300.000.000,00	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		1.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan											

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	1.200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.105.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	1.110.000.000,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	800.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	800.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
231	4	01	04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	153.034.446.638,00			-		-	153.850.000.000,00		
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	-			-	149.884.446.638,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	150.700.000.000,00		
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				200 Unit	149.184.446.638,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	150.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				100 Lembaga	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	700.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-			-	1.650.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	1.650.000.000,00		
4	01 04 1.02 000 1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 04 1.02 000 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				2 Dokumen	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	950.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 04 1.02 000 3	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 04 1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	-			-	1.500.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	1.500.000.000,00		
4	01 04 1.03 000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	500.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 04 1.03 000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				2 Dokumen	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		650.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 04 1.03 000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing		350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Biro Hukum											4.778.850.000,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											4.778.850.000,00			
4	01	SEKRETARIAT DAERAH											4.778.850.000,00			
232	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											1.601.250.000,00			
4	01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						303.100.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		303.100.000,00		
4	01 01 1.01 000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	209.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		209.000.000,00	BIRO HUKUM	
4	01 01 1.01 000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		11.000.000,00	BIRO HUKUM	
4	01 01 1.01 000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		6.600.000,00	BIRO HUKUM	
4	01 01 1.01 000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.700.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		7.700.000,00	BIRO HUKUM	
4	01 01 1.01 000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	8.800.000,00	BIRO HUKUM	
4	01 01 1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	60.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	BIRO HUKUM	
4	01 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	263.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	263.000.000,00		
4	01 01 1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	263.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	263.000.000,00	BIRO HUKUM	
4	01 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	450.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	450.000.000,00		
4	01 01 1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	450.000.000,00	BIRO HUKUM	
4	01 01 1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-		-	80.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	80.000.000,00		
4	01 01 1.07	0007	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	80.000.000,00	BIRO HUKUM	
4	01 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	789.088.700,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	789.088.700,00		
4	01 01 1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.500.000,00	BIRO HUKUM	
4	01 01 1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				25 Laporan	787.588.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	787.588.700,00	BIRO HUKUM	
4	01 01 1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	23.650.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	23.650.000,00		
4	01 01 1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	23.650.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	23.650.000,00	BIRO HUKUM	
233	4 01 05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	-	-		-	3.177.600.000,00			-		-	3.177.600.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-	-	-	-	1.830.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.830.000.000,00			
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum				63 Dokumen	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	750.000.000,00	BIRO HUKUM		
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum				600 Dokumen	90.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	90.000.000,00	BIRO HUKUM		
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				3 Dokumen	240.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	240.000.000,00	BIRO HUKUM		
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum				339 Dokumen	750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	750.000.000,00	BIRO HUKUM		
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	-	-	1.347.600.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.347.600.000,00			
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				10 Kasus	860.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	860.000.000,00	BIRO HUKUM		
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				10 Kasus	487.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	487.600.000,00	BIRO HUKUM		
					Biro Perencanaan					4.085.047.688,00							4.285.047.688,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					4.085.047.688,00							4.285.047.688,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					4.085.047.688,00							4.285.047.688,00		
234	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	1.170.047.688,00							1.220.047.688,00		
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	20.000.000,00							30.000.000,00		
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	15.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN		
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	15.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	10.000.000,00							15.000.000,00		
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	-	-	35.000.000,00		
4	01 01 1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	35.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	465.047.688,00			-	-	-	470.047.688,00		
4	01 01 1.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.047.688,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	80.047.688,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 01 1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 01 1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	345.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	350.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	-	-	525.000.000,00		
4	01 01 1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	525.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	140.000.000,00			-	-	-	145.000.000,00		
4	01 01 1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diharapkan Pajaknya				10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 01 1.09	0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	45.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
235	4 01 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	2.915.000.000,00			-	-	-	3.065.000.000,00		
4	01 06 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-	-			-	1.215.000.000,00			-	-	-	1.225.000.000,00		
4	01 06 1.01	0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	875.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	875.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 06 1.01	0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				2 Dokumen	340.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	350.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-	-			-	700.000.000,00			-	-	-	790.000.000,00		
4	01 06 1.02 000 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				3 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	280.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 06 1.02 000 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	250.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 06 1.02 000 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				2 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	260.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	-			-	1.000.000.000,00			-	-	-	1.050.000.000,00		
4	01 06 1.03 000 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				5 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	400.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 06 1.03 000 2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	250.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01 06 1.03 000 4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	400.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	
			Biro Pengadaan Barang dan Jasa						4.315.039.152,00						4.489.804.780,00	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						4.315.039.152,00						4.489.804.780,00	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH						4.315.039.152,00						4.489.804.780,00	
236	4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.785.144.152,00						1.861.759.780,00	
4	01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	42.000.000,00			-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	45.000.000,00		
4	01 01 1.01 000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		7.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	01	1.01	000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		7.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	01	1.01	000	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		7.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	01	1.01	000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		7.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	01	1.01	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		7.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	01	1.01	000	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		7.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								172.500.000,00		
4	01	01	1.02	000	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	01	1.02	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		7.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	01	1.02	000	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	7.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01 01 1.02 000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	7.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	330.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	355.000.000,00		
4	01 01 1.05 000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				40 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	85.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01 01 1.05 000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	145.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01 01 1.05 001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	125.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	457.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	470.259.780,00		
4	01 01 1.06 000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	121.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01 01 1.06 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01 01 1.06 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	29.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01 01 1.06 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	267.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	270.259.780,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-			-	55.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00		
4	01 01 1.07 000 6	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	735.144.152,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	759.000.000,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	362.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	369.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	55.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	298.144.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	305.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
237	4	01	07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-	2.529.895.000,00			-		-	-	2.628.045.000,00		
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	392.245.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	405.895.000,00		
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			1 Laporan	142.245.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	147.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			1 Laporan	165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	168.805.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			1 Laporan	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	90.090.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	-	1.642.650.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	1.713.150.000,00		
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			1 Laporan	1.312.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	1.338.150.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			1 Laporan	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	225.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
4	01 07 1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	495.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	509.000.000,00		
4	01 07 1.03 000 1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				1 Orang	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	189.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01 07 1.03 000 2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	185.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01 07 1.03 000 3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	135.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Biro Administrasi Pembangunan					3.793.827.707,00							4.208.282.700,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					3.793.827.707,00							4.208.282.700,00		
4	01	SEKRETARIAT DAERAH					3.793.827.707,00							4.208.282.700,00		
238	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Kegiatan		6 Kegiatan	2.143.827.707,00						6 Kegiatan	2.393.782.700,00		
4	01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-		9 Dokumen	580.000.000,00					Biro Administrasi Pembangunan	-	640.500.000,00		
4	01 01 1.01 000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Biro Administrasi Pembangunan	-	11.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	01 01 1.01 000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Biro Administrasi Pembangunan	-	11.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	01 01 1.01 000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Biro Administrasi Pembangunan	-	11.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	01 01 1.01 000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Biro Administrasi Pembangunan	-	11.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	01 01 1.01 000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Biro Administrasi Pembangunan	-	11.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan		550.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan		33.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	-			2 Laporan	29.934.300,00			-	-	Biro Administrasi Pembangunan		33.000.000,00			
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14.934.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan		16.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan		16.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-			22 Orang	200.000.000,00			-	-	Biro Administrasi Pembangunan		220.000.000,00			
4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan		110.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	100.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan		110.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor	-			5 Paket	854.316.607,00			-	-	Biro Administrasi Pembangunan		972.748.300,00			
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	354.060.300,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan		389.466.300,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	46.428.600,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan		51.071.500,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					1 Laporan	393.827.707,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan	433.210.500,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan	99.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	-			7 Unit	0,00			-	-		0,00			
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					6 Unit	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Laporan	433.664.000,00			-	-	Biro Administrasi Pembangunan	477.030.400,00			
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan	110.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	333.664.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan	367.030.400,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	-			48 unit	45.912.800,00			-	-	Biro Administrasi Pembangunan	50.504.000,00			
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					13 Unit	20.405.800,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan	22.446.300,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35 Unit	25.507.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pembangunan	28.057.700,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
239	4	01	08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Dokumen Data Pelaporan dan Data capaian Realisasi Keuangan dan pembangunan yang Tenar Waktu	100 %			100 %	1.650.000.000,00			-	-		100 %	1.814.500.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-			80 Laporan	950.000.000,00				Provinsi Kalimantan Tengah	-	1.044.500.000,00					
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				12 Laporan	425.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Tengah		467.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				12 Laporan	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Tengah		192.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				56 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Tengah		385.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-			12 Dokumen	700.000.000,00				Provinsi Kalimantan Tengah	-	770.000.000,00					
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				4 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Tengah		165.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				4 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Tengah		165.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				4 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Tengah		440.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
						Biro Organisasi					2.751.910.175,00								2.782.800.000,00			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													2.751.910.175,00			2.782.800.000,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH													2.751.910.175,00			2.782.800.000,00	
240	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.360.110.175,00								-	1.391.000.000,00		
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	130.000.000,00			Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	130.000.000,00					
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	130.000.000,00	BIRO ORGANISASI			
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	60.000.000,00					
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kenezerawalan				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
4	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	385.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	385.000.000,00		
4	01 01 1.06 000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	180.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
4	01 01 1.06 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan				12 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	25.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
4	01 01 1.06 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	180.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
4	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	735.110.175,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	746.000.000,00		
4	01 01 1.08 000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	20.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
4	01 01 1.08 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	725.110.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	726.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
4	01 01 1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	50.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	70.000.000,00		
4	01 01 1.13 000 2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	70.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
241	4 01 02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	-	-			-	1.391.800.000,00			-		-	1.391.800.000,00		
4	01 02 1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-			-	550.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	550.000.000,00		
4	01 02 1.01 000 1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				36 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	200.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
4	01 02 1.01 000 2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				14 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
4	01 02 1.01 000 3	Penataan Analisis Jabatan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan			36 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	200.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
4	01	02	1.02		Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-		-	841.800.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	841.800.000,00			
4	01	02	1.02	000	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
				1		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1 Dokumen	241.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	241.800.000,00	BIRO ORGANISASI		
4	01	02	1.02	000	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
				2		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
4	01	02	1.02	000	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
				3		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
4	01	02	1.02	000	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
				4		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan			2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
4	01	02	1.02	000	Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
				5		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
						Biro Umum					142.355.386.131,00						140.114.743.494,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH														
242	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		-	142.355.386.131,00					-	140.114.743.494,00			
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	220.000.000,00				Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	231.250.000,00			
4	01	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
				1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	31.250.000,00	BIRO UMUM		
4	01	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
				2		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	31.250.000,00	BIRO UMUM		
4	01	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
				3		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	37.500.000,00	BIRO UMUM		
4	01	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
				4															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		31.250.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.01	0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		37.500.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.01	0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		31.250.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.01	0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		31.250.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.02				-	67.973.073.631,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	81.369.730.994,00		
4	01	01	1.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				400 Orang/Bulan	67.691.573.631,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		81.088.230.994,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.02	0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		130.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.02	0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		80.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.02	0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	71.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah		71.500.000,00	BIRO UMUM	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				845.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	864.750.000,00		
4	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	17.250.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	520.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	525.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					6 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	307.500.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				1.250.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.715.000.000,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut					1 Paket	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.450.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					40 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	265.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan					20 Orang	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				9.900.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	9.215.000.000,00		
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	800.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	825.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.06 000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Paket	900.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	575.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.06 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4 Paket	475.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	475.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.06 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	3.575.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.06 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				4 Laporan	3.575.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	3.600.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.06 001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	165.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	16.950.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	3.375.000.000,00		
4	01 01	1.07 000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5 Unit	3.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.07 000 5	Pengadaan Mebel				10 Paket	1.750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.775.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.07 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8 Unit	1.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	500.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.07 000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.07 001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	1.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.07 001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.100.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	17.400.562.500,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	16.271.000.000,00		
4	01 01	1.08 000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	90.562.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	91.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.08 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	5.150.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.08 000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	915.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.08 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.110.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	10.115.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	14.770.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	14.940.000.000,00		
4	01 01	1.09 000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihavakan Pajaknya				6 Unit	1.300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.100.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01 01	1.09 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				83 Unit	2.550.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	2.600.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.09	000	5	Pemeliharaan Mebel										
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	450.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	450.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.09	000	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.200.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.09	000	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				6 Unit	170.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	90.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	7.500.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.09	001	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	500.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.09	001	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	1.200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	1.500.000.000,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-				Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	4.008.012.500,00		
4	01	01	1.11	000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	396.750.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	456.262.500,00	BIRO UMUM	
4	01	01	1.11	000	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	210.000.000,00	BIRO UMUM	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	300.000.000,00	BIRO UMUM		
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	3.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	3.041.750.000,00	BIRO UMUM		
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	8.150.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	8.125.000.000,00			
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				4 Paket	4.300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	4.400.000.000,00	BIRO UMUM		
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				4 Paket	3.250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	3.300.000.000,00	BIRO UMUM		
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga				1 Paket	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	425.000.000,00	BIRO UMUM		
					Biro Administrasi Pimpinan					7.241.488.081,00						0,00			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					7.241.488.081,00						0,00			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					7.241.488.081,00						0,00			
243	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	7.241.488.081,00						0,00			
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	163.399.174,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00			
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	163.399.174,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	297.660.584,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00			
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi				450 Dokumen	156.325.222,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	141.335.362,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.226.468.913,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00		
4	01	01	1.06	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	445.505.343,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.06	000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	46.479.721,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	334.483.849,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-			-	1.244.924.732,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00		
4	01	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	3.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Laporan	1.241.924.732,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	66.277.824,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00		
4	01	01	1.09	000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibavarkan Pakainya				2 Unit	66.277.824,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.13			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	1.854.998.999,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00		
4	01	01	1.13	000	1	Penyiapan Materi Pimpinan														
							Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				250 Dokumen	480.330.809,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
4	01	01	1.13	000	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					750 Laporan	537.176.688,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.13	000	3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				60 Laporan	837.491.502,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.14			Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-	2.387.757.855,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00		
4	01	01	1.14	000	1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					700 Laporan	884.165.659,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.14	000	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				250 Laporan	428.398.651,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.14	000	3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				700 Laporan	1.075.193.545,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
						Sekretariat DPRD						100.685.464.153,00							100.685.464.153,00	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.685.464.153,00							100.685.464.153,00	
244	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	58.061.897.081,00							58.061.897.081,00	
4	02	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	480.359.510,00							480.359.510,00	
4	02	01	1.01	000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	345.439.854,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				345.439.854,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.01	000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	32.022.709,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				32.022.709,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.01	000	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	27.906.642,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-				27.906.642,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.01	000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	33.832.406,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-				33.832.406,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.01	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	32.157.899,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	32.157.899,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	9.529.655.578,00	-	-	-	-	9.529.655.578,00	
4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	8.579.655.578,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	8.579.655.578,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	850.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	178.100.000,00	-	-	-	-	178.100.000,00	
4	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	151.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	151.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.03	000	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	26.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	26.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	575.992.382,00		
4	02	01	1.05	000	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	375.992.382,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	375.992.382,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.05	000	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				67 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	2.137.246.766,00		
4	02	01	1.06	000	1	Penyediaan Komponen Instalasi										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.06	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.06	000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	298.512.742,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	298.512.742,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	293.734.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	293.734.024,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.06	000	7	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	850.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-	-	-	-	-	849.971.778,00		
4	02	01	1.07	000	5	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	249.971.778,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	249.971.778,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.07	000	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	-	-	-	7.554.494.335,00		
			Jumlah Paket Jasa Penunjang Urusan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemerintahan Daerah													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	22.168.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	22.168.200,00	SEKRETARIAT DPRD		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Laporan	1.345.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.345.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
4	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Laporan	111.984.215,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	111.984.215,00	SEKRETARIAT DPRD		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan	6.075.341.920,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6.075.341.920,00	SEKRETARIAT DPRD		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan														
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.650.000.000,00			-	-	-	2.650.000.000,00			
4	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				14 Unit	950.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diharapkan Pajaknya														
4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14 Unit	750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara														
4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 Unit	950.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-		-	33.255.339.152,00			-	-	-	33.255.339.152,00			
4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				45 Orang/ Bulan	30.697.684.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	30.697.684.152,00	SEKRETARIAT DPRD		
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD														
4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1 Paket	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan														
4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				45 Orang	1.807.655.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.807.655.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD														
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-		-	850.737.580,00			-	-	-	850.737.580,00			
4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	91.506.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	91.506.080,00	SEKRETARIAT DPRD		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	759.231.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-		759.231.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
245	4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-			-	42.623.567.072,00			-	-		42.623.567.072,00		
	4 02 02 1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	-	-			-	4.300.289.000,00			-	-		4.300.289.000,00		
	4 02 02 1.01 000 1	Penyusunan dan Pembahasan Program														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	800.289.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		800.289.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 1.01 000 6	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				1000 Orang	3.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-		3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	11.358.092.562,00			-	-		11.358.092.562,00		
	4 02 02 1.04 000 2	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen Dokumen	1.519.203.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.519.203.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 1.04 000 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				18 Orang	1.350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 1.04 000 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				14 Orang	387.454.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		387.454.380,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 1.04 000 8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				20 Dokumen	8.101.434.582,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8.101.434.582,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	16.765.185.510,00			-	-		16.765.185.510,00		
	4 02 02 1.05 000 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				10 Laporan	6.618.902.118,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6.618.902.118,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 1.05 000 3	Pelaksanaan Reses														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	10.146.283.392,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10.146.283.392,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	10.200.000.000,00			-	-		10.200.000.000,00		
	4 02 02 1.08 000 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				20 Dokumen	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 1.08 000 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan						60.842.171.883,00						54.604.500.000,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						56.460.171.883,00						53.104.500.000,00		
	5 01	PERENCANAAN						42.650.171.883,00						34.299.500.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
246	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	30.185.171.883,00					-	21.140.000.000,00				
	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	210.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	235.000.000,00			
	5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	60.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.511.171.883,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	11.600.000.000,00			
	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/Bulan	10.986.171.883,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	11.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	1.02	000	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	1.02	000	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	1.02	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	1.02	000	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	95.000.000,00		
5	01	01	1.03	000	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	95.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	400.000.000,00		
5	01	01	1.05	000	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	1.05	000	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	1.05	000	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.05 001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.960.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.700.000.000,00		
5	01 01 1.06 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.06 000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	450.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.06 000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.06 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.06 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.06 000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.06 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.06 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	850.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.06 001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	125.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.06 001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.07 000 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang						1.600.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.300.000.000,00		
5	01 01 1.07 000 2	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	1.050.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.07 000 5	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.07 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	450.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.08 000 1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.609.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.460.000.000,00		
5	01 01 1.08 000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.08 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	1.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	950.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 01 1.08 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-									2.350.000.000,00			
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihavarkan Pakainya				15 Unit	400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	10.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
247	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-				4.650.000.000,00						5.550.000.000,00		
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-				2.600.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.000.000.000,00		
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				2 Berita Acara	700.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
5	01	02	1.01	000	6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi				4 Dokumen	700.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	01	02	1.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	700.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00			
5	01	02	1.02	000	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	01	02	1.02	000	2	Pembiayaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				250 Orang	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	01	02	1.02	000	3	Pembiayaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				250 Orang	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	01	02	1.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	1.350.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.550.000.000,00			
5	01	02	1.03	000	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi				4 Laporan	900.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	01	02	1.03	000	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	01	02	1.03	000	4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				14 Dokumen	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
248	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	7.815.000.000,00			-		-	7.609.500.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	2.250.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.585.000.000,00				
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	70.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	984.612.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	724.153.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	1.020.388.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	615.847.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-	2.500.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.655.000.000,00				
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	270.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 03	1.02 000 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 03	1.02 000 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 03	1.02 000 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				4 Dokumen	870.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	870.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 03	1.02 000 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	260.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 03	1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	-	3.065.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.369.500.000,00		
5	01 03	1.03 000 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				2 Dokumen	815.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 03	1.03 000 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 03	1.03 000 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 03 1.03 000 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 03 1.03 000 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	319.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01 03 1.03 000 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
249	5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														
								13.810.000.000,00						18.805.000.000,00		
5	05 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan														
								2.020.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.045.000.000,00		
5	05 02 1.01 000 2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				4 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05 02 1.01 000 3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05 02 1.01 000 5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				3 Laporan	700.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05 02 1.01 001 2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	1.02					4.800.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	6.400.000.000,00		
5	05	02	1.02	0001			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	1.02	0002			Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	1.02	0003			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	1.02	0004			Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	1.02	0005			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	1.02	0006			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	1.02	0009			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	1.02	0010			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	1.03					6.000.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	8.000.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan			1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan			1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	1.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	1.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05 02 1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	990.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.360.000.000,00		
5	05 02 1.04 000 1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05 02 1.04 000 2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05 02 1.04 000 3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05 02 1.04 000 4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
X			NON URUSAN											1.500.000.000,00		
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX											1.500.000.000,00		
250	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											1.500.000.000,00			
X	XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.382.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.500.000.000,00		
X	XX 01 1.09 001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.382.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Badan Keuangan dan Aset Daerah											1.416.827.231.745,00	1.419.045.709.733,00	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											1.416.827.231.745,00	1.419.045.709.733,00	
5	02		KEUANGAN											1.416.827.231.745,00	1.419.045.709.733,00	
251	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %			100 %	26.971.413.269,00			-		100 %	28.392.468.909,00		
5	02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-			100 %	317.105.601,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	348.816.161,00		
5	02 01 1.01 000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	85.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	93.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.01	000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	21.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	23.650.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.01	000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	16.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.01	000			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	16.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.01	000			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	16.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.01	000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	8.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	8.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.01	000			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	157.605.601,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	173.366.161,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.02				100 %	11.949.651.905,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	13.145.717.094,00		
5	02	01	1.02	000			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	11.764.074.354,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	12.941.581.789,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.02	000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	51.871.413,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	57.058.554,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.02	000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	48.692.772,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	53.562.049,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	85.013.366,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	93.514.702,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Pengamanan/Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %	835.158.798,00			Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	918.674.676,00		
5	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	433.202.379,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	476.522.616,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD											
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				7 Dokumen	401.956.419,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	442.152.060,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	-	100 %	306.976.812,00			Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	306.976.812,00		
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	306.976.812,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	306.976.812,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	-	100 %	3.055.390.470,00			Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.341.579.516,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	41.037.150,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	45.140.865,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1.093.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.093.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	96.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	106.480.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
5	02	01	1.06	000	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					2 Dokumen	130.680.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	143.748.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.06	000	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	130.680.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	143.748.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.06	000	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	120.338.904,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	132.372.794,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.06	000	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.051.977.101,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	277.174.811,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.06	001	01	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	171.057.315,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	188.163.046,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Fasilitasi Pengadaan BMD PD	-			100 %	557.300.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	613.030.000,00		
5	02	01	1.07	000	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	457.300.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	503.030.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.07	001	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Fasilitasi Penunjang Urusan PD	-			100 %	4.331.656.350,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	4.764.821.984,00		
5	02	01	1.08	000	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	27.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.08	000	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	803.234.076,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	883.557.483,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.08	000	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	88.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.08	000	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.423.422.274,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.765.764.501,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Aset BMD pada PD	-			100 %	5.618.173.333,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	5.952.852.666,00		
5	02	01	1.09	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2 Unit	798.113.333,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	877.924.666,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.09	000	5	Pemeliharaan Mebel				12 Unit	9.680.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	10.648.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.09	000	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5 Unit	39.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	42.900.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3 Unit	2.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.09	001	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 Unit	2.271.380.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.271.380.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
252	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja kesehatan (10%) Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Persentase belanja pendidikan (20%) Persentase SILPA Penetapan APBD	Tepat Waktu 10,03% 6,33% 14Kab/Kota 30,96% 6,33% Tepat Waktu		10,03 % 14 Kab/Kota 30,96 % 6,33 % Tepat Waktu	1.387.746.503.309,00			-			Tepat Waktu 10,03% 6,33% 14Kab/Kota 30,96% 6,33%	1.388.060.994.143,00	
5	02	02	1.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-		100 %	3.413.100.270,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.534.410.294,00		
5	02	02	1.01	000	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				2 Dokumen	429.929.750,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	472.922.725,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.01	000	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA				2 Dokumen	230.326.288,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	143.358.916,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.01	000	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	490.623.964,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	539.686.360,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.01	000	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional					Daerah			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	485.647.657,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	534.212.422,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	02	1.01	000	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	428.550.936,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	361.406.029,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	02	1.01	001	3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				1 Orang	1.348.021.675,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.482.823.842,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	02	1.02			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-				100 %	517.940.712,00		-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	569.734.783,00	
5	02	02	1.02	000	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				1 Laporan	85.580.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	94.138.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	02	1.02	000	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				2 Laporan	137.049.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.754.450,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	02	1.02	000	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				2 Laporan	127.140.060,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	139.854.066,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	02	1.02	000	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Laporan	168.171.152,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	184.988.267,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	02	1.03			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				100 %	811.433.218,00		-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	892.576.537,00	
5	02	02	1.03	000	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional					Daerah		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				4 Dokumen	206.699.836,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	227.369.819,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	02	1.03	000	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya												
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	167.620.416,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	184.382.457,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	02	1.03	000	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank												
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	252.206.797,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	277.427.476,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	02	1.03	000	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait												
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	184.906.169,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	203.396.785,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	02	1.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-			100 %	602.434.207,00			Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	662.677.627,00	
5	02	02	1.04	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi												
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	280.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	308.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	02	1.04	000	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah												
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	216.404.750,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	238.045.225,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	02	1.04	001	0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah												
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	106.029.457,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	116.632.402,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	02	1.05			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Bantuan/Hibah/Bansos Keuangan Daerah	-			100 %	1.382.401.594.902,00			Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.382.401.594.902,00	
5	02	02	1.05	000	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	24.279.734.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	24.279.734.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.05	000	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	157.122.806.028,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA DARURAT	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	157.122.806.028,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.05	001	0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi										
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	1.200.999.054.574,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.200.999.054.574,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
253	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP Nilai				WTP Nilai		2.592.246.681,00		
5	02	03	1.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terlaksananya Fasilitasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				100 %	2.109.315.167,00		2.592.246.681,00	
5	02	03	1.01	000	1	Penyusunan Standar Harga										
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				20 Dokumen	225.681.749,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	248.249.923,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	1.01	000	3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				20 Dokumen	24.693.680,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	27.163.048,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	1.01	000	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	272.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	272.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	1.01	000	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				14 Laporan	203.039.331,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	223.343.264,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	1.01	000	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	249.148.523,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	274.063.375,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	1.01	000	7	Pengamanan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	588.652.749,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	647.518.023,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	1.01	000	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	221.528.735,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	542.881.608,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	1.01	001	0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsuhan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	238.574.490,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	262.431.939,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	03	1.01	001	1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	69.440.690,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	76.384.759,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	03	1.01	001	2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah											
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	16.555.220,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	18.210.742,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			Badan Pendapatan Daerah						134.085.037.201,00						0,00		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						133.725.037.201,00							0,00	
5	02		KEUANGAN						132.985.037.201,00							0,00	
254	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							0,00		
5	02	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							0,00		
5	02	01	1.01	000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	338.061.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	01	1.01	000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD											
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	498.518.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	01	1.01	000	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	01	1.01	000	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	503.589.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							0,00		
5	02	01	1.02	000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				153 Orang/Bulan	77.109.134.759,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	01	1.02	000	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	01	1.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-							0,00		
5	02	01	1.04	000	4	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				12 Dokumen	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 01 1.05 000 8	Pemindahan Tugas ASN														
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				12 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	8.678.234.064,00			-	-	-	0,00		
5	02 01 1.06 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.215.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 01 1.06 000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.019.172.624,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 01 1.06 000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.573.601.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 01 1.06 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	470.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 01 1.06 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-			-	14.860.037.193,00			-	-	-	0,00		
5	02 01 1.07 000 5	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 01 1.07 001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	13.360.037.193,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-			-	3.000.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 01 1.08 000 1	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 01 1.08 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 01 1.08 000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.09					5.711.776.044,00			-	-	-	0,00		
5	02	01	1.09	0005												
							15 Unit	121.300.044,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.09	0007												
							15 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.09	0009												
							15 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.09	0011												
							15 Unit	4.490.476.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
255	5	02	02					7.982.402.300,00						0,00		
5	02	02	1.01					804.113.300,00						0,00		
5	02	02	1.01	0010												
							4 Dokumen	804.113.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	1.03					7.178.289.000,00						0,00		
5	02	02	1.03	0005												
							12 Dokumen	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	1.03	0010												
							12 Dokumen	6.328.289.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
256	5	02	03					1.500.000.000,00						0,00		
5	02	03	1.01					1.500.000.000,00						0,00		
5	02	03	1.01	0006												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				12 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 03 1.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				12 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
257	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	10.930.783.351,00						0,00		
5	02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	10.930.783.351,00						0,00		
5	02 04 1.01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 04 1.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				15 Sarana dan Prasarana	2.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 04 1.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	430.783.351,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 04 1.01 0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen Ketetapan	1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 04 1.01 0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				12 Dokumen	1.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 04 1.01 0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen SSPD	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 04 1.01 0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti				12 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02 04 1.01 0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						740.000.000,00						0,00		
258	5 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	740.000.000,00						0,00		
5	04 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	740.000.000,00						0,00		
5	04 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	740.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
X		NON URUSAN						360.000.000,00						0,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.230.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PALANGKA RAYA	
5	02 01 1.08 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	222.444.540,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PALANGKA RAYA	
5	02 01 1.08 000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PALANGKA RAYA	
5	02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						107.530.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 01 1.09 000 5	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	2.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PALANGKA RAYA	
5	02 01 1.09 000 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	70.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PALANGKA RAYA	
5	02 01 1.09 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.030.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PALANGKA RAYA	
261	5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						35.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						35.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 02 1.03 001 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PALANGKA RAYA	
262	5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						16.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						16.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 03 1.01 000 7	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	16.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PALANGKA RAYA	
263	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						650.200.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						650.200.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 04 1.01 001 0	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	275.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PALANGKA RAYA	
5	02 04 1.01 001 2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	375.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PALANGKA RAYA	
			UPTPPD KASONGAN					1.098.323.120,00						0,00		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					1.082.323.120,00						0,00		
5	02		KEUANGAN					1.082.323.120,00						0,00		
264	5	02	01					394.723.120,00						0,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		-							0,00		
5	02	01	1.06					208.282.000,00						0,00		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-							0,00		
5	02	01	1.06	000												
			Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN	
5	02	01	1.06	000												
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	66.332.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN	
5	02	01	1.06	000												
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN	
5	02	01	1.06	000												
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN	
5	02	01	1.06	000												
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	33.950.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN	
5	02	01	1.06	000												
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN	
5	02	01	1.06	000												
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	70.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN	
5	02	01	1.08					98.941.120,00						0,00		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-		-							0,00		
			Pemerintahan Daerah													
5	02	01	1.08	000												
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.630.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN	
5	02	01	1.08	000												
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	95.311.120,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN	
5	02	01	1.09					87.500.000,00						0,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-		-							0,00		
			Pemerintahan Daerah													
5	02	01	1.09	000												
			Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					1 Unit	60.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	25.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN		
265	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	0,00			
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	0,00			
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN		
266	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	4.000.000,00			-	-	-	0,00			
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	4.000.000,00			-	-	-	0,00			
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN		
267	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	673.600.000,00			-	-	-	0,00			
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	673.600.000,00			-	-	-	0,00			
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah					12 Dokumen SSPD	298.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN		
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					12 Laporan	375.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN		
X					NON URUSAN						16.000.000,00						0,00			
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						16.000.000,00						0,00			
268	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	16.000.000,00			-	-	-	0,00			
X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	16.000.000,00			-	-	-	0,00			
X	XX	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Laporan	16.000.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KASONGAN		
					UPTPPD SAMPIT						1.303.378.500,00						0,00			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.266.795.700,00						0,00			
5	02				KEUANGAN						1.266.795.700,00						0,00			
269	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	542.836.700,00			-	-	-	0,00			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	252.520.200,00			-	-	-	0,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SAMPIT		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan														
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Paket	126.965.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SAMPIT		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1 Paket	25.555.200,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SAMPIT		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan														
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SAMPIT		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan														
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SAMPIT		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	177.816.500,00			-	-	-	0,00			
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SAMPIT		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Laporan	152.828.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SAMPIT		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Laporan	19.988.500,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SAMPIT		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	112.500.000,00			-	-	-	0,00			
5	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel				4 Unit	2.500.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SAMPIT		
					Jumlah Mebel yang Dipelihara														
5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				4 Unit	70.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SAMPIT		
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara														
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SAMPIT		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
270	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	34.959.000,00			-	-	-	0,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-				34.959.000,00								
5	02	02	1.03	001	0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan													
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	34.959.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD SAMPIT	
271	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-				9.000.000,00						0,00		
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-				9.000.000,00						0,00		
5	02	03	1.01	000	7	Pengamanan Barang Milik Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD SAMPIT	
272	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-				680.000.000,00						0,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-				680.000.000,00						0,00		
5	02	04	1.01	001	0	Penagihan Pajak Daerah													
						Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	305.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD SAMPIT	
5	02	04	1.01	001	2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Laporan	375.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD SAMPIT	
X					NON URUSAN						36.582.800,00						0,00		
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						36.582.800,00						0,00		
273	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				36.582.800,00						0,00		
X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				36.582.800,00						0,00		
X	XX	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	36.582.800,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD SAMPIT	
X	XX	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD SAMPIT	
						UPTPPD PANGKALAN BUN													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.382.838.262,00						0,00		
5	02				KEUANGAN						1.382.838.262,00						0,00		
274	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				672.545.262,00						0,00		
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				20.000.000,00						0,00		
5	02	01	1.05	000	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				305.415.268,00						0,00		
5	02	01	1.06	000	1	Penyediaan Komponen Instalasi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN	
5	02	01	1.06	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	124.400.100,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN	
5	02	01	1.06	000	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.025.168,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN	
5	02	01	1.06	000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.500.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN	
5	02	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	36.490.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN	
5	02	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN	
5	02	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	90.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN	
5	02	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang										
			Urusan Pemerintah Daerah				-	18.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02	01	1.07	001	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	18.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN	
5	02	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan										
			Pemerintahan Daerah				-	189.129.994,00			-	-	-	0,00		
5	02	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5.630.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN	
5	02	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	165.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN	
5	02	01	1.08	000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	18.499.994,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-									0,00			
5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	80.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	60.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN		
275	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			20.000.000,00						0,00			
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			20.000.000,00						0,00			
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN		
276	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			5.293.000,00						0,00			
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			5.293.000,00						0,00			
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			4 Laporan	5.293.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN		
277	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			685.000.000,00						0,00			
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			685.000.000,00						0,00			
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah														
						Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			4 Dokumen SSPD	305.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN		
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			12 Laporan	380.000.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN		
X					NON URUSAN					12.500.000,00						0,00			
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					12.500.000,00						0,00			
278	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			12.500.000,00						0,00			
X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			12.500.000,00						0,00			
X	XX	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara			1 Unit	12.500.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PANGKALAN BUN		
										1.145.851.354,00						0,00			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					1.145.851.354,00						0,00			
5	02				KEUANGAN					1.145.851.354,00						0,00			
279	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			450.215.146,00						0,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				256.441.355,00			-	-	0,00			
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					1 Paket	13.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	91.388.755,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.102.600,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	33.950.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Laporan	90.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	102.223.792,00			-	-	0,00			
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemerintahan Daerah				4 Laporan	5.630.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	79.093.792,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	17.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	91.549.999,00			-	-	0,00			
5	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemerintahan Daerah				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	60.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
5	02	01	1.09	0009												
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.049.999,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
280	5	02	02				-	15.050.000,00					0,00			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-											
5	02	02	1.03				-	15.050.000,00					0,00			
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-											
5	02	02	1.03	0010												
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan													
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	15.050.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
281	5	02	03				-	5.906.208,00					0,00			
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-											
5	02	03	1.01				-	5.906.208,00					0,00			
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-											
5	02	03	1.01	0007												
			Pengamanan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	5.906.208,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
282	5	02	04				-	674.680.000,00					0,00			
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-											
5	02	04	1.01				-	674.680.000,00					0,00			
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-											
5	02	04	1.01	0010												
			Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	299.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
5	02	04	1.01	0012												
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	375.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD KUALA PEMBUANG		
			UPTPPD NANGA BULIK					1.113.470.000,00					0,00			
5								1.113.470.000,00					0,00			
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02							1.113.470.000,00					0,00			
			KEUANGAN													
283	5	02	01				-	417.870.000,00					0,00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-											
5	02	01	1.06				-	216.390.000,00					0,00			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
5	02	01	1.06	0001												
			Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK		
5	02	01	1.06	0002												
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	71.440.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK		
5	02	01	1.06	0003												
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
5	02	01	1.06	000												
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
5	02	01	1.06	000												
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	33.950.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
5	02	01	1.06	000												
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
5	02	01	1.06	000												
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	70.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
5	02	01	1.07													
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					20.000.000,00			-	-	-	0,00		
			Urusan Pemerintah Daerah													
5	02	01	1.07	001												
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
5	02	01	1.08													
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					91.480.000,00			-	-	-	0,00		
			Pemerintahan Daerah													
5	02	01	1.08	000												
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5.980.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
5	02	01	1.08	000												
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	68.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
5	02	01	1.08	000												
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	17.500.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
5	02	01	1.09													
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					90.000.000,00			-	-	-	0,00		
			Pemerintahan Daerah													
5	02	01	1.09	000												
			Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
5	02	01	1.09	000												
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	60.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
5	02	01	1.09	000												
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	27.500.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
284	5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	0,00		
	5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 02 1.03 001 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
285	5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	7.000.000,00			-	-	-	0,00		
	5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	7.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 03 1.01 000 7	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
286	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	673.600.000,00			-	-	-	0,00		
	5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	673.600.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 04 1.01 001 0	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	298.600.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
5	02 04 1.01 001 2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Laporan	375.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD NANGA BULIK	
			UPTPPD SUKAMARA												0,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													1.074.807.834,00	
5		KEUANGAN													1.074.807.834,00	
287	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	384.727.834,00			-	-	-	0,00		
	5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	210.450.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 01 1.06 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	
5	02 01 1.06 000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	65.500.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	
5	02 01 1.06 000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	
5	02 01 1.06 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
5	02	01	1.06	000	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	33.950.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	
5	02	01	1.06	000	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	
5	02	01	1.06	000	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	70.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	
5	02	01	1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	84.277.834,00			-	-	-	0,00		
							Pemerintahan Daerah													
5	02	01	1.08	000	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	6.230.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	
5	02	01	1.08	000	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	60.547.834,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	
5	02	01	1.08	000	000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	17.500.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	
5	02	01	1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	90.000.000,00			-	-	-	0,00		
							Pemeliharaan Mebel													
5	02	01	1.09	000	000	5	Pemeliharaan Mebel													
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	
5	02	01	1.09	000	000	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	60.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	
5	02	01	1.09	000	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	27.500.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	
288	5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	10.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02	02	1.03				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	-	-	10.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02	02	1.03	001	001	0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan													
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD SUKAMARA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
289	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	5.400.000,00				-	0,00			
	5	02	03	1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	5.400.000,00				-	0,00			
	5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	5.400.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD SUKAMARA	
290	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	674.680.000,00				-	0,00			
	5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	674.680.000,00				-	0,00			
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah													
						Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	299.680.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD SUKAMARA	
	5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	375.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD SUKAMARA	
						UPTPPD PULANG PISAU													
						1.106.421.035,00													
						1.106.421.035,00													
						1.106.421.035,00													
291	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	432.821.035,00				-	0,00			
	5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	233.338.047,00				-	0,00			
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD PULANG PISAU	
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	86.413.047,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD PULANG PISAU	
	5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12.675.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD PULANG PISAU	
	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	14.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD PULANG PISAU	
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	42.410.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD PULANG PISAU	
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	69.840.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	UPTPPD PULANG PISAU	
	5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-			-	62.695.000,00				-	0,00			
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	57.250.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PULANG PISAU	
5	02 01 1.08 000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	5.445.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PULANG PISAU	
5	02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	136.787.988,00			-	-	-	0,00		
5	02 01 1.09 000 5	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	24.500.488,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PULANG PISAU	
5	02 01 1.09 000 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	112.287.500,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PULANG PISAU	
292	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	673.600.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	673.600.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 04 1.01 001 0	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	298.600.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PULANG PISAU	
5	02 04 1.01 001 2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Laporan	375.000.000,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PULANG PISAU	
X		NON URUSAN						0,00						0,00		
X	XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00						0,00		
293	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00			-	-	-	0,00		
X	XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	0,00		
X	XX 01 1.06 000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PULANG PISAU	
		UPTPPD KAPUAS						1.262.124.400,00						0,00		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.262.124.400,00						0,00		
5	02	KEUANGAN						1.262.124.400,00						0,00		
294	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	558.524.400,00			-	-	-	0,00		
5	02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	270.894.400,00			-	-	-	0,00		
5	02 01 1.06 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
5	02 01 1.06 000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
5	02 01 1.06 000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
5	02	01	1.06	000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
5	02	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	33.950.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
5	02	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
5	02	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	111.944.400,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
5	02	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-						0,00		
			Pemerintahan Daerah					170.000.000,00			-	-	-			
5	02	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
5	02	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	153.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
5	02	01	1.08	000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	12.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
5	02	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						0,00		
5	02	01	1.09	000	5	Pemeliharaan Mebel										
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
5	02	01	1.09	000	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	72.630.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
5	02	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
295	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-						0,00		
5	02	02	1.03			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-						0,00		
5	02	02	1.03	001	0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
296	5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	0,00		
	5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	0,00		
	5 02 03 1.01 000 7	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
297	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	678.600.000,00			-	-	-	0,00		
	5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	678.600.000,00			-	-	-	0,00		
	5 02 04 1.01 001 0	Pengalihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	303.600.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
5	02 04 1.01 001 2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Laporan	375.000.000,00	Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KAPUAS	
								1.223.640.074,00						0,00		
5		UPTPPD BUNTOK						1.223.640.074,00						0,00		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.223.640.074,00						0,00		
5	02	KEUANGAN						1.223.640.074,00						0,00		
298	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	537.114.274,00			-	-	-	0,00		
	5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	293.084.274,00			-	-	-	0,00		
	5 02 01 1.06 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
5	02 01 1.06 000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	122.183.810,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
5	02 01 1.06 000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	33.360.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
5	02 01 1.06 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
5	02 01 1.06 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34.166.264,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
5	02 01 1.06 000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
5	02	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	80.374.200,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
5	02	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0,00		
5	02	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								0,00		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.630.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
5	02	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								0,00		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	111.400.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
5	02	01	1.08	000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								0,00		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	17.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
5	02	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0,00		
5	02	01	1.09	000	5	Pemeliharaan Mebel								0,00		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
5	02	01	1.09	000	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								0,00		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	77.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
5	02	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								0,00		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
299	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								0,00		
5	02	02	1.03			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								0,00		
5	02	02	1.03	001	0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								0,00		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	12.900.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
300	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								0,00		
5	02	03	1.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah								0,00		
5	02	03	1.01	000	7	Pengamanan Barang Milik Daerah								0,00		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	3.625.800,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
301	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	670.000.000,00				-	0,00			
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	670.000.000,00				-	0,00			
	5	02	04	1.01	001	0	Penagihan Pajak Daerah													
							Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			4 Dokumen SSPD		295.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
	5	02	04	1.01	001	2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			4 Laporan		375.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD BUNTOK	
							UPTPPD TAMIANG LAYANG				1.149.002.459,00						0,00			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					1.149.002.459,00						0,00			
	5	02				KEUANGAN					1.149.002.459,00						0,00			
302	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	455.352.459,00				-	0,00			
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	209.759.000,00				-	0,00			
	5	02	01	1.06	000	1	Penyediaan Komponen Instalasi													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket		13.000.000,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
	5	02	01	1.06	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket		59.566.000,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
	5	02	01	1.06	000	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket		19.989.000,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
	5	02	01	1.06	000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket		8.000.000,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
	5	02	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket		33.910.000,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
	5	02	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	0,00		Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
	5	02	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan		75.294.000,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	78.113.813,00				-	0,00			
	5	02	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 Laporan		5.630.000,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
	5	02	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	54.983.813,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
5	02	01	1.08	000												
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	17.500.000,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
5	02	01	1.09					167.479.646,00			-	-	-	0,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
5	02	01	1.09	000												
			Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
5	02	01	1.09	000												
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	134.979.750,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
5	02	01	1.09	000												
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.999.896,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
303	5	02	02					15.050.000,00						0,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
5	02	02	1.03					15.050.000,00						0,00		
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah													
5	02	02	1.03	001												
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan													
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	15.050.000,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
304	5	02	03					5.000.000,00						0,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH													
5	02	03	1.01					5.000.000,00						0,00		
			Pengelolaan Barang Milik Daerah													
5	02	03	1.01	000												
			Pengamanan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
305	5	02	04					673.600.000,00						0,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
5	02	04	1.01					673.600.000,00						0,00		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah													
5	02	04	1.01	001												
			Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	298.600.000,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
5	02	04	1.01	001												
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Laporan	375.000.000,00	Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD TAMIANG LAYANG	
			UPTPPD MUARA TEWEH					1.119.545.000,00						0,00		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					1.119.545.000,00						0,00		
5	02		KEUANGAN					1.119.545.000,00						0,00		
306	5	02	01					415.945.000,00						0,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				230.315.000,00			-	-	0,00			
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					1 Paket	13.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH		
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	80.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH		
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	23.350.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH		
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	33.965.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Dokumen	0,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	93.130.000,00			-	-	0,00			
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemerintahan Daerah				4 Laporan	5.630.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	70.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH		
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	17.500.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	92.500.000,00			-	-	0,00			
5	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemerintahan Daerah				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH		
5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	60.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH	
5	02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH	
307	5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 02 1.03 0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH	
308	5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 03 1.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH	
309	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	673.600.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	673.600.000,00			-	-	-	0,00		
5	02 04 1.01 0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	298.600.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH	
5	02 04 1.01 0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Laporan	375.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD MUARA TEWEH	
			UPTPPD PURUK CAHU												0,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												1.171.275.379,00		
5	02	KEUANGAN												1.171.275.379,00		
310	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	476.675.379,00			-	-	-	0,00		
5	02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	239.974.644,00			-	-	-	0,00		
5	02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU	
5	02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	83.024.696,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU	
5	02 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	19.999.976,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Paket	8.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4 Paket	33.950.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan													
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				4 Dokumen	0,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan													
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				12 Laporan	81.999.972,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	92.273.258,00			-	-	-	0,00			
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	12.260.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Laporan	65.013.258,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	144.427.477,00			-	-	-	0,00			
5	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara													
5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1 Unit	89.427.477,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara													
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
311	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	15.000.000,00			-	-	-	0,00			
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	-	-	15.000.000,00			-	-	-	0,00			
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU	
312	5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	0,00		
	5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	0,00		
	5 02 03 1.01 000 7	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU	
313	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	673.600.000,00			-	-	-	0,00		
	5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	673.600.000,00			-	-	-	0,00		
	5 02 04 1.01 001 0	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				4 Dokumen SSPD	298.600.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU	
	5 02 04 1.01 001 2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Laporan	375.000.000,00	Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD PURUK CAHU	
								1.032.902.883,00						0,00		
	5		UPTPPD KUALA KURUN					1.032.902.883,00						0,00		
	5 02		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					1.032.902.883,00						0,00		
	5 02		KEUANGAN					1.032.902.883,00						0,00		
314	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	359.302.883,00			-	-	-	0,00		
	5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	223.417.883,00			-	-	-	0,00		
	5 02 01 1.06 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KUALA KURUN	
	5 02 01 1.06 000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.875.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KUALA KURUN	
	5 02 01 1.06 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	77.752.883,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KUALA KURUN	
	5 02 01 1.06 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	43.950.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KUALA KURUN	
	5 02 01 1.06 000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KUALA KURUN	
	5 02 01 1.06 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	11.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KUALA KURUN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					12 Laporan	69.840.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KUALA KURUN	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	-	46.800.000,00			-	-	-	0,00		
					Permerintahan Daerah														
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	46.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KUALA KURUN	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-	-	-	-	89.085.000,00			-	-	-	0,00		
					Permerintahan Daerah														
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 Unit	81.085.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KUALA KURUN	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	8.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KUALA KURUN	
315	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	673.600.000,00			-	-	-	0,00		
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah														
5	02	04	1.01		Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	673.600.000,00			-	-	-	0,00		
					0														
					Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.					4 Dokumen SSPD	298.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KUALA KURUN	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					4 Laporan	375.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	UPTPPD KUALA KURUN	
					Badan Kepegawaian Daerah						21.591.908.845,00						415.000.000,00		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						21.591.908.845,00						415.000.000,00		
5	03				KEPEGAWAIAN						21.591.908.845,00						415.000.000,00		
316	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	11.415.908.845,00			-	-	-	0,00		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						210.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		0,00		
5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.01	000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.01	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.01	000	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.01	000	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	7.182.000.000,00	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00		
5	03	01	1.02	000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	7.032.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.02	000	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.02	000	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.02	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.02	000	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	-	-	-	35.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00		
5	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	150.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00		
5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut											
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.713.908.845,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00		
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	800.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan											
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25 Laporan	758.908.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	1.050.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00		
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1.050.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.075.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diharapkan Pajaknya			100 Unit	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	700.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
317	5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	10.176.000.000,00			-		-	415.000.000,00			
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	-	-	6.640.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	415.000.000,00			
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	330.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			1 Dokumen	90.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1 Lembaga	5.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	-	-	2.800.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00			
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Laporan	750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.02	000	3	Pengelolaan Promosi ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1.900.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.03			Pengembangan Kompetensi ASN	-	201.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00		
5	03	02	1.03	000	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	101.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.03	001	3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN										
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				600 Orang	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	535.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00		
5	03	02	1.04	000	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	000	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai										
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				200 Orang	85.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	000	7	Pembinaan Disiplin ASN										
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				200 Orang	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	000	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN										
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	03	02	1.04	000	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai										
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						42.342.928.787,00						44.024.600.000,00	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						42.342.928.787,00						44.024.600.000,00	
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						42.342.928.787,00						44.024.600.000,00	
318	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	25.766.168.787,00						-	25.624.600.000,00	
5	04	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	85.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		78.000.000,00	
5	04	01	1.01	000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
5	04	01	1.01	000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	12.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.01	000	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	12.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.01	000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	12.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.01	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.01	000	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	12.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.796.491.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	9.328.000.000,00		
5	04	01	1.02	000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	8.488.491.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	9.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.02	000	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	265.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.02	000	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	18.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.02	000	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	13.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.02	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					2 Laporan	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	65.000.000,00			
5	04	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	65.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	226.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	250.000.000,00			
5	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut					2 Paket	145.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	160.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	04	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi					1 Dokumen	81.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	90.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	4.569.229.700,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	4.155.600.000,00			
5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					1 Paket	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	04	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Paket	3.021.389.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	04	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					6 Paket	593.840.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	650.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	35.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					2 Dokumen	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	35.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	575.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	600.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.06	001	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	29.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	35.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.06	001	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	400.000.000,00		
5	04	01	1.07	000	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	1.400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.888.000.000,00		
5	04	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	38.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.112.218.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.620.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.650.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	8.460.000.000,00		
5	04	01	1.09	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	245.970.818,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	260.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.09	000	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	6.050.056.134,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	6.500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	01	1.09	001	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1.396.202.335,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
319	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	16.576.760.000,00			-	18.400.000.000,00		
5	04	02	1.01			Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	-	1.490.000.000,00		Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.850.000.000,00		
5	04	02	1.01	000	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				600 Orang	1.290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.600.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	1.01	000	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	1.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	-	13.236.760.000,00		Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	14.350.000.000,00		
5	04	02	1.02	000	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional										
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	1.02	000	2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi										
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				1 Dokumen	177.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	1.02	000	4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar										
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Laporan	455.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	1.02	000	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan										
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1040 Orang	12.229.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	13.200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	350.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	04	02	1.03		Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-	-	-	-	1.850.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.200.000.000,00			
5	04	02	1.03	0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				600 Orang	1.290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.600.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	04	02	1.03	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				400 Orang	560.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	600.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
					Badan Penghubung					11.100.000.000,00						0,00			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					11.100.000.000,00						0,00			
5	07				PENGLOLAAN PENGHUBUNG					11.100.000.000,00						0,00			
320	5	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	9.850.000.000,00					-	0,00			
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	3.400.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00			
5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	3.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG		
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	100.000.000,00			-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	0,00			
5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG		
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	500.000.000,00			-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	0,00			
5	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG	
5	07	01	1.05	001												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG	
5	07	01	1.06					1.350.000.000,00			-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	0,00		
5	07	01	1.06	000												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG	
5	07	01	1.06	000												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG	
5	07	01	1.06	000												
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG	
5	07	01	1.06	000												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG	
5	07	01	1.06	000												
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG	
5	07	01	1.06	000												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG	
5	07	01	1.07					500.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00		
5	07	01	1.07	000												
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG	
5	07	01	1.07	000												
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
5	07	01	1.07	001	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG		
5	07	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	2.250.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00			
5	07	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG		
5	07	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG		
5	07	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG		
5	07	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	1.750.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00			
5	07	01	1.09	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG		
5	07	01	1.09	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG		
5	07	01	1.09	001	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG		
321	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	1.250.000.000,00			-		-	0,00			
5	07	02	1.01			Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-	-	-	1.250.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	0,00			
5	07	02	1.01	000	3	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk				0 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
5	07	02	1.01	000	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan														
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				0 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG		
X						NON URUSAN													0,00	
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													0,00	
322	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		-	0,00					-	0,00			
X	XX	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	0,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	0,00		
X	XX	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG		
						Inspektorat													39.792.510.433,00	
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													39.792.510.433,00	
6						INSPEKTORAT DAERAH													39.792.510.433,00	
323	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		-	24.444.000.000,00					-	26.818.000.000,00			
6	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	105.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	105.000.000,00		
6	01	01	1.01	000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	30.000.000,00	INSPEKTORAT		
6	01	01	1.01	000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	INSPEKTORAT		
6	01	01	1.01	000	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	INSPEKTORAT		
6	01	01	1.01	000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	INSPEKTORAT		
6	01	01	1.01	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	INSPEKTORAT		
6	01	01	1.01	000	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	18.040.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	19.300.000.000,00		
6	01 01 1.02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	17.770.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	19.000.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.02	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	270.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	300.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	23.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	23.000.000,00		
6	01 01 1.03	000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	23.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	23.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.350.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.350.000.000,00		
6	01 01 1.05	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				98 Paket	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	350.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.05	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				78 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.663.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.730.000.000,00		
6	01 01 1.06	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	35.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	60.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.06	000	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	320.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	350.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.06	000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	350.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.06	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	53.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	55.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.06	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	30.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.06	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	850.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		270.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		300.000.000,00		
6	01	01	1.07	001	0	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	270.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	300.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.628.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah		2.465.000.000,00		
6	01	01	1.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	15.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	450.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.08	000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	370.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.08	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.09					1.365.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.545.000.000,00		
6	01	01	1.09	000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							12 Unit	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	45.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.09	000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							12 Unit	435.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.09	001			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							3 Unit	888.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.000.000.000,00	INSPEKTORAT	
324	6	01	02					10.128.000.000,00						8.125.000.000,00		
6	01	02	1.01					7.323.000.000,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	4.775.000.000,00		
6	01	02	1.01	000			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
							39 Laporan	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	100.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	1.01	000			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
							72 Laporan	3.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.250.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	1.01	000			Reviu Laporan Kinerja									
							4 Laporan	98.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	125.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	1.01	000			Reviu Laporan Keuangan									
							140 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	400.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	1.01	000			Pengawasan Umum dan Teknis									
							28 Laporan	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.500.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	1.01	000			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				0 Dokumen	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	400.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 02 1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	2.805.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.350.000.000,00		
6	01 02 1.02 000 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				13 Laporan	505.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	350.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 02 1.02 000 2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	2.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.000.000.000,00	INSPEKTORAT	
325	6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			-	5.220.510.433,00						4.490.000.000,00		
6	01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	480.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	600.000.000,00		
6	01 03 1.01 000 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	600.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 03 1.01 000 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-	0,00	INSPEKTORAT	
6	01 03 1.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	4.740.510.433,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	3.890.000.000,00		
6	01 03 1.02 000 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				1 Perangkat Daerah	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	30.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 03 1.02 000 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				38 Perangkat Daerah	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	360.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01 03 1.02 000 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				17 Kegiatan	2.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	1.500.000.000,00	INSPEKTORAT			
6	01	03	1.02	000 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi																
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					2 Perangkat Daerah	2.280.510.433,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	2.000.000.000,00	INSPEKTORAT			
J U M L A H																	8.799.913.521.188,00			7.308.171.165.973,03	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengukuran Kinerja (*performance measurement*) saat ini menjadi faktor kunci untuk mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Indikator Kinerja merupakan suatu ukuran kinerja untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan akhir dalam pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan terbagi menjadi 2 (dua) indikator yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah disusun menjadi sebuah instrumen untuk mengukur keberhasilan seluruh bidang urusan yang disusun dalam periode 5 (lima) tahunan perencanaan untuk mendukung misi kepala daerah dalam mewujudkan janji-janji kepala daerah terpilih.

Penentuan Indikator Kinerja tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan terakomodir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Dengan adanya perhitungan yang terukur dalam menentukan indikator kinerja diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi kepala daerah. Selain itu dibutuhkan koordinasi dan kerja keras berbagai lintas sektor baik dari kabupaten/kota maupun antar Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan. Berikut capaian dan target kinerja utama yang diukur dari berbagai aspek-aspek yang menjadi indikator pembangunan yaitu :

7.1. Indikator Kinerja Utama

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu kunci keberhasilan utama dari sebuah pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM merupakan indikator utama dalam menentukan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), Pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli). Penduduk di





Provinsi Kalimantan Tengah memiliki hak yang sama dalam memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan lebih efektif dan efisien. Berikut adalah target dan capaian IPM menurut kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

Tabel 7. 1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	2023
1	Kotawaringin Barat	74,04
2	Kotawaringin Timur	72,21
3	Kapuas	70,75
4	Barito Selatan	71,65
5	Barito Utara	71,84
6	Sukamara	69,44
7	Lamandau	71,81
8	Seruyan	68,68
9	Katingan	70,28
10	Pulang Pisau	69,60
11	Gunung Mas	72,09
12	Barito Timur	72,70
13	Murung Raya	69,42
14	Palangka Raya	81,68
	Kalimantan Tengah	72,20

Sumber: kalteng.bps.go.id

2. Indeks Modal Manusia

Sesuai dengan hasil sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah berdasarkan RPJPN 2025-2045 terdapat indikator tambahan dalam dokumen perencanaan dan indikator pengganti. Indeks Modal Manusia sendiri merupakan indikator pengganti dari Indeks Pembangunan Manusia. Proses penghitungan bagi masing-masing kabupaten/kota akan dibantu oleh BPS setempat, sedangkan untuk target tahun 2025 bagi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,54.

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik dalam wilayah administrasi pemerintahan dimana fenomena tersebut dikatakan akan selalu ada selama suatu regional berdiri. Oleh





karenanya, dalam setiap rumusan perencanaan pembangunan daerah selalu tercantum kebijakan terkait pengentasan kemiskinan sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Pemerintah dari tahun ketahun selalu mengupayakan penurunan kemiskinan, berbagai upaya dilakukan agar angka kemiskinan semakin menurun.

Tabel 7. 2
Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	2023
1	Kotawaringin Barat	4,18
2	Kotawaringin Timur	5,69
3	Kapuas	5,21
4	Barito Selatan	4,72
5	Barito Utara	5,35
6	Sukamara	3,96
7	Lamandau	3,12
8	Seruyan	7,12
9	Katingan	4,99
10	Pulang Pisau	4,58
11	Gunung Mas	5,47
12	Barito Timur	6,63
13	Murung Raya	6,44
14	Palangka Raya	3,44
	Kalimantan Tengah	5,11

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan tengah, 2024

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang digunakan maupun yang tidak digunakan di pasar kerja. Adapun TPT per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 7. 3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	2023
1	Kotawaringin Barat	4,45





No	Kabupaten/Kota	2023
2	Kotawaringin Timur	4,77
3	Kapuas	3,66
4	Barito Selatan	4,33
5	Barito Utara	4,85
6	Sukamara	5,23
7	Lamandau	3,32
8	Seruyan	3,61
9	Katingan	4,96
10	Pulang Pisau	2,07
11	Gunung Mas	3,24
12	Barito Timur	3,37
13	Murung Raya	2,75
14	Palangka Raya	5,13
	Kalimantan Tengah	4,10

Sumber: Provinsi Kalimantan tengah, Dalam Angka 2024

5. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Penurunan intensitas emisi GRK sendiri merupakan indikator utama baru berdasarkan hasil penyelarasan dengan nasional. Untuk penghitungan bagi kabupaten/kota akan dibantu oleh BPS, sedangkan target untuk Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2025 adalah 76,00.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Melalui capaian ekonomi di Tahun 2023 ini diharapkan dapat sebagai pertimbangan dalam menentukan Target Kinerja Utama pada Tahun 2025.

Tabel 7. 4

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	2023
1	Kotawaringin Barat	6,10
2	Kotawaringin Timur	1,81
3	Kapuas	5,71
4	Barito Selatan	3,27
5	Barito Utara	5,49
6	Sukamara	5,64
7	Lamandau	1,59
8	Seruyan	4,55





No	Kabupaten/Kota	2023
9	Katingan	5,98
10	Pulang Pisau	4,84
11	Gunung Mas	4,25
12	Barito Timur	3,47
13	Murung Raya	5,46
14	Palangka Raya	6,57
	Kalimantan Tengah	4,14

Sumber: kalteng.bps.go.id 2024

Selain itu untuk mendukung kinerja Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama antara lain sebagai berikut :

Tabel 7. 5
Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja	
		2023	2024	2025 berdasarkan kesepakatan forum pemutakhiran indicator Makro Daerah
1	2	3	4	5
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,14	5,80	5,60
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,10	3,90	3,32-3,91
3	Tingkat Kemiskinan	5,11	4,66	4,11-4,61
4	Rasio Gini	0,317	0,316	0,311-0,315
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,73	73,42	-
6	Indeks Modal manusia	-	-	0,54
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	-	76,00





TABEL 7.6

INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKRENBANG 2024

No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%		80.50	90	90	90	70 / %	90 / %
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%		11	1.47	2	2	0 / %	2 / %
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%		99.60	75.89	80	95.60	95 / %	99.6 / %
4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%		98	52,41	80	98	75.80 / %	98 / %
5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%		47	51	42	45	66 / %	45 / %
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	%		93.10	92,82	60	93.10	60 / %	93.1 / %





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
7.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%		71	76.57	65	71	60.80 / %	71 / %
8.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	%		40		38	40	39 / %	40 / %
9.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%		95	111.57	100	100	100 / %	100 / %
10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai		70.34	67.01	69.38	72.03	67.18 / Nilai	72.03 / Nilai
11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase		20	11.52	2.25	2.25	7 / Persentase	7 / Persentase





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase		4	-	6.00	-	4 / Persentase	4 / Persentase
13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatkan literasi digital dan kemampuan digital mulai dari level pengguna hingga inovator secara menyeluruh	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%		20		1		2 / %	15 / %
14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%		74		85	86	74 / %	86 / %
15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%		100	86	90	95	90 / %	100 / %
16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Persentase		75	-	5,33 (4 UK)	-	4 / Persentase	4 / Persentase





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%		100		100		100 / %	100 / %
18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%		85		80	85	85 / %	85 / %
19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%		100	2	57	100	100 / %	80 / %
20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%		90	100	100	100	100 / %	100 / %
21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase		2.90	69.88	9.99	9.99	4 / Persentase	0 / Persentase



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%		50				21 / %	50 / %
23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%		7.86	-14.37	5.50	5.75	8 / %	6 / %
24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	meningkatnya perlindungan konsumen di daerah	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%		92	82.61	100	100	100 / %	92 / %
25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%		6.62	5.87	6.10	6.15	6.10 / %	6.2 / %
26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%		18.15	15.49	16.20	16.30	16.20 / %	16.30 / %
27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang		21.21	0.062	0.078	0.079	82000 / Orang	0.079 / Orang
28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%		75	87,15	75	78	80 / %	78 / %
29.				Indeks		91.95	89.2	89.11	89.13	89.11 / Nilai	89.5 / Indeks





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Indeks Pembangunan Gender (IPG)								
30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi	%		100	93.38	95.58	98.75	100 / %	99.54 / %
31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%		23	13.49	15	18	15 / %	17 / %
32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks		65.03	59,56	63.68	67.55	63.68 / Nilai	65.68 / Indeks
33.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang		2100000	276158	250000	280000	78000 / Orang	280000 / Orang
34.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Index		57.50	40.15	30.30	35.00	30.30 / Index	30.30 / Index





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
35.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%		71.63	26	27	27	37.73 / %	75.86 / %
36.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%		8.6	7	7,3	7,5	17.22 / %	11.12 / %
37.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%		1.67	0,7	0,7	0,7	1.8 / %	2.29 / %
38.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%		19.91	35	35	35	35 / %	14.18 / %
39.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%		65.50	15	15	15	15 / %	15.00 / %
40.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Pemajuan Kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%		0.66	0,002	0,002	0,002	41.74 / %	35.53 / %
41.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%		0.3	0,00025	0,00035	0,00040	0.4 / %	0.19 / %
42.				Rp		882				4.2 / Rp	2.94 / Rp





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)				0.80 Rp Triliun (PMDN)	0.85 Rp Triliun (PMDN)	0.90 Rp Triliun (PMDN)		
43.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai		244.79	0.95	1.00	1.05	1.3 / Nilai	1.15 / Nilai
44.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index		46.10	46.99	49.11	49.15	49.11 / Index	43.94 / Index
45.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp		134700000000	14150000000	15000000000	15000000000	15000000000 / Rp	15000000000 / Rp
46.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks		61	54.25	64.55	64.55	64.55 / Indeks	64.55 / Indeks
47.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		18	19,51	18	16	18 / Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	35 / Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun
48.				Nilai		59	56.34	57.06	57.77	55.53 / Nilai	57.77 / Nilai





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional								
49.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%		100	66.32	100	100	100 / %	100 / %
50.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai		66	67.01	68.22	70.65	67.16 / Nilai	70.65 / Nilai
51.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai		55	55.83	56.57	57.30	54.44 / Nilai	57.30 / Nilai
52.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai		68	66.29	67.97	69.97	67.70 / Nilai	69.97 / Nilai
53.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai		72	60.14	68.76	69.26	71.65 / Nilai	69.26 / Nilai





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
54.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai		64	56.86	61.47	62.97	67.72 / Nilai	62.97 / Nilai
55.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai		55	53.33	64.49	64.99	46.88 / Nilai	64.99 / Nilai
56.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai		63.67	60.41	63.27	65.95	64.86 / Nilai	65.95 / Nilai
57.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai		58	55.56	57.77	61.71	58.98 / Nilai	61.71 / Nilai
58.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%		90	88.72	94	94.61	94 / %	94.61 / %
59.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%		82	68.37	76.90	77.51	76.90 / %	77.51 / %
60.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim keamanan SMA	Nilai		77	72.26	81.20	83.20	87.33 / Nilai	83.20 / Nilai





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
61.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklm keamanan SMK	Nilai		74	70.97	80.70	81.20	85.22 / Nilai	81.20 / Nilai
62.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklm keamanan SDLB	Nilai		78	74.55	83.83	84.33	83.64 / Nilai	84.33 / Nilai
63.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklm keamanan SMPLB	Nilai		77	70.89	81.34	82.84	86.16 / Nilai	82.84 / Nilai
64.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklm keamanan SMALB	Nilai		76	72.06	85.28	86.28	81.07 / Nilai	86.28 / Nilai
65.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklm kebinekaan SMA	Nilai		82	74.65	76.09	77.52	92.60 / Nilai	77.52 / Nilai
66.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklm kebinekaan SMK	Nilai		77	72.86	74.12	75.37	93.32 / Nilai	75.37 / Nilai
67.				Nilai		75	68.76	72.63	73.63	89.80 / Nilai	73.63 / Nilai





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklm kebinekaan SDLB								
68.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklm kebinekaan SMPLB	Nilai		71	66.39	69.04	72.65	79.76 / Nilai	72.65 / Nilai
69.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklm kebinekaan SMALB	Nilai		70	68.10	68.61	70.27	91.96 / Nilai	70.27 / Nilai
70.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklm Inklusivitas SMA	Nilai		63	57.96	62.19	64.95	83.25 / Nilai	64.95 / Nilai
71.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklm Inklusivitas SMK	Nilai		58.83	57.05	59.22	61.24	80.86 / Nilai	61.24 / Nilai
72.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklm Inklusivitas SDLB	Nilai		61	54.14	62.40	64.90	78.70 / Nilai	64.90 / Nilai
73.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklm inklusivitas SMPLB	Nilai		70.20	69.67	70.71	71.75	93.36 / Nilai	71.75 / Nilai





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
74.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim inklusivitas SMALB	Nilai		68	66.70	67.23	70.09	79.59 / Nilai	70.09 / Nilai
75.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%		100	100	100	100	100 / %	100 / %
76.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan		125000000	2777100	1800000	1800000	1800000 / Perjalanan	2777100 / Perjalanan
77.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang		6648453	582683	585000	590000	43156 / Orang	139200 / Orang
78.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang		55000	1140	3000	3500	2750 / Orang	3500 / Orang
79.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%		75	87,15	88	89	400 / Orang	89 / %





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
80.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%		70	36	39,95	40	250 / Orang	70 / %
81.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita		2.1	2.29	2.00	1.96	2.00 / Rata-rata Anak per Wanita	2.25 / Rata-rata Anak per Wanita
82.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%		63.41	74.38	74.26	74.76	74.26 / %	66.2 / %
83.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%		7.1	8.58	5.01	5.01	5 / %	8 / %
84.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%		100	100	100	100	100 / %	100 / %





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
85.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%		100	100	100	100	100 / %	100 / %
86.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Pembangunan literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index		70.5	56,06	48	50	14 / Index	70 / Index
87.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai		71.5	60,58	65	65	67.3 / Nilai	65 / Nilai
88.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Ha		1000000	414702.34	425000	465000	40000 / Ha	465000 / Ha
89.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha		40000	728.3	1200	1250	1200 / Ha	1250 / Ha
90.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%		100	86.51	97.51	97.77	100 / %	100 / %
91.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terselenggaranya Bangunan Gedung yang Tertib dan Andal	Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	%		100	100	100	100	100 / %	100 / %





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
92.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%		75		86,01		87.50 / %	87 / %
93.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%		33				13.34 / %	20 / %
94.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%		28		26.01		26.01 / %	27 / %
95.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah		286339	3625	1000	1000	15000 / Bidang Tanah	10000 / Bidang Tanah
96.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga		148800	TAD	3000	3000	3100 / Kepala Keluarga	3600 / Kepala Keluarga
97.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis		106		5		2 / Materi Teknis	4 / Materi Teknis
98.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penetapan RTRW	Perda/Perkada		50		14		00 / Perda/Perkada	4 / Perda/Perkada





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
99.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perkada		89		6		3 / Perda/Perkada	4 / Perda/Perkada
100.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	%		100				/	/
101.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton		2702421	136380	140271	140313	/	140313 / Ton
102.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	Unit		3675	0.0	0.0	0.0	/	0.0 / Unit
103.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%		30	3.50	30	35	/	30 / %
104.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase		100	88	100	100	/	100 / Persentase
105.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio		0.763	0.61	0.61	0.61	/	0.61 / Rasio
106.				Indeks		0.43	0.526	0.504	0.493	/	0.493 / Indeks





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)								
107.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan)	%		85			80	/	85 / %
108.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	Desa		3000		100	100	/	50 / Desa
109.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)	%		100				/	100 / %





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
110.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan di daerah	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	Nilai		601	601	701	701	/	701 / Nilai
111.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	Ton		43877				/	/
112.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Kawasan konservasi daerah yang operasional	Ha		19500000	61.362,24	61.362,24	61.362,24	/	99453.96 / Ha
113.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	%		30				/	10 / %
114.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup		180	179.3	170	165	/	165 / Per 100.000 Kelahiran Hidup
115.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Persentase		19.64	13.54	14,00	15.00	/	1.61 / Persentase





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
116.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%)	%		100				/	/
117.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin		2.6	1.63	2.6	2.6	/	2.6 / Poin
118.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Rehabilitasi hutan mangrove	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi	Ha		16000	104	212	200	/	200 / Ha
119.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%		100	100	100	100	/	100 / %
120.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	Persentase		10.88				/	5.10 / Persentase





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
121.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah	Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	%		60				/	60 / %
122.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing	Produksi Garam	Ton		2250000				/	0 / Ton
123.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Desa	Persentase BUM Desa Maju	Persentase		8.28	0.55	0.88	1.23	/	1.23 / Persentase
124.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	%		60	22	26	32	/	60 / %
125.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Lembaga		1000	100	20	100	/	100 / Lembaga
126.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi	Orang		325				/	4 / Orang





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
			Keamanan Siber dan Sandi								
127.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase		66.93	56.49	70.98	60.00	/	64.53 / Persentase
128.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Provinsi		38	1	1	1	/	/
129.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%		20				/	40 / %
130.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	daerah		552		14	14	/	15 / daerah





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
131.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan	%		100	100	100	100	/	100 / %
132.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%		85		85	85	/	85 / %
133.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton		2000000	72,30	7,21	382	/	8047 / Ton
134.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%		100	100	100	100	/	100 / %
135.				%		100	100	100	100	/	100 / %





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana								
136.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%		99.5	92.76	99.40	99.70	/	99.5 / %
137.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%		70				/	70 / %
138.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan	Jumlah PM yang Meningkatkan Pendapatannya	Orang		100000		350	500	/	500 / Orang
139.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		19539705	136140.63	144272.92	152405,21	/	152405.21 / Ton
140.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	Ton		70520	168	169	169	/	/





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
141.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Susu	Ton		855569				/	/
142.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Terpenuhinya Data Kependudukan yang terintegrasi antar Lembaga	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen		2	2	2	2	/	2 / Dokumen
143.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L)	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	%		13.5	12.1	16	13,5	/	13.5 / %
144.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Terwujudnya Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan	%		5	3.81	4.25	4.5	/	5 / %
145.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	persentase kepatuhan berusaha	Persentase		90				/	100 / Persentase
146.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan kebakaran yang terintegrasi	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	daerah		552	10	14	14	/	15 / daerah
147.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	%		79.58	79.30	78.75	79.00	/	79 / %
148.				poin		72.94	75.17	74.75	76.34	/	76.34 / poin





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup								
149.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%		98	85	85	85	/	90 / %
150.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan di daerah	Provinsi Layak Anak (Provila)	Nilai		100	-	-	-	/	71 / Nilai
151.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	Laporan		2	1	1	1	/	2 / Laporan
152.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Telur	Ton		7446401	9500	11791	12027	/	14317 / Ton
153.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton		4966247	48696,35	54619	55796	/	55796 / Ton
154.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai		64				/	100 / Nilai





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
155.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Provinsi		38	100%	100%	100%	/	1 / Provinsi
156.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Menurunnya peristiwa konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	Provinsi		38	100%	100%	100%	/	1 / Provinsi
157.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Penurunan Emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK	%		28.15	8.65	27.3	47.87	/	47.87 / %
158.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatkan literasi digital dan kemampuan digital mulai dari level pengguna hingga inovator secara menyeluruh	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%		100				/	100 / %
159.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah	Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%		50				/	50 / %
160.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai		88.5	73.70	78	78	/	78 / Nilai





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
161.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton		2893808	16502	16504	16656	/	16656 / Ton
162.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	Orang		275				/	3 / Orang
163.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton		641207	1531	1572	1530	/	1530 / Ton
164.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%		62	42	47	52	/	62 / %
165.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lingkungan Hidup Berkualitas.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%		12.5	11.16	8		/	14 / %
166.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai		95.4	88.5	91	91.5	/	91.5 / Nilai
167.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase		100	100	100	100	/	100 / Persentase





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
		Minimal (SPM) Bidang Sosial									
168.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lingkungan Hidup Berkualitas.	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%		24				/	15 / %
169.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pempdes	Orang		4350	144	320	400	/	300 / Orang
170.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah		1650	19.11 Triliun	18.96 Triliun	18.96 Triliun	/	18.96 / triliun rupiah
171.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton		772058	236	235	235	/	/
172.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	Persentase		29	25	25	25	/	25 / Persentase
173.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	%		75	64	65	75	/	75 / %





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
		kesehatan sesuai standar									
174.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Peningkatan partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%		75.79	6.95	7.50	7.65	/	77.75 / %
175.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa		1500	72	320	400	/	400 / Desa
176.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%		50	119	70.5	80.5	/	80.5 / %
177.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%		78	69.70	69.70	78	/	78 / %
178.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Ton		17037783	41573	113162,37	116557,24	/	116557.24 / Ton





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
179.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatkan Ketahanan Air Nasional	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	m ³ /detik		5				/	0 / m ³ /detik
180.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan di daerah	Persentase ARG	%		10.0	1.3	3.60	3.70	/	3.70 / %
181.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Desa		800				/	100 / Desa
182.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase		100	100	100	100	/	100 / Persentase
183.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Keberhasilan Pengobatan TB (TBC Succes Rate)	Penemuan Kasus TBC	%		90	52.72	90	90	/	90 / %
184.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online	Perusahaan		570000	13713	13913	14113	/	14113 / Perusahaan





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
185.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatkan Ketahanan Air Nasional	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Ha		350000				/	4000 / Ha
186.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya	%		30	25	30	50	/	50 / %
187.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatkan Ketahanan Air Nasional	Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	Km		200				/	0.15 / Km
188.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton		3070000	7968	639	7965	/	7965.31 / Ton
189.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	%		67.32		25	30	/	65.09 / %
190.				Perusahaan		120	0.00	1	1	/	





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan								1 / Perusahaan
191.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	Ton		6000000	160127.81	141244.64	145481.98	/	145481.98 / Ton
192.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi	Dokumen		1		1	1	/	1 / Dokumen
193.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%		45				/	35 / %





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
194.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat	Dokumen		1	1	1	1	/	1 / Dokumen
195.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	Ha		210000			50	/	50 / Ha
196.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi	Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	daerah		552		14	14	/	15 / daerah
197.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	Ton		135448				/	/
198.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Jumlah perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani Pada Jalan Provinsi	Unit		100	0.00	0.00	0.00	/	0.00 / Unit
199.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Meningkatnya Pemenuhan Hak	Persentase anak korban kekerasan	%		95	100	90	90	/	95 / %





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	dan Perlindungan Khusus Anak	yang mendapatkan layanan komprehensif								
200.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%		72	38.29		45	/	45 / %
201.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Kedelai	Ton		334308	225	159,87	164,66	/	/
202.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang		300				/	7 / Orang
203.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatkan Ketahanan Air Nasional	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha		50000				/	0 / Ha
204.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%		100		2	1	/	1 / %
205.				Materi Teknis		60		2		/	





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RTRW								1 / Materi Teknis
206.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase		100	100	100	100	/	100 / Persentase
207.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lingkungan Hidup Berkualitas.	Persentase angka BABS di tempat terbuka	%		2.5	2.53			/	1.5 / %
208.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase		83	80	80	80	/	80 / Persentase
209.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin		0.44			0.557	/	0.557 / Poin
210.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	Indeks		40.00	33	18	18	/	35.86 / Indeks
211.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu	%		90	90	91	91.5	/	91.5 / %





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
			dan keamanan pangan								
212.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	%		100				/	/
213.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	Persentase Kota/Kabupaten yang berada pada Wilayah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)	%		100				/	100 / %
214.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi)	Provinsi		10	1	1	1	/	1 / Provinsi
215.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai		60	30	50	50	/	50 / Nilai





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
216.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase		73	75	75	75	/	75 / Persentase
217.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Ton		56046664	336315	683526	704032	/	704032 / Ton
218.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai		1.30	5.53	5.56	5.65	/	1.72 / Nilai
219.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%		70				/	70 / %
220.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	Orang		2315250	9133	13000	13000	/	20000 / Orang
221.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Jagung	Ton		22591512	42143	152294,14	156863,14	/	156863.14 / Ton





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
222.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus		120				/	0 / Kasus
223.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	Orang		250000	62	55	60	/	2500 / Orang
224.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhannya	Persentase		100	100	100	100	/	100 / Persentase
225.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Peningkatan kemandirian usaha KTH	Nilai transaksi ekonomi KTH	Rupiah/Kapita		700000000000			7137000000	/	7137000000 / Rupiah/Kapita
226.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang		7925				/	375 / Orang





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
227.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang		45300				/	1450 / Orang
228.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi		33				/	1 / Provinsi
229.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhannya	Persentase		100	100	100	100	/	100 / Persentase
230.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Provinsi		38	1	1	1	/	/
231.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	%		95	88.55	94	96	/	96 / %





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
232.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%		100	62.6	100	100	/	100 / %
233.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH		43.30	58,67	59,43	61,23	/	61.23 / Kg/KAP/TH
234.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Peningkatan kemandirian usaha KUPS	Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial	Rupiah/Kapita		1500000000000			373200000000	/	373200000000 / Rupiah/Kapita
235.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%		20				/	40 / %
236.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Rasio PDB Pariwisata	%		4.5				/	3.6 / %
237.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kebebasan sipil dan hak-hak bernegara bagi masyarakat	Indeks Kinerja Ormas	Nilai		75	54.12	65	70	/	100 / Nilai
238.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Pengentasan Kemiskinan	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu	Persentase		70	90	90	90	/	90 / Persentase





No.	Urusan	Outcome prioritas	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah 2023	Target Daerah		Kesepakatan Rencana Target Daerah	
					2024	2025		2024	2025	2024	2025
			penanggulangan kemiskinan								
239.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	Daerah		100	100	100	100	/	/





7.2. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Tabel 7.5 merupakan indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing.

Tabel 7. 7

Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Target RPJMD 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
I Pendapatan						
1.1	Persentase optimalisasi penerimaan pendapatan daerah (%)	103,55	100	100	Bappenda	
1.2	Rasio kemandirian keuangan daerah (%)	60,84	44.2	46.4	Bappenda	
1.3	Indeks kepuasan pelayanan (%)	86,04	93.1	94.5	Bappenda	
II. Kesejahteraan Sosial						
2 Pendidikan						
2.1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,76	14.7	14.8	Disdik	
2.2	Rata-rata Lama Sekolah	8,73	10.5	11	Disdik	
2.3	Angka Melek Huruf	99,03	99.84	99.85	Disdik	
3 Kesehatan						
3.1	Umur Harapan Hidup (tahun)	73,54	70.44	70.74	Dinkes (BPS)	
3.2	Persentase Balita Wasting	5,5	7.3	7.0	Dinkes (Bidang Kesmas)	
3.3	Persentase Balita Stunting (%)	12,1	16	14	Dinkes (Bidang Kesmas)	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
3.4	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	6	6.7	6.5	Dinkes (Bidang Kesmas)	
3.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	211	128	125	Dinkes (Bidang Kesmas)	
4	Ketenagakerjaan					
4.1	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	96,10	96.10		Disnakertrans	
5	Kesejahteraan Rakyat					
5.1	Jumlah Tempat Ibadah yang Dikelola	210	220	230	Biro Kesra	
5.2	Jumlah Kelembagaan Spiritual yang Dibina	95	90	95	Biro Kesra	
5.3	Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	3	13	14	Biro Kesra	
III	Seni Budaya dan Olahraga					
1	Kebudayaan					
1.1	Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (grup)	492	400	430	Disbudpar	
1.2	Jumlah pemanfaatan eseha (kali)	75	40	45	Disbudpar	
2	Pemuda Dan Olahraga					
2.1	Jumlah Klub olahraga (buah)	136	150	155	Dispora	
2.2	Jumlah eseha olahraga (unit)	4	5	6	Dispora	
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
I.	Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar					
1	Pendidikan					
1.	Pendidikan menengah					
1.1.1	Prosentase guru SMA/SMK/PK	99,71	100	100	Disdik	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
	(Pendidikan Khusus) yang berkualifikasi minimal S1/D4					
1.1.2	Prosentase guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang bersertifikasi	71,23	77.67	88.63	Disdik	
1.1.3	Persentase SMA berakreditasi minimal B (%)	69,96	81.3	90.2	Disdik	
1.1.4	Persentase SMK Berakreditasi minimal B (%)	61,15	81.4	90.6	Disdik	
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	70,36	68.67	69.17	Disdik	
1.1.6	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	88,28	86.2	87.46	Disdik	
1.1.7	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0	0.55	0.50	Disdik	
1.1.8	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	66,32	92.75	94.15	Disdik	
1.1.9	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkatagori Mahir	24,54	50 %	50.5%	Disdik	
1.1.10	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkatagori Minimal Dasar	47,52 %	90 %	95 %	Disdik	
2	Kesehatan					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja		PD Penanggung Jawab
			2023	2024	
1	2	3	4	5	9
2.1	Pelayanan esehatan bagi penduduk terdampak krisis esehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provins	81,46	100	100	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.2	Pelayanan esehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	65,57	100	100	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.3	Insidensi HIV (per 1000 pdk yg tdk terinfeksi HIV)	0,24	0.144	0.140	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.4	Insidensi TB (per 100.000 penduduk)	51	47.5	44	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.5	Eliminasi malaria (kab/kota)	12	13	14	Dinkes (Bidang P2 & Sekretariat)
2.6	Rasio distribusi tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk Per 1000 pdk	1,4	1.14	1.19	Dinkes (Bidang SDK)
2.7	Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) (%) (45/100.000)	29,3	31	32.5	Dinkes (Bidang SDK)
2.8	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga esehatan sesuai standar (9 nakes)	32,35	22.7	23.2	Dinkes (Bidang SDK)
2.9	Persentase fasilitas esehatan tingkat pertama (FKTP) terakreditasi	60	100	100	Dinkes (Bidang Yankes)





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
2.1 0	Persentase rumah sakit terakreditasi	100	100	100	Dinkes (Bidang Yankes)	
2.1 1	Cakupan kepesertaan JKN (persen)	98,38	95.4	97.4	Dinkes (Bidang Yankes)	
2.1 2	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (persen)	88,55	94	96	Dinkes (Bidang SDK)	
2.1 3	Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS)	45	50	55	Dinkes (Bidang Kesmas)	
2.1 4	Jumlah Kab/kota yang melakukan Pandu (Pelayanan Terpadu) PTM (penyakit Tidak menular) di > 80% Puskesmas	14	14	14	Dinkes (Bidang P2)	
2.1 5	Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	22	24	Dinkes (Bidang SDK)	
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Proporsi esehat jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	0,4296	0.45	0.47	DPUPR	
3.2	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	85,999	86,01	87.20	DPUPR	
3.3	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	42,31	45,35	46.72	DPUPR	
3.4	Persentase Jalan Provinsi yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	BAD	63,85	64.16	DPUPR	
3.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	86,91	80	85	DPUPR	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
3.6	Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik	77,45	77,63	77.69	DPUPR	
3.7	Rasio Jaringan Irigasi	23,85	24,89	25.38	DPUPR	
3.8	Persentase penduduk berakses air minum	77,72	100	100	DPUPR	
3.9	Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	6	9	10	DPUPR	
3.10	Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	2.287	4.000	5.000	DPUPR	
3.11	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	1.248	1.330	1.730	DPUPR	
4	Perumahan rakyat dan esehat permukiman					
4.1	Persentase Rumah layak huni (%)	54,07	70,89	71,28	Dinas Perkimtan	
4.2	Rasio rumah layak huni	1 : 7,15	1 : 5,37	1:5,35	Dinas Perkimtan	
4.3	Persentase areal esehat kumuh (%)	0,0510	0,0511	0,0510	Dinas Perkimtan	
4.4	Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani (%)	2,381	4,762	5,952	Dinas Perkimtan	
4.5	Persentase luasan permukiman kumuh di esehat perkotaan yang ditangani (%)	6,061	12.121	15,152	Dinas Perkimtan	
4.6	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	Dinas Perkimtan	
4.7	Persentase warga negara yang terkena relokasi	100	100	100	Dinas Perkimtan	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja		PD Penanggung Jawab
			2023	2024	
1	2	3	4	5	9
	akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%)				
5	Ketentraman, Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat				
5.1	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM aktif (Prosentase)	117,87	75%	75 %	Kesbangpol
5.2	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah (nilai)	79,30	76,00	76,25	Kesbangpol
5.3	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang)	1300	200	200	Kesbangpol
5.4	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (persentase kasus)	72,00%	85	90	Kesbangpol
5.5	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (Orang)	8:10000	10 : 10.000	11:10.000	SatpolPP
5.6	Jumlah Anggota Linmas yang Terlatih (Orang)	1956	75	80	Satpol PP
5.7	Penegakan Perda (kali)	6	21	23	SatpolPP
5.8	Cakupan eseha petugas Satpol PP (kali)	237	897	920	SatpolPP
5.9	Pengamanan Objek Vital dan Aset Pemerintah Provinsi (kali)	12287	2,592	2.812	SatpolPP
5.10	Pengawasan Pejabat atau Tamu VVIP (kali)	26	150	175	SatpolPP





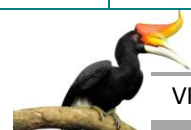
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
5.1 1	Koordinasi Kewaspadaan Dini dengan Stakeholder terkait (kegiatan)	BAD	21	26	SatpolPP	
5.1 2	Persentase Penanganan Pra Bencana	100	100	100	BPBPK	
5.1 3	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	BPBPK	
5.1 4	Persentase Penyaluran eseha dan Peralatan	100	100	100	BPBPK	
5.1 5	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100	100	100	BPBPK	
5.1 6	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	12	12	12	BPBPK	
5.1 7	Tersedianya SDM Penanggulangan Bencana yang kompeten	10	10	10	BPBPK	
5.1 8	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	100	100	100	BPBPK	
5.1 9	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	100	100	BPBPK	
6	Sosial					
6.1	Sarana eseha seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)	67	68	69	Dinsos	
6.2	PPKS yang memperoleh bantuan eseha (Orang)	1.000	1,100	1,200	Dinsos	
6.3	Jumlah penanganan kasus penyandang	100	100	100	Dinsos	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
	masalah kesejahteraan eseha (Kasus)					
6.4	Potensi dan Sumber Kesos (PSKS) yang mendapat Pembinaan	3.100	3,100	3,200	Dinsos	
6.5	Jumlah Fakir Miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KK)	150	175	175	Dinsos	
6.6	Jumlah PPKS yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar secara inklusivitas di dalam panti (orang)	300	340	380	Dinsos	
II. Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar						
1 Tenaga Kerja						
1.1	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	18,75	96.50	97.00	Disnakertrans	
1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,81	72.60	72.70	Disnakertrans	
1.3	Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	1.831	3,000	3.500	Disnakertrans	
1.4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,10	3.90	3.50	Disnakertrans	
1.5	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	72,94	81,00	82.50	Disnakertrans	
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,98	81.94	81.96	DP3AP2KB	
2.2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,64	3,60	3.70	DP3AP2KB	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
2.3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	114,3	90	92.5	DP3AP2KB	
2.4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	59,56	65,59	67.55	DP3AP2KB	
2.5	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	60	65	DP3AP2KB	
3	Pangan					
3.1	Skor Pola Harapan (PPH) Konsumsi (%)	91,2	91	91	DKP	
3.2	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	51,087	36.334	38.500	DKP	
3.3	Penguatan Cadangan Pangan (%)	100	70.5	80.5	DKP	
3.4	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	2,32	2	2	DKP	
3.5	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	90,0	90,5	91.5	DKP	
4	Pertanahan					
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	1.766	1,13	1.15	Dinas Perkimtan	
4.2	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%)	66,6	20,4	20.5	Dinas Perkimtan	
5	Lingkungan Hidup					
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,17	74.75	74.97	DLH	
5.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	39,20	78	79	DLH	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
	kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)					
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
6.1	Penerbitan Kartu Keluarga (dokumen)	8222,022	825.753	827.405	Disdukcapil	
6.2	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	97,76	99,22	99.30	Disdukcapil	
6.3	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan (%)	50,39	50	60	Disdukcapil	
6.4	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun (%)	98,93	99,40	99.70	Disdukcapil	
6.5	Persentase Penerbitan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan (%)	98,33	80	85.5	Disdukcapil	
6.6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	45,84	47	52	Disdukcapil	
6.7	Jumlah Instansi/Lembaga yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (esehat pengguna)	4	7	10	Disdukcapil	

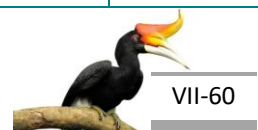




No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
6.8	Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk (%)	100	100	100	Disdukcapil	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
7.1	Jumlah Aparatur Desa Terlatih	1184	1380	1770	Dinas PMD	
7.2	Jumlah Desa Mandiri	194	70	75	Dinas PMD	
7.3	Jumlah Desa Berkembang	704	817	837	Dinas PMD	
7.4	Jumlah Desa Tertinggal	143	270	240	Dinas PMD	
7.5	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	642	750	760	Dinas PMD	
7.6	Jumlah eshat kemasyarakatan desa/kelurahan dan eshat adat yang aktif	3686	1750	1760	Dinas PMD	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	54,25	64.55	64.55	DP3AP2KB	
8.2	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2,29	2.00	1.96	DP3AP2KB	
8.3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mPCR)	74,38	74.26	74.76	DP3AP2KB	
8.4	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	8,58	5.00	5.01	DP3AP2KB	
8.5	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate / ASFR</i>)	20	18	16	DP3AP2KB	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2023	Target Kinerja		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	
1	2	3	4	5	9
9	Perhubungan				
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP)	686,186	1,765,000	1.854.000	Dishub
9.2	Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	360	430	450	Dishub
9.3	Rasio Izin Trayek	0,0000004	0,00008	0,000082	Dishub
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut /Udara/Terminal Bus	1	3	3	Dishub
9.5	Persentase Layanan Angkutan Darat (%)	63	68	69	Dishub
9.6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	80	93	96	Dishub
9.7	Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (%)	100	100	100	Dishub
9.8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,014	0.015	0,017	Dishub
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum darat (Orang/Barang)	111,704	250.000 / 248.000	260.000/ 250.000	Dishub
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	798,890 orang/8598 765 ton	2.250.000 orang / 32.370.000 ton	2.267.000 orang/ 32.375.000 ton	Dishub
10	Komunikasi dan Informatika				
10.1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	60	79	87	Diskominfoantik
10.2	Jumlah konten yang disebarluaskan melalui media cetak/ online/ elektronik	600	698	700	Diskominfoantik





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2023	Target Kinerja		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	
1	2	3	4	5	9
10.3	Jumlah website/ aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan	43	50	55	Diskominfoantik
10.4	Jumlah lokasi yang terhubung dengan <i>Fiber Optic</i> (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	43	56	58	Diskominfoantik
10.5	Jumlah informasi yang di upload pada portal PPID Provinsi Kalimantan Tengah	500	587	600	Diskominfoantik
10.6	Jumlah PD yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah (co-location/hosting)	30	35	38	Diskominfoantik
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
11.1	Persentase Kontribusi UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	39,47	13,15	14.00	Diskop,UKM
11.2	Jumlah Wirausaha (Unit)	121.458	86.508	95.158	Diskop,UKM
11.3	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	121.149	69.360	83.232	Diskop,UKM
11.4	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	69,88	9,99	9	Diskop,UKM
11.5	Persentase Rasio Kewirausahaan	8,61	8,98	6,49	Diskop,UKM
11.6	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Unit)	3.672	4.285	4.328	Diskop,UKM
11.7	Jumlah UMKM yang di esehat (Unit)	449	480	480	Diskop,UKM



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
11.8	Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USP-Kop/KJKS) (Unit)	2.594	2.609	2.634	Diskop,UKM	
11.9	Persentase koperasi aktif (%)	80,96	84,21	84,71	Diskop,UKM	
11.10	Pertumbuhan Koperasi (Unit)	140	50	50	Diskop,UKM	
11.11	Presentase koperasi yang memiliki kategori sehat/Berkualitas (%)	18,03	21,50	25,00	Diskop,UKM	
11.12	Koperasi berprestasi tingkat provinsi dan nasional (unit)	0	12	12	Diskop,UKM	
11.13	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih (Orang)	240	240	240	Diskop,UKM	
11.14	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset (%)	11,52	2,25	2,25	Diskop,UKM	
11.15	Koperasi Modern (Unit)	6	3	3	Diskop,UKM	
11.16	Persentase Kontribusi Koperasi di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	3,29	1,85	2,00	Diskop,UKM	
12	Penanaman Modal					
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	2.267	752	807	DPM dan PTSP	
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (dalam juta rupiah)	19.104.525,23	8.650.000	9.100.000	DPM dan PTSP	
12.3	PMDN (dalam Juta Rupiah)	8.779.502,70	6.055.000	6.370.000	DPM dan PTSP	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
12.4	PMA (dalam US \$ Ribu)	697.636,70	177.739,73	186.986,30	DPM dan PTSP	
12.5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Investasi (%)	32,44	4,22	5,20	DPM dan PTSP	
12.6	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan (%)	84,64	81	82	DPM dan PTSP	
12.7	Jumlah Perizinan yang Terbit Tetap Waktu	690	595	595	DPM dan PTSP	
12.8	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	6	4	4	DPM dan PTSP	
12.9	Jumlah Informasi Data Perijinan berusaha yang terkelola dengan baik	10	5	5	DPM dan PTSP	
12.10	Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi	5	2	2	DPM dan PTSP	
13	Kepemudaan dan Olahraga					
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	80,00%	87,71%	92,98%	Dispora	
13.2	Persentase Wirausaha Muda	32,00%	49,20%	56,90%	Dispora	
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	66,67%	100%	100%	Dispora	
13.4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	45,45%	50,00%	54,29%	Dispora	
13.5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	47,62%	58,14%	68,18%	Dispora	
13.6	Jumlah Atlet Berprestasi	14	15	17	Dispora	
13.7	Jumlah Prestasi Olahraga	31	18	20	Dispora	
14	Statistik					





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja		PD Penanggung Jawab
			2023	2024	
1	2	3	4	5	9
14.1	Buku "Kalimantan Tengah Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Diskominfo santi k
14.2	Buku "PDRB Kalimantan Tengah"	Ada	Ada	Ada	Diskominfo santi k
14.3	Tersedianya eseha data dan esehatan yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Diskominfo santi k
15	Persandian				
15.1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	447	560	620	Diskominfo santi k
16	Kebudayaan				
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	4	4	5	Disbudpar
16.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	743	680	710	Disbudpar
17	Perpustakaan				
17.1	Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan (eks)	37560	150,000	155.000	DPAD
17.2	Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan	9015	28.675	29.675	DPAD
17.3	Jumlah Lembaga/Perpustakaan yang diberikan Pembinaan Peprustakaan Berbasis Inklkusi Sosial	8	34	44	DPAD
17.4	Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan	83	100,00%	100,00%	DPAD
17.5	Jumlah Koleksi Bacaan yang tersedia di perpustaklaan (judul)	11300	50.000	60.000	DPAD





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
17.	Jumlah Naskah Kuno yang terlestarikan (Naskah)	0	2	3	DPAD	
18	Kearsipan					
18.	Presentase SOPD Menerapkan Arsip Secara Baku Sesuai Standar Kearsipan	97	100%	100%	DPAD	
III.	Urusan Pilihan					
1	Kelautan dan Perikanan					
1.1	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	136164,09	144.272,92	152.405,21	Dislutkan	
1.2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	160127,81	141.244,64	145.481,98	Dislutkan	
1.3	Angka Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	56,67	59,43	61,23	Dislutkan	
1.4	Jumlah kebutuhan benih ikan (ekor)	72824	74.200	76.390	Dislutkan	
1.5	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	109,9	110.75	112	Dislutkan	
1.6	Kontribusi eseha Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	2,80	3,40	3,50	Dislutkan	
1.7	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	88,89	85	90	Dislutkan	
1.8	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok)	204	52	58	Dislutkan	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
1.9	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	4	5	6	Dislutkan	
1.10	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	35528,94	35.385,52	35.697,36	Dislutkan	
2	Pertanian dan Peternakan					
2.1	Luas panen tanaman pangan					
2.1.1	Padi (Ha) :	101.093	175.949	181.227	DPTPHP	
2.1.2	Jagung (Ha)	7.500	29.077	29.950	DPTPHP	
2.1.3	Kedelai(Ha)	108,8	102,2	105,2	DPTPHP	
2.1.4	Ubi Kayu (Ha)	1.252	3.621	3.730	DPTPHP	
2.2	Produktivitas tanaman pangan					
2.2.1	Padi (ku/Ha)	3,13	4,22	4,35	DPTPHP	
2.2.2	Jagung (Kwintal/Ha)	3,75	6,07	6,25	DPTPHP	
2.2.3	Kedelai (Kwintal/Ha)	1,96	1,60	1,62	DPTPHP	
2.2.4	Ubi Kayu (Kwintal/Ha)	27,21	28,48	29,33	DPTPHP	
2.3	Produksi tanaman pangan					
2.3.1	Padi (Ton)	334.733	683.526	704.032	DPTPHP	
2.3.2	Jagung (Ton)	26.856,24	152.294,14	156.863,14	DPTPHP	
2.3.3	Kedelai (Ton)	165,39	159,87	164,66	DPTPHP	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja		PD Penanggung Jawab
			2023	2024	
1	2	3	4	5	9
2.3	Ubi Kayu (Ton)	33.494,55	113.162,37	116.557,24	DPTPHP
2.4	Luas Panen Tanaman Hortikultura				
2.4	Buah-Buahan (Ku)				
.1	a. Jeruk (Ha)	297	595	611	DPTPHP
	b. Durian (Ha)	1.334	1,070	1084	DPTPHP
	c. Rambutan (Ha)	2.696	2,775	2785	DPTPHP
	d. Nanas (Ha)	110	502	510	DPTPHP
	e. Pisang (Ha)	623	2,025	2037	DPTPHP
2.4	Sayuran (Ku)				
.2	a. Bawang Merah (Ha)	17	1,049	1056	DPTPHP
	b. Cabai Besar (Ha)	209	1,060	1068	DPTPHP
	c. Cabai Rawit (Ha)	915	2,352	2365	DPTPHP
	d. Kacang Panjang (Ha)	748	2,066	2079	DPTPHP
2.4	Tanaman Hias (Tangkai)				
.3	a. Angrek	1,531	2,163	2273	DPTPHP
	b. Mawar	865	1,137	1254	DPTPHP
2.4	Tanaman Obat (Kg)				
.4	a. Jahe	380,986	383,170	383.300	DPTPHP
	b. Kunyit	194,509	195,484	195.601	DPTPHP
2.5	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura				
2.5	Buah-Buahan (Ku)				
.1	a. Jeruk (Ton)	4.394	14,146	14.566	DPTPHP
	b. Durian (Ton)	11.365	7,812	7.970	DPTPHP
	c. Rambutan (Ton)	20.147	10,288	10.428	DPTPHP
	d. Nanas (Ton)	10.994	14,359	14.580	DPTPHP
	e. Pisang (Ton)	40.546	33,919	34.269	DPTPHP
2.5	Sayuran (Ku)				
.2	a. Bawang Merah (Ton)	72	8,047	8.120	DPTPHP
	b. Cabai Besar (Ton)	999	6,557	6.657	DPTPHP
	c. Cabai Rawit (Ton)	6.969	8,324	8.490	DPTPHP
	d. Kacang Panjang (Ton)	4.004	7,901	8.045	DPTPHP



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
2.5	Tanaman Hias (Tangkai)					
.3	a. Anggrek	1.795	17,439	17.894	DPTPHP	
	b. Mawar	4.459	7,343	8.197	DPTPHP	
2.5	Tanaman Obat (Kg)					
.4	a. Jahe	438.843	793,811	851.696	DPTPHP	
	b. Kunyit	249.778	344,837	361.644	DPTPHP	
2.	Jumlah Produktivitas Tanaman Holtikultura					
6						
2.6	Buah-Buahan (Ku/Pohon)					
.1	a. Jeruk (Ton/Ha)	14,81	19.24	19.62	DPTPHP	
	b. Durian (Ton/Ha)	8,52	6.64	6.77	DPTPHP	
	c. Rambutan (Ton/Ha)	7,47	4.82	4.92	DPTPHP	
	d. Nanas (Ton/Ha)	100,32	96.56	98.49	DPTPHP	
	e. Pisang (Ton/Ha)	65,08	20.24	20.37	DPTPHP	
2.6	Sayuran (Ku/Ha)					
.2	a. Bawang Merah (Ton/Ha)	58,91	7.21	7.35	DPTPHP	
	b. Cabai Besar (Ton/Ha)	4,78	6.27	6.40	DPTPHP	
	c. Cabai Rawit (Ton/Ha)	7,61	6.39	6.52	DPTPHP	
	d. Kacang Panjang (Ton/Ha)	5,35	2.58	2.63	DPTPHP	
2.6	Tanaman Hias (Tangkai/m2)					
.3	a. Anggrek	1,65	5.76	5.88	DPTPHP	
	b. Mawar	10,93	3.54	10.54	DPTPHP	
2.6	Tanaman Obat (Kg/m2)					
.4	a. Jahe	2,35	2.24	2.28	DPTPHP	
	b. Kunyit	1,95	1.98	2.02	DPTPHP	
2.	Populasi Ternak					
7						
2.7	Sapi Potong (Ekor)	73.936	105,459	111.882	DPTPHP	
.1						
2.7	Kerbau (Ekor)	11.588	14,490	15.224	DPTPHP	
.2						





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
2.7 .3	Kambing (Ekor)	45.957	57,911	59.359	DPTPHP	
2.7 .4	Babi (Ekor)	101.857	280,897	286.515	DPTPHP	
2.7 .5	Ayam Buras (Ekor)	2.843.942	3,414,885	3.483.182	DPTPHP	
2.7 .6	Ayam Ras Petelur (Ekor)	617.863	530,991	541.611	DPTPHP	
2.7 .7	Ayam Ras Pedaging (Ekor)	26.653.685	28,074,731	28.636.226	DPTPHP	
2.7 .8	Itik (Ekor)	256.689	356,720	363.854	DPTPHP	
2. 8	Jumlah Produksi Daging Ternak					
2.8 .1	Sapi Potong (Ton)	4.026,73	5,547	5.714	DPTPHP	
2.8 .2	Kerbau (Ton)	48,75	100	103	DPTPHP	
2.8 .3	Kambing (Ton)	33,65	260	267	DPTPHP	
2.8 .4	Babi (Ton)	1.949,35	2,082	2.124	DPTPHP	
2.8 .5	Ayam Buras (Ton)	2.543,78	2,861	2.918	DPTPHP	
2.8 .6	Ayam Ras Petelur (Ton)	411,50	45	45	DPTPHP	
2.8 .7	Ayam Ras Pedaging (Ton)	39.440,16	43,505	44.375	DPTPHP	
2.8 .8	Itik (Ton)	242,43	219	223	DPTPHP	
2.8 .1	Sapi Potong (Ton)		5,547	5.714	DPTPHP	
2. 9	Telur					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2023	Target Kinerja		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	
1	2	3	4	5	9
2.9.1	Ayam Buras (Kg)	2.417.351	2,648,018	2.700.978	DPTPHP
2.9.2	Ayam Ras Petelur (Kg)	5.573.705	7,278,975	7.424.555	DPTPHP
2.9.3	Itik (Kg)	1.509.203	1,864,346	1.901.633	DPTPHP
2.10	Peningkatan pertumbuhan eseha pertanian dalam PDRB Kalteng (%)	4,62	7.38	7,6	DPTPHP
2.11	Kontribusi sub eseha tanaman pangan terhadap PDRB (%)	1,23	1.54	1,59	DPTPHP
2.12	Kontribusi sub eseha peternakan terhadap PDRB (%)	0,48	2.65	2,73	DPTPHP
2.13	Kontribusi Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB (%)	1,46	3.19	3,28	DPTPHP
3	Pariwisata				
3.1	Jumlah wisatawan (orang)	1.803.744	870.422	896.535	Disbudpar
4	Perdagangan				
4.1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	6.72	7,40	7,45	Disdagperin
4.2	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (%)	11,86	13,70	13,80	Disdagperin
4.3	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kalteng (Juta US \$)	4916,97	1.875	1,968	Disdagperin
4.4	Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)	-14,37	5,50	5,75	Disdagperin



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja		PD Penanggung Jawab
			2023	2024	
1	2	3	4	5	9
4.5	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu (%)	6,7	5.00	4,00	Disdagperin
4.6	Pengaduan Konsumen Terkait Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti (%)	100	100.00	100.00	Disdagperin
4.7	Peningkatan Sampel Produk yang Memenuhi Standar Uji Mutu	11,68	12,12	12,72	Disdagperin
5	Kehutanan				
5.1	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (Persen)	93,40	90	100	Dishut
5.2	Luas Kawasan Hutan KPH yang difasilitasi pemanfaatannya (hektar)	39835	50,000	60.000	Dishut
5.3	Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar)	806	1,200	1.300	Dishut
5.4	Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Setiap Tahun (hektar)	90812,96	268,000	252.000	Dishut
5.5	Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar)	372991,45	425,000	465.000	Dishut
5.6	Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun (persen)	70	100	100	Dishut



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
5.7	Luas Kawasan Konservasi/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola (hektar)	58,113	58,700	58.853	Dishut	
5.8	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas gold/silver (unit)	509	260	330	Dishut	
5.9	Kontribusi eseha Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (%)	0,97	0,91	0,88	Dishut	
5.10	Jumlah Dokumen pengelolaan DAS wilayah Kalimantan Tengah (dokumen)	1	1	1	Dishut	
6	Perkebunan					
6.1	Persentase Penanganan Organisme Penyakit Tanaman (OPT)	75	80%	82%	Disbun	
6.2	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	53	55	57	Disbun	
6.3	Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang Memperoleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)	33,8	55%	60%	Disbun	
6.4	Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80	80%	82%	Disbun	
6.5	Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500	500	500	Disbun	

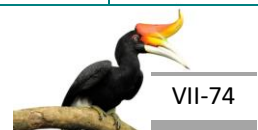


No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja		PD Penanggung Jawab
			2023	2024	
1	2	3	4	5	9
6.6	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	14,67	14,05	14,10	Disbun
6.7	Persentase Peningkatan NTP sub eseha Perkebunan	0,20	0,08	0,09	Disbun
6.8	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	2	0,16%	0,18%	Disbun
7	Perindustrian				
7.1	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan (%)	15,49	16,20	16,30	Disdagperin
7.2	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	6,10	6,10	6,15	Disdagperin
8	Ketransmigrasian				
8.1	Jumlah rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan	6	9	10	Disnakertrans
9	Energi Dan Sumber Daya Mineral				
9.1	Rasio Elektrifikasi (%)	93,38	95,58	97,77	DESDM
9.2	Rasio desa berlistrik (%)	86,51	97,51	98,75	DESDM
9.3	Penggunaan Energi yang bersumber dari kon Terbarukan (EBT) (%)	13	15	18	DESDM
IV. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Perencanaan Pembangunan				
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	1	Bappedalitbang





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perubahan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	1	Bappedalitbang	
2	Penelitian Dan Pengembangan					
2.1	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah (%)	100	97	98	Bappedalitbang	
3	Setda (Administrasi Pemerintahan)					
3.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	81,85	90	92	Biro Organisasi	
3.2	Nilai SAKIP	B	BB	A	Biro Organisasi	
3.3	Predikat Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	BB	Biro Organisasi	
3.4	Perda Kelembagaan Organisasi Daerah	4 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	Biro Organisasi	
3.5	Pengadaan Tepat Waktu (%)	100	75	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
3.6	Ketersediaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (%)	99,99	100	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
3.7	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kabupaten/Kot a serta pembangunan fisik prasarana se- Kalimantan Tengah	100	100%	100%	Biro Administrasi Pembangunan	
3.8	Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang	100	100%	100%	Biro Administrasi Pembangunan	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
	pembangunan daerah di Provinsi Kesehatan Tengah					
3.9	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	89,14	98%	100%	Biro Administrasi Pembangunan	
3.10	Jumlah penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (rancangan)	9	10	10	Biro Hukum	
3.11	Jumlah Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan)	63	50	50	Biro Hukum	
3.12	Jumlah penyusunan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah (rancangan)	619	750	750	Biro Hukum	
3.13	Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi (rancangan prohumda)	51	194	197	Biro Hukum	
3.14	Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	530	110	116	Biro Hukum	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
	secara refresif (produk hukum)					
3.1	Jumlah Rancangan produk hukum daerah kabupaten.kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (rancangan prohumda)	530	300	306	Biro Hukum	
3.1	Jumlah dokumen gugatan perkara hukum litigasi yang ditandatangani (perkara)	30	14	16	Biro Hukum	
3.1	Jumlah dokumen perkara non litigasi yang ditangani (kasus)	12	14	16	Biro Hukum	
3.1	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan aksi HAM (dokumen)	3	4	4	Biro Hukum	
3.1	Jumlah buku-buku himpunan produk hukum daerah (buku)	0	600	650	Biro Hukum	
3.2	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	100	86%	89%	Biro Umum	
3.2	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	100	2,20%	2,30%	Biro Umum	
3.2	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	311	155 Kali	155 Kali	Biro Umum	
3.2	Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	170	135 Kali	150 Kali	Biro Umum	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
3.2 4	Jumlah tata naskah dinas yg ditandatangani oleh pimpinan	251	230 Surat	240 Surat	Biro Umum	
3.2 5	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional	142	85 Kali	90 Kali	Biro Umum	
3.2 6	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	207	165 Kali	170 Kali	Biro Umum	
3.2 7	Jumlah dokumen perencanaan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (dokumen)	2	2 dokumen	2 dokumen	Biro Administrasi Pimpinan	
3.2 8	Jumlah pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (dokumen)	63	350 dokumen	450 dokumen	Biro Administrasi Pimpinan	
3.2 9	Jumlah pelayanan kegiatan Pimpinan (Protokol dan Humas)	484	700 Kegiatan	700 Kegiatan	Biro Administrasi Pimpinan	
4	Kepegawaian, Pendidikan Serta Pelatihan					
4.1	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	95	95%	100%	Badan Kepegawaian Daerah	
4.2	Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	77	80%	85%	Badan Kepegawaian Daerah	
4.3	Persentase ASN yang mengikuti esehatan dan pelatihan formal	100	75%	80%	Badan Kepegawaian Daerah	
4.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	51	54	54	Badan Kepegawaian Daerah	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja		PD Penanggung Jawab
			2023	2024	
1	2	3	4	5	9
4.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	3189	1013	1015	Badan Kepegawaian Daerah
4.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	6846	6400	6600	Badan Kepegawaian Daerah
4.7	Indeks Profesionalitas ASN	71,86	77.70	78,00	Badan Kepegawaian Daerah
4.8	Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	0,10	0.10%	0,10%	Badan Kepegawaian Daerah
4.9	Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	90	85%	90%	Badan Kepegawaian Daerah
4.10	Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	98	72%	90%	Badan Kepegawaian Daerah
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.1	Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	100	85%	90%	BPSDM
5.2	Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test	146	85%	90%	BPSDM
5.3	Persentase Peserta Pelatihan Jabatan	55	80%	85%	BPSDM



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja		PD Penanggung Jawab
			2023	2024	
1	2	3	4	5	9
	Fungsional Sosial Kultural yang lulus post test				
5.4	Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan diklat	33	85%	90%	BPSDM
6	Keuangan				
6.1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.2	Persentase SILPA terhadap APBD	14	6,33%	6,33%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.3	Persentase belanja esehatan (20%)	14	30,96%	30,96%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.4	Persentase belanja esehatan (10%)	9	10,03%	10,03%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	1 4 Kabupaten/ Kota	7.00%	7.00%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.6	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Penghubung				
7.1	Jumlah yang mendapat fasilitasi layanan penghubung	BAD	2200	2300	Badan Penghubung
7.2	Jumlah layanan informasi dan promosi	BAD	150	200	Badan Penghubung
8	Pengawasan				
8.1	Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
8.2	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP	WTP	Inspektorat



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja		PD Penanggung Jawab
			2023	2024	
1	2	3	4	5	9
8.3	Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat 3	Tingkat 3	Tingkat 3	Inspektorat
8.4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai				
	- BPK RI	76,39 %	70 %	75%	Inspektorat
	- ITJEN Kemendagri/Teknis Lainnya	67,61 %	70 %	75%	Inspektorat
	- Inspektorat	85,02%	80 %	85%	Inspektorat
8.5	Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan.	30,77	35 %	30%	Inspektorat
8.6	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Minimal "B"	76,31 %	80 %	85%	Inspektorat
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH					
I. Kemampuan Ekonomi					
1 Pertanian					
1.1	Nilai Tukar Petani/ NTP (%)	118,57	109.7	110,8	DPTPHP
1.2	Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Tanaman Pangan	98,85	103.1	104,1	DPTPHP
1.3	Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Hortikultura	110,14	102.9	103,9	DPTPHP
1.4	Nilai Tukar Petani / NTP (%) Sub Sektor Peternakan	103,40	107.5	108,6	DPTPHP
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja			PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	9	
2.1	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemerintahan, Fasilitas Otonomi Daerah, dan Fasilitas Kerjasama	BAD	80	90		Biro Pemerintahan dan Otda
II. Fasilitas Wilayah/Infrastuktur						
1 Penataan Ruang						
1.1	Jumlah RTR Provinsi Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	9	12	14		DPUPR
1.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kab/Kota)	14	14	14		DPUPR
1.3	Persentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang (%)	70	80.00	100,00		DPUPR
1.4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (%)	55	60.00	65,00		DPUPR
1.5	Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	60	60.00	60,00		DPUPR
2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan						
2.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	220	318	320		Biro Perekonomian
2.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	40	57	59		Biro Perekonomian





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja		PD Penanggung Jawab
			2023	2024	
1	2	3	4	5	9
2.3	Jumlah Industri dan Kelembagaan Pariwisata (buah)	2330	300	330	Disbudpar
2.4	Jumlah Obyek Wisata Unggulan (buah)	88	17	18	Disbudpar
III. Iklim Berinvestasi					
1 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat					
1.1	Angka kriminalitas	11,75	9.53	9,01	Kesbangpol
IV. Sumber Daya Manusia					
1 Ketenagakerjaan					
1.1	Jumlah peserta pelatihan yang memiliki Sertifikat Kompetensi	119	150	180	Disnakertrans



**TABEL 7.8****CAPAIAN DAN TARGET SPM PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

No	INDIKATOR	Capaian 2023	Target 2023	Target 2024	Target 2025
1	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	66,32	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	62,60	100,00	100,00	100,00
3	Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	67,01	67,48	69,38	72,03
4	Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	56,34	54,03	56,11	57,77
5	Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	67,01	66,98	68,22	70,65
6	Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	55,83	53,23	55,27	57,30
7	Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	66,29	64,88	67,97	69,97
8	Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	53,33	64,49	64,49	64,99
9	Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	60,14	68,76	68,76	69,26
10	Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	60,41	63,02	65,45	65,95
11	Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	56,86	60,97	61,97	62,97





No	INDIKATOR	Capaian 2023	Target 2023	Target 2024	Target 2025
12	Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	55,56	57,77	57,77	61,71
13	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,72	94,00	94,00	94,61
14	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	68,37	76,00	76,90	77,51
15	Indeks Iklim Keamanan SMA	72,26	79,20	81,20	83,20
16	Indeks Iklim Kebinekaan SMA	74,65	70,77	73,14	77,52
17	Indeks Inklusivitas SMA	57,96	59,19	62,19	64,95
18	Indeks Iklim Keamanan SMK	70,97	78,70	80,70	81,20
19	Indeks Iklim Kebinekaan SMK	72,86	69,02	71,42	75,37
20	Indeks Inklusivitas SMK	57,05	57,06	59,22	61,24
21	Indeks Iklim Keamanan SDLB	74,55	83,83	83,83	84,33
22	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	68,76	70,47	72,63	73,63
23	Indeks Inklusivitas SDLB	54,14	61,90	63,90	64,90
24	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	70,89	80,84	81,84	82,84
25	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	66,39	66,81	69,04	72,65
26	Indeks Inklusivitas SMPLB	69,67	63,17	66,47	71,75
27	Indeks Iklim Keamanan SMALB	72,06	83,28	85,28	86,28
28	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	68,10	66,43	68,61	70,27
29	Indeks Inklusivitas SMALB	66,70	63,87	67,23	70,09





BAB VIII PENUTUP

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan prinsip dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2025 telah dilaksanakan proses partisipatif, *Top-Down*, *Bottom-Up* melalui rangkaian kegiatan perencanaan yakni Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dihadiri oleh unsur FORKOPIMDA, akademisi, perbankan, LSM dan unsur masyarakat secara berjenjang.

RKPD Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2025 ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan provinsi maupun kabupaten/kota, selain itu RKPD dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

Penyusunan dokumen perencanaan ini tetap mengacu dan menerapkan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam penjarangan masukan pada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan maupun dalam tahapan



pengawasan/pengendalian pembangunan agar dapat mencapai tujuan akhir pembangunan yang diharapkan. Kaidah dan prinsip perencanaan yang digunakan antara lain :

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dari tingkat desa sampai tingkat provinsi.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Seluruh Perangkat Daerah/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan, yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025.
4. Setiap Perangkat Daerah/Dinas/Instansi harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2025 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN, BLN, dan sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dokumen RKPD digunakan dalam penyusunan APBD, melalui penjabaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah (hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah).
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Gubernur, melalui Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Provinsi secara berkala (3 bulan) selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2025.



8. Setiap kepala Perangkat Daerah/Dinas/Instansi pada akhir tahun 2024 wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 untuk menyusun perencanaan tahun 2025.
9. Kepala Bappedalitbang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala perangkat daerah/Dinas/Instansi dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan mengikuti kaidah dan prinsip di atas, diharapkan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik, tumbuh, transparan dan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan pembangunan menuju Kalteng Makin Berkah.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN